

2021 ANNUAL REPORT

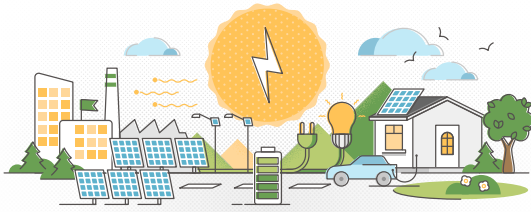


Transformasi Menuju Transisi Energi
Transformation to Energy Transition

KESINAMBUNGAN TEMA

Theme & Continuity





2021



TRANSFORMASI MENUJU TRANSISI ENERGI

TRANSFORMATION TO ENERGY TRANSITION

Dalam RUPTL 2021-2030 yang telah di sah kan, kita dapat melihat bahwa di dalam proses pengembangan ketenagalistrikan di Indonesia telah terjadi pergeseran dari penggunaan pembangkit listrik dari bahan bakar fosil menjadi Renewable Energy atau Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan komitmen dari pemerintah dalam Paris Agreement yaitu penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sesuai dengan NDC (Nationally Determined Contribution) pada tahun 2030 sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan sebesar 41% dengan dukungan internasional.

Dengan lebih besarnya porsi penambahan pembangkit EBT di dalam RUPTL 2021-2030 yang mencapai 51,6% lebih besar dari pembangkit fosil yang mencapai 48,4%, PT PLN Enjiniring berkomitmen untuk merealisasikan RUPTL 2021-2030.

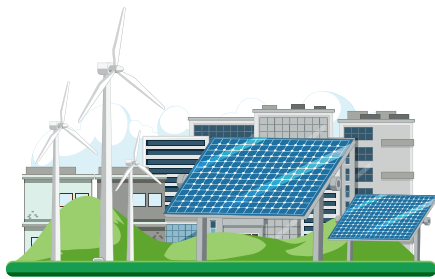
PLN Enjiniring berusaha untuk bertransformasi menuju level yang lebih baik, dapat berkontribusi positif di dalam pekerjaan kelistrikan di Indonesia khususnya proyek-proyek Energi Baru Terbarukan yang akan mengambil porsi besar didalam pembangunan kelistrikan di Indonesia.

In the RUPTL 2021-2030 which has been ratified, we can see that in the process of developing electricity in Indonesia, there has been a shift from the use of power plants from fossil fuels to Renewable Energy or New Renewable Energy (EBT) as cleaner and friendlier energy. environment. This is in line with the government's commitment in the Paris Agreement, namely reducing greenhouse gas (GHG) emissions in accordance with the NDC (Nationally Determined Contribution) in 2030 by 29% with its own capabilities and by 41% with international support.

With a larger portion of the addition of new and renewable energy plants in the 2021-2030 RUPTL which is 51.6% larger than fossil power plants which reached 48.4%, PT PLN Enjiniring is committed to realizing the 2021-2030 RUPTL.

PLN Enjiniring is trying to transform to a better level, can contribute positively to electricity work in Indonesia, especially New and Renewable Energy projects which will take up a large portion of electricity development in Indonesia.





2020



PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN LAYANAN UNTUK MENINGKATKAN KEPUASAN PELANGGAN

"INCREASING THE PRODUCTIVITY AND SERVICE TO IMPROVE CUSTOMER SATISFACTION"

Bagi hampir semua perusahaan meningkatkan kepuasan pelanggan pastinya merupakan sebuah misi. Semakin tercapainya kepuasan pelanggan, maka artinya akan semakin bagus pula pelayanan dan produk atau jasa yang ditawarkan.

Keputusan pelanggan juga mencerminkan tolok ukur keberhasilan atau kesuksesan dari suatu bisnis. Dengan terus meningkatkan kepuasan pelanggan, sebuah perusahaan atau bisnis pastinya berkesempatan untuk meraih lebih banyak pelanggan dan mencapai target yang telah di tentukan.

Untuk itu pada Tahun 2020 ini tantangan dari PT PLN Enjiniring adalah bagaimana PLNE bisa membangun kepercayaan yang lebih baik lagi kepada para pelanggan yang menjadi mitra bisnis PLNE selama ini dan kepada para pelanggan baru yang menjadi target potensial bagi plne.

PLNE harus meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan diri yang kuat di dalam bidang keilmuan yang dimiliki sebagai landasan di dalam menjalankan bisnis perusahaan. PLNE harus membangun komitmen yang baik dari sisi internal dan eksternal dan konsisten didalam menjaga relasi yang ada serta membangun reputasi perusahaan dan insan PLNE sendiri, agar tercipta relationship trust yang secara otomatis akan membentuk market trust kepada PT PLN Enjiniring.

Pelayanan yang prima dari insan-insan PLNE adalah kunci utama di dalam membentuk kepercayaan kepada mitra yang berefek kepada meningkatnya kepercayaan dan kepuasan para mitra/pelanggan terhadap service dan komitmen yang dijalankan oleh PLNE.

For almost all companies, increasing customer satisfaction is certainly a mission. The more customer satisfaction is achieved; it means that the better the services and products offered.

Customer satisfaction also reflects a measure of the success or success of a business. By continuously improving customer satisfaction, a company or business certainly has the opportunity to reach more customers and achieve the targets that have been set.

For this reason, in 2020 the challenge for PT PLN Enjiniring is how PLNE can build better customers trust who have been PLNE's business partners so far and to new customers who are potential targets for PLNE.

PLNE must increase credibility and strong self-confidence in science field owned as a foundation in running the company's business. PLNE must build a good internal and external commitment as well as consistent in maintaining existing relationships and build the reputation of the company and PLNE's individual, in order to create a relationship that will automatically form market trust to PT PLN Enjiniring.

Excellent service from PLNE personnel is the main key in creating trust in partners which has an effect on increasing partners/customers trust and satisfaction on the services and commitments carried out by PLNE.



PENINGKATAN
KOMITMEN KOMUNIKASI
DAN PERUBAHAN BUDAYA
MENUJU PLNE JUARA

ANNUAL REPORT 2019



2019



PENINGKATAN KOMITMEN KOMUNIKASI, DAN PERUBAHAN BUDAYA MENUJU PLNE JUARA

IMPROVEMENT ON COMMUNICATION COMMITMENT, AND CULTURAL CHANGES TOWARDS PLNE JUARA

Peran PLN Enjiniring bertambah besar dengan adanya arahan Pemegang Saham dimana Perseroan diminta untuk memperkuat atau fokus pada core bisnis Perseroan meliputi Basic Design dan Detailed Design. PLN Enjiniring dalam memenuhi arahan tersebut harus melakukan pengayaan dengan membangun kompetensi dan pengalaman Enjinir-Enjinir di PLN Enjiniring pada proyek-proyek Basic Design dan Detailed Design.

Kesiapan PLN Enjiniring dalam proyek-proyek Basic Design dan Detailed Design merupakan kontribusi yang cukup besar bagi proyek-proyek PLN (Persero) dan diharapkan menjadi awal yang baik selaras dengan implementasi Program SOLID PLN (Persero) dimana PLN Enjiniring berperan sebagai enabler dan bersinergi dengan Anak dan Cucu Perusahaan PLN Group.

Peran ini didukung dengan 3C (Commitment, Communication dan Change) oleh seluruh insan organisasi sehingga sinergi dan budaya perusahaan dapat terwujud dengan baik. Diharapkan melalui 3C seluruh Pegawai dapat memberikan kontribusi terbaiknya dalam memberikan produk layanan yang akurat dan berkualitas serta layanan prima untuk memenuhi persyaratan dan harapan Pemberi Kerja sehingga pencapaian target kinerja perusahaan dapat tercapai secara optimal.

The role of PLN Enjiniring is getting bigger with the direction of the Shareholders where the company asked to strengthen or focus on to the company's business core which includes Basic Design and Detailed Design. In order to fulfill that direction PLN Enjiniring must enriched its engineers with competence and experienced in a Basic Design and Detailed Design projects.

PLN Enjiniring readiness in Basic Design and Detailed Design projects is a significant contribution to PLN (Persero) projects and is expected to be a good start in line with the implementation of the PLN (Persero) SOLID Program where PLN Enjiniring acts as an enabler and synergizes with the children and grandchildren of PLN Group companies.

This role is supported by 3C (Commitment, Communication and Change) by all people in the organization so that the synergy and corporate culture can be realized properly. It is hoped that through 3C all employees can contribute their best in providing accurate and good quality service products as well as excellent service to meet the requirements and expectations of the Employer so that the achievement of company performance targets can be optimal.

DAFTAR ISI

Table of Contents

- | | |
|--|---|
| <p>2 Kesinambungan Tema
<i>Theme & Continuity</i></p> <p>8 Daftar Isi
<i>Table of Contents</i></p> <p>18 Jejak Langkah
<i>Milestone</i></p> <p>24 Kekuatan Kami
<i>Our Strength</i></p> <p>25 Proyek Unggulan
<i>Leading Project</i></p> <p>26 Kilas Kinerja 2021
<i>Flash 2021</i></p> <p>28 Ikhtisar Saham
<i>Stock Highlights</i></p> <p>28 Ikhtisar Obligasi
<i>Bond Overview</i></p> <p>29 Peristiwa PT PLN Enjiniring Tahun 2021
<i>Important Events in 2021</i></p> | <p>38 Pengawasan Terhadap Aspek SDM dan Pengembangan Karir SDM
<i>Supervision of HR Aspects and HR Career Development</i></p> <p>39 Pengawasan Terhadap Pengembangan Usaha/ Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi (APPA)
<i>Supervision of Business Development/ Subsidiaries and Affiliated Companies (APPA)</i></p> <p>39 Pengawasan Terhadap Kebijakan Mutu dan Pelayanan
<i>Supervision of Quality and Service Policy</i></p> <p>40 Pengawasan Terhadap Manajemen Risiko
<i>Supervision of Risk Management</i></p> <p>41 Pengawasan Terhadap Penyusunan Rancangan RKAP dan RJPP
<i>Supervision of the Drafting of the RKAP and RJPP</i></p> <p>42 Laporan Direksi
<i>The Board of Directors Report</i></p> <p>43 Strategi Bisnis Perusahaan
<i>Company Business Strategy</i></p> <p>43 Kinerja Keuangan Tahun 2021
<i>Financial Performance in 2021</i></p> <p>44 Kinerja Non Keuangan 2021
<i>Non Financial Performance in 2021</i></p> <p>45 Aspek Produksi Tahun 2021
<i>Aspect of Production Year 2021</i></p> <p>45 Key Performance Index (KPI)
<i>Key Performance Index (KPI)</i></p> <p>46 Kendala-kendala yang Dihadapi
<i>Obstacles Faced by PLN Enjiniring</i></p> <p>46 Penerapan Good Corporate Governance
<i>Implementation of Good Corporate Governance</i></p> <p>47 Perubahan Komposisi Direksi
<i>Change in the Composition of the Board of Directors</i></p> <p>47 Penutup
<i>Closing</i></p> |
|--|---|

Laporan Manajemen

Management Report



- 34** **Laporan Manajemen**
Management Report
- 36** **Laporan Dewan Komisaris**
The Board of Commissioners' Report
- 37** **Pengawasan Terhadap KPI Perseroan Tahun 2021**
Supervision of the Company's KPI in 2021
- 37** **Pengawasan Terhadap Kinerja Pemasaran**
Supervision of Marketing Performance



Tanggung Jawab Manajemen Atas Laporan Tahunan 2020

Management Responsibility On Annual Report 2020



- 48 **Tanggung Jawab Manajemen Atas Laporan Tahunan 2021**
Management Responsibility On Annual Report 2021
- 50 **Tanggung Jawab Manajemen Atas Laporan Tahunan 2021**
Management Responsibility On Annual Report 2021
- 51 **Tanggung Jawab Manajemen Atas Laporan Tahunan 2021**
Management Responsibility On Annual Report 2021



Profil Perusahaan

Company Profile



- 53 **Profil Perusahaan**
The Company Profile
- 54 **Profil Perusahaan**
Company Profile
- 54 **Identitas Perusahaan**
Company Identity
- 55 **Riwayat Singkat**
Brief History
- 55 **Bidang Usaha**
Line of Business
- 57 **Kegiatan usaha yang dijalankan**
Business Activities Undertaken
- 57 **Produk/Jasa yang Dihasilkan**
Products / services produced
- 58 **Jasa Enjiniring Terintegrasi**
Integrated Engineering Services
- 58 **Jasa lainnya**
Other Services
- 60 **Peta Lokasi Proyek**
Project Location Map
- 62 **Struktur Organisasi**
Organization Structure
- 63 **Visi, Misi dan Budaya Perusahaan**
Vision, Mission and Company Culture
- 63 **Visi**
Vision
- 63 **Misi**
Mission
- 63 **Tata Nilai Perusahaan**
The Company's Culture
- 66 **Profil Dewan Komisaris**
Profile of the Board of Commissioners
- 71 **Profil Direksi**
Profile of the Board of Directors
- 75 **Profil Pejabat Eksekutif**
Profile of Executive Officers
- 76 **Struktur Korporasi**
Corporate Structure
- 76 **Kronologi Pencatatan Saham**
Chronology of Registered Shares
- 76 **Kronologi Pencatatan Efek Lainnya**
Chronology of Other Securities Registers
- 77 **Daftar Entitas Anak dan/Entitas Asosiasi**
List of Subsidiary Companies and/or Associated Entities
- 78 **Profil Anak Perusahaan**
Table of Subsidiaries and Associations
- 80 **Profil Perusahaan Asosiasi**
Associated Company Profile
- 88 **Lembaga Profesi Penunjang**
Supporting Professional Agencies

- 89 **Penghargaan dan Sertifikasi**
Award and Certification
- 91 **Nama dan Alamat Kantor Induk, Perwakilan dan Proyek**
Name and Address of Head Office, Representative Office and Project Office

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis



- 93 **Analisis dan Pembahasan Manajemen**
Management Discussion and Analysis
- 94 **Posisi PLN Enjiniring di Industri Kelistrikan**
PLN Enjiniring Position in the Electrical Industry
- 95 **Tinjauan Operasional**
Operational Review
- 97 **Strategi Perusahaan**
Company Strategy
- 104 **Kinerja Operasi Per Segmen Usaha**
Operating Performance Per Business Segment
- 104 **Pelanggan PT PLN Enjiniring**
PT PLN Enjiniring Customers
- 110 **Kinerja Operasi Bidang**
Field Operation Performance
- 110 **Realisasi Pencapaian Kinerja**
Realized Performance Achievements
- 110 **Realisasi Pencapaian Pekerjaan**
Realized Job Achievement
- 111 **Realisasi Pencapaian Kinerja**
Realized Performance Achievements

- 112 **Realisasi Pencapaian Pekerjaan**
Realized Job Achievement
- 113 **Realisasi Pencapaian Kinerja**
Realized Performance Achievements
- 114 **Realisasi Pencapaian Pekerjaan**
Realized Job Achievement
- 114 **CNG Plant Bangkanai**
CNG Plant Bangkanai
- 116 **Pendapatan**
Income
- 118 **Performance CNG Plant**
Performance CNG Plant
- 119 **Jasa Lainnya**
Other Services
- 122 **Aspek Pemasaran**
Marketing Aspects
- 122 **Strategi Pemasaran**
Marketing Aspects
- 122 **Strategi Pemasaran Pelanggan Internal dan Eksternal**
Internal and External Customer Marketing Strategy
- 125 **Pangsa Pasar**
Market Share
- 126 **Prospek Usaha**
Business Prospect
- 129 **Strategi Pengembangan Usaha**
Business Development Strategy
- 133 **Rencana Investasi Bisnis Baru**
The New Business Investment Plan
- 133 **Tinjauan Keuangan**
Financial Review
- 134 **Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian**
Consolidated Financial Position Statements
- 135 **Posisi Keuangan Konsolidasian**
Consolidated Financial Position
- 140 **Laporan Laba (Rugi) Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian**
Consolidated Statements of Income (Loss) and Other Comprehensive Income
- 142 **Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian**
Consolidated Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

- 145 Pos Keuangan dan Lain-Lain Bersih**
Net Financial Position and Other
- 146 Laporan Arus Kas Konsolidasian**
Consolidated Cash Flows Statements
- 146 Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian**
Consolidated Profit (Loss) and Other Comprehensive Income
- 148 Tingkat Kesehatan Perusahaan**
Company Health Level
- 149 Rasio Keuangan**
Financial Ratios
- 151 Struktur Modal**
Capital Structure
- 153 Perbandingan Target dan Realisasi**
Comparison of Targets and Realization
- 155 Proyeksi Tahun 2021**
Projection of 2020
- 155 Informasi Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan**
Material Information that Occurs after the Date of the Accountant's Report
- 155 Kebijakan Deviden**
Dividend Policy
- 155 Program Kepemilikan Saham Oleh Manajemen Dan/Atau Karyawan**
Share Ownership Program By Management And / Or Employees
- 156 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum**
Realization of the Use of Funds from Public Offering
- 157 Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi atau Restrukturisasi Utang/Modal**
Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Business Combinations, Acquisitions or Debt / Capital Restructuring
- 159 Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan Dan/Atau Transaksi Dengan Pihak Berelasi**
Material Transaction Information Containing Conflicts of Interest and / or Transactions with Related Parties

- 160 Transaksi Pihak Berelasi**
Related Party Transactions
- 164 Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan**
Amendments to the Law and Regulations which have a Significant Effect on the Company
- 164 Perubahan Kebijakan Akuntansi**
Changes in Accounting Policies



- 169 Sumber Daya Manusia**
Human Resources
- 170 Sumber Daya Manusia**
Human Resources
- 171 Organisasi Pengelola Sumber Daya Manusia**
Human Resource Management Organization
- 172 Profil Vice President SDM Dan Umum**
Vice President of HR and General Profile
- 172 Fungsi dan Ruang Lingkup Tugas Bidang SDM & Umum**
Functions and Scope of Duty in the Sector of Human Resources & General Affairs
- 173 Kebijakan Rekrutmen Sumber Daya Manusia**
Human Resources Recruitment Policy
- 174 Pengembangan Sumber Daya Manusia**
Development Of Human Resources
- 183 Biaya Pengembangan Kompetensi Karyawan**
Employee Competency Development Costs
- 184 Rencana Pelatihan dan Sertifikasi Tahun 2021**
Training and Certification Planning 2021

- 201 **Employee Engagement**
Employee Engagement
- 201 **Manajemen Kinerja**
Performance Management
- 203 **Kebijakan Penghargaan Kepada Karyawan**
Employee Policy To Employees
- 204 **Fasilitas Kesehatan**
Health Facilities
- 205 **Program Pensiun**
Retirement Program
- 206 **Pengelolaan Hubungan Industrial**
Management Of Industrial Relations
- 208 **Survei Budaya**
Cultural Survey
- 208 **Kesimpulan Hasil Survei**
Conclusion Of Survey Results
- 209 **Pembinaan Kompetensi Dan Karir**
Development Of Competency And Career
- 210 **Profil Karyawan**
Employee Profile
- 210 **Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian**
Employee Composition Based on Civil Service Status
- 213 **Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan Organisasi**
Employee Composition Based on Organization Position Levels
- 216 **Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Pendidikan**
Employee Composition Based on Education Level
- 218 **Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia**
Employee Composition by Age
- 220 **Komposisi Karyawan Berdasarkan Gender**
Employee Composition by Gender
- 222 **Biaya Tenaga Kerja**
Labor Costs
- 222 **Tingkat Turnover Pegawai**
Turnover Of Employees

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance



- 225 **Tata Kelola Perusahaan Yang Baik**
Good Corporate Governance
- 226 **Penerapan Tata Kelola Perusahaan**
Implementation of Corporate Governance
- 226 **Maksud, Tujuan dan Sasaran Penerapan Tata Kelola Perusahaan**
Purpose, Objectives and Objectives Of Corporate Governance Implementation
- 226 **Maksud Penerapan Tata Kelola Perusahaan**
Purpose of Implementing Good Corporate Governance
- 227 **Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan**
Purpose of Implementation of Good Corporate Governance
- 228 **Sasaran Penerapan Tata Kelola Perusahaan**
Targets for the Implementation of Good Corporate Governance
- 228 **Dasar Hukum Penerapan Tata Kelola Perusahaan**
Legal Basis For Implementation Of Corporate Governance
- 231 **Struktur GCG**
GCG Structure
- 231 **Organ Perseroan**
Company Organs
- 234 **Penanggung Jawab Penerapan Tata Kelola Perusahaan**
Responsible For Implementation of Corporate Governance
- 234 **Tahapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan**
Stages of Corporate Governance Implementation
- 235 **Road Map Tata Kelola Perusahaan**
Corporate Governance Road Map

- 237 Penilaian (Assessment) Tahun Buku 2021**
Assessment Fiscal Year 2021
- 239 Penilaian (Assessment) Tahun Buku 2020**
Assessment Fiscal Year 2020
- 240 Sinergi dengan Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan**
Synergy with the Parent Company and Subsidiaries in the Implementation of Good Corporate Governance
- 242 Rapat Umum Pemegang Saham**
General Meeting of Shareholders
- 242 Pedoman Pelaksanaan RUPS**
GMS Implementation Guidelines
- 244 Hak Pemegang Saham**
Shareholders' Rights
- 246 Kewajiban Pemegang Saham**
Shareholders' Obligations
- 246 Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2021**
Implementation of the 2021 General Meeting of Shareholders (GMS)
- 247 Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**
Decision of the General Meeting of Shareholders (GMS)
- 247 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pengesahan RKAP 2021**
General Meeting of Shareholders (GMS) Ratification of RKAP 2021
- 247 Keputusan RUPS :**
GMS Resolutions:
- 248 RUPS LPT Tahun Buku 2020**
GMS Annual Report Fiscal Year 2020
- 249 Keputusan RUPS LPT Tahun Buku 2020**
Decision of GMS Annual Report Fiscal Year 2020
- 251 Dewan Komisaris**
Board of Commissioners
- 251 Board Manual Dewan Komisaris**
Board Manual Of The Board Of Commissioners
- 252 Komposisi Dewan Komisaris**
Composition Of The Board Of Commissioners
- 254 Komisaris Independen**
Independent Commissioner
- 254 Kriteria Penentuan Komisaris Independen**
Criteria for Determining Independent Commissioners
- 255 Pernyataan Komisaris Independen**
Statement of The Independent Commissioner
- 256 Masa Jabatan Dewan Komisaris**
The Service of The Board of Commissioners
- 256 Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**
Duties And Responsibilities of The Board of Commissioners
- 257 Wewenang Dewan Komisaris**
Authority Of The Board Of Commissioners
- 258 Kewajiban Dewan Komisaris**
Obligations Of The Board Of Commissioners
- 259 Pembagian Tugas Dewan Komisaris**
Duties Of The Board Of Commissioners
- 264 Kriteria Anggota Dewan Komisaris**
Criteria For Members Of The Board Of Commissioners
- 266 Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan**
Capability And Fitness Assessment
- 266 Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris**
Board Of Commissioners' Diversity Policy
- 269 Rangkap Jabatan Dewan Komisaris**
Dual Position Of Board Of Commissioners
- 270 Program Pengenalan Untuk Komisaris Baru**
Introduction Program For New Commissioners
- 271 Pemberhentian Dan Pengunduran Diri Dewan Komisaris**
Disclaimer And Registration Of The Board Of Commissioners
- 273 Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris**
Management Of Conflicts Of Interest Board Of Commissioners
- 274 Kepemilikan Saham Dewan Komisaris**
Share Ownership of The Board Of Commissioners
- 275 Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris**
Board of Commissioners' Remuneration Policy
- 275 Prosedur Penetapan Remunerasi**
Remuneration Determination Procedure
- 275 Fasilitas Anggota Dewan Komisaris**
Board of Commissioners' Facilities

- 279 **Rapat Dewan Komisaris**
Meeting Of The Board Of Commissioners
- 280 **Rapat Internal Dewan Komisaris**
Internal Meeting Of The Board Of Commissioners
- 284 **Rapat Dewan Komisaris Dengan Mengundang Direksi**
Meeting Of The Board Of Commissioners By Invite The Board Of Directors
- 289 **Penilaian Kinerja Dewan Komisaris**
Performance Assessment of The Board Of Commissioners
- 289 **Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris**
Board of Commissioners' Performance Assessment Criteria
- 289 **Prosedur Pelaksanaan Kinerja Dewan Komisaris**
Board of Commissioners Performance Implementation Procedures
- 289 **Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Berdasarkan KPI**
Board of Commissioners Performance Assessment Based On Kpi
- 290 **Pihak Yang Melakukan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris**
Parties That Conduct The Board of Commissioners' Performance Assessment
- 290 **Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris**
Results of The Board of Commissioners' Performance Assessment
- 291 **Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Berdasarkan Assessment Good Corporate Governance (GCG)**
Performance Assessment of The Board of Commissioners Based on Good Corporate Governance (GCG) Assessment
- 292 **Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris**
Board Of Commissioners' Performance Assessment Criteria
- 292 **Prosedur Pelaksanaan Assessment Kinerja Dewan Komisaris**
Procedure For Implementing The Board Of Commissioners Performance Assessment The GCG
- 293 **Pihak Yang Melakukan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris**
Parties That Perform The Board Of Commissioners' Performance Assessment
- 293 **Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris**
Competency Development Of The Board Of Commissioners
- 295 **Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2021**
Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners in 2021
- 296 **Remunerasi Dewan Komisaris**
Remuneration Of The Board Of Commissioners
- 296 **Organ Pendukung Dewan Komisaris**
Supporting Organs Of The Board Of Commissioners
- 297 **Tugas Sekretariat Dewan Komisaris**
Duties of the Secretariat of the Board of Commissioners
- 298 **Masa Jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris**
Term of Office of Secretary and Secretariat Staff of the Board of Commissioners
- 294 **Evaluasi Kinerja Sekretariat Dewan Komisaris**
Performance Evaluation of the Secretariat of the Board of Commissioners
- 299 **Profil Sekretaris Dewan Komisaris**
Board of Commissioners' Secretary Profile
- 299 **Komite Dewan Komisaris**
Committee of The Board of Commissioners
- 299 **Komite Audit**
Audit Committee
- 302 **Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Audit**
Appointment and Dismissal of the Audit Committee
- 303 **Tugas Komite Audit**
Audit Committee Duties
- 303 **Masa Jabatan Anggota Komite Audit**
Term of Office of Audit Committee Members
- 304 **Persyaratan Keanggotaan Komite Audit**
Audit Committee Membership Requirements
- 304 **Independensi Komite Audit**
Independence of the Audit Committee
- 305 **Komite Nominasi Dan Remunerasi**
Nomination And Remuneration Committee
- 307 **Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Nominasi dan Remunerasi**
Appointment and Dismissal of the Nomination and Remuneration Committee
- 308 **Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi**
Duties of the Nomination and Remuneration Committee

- 309 Masa Jabatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi**
Term of Office for Nomination and Remuneration Committee Members
- 310 Persyaratan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi**
Nomination and Remuneration Committee Member Requirements
- 310 Komite Manajemen Risiko Dan Gcg**
Risk Management And Gcg Committee
- 312 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko & GCG**
Risk Management & GCG Committee Duties and Responsibilities
- 313 Masa Jabatan Anggota Komite Manajemen Risiko dan GCG**
Term of Office for Risk Management and GCG Committee Members
- 313 Persyaratan Anggota Komite Manajemen Risiko dan GCG**
Risk Management and GCG Committee Member Requirements
- 314 Tata Kerja Komite**
Committee Working Procedures
- 314 Piagam Komite**
Committee Charter
- 314 Pakta Integritas**
Integrity Pact
- 314 Rencana Kerja Dan Penganggaran**
Work Plan And Budget
- 315 Rapat Komite**
Committee Meeting
- 315 Pelaporan**
Reporting
- 315 Akses dan Kerahasiaan Informasi**
Access and Confidentiality Of Information
- 316 Evaluasi Kinerja Komite**
Committee Performance Evaluation
- 317 Direksi**
Directors
- 323 Persyaratan Dan Pengangkatan Direksi**
Requirements And Appointment Of Board Of Directors
- 318 Board Manual Direksi**
Board Manual Board of Directors
- 318 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi**
Duties, Authorities And Obligations Of The Board Of Directors
- 328 Masa Jabatan, Pemberhentian Dan Pengunduran Diri Direksi**
Term Of Service, Termination And Redemption Of The Board Of Directors
- 328 Masa Jabatan**
Length Of Service
- 328 Pemberhentian Sewaktu-Waktu Anggota Direksi**
Termination Of A Member Of The Board Of Directors
- 330 Pemberhentian Sementara Anggota Direksi**
Temporary Termination Of Members Of The Board Of Directors
- 332 Pengunduran Diri**
Resignation
- 332 Pelaksana Tugas Anggota Direksi Yang Lowong**
Implementation Of Duties For Members Of The Vacant Board Of Directors
- 334 Program Orientasi Bagi Direksi Baru**
Orientation Program For New Board Of Directors
- 335 Ruang Lingkup Pekerjaan Dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi**
Scope Of Work And Responsibilities Of Each Member Of The Board Of Directors
- 335 Pembagian Tugas Direksi**
Development Of Duties Of The Board Of Directors
- 337 Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan**
Fitness Assessment
- 337 Kebijakan Keberagaman Komposisi Direksi**
Diversity Policy Composition Of The Board Of Directors
- 339 Jumlah Dan Komposisi Direksi**
Number And Composition Of The Board Of Director
- 340 Dasar Pengangkatan, Pemberhentian Dan Mulai Berlakunya Jabatan Direksi**
Basis For Appointment, Termination And Entry Into The Position Of Board Of Directors
- 341 Hubungan Afiliasi Direksi**
Board Of Directors Affiliate Relationships
- 343 Kepemilikan Saham Direksi**
Share Ownership Of The Board Of Directors

- 344** **Rangkap Jabatan Direksi**
Dual Positions Of Board Of Directors
- 344** **Pengaturan Rangkap Jabatan**
Multiple Position Arrangements
- 346** **Pengelolaan Benturan Kepentingan**
Conflict of Interest Management
- 347** **Benturan Kepentingan**
Conflict of Interest
- 348** **Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Tahun 2021**
Implementation of Duties And Responsibilities of The Board of Directors In 2021
- 348** **Rapat Direksi**
Board of Directors Meeting
- 349** **Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi**
Frequency and Attendance of Board Of Directors' Meetings
- 349** **Agenda, Tanggal Dan Persiapan Rapat Internal Direksi**
Agenda, Date And Preparation For Internal Meeting Of The Board Of Directors
- 355** **Pengembangan Kompetensi Direksi**
Board Of Directors' Competence Development
- 357** **Penilaian Kinerja Direksi**
Board Of Directors Performance Assessment
- 361** **Organ Dan Komite Di Bawah Direksi**
Organs And Committees Below The Board Of Directors
- 369** **Organ Dan Komite Di Bawah Direksi**
Organs And Committees Below The Board Of Directors
- 383** **Sistem Pengendalian Intern**
Internal Control System
- 384** **Evaluasi Sistem Pengendalian Intern**
Internal Control System Evaluation
- 384** **Kesesuaian Pengendalian Intern Dengan Kerangka COSO**
Conformity of Internal Control With COSO Framework
- 386** **Organ dan Komite Di Bawah Direksi**
Organs and Committees Below The Board Of Directors
- 386** **Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu Dan Risiko**
Procurement Unit, Quality And Risk Management
- 390** **Tugas dan tanggung jawab**
Duties and responsibilities
- 408** **Sistem Manajemen Terintegrasi**
Integrated Management System
- 408** **Sistem Manajemen Mutu**
Quality Management System
- 417** **Sistem Manajemen K3**
Health And Safety System Management
- 419** **Sistem Teknologi Informasi**
Information Technology System
- 419** **Kebijakan Teknologi Informasi**
Information Technology Policy
- 421** **Roadmap Teknologi Informasi**
Information Technology Roadmap
- 421** **Pelaksanaan Teknologi Informasi**
Information Technology Implementation
- 426** **Perkara Hukum yang Dihadapi PLN Enjiniring**
Legal Cases Faced by PLN Enjiniring
- 427** **Pedoman Perilaku**
Code of Conduct
- 427** **Tujuan Code of Conduct**
Purpose of the Code of Conduct
- 427** **Tanggung Jawab Penerapan dan Pengawasan Code of Conduct**
Responsibilities for Implementing and Overseeing the Code of Conduct
- 428** **Ruang Lingkup Code of Conduct**
Scope of the Code of Conduct
- 428** **Isi Code of Conduct**
Code of Conducts Content
- 428** **Kepatuhan Terhadap Code Of Conduct**
Code of Conduct Complianced
- 429** **Jenis Sanksi Pelanggaran Code Of Conduct**
Types of Penalty for Code Of Conduct Violation
- 431** **Jumlah Pelanggaran Kode Etik**
Number of Code of Conducts Violations
- 432** **Kebijakan Pengendalian Gratifikasi**
Gratuity Policy
- 435** **Whistleblowing System**
Whistleblowing System
- 441** **Informasi Pemegang Saham Utama Dan Pengendali**
Access to Companies Information and Data

- 441 **Akses Informasi Dan Data Perusahaan**
Information on Major and Controlling Shareholders
- 442 **Media Informasi Perusahaan**
Information Media To Company
- 442 **Website**
Website
- 443 **Media Elektronik Interaktif**
Interactive Electronic Media
- 443 **Media Sosial**
Social Media
- 443 **Media Internal**
Internal Media



- 444 **Tanggung Jawab Perusahaan**
Company Responsibilities
- 446 **Tanggung Jawab Perusahaan**
Corporate Responsibility
- 446 **Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan**
Social & Environmental Responsibility
- 453 **Corporate Social Responsibility (CSR) Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan, Dan Keselamatan Kerja**
Corporate Social Responsibility (CSR) Related to Labor, Health and Safety Work
- 453 **Ketenagakerjaan**
Employment
- 458 **Kesehatan**
Health
- 460 **Keselamatan Kerja**
Work safety

- 462 **Corporate Social Responsibility Terkait Pengembangan Sosial Dan Kemasyarakatan**
Corporate Social Responsibility Related to Social and Community Development
- 464 **Corporate Social Responsibility Terkait Tanggung Jawab Kepada Konsumen**
Corporate Social Responsibility Related To Consumer Responsibility
- 466 **Corporate Social Responsibility Terkait Tanggung Jawab Kepada Negara**
Corporate Social Responsibility Related to Responsibility to the State
- 468 **Corporate Social Responsibility Terkait Tanggung Jawab Kepada Kreditur**
Corporate Social Responsibility With Responsibility To Creditors
- 469 **Corporate Social Responsibility Terkait Tanggung Jawab Kepada Pemasok**
Corporate Social Responsibility With Responsibilities To Suppliers



- 471 **Laporan Keuangan**
Financial Report

JEJAK LANGKAH

Milestone



2002

2003

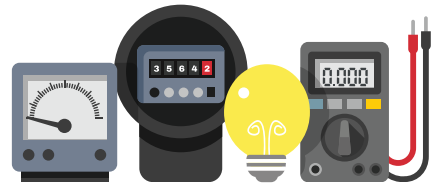
2004

- Pendirian PT PLN Enjiniring.
- *Establishment of PT PLN Enjiniring.*

- Pelaksanaan Proyek Supervisi Konstruksi PLTU Tanjung Tambalong, Kalimantan Barat.
- *Project Supervision Implementation of PLTU(Steam Plant) Construction at Tanjung Tambalong, West Kalimantan.*
- Pelaksanaan Proyek Supervisi Konstruksi I PLTGB Muara Tawar, Jawa Barat
- *Implementation of Supervision Project for PLTGB MuaraTawar Construction I, West Java*

- Pembangunan Independent Power Producer (IPP) PLTMG Prabumulih Kapasitas 2x6 MW.
- *Construction of Independent Power Producer (IPP) Prabumulih PLTMG with a capacity of 2x6 MW 2005*





- Pembangunan IPP PLTGU Musi, Palembang Kapasitas 3x4,7 MW dan 1x6 MW.
- *Construction of IPP Musi PLTGU, Palembang with a capacity of 3x4.7 MW and 1x6 MW.*
- Pembangunan IPP PLTMG Sako, Palembang Kapasitas 2x6 MW.
- *Construction of IPP Sako PLTMG, Palembang with a capacity of 2x6 MW.*



2005

- Pembangunan IPP PLTU Sarolangun, Jambi Kapasitas 2x7 MW.
- *Construction of IPP Sarolangun PLTU, Jambi with a capacity of 2x7 MW.*



2006

- Penambahan Modal Disetor dari PT PLN (Persero).
- *Paid-in capital addition from PT PLN (Persero).*



2007

2008

- Perubahan struktur organisasi berdasarkan SK Direksi No.28.001.K/010/DIR/PLNE/XI/2008.
- *Change in organizational structure based on Directors Decree No.28.001.K/010/DIR/PLNE/XI/2008.*
- Pelaksanaan Proyek Desain Enjiniring dan Supervisi Konstruksi High Voltage Direct Current (HVDC) Interkoneksi Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.
- *Implementation of Engineering Design Project and Supervision of High Voltage Direct Current (HVDC) Construction from the Interconnection of Sumatra and Java Islands.*



2009

- Pengangkatan Pegawai Organik I PLN Enjiniring.
- *Appointment of Organic Staff I of PLN Enjiniring.*
- Pelaksanaan Proyek Desain Enjiniring untuk Pembangunan Pembangkit Skala Kecil dan Tersebar di Seluruh Indonesia.
- *Implementation of Engineering Design Projects for the Construction of Scattered-Small Scale Generators throughout Indonesia.*



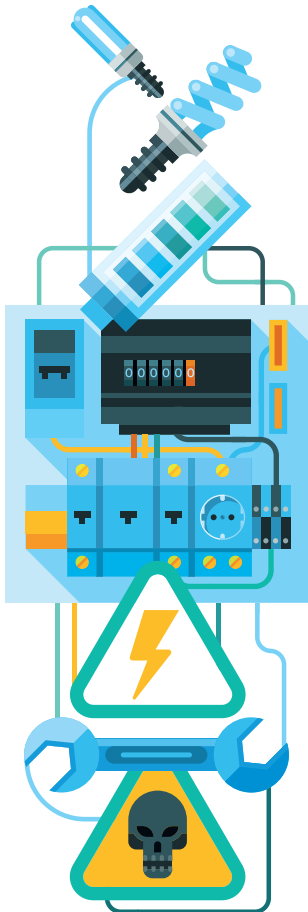
2010

- Pembayaran Dividen I ke Pemegang Saham.
- *Payment of Dividend I to Shareholders.*



2011

- Perubahan Visi dan Misi PLN Enjiniring.
- *Changes in the Vision and Mission of PLN Enjiniring.*
- Perubahan Organisasi Dari 4 (empat) Direktorat Menjadi 3 (tiga) Direktorat.
- *Organizational Change From 4 (four) Directorates to 3 (three) Directorates.*

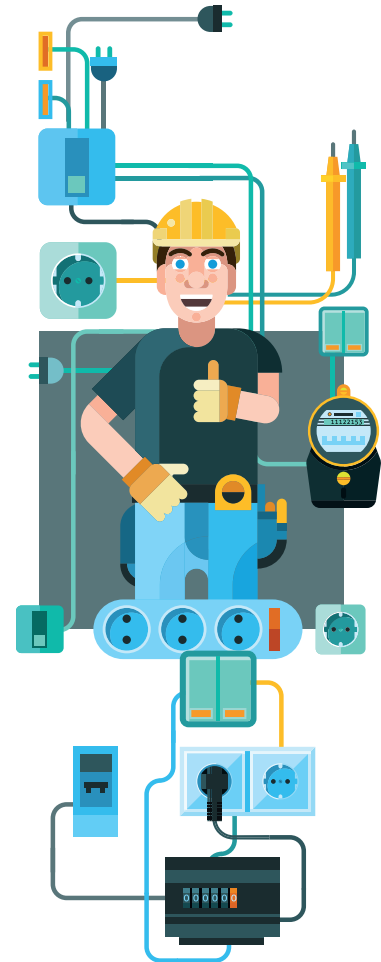


2012

- Persiapan SDM memasuki bisnis sebagai Project Integrator.
- *Preparation of HR to enter business as a Project Integrator.*
- Persiapan bidang usaha baru yang telah disahkan melalui perubahan Anggaran Dasar.
- *Preparation of new business fields that have been ratified through amendments to the Articles of Association.*
- Penunjukan PLN Enjiniring untuk pembangunan pabrik switchgear di Indonesia.
- *Appointment of PLN Enjiniring for the construction of a switchgear factory in Indonesia.*

2013

- Pembentukan Entitas Asosiasi PT Crompton Prima Switchgear Indonesia (CPSI).
- *Establishment of Association Entity of PT Crompton Prima Switchgear Indonesia (CPSI).*
- Perubahan struktur organisasi berdasarkan SK Direksi No.01.001.K/010/DIR/PLNE/VIII/2013.
- *Change in organizational structure based on Directors Decree No. 01.001.K/010/DIR/PLNE/VIII/2013.*



2014

- Penandatanganan Anggaran Dasar PT Crompton Prima Switchgear Indonesia (Entitas Asosiasi).
- *Signing of the Articles of Association of PT Crompton Prima Switchgear Indonesia (Association Entity).*
- Persetujuan Pendirian Anak Perusahaan PT Prima Power Nusantara.
- *Approval of the Establishment of a Subsidiary of PT Prima Power Nusantara.*
- Perubahan struktur organisasi berdasarkan SK Direksi No.10.001.K/010/DIR/PLNE/IX/2014
- *Changes in organizational structure based on the Directors Decree No.10.001.K/010/DIR/PLNE/IX/2014.*
- Penandatanganan kontrak pembangunan CNG Plant Bangkanai, Kalimantan Tengah.
- *Signing of the Bangkanai CNG Plant construction contract, Central Borneo.*
- Jasa Konsultansi untuk Supervisi Design dan Konstruksi PLTU Parit Baru (2x50 MW) Kalimantan Barat dan PLTA Jati Gede (2x55 MW) di Sumedang Jawa Barat.
- *Consultancy Services for Supervision of Design and Construction of Parit Baru PLTU (2x50 MW) West Borneo and Jati Gede (2x55 MW) PLTA in Sumedang, West Java.*
- Jasa Konsultansi untuk Supervisi Konstruksi dan QA/QC PLTU Pangkalan Susu 3 dan 4 (2x200 MW) di Sumatera Utara dan PLTU Takalar 2x100 MW di Sulawesi Selatan.
- *Consultancy Services for Construction Supervision and QA/QC of Pangkalan Susu PLTU 3 and 4 (2x200 MW) in North Sumatra and Takalar PLTU (2x100 MW) in South Sulawesi.*

2015

- Perjanjian Kerjasama PLN Pusat dan PLNE Penyediaan Jasa Pre-Treatment Gas dan CNG untuk keperluan Pembangkit Peaker di Bangkanai, Kalimantan Tengah.
- *Central PLN Cooperation Agreement and PLNE Provision of Gas and CNG Pre-Treatment Services for the requisite of Peaker Generators in Bangkanai, Central Borneo.*
- Ground Breaking Pabrik Air-Insulated Switchgear Tegangan Tinggi dan Tegangan Ekstra Tinggi Pertama di Indonesia yang dimiliki oleh PT Crompton Prima Switchgear Indonesia di Cikande, Banten.
- *Ground Breaking Water Plant - Insulated High Voltage Switchgear and the First Extra High Voltage in Indonesia owned by PT Crompton Prima Switchgear Indonesia at Cikande, Banten.*
- Jasa Konsultan Supporting Konstruksi Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Peaker Grati Extension 450 MW, Grati Pasuruan, Jawa Timur.
- *Consultant Services for Supporting Construction of Peaker Grati Extension 450 MW Steam Power Plant (PLTGU) Project, Grati Pasuruan, East Java.*

2016

- Pendirian anak perusahaan PT Prima Power Nusantara yang bergerak di bidang usaha dalam bidang investasi, operasi dan pemeliharaan pada sektor ketenagalistrikan dan non ketenagalistrikan, minyak dan gas serta penyediaan peralatan pendukung dalam bidang ketenagalistrikan.
- *Establishment of a subsidiary company of PT Prima Power Nusantara engaged in business in the fields of investment, operations and maintenance in the electricity and non-electricity, oil and gas sectors and the provision of supporting equipment in the electricity sector.*
- Perjanjian kerjasama jasa operasi dan pemeliharaan PLTMG Bangkanai 16x9,7MW tahap supporting antara PLNE dengan PT PLN (Persero) wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
- *Agreement on cooperation in the operation and maintenance service of Bangkanai PLTMG 16x9.7MW in the supporting stage between PLNE and PT PLN (Persero) in South Borneo and Central Borneo.*



2017

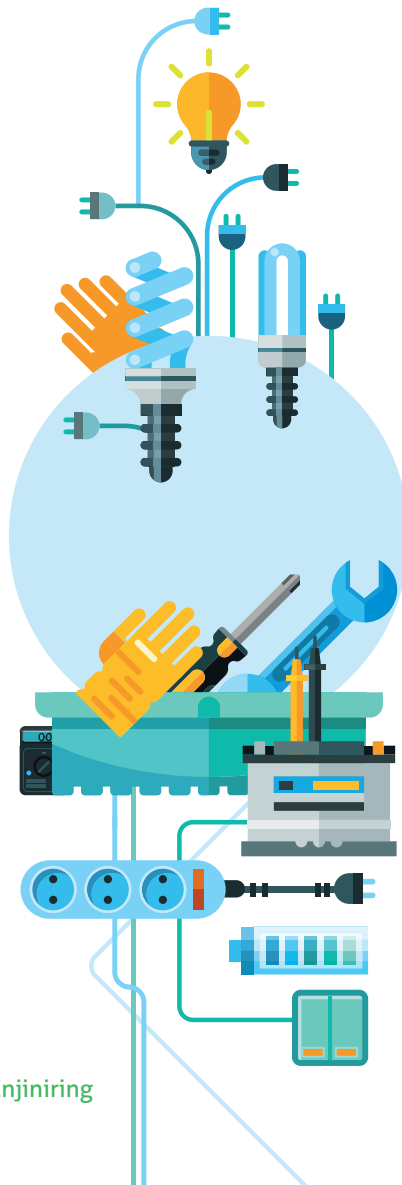
2018

2019

- Pengoperasian Proyek CNG Plant Bangkanai, Kalimantan Tengah pada Bulan Maret 2017.
- *Operation of the Bangkanai CNG Plant Project, Central Borneo in March 2017.*
- Penyelesaian pembangunan Pabrik Switchgear PT CPSI dengan realisasi progress mencapai 72% pada Bulan Desember 2017.
- *Completion of the construction of PT CPSI Switchgear Factory with progress realization reaching 72% in December 2017.*
- Pelaksanaan pekerjaan EPC bidang Transmisi dan Gardu Induk oleh PT Prima Power Nusantara (PT PPN) sebagai pengembangan usaha bisnis inti Perseroan.
- *The implementation of EPC work in the field of Transmission and Substation by PT Prima Power Nusantara (PT PPN) as the development of the Company's core business.*

- Peresmian dan Pengoperasian Pabrik Switchgear Tegangan Tinggi (TT) dan Tegangan Ekstra Tinggi (TET) pertama di Indonesia milik PT Crompton Prima Switchgear Indonesia (PT CPSI) pada Senin, 20 Agustus 2018 di Kawasan Industri Modern Cikande, Banten.
- *Inauguration and Operation of the first High Voltage (TT) and Extra High Voltage (TET) Factory in Indonesia owned by PT Crompton Prima Switchgear Indonesia (PT CPSI) on Monday, August 20, 2018 in the Cikande Modern Industrial Estate, Banten.*

- Kerjasama PT PLN Enjiniring dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur (UIW NTT) untuk Jasa Konsultasi Studi Interkoneksi dari Sistem Labuan Bajo ke Pulau Bajo
- *Agreement between PT PLN Enjiniring and PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur (UIW NTT) for Interconnection Study Consultation Services from the Labuan Bajo System to Bajo Island*
- Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT PLN Enjiniring dengan GIZ (Deutsche Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit), Fichtner dan Steag dengan bentuk kerjasama terkait Power System and Grid Impact Studies of Renewable Energy Based Power Plant dengan Fichtner, Promoting The Use of Renewable Energy Through Technical Capacity Development dengan GIZ serta Basic and Advance Design of Renewable Energy Based Power Plant dengan Steag.
- *Signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between PT PLN Enjiniring and GIZ (Deutsche Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit), Fichtner and Steag in a form of collaboration related to Power System and Grid Impact Studies of Renewable Energy Based Power Plant with Fichtner, Promoting The Use of Renewable Energy Through Technical Capacity Development with GIZ and Basic and Advance Design of Renewable Energy Based Power Plant with Steag.*



2020



- Pembangunan PLTS 400 kWp Pulau Sebira – Kepulauan Seribu
- *Construction of 400 kWp PLTS Sebira Island – Seribu Islands*
- Pembangunan pipa gas jalur PK-52 ke PLTGU Tanjung Batu
- *Construction of the PK-52 gas pipeline to PLTGU Tanjung Batu*
- Golden Flag (Bendera Emas) untuk K3 Sektor Industri Treatment Gas dan Peaker CNG Plant Bangkanai dengan hasil capaian 87,34%
- *Golden Flag for health and safety (K3) in Industry Sector for Gas Treatment and CNG Peaker Plant Bangkanai with an achievement of 87.34%*
- BUMN Branding & Marketing Award 2020, Service Development Terbaik
- *BUMN Branding & Marketing Award 2020, Best Service Development*
- Pasokan gas CNG Plant Bangkanai berkontribusi meningkatkan keandalan system kelistrikan Kalimantan Tengah (PLN KITLURKAL)
- *CNG gas from the Bangkanai Plant supply contributes to improving the reliability of the Central Kalimantan electricity system (PLN KITLURKAL)*

2021



- Penandatanganan MoU dengan Masyarakat Biomassa Indonesia (MEBI) terkait Kerjasama Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm)
- *Signing of MoU with Indonesian Biomass Society (MEBI) related to Cooperation in Biomass Power Plant (PLTBm)*
- Kerjasama PT PLN Enjiniring dengan PT Kayan Hydropower Nusantara (KHN) terkait Mentarang Induk HEP Power Evacuation System Study
- *Cooperation of PT PLN Enjiniring with PT Kayan Hydropower Nusantara (KHN) related to Mentarang Induk HEP Power Evacuation System Study*
- Kerjasama PT PLN Enjiniring dengan Thorcon International Pte.Ltd untuk Jasa Konsultasi Enjiniring Pembangkit Listrik Tenaga Thorium (PLTT) ThorCon 500 MW
- *Cooperation of PT PLN Enjiniring with Thorcon International Pte.Ltd for Consulting Services for ThorCon 500 MW Thorium Power Plant Engineering (PLTT)*
- Pekerjaan Supervisi Konstruksi GI 150 kV Timika
- *Construction Supervision of GI 150 kV Timika*
- Kerjasama PT PLN Enjiniring dengan PT PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya terkait Pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Proyek Desain Revitalisasi Sistem Kelistrikan Istana Negara
- *Cooperation between PT PLN Enjiniring and PT PLN Main Distribution Unit for Greater Jakarta related to Project Management Consulting Services Design for the Revitalization of the State Palace Electricity System*
- Pekerjaan Desain Review, QA/QC dan Supervisi Konstruksi Shunt Reactor GITET 500/150 Kv PLTU Indramayu
- *Design Review, QA/QC and Construction Supervision of the GITET 500/150 Kv Shunt Reactor PLTU Indramayu Work*

Kekuatan Kami

OUR STRENGTH

1. Merupakan satu-satunya Anak Perusahaan yang bergerak di bisnis engineering di PLN Group
2. Merupakan perusahaan engineering dengan jumlah insinyur terbanyak di Indonesia yaitu 510 orang insinyur dengan pengalaman di bisnis engineering lebih dari 15 tahun dan sudah mengerjakan lebih dari 700 kontrak proyek engineering dan supervisi konstruksi di bidang pembangkitan, transmisi dan distribusi
3. Memiliki fasilitas ruang rapat dengan klien sebanyak 22 ruang rapat, *engineering software* berlisensi, *design guideline*, dan *code and standard* yang lengkap untuk pekerjaan *basic design*
4. Memiliki *network* pendukung kegiatan engineering (SI, AMDAL, UKL/UPL, desain, dan manufaktur) baik di seluruh Indonesia maupun di lingkup internasional
5. Memiliki sertifikat ISO 9001:2018 dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
6. Memiliki produk dan layanan terintegrasi (*one stop engineering services* untuk tahap inisiasi, *development*, dan *operation*)
7. Margin yang diperoleh dari bisnis *mid stream* gas mampu meningkatkan kemampuan finansial sehingga dapat digunakan untuk melakukan pengembangan

1. *Is the only PLN Group Subsidiary whose engaged in the engineering business.*
2. *Is an engineering company with the largest engineers number in Indonesia, namely 510 engineers with more than 15 years of experience in the engineering business and has worked on more than 700 engineering project contracts and construction supervision in the fields of generation, transmission and distribution.*
3. *Has clients meeting room facilities as many as 22 meeting rooms, licensed engineering software, design guidelines, and complete code and standards for basic design work*
4. *Have a network to support engineering activities (SI, AMDAL, UKL/UPL, design, and manufacturing) both throughout Indonesia and internationally*
5. *Certified with ISO 9001:2018 certificate and Occupational Health and Safety Management System (SMK3)*
6. *Have integrated products and services (one stop engineering services for the initiation, development, and operation stages)*
7. *The margin obtained from the midstream gas business is able to increase financial capacity so that it can be used for development.*

Proyek Unggulan

Leading Project

Nama Proyek <i>Project Name</i>	Nilai Proyek <i>Project Value</i>		Durasi <i>Duration</i>	Lokasi <i>Location</i>
	IDR	USD		
Pengadaan Jasa Konsultansi Untuk Supervisi Konstruksi dan QA/QC Pembangunan PLTU Parit Baru (2x50 MW) <i>Consulting Service Providing for Construction Supervision and QA/QC of PLTU Development of Parit Baru (2x50 MW)</i>	47.027.615.909	5.369.606,51	3 Desember 2013 – 30 Juni 2021	Bengkayang, Kalimantan Barat
Jasa Konsultansi Untuk Supervisi Desain dan Konstruksi PLTA Jatigede (2x55 MW). <i>Consulting Service for Design and Construction Supervision of PLTA of Jatigede (2x55 MW)</i>	53.024.221.637,761	6.827.576	September 2014 – 31 Desember 2021	Jatigede, Jawa Barat
Jasa Konsultansi Supervisi Desain, Supervisi Konstruksi dan Quality Assurance & Quality Control (QA/QC) Pembangunan Muara Tawar Combined Cycle Power Plant Block 2,3, & 4 Add-On Project	69.620.826.533,5		06 Maret 2017 – 30 Maret 2021	Bekasi, Jawa Barat
Pekerjaan Jasa Konsultansi Project Management Team PLTA Upper Cisokan	123,377,562,124.00		17 Nov 2017 – 17 Nov 2024	Cisokan, Jawa barat
Jasa Konsultansi Update Desain, Supervisi Desain dan Supervisi Konstruksi PLTA Upper Cisokan Pumped Storage (4x260 MW)	334,985,483,326.00		16 Nov 2018 – 16 Dec 2023	Cisokan, Jawa barat
Pekerjaan Supervisi Konstruksi SUTET 500 kV New Aur Duri - Peranap (Paket SV-01)	27,500,699,957.5		13 Mei 2016 – 31 Juli 2022	Padang - Jambi
Pekerjaan Supervisi Konstruksi T/L 500 kV Pranap – Perawang	35,809,663,725		13 Mei 2016 – 31 Juli 2022	Padang - Jambi
Pekerjaan Jasa Supervisi Konstruksi Pembangunan Special Facilities (Infrastruktur Sandar dan Extension Line Bay GI 150 kV Ambon Peaker) BMPP Nusantara I	2,176,319,090		28 Okt 2021-22 April 2022	Ambon

Kilas Kinerja 2021

Flash 2021

IKHTISAR KEUANGAN (DALAM JUTA RUPIAH)

FINANCIAL OVERVIEW (IN MILLION RUPIAH)

Uraian Description	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian <i>Consolidated of Comprehensive Income Statements</i>	(dalam juta rupiah) (in million Rupiah)					
Pendapatan Bersih <i>Net Income</i>	736,732	625,344	978,680	1,117,269	848,682	453,932
Beban Langsung <i>Direct Expenses</i>	500,492	436,166	717,048	812,914	605,463	297,859
Laba Kotor <i>Gross Profit</i>	236,240	189,178	261,632	304,355	243,219	156,073
Beban Usaha <i>Operating Expenses</i>	170,916	190,713	136,740	129,098	112,665	107,818
Laba Sebelum Pos Keuangan dan Lain - lain <i>Profit Before Financial Post and Other</i>	65,324	-1,535	124,892	175,257	130,554	48,255
Pos Keuangan dan Lain-Lain Bersih <i>Financial Post dan Others Net</i>	11,934	21,979	514	6,117	15,614	4,608
Laba Sebelum Pajak <i>Profit before tax</i>	77,258	20,444	125,406	169,140	114,940	52,863
Beban Pajak <i>Tax Expense</i>	7,386	4,947	7,392	5,056	10,021	1,102
Laba Tahun Berjalan dan Jumlah Laba Komprehensif <i>Profit of the Current Year and Comprehensive Total Profit</i>	69,872	15,497	118,014	164,084	104,919	51,761
Pendapatan Komprehensif lain tahun berjalan <i>Other Comprehensive Income of the current year</i>	-10,418	1,267	-679	1,509	3,227	6,655
Jumlah Penghasilan Komprehensif tahun berjalan <i>Comprehensive Income of the current year</i>	59,454	16,764	117,335	162,575	108,146	45,106
Jumlah Aset <i>Total Assets</i>	1,125,800	1,163,213	1,165,957	1,245,494	1,031,103	871,601
Jumlah Liabilitas <i>Amount of Liabilities</i>	366,894	463,761	496,947	599,838	495,568	444,212
Jumlah Ekuitas <i>Total Equity</i>	758,906	699,452	669,010	645,656	535,535	427,389
Investasi pada Entitas Asosiasi <i>Investment in Association Entities</i>	11,764	9,851	13,726	26,98	32,053	38,337
Modal Kerja Bersih <i>Net Working Capital</i>	520,989	466,221	465,004	421,661	323,838	303,371
EBITDA	105,140	74,006	198,944	240,670	167,772	69,940

Rasio Ratio						
Marjin Laba Kotor (%) Gross Profit Margin (%)	0.1	0,03	0,13	0,27	0,29	0,34
Rasio Kas (X) Cash Ratio (X)	1.45	0,89	0,58	0,69	1,03	0,36
Rasio Lancar (X) Current Ratio (X)	2.68	2,22	2,19	1,91	1,97	1,96
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas (X) Ratio of Liabilities to Equity (X)	0.48	0,66	0,74	0,93	0,93	1,04
Rasio Liabilitas Terhadap Aset (X) Ratio of Liabilities to Assets (X)	0.33	0,4	0,43	0,48	0,48	0,51
Rasio Imbal Hasil Atas Aset (X) Return on Assets Ratio (X)	0.06	0,01	0,1	0,13	0,08	0,06
Rasio Imbal Hasil Atas Ekuitas (X) Return on Equity Ratio (X)	0.09	0,02	0,18	0,25	0,20	0,12
Rasio Imbal Hasil Atas Pendapatan (X) Revenue Ratio on Revenue (X)	0.09	0,02	0,12	0,15	0,12	0,11

TABEL JUMLAH KONTRAK TAHUN 2017 - 2021 (DALAM UNIT KONTRAK)

TABLE NUMBER OF CONTRACTS YEAR 2017 - 2021 (IN CONTRACT UNIT)

Keterangan Explanation	Jumlah kontrak (Internal Eksternal) Number of Contract (Internal & Eksternal)														
	2021			2020			2019			2018			2017		
	Int	Eks	Total	Int	Eks	Total	Int	Eks	Total	Int	Eks	Total	Int	Eks	Total
Kontak Baru New Contracts	183	15	198	75	10	85	87	11	98	118	9	127	91	9	100
Jumlah Total	183	15	198	75	10	85	87	11	98	118	9	127	91	9	100

TABEL PEROLEHAN KONTRAK JASA ENJINIRING (DALAM RUPIAH)

ENGINEERING SERVICES CONTRACT GAINS TABLE (IN INDONESIAN RUPIAH)

Uraian Description	2021	2020	2019	2018	2017
Internal Internal	283.11	115,100.65	164,160.87	910,719.71	513,431.93
Eksternal External	38.52	6,136.70	8,321.84	11,061.77	9,825.05
Jumlah Total	321.63	121,237.35	172,482.71	921,781.49	523,256.98

IKHTISAR SAHAM

Sampai dengan akhir tahun 2021, PLN Enjiniring tidak memiliki catatan mengenai Ikhtisar pencatatan saham maupun pencatatan efek lainnya, hal ini dikarenakan PLN Enjiniring belum menjadi perusahaan publik.

STOCK HIGHLIGHTS

Until the end of 2021, PLN Enjiniring does not have a record regarding the Summary of share listings or other securities listings, this is because PLN Enjiniring has not yet become a public company.

IKHTISAR OBLIGASI

Sampai dengan akhir tahun 2021, PLN Enjiniring tidak menerbitkan obligasi, sukuk dan obligasi konversi sehingga tidak ada informasi terkait dengan jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk.

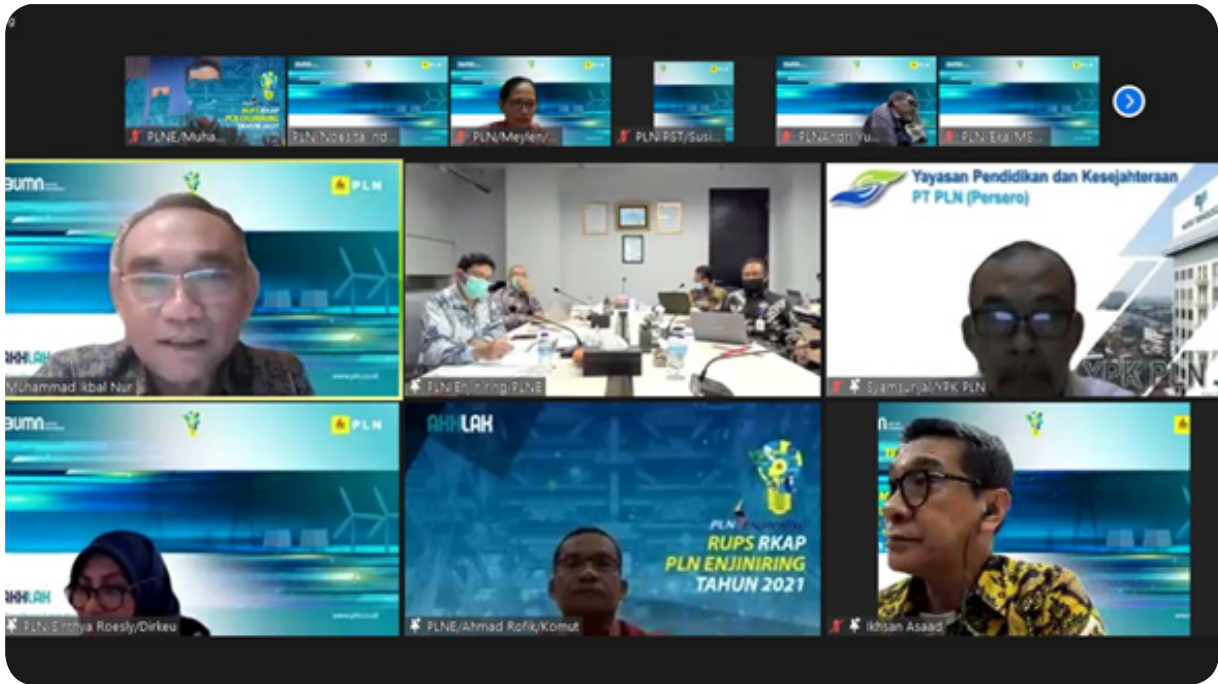
BOND OVERVIEW

Until the end of 2021, PLN Enjiniring does not issue bonds, sukuk and convertible bonds, so there is no information regarding the number of bonds/sukuk/convertible bonds outstanding, interest



PERISTIWA PT PLN ENJINIRING TAHUN 2021

Important Events in 2021



Gambar 1. RUPS RKAP PLNE tahun 2021
Picture 1. PLNE RKAP GMS 2021



Gambar 2. Rapat Kerja PLNE tahun 2021
Picture 2. PLNE Work Meeting 2021



Gambar 3. PLNE Melaksanakan Entry Meeting Assessment GCG tahun buku 2020

Picture 3. PLNE Conducts GCG Entry Meeting Assessment for fiscal year 2020



Gambar 4. Serah Terima Jabatan Direksi dan Komisaris PLNE

Picture 4. Handover of the Positions of PLNE Directors and Commissioners



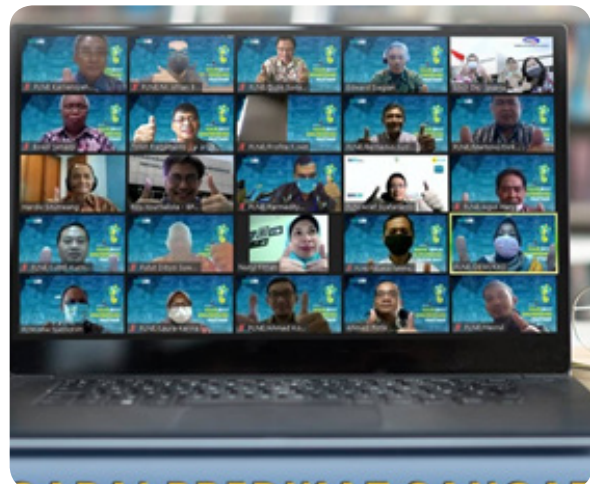
Gambar 5. PLNE Teken MoU dengan MEBI

Picture 5. PLNE Signs MoU with MEBI



Gambar 6. PLNE Teken Agreement dengan KHN

Picture 6. PLNE Signs Agreement with KHN



Gambar 7. PLNE Capai Predikat Sangat Baik dalam Assessment GCG 2020

Picture 7. PLNE Achieves Very Good Predicate in the 2020 GCG Assessment



Gambar 8. PLNE Mendukung Penuh Gerakan Anti Korupsi dan Gratifikasi

Picture 8. PPLNE Fully Supports the Anti-Corruption and Gratification Movement



Gambar 9. PLNE dan ThorCon International Tandatangani Perjanjian

Picture 9. PLNE and ThorCon International Sign Agreement



Gambar 10. CSR: Peduli Kesehatan, PLNE Salurkan Bantuan Bersama PLN Group

Picture 10. CSR: Health Care, PLNE Distributes Aid Together with PLN Group



Gambar 11. Ramadhan Berbagi, PLNE Bagikan Sembako ke Masyarakat yang Membutuhkan

Picture 11. Ramadhan Sharing, PLNE Distributes Basic Food to People in Need



Gambar 12. RUPS LPT PT PLN Enjiniring tahun 2020

Picture 12. PT PLN Enjiniring LPT GMS 2020



**HALAL BIHALAL PLNE 2021:
HARMONI KEBERSAMAAN DI HARI YANG FITRI**

Dalam rangka memeriahkan lebaran 2021 serta guna mempererat hubungan antar sesama karyawan, PLNE menyelenggarakan kegiatan Halal Bihalal 2021 secara virtual pada Selasa (18/05). Adapun kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh insan PLNE dari seluruh Indonesia.

Gambar 13. Halal bihalal PT PLN Enjiniring 2021

Picture 13. Halal bihalal PT PLN Enjiniring 2021



**DUKUNG CAPAIAN KINERJA YANG ANDAL,
PLNE MENYELENGGARAKAN RAPAT EVALUASI
PROGRAM KERJA SEMESTER I TAHUN 2021**

Jakarta - Sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja perusahaan serta guna mendukung capaian kinerja yang andal, PLN Enjiniring menyelenggarakan Rapat Evaluasi Program Kerja Semester I tahun 2021 dengan tema "Bekerja Lebih Baik, Melebihi Harapan Pemberi Kerja" pada Selasa (27/07).

Gambar 14. PLNE Menyelenggarakan Rapat valuasi Program Kerja Semester I tahun 2021

Picture 14. PLNE Holds an Evaluation Meeting for the First Semester of 2021



**SINERGI MEMBANGUN NEGERI :
PLN ENJINIRING BERSAMA PLN TARAKAN
MELAKSANAKAN CSR PEMBANGUNAN JALAN
DI DAERAH 3T**

Barito Utara - Sebagai wujud implementasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan perusahaan, serta guna mendukung tercapainya Sustainability Development Goals, PLN Enjiniring bersama PLN Tarakan melaksanakan program CSR Pembangunan Jalan di Desa Luwe, Barito Utara, Kalimantan Tengah pada Selasa (03/08).

Gambar 15. PLNE Bersama PLNT Melaksanakan CSR Pembangunan Jalan di Daerah 3T

Picture 15. PLNE and PLNT Implement CSR Road Construction in 3T Regions



Gambar 16. HUT ke-19 PLNE

Picture 16. PLNE's 19th Anniversary



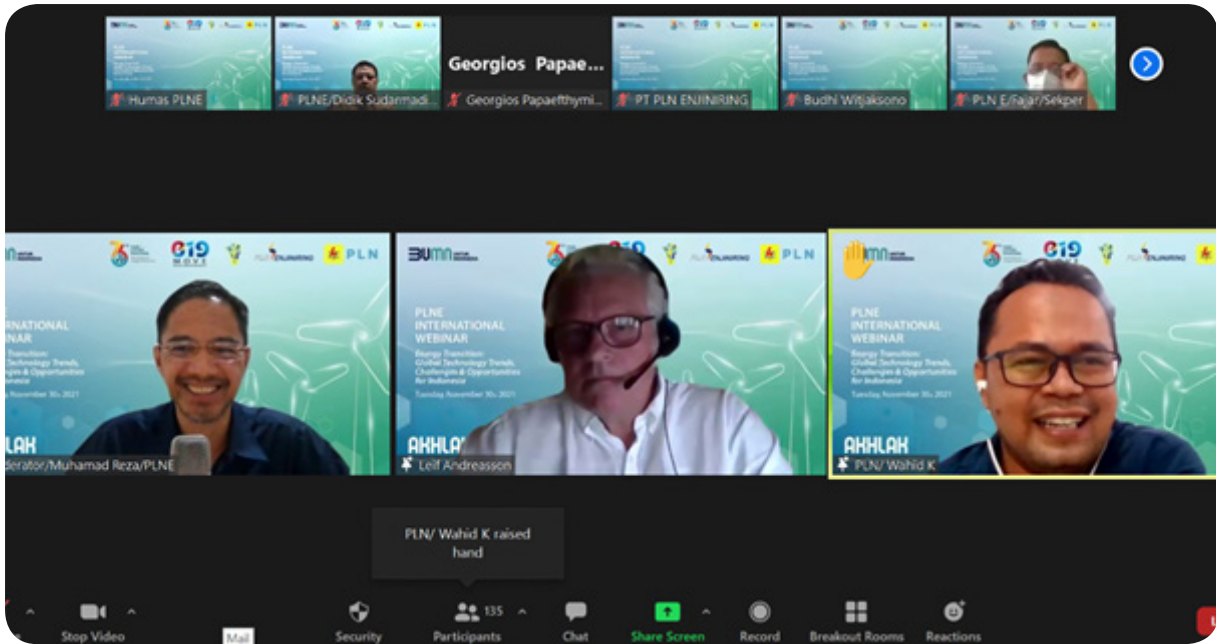
Gambar 17. PLNE Selenggarakan Webinar PLNE Technology & Business Talk

Picture 17. PLNE Holds PLNE Technology & Business Talk Webinar



Gambar 18. PLNE Ikut Berpartisipasi dalam Ajang Internasional: CEPSI 2021

Picture 18. PLNE Participates in International Event: CEPSI 2021



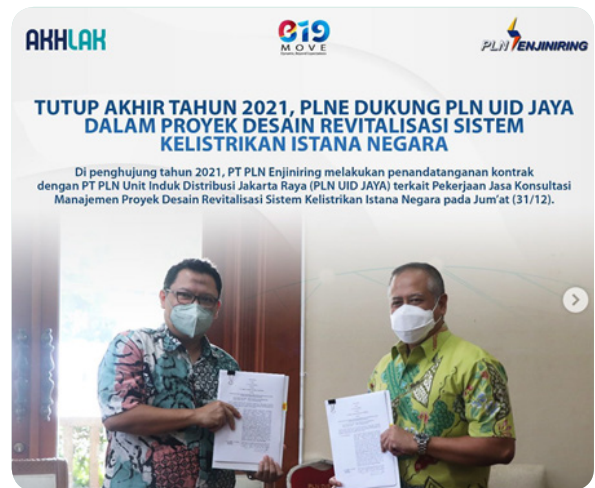
Gambar 19. PLNE Selenggarakan International Webinar Energy Transition: Global Technology Trends, Challenges & Opportunities For Indonesia

Picture 19. PLNE Held International Webinar Energy Transition: Global Technology Trends, Challenges & Opportunities For Indonesia



Gambar 20. PLNE Berhasil Mendukung PLN dalam Proyek GI 150 Kv Timika

Picture 20. PLNE Successfully Supports PLN in the Timika 150 Kv GI Project



Gambar 21. PLNE Dukung PLN UID Jaya dalam Proyek Desain Revitalisasi Sistem Kelistrikan Istana Negara

Picture 21. PLNE Supports PLN UID Jaya in the Design Project for the Revitalization of the State Palace Electricity System



Gambar 22. PLNE Berhasil Mendukung PLN UIP JBT dalam Proyek GITET 500/150 kV PLTU Indramayu

Picture 22. PLNE Successfully Supports PLN UIP JBT in the GITET 500/150 kV PLTU Indramayu Project

Laporan Manajemen

Management Report



Laporan Dewan Komisaris

The Board of Commissioners' Report

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi atas kebijakan, pengurusan, dan usaha Perseroan.

Laporan Dekom pada tahun 2021 difokuskan pada: (i) KPI Perseroan Tahun 2021, (ii) Kinerja Keuangan, (iii) Kinerja Pemasaran, (iv) Aspek SDM dan Pengembangan Karir, (v) Sistem Teknologi Informasi, (vi) Pengawasan Pengembangan Usaha/Anak Usaha dan Perusahaan Afiliasi, (vii) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, (viii) Manajemen Risiko, (ix) Kebijakan Mutu dan Pelayanan, (x) Kebijakan Pengadaan, (xi) Kepatuhan Direksi Dalam Menjalankan Peraturan Perundangan, (xii) Sistem Pengendalian Internal, (xiii) Penyusunan RKAP Tahun 2022, (xiv) Pelaksanaan RJPP, (xv) Tindak Lanjut Arahan RUPS & Dekom, (xvi) Hal-hal Penting Yang Perlu Dilaporkan.

Laporan Dekom Tahun 2021 disusun berdasarkan RKAP tahun 2021, Laporan Manajemen dan Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko tahun 2021, hasil rapat-rapat koordinasi antara Dekom dan Direksi, serta melihat perkembangan usaha Perseroan sampai akhir tahun 2021.

Laporan Dewan Komisaris Tahun 2021 disusun dengan membandingkan RKAP Tahun 2021 terhadap laporan-laporan hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dan PWC yang terdiri dari:

1. Laporan Keuangan Konsolidasi No. 01101/2.1025/AU.1/03/1789-1/1/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022

"Wajar dalam Semua Hal yang Material"

Based on the prevailing laws and regulations and the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners has the duty and obligation to supervise and provide advice to the Board of Directors on the policies, management and business of the Company.

The Board of Commissioners' report in 2021 is focused on: (i) Company KPIs for 2021, (ii) Financial Performance, (iii) Marketing Performance, (iv) HR and Career Development Aspects, (v) Information Technology Systems, (vi) Business Development Supervision /Subsidiaries and Affiliated Companies, (vii) Good Corporate Governance, (viii) Risk Management, (ix) Quality and Service Policy, (x) Procurement Policy, (xi) Compliance of the Board of Directors in Implementing Legislation, (xii) System Internal Control, (xiii) Preparation of the 2022 RKAP, (xiv) Implementation of the RJPP, (xv) Follow-up to GMS & Board of Commissioners' Directions, (xvi) Important Matters Needing to be Reported.

The 2021 Board of Commissioners report was prepared based on the 2021 RKAP, the Management Report and the 2021 Risk Management Implementation Report, the results of coordination meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as observing the Company's business development until the end of 2021.

The 2021 Board of Commissioners report was prepared by comparing the 2021 RKAP against the audit reports by the Public Accounting Firm (KAP) of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners at PWC which consists of:

1. Consolidated Financial Statements No. 01101/2.1025/AU.1/03/1789-1/1/VI/2022 dated 7 June 2022

"Reasonable in All Material Things"

2. Laporan Kepatuhan Perundang-Undangan dan Laporan Kepatuhan Internal No. N20220607005 / DC2/ FSA / 2022, tanggal 7 Juni 2022

“Perusahaan Mematuhi dalam Semua Hal yang Material ”

3. Laporan Evaluasi Kinerja No. N20220607006/ DC2/FSA/2022 tanggal 7 Juni 2022

“Tingkat Kesehatan Perusahaan SEHAT kategori “AAA” dengan nilai 101,64”

2. *Legal Compliance Report and Internal Compliance Report No. N20220607005 / DC2/ FSA / 2022, June 7, 2022*

“The Company Complies in All Material Matters”

3. *Performance Evaluation Report No. N20220607006/DC2/FSA/2022 dated 7 June 2022*

“Healthy Company Health Level “AAA” category with a score of 101.64”

PENGAWASAN TERHADAP KPI PERSEROAN TAHUN 2021

Hasil Pencapaian KPI Perseroan Tahun 2021 diperoleh skor 101,64, digolongkan dalam kondisi SEHAT. Untuk kinerja tahun 2021 terdapat 3 indikator kinerja yang tidak tercapai (merah), yaitu:

1. Komposisi Enjinir non organik untuk produk enjiniring (FS, Biddoc dan Enjiniring Design)
2. Pendapatan Proyek Internal (PLN) dari produk enjiniring diluar sinergi Anak Perusahaan
3. Rasio operasi holding bagian pendapatan usaha

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah menyampaikan arahan-arahan untuk mendorong Direksi agar melakukan best effort untuk mencapai target KPI Tahun 2021, diantaranya agar Direksi senantiasa melaksanakan strategi pengembangan usaha yang inovatif dan agresif, melakukan tindakan perbaikan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, menyusun roadmap peningkatan kompetensi enjinir-enjinir muda, melakukan optimalisasi dan efisiensi biaya operasional namun dengan tetap memperhatikan mutu, serta melakukan monitoring dan controlling yang ketat atas pencapaian KPI selama tahun 2021.

PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PEMASARAN

Pada tahun 2021, jumlah penugasan yang dilakukan oleh Perseroan adalah sebanyak 254 penugasan dengan potensi nilai sebesar Rp 392 Miliar. Berdasarkan telaah dari total 254 penugasan sebanyak 198 pekerjaan telah terkontrak dengan nilai sebesar Rp. 321 Miliar, sebanyak

SUPERVISION OF THE COMPANY'S KPI IN 2021

The results of the Company's 2021 KPI Achievements obtained a score of 101.64, classified as HEALTHY. For performance in 2021, there are 3 performance indicators that are not achieved (red), namely:

1. *Composition of non-organic engineers for engineering products (FS, Biddoc and Engineering Design)*
2. *Internal Project Revenue (PLN) from engineering products outside of the Subsidiary's synergy*
3. *Operating income share holding ratio*

During 2021, the Board of Commissioners has conveyed directions to encourage the Board of Directors to make best efforts to achieve the 2021 KPI targets, including for the Board of Directors to always implement innovative and aggressive business development strategies, take corrective actions to improve customer satisfaction, develop a competency improvement roadmap. young engineers, optimizing and efficient operational costs while still paying attention to quality, as well as conducting strict monitoring and control of KPI achievements during 2021.

SUPERVISION OF MARKETING PERFORMANCE

In 2021, the number of assignments carried out by the Company is 254 assignments with a potential value of Rp. 392 billion. Based on a review of a total of 254 assignments as many as 198 jobs have been contracted with a value of Rp. 321 billion, as many as 24 assignments

24 penugasan dalam proses kontraktual dengan potensi nilai sebesar Rp. 34 Miliar, dan sebanyak 10 penugasan yang ditunda dengan potensi nilai sebesar Rp. 15 Miliar.

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan pengawasan terhadap pencapaian kinerja pemasaran dan telah menyampaikan arahan dan rekomendasi diantaranya agar Direksi mengembangkan strategi dan program bisnis untuk menuju perusahaan injiniring internasional dengan target pasar PLN Grup dan di luar PLN Grup, mengantisipasi adanya restrukturisasi organisasi terkait pelaksanaan fungsi injiniring di PLN Grup (Pusenlis), memastikan pengembangan usaha untuk proyek-proyek EBT, memastikan antisipasi terkait isu digitalisasi, dekarbonisasi dan desentralisasi, mengembangkan portofolio yang dapat memberikan kontribusi segera kepada kinerja keuangan serta melakukan kolaborasi dengan mitra untuk pemenuhan tenaga ahli dan antisipasi perkembangan teknologi.

PENGAWASAN TERHADAP ASPEK SDM DAN PENGEMBANGAN KARIR SDM

Pada tahun 2021, pengelolaan aspek SDM dan pengembangan karir SDM Perseroan dilaksanakan selaras dengan tema strategis Perseroan yaitu meningkatkan keandalan, peningkatan revenue, cost efficiency dan peningkatan customer experience. Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut Dewan Komisaris telah menyampaikan arahan dan rekomendasi, diantaranya agar Direksi menyusun roadmap SDM yang menjelaskan pengelolaan SDM 5 tahun ke depan dengan mempertimbangkan arah pengembangan usaha Perseroan, pengembangan EBT, trend bisnis, perkembangan teknologi, pembangunan tata nilai, syarat sertifikasi, kebutuhan kemitraan dan lain-lain, sehingga pengelolaan SDM dapat memberikan value yang maksimal bagi Perseroan. Selain itu Dewan Komisaris juga telah menyampaikan agar pengembangan talent pool Perseroan dilakukan baik untuk karyawan struktural maupun fungsional karena bidang usaha Perseroan adalah bergerak di bidang injiniring yang sangat bergantung pada kepakaran.

in the contractual process with a potential value of Rp. 34 billion, and as many as 10 assignments were postponed with a potential value of Rp. 15 Billion.

During 2021, the Board of Commissioners continues to supervise the achievement of marketing performance and has conveyed directions and recommendations, including for the Board of Directors to develop business strategies and programs to become an international engineering company with a target market of the PLN Group and outside the PLN Group, anticipating organizational restructuring related to the implementation of functions. engineering at the PLN Group (Pusenlis), ensuring business development for EBT projects, ensuring anticipation related to digitalization, decarbonization and decentralization issues, developing portfolios that can contribute immediately to financial performance and collaborating with partners to fulfill experts and anticipate technological developments .

SUPERVISION OF HR ASPECTS AND HR CAREER DEVELOPMENT

In 2021, the management of HR aspects and career development of the Company's HR is carried out in line with the Company's strategic themes, namely increasing reliability, increasing revenue, cost efficiency and improving customer experience. In order to support these activities, the Board of Commissioners has conveyed directions and recommendations, including for the Board of Directors to prepare an HR roadmap that explains HR management for the next 5 years by considering the direction of the Company's business development, NRE development, business trends, technology development, value development, certification requirements, partnership needs and others, so that HR management can provide maximum value for the Company. In addition, the Board of Commissioners has also conveyed that the development of the Company's talent pool is carried out for both structural and functional employees because the Company's line of business is engaged in engineering which relies heavily on expertise.

PENGAWASAN TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA/ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN AFILIASI (APPA)

Pada tahun 2021, terdapat 2 program Perseroan yang terkait aksi korporasi menyangkut Anak Perusahaan yaitu aksi korporasi implementasi strategi Quick Win A15 dan A16/ Akusisi PPN – REC dan aksi korporasi penyelesaian permasalahan di PT CPSI. Atas aksi korporasi ini Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan dan memberikan arahan/rekomendasi diantaranya agar Direksi menyempurnakan prosedur pengawasan APPA sehingga capaian kinerjanya termonitor dan patuh terhadap GCG, memastikan pemilihan opsi penyelesaian permasalahan di PT CPSI didukung oleh kajian komprehensif dari segi operasional, pasar, finansial, legal dan risiko yang penyusunannya dilakukan dengan dukungan dari konsultan yang kompeten dan pengalaman, memastikan kajian yang dihasilkan menggambarkan skenario bisnis dan potensi sustainability atas opsi-opsi yang dapat dipilih sehingga dapat menggambarkan opsi yang dapat memberikan value yang optimal bagi Perusahaan, memastikan pemberian dana talangan kepada Bank Mandiri atas bunga dan pokok pinjaman CPSI dapat dikembalikan sebelum akhir tahun 2021, serta memastikan pelaksanaan keseluruhan proses akusisi PPN-REC dilakukan secara prudent, mematuhi peraturan perundang-undangan serta sesuai GCG.

PENGAWASAN TERHADAP KEBIJAKAN MUTU DAN PELAYANAN

Untuk memastikan pencapaian sasaran peningkatan kepuasan pelanggan, kualitas produk engineering serta keselamatan dan kesehatan kerja, Perseroan menerapkan SMT yang meliputi Sistem manajemen Mutu – ISO 9001:2015, Manajemen Risiko – ISO 31000:2018, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) – Peraturan Pemerintah RI 50 tahun 2012, Sistem Manajemen Anti Penyuapan – ISO 37001:2016, Sistem Manajemen Kepatuhan – ISO 19600:2014, Sistem Manajemen Keamanan Informasi – ISO 27001:2016, dan Sistem Manajemen Keamanan Organisasi – Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007.

SUPERVISION OF BUSINESS DEVELOPMENT/SUBSIDIARIES AND AFFILIATED COMPANIES (APPA)

In 2021, there are 2 Company programs related to corporate actions regarding Subsidiaries, namely corporate actions implementing the Quick Win A15 and A16 strategies / Acquisition of PPN – REC and corporate actions to resolve problems at PT CPSI. For this corporate action, the Board of Commissioners always supervises and provides direction/recommendations, including so that the Board of Directors improves the APPA supervision procedures so that their performance achievements are monitored and complies with GCG, ensures that the selection of problem solving options at PT CPSI is supported by a comprehensive study in terms of operations, market, financial, legal and risk arrangements whose preparation is carried out with the support of competent and experienced consultants, ensuring the resulting study describes the business scenario and potential sustainability of the options that can be selected so as to describe options that can provide optimal value for the Company, ensure the provision of bailout funds to Bank Mandiri for the interest and principal of the CPSI loan can be returned before the end of 2021, and ensures the implementation of the entire PPN-REC acquisition process is carried out prudently, complies with laws and regulations and is in accordance with GCG.

SUPERVISION OF QUALITY AND SERVICE POLICY

To ensure the achievement of the target of increasing customer satisfaction, engineering product quality as well as occupational safety and health, the Company implements SMT which includes Quality management system – ISO 9001:2015, Risk Management – ISO 31000:2018, Occupational Health and Safety Management System (SMK3) – Regulations RI Government 50 of 2012, Anti-Bribery Management System – ISO 37001:2016, Compliance Management System – ISO 19600:2014, Information Security Management System – ISO 27001:2016, and Organizational Security Management System – Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 24 Year 2007.

Terhadap implementasi kebijakan mutu dan pelayanan Perseroan pada tahun 2021, Dewan Komisaris telah menyampaikan arahan diantaranya agar Direksi menerapkan standar baku mutu proyek untuk menentukan jumlah maning schedule, durasi pelaksanaan pekerjaan, billing rate dan lainnya, standar baku mutu ini agar dituangkan dalam Prosedur Enjiniring; selanjutnya Direksi agar melakukan evaluasi terhadap ekspektasi pelanggan dan melakukan tindakan perbaikan atas ketidakpuasan pelanggan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan pelanggan sehingga pada akhirnya meningkatkan perolehan pendapatan, serta memperhatikan mutu produk dan layanan dalam pelaksanaan kontrak dan pemenuhan kebutuhan resourcesnya.

PENGAWASAN TERHADAP MANAJEMEN RISIKO

Profil Risiko korporat disusun untuk memastikan pencapaian sasaran strategis Perseroan yang tertuang dalam RKAP 2021. Profil Risiko Korporat PT PLN Enjiniring digunakan sebagai acuan utama bagi manajemen perusahaan untuk memonitor realisasi pencapaian Key Risk Indicator risiko perusahaan sebagai bahan manajemen dalam pengambilan keputusan.

Terhadap pelaksanaan manajemen risiko pada tahun 2021, Dewan Komisaris telah memberikan arahan antara lain agar Direksi memberikan perhatian dalam pelaksanaan manajemen risiko, khususnya untuk memastikan mitigasi risiko dilakukan secara efektif dalam rangka mencapai sasaran RKAP 2021, mendukung terlaksananya Roadmap Manajemen Risiko (MRT) di Lingkungan Perusahaan, serta mengupayakan pencapaian maturity level ERM 2021 sesuai target KPI.

Regarding the implementation of the Company's quality and service policies in 2021, the Board of Commissioners has conveyed directions, among others, that the Board of Directors apply project quality standards to determine the number of maning schedules, duration of work implementation, billing rates and others, these quality standards to be included in the Engineering Procedure; furthermore, the Board of Directors should evaluate customer expectations and take corrective action on customer dissatisfaction to increase the level of customer trust so that in the end increase revenue generation, and pay attention to the quality of products and services in implementing contracts and fulfilling their resource needs.

SUPERVISION OF RISK MANAGEMENT

The Corporate Risk Profile is prepared to ensure the achievement of the Company's strategic objectives as stated in the 2021 RKAP. The Corporate Risk Profile of PT PLN Enjiniring is used as the main reference for company management to monitor the realization of the Company's Key Risk Indicator achievement as management material for decision making.

Regarding the implementation of risk management in 2021, the Board of Commissioners has given directions, among others, so that the Board of Directors pays attention to the implementation of risk management, in particular to ensure that risk mitigation is carried out effectively in order to achieve the 2021 RKAP targets, to support the implementation of the Risk Management Roadmap (MRT) within the Company, and strive to achieve the maturity level of ERM 2021 according to KPI targets.

PENGAWASAN TERHADAP PENYUSUNAN RANCANGAN RKAP DAN RJPP

Salah satu tugas Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas penyusunan RKAP 2022, Dewan Komisaris telah membahas konsep RKAP tahun 2022 bersama Direksi.

Terhadap penyusunan konsep RKAP tahun 2022, Dewan Komisaris memberikan pendapat dan pandangan, diantaranya agar Direksi menyusun RKAP 2022 berlandaskan manajemen risiko yang terintegrasi dengan proses bisnis, menyiapkan antisipasi atas penurunan target pendapatan dalam RKAP 2022 sebagai dampak implementasi strategi quick win A15 dan A16 – Akuisisi PPN-REC, dalam penyusunan RKAP 2022 agar dilakukan dengan prudent dan patuh terhadap GCG.

Pada tahun 2021, Dewan Komisaris juga telah memberikan catatan terkait RJP Perseroan, diantaranya, agar Direksi melakukan alignment terhadap RJP yang didasarkan pada kondisi terkini Perseroan sehingga menggambarkan arah pengembangan usaha, potensi-potensi pengembangan usaha, roadmap pencapaian sasaran strategis yang terintegrasi dengan pemenuhan resources, serta memastikan keselarasannya dengan visi dan misi yang telah disepakati. Selain itu Dewan Komisaris mengarahkan agar Direksi memastikan keselarasan antara RKAP 2022 dengan RJP Perseroan, serta agar Direksi segera menyusun RJP 2022 – 2026.

PT Prima Layanan Nasional Enjiniring



Edwin Nugraha Putra

Komisaris Utama

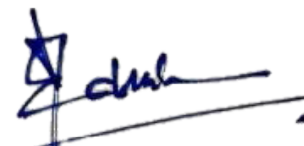
SUPERVISION OF THE DRAFTING OF THE RKAP AND RJPP

One of the duties of the Board of Commissioners is to supervise the preparation of the 2022 RKAP, the Board of Commissioners has discussed the concept of the 2022 RKAP with the Board of Directors.

Regarding the preparation of the 2022 RKAP concept, the Board of Commissioners provides opinions and views, including that the Board of Directors prepares the 2022 RKAP based on risk management that is integrated with business processes, prepares anticipation for the decline in revenue targets in the 2022 RKAP as the impact of the implementation of the quick win strategy A15 and A16 - VAT acquisition -REC, in the preparation of the 2022 RKAP to be carried out prudently and comply with GCG.

In 2021, the Board of Commissioners has also provided notes related to the Company's RJP, among others, so that the Board of Directors performs an alignment of the RJP based on the current conditions of the Company so as to describe the direction of business development, business development potentials, a roadmap for achieving strategic targets that are integrated with the fulfillment of resources, and ensure its alignment with the agreed vision and mission. In addition, the Board of Commissioners directs the Board of Directors to ensure alignment between the 2022 RKAP and the Company's RJP, and that the Board of Directors immediately prepares the 2022-2026 RJP.

PT Prima Layanan Nasional Enjiniring



Edwin Nugraha Putra

President Commissioner

Laporan Direksi

The Board of Directors Report

LAPORAN DIREKSI

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat, Kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas semua usaha yang telah dilakukan dalam pencapaian prestasi yang telah diraih PLN Enjiniring pada tahun 2021. Perusahaan telah membukukan kinerja yang baik sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2021.

KPI Manajemen PT PLN Enjiniring tahun 2021 mendapatkan skor 101,64 (masuk pada golongan perusahaan yang SEHAT, kategori AAA) dengan pencapaian masing-masing indikator adalah Fokus Pelanggan sebesar 7,70, Efektifitas Produk dan Proses sebesar 33,50, SDM sebesar 12,20, Keuangan dan Pasar sebesar 38,85, serta Fokus Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan sebesar 9,39. Skor KPI ini merupakan realisasi capaian tahun 2021 yang telah bersifat Audited oleh Kantor Akuntan Publik.

Perusahaan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah disepakati oleh seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk memenuhi harapan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sustainable business. Sehubungan dengan hal tersebut, kami atas nama Direksi PT PLN Enjiniring melaporkan kinerja Perusahaan tahun 2021, semoga penyajian laporan ini memberikan nilai tambahan yang signifikan baik bagi PLN Enjiniring dan Pemegang Saham.

Pada tahun 2021 ini, PLN Enjiniring berkomitmen untuk selalu memperbaiki dan mempertahankan sustainability perusahaan, sebagai wujud tanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh Pemberi Kerja.

THE BOARD OF DIRECTORS REPORT

The honorable Stakeholders and Shareholders, We give thanks to the Almighty God for all the efforts put to the achievements that have been accomplished by PLN Enjiniring in 2021. The company has recorded good performance according to the targets set in the Work Plan and the 2021 Corporate Budget (RKAP).

PT PLN Enjiniring Management KPI in 2021 got a score of 101.64 (included in the HEALTHY company category, AAA category) with the achievements of each indicator being Customer Focus of 7.70, Product and Process Effectiveness of 33.50, HR of 12, 20, Finance and Markets at 38.85, and Focus on Leadership, Governance and Social Responsibility at 9.39. This KPI score is the realization of the 2021 achievements that have been audited by the Public Accounting Firm.

The company is always guided by the vision and mission agreed upon all levels of management and employees to meet the expectations of shareholders and stakeholders in an effort to achieve a sustainable business. We on behalf of the Board of Directors of PT PLN Enjiniring report the Company's performance in 2021, we hope that the presentation of this report will provide significant additional value for both PLN Enjiniring and Shareholders.

In 2021, PLN Enjiniring is committed to always improving and maintaining the company's sustainability, as a form of responsibility for the mandate given by the Employer.

STRATEGI BISNIS PERUSAHAAN

PT PLN Enjiniring melakukan penyesuaian terhadap "Transformasi PLN" melalui pengembangan kompetensi perusahaan untuk mendukung 20 breakthrough, agar 4 strategic goals (Green, Innovative, Customer Focus dan Lean) PT PLN (Persero) tercapai.

Sesuai dengan Core Business PLN Enjiniring sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa enjiniring, PLN Enjiniring mengemban misi strategis Optimizing Cost Efficiency dan Leading Industry Capabilities. Dengan 2 misi strategis tersebut, PLN Enjiniring mengaplikasikan pengembangan kegiatan bisnis yang selaras dengan misi strategis "PLN SOLID" sebagai berikut:

1. **Optimizing Cost Efficiency**, "mengoptimalkan struktur biaya PLN Group di sepanjang rantai nilai, sehingga PT PLN (Persero) dapat menjadi "price setter" dan memaksimalkan penciptaan nilai PLN Group melalui efisiensi biaya secara keseluruhan."
2. **Leading Industry Capabilities**, "mengembangkan kemampuan dalam bentuk pengetahuan, keahlian dan ketrampilan yang memberikan daya saing, dan atau keunggulan strategis ("capability setter") bagi PLN Group dengan standar terbaik dalam industri ketenagalistrikan nasional dan sesuai dengan standar yang berlaku secara internasional atau global."

KINERJA KEUANGAN TAHUN 2021

Dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada, kinerja PLN Enjiniring tahun 2021 telah menunjukkan hasil yang baik. Perusahaan berusaha memenuhi harapan Pemegang Saham (shareholders) dengan pencapaian kinerja sesuai target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Kinerja Keuangan PT PLN Enjiniring di 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut ;

1. **Pendapatan Usaha** di 2021 tercatat sebesar Rp 736,73 miliar, mengalami peningkatan sebesar 17,81% atau Rp 111,39 miliar jika dibandingkan dengan 2020 yaitu sebesar Rp 625,34 miliar. Peningkatan pendapatan yang signifikan adalah pada Jasa Enjiniring, Prokuremen dan Konstruksi (EPC) sebesar Rp 63,16 miliar atau 23,43%,

COMPANY BUSINESS STRATEGY

PT PLN Enjiniring is aligning the "PLN Transformation" through the development of company competencies to support 20 breakthroughs, so that the 4 strategic goals (Green, Innovative, Customer Focus and Lean) of PT PLN (Persero) are achieved.

In accordance with PLN Enjiniring Core Business as a company engaged in engineering services, PLN Enjiniring carries out the strategic mission of Optimizing Cost Efficiency and Leading Industry Capabilities. With these 2 strategic missions, PLN Enjiniring applies the development of business activities that are in line with the "PLN SOLID" strategic mission as follows:

1. *Optimizing Cost Efficiency, "optimizing the cost structure of the PLN Group along the value chain, so that PT PLN (Persero) can become the "price setter" and maximize the value creation of the PLN Group through overall cost efficiency."*
2. *Leading Industry Capabilities, "developing capabilities in the form of knowledge, expertise and skills that provide competitiveness, and/or strategic advantage ("capability setters") for PLN Group with the best standards in the national electricity industry and in accordance with internationally applicable standards or global."*

FINANCIAL PERFORMANCE IN 2021

With the various challenges and opportunities that exist, the performance of PLN Enjiniring in 2021 has shown good results. The company tries to meet the expectations of shareholders (shareholders) by achieving performance according to the targets of the Company's Work Plan and Budget (RKAP). The Financial Performance of PT PLN Enjiniring in 2021 can be described as follows;

1. *Operating Income in 2021 was recorded at Rp 736.73 billion, an increase of 17.81% or Rp 111.39 billion when compared to 2020, which was Rp 625.34 billion. Significant increase in revenue was in Engineering, Procurement and Construction Services (EPC) by Rp. 63.16 billion or 23.43%,*

Bidang Pembangkitan sebesar Rp 42,68 miliar atau 59,02%, dan Bidang Konstruksi sebesar Rp 20,26 miliar atau 15,94%.

Hal di atas secara general disebabkan karena adanya peningkatan pekerjaan terkontrak, penyelesaian kontrak terkendala pada tahun sebelumnya dan capaian pendapatan pada tahun berjalan.

- 2. Beban Usaha** pada tahun 2021, Perusahaan membukukan Beban Usaha sebesar Rp 170,92 miliar, mengalami penurunan sebesar 10,38% dibandingkan tahun 2020. Penurunan pada beban usaha, penurunan signifikan adalah disebabkan atas penurunan beban kerugian penurunan piutang usaha sebagai dampak penerapan PSAK 71 dan penurunan pada beban pemeliharaan.
- 3. Realisasi Laba (Rugi) Periode Berjalan,** Peningkatan Bersih Kas dan Setara Kas pada tahun 2021 sebesar Rp 112,19 miliar atau sebesar Rp.33,13% disebabkan adanya peningkatan Arus Kas untuk Pendanaan sebesar Rp 16,98 miliar atau -29,44% dibanding tahun 2020.

Generation by Rp. 42.68 billion or 59.02%, and Construction by Rp. 20.26 billion. or 15.94%.

The above is generally due to an increase in contracted work, constrained contract completion in the previous year and the achievement of income in the current year.

- 2. Operating Expenses In 2021, the Company recorded Operating Expenses of Rp 170.92 billion, a decrease of 10.38% compared to 2020. The decrease in operating expenses, a significant decrease was due to a decrease in the cost of losses, decrease in trade receivables as a result of the implementation of PSAK 71 and a reduction in maintenance costs.*
- 3. Realized Profit (Loss) for the Current Period, Net Increase in Cash and Cash Equivalents in 2021 amounting to Rp 112.19 billion or Rp. 33.13% due to an increase in Cash Flow for Funding by Rp 16.98 billion or -29, 44% compared to 2020.*

KINERJA NON KEUANGAN 2021

Direksi berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Hal ini tercermin dari upaya Perusahaan melakukan pengelolaan hubungan pelanggan dan pengelolaan complain pelanggan.

Dalam menjalankan operasional usaha, jumlah Karyawan PT PLN Enjiniring pada tahun 2021 (Desember 2021) adalah sebanyak 640 orang yang terdiri dari 15 pegawai Tugas Karya dari PT PLN (Persero), 237 pegawai Organik PT PLN Enjiniring, 131 orang tenaga kerja pendukung (outsourcing) dari PT Haleyora Powerindo, UJPK & DJATAIS, dan 257 orang berstatus sebagai tenaga kerja dengan kontrak perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang bekerja di kantor Jakarta serta proyek-proyek PT PLN Enjiniring yang tersebar di Indonesia.

Perusahaan terus meningkatkan engagement pegawai melalui berbagai kegiatan seperti rapat kerja, coffee morning dan knowledge sharing. Berbagai program pelatihan dan pengembangan telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualitas kerja pegawai. Sedangkan pada aspek pengakuan masyarakat/

NON FINANCIAL PERFORMANCE IN 2021

The Board of Directors is committed to improving service to customers. This is reflected in the Company's efforts to manage customer relationships and manage customer complaints.

In carrying out business operations, the number of employees of PT PLN Enjiniring in 2021 (December 2021) is 640 people consisting of 15 employees of Task Work from PT PLN (Persero), 237 Organic employees of PT PLN Enjiniring, 131 support workers (outsourcing) from PT Haleyora Powerindo, UJPK & DJATAIS, and 257 people with the status of workers with a certain time work agreement contract who work in the Jakarta office as well as PT PLN Enjiniring projects spread across Indonesia.

The company continues to increase employee engagement through various activities such as work meetings, coffee mornings and knowledge sharing. Various training and development programs have been carried out in order to improve the competence and quality of work of employees. Meanwhile, in the

stakeholder atas pengelolaan Perusahaan, PLN Enjiniring telah mendapatkan berbagai penghargaan. Penghargaan yang diperoleh Perusahaan pada tahun 2021 antara lain penghargaan "Best Engineering for New and Renewable Energy" pada ajang Creative & Innovation Business Champion Award 2021 yang diadakan oleh majalah Profil Indonesia.

ASPEK PRODUKSI TAHUN 2021

Pada tahun 2021 bidang pembangkit melaksanakan 160 pekerjaan, bidang Konstruksi melaksanakan 36 pekerjaan, dan bidang Transmisi dan Distribusi melaksanakan 108 pekerjaan. Total pekerjaan yang dilaksanakan Direktorat Enjiniring tahun 2021 ini adalah 304 pekerjaan, serta terdapat 121 pekerjaan berstatus penutupan kontrak atau telah selesai.

KEY PERFORMANCE INDEX (KPI)

Dalam kesempatan ini kami laporkan terkait KPI PT PLN Enjiniring. KPI terdiri dari 5 (lima) perspektif sesuai Kontrak Manajemen antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Perspektif Fokus Pelanggan
2. Perspektif Efektifitas Produk dan Proses
3. Perspektif SDM
4. Perspektif Keuangan dan Pasar
5. Perspektif Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan

KPI Manajemen PT PLN Enjiniring tahun 2021 mendapatkan skor 101,64 (masuk pada golongan perusahaan yang SEHAT, kategori AAA) dengan pencapaian masing-masing indikator adalah Fokus Pelanggan sebesar 7,70, Efektifitas Produk dan Proses sebesar 33,50, SDM sebesar 12,20, Keuangan dan Pasar sebesar 38,85, serta Fokus Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan sebesar 9,39. Skor KPI ini merupakan realisasi capaian tahun 2021 yang telah bersifat Audited oleh Kantor Akuntan Publik.

aspect of community/stakeholder recognition for the management of the Company, PLN Enjiniring has received various awards. The awards obtained by the Company in 2021 include the "Best Engineering for New and Renewable Energy" award at the 2021 Creative & Innovation Business Champion Award held by Profil Indonesia magazine.

ASPECT OF PRODUCTION YEAR 2021

In 2021 the power plant sector will carry out 160 jobs, the Construction sector will carry out 36 jobs, and the Transmission and Distribution sector will carry out 108 jobs. The total work carried out by the Directorate of Engineering in 2021 is 304 jobs, and there are 121 jobs with contract closing status or have been completed.

KEY PERFORMANCE INDEX (KPI)

We will be reporting the KPI of PT PLN Enjiniring in this occasion. KPI consists of 5 (five) perspectives according to the Management Contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners and the Company's Shareholders, that follows :

1. Customer Focus Perspective
2. Product and Process Effectiveness Perspective
3. HR Perspective
4. Financial and Market Perspective
5. Leadership, Governance and Social Responsibility Perspectives

PT PLN Enjiniring Management KPI in 2021 got a score of 101.64 (included in the HEALTHY company category, AAA category) with the achievements of each indicator being Customer Focus of 7.70, Product and Process Effectiveness of 33.50, HR of 12, 20, Finance and Markets at 38.85, and Focus on Leadership, Governance and Social Responsibility at 9.39. This KPI score is the realization of the 2021 achievements that have been audited by the Public Accounting Firm.

KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI

Direksi menyadari bahwa pencapaian kinerja dan prestasi yang telah diraih oleh PLN Enjiniring tidak terlepas dari berbagai kendala. Namun demikian, Perusahaan telah berhasil melakukan upaya kebijakan terhadap kendala yang ada sehingga tidak mempengaruhi kinerja Perusahaan secara signifikan.

Kendala-kendala yang dihadapi Perseroan di 2021 berasal dari pihak eksternal dan internal. Kendala eksternal antara lain adalah Pandemi Covid-19 yang berimbas kepada bisnis perusahaan, munculnya perusahaan konsultan baru sebagai pesaing dengan *billing rate* rendah yang tidak mencerminkan kualitas sehingga menyebabkan penurunan harga pasar dan perubahan nilai kurs yang mempengaruhi siklus kas bisnis enjiniring.

Sedangkan, kendala internal utama terkait dengan kurangnya enjinir yang berpengalaman untuk mendukung perkembangan bisnis. Di samping itu, Perusahaan merupakan pemain baru dalam bisnis EPC dan IPP sehingga belum memiliki pengalaman yang cukup.

Untuk mengatasi kendala-kendala eksternal, Perusahaan telah melakukan strategi strategi antara lain dengan memitigasi risiko, melakukan efisiensi dan penyederhanaan proses bisnis, dan melakukan *currency hedging* yang sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan, untuk mengatasi kendala-kendala internal, telah dilakukan strategi pengembangan system manajemen SDM yang berbasis kompetensi dan melaksanakan program sertifikasi enjinir.

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan proses jangka panjang yang memberikan hasil berupa sustainable values. Aktualisasi GCG sebagai sebuah sistem dilakukan melalui proses internal yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai.

OBSTACLES FACED BY PLN ENJINIRING

The Board of Directors realizes that the performance and achievements that have been achieved by PLN Enjiniring cannot be separated from various obstacles. However, the Company has succeeded in making policy efforts to address the existing constraints so that it does not significantly affect the Company's performance.

The constraints faced by the Company in 2021 come from external and internal parties. External constraints include the Covid-19 Pandemic which has an impact on the company's business, the emergence of a new consulting company as a competitor with a low billing rate that does not reflect quality, causing a decrease in market prices and changes in exchange rates that affect the engineering business cash cycle.

Meanwhile, the main internal constraint is related to the lack of experienced engineers to support business development. In addition, the Company is a new player in the EPC and IPP business so it does not have sufficient experience.

To overcome external constraints, the Company has implemented strategic strategies, among others, by mitigating risks, making efficiency and simplification of business processes, and conducting currency hedging as needed. Meanwhile, to overcome internal constraints, a competency-based HR management system development strategy has been carried out and carried out an engineer certification program.

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) is a long-term process that results in sustainable values. GCG actualization as a system is carried out through an internal process involving the Board of Commissioners, Directors and all employees.

Tujuan dilakukannya GCG adalah peningkatan kinerja dan penciptaan citra perusahaan yang baik. Target skor GCG tahun 2021 ini adalah Real 2020 + 0,5 Poin dan berdasarkan hasil self asesmen GCG PLNE tahun 2021 mencapai skor 91,65. Sehingga capaian Penerapan GCG tahun 2021 ini adalah 101,26%.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Sampai dengan bulan Desember tahun 2021, struktur Direksi PLN Enjiniring tidak mengalami perubahan dengan komposisi seorang sebagai Direktur Utama dan 3 (tiga) orang Direktur. Secara keseluruhan Kepengurusan Direksi sampai dengan tahun 2021, adalah sebagai berikut: Didik Sudarmadi sebagai Direktur Utama, Bernadus Sudarmanta sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha, Martono sebagai Direktur Keuangan dan SDM, dan Muhamad Reza sebagai Direktur Enjiniring.

PENUTUP

Akhir kata, kami atas nama Direksi menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pemerintah, regulator, masyarakat, pemegang saham, pelanggan, mitra usaha serta seluruh pegawai dan keluarga besar PLN Enjiniring atas seluruh dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan. Semoga dengan dukungan tersebut, PLN Enjiniring akan semakin maju mewujudkan kinerja terbaik dan terus berperan dalam mensejahterakan masyarakat.

The purpose of GCG is to improve performance and create a good corporate image. The target for the 2021 GCG score is Real 2020 + 0.5 Points and based on the results of the 2021 PLNE GCG self-assessment it reaches a score of 91.65. So that the achievement of GCG Implementation in 2021 is 101.26%.

CHANGE IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

As of December 2021, the structure of the PLN Enjiniring Board of Directors has not been changed with the composition of one President Director and 3 (three) Directors. The overall Board of Directors management until 2021 is as follows: Didik Sudarmadi as President Director, Bernadus Sudarmanta as Director of Marketing and Business Development, Martono as Director of Finance and Human Resources, and Muhamad Reza as Director of Engineering.

CLOSING

Finally, on behalf of the Board of Directors, we would like to express our appreciation and gratitude to the government, regulators, society, shareholders, customers, business partners and all employees and the extended family of PLN Enjiniring for all the support and trust that have been given. We deliver this report in the hope that PLN Enjiniring will progressively achieve the best performance and continue to play a role in the welfare of the community.

PT Prima Layanan Nasional Enjiniring



DIDIK SUDARMADI
Direktur Utama

PT Prima Layanan Nasional Enjiniring



DIDIK SUDARMADI
President Director

Tanggung Jawab Manajemen Atas Laporan Tahunan 2021

*Management Responsibility On
Annual Report 2021*



Tanggung Jawab Manajemen Atas Laporan Tahunan 2021

Management Responsibility On Annual Report 2021

**Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris
Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2021
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring**

*Letter of Statement of Members of The Board of Commissioners
Responsibility For Annual Report and Consolidated Financial Statements Year 2021
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring*

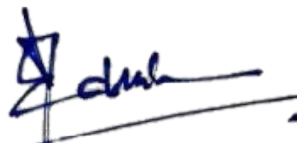
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Prima Layanan Nasional Enjiniring tahun 2021 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Prima Layanan Nasional Enjiniring.

We, the undersigned hereby declare that all information in the Annual Report of PT Prima Layanan Nasional Enjiniring of 2021 has been fully recorded and fully responsible for the accuracy of the contents of PT Prima Layanan Nasional Enjiniring's Annual Report and Consolidated Financial Statements.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
This statement was made with actual.

Jakarta, 29 Juni 2021
Jakarta, June 29, 2021

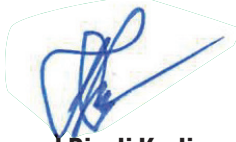
Dewan Komisaris
Boards of Commissioners



Edwin Nugraha Putra
Komisaris Utama
President Commissioner



Edward Siagian
Komisaris
Commissioner



Muhammad Rizali Karliansyah
Komisaris
Commissioner



Hardiv Harris Situmeang
Komisaris
Commissioner

Tanggung Jawab Manajemen Atas Laporan Tahunan 2021

Management Responsibility On Annual Report 2021

**Surat Pernyataan Anggota Dewan Direksi
Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2021
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring**

*Letter of Statement of Members of The Board of Commissioners
Responsibility For Annual Report and Consolidated Financial Statements Year 2021
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring*

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Prima Layanan Nasional Enjiniring tahun 2021 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Prima Layanan Nasional Enjiniring.

We, the undersigned hereby declare that all information in the Annual Report of PT Prima Layanan Nasional Enjiniring of 2021 has been fully recorded and fully responsible for the accuracy of the contents of PT Prima Layanan Nasional Enjiniring's Annual Report and Consolidated Financial Statements.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
This statement was made with actual.

Jakarta, 29 Juni 2021
Jakarta, June 29, 2021

Dewan Direksi
Boards of Commissioners



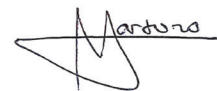
Didik Sudarmadi
Direktur Utama
President Director



Muhamad Reza
Direktur Enjiniring
Engineering Director



Bernadus Sudarmanta
Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha
Director of Marketing and Business Development



Martono
Direktur Keuangan dan SDM
Director of Finance and Human Resources



Profil Perusahaan

The Company Profile



Profil Perusahaan

Company Profile

IDENTITAS PERUSAHAAN

COMPANY IDENTITY

 Nama Perusahaan <i>Name of the Company</i>	PT Prima Layanan Nasional Enjiniring <i>PT Prima Layanan Nasional Enjiniring</i>
 Kantor Pusat <i>Head Office</i>	Menara Enjiniring, Jl. Ciputat Raya No. 123, Kebayoran Lama - Jakarta 12310 Telephone. (62-21) 275 10363, Fax. (62-21) 2751062 <i>Menara Enjiniring, Ciputat Raya Street, No. 123, Kebayoran Lama - Jakarta 12310 Phone. (62-21) 275 10363, Fax. (62-21) 2751062</i>
 Bidang Usaha <i>Business Sector</i>	Enjiniring, pengadaan dan konstruksi, operasi, pemeliharaan pada sektor ketenagalistrikan dan konstruksi, operasi, pemeliharaan pada sektor ketenagalistrikan dan non ketenagalistrikan <i>Engineering, procurement and construction, operation, maintenance in the electricity sector and construction, operation, maintenance in the electricity and non-electricity sectors</i>
 Status Perusahaan <i>Company Status</i>	Entitas anak PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) <i>Entity of Subsidiary of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)</i>
 Kepemilikan <i>Ownership</i>	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 99.90% <i>PT Perusahaan Listrik Negara 99.90%</i> Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN (Persero) 0.1% <i>Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN 0.1%</i>
 Tanggal Pendirian <i>Date of Establishment</i>	3 Oktober 2002 <i>October 3, 2002</i>
Dasar Hukum Pendirian <i>Basic Law of Establishment</i>	Akta Nomor 9 oleh Notaris Haryanto, SH <i>The Deed of Incorporation Number 9 by Haryanto, SH., as a notary in Jakarta</i>
Modal Dasar <i>Authorized Capital</i>	Rp25.000.000.000; <i>Rp25.000.000.000;</i>
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh <i>Issued and Fully Paid Capital</i>	Rp25.000.000.000; <i>Rp25.000.000.000;</i>
Jumlah Karyawan <i>Number of Employees</i>	640 Orang <i>640 employees</i>
Website <i>Website</i>	www.plne.co.id <i>www.plne.co.id</i>

Layanan Informasi
Information Services

Sekretaris Perusahaan
Jalan Ciputat Raya No. 123, Kebayoran Lama - Jakarta 12310
Telp. (62-21) 275 10363
Fax. (62-21) 2751062
Email : contact@plne.co.id
Company's Secretary
Jalan Ciputat Raya No. 123, Kebayoran Lama - Jakarta 12310
Phone. (62-21) 275 10363,
Fax. (62-21) 2751062
Email : contact@plne.co.id

RIWAYAT SINGKAT

PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (untuk selanjutnya disebut dengan PLN Enjiniring atau Perusahaan) merupakan perusahaan terkemuka di bidang konsultasi dan enjiniring. PLN Enjiniring yang merupakan Entitas Anak PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) didirikan berdasarkan akta No.9 tanggal 3 Oktober 2002 oleh Haryanto, SH., notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. C-00184.HT.01.01TH.2003 tanggal 6 Januari 2003 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 19, Tambahan No. 1891 tanggal 7 Maret 2003.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dengan akta No. 55 tanggal 23 Desember 2019 oleh Lenny Janis Ishak, SH., Notaris di Jakarta mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. Perubahan tersebut telah didaftarkan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No.AHU-0012595.AH.01.11 tanggal 21 Januari 2020. Sampai dengan tahun 2020 Perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama.

BIDANG USAHA

■ Kegiatan usaha menurut Anggaran Dasar

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang :

BRIEF HISTORY

PT Prima Jasa Nasional Engineering (hereinafter referred to as PLN Enjiniring or the Company) is a leading company in the consulting and engineering sector. PLN Enjiniring which is a subsidiary of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) was established based on deed No.9 dated October 3, 2002 by Haryanto, SH., a notary in Jakarta. The deed of establishment has been approved by the Minister of Justice and Human Rights in Decree No. C-00184.HT.01.01TH.2003 dated January 6, 2003 and announced in the State Gazette No. 19, Supplement No. 1891 dated March 7, 2003. The Company's Articles of Association have been amended several times. The latest amendment by deed No. 55 dated December 23, 2019 by Lenny Janis Ishak, SH., Notary in Jakarta regarding the Amendment to the Company's Articles of Association. The change has been registered with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Letter No.AHU-0012595.AH.01.11 dated January 21, 2020. Until 2020, the Company has never changed its name.

LINE OF BUSINESS

■ Business activities according to the Articles of Association

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the aims and objectives of the Company are to do business in the fields of:

1. Menyelenggarakan usaha enjiniring , pengadaan dan konstruksi, operasi, pemeliharaan pada sektor ketenagalistrikan dan non ketenagalistrikan;
2. Menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
3. Melaksanakan penugasan dari Pemegang Saham Mayoritas dalam rangka menunjang/ mendukung kegiatan usaha Pemegang Saham dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Kepatutan serta Etika Bisnis pada Perseroan Terbatas;

1. *Carrying out engineering, procurement and construction, operation, maintenance businesses in the electricity and non-electricity sectors;*
2. *Organizing an electricity business based on sound industrial and commercial principles by applying the principles of a Limited Liability Company;*
3. *Carry out assignments from the Majority Shareholders in order to support/support the business activities of Shareholders by applying the principles of Good Corporate Governance and Property and Business Ethics in Limited Liability Companies;*

KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN

Kegiatan usaha yang berjalan saat ini dikelompokkan ke dalam tiga bidang usaha, yaitu :

■ Jasa Enjiniring

Jasa Enjiniring berupa jasa konsultansi enjiniring di industri ketenagalistrikan meliputi bidang Pembangkit, Transmisi dan Distribusi, serta jasa supervisi Konstruksi.

■ Jasa Non Enjiniring

Jasa Non Enjiniring berupa penyediaan jasa kompresi gas, bisnis Engineering, Procurement, Construction (EPC), bisnis manufaktur Material Transmisi Utama (MTU), serta bisnis Independent Power Producer (IPP).

PRODUK/JASA YANG DIHASILKAN

PT PLN Enjiniring memiliki 3 produk dan jasa yang dihasilkan oleh bidang pembangkitan, bidang transmisi & distribusi dan bidang konstruksi. Penjelasan lebih lanjut terkait jenis-jenis produk dan jasa terdapat pada Tabel produk dan jasa yang dihasilkan.

TABEL PRODUK DAN JASA YANG DIHASILKAN TABLE OF PRODUCTS AND SERVICE PRODUCED

Pembangkitan <i>Generation</i>	Transmisi dan Distribusi <i>Transmission and Distribution</i>	Konstruksi <i>Construction</i>
Studi Kelayakan <i>Feasibility Study</i>	Survey	Supervisi Konstruksi <i>Construction Supervision</i>
Penyelidikan Tanah <i>Soil Investigation</i>	Penyelidikan Tanah <i>Soil Investigation</i>	Pengawasan QA/QC <i>QA/QC Supervision</i>
Penyusunan Request for Proposal <i>Preparation of Request for Proposal</i>	Penyusunan Basic Design <i>Basic Design Arrangement</i>	
Pembuatan Harga Perkiraan Enjinir <i>Engineer's Estimate Price</i>	Pembuatan Harga Perkiraan Enjinir <i>Engineer's Estimate Price</i>	
Pendampingan dalam Proses Tender <i>Procurement Assistance</i>	Pendampingan dalam Proses Tender <i>Procurement Assistance</i>	

BUSINESS ACTIVITIES UNDERTAKEN

The business activities currently running are grouped into three business major, namely:

■ Engineering Services

Engineering services in the form of engineering consultant services in electricity industry covering the fields of Power Plant, Transmission and Distribution, as well as construction supervision services.

■ Non Engineering Service

Non-engineering services include the provision of gas compression services, the Business Engineering, Procurement, Construction (EPC), manufacture business, the Main Transmission Material (MTU) manufacture, and the Independent Power Producer (IPP).

PRODUCTS / SERVICES PRODUCED

PT PLN Enjiniring has 3 products and services produced by the generation, transmission & distribution and construction sectors. Further explanation regarding the types of products and services contained in the table of products and services produced.

Pendampingan dalam proses Contract Discussion Agreement <i>Assistance in the Contract Discussion Agreement process</i>	Pendampingan dalam proses Contract Discussion Agreement <i>Assistance in the Contract Discussion Agreement process</i>
Review Desain <i>Design Review</i>	Review Desain <i>Design Review</i>
Pengawasan QA/QC <i>QA/QC Supervision</i>	Pengawasan QA/QC <i>QA/QC Supervision</i>
Studi AMDAL dan UKL/UPL <i>Study of AMDAL and UKL/UPL</i>	Pendampingan dalam Due Diligent Visit <i>Assistance in Due Diligent Visit</i>
	Studi Sistem Ketenagalistrikan <i>Study of Electricity System</i>
	Studi AMDAL dan UKL/UPL <i>Study of AMDAL and UKL/UPL</i>
	Studi Lainnya <i>Other Studies</i>

JASA ENJINIRING TERINTEGRASI

Jasa non enjiniring meliputi pembangunan Transmisi dan Gardu Induk melalui Anak Perusahaan EPC, penyediaan Material Transmisi Utama (MTU) yang terdiri dari *Circuit Breaker, Current Transformer, Capacitor Voltage Transformer, Lightning Arrester* melalui perusahaan *joint venture*, dan bisnis *Independent Power Producer (IPP)* melalui perusahaan afiliasi/kepemilikan saham.

JASA LAINNYA

Jasa lainnya meliputi Bidang Informasi dan Teknologi

INTEGRATED ENGINEERING SERVICES

Non-engineering services include the Transmission and Substation construction through EPC Subsidiaries, provision of Main Transmission Material (MTU) consisting of Circuit Breakers, Current Transformers, Capacitor Voltage Transformers, Lightning Arrester through joint venture companies, and Independent Power Producer (IPP) business through company through affiliate/share owned.

OTHER SERVICES

Other services include the Information and Technology Sector.



GAS SCRUBBER
13-V-002

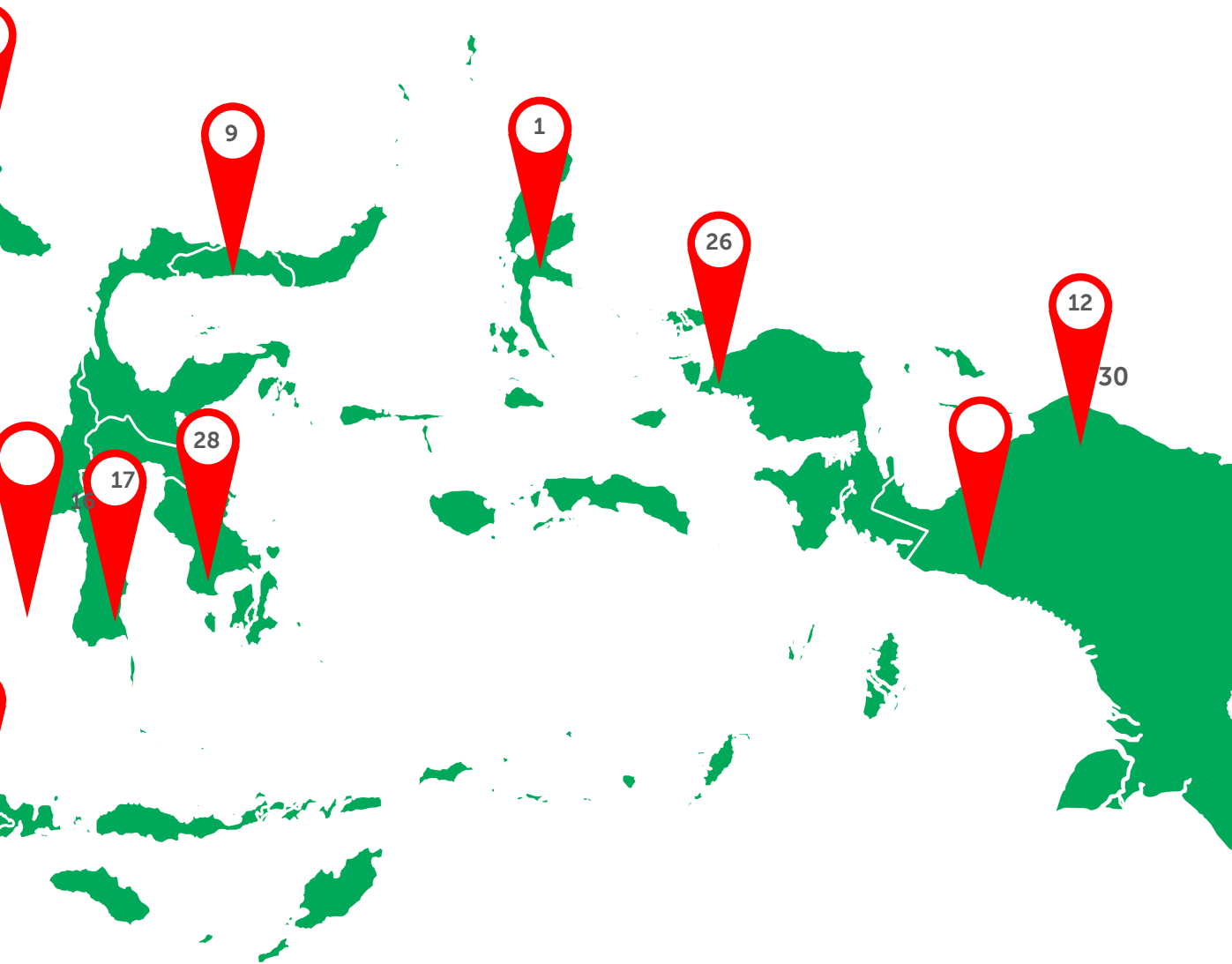
FILTER
COALE
14-V-

Peta Lokasi Proyek

Project Location Map



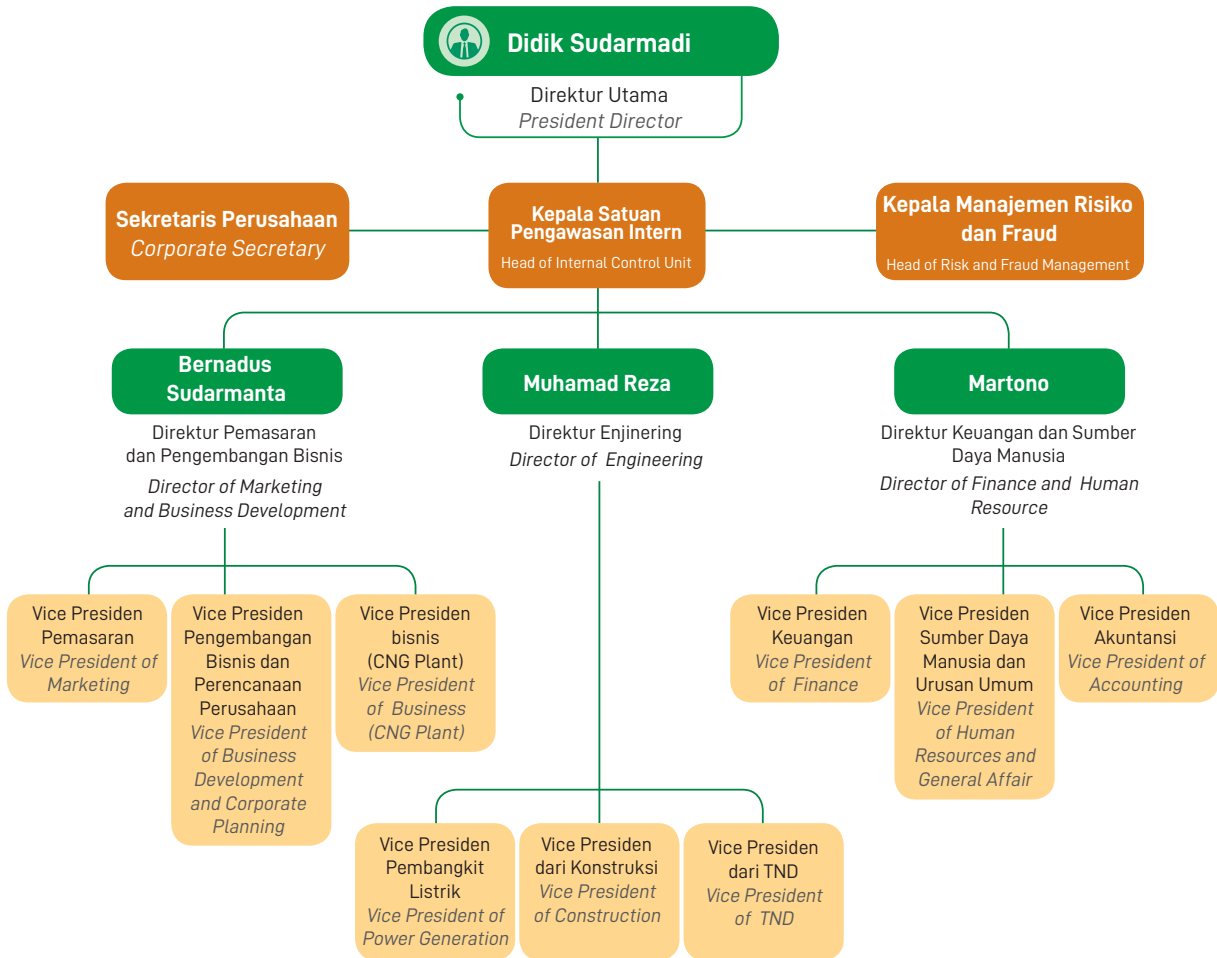
1. Ambon, Maluku
2. Arun, NAD
3. Balikpapan, Kalimantan Timur
4. Bandung, Jawa Barat
5. Bangka Belitung
6. Bangkanai, Kalimantan Tengah
7. Batam
8. Cilegon, Banten
9. Gorontalo, Sulawesi
10. Grati, Jawa Timur
11. Jakarta
12. Jayapura, Papua
13. Kalimantan Barat
14. Kotabaru, Kalimantan
15. Lampung
16. Makassar



- 17. Maros, Sulawesi Selatan
- 18. Medan, Sumatera Utara
- 19. Nagan Raya, NAD
- 20. Nias, Sumatera Utara
- 21. Padang Sidempuan, Sumatera Utara
- 22. Pangkalan Susu, Sumatera Utara
- 23. Pamaron, Bali
- 24. Peranap, Riau
- 25. Siberida, Kepulauan Riau
- 26. Sorong, Papua
- 27. Sumedang, Jawa Barat
- 28. Takalar, Sulawesi
- 29. Tarakan
- 30. Timika, Papua
- 31. Yogyakarta
- 32. NTT

Struktur Organisasi

Organization Structure



VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN

VISION, MISSION AND COMPANY CULTURE

VISI

Menjadi Perusahaan Konsultan Enjiniring Terintegrasi yang Terkemuka se Asia Tenggara dan Pilihan No. 1 Pelanggan

MISI

Memberikan pelayanan prima:

1. Menyediakan solusi enjiniring terintegrasi dibidang ketenagalistrikan dengan melakukan optimasi efisiensi biaya secara keseluruhan bagi Pemberi Kerja.
2. Menyediakan jasa enjiniring, jasa enjiniring untuk pengadaan serta jasa enjiniring untuk konstruksi yang terkemuka dan memiliki keunggulan daya saing.
3. Meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.

TATA NILAI PERUSAHAAN

PLN Enjiniring menanamkan nilai-nilai budaya yang kuat dalam menjalin hubungan yang berkesinambungan dengan para pemangku kepentingan. Hal ini tidak lepas dari tata nilai budaya Perusahaan yang disebut AKHLAK.

- 1. Amanah**, yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
Panduan perilaku tata nilai Amanah :
 - a. Memenuhi janji dan komitmen
 - b. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan
- 2. Kompeten**, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
Panduan perilaku tata nilai Kompeten :
 - a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
 - b. Membantu orang lain belajar
 - c. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik
- 3. Harmonis**, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan.
Panduan perilaku tata nilai Harmonis :

VISION

To become Southeast Asia's Leading Integrated Engineering Consultant Company and No.1 Choice of Customer.

MISSION

Provide excellent service:

- 1. Providing integrated engineering solutions in the electricity sector by optimizing overall cost efficiency for Employers.*
- 2. Providing engineering services, engineering services for procurement and engineering services for construction that are leading and have competitive advantages.*
- 3. Increase customer satisfaction and loyalty.*

THE COMPANY'S CULTURE

PLN Enjiniring instills strong cultural values in establishing sustainable relationships with stakeholders. This is inseparable from the Company's cultural values, which are called AKHLAK.

- 1. Amanah**, namely holding fast to the trust given.
Amanah value code behavior guidelines:
 - a. Fulfill promises and commitments*
 - b. Responsible for tasks, decisions and actions taken*
- 2. Kompeten**, that is, continue to learn and develop capabilities
Competent values behavior guidelines:
 - a. Improve self-competence to respond to ever-changing challenges*
 - b. Helping others learn*
 - c. Complete tasks with the best quality*
- 3. Harmonious**, namely caring for and respecting differences.
Harmonious values behavior guide:



- a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- b. Suka menolong orang lain
- c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif

4. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara

Panduan perilaku tata nilai Loyal :

- a. Menjaga nama baik sesama karyawan, Pimpinan, BUMN dan Negara
- b. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar
- c. Patuh kepada Pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

4. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.

Panduan perilaku tata nilai Adaptif :

- a. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik
- b. Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi
- c. Bertindak proaktif

4. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

Panduan perilaku tata nilai Kolaboratif :

- a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- b. Terbuka untuk bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan Bersama

- a. *Respect everyone regardless of background*
- b. *Likes to help others*
- c. *Build a conducive work environment*

4. Loyal, namely being dedicated and prioritizing the interests of the Nation and the State

Loyal values behavior guide :

- a. *Maintaining the good name of fellow employees, leaders, SOEs and the State*
- b. *Willing to sacrifice to achieve a bigger goal*
- c. *Obey the leadership as long as it is not against the law and ethics.*

5. Adaptive, namely continuing to innovate and enthusiastic in moving or facing change.

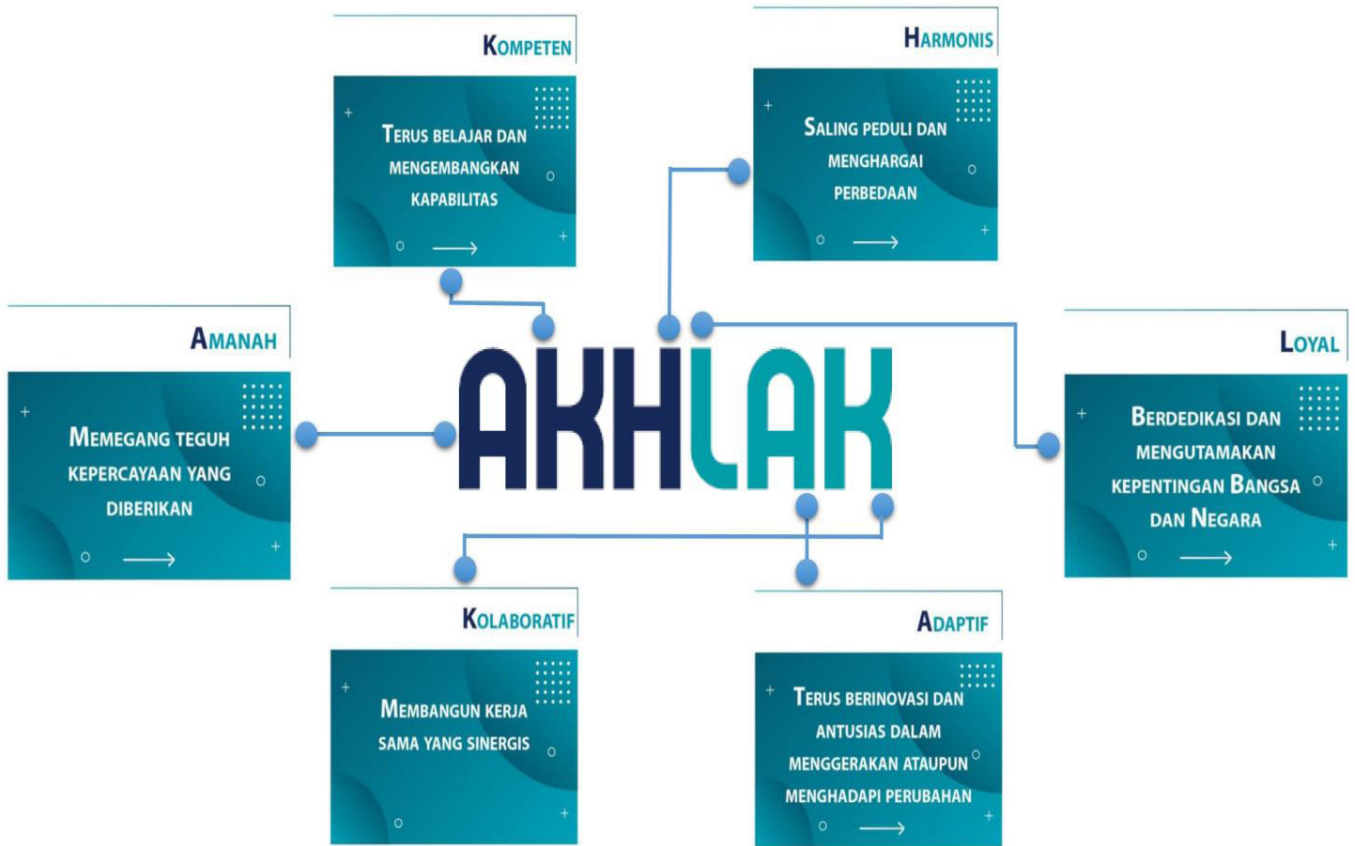
Adaptive values behavior guide:

- a. *Quickly adapt to be better*
- b. *Continuously making improvements following technological developments*
- c. *Act proactive*

4. Collaborative, namely building synergistic cooperation.

Collaborative values behavior guidelines:

- a. *Provide opportunities for various parties to contribute*
- b. *Open to work together to generate added value*
- c. *Mobilize the use of various resources for common goals*



Profil Dewan Komisaris

Profile of the Board of Commissioners



Ahmad Rofik

KOMISARIS UTAMA PRESIDENT COMMISSIONER

Warga Negara Indonesia, lahir pada Desember 1967. Berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Komisaris Utama PT PLN Enjiniring sejak 08 Desember 2020. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara pada PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada Desember 2019 – Mei 2020, Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua pada PT PLN (Persero) PT PLN (Persero) pada Agustus 2017 – Desember 2019. Menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Teknik Mesin di Universitas Indonesia pada tahun 1986, dan saat ini meneruskan Pendidikan S3 Manajemen Pemasaran Usakti.

Indonesian citizen, born in December 1967. Domiciled in Jakarta. Served as President Commissioner of PT PLN Enjiniring since December 08, 2020. Previously Served as an Regional Business Director of Maluku, Papua and Nusa Tenggara at PT PLN (Persero) Head Office in December 2019 – May 2020, Regional Business Director of Maluku and Papua at PT PLN (Persero) PT PLN (Persero) in August 2017 – December 2019. He Completed his Education at the Faculty of Mechanical Engineering at the University of Indonesia in 1986 and is currently continuing his Doctoral Education in Marketing Management at Usakti.

Riwayat Dasar Pengangkatan

- RUPS Sirkuler Pengangkatan tanggal 08 Desember 2020
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 05 tanggal 09 Maret 2021

Special assignment: -

Basic History of Appointment:

- Appointment by General Meeting of Shareholders on December 08, 2020
- Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 05 dated March 09, 2021



Edward Siagian

KOMISARIS COMMISSIONER

Warga Negara Indonesia, lahir pada Januari 1960. Berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Komisaris PT PLN Enjiniring sejak 08 Desember 2020. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Expert Pengendalian Proyek (TK) pada (Tugas Karya ke PT PLN Enjiniring) PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada tahun 2014 – 2016, Senior Specialist I Pengendalian Proyek (TK) pada (Tugas Karya PT PLN Enjiniring) PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada tahun 2010 – 2014.

Menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Teknik Tenaga Listrik di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1982, kemudian melanjutkan Pendidikan S2 Bidang Manajemen di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1997.

Riwayat Dasar Pengangkatan :

- RUPS Sirkuler Pengangkatan tanggal 08 Desember 2020
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 05 tanggal 09 Maret 2021

Basic History of Appointment:

- Appointment by General Meeting of Shareholders on 08 December 2020
- Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 05 dated March 09, 2021

Indonesian citizen, born in January 1960. Domiciled in Jakarta. Served as Commissioner of PT PLN Enjiniring since December 08, 2020. Previously he had experience as an Project Control Expert (TK) at (work assignment at PT PLN Enjiniring) PT PLN (Persero) Head Office in 2014 – 2016, Senior Specialist I Project Control (TK) at (work assignment at PT PLN Enjiniring) PT PLN (Persero) Head Office in 2010 – 2014.

Graduated from the Faculty of Electrical Engineering at the Bandung Institute of Technology (IRB) in 1982, then continued his Masters in Management at the Bandung Institute of Technology (ITB) in 1997.



Muhammad Rizali Karlansyah

KOMISARIS COMMISSIONER

Warga Negara Indonesia, lahir pada Maret 1961. Berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Komisaris PT PLN Enjiniring sejak 19 Februari 2021. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015 – 2021, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2010 – 2015, dan Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran Pertambangan, Energi dan Migas di Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2007 – 2010.

Menyelesaikan Pendidikan S1 Biologi di Universitas Indonesia pada tahun 1985, kemudian menyelesaikan Pendidikan S2 Ilmu Lingkungan di Universitas Indonesia pada tahun 1989.

Indonesian citizen, born in March 1961. Domiciled in Jakarta. Served as Commissioner of PT PLN Enjiniring since February 19, 2021. Previously he had experience as Director General of Environmental Pollution and Damage Control at the Ministry of Environment and Forestry in 2015 – 2021, Deputy for Environmental Pollution Control at the Ministry of Environment in 2010 – 2015, and Assistant Deputy for Environmental Affairs Mining, Energy and Oil and Gas Pollution Control at the Ministry of Environment 2007 – 2010.

Completed his Bachelor of Biology at the University of Indonesia in 1985, then completed his Masters in Environmental Science at the University of Indonesia in 1989.

Riwayat Dasar Pengangkatan :

- RUPS Sirkuler Pengangkatan tanggal 19 Februari 2021
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 05 tanggal 09 Maret 2021

Basic History of Appointment:

- Appointment by General Meeting of Shareholders on February 19, 2021
- Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 05 dated March 09, 2021



Hardiv Harris Situmeang

KOMISARIS INDEPENDEN INDEPENDENT COMMISSIONER

Warga Negara Indonesia, lahir pada Mei 1953. Berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Komisaris Independen PT PLN Enjiniring sejak 15 Maret 2021. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Ahli Utama di PT PLN (Persero) dari tahun 2003, Direktur Perencanaan PT PLN (Persero) tahun 2001 dan Direktur Perencanaan PT PLN (Persero) tahun 1998.

Menyelesaikan Pendidikan S1 Teknik Tenaga Listrik di Institut Teknologi Bandung tahun 1976, Pendidikan S2 Electrical Engineering di Union College, Schenectady, New York tahun 1985, dan menyelesaikan S3 System Science & Mathematics di Washington University tahun 1993.

Indonesian citizen, born in Mei 1953. Domiciled in Jakarta. Served as Commissioner of PT PLN Enjiniring since March 15, 2021. Previously he had experience as a Principal Expert at PT PLN (Persero) from 2003, Planning Director at PT PLN (Persero) in 2001 and Planning Director at PT PLN (Persero) in 1998.

He completed his Bachelor's Degree in Electrical Engineering at the Bandung Institute of Technology in 1976, Master's Degree in Electrical Engineering at Union College, Schenectady, New York in 1985, and completed his Doctoral Degree in System Science & Mathematics at Washington University in 1993.

Riwayat Dasar Pengangkatan :

- RUPS Sirkuler Pengangkatan tanggal 23 Maret 2021
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 02 tanggal 05 April 2021
- RUPS Sirkuler Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tanggal 25 November 2021
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 30 tanggal 30 November 2021

Basic History of Appointment:

- Appointment by General Meeting of Shareholders on March 15, 2021
- Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 02 dated April 05, 2021
- Circular GMS Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners on November 25, 2021
- Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 30 dated November 30, 2021

Profil Dewan Komisaris

Profile of the Board of Commissioners

PERIODE PENGANGKATAN 30 DESEMBER 2021 – SEKARANG

APPOINTMENT PERIOD DECEMBER 30, 2021 - PRESENT



Edwin Nugraha Putra

KOMISARIS UTAMA PRESIDENT COMMISSIONER

Warga Negara Indonesia, lahir pada Juli 1969. Berdomisili di Denpasar. Menjabat sebagai Komisaris Utama PT PLN Enjiniring sejak 30 Desember 2021. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Executive Vice President Electricity System Planning pada Direktorat Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat tahun 2020 – 2021, Senior Specialist I Pengembangan Regional pada Divisi Pengembangan Regional Jawa Bagian Tengah Direktorat Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN (Persero) Kantor Pusat tahun 2019 – 2020, General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pusat Pengatur Beban tahun 2019, General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah tahun 2018 – 2019, serta General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah pada tahun 2017 – 2018.

Menyelesaikan Pendidikan S1 Listrik di Universitas Sumatera Utara pada tahun 1994, kemudian melanjutkan Pendidikan S2 Bidang Informatika di University of Abertay Dundee Inggris pada tahun 2007.

Indonesian citizen, born in July 1969. Domiciled in Denpasar. Served as President Commissioner of PT PLN Enjiniring since December 30, 2021. Previously he had experience as Executive Vice President Electricity System Planning at the Directorate of Corporate Planning of PT PLN (Persero) Head Office 2020 – 2021, Senior Specialist I Regional Development at the Regional Development Division of Java Section Central Directorate of Central Java Regional Business PT PLN (Persero) Head Office 2019 – 2020, General Manager of PT PLN (Persero) Main Unit Load Control Center in 2019, General Manager of PT PLN (Persero) Central Java Transmission Main Unit 2018 – 2019, as well as the General Manager of PT PLN (Persero) Central Java Transmission Main Unit in 2017 – 2018.

Completed his Bachelor's Degree in Electrical at the University of North Sumatra in 1994, then continued his Master's Degree in Information Technology at the University of Abertay Dundee, England in 2007.

Riwayat Dasar Pengangkatan

- RUPS Sirkuler Pengangkatan tanggal 30 Desember 2021

Special assignment: -

Basic History of Appointment:

- RUPS Appointment of Circular on December 30, 2021

Profil Direksi

Profile of the Board of Directors



Didik Sudarmadi

DIREKTUR UTAMA
PRESIDENT DIRECTOR

Warga Negara Indonesia, lahir pada Januari 1969. Berdomisili di Depok. Menjabat sebagai Direktur Utama PT PLN Enjiniring sejak 19 Februari 2021. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Executive Vice President Pengembangan Regional Jawa Bagian Barat pada Direktorat Bisnis Regional Jawa Bagian Barat PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada tahun 2019 - 2021, General Manager PT PLN (Persero) Pusat Enjiniring Ketenagalistrikan pada tahun 2017 - 2019, General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku pada tahun 2016 - 2017.

Menyelesaikan pendidikan S1 Listrik di Institut Teknologi Bandung tahun 1993 dan menyelesaikan pendidikan S2 Bidang Kelistrikan di Delft University of Technology, Netherlands tahun 1999.

Indonesian citizen, born in January 1969. Domiciled in Depok. Served as President Director of PT PLN Enjiniring since February 19, 2021. Previously he had experience as Executive Vice President of West Java Regional Development at the West Java Regional Business Directorate PT PLN (Persero) Head Office in 2019 - 2021, General Manager of PT PLN (Persero) Electricity Engineering Center in 2017 - 2019, General Manager of PT PLN (Persero) Maluku Development Main Unit in 2016 - 2017.

Completed his Bachelor of Electrical education at the Bandung Institute of Technology in 1993 and completed his Master's Degree in Electrical at Delft University of Technology, Netherlands in 1999.

Riwayat Dasar Pengangkatan

- RUPS Pengangkatan tanggal 19 Februari 2021
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 13 tanggal 23 Februari 2021

Special assignment: -

Basic History of Appointment:

- *Appointment by General Meeting of Shareholders on February 19, 2021*
- *Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 13 dated February 23, 2021*



Martono

DIREKTUR ENJINIRING DIRECTOR OF ENGINEERING

Warga Negara Indonesia, lahir pada Mei 1970. Berdomisili di Depok. Menjabat sebagai Direktur Keuangan dan SDM PT PLN Enjiniring sejak 19 Februari 2021. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Vice Presiden Anggaran III Pada Divisi Anggaran Direktorat Keuangan PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada tahun 2018-2021, Manajer Senior Anggaran III pada Divisi Anggaran Direktorat Keuangan PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada tahun 2016-2018, Manajer Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia pada PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan III pada tahun 2013-2015.

Menyelesaikan pendidikan D3 Manajemen Bisnis di Politeknik UI pada tahun 1994 dan menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen Keuangan di UNIBA pada tahun 2008.

Indonesian citizen, Born in May 1970. Domiciled in Depok. Served as Director of Finance and Human Resources of PT PLN Enjiniring since February 19, 2021. Previously he had experience as Vice President of Budget III at the Budget Division of the Directorate of Finance of PT PLN (Persero) Head Office in 2018-2021, Senior Manager of Budget III at the Budget Division of the Directorate of Finance of PT PLN (Persero) Head Office in 2016-2018, Manager of Finance and Resources Humans at PT PLN (Persero) Parent Development Unit III in 2013-2015.

He completed his associate degree in Business Management education at the UI Polytechnic in 1994 and completed his Bachelor's degree in Financial Management at UNIBA in 2008.

Riwayat Dasar Pengangkatan :

- RUPS Pengangkatan tanggal 19 Februari 2021
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 13 tanggal 23 Februari 2021

Basic History of Appointment:

- Appointment by General Meeting of Shareholders on dated February, 2021
- Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 13 dated February 23, 20121



Bernadus Sudarmanta

DIREKTUR PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN USAHA *DIRECTOR OF MARKETING AND BUSINESS DEVELOPMENT*

Warga Negara Indonesia, lahir pada September 1968. Berdomisili di Tangerang. Menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT PLN Enjiniring sejak 19 Februari 2021. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Komisaris Utama di PT Rekadaya ElektriKA Consult pada tahun 2017-2020, Direktur Utama di PT Pembangkit Jawa Bali Investasi pada tahun 2016-2017, General Manajer PT PLN SUMBAGUT pada tahun 2015.

Menyelesaikan Pendidikan S1 Mesin di Institut Teknologi Sepuluh November pada tahun 1991 dan menyelesaikan Pendidikan S2 Bidang Manajemen di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2002.

Riwayat Dasar Pengangkatan :

- RUPS Pengangkatan tanggal 19 Februari 2021
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 13 tanggal 23 Februari 2021

Basic History of Appointment:

- Appointment by General Meeting of Shareholders on February 19, 2021
- Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 13 dated February 23, 2021

Indonesian citizen, born in September 1968. Domiciled in Tangerang. Served as Director of Marketing and Business Development of PT PLN Enjiniring since February 19, 2021. Previously he had experience as President Commissioner at PT Rekadaya ElektriKA Consult in 2017-2020, President Director at PT Pembangkit Jawa Bali Investasi in 2016-2017, General Manager at PT PLN SUMBAGUT in 2015

He completed his Bachelor of Mechanical Education at the Sepuluh November Institute of Technology in 1991 and completed his Master's Degree in Management at the Bandung Institute of Technology in 2002.



Muhamad Reza

DIREKTUR KEUANGAN DAN SDM DIRECTOR OF FINANCE AND HUMAN RESOURCES

Warga Negara Indonesia, lahir pada November 1974. Berdomisili di Bandung. Menjabat sebagai Direktur Enjiniring PT PLN Enjiniring sejak 20 September 2021. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Dosen di Telkom University, Bandung pada tahun 2016 - 2021; Dosen di Peradaban University, Jawa Tengah pada tahun 2017 - 2021, Technical Expert, Business Development & Business Line Manager Power System, Advisory & Advanced Analytics di Tractebel Engineering Indonesia pada tahun 2019 - 2021; Business Development Manager, Power System Specialist & Country Representative di Solvina International, Göteborg-Sweden pada tahun 2016 - 2016; Business Development Manager, Power System Specialist & Country Representative di Solvina International, Jakarta-Indonesia pada tahun 2016 - 2019; Group Manager System Design Studies Power Systems FACTS di ABB Sweden, Västerås pada tahun 2006 - 2016; Delft : Research Assistant at Electrical Power System Laboratory di Delft University of Technology Netherlands pada tahun 2012 - 2006.

Menyelesaikan pendidikan S1 Electrical Engineering di Institut Teknologi Bandung tahun 1997, menyelesaikan pendidikan S2 Electrical Engineering di Delft University of Technology, Netherlands tahun 2000, serta menyelesaikan pendidikan S3 Electrical Power Systems di Delft University of Technology, Netherlands tahun 2006.

Indonesian citizen, born in November 1974. Domiciled in Bandung. Served as Engineering Director of PT PLN Enjiniring since September 20, 2021. Previously he had experience as a Lecturer at Telkom University, Bandung in 2016 - 2021; Lecturer at Peradaban University, Central Java in 2017 - 2021, Technical Expert, Business Development & Business Line Manager Power System, Advisory & Advanced Analytics at Tractebel Engineering Indonesia in 2019 - 2021; Business Development Manager, Power System Specialist & Country Representative at Solvina International, Göteborg-Sweden 2016 - 2016; Business Development Manager, Power System Specialist & Country Representative at Solvina International, Jakarta-Indonesia in 2016 - 2019; Group Manager System Design Studies Power Systems FACTS at ABB Sweden, Västerås 2006 - 2016; Delft : Research Assistant at Electrical Power System Laboratory at Delft University of Technology Netherlands in 2012 - 2006.

He Completed his Bachelor of Electrical Engineering at the Bandung Institute of Technology in 1997, completed his Master's Degree in Electrical Engineering at Delft University of Technology, Netherlands in 2000, and completed his Doctoral Education in Electrical Power Systems at Delft University of Technology, Netherlands in 2006.

Riwayat Dasar Pengangkatan :

- RUPS Pengangkatan tanggal 20 September 2021
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 40 tanggal 29 September 2021

Basic History of Appointment:

- Appointment by General Meeting of Shareholders on September 20, 2021
- Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 40 dated September 29, 2021

Profil Pejabat Eksekutif

Profile of Executive Officers

■ FAJAR SUROYO

Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak September 2021. Sebelumnya pernah menjabat sebagai PLT General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan (2018-2020) dan PLT Manajer UPK Kalimantan Barat PT PLN (Persero) Regional Kalimantan Indonesia Bagian Tengah. Menyelesaikan Pendidikan S1 Teknik Sipil dari Universitas Diponegoro Semarang, S2 Bidang Manajemen Bisnis Administration dari Universiti Tenaga Nasional Malaysia dan S3 Universitas Padjadjaran DMB UNPAD Bandung.

■ FAJAR SUROYO

Corporate Secretary

Indonesian citizens. Served as Corporate Secretary since September 2021. Previously served as PLT General Manager of PT PLN (Persero) Southern Sumatra Development Main Unit (2018-2020) and PLT Manager of West Kalimantan UPK PT PLN (Persero) Central Kalimantan Indonesia Region. Completed Bachelor's Degree in Civil Engineering from Diponegoro University Semarang, Master's Degree in Business Administration from Universiti Tenaga Nasional Malaysia and Doctoral Degree from Padjadjaran University DMB UNPAD Bandung.

■ RUNGGUN FREDO AMARTA

Kepala Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu dan Risiko

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Kepala Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu dan Risiko sejak April 2020, sebelumnya menjabat sebagai Manajer Unit Pelaksana Produksi & Workshop III pada PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan (2016 – 2020). Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Mesin dari Universitas Indonesia dan S2 Administrasi Bisnis dari Universiti Tenaga Nasional, Malaysia.

■ RUNGGUN FREDO AMARTA

Head of Procurement, Quality and Risk Management Unit

Indonesian citizens. Served as Head of Procurement Unit, Quality and Risk Management since April 2020, Previously served as Production & Workshop III Implementation Unit Manager at PT PLN (Persero) Electricity Maintenance Center (2016 – 2020). Obtained his Bachelor degree in Mechanical Engineering from University of Indonesia and Master of Business Administration from Universiti Tenaga Nasional, Malaysia.

■ IZHAR SYAFRIL

Kepala Satuan Pengawasan Internal

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern sejak Juli 2019, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Satuan Audit Internal PT PLN (Persero) Kantor Pusat Tahun 2019 dan menjabat sebagai Group Head Audit Maluku Papua pada tahun 2018. Menamatkan pendidikan D3 Mesin Universitas Sriwijaya dan S1 Teknik Mesin di Universitas Taman Siswa Palembang.

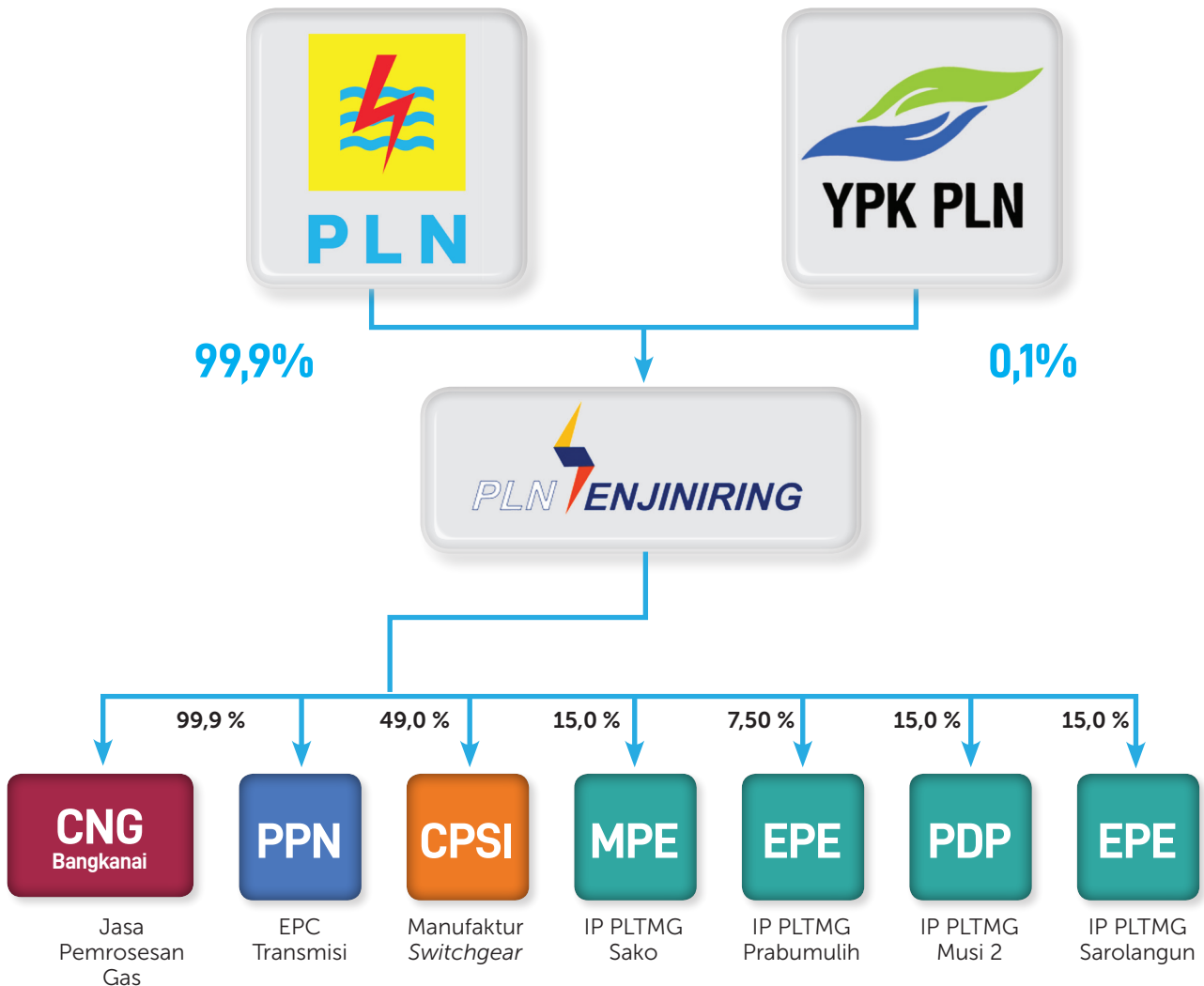
■ IZHAR SYAFRIL

Head of Internal Supervision Unit

Indonesian citizen, 52 years old. Served as Head of the Internal Supervision Unit since July 2019. Previously he served as Head of Internal Audit Unit of PT PLN (Persero) at Head Office 2019 and serves as Group Head Audit for Maluku Papua on March 2018. Graduated from associate degree in Mechanical Engineering at Sriwijaya University and Bachelor's Education in Mechanical Engineering at Taman Siswa University Palembang.

Struktur Korporasi

Corporate Structure



- Unit Usaha**
- Anak Perusahaan**
- Joint Venture Company**
- Afiliasi/Penyertaan Saham**

CNG Bangkanai : Compressed Natural Gas Bangkanai
 PPN : PT Prima Power Nusantara
 CPSI : PT Crompton Power Switchgear Indonesia
 MPE : PT Multidaya Prima Elektrindo
 EPE : PT Energi Prima ElektriKa
 PDP : PT Putra Daya Prima
 PPE : PT Permata Prima Elektrindo

KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM

CHRONOLOGY OF REGISTERED SHARES

PLN Enjiniring merupakan badan usaha *non listed* yang belum melakukan pencatatan saham.
PLN Enjiniring is a non-listed business entity that has not yet registered the shares.

KRONOLOGI PENCATATAN EFEK LAINNYA

CHRONOLOGY OF OTHER SECURITIES REGISTERS

PLN Enjiniring belum melakukan pencatatan efek lainnya.
PLN Enjiniring has not yet registered the other securities.

DAFTAR ENTITAS ANAK DAN/ENTITAS ASOSIASI

LIST OF SUBSIDIARY COMPANIES AND/OR ASSOCIATED ENTITIES

TABEL ENTITAS ANAK DAN ASOSIASI

TABLE OF SUBSIDIARIES AND ASSOCIATIONS

Nama Perusahaan	Kepemilikan Saham	Bidang Usaha	Status Operasi	Kedudukan
<i>Name of Company</i>	<i>Stock Ownership</i>	<i>Business Fields</i>	<i>Operational Status</i>	<i>Position</i>
Entitas Anak				
<i>Subsidiary Entity</i>				
PT Prima Power Nusantara	99,9%	Investasi, operasi dan pemeliharaan pembangkit, Engineering Procurement and Construction (EPC) Transmisi dan Gardu Induk Tenaga Listrik, oil dan gas serta penyediaan peralatan pendukung dalam bidang ketenagalistrikan <i>Investment, Operation and Generation Maintenance, Engineering Procurement and Construction (EPC) of Electric Power Transmission and Substation, Oil and Gas and the provision of supporting equipment in the electricity sector</i>	Beroperasi Operating	Jakarta
Entitas Asosiasi				
<i>Associated Entities</i>				
PT Energi Prima ElektriKA	7,5%	Pembangkit <i>Generator</i>	Beroperasi <i>Operating</i>	Jakarta Selatan
PT Pura Daya Prima	15,0%	Pembangkit <i>Generator</i>	Beroperasi <i>Operating</i>	Jakarta
PT Multidaya Prima Elektrindo	15,0%	Pembangkit <i>Generator</i>	Beroperasi <i>Operating</i>	Jakarta Selatan
PT Permata Prima Elektrindo	15,0%	Pembangkit <i>Generator</i>	Beroperasi <i>Operating</i>	Jakarta
PT Crompton Prima Switchgear Indonesia	49,0%	Industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik <i>Industrial electric control and distribution equipment</i>	Beroperasi Operating	Jakarta Selatan

Profil Anak Perusahaan

Table of Subsidiaries and Associations

PT PRIMA POWER NUSANTARA

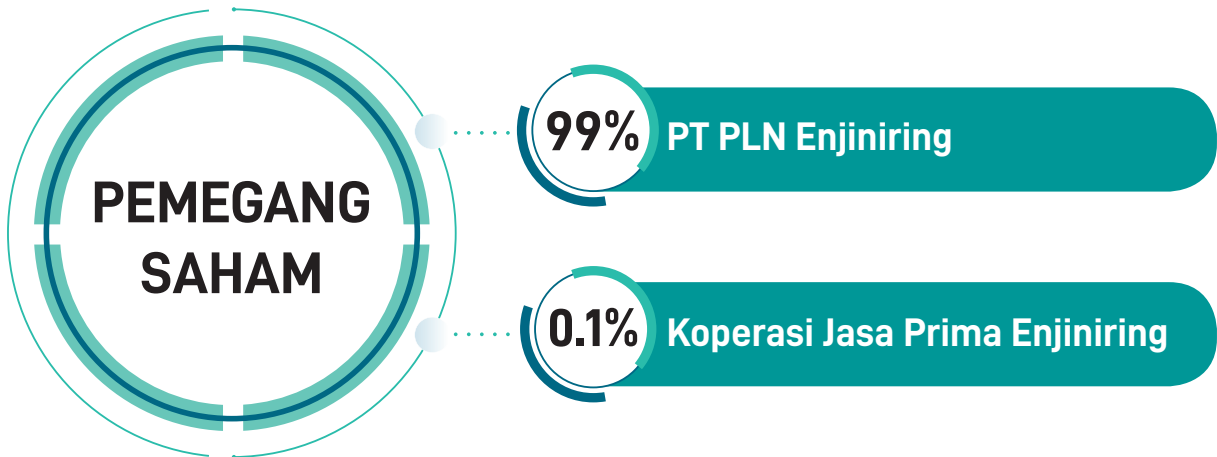
Didirikan berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 16 Juni 2016 oleh Notaris Lenny Janis Ishak. Telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0029883.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 21 Juni 2016. PLN Enjiniring memiliki saham sebesar 99,9%.

■ Daftar Pemegang Saham PT Prima Power Nusantara

PT PRIMA POWER NUSANTARA

Established based on Deed No. 21 dated June 16, 2016 by Notary Lenny Janis Ishak. Has obtained the Ratification under the Decree of the Minister of Law and Human Rights number AHU-0029883.AH.01.01.Year2016 dated June 21, 2016. PLN Enjiniring owns 99.9% of shares.

■ Shareholders List of PT Prima Power Nusantara



Kegiatan Usaha Perseroan meliputi :

1. Pengembangan usaha di bidang investasi
2. Operasi dan pemeliharaan pembangkit, transmisi dan distribusi di sektor ketenagalistrikan dan non ketenagalistrikan
3. Pengembangan usaha di bidang EPC transmisi dan gardu induk tenaga listrik
4. Pemeliharaan instalasi minyak dan gas
5. Menjalankan usaha-usaha di bidang peralatan pendukung dan atau manufaktur dalam bidang ketenagalistrikan
6. Usaha lainnya yang berkaitan dengan usaha Perseroan dalam rangka memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki perusahaan.

The Company's business activities include:

1. Business development in the investment sector
2. Operation and maintenance of power plant, transmission and distribution in the electricity and non-electricity sectors
3. Business development in EPC transmission and electric power substations
4. Oil and gas installations Maintenance
5. Running businesses of supporting equipment and or manufacturing field in the electricity sector
6. Other businesses related to the Company's business in order to maximize the potential of the company.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Prima Power Nusantara sebagai berikut.

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Prima Power Nusantara is as follows.

SUSUNAN BOD & BOC PT ENERGI PRIMA ELEKTRIKA

DIREKSI	
Jabatan	Nama Direktur
Direktur Utama	Sarono
Direktur Keuangan	Abdul Fadil
Direktur Teknik	Setyo Heru Purwoko

DEWAN KOMISARIS	
Jabatan	Nama
Komisaris	M. Sofyan

Profil Perusahaan Asosiasi

Associated Company Profile

PT ENERGI PRIMA ELEKTRIKA

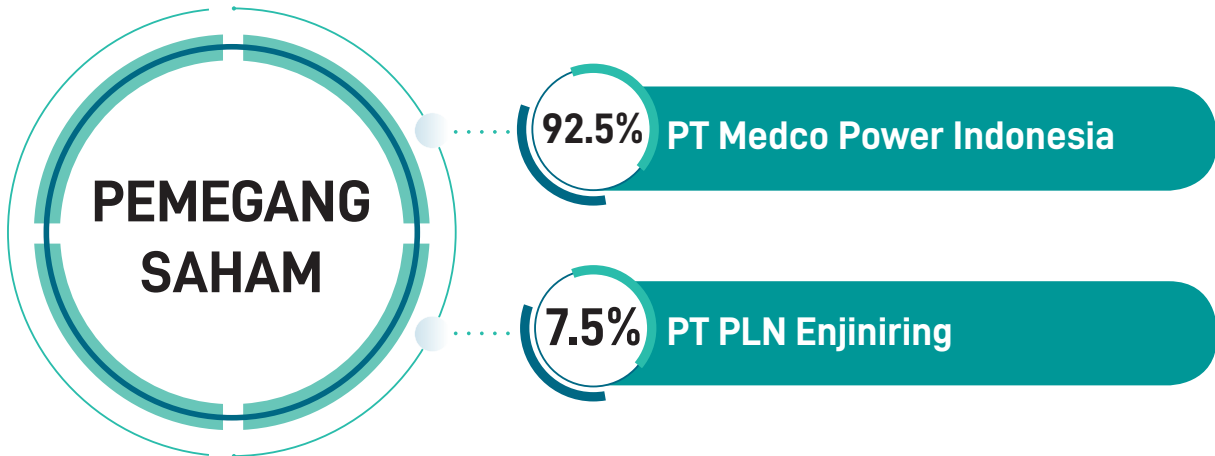
Didirikan sesuai Akta Pendirian No. 1 tanggal 24 Mei 2004 oleh Notaris Jafrizoli, SH dengan bidang usaha pembangkit (IPP Prabumulih). Telah mendapatkan Pengesahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-18964 HT.01.01.TH.2004 tanggal 29 Juli 2004. PLN Enjiniring memiliki penyertaan usaha sebesar 7,5% atas modal disetor.

Daftar Pemegang Saham PT Prima Power Nusantara

PT ENERGI PRIMA ELEKTRIKA

Established under the Deed of Incorporation No. 1 dated May 24, 2004 by Notary Jafrizoli, SH in the business field of power generation (IPP Prabumulih). Has obtained the Ratification under the Decree of the Minister of Justice and Human Rights Number: C-18964 HT.01.01.TH.2004 dated July 29, 2004. PLN Enjiniring has a business participation by 7.5% of paid-up capital.

Shareholders List of PT Prima Power Nusantara



Kegiatan Usaha Perseroan meliputi :

1. Melakukan usaha di bidang industri pembangkit tenaga listrik berikut transmisi dan distribusi tenaga listrik, fabrikasi, peralatan listrik dan elektronika;
2. Menjalankan usaha di bidang perdagangan pada umumnya, termasuk ekspor impor, interinsuler dan lokal terutama memperdagangkan alat-alat listrik dan elektronika, baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi aatau amanat.
3. Memberikan jasa konsultasi di bidang listrik (elektrikal), listrik elektronika serta jasa penunjang kelistrikan; melakukan pemasangan instalasi dan jaringan listrik.

The Company's business activities include:

1. *Performed business in the power plant industry including electric power transmission and distribution, fabrication, electrical equipment and electronics;*
2. *Running a general trading business, including export, import, interinsular and local, especially in electrical and electronic equipment trading, either for own calculations or on a commission or mandate basis.*
3. *Provide consulting services in electricity (electrical) field, electrical electronics and electrical support services; perform electrical installations and networks.*

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Energi Prima ElektriKA sebagai berikut.

PT Energi Prima ElektriKA Board of Commissioners and Directors arrangement is as follows.

SUSUNAN BOD & BOC PT ENERGI PRIMA ELEKTRIKA

DIREKSI	
Jabatan	Nama Direktur
Direktur Utama	Danny Praditya
Direktur	Susilawati

DEWAN KOMISARIS	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Budi Nugroho
Komisaris	Sutiyo

Saat ini PT Energi Prima ElektriKA memiliki 1 lini bisnis yang bergerak dibidang pembangkit yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Currently PT Energi Prima ElektriKA has 1 business line which is engaged in the power plant, which is detailed as follows:

Lokasi : Prabumulih

Location : Prabumulih

Kapasitas : 2 x 6 MW

Capacity : 2 x 6 MW

Jenis : Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)

Type : Gas Engine Power Plant (PLTMG)

Jumlah : 7,5% penyertaan

Jumlah : 7,5% penyertaan

Status : Pembangunan selesai, mulai operasi 2006

Amount : Construction complete, start operation 2006

Investor lainnya : PT Medco Power Indonesia (92,5%)

Other investors : PT Medco Power Indonesia (92,5%)

PT PURA DAYA PRIMA

PT PURA DAYA PRIMA

Didirikan sesuai Akta Pendirian No.34 tanggal 30 Maret 2005 oleh Notaris Eddi Setiadi, SH dengan bidang usaha pembangkit (IPP Musi II). Telah mendapatkan Pengesahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-28440 HT.01.01.TH.2005 tanggal 17 Oktober 2005. PLN Enjiniring memiliki penyertaan usaha sebesar 15% atas modal disetor.

Established under the Deed of Incorporation No.34 dated March 30th, 2005 by Notary Eddi Setiadi, SH in the business field of power generation (IPP Musi II). Has obtained the Ratification under the Decree of the Minister of Justice and Human Rights Number: C-28440 HT.01.01.TH.2005 dated October 17th, 2005. ENG Engineering has a business participation by 15% of paid-up capital.

Daftar Pemegang Saham PT Prima Power Nusantara

Shareholders List of PT Prima Power Nusantara

PEMEGANG SAHAM

85% PT Manggala Gita Karya

15% PT PLN Enjiniring

Kegiatan Usaha Perseroan meliputi :

1. Kegiatan usaha perseroan meliputi:
2. Menjalankan usaha membangkitkan tenaga listrik yang berasal dari berbagai sumber energi, termasuk tetapi tidak terbatas dari gas, bahan bakar minyak, air, batubara, tenaga surya, panas bumi dan lain-lain;
3. Pengadaan dan/atau pembangunan instalasi kelistrikan Gedung dan pabrik;
4. Pengadaan dan/atau pembangunan instalasi control dan instrumentasi;
5. Menyelenggarakan kegiatan operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik dan instalasi listrik;
6. Membuat jaringan transmisi dan melakukan kegiatan usaha distribusi atau penyaluran tenaga listrik melalui jaringan tenaga listrik

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Pura Daya Prima sebagai berikut.

The Company's business activities include:

1. *The company's business activities include:*
2. *Running a electricity plant business from various energy sources, including but not limited to gas, fuel oil, water, coal, solar power, geothermal and others;*
3. *Procurement and/or construction of electrical installations for buildings and factories;*
4. *Procurement and/or construction of control and instrumentation installations;*
5. *Carrying out operation and maintenance activities for power plants and electrical installations;*
6. *Creating a transmission network and conducting business activities of electricity distribution through the electric power network.*

PT Pura Daya Prima Board of Commissioners and Directors arrangement is as follows.

SUSUNAN BOD & BOC PT MULTIDAYA PRIMA ELEKTRINDO

DIREKSI	
Jabatan	Nama Direktur
Direktur Utama	Virgianto
Direktur	Bob Surahno
Direktur	Margono Krido Utomo
Direktur	Yulius Mulyani Halim

DEWAN KOMISARIS	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Robertus Dimas Prakarsa
Komisaris	Aris Setiawan
Komisaris	Ir. Setiadi Wiogo
Komisaris	Budi Setyawan

Saat ini PT Pura Daya Prima memiliki 1 lini bisnis yang bergerak dibidang pembangkit yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Lokasi : Musi II Palembang

Kapasitas : 3 x 4,7 MW dan 6 MW

Jenis : Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)

Jumlah : 15% Penyertaan

Status : Pembangunan selesai, mulai operasi – Juni 2006 dan combine cycle mulai awal tahun 2009.

Investor lainnya: PT Manggala Gita Karya (85%)

Currently PT Pura Daya Prima has 1 business line which is engaged in the power plant, with the following details:

Location: Musi II Palembang

Capacity: 3 x 4.7 MW and 6 MW

Type: Gas Engine Power Plant (PLTMG)

Amount: Participation by 15%

Status: Construction completed, commencing operations in June 2006 and combining cycles starting in early 2009.

Other investors: PT Manggala Gita Karya (85%)

PT MULTIDAYA PRIMA ELEKTRINDO

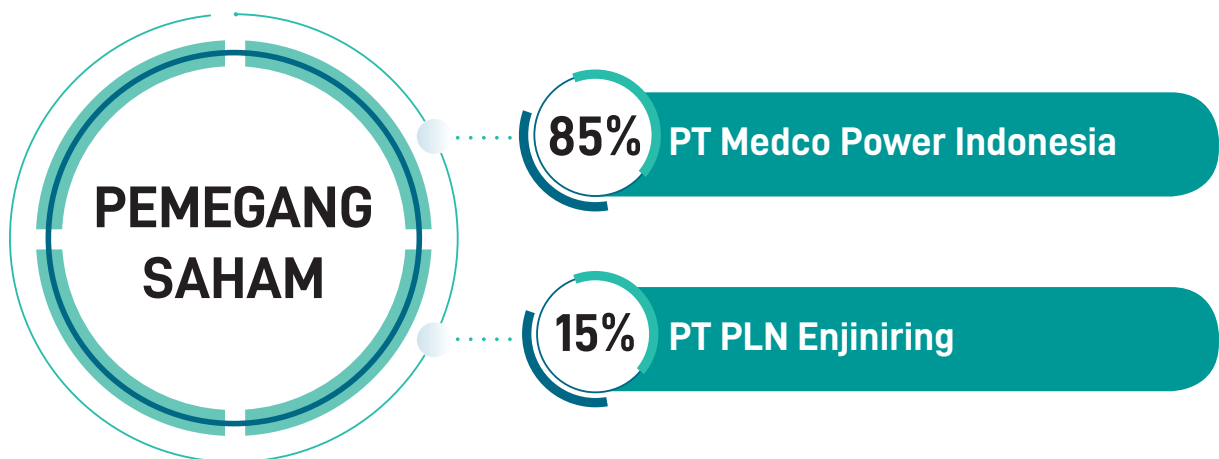
Didirikan sesuai Akta Pendirian No. 50 tanggal 15 Juli 2005 oleh Notaris Kun Hidayat, SH dengan bidang usaha pembangkit (IPP Sako). Telah mendapatkan Pengesahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-23107 HT.01.01.TH.2006 tanggal 7 Agustus 2006. PLN Enjiniring memiliki penyertaan usaha sebesar 15% atas modal disetor.

Daftar Pemegang Saham PT Multidaya Prima Elektrindo

PT MULTIDAYA PRIMA ELEKTRINDO

Established under the Deed of Incorporation No. 50 dated July 15th, 2005 by Notary Kun Hidayat, SH in the business field of power generation (IPP Sako). Has obtained the Ratification under the Decree of the Minister of Justice and Human Rights Number: C-23107 HT.01.01.TH.2006 dated 7 August 2006. PLN Enjiniring has a business participation by 15% of paid-up capital.

Shareholders List of PT Multidaya Prima Elektrindo



Kegiatan Usaha Perseroan meliputi :

1. Dalam bidang industri: menjalankan industri pembangkit tenaga listrik berikut transmisi dan distribusi tenaga listrik, fabrikasi, peralatan listrik dan elektronika;
2. Dalam bidang perdagangan: menjalankan perdagangan pada umumnya, termasuk ekspor impor, interinsuler dan lokal terutama memperdagangkan alat-alat listrik dan elektronika, baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atau amanat.
3. Dalam bidang jasa: menjalankan usaha-usaha jasa meliputi, jasa konsultasi di bidang listrik (elektrikal), listrik elektronika serta jasa penunjang kelistrikan; melakukan pemasangan instalasi dan jaringan listrik.

The Company's business activities include:

1. In the industrial sector: operating the power generation industry as well as electric power transmission and distribution, fabrication, electrical equipment and electronics;
2. In trading field: carry out general trading, including export, import, interinsular and local, especially trading in electrical and electronic equipment, both for self-calculation or on a commission or mandate basis.
3. Provide consulting services in electricity (electrical) field, electrical electronics and electrical support services; perform electrical installations and networks.

SUSUNAN BOD & BOC PT MULTIDAYA PRIMA ELEKTRINDO

DIREKSI	
Jabatan	Nama Direktur
Direktur Utama	Danny Praditya
Direktur	Susilawati

DEWAN KOMISARIS	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Eka Satria
Komisaris	Fransiska Widyastuti

Saat ini PT Multidaya Prima Elektrindo memiliki 1 lini bisnis yang bergerak dibidang pembangkit yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Currently PT Multidaya Prima Elektrindo has 1 business line which is engaged in the power plant, with the following details:

Lokasi : Sako, Palembang

Location: Sako, Palembang

Kapasitas : 2 x 6 MW

Capacity: 2 x 6 MW

Jenis : Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)

Type: Gas Engine Power Plant (PLTMG)

Jumlah : 15 % penyertaan

Amount: Participation by 15%

Status : Pembangunan selesai, mulai operasi Juni 2008

Status: Construction completed, commencing operations in June 2008

Investor lainnya : PT Medco Power Indonesia (85%).

Other investors: PT Medco Power Indonesia (85%).

PT PERMATA PRIMA ELEKTRINDO

Didirikan sesuai Akta Pendirian No. 6 tanggal 22 September 2006 oleh Notaris Edi Priyono,SH dengan bidang usaha pembangkit (IPP Sarolangun). Telah mendapatkan Pengesahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: W7-02476 HT.01.01.TH.2006 tanggal 14 November 2006. PLN Enjiniring memiliki penyertaan usaha sebesar 15% atas modal disetor.

Daftar Pemegang Saham PT Permata Prima Elektrindo



Kegiatan Usaha Perseroan meliputi :

1. Menjalankan usaha-usaha dibidang industri meliputi berbagai macam industri antara lain industry pembangkit tenaga listrik, yang berasal dari sumber energi, termasuk tetapi tidak terbatas dari gas, bahan bakar minyak, air, batubara, tenaga surya dan panas bumi. Menjalankan usaha dalam bidang pembuatan jaringan transmisi dan melakukan kegiatan usaha distribusi atau penyaluran tenaga listrik;
2. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa yang meliputi: penyelenggaraan kegiatan operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik dan instalasi listrik.

PT PERMATA PRIMA ELEKTRINDO

Established under the Deed of Incorporation No. 43 dated September 22nd, 2006 by Notary Edi Priyono, SH in the business field of power generation (IPP Sarolangun). Has obtained the Ratification under the Decree of the Minister of Justice and Human Rights Number: W7-02476 HT.01.01.TH.2006 dated November 14th, 2006. PLN Enjiniring has a business participation by 15% of paid up capital.

Shareholders List of PT Permata Prima Elektrindo



The Company's business activities include:

1. *Running businesses in the industrial sector covering a variety of industries including the power generation industry, which comes from energy sources, including but not limited to gas, fuel oil, water, coal, solar and geothermal power. Running a business in manufacturing transmission networks field and conducting business activities in electricity distribution;*
2. *Running businesses in services field which include: power plants operation and maintenance and electrical installations.*

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Permata Prima Elektrindo sebagai berikut.

PT Permata Prima Elektrindo Board of Commissioners and Directors arrangement is as follows.

SUSUNAN BOD & BOC PT PERMATA PRIMA ELEKTRINDO

DIREKSI	
Jabatan	Nama Direktur
Direktur	Avit Alfaserian

DEWAN KOMISARIS	
Jabatan	Nama
Komisaris	Herwan

Saat ini PT Permata Prima Elektrindo memiliki 1 lini bisnis yang bergerak dibidang pembangkit yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Currently PT Permata Prima Elektrindo has 1 business line which is engaged in the power plant, with the following details:

Lokasi : Sarolangun, Jambi

Location: Sarolangun, Jambi

Kapasitas : 2 x 7 MW

Capacity: 2 x 7 MW

Jenis : Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Type: Steam Power Plant (PLTU)

Jumlah : 15 % penyertaan

Amount: Participation by 15%

Status : Pembangunan selesai, Mei 2010

Status: Construction completed, commencing operations in May 2010

Investor Lainnya : PT Perwira Inti Megah (85%).

Other Investors: PT Perwira Inti Megah (85%).

PT CROMPTON PRIMA SWITCHGEAR INDONESIA

PT CROMPTON PRIMA SWITCHGEAR INDONESIA

PT Crompton Prima Switchgear Indonesia (CPSI) merupakan perusahaan yang didirikan atas dasar kerja sama antara PT PLN Persero dengan Crompton Greaves Limited perusahaan asal India yang bergerak di bidang Industri peralatan pengontrol (switchgear component) dan pendistribusian listrik, dengan melakukan sinergi antar anak perusahaan yaitu PT PLN Enjiniring dan PT CG International Holdings Singapore PTE.,LTD. PLN Enjiniring memiliki penyertaan usaha sebesar 49% atas modal disetor.

PT Crompton Prima Switchgear Indonesia (CPSI) is a company established on the basis of cooperation between PT PLN Persero and Crompton Greaves Limited an Indian company engaged in the field of switchgear component production insudtry and electricity distribution, by synergizing between its Subsidiary Companies namely PT PLN Enjiniring and PT CG International Holdings Singapore PTE., LTD. PLN Enjiniring has a business participation by 49% of paid up capital.

Didirikan sesuai Akta Pendirian No.3 tanggal 7 Mei 2014 oleh Notaris Lenny Janis Ishak, SH. dengan bidang usaha industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik. Telah mendapatkan Pengesahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-08265.40.10.2014 tanggal 12 Mei 2014.

Established under the Deed of Incorporation No.3 dated May 7th, 2014 by Notary Lenny Janis Ishak, SH. in the business field of electricity control and distribution equipment industry. Has obtained the Ratification under the Decree of the Minister of Justice and Human Rights No. AHU-08265.40.10.2014 dated May 12th, 2014.

Tujuan pendirian CPSI adalah untuk alih teknologi switchgear dan sebagai bagian dari upaya meningkatkan penggunaan komponen lokal dalam setiap peralatan untuk infrastruktur ketenagalistrikan. CPSI diharapkan mampu memproduksi komponen switchgear yang dibutuhkan dalam menunjang pembangunan infrastruktur kelistrikan di Indonesia.

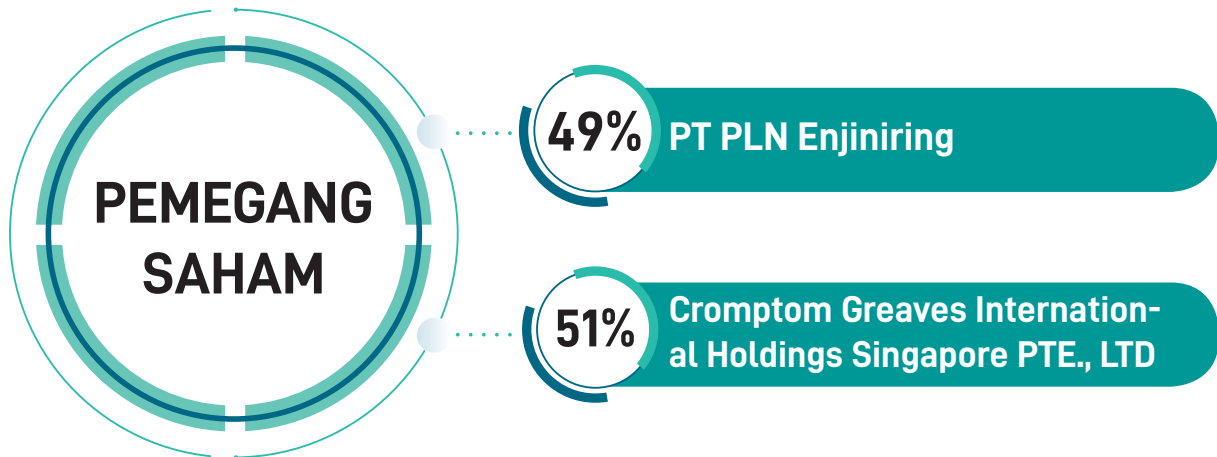
The purpose of establishing the CPSI is to transfer switchgear technology and as part of efforts to increase the use of local components in each equipment for electricity infrastructure. CPSI is expected to be able to produce switchgear components needed to support electricity infrastructure development in Indonesia.

PT Crompton Prima Switchgear Indonesia telah melaksanakan RUPS Pertama pada tanggal 10 Juli 2014 dan peningkatan modal disetor pada tanggal 24 Juli 2014 sebesar USD3.900.000. CPSI telah membeli lahan sebagai lokasi pabrik di daerah Cikande pada triwulan IV/2014 dan telah dilaksanakan Ground breaking pada bulan November 2015 dan diresmikan pada Senin, 20 Agustus 2018.

PT Crompton Prima Switchgear Indonesia held the First General Meeting of Shareholders on July 10th, 2014 and increased paid-up capital on July 24th, 2014 amounted to USD3,900,000. CPSI purchased land as a factory location in the Cikande area in the fourth quarter of 2014 and a ground breaking was held in November 2015 and was inaugurated on Monday, August 20th, 2018.

Daftar Pemegang Saham PT Crompton Prima Switchgear Indonesia (CPSI)

Shareholders List of PT Crompton Prima Switchgear Indonesia (CPSI)



Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Crompton Prima Switchgear Indonesia sebagai berikut.

PT Crompton Prima Switchgear Indonesia Board of Commissioners and Directors arrangement is as follows.

SUSUNAN BOD & BOC PT CROMPTON PRIMA SWITCHGEAR INDONESIA

DIREKSI	
Jabatan	Nama Direktur
Direktur Utama	Manoj Gajanan Naphade
Direktur Keuangan	Bektiwacono
Direktur Teknik	Rajesh Motiram Jadhav

DEWAN KOMISARIS	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Lloyd Pinto
Komisaris	Tonny Sarief

Lembaga Profesi Penunjang

Supporting Professional Agencies



KANTOR AKUNTAN PUBLIK

PwC Indonesia
KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
Gedung WTC 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920

PUBLIC ACCOUNTING FIRM

PwC Indonesia
KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
Gedung WTC 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920

NOTARIS

Kantor Notaris & PPAT Lenny Janis, SH
Jl. Hang Lekir 9 No. 1
Jakarta, 12120

NOTARY

Kantor Notaris & PPAT Lenny Janis, SH
Jl. Hang Lekir 9 No. 1
Jakarta, 12120

KONSULTAN HUKUM

NAH'R Murdono Law Office
District 8 - Prosperity Tower
20th Floor, Unit E, SCBD Lot 28
Jalan Jend Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190 - Indonesia

LAW CONSULTANT

NAH'R Murdono Law Office
District 8 - Prosperity Tower
20th Floor, Unit E, SCBD Lot 28
Jalan Jend Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190 - Indonesia

Penghargaan dan Sertifikasi

Award and Certification



JENIS PENGHARGAAN/ JENIS SERTIFIKASI ISO 9001 : 2015

Bidang Usaha yang di Sertifikasi :

- Desain Enjiniring (Feasibility Study, Design Review , Bidding Document)
- Supervisi Konstruksi Instalasi Ketenagalistrikan
- Pemberi Penghargaan/ Sertifikasi
- LMK - Certification
- Komite Akreditasi Nasional

Tahun Perolehan : 2020

Periode : 2020 – 2023

AWARD AND CERTIFICATION AWARD TYPE/CERTIFICATION TYPE : ISO 9001 : 2015

Scope of Business :

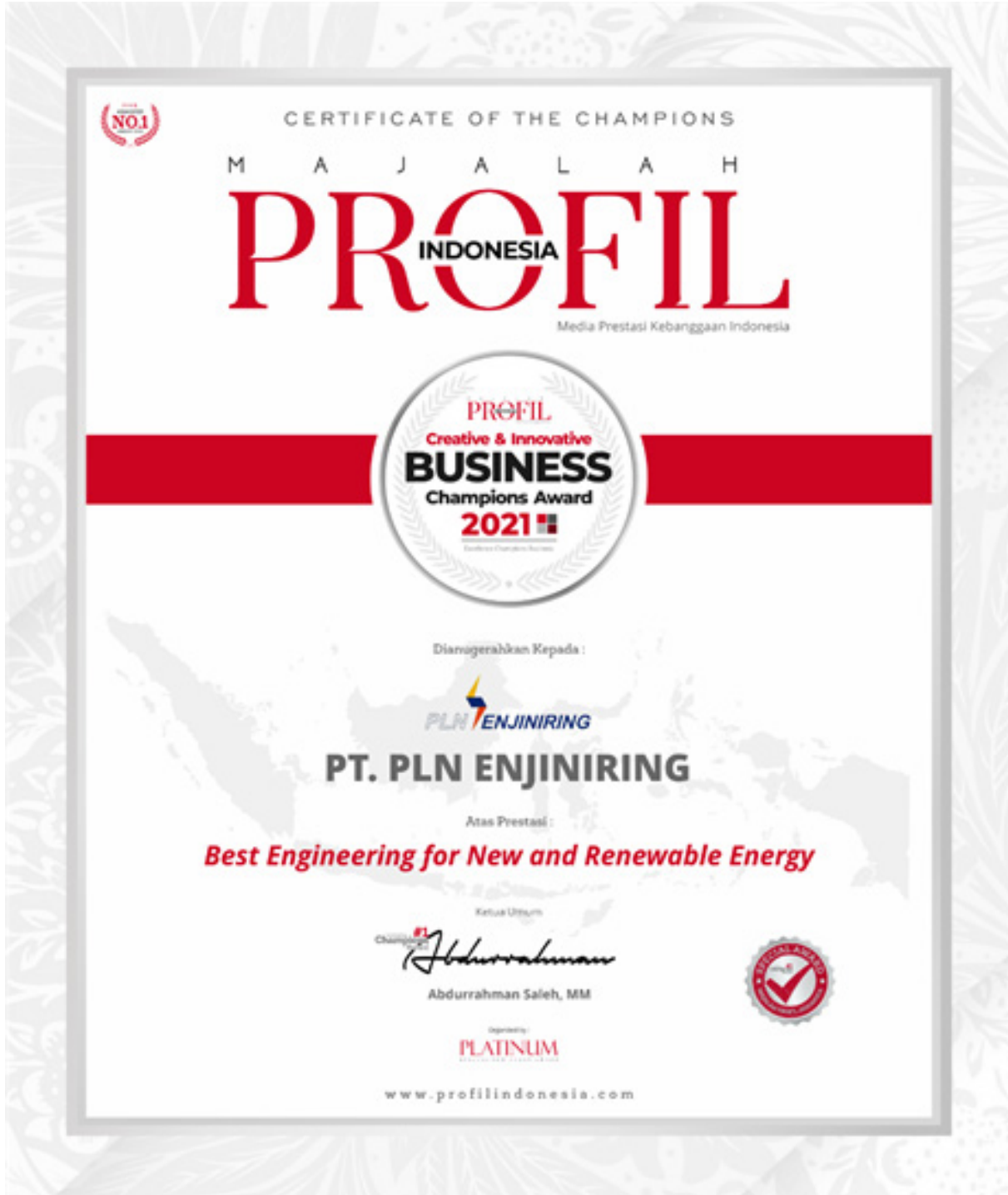
- Engineering Design (Feasibility Study, Design Review , Bidding Document)
- Supervision of Electricity Installation Construction
- Award /Certification issued by :
- LMK – Certification
- National Accreditation Committee (KAN)

Year to Date : 2020

Periode : 2020 – 2023

Penghargaan Tahun 2021

1. Penghargaan Creative & Innovative Bussiness Champion Award 2021



PLN Enjiniring berhasil mendapatkan penghargaan "Best Engineering for New and Renewable Energy" pada ajang Creative & Innovation Bussiness Champion Award 2021 yang diadakan oleh majalah Profil Indonesia.

Nama dan Alamat Kantor Induk, Perwakilan dan Proyek

Name and Address of Head Office, Representative Office and Project Office



KANTOR INDUK

Menara Enjiniring

Jl. Ciputat Raya No. 123
Kebayoran Lama - Jakarta 12310
Telp.(62-21) 560 8432, 560 8918, 560 9044
Fax.(62-21) 564 0132
Website : www.plne.co.id
Email : contact@plne.co.id
Instagram : @pln_enjiniring

HEAD OFFICE

Menara Enjiniring

Jl. Ciputat Raya No. 123
Kebayoran Lama - Jakarta 12310
Telp.(62-21) 560 8432, 560 8918, 560 9044
Fax.(62-21) 564 0132
Website : www.plne.co.id
Email : contact@plne.co.id
Instagram : @pln_enjiniring

KANTOR REPRESENTATIF

CNG Plant Bangkanai

Desa Karendan, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara,
Kalimantan Tengah

REPRESENTATIVE OFFICE

CNG Plant Bangkanai

Desa Karendan, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara,
Kalimantan Tengah

ANAK PERUSAHAAN

PT PRIMA POWER NUSANTARA

Menara Enjiniring Lt. 7
Jl. Ciputat Raya No. 123
Kebayoran Lama - Jakarta 12310
Telp.(62-21) 227 68719, 278 28556
Fax.(62-21) 227 69986
Email : info@primponus.co.id

SUBSIDIARY

PT PRIMA POWER NUSANTARA

Menara Enjiniring Lt. 7
Jl. Ciputat Raya No. 123
Kebayoran Lama - Jakarta 12310
Telp.(62-21) 227 68719, 278 28556
Fax.(62-21) 227 69986
Email : info@primponus.co.id

PERUSAHAAN AFILIASI

■ PT PURA DAYA PRIMA

Jl. Raya Kelapa Hibrida Blok PF 23 No. 11-12
Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14250

■ PT PERMATA PRIMA ELEKTRINDO

Senayan City Lot 19
Panin Tower Lantai 11
Jl. Asia Afrika, Jakarta Selatan

■ PT ENERGI PRIMA ELEKTRIKA

The Energy Building, 50th floor, Lot 11A SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

■ PT MULTIDAYA PRIMA ELEKTRINDO

The Energy Building, 50th floor, Lot 11A SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

■ CROMPTON PRIMA SWITCHGEAR INDONESIA

Menara Enjiniring
Jl. Ciputat Raya No. 123 Pondok Pinang
Kebayoran Lama - Jakarta 12310
Indonesia
Telp.(62-21) 2751-0363

ALAMAT PABRIK :

Kawasan Industri Modern Cikande
Jl. Modern Industri VI Blok A No. 4
Desa Nambo Ilir Kec. Kibin
Serang – Banten 42185
Telp. (62-254) 840 8448
Fax. (62-254) 840 8848

PERUSAHAAN AFILIASI

■ PT PURA DAYA PRIMA

Jl. Raya Kelapa Hibrida Blok PF 23 No. 11-12
Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14250

■ PT PERMATA PRIMA ELEKTRINDO

Senayan City Lot 19
Panin Tower Lantai 11
Jl. Asia Afrika, Jakarta Selatan

■ PT ENERGI PRIMA ELEKTRIKA

The Energy Building, 50th floor, Lot 11A SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

■ PT MULTIDAYA PRIMA ELEKTRINDO

The Energy Building, 50th floor, Lot 11A SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

■ CROMPTON PRIMA SWITCHGEAR INDONESIA

Menara Enjiniring
Jl. Ciputat Raya No. 123 Pondok Pinang
Kebayoran Lama - Jakarta 12310
Indonesia
Telp.(62-21) 2751-0363

FACTORY ADDRESS :

Kawasan Industri Modern Cikande
Jl. Modern Industri VI Blok A No. 4
Desa Nambo Ilir Kec. Kibin
Serang – Banten 42185
Telp. (62-254) 840 8448
Fax. (62-254) 840 8848

A photograph of a desk setup. On the left, there are several grey ring-bound binders. In front of them is a black stapler. To the right of the stapler is a silver laptop with a pair of black-rimmed glasses resting on its keyboard. In the foreground, there is a black spiral-bound notebook with a blank white page, a black pen, a black paperclip, and a black calculator with a small display screen. A small potted plant is visible on the far left. The background is a plain white wall.

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Posisi PLN Enjiniring di Industri Kelistrikan

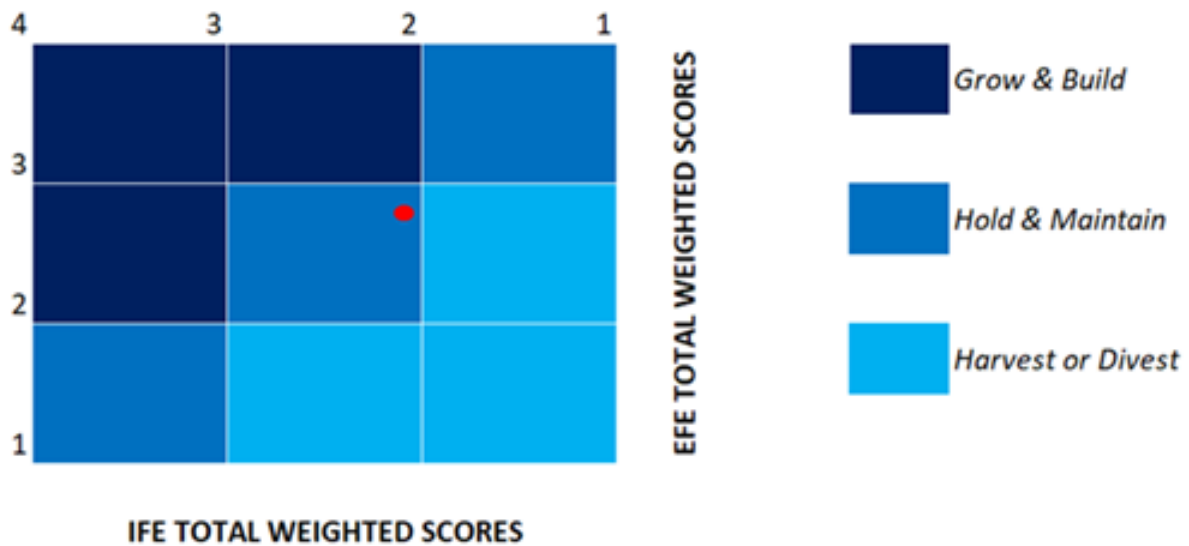
PLN Enjiniring Position in the Electrical Industry

Pemetaan posisi PT PLN Enjiniring menggunakan Matriks IE yang digambarkan dalam dua sumbu (x,y), yaitu faktor internal (IFE-Internal Factor Evaluation (x)) dan (EFE-External Factor Evaluation (y)); Penilaian posisi perusahaan berada di:

- i. Untuk faktor internal (IFE) masih berada di bawah standar rata-rata (skor 2.17)
- ii. Untuk faktor eksternal (EFE) dalam kondisi baik atau favorable (skor 2.83)

Mapping the position of PT PLN Enjiniring using the IE Matrix which is described in two axes (x,y), namely internal factors (IFE-Internal Factor Evaluation (x)) and (EFE-External Factor Evaluation (y)); The assessment of the company's position is at:

- i. For internal factors (IFE) it is still below the average standard (score 2.17)
- ii. For external factors (EFE) in good condition or favorable (score 2.83)



Dengan demikian posisi perusahaan saat ini adalah berada di **Hold and Maintain**. Pada periode ke depan, perusahaan akan melakukan penguatan serta konsolidasi pada *core business* PT PLN Enjiniring, yaitu dengan fokus pada **Market Penetration** dan **Product Development**.

Thus, it can be generally concluded that currently PT PLN Enjiniring is develops a **Hold and Maintain** strategy, where this strategy is still the same as PT PLN Enjiniring strategy in the previous period. The strategies implemented are **Market Penetration** and **Product Development**.

1. **Market Penetration** (Penetrasi Pasar): Fokus pada peningkatan pendapatan dengan meningkatkan nilai kontrak untuk tiap proyek pekerjaan. Nilai kontrak penjualan produk atau layanan yang sudah ada (*existing*) adalah sebesar 1-2% dari *capex* proyek menuju ke kontrak yang memiliki nilai 10-15% dari *capex* proyek.
2. **Product Development** (Pengembangan Produk): Fokus pada pengembangan produk dan jasa *existing* (FS, BD, ED, SPV) dan jasa *Engineering Integrator* (Detail Engineering Design).

1. **Market Penetration** : Focus on increasing revenue by increasing the contract value for each work project. The value of the existing product or service sales contract is 1-2% of the project *capex* leading to the contract which has a value of 10-15% of the project *capex*.
2. **Product Development** : Focus on developing existing products and services (FS, BD, ED, SPV) and *Engineering Integrator* services (Detail Engineering Design).

Tinjauan Operasional

Operational Review

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi usaha enjiniring, pengadaan dan konstruksi, operasi, pemeliharaan pada bidang ketenagalistrikan dan non ketenagalistrikan sebagai berikut :

- a. Jasa konsultasi enjiniring dan atau manajemen proyek termasuk integrator proyek ketenagalistrikan;
- b. Studi sistem kelistrikan;
- c. Studi analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
- d. Informasi teknologi;
- e. Pendidikan dan pelatihan;
- f. Penelitian dan pengembangan;
- g. Penyediaan tenaga listrik;
- h. Perencanaan, pengadaan, pembangunan dan atau pemasangan (jasa konstruksi) bidang bidang pembangkitan, transmisi dan/atau distribusi;
- i. Pemeliharaan dan atau pengoperasian bidang pembangkitan, transmisi dan atau distribusi;
- j. Pengolahan, penimbunan, transportasi, niaga, pengoperasian dan pemeliharaan instalasi minyak dan atau gas bumi;
- k. Penyediaan/manufaktur berbagai peralatan elektrikal untuk transmisi dan elektrikal untuk transmisi dan distribusi listrik.

Kegiatan usaha yang berjalan saat ini dikelompokkan ke dalam tiga bidang usaha yaitu Jasa Enjiniring, Jasa Non Enjiniring, dan Jasa Lainnya. Jasa Enjiniring meliputi Pembangkitan (jasa mendisain), Transmisi dan Distribusi (jasa mendisain) dan Konstruksi (jasa supervisi). Sedangkan untuk Jasa Non Enjiniring berupa jasa dalam bidang *Operation and Maintenance*, dan Jasa Lainnya berupa jasa di bidang Informasi dan Teknologi.

Rincian dari bidang usaha Jasa Enjiniring dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Based on the Article 3 of the Company's articles of association, the Company's scope of activities includes engineering, procurement and construction, operation, maintenance in the electricity and non-electricity sectors as follows:

- a. *Engineering consulting and/or project management services including electricity project integrators;*
- b. *Electrical system study;*
- c. *Environmental impact analysis study (AMDAL);*
- d. *Information technology;*
- e. *Education and training;*
- f. *Research and development;*
- g. *Electricity supply;*
- h. *Planning, procurement, construction and or installation (construction services) in the field of power plants, transmission and/or distribution;*
- i. *Maintenance and or operation of power plant sector, transmission and or distribution;*
- j. *Processing, stockpiling, transporting, trading, operating and maintaining oil and or natural gas installations;*
- k. *Supply/manufacture of various electrical equipment for transmission and distribution of electricity.*

The current business activities are grouped into three business sectors, namely Engineering Services, Non-Engineering Services, and Other Services. Engineering services include power plants (design services), transmission and distribution (design services) and construction (supervision services). Meanwhile, non-engineering services are in the form of operating and maintaining services, and other services in the form of information and technology services sector.

Details of the Engineering Services business sectors are described in the table below:

TABEL JENIS JASA ENJINIRING PLN ENJINIRING

TABLE OF TYPES OF ENGINEERING SERVICES FOR PLN ENJINIRING

Pembangkitan	Transmisi dan Distribusi	Konstruksi
<i>Generation</i>	<i>Transmission and Distribution</i>	<i>Construction</i>
Studi Kelayakan <i>Feasibility Study</i>	Survei <i>Survey</i>	Supervisi Konstruksi <i>Construction Supervision</i>
Penyelidikan Tanah <i>Soil Investigation</i>	Penyelidikan Tanah <i>Soil Investigation</i>	Pengawasan QA QC <i>QA/QC Supervision</i>
Penyusunan Bid Dokumen <i>Bidding Document Preparation</i>	Penyusunan Basic Design <i>Basic Design Preparation</i>	
Penyusunan Request for Proposal <i>Request for Proposal Preparation</i>	Penyusunan Bid Dokumen <i>Bidding Document Preparation</i>	
Pembuatan Harga Perkiraan Enjinir <i>Establish Estimated Engineer Price</i>	Pembuatan Harga Perkiraan Enjinir <i>Establish Estimated Engineer Price</i>	
Pendampingan dalam Proses Tender <i>Assistance in Tendering Process</i>	Pendampingan dalam Proses Tender <i>Assistance in Tendering Process</i>	
Pendampingan dalam proses Contract Discussion Agreement <i>Assistance in Contract Discussion Agreement</i>	Pendampingan dalam proses Contract Discussion Agreement <i>Assistance in Contract Discussion Agreement</i>	
Review Desain <i>Design Review</i>	Review Desain <i>Design Review</i>	
Pengawasan QA QC <i>QA/QC Supervision</i>	Pengawasan QA QC <i>QA/QC Supervision</i>	
Studi AMDAL dan UKL/UPL <i>Study on Environment Impact and UKL/UPL</i>	Pendampingan dalam Due Diligent Visit <i>Assistance in Due Diligent Visit</i>	
Studi Lainnya <i>Other Studies</i>	Studi Sistem Ketenagalistrikan <i>Electrical Power System Study</i>	
	Studi AMDAL dan UKL/UPL <i>Study on Environment Impact and UKL/UPL</i>	
	Studi Lainnya <i>Other Studies</i>	

STRATEGI PERUSAHAAN

Company Strategy

Strategi Perusahaan

Perumusan sasaran strategis perusahaan dilakukan dengan menggunakan framework Malcolm Baldrige yang didasarkan atas lima perspektif yakni Perspektif Fokus Pelanggan, Perspektif Kualitas Produk dan Layanan, Perspektif Fokus SDM, Perspektif Keuangan dan Pasar, serta Perspektif Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab sesuai dengan hasil perumusan menghasilkan 22 KPI yang harus dijadikan sebagai acuan oleh PLNE dalam mencapai sasaran perusahaan tahun 2021 sebagai berikut:

1. Perspektif Fokus Pelanggan
 - a. Indeks Kepuasan Pelanggan
2. Perspektif Kualitas Produk dan Layanan
 - a. *Engineering First Pass Yield (FPY)*
 - b. *Engineering On Time Delivery (OTD)*
 - c. Produktivitas Supervisi Konstruksi
 - d. Komposisi Enjinirs *Subletting* untuk Produk Enjiniring (FS, Biddoc dan *Engineering Design*)
3. Perspektif Fokus Tenaga Kerja
 - a. *Human Capital Readiness (HCR)*
 - b. *Organization Capital Readiness (OCR)*
 - c. Produktivitas Pegawai
 - d. Pemenuhan *Talent Pool* dan *Talent Mobility*.
 - i. % Perempuan dalam nominated talent.
 - ii. % milenial (< 40 tahun) dalam top talent.
4. Perspektif Keuangan dan Pasar
 - a. Pencapaian Investasi
 - b. Sinergi dengan Anak Perusahaan Lain
 - c. Efisiensi Biaya Enjiniring oleh *Sub Consultant* dan *Outsourcing*
 - d. Rasio Operasi
5. Perspektif Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Masyarakat
 - a. Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*

Company Strategy

The formulation of the company's strategic objectives is carried out using the Malcolm Baldrige framework which is based on five perspectives, namely Perspective Customer Focus, Product Quality Perspective and Service, HR Focus Perspective, Financial Perspective and Markets, and Leadership, Governance Perspectives and Responsibility in accordance with the results of the formulation produce 22 KPIs that must be used as a reference by PLNE in achieving the company's targets for the year 2021 as follows:

1. *Customer Focus Perspective*
 - a. *Customer Satisfactory Index*
2. *Product and Services Quality Perspective*
 - a. *Engineering First Pass Yield (FPY)*
 - b. *Engineering On Time Delivery (OTD)*
 - c. *Construction Supervision Productivity*
 - d. *Subletting Engineering Composition for Engineering Products (FS, Biddoc dan Engineering Design)*
3. *HR Focus Perspective*
 - a. *Human Capital Readiness (HCR)*
 - b. *Organization Capital Readiness (OCR)*
 - c. *Employee Productivity*
 - d. *Fulfillment of Talent Pool and Talent Mobility.*
 - i. *% Female nominated talent.*
 - ii. *% of millennials (< 40 years) in top talent.*
4. *Financial and Market Perspective*
 - a. *Investment Achievement*
 - b. *Synergy with Other Subsidiaries*
 - c. *Engineering Cost Efficiency by Sub Consultant and Outsourcing*
 - d. *Operating Ratio*
5. *Leadership, Governance and Responsibility Perspective*
 - a. *The implementation of Good Corporate Governance (GCG)*

- b. *Maturity Level ERM.*
- c. *IT Maturity Level.*
- d. *Penyelesaian Temuan Audit (BPK, KAP, SPI, dan Auditor lainnya).*
- e. *Kepatuhan pada K3LH (Kesehatan, Keselamatan Kerja & Lingkungan Hidup).*

Sasaran-sasaran strategis tersebut di atas dijabarkan dalam program-program kegiatan yang diuraikan sebagai berikut.

1. Pemasaran dan Penjualan

PT PLN Enjiniring sebagai bagian dalam grup PT PLN (Persero) ikut serta dalam menyukseskan program 35.000 MW. Strategi pemasaran untuk akselerasi program tersebut adalah menyelesaikan pekerjaan – pekerjaan terkait enjiniring program 35.000 MW sesuai dengan RUPTL 2019 - 2028 baik berupa kontrak penugasan atau tender dari PLN maupun pihak swasta.

Perolehan kontrak enjiniring pada tahun 2021 diharapkan berjumlah Rp 700 Miliar. Strategi peningkatan kontrak jasa enjiniring berbasis pada RUPTL 2019-2028 untuk potensi pekerjaan pengembangan ketenagalistrikan (pembangkitan, transmisi dan gardu induk) pada periode 2019-2021 yang dapat dilaksanakan oleh PLN Enjiniring pada tahun 2021. Hal ini dimaksudkan agar program 35.000 MW dapat diselesaikan tepat waktu dan PLNE dapat membuat perencanaan yang lebih baik dalam penyelesaian pekerjaan dan workload SDM serta peningkatan kualitas produk.

Pekerjaan jasa utama (*core business*) di bidang enjiniring ketenagalistrikan terdiri atas pendapatan enjiniring bidang pembangkitan, bidang transmisi & distribusi, bidang supervisi konstruksi, detail enjiniring desain dan pengembangan jasa enjiniring.

Pada pengembangan pasar jasa enjiniring lebih lanjut, berbasis pada mengoptimalkan kontrak pekerjaan jasa enjiniring yang didapatkan dari sinergi antar Anak Perusahaan. Disamping pekerjaan jasa tersebut diatas, terdapat pendapatan lainnya dari pengembangan usaha berbasis keenjiringan diantaranya:

- a. *Perolehan hasil Investasi dengan mengoptimalkan pengoperasian & pemeliharaan CNG Bangkanai.*

- b. *Maturity Level ERM*
- c. *IT Maturity Level.*
- d. *Completion of Audit Findings (BPK, KAP, SPI, and other Auditors).*
- e. *Compliance with K3LH (Health, Occupational Safety & Environment).*

The strategic targets mentioned above are described in the activity programs which are described as follow;

1. *Sales and Marketing*

As part of the PT PLN (Persero) group PT PLN Enjiniring have been participated in the success of the 35,000 MW program. The marketing strategy for the program acceleration is to complete works related to the 35,000 MW engineering program in accordance with the 2019-2028 RUPTL, either in the form of assignment contracts or tenders from PLN or private parties.

The acquisition of engineering contracts in 2021 is expected to amount to IDR 700 billion. The strategy for increasing engineering service contracts is based on the 2019-2028 RUPTL for potential electricity development work (generation, transmission and substations) in the 2019-2021 period that can be carried out by PLN Enjiniring in 2021. This is intended so that the 35,000 MW program can be completed on time and PLNE can make better planning in completing work and HR workloads as well as improving product quality.

The core business services in electricity engineering field consists of engineering in generation field revenue, transmission & distribution sector, construction supervision, design engineering details and engineering service development.

In the further engineering services market development, based on optimizing engineering work service contracts obtained from synergies between Subsidiaries. In addition to the services mentioned above, There are other income from engineering-based business development including:

- a. *Return on Investment by optimizing the operation & maintenance of CNG Bangkanai.*

- b. Perolehan Jasa Konstruksi maupun EPC Ketenagalistrikan di bidang transmisi, dan distribusi dari PT Prima Power Nusantara.

Untuk menjamin keberhasilan pengembangan usaha, pada setiap program pengembangan usaha yang bersifat investasi, didukung dengan Kajian Enjiniring/Kajian Kelayakan Operasi dan Kajian Kelayakan Finansial serta Kajian Resiko.

2. Produksi

Capaian kinerja perusahaan tahun 2021 aspek produksi dilakukan dengan penyelesaian kontrak *carry over* maupun kontrak baru yang diperoleh pada tahun 2021. Sebagai dukungan atas kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian produk & jasa enjiniring dan pengembangan usaha berbasis keenjiniringan (investasi, operation & *maintenance* CNG Bangkanai, dan Jasa Konstruksi Ketenagalistrikan dari PT Prima Power Nusantara), dilakukan program – program penguatan produksi, dengan sasaran khusus antara lain:

- a. Peningkatan kapasitas produksi dan produktifitas
- b. Mengendalikan biaya pokok produksi
- c. Program Investasi yang prima
- d. Program Prasarana Proyek berbasis *Information Technology*.

3. Keuangan dan Akuntansi

Program kerja Keuangan dan Akuntansi dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan internal control atas Laporan Keuangan.
- b. Penerapan PSAK terbaru yaitu 71,72 dan 73 pada Laporan Keuangan Perusahaan
- c. Pelaksanaan perhitungan PSAK 24 mengenai imbal kerja
- d. Mengusulkan penyempurnaan integrasi sistem IT antara SAP, Virtual Cubicle dan Sunfish serta mendukung konsolidasi Laporan Keuangan Korporat dan Anak Perusahaan
- e. Meningkatkan tertib administrasi pajak
- f. Mendukung pelaksanaan asuransi aset material yang dimiliki oleh Perusahaan
- g. Mendukung pelaksanaan inventarisasi aset bersama tim yang ditunjuk oleh Manajemen

- b. *Obtaining Electricity Construction and EPC Services in transmission and distribution sector from PT Prima Power Nusantara..*

To ensure the business development success, in every investment business development program, supported by an Engineering Study/ Operational Feasibility Study and a Financial Feasibility Study as well as a Risk Assessment.

2. Production

The company's performance achievement in 2021 in production aspect is carried out by completing the carry over contracts and new contracts obtained in 2021. As a support for the quality and timeline accuracy on completing the engineering products & services and engineering-based business development (investment, operation & maintenance of CNG Bangkanai, and Electricity Construction Services from PT Prima Power Nusantara), the production strengthening programs are carried out, with specific targets including:

- a. *Increasing production capacity and productivity*
- b. *Controlling the cost of production*
- c. *Excellent Investment Program*
- d. *Project Infrastructure Program based on Information Technology.*

3. Finance and Accounting

Finance and Accounting can be described as follows:

- a. *Improve internal control over Financial Reports.*
- b. *The implementation of the latest PSAK, namely 71.72 and 73 in the Company's Financial Statements*
- c. *Implementation of PSAK 24 calculations regarding employee benefits*
- d. *Propose improvements to IT system integration between SAP, Virtual Cubicle and Sunfish and support the consolidation of Corporate and Subsidiary Financial Statements*
- e. *Improve tax administration order*
- f. *Support the implementation of material asset insurance owned by the Company*
- g. *Support the implementation of asset inventory with the team appointed by Management*



- h. Membantu pencapaian target KPI Perusahaan
 - i. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM pada bidang Akuntansi, Pajak dan Asuransi dengan mengusulkan pengadaan training, workshop dan program profesi Akuntansi
 - j. Membantu pemenuhan kebutuhan bidang lain terkait Rating Perusahaan.
4. SDM dan Umum

Dalam mendukung misi PLN Group "SOLID" dimana PLNE mendapat arahan dua misi yaitu *Leading Industry Capabilities* dan *Optimizing Cost Efficiency* maka hal ini akan diselaraskan pada strategi Sumber Daya Manusia dan Umum. Pelaksanaan penyelarasan strategi akan dijabarkan sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan struktur organisasi
 - i. Dalam rangka penguatan proses bisnis Detailed Engineering Design (DED) akan dibentuk VP Enjiniring Pembangkit Thermal dan VP Enjiniring Pembangkit EBT. Masing-masing VP akan membawahi 2 Manajer yaitu yang menangani *Basic Engineering Design* dan *Detailed Engineering Design* (DED).
 - ii. Dalam rangka mendukung arahan pemegang saham untuk implementasi PLN SOLID, penguatan dan pengembangan bisnis inti *Detailed Engineering Design* (DED) dan enjiniring EBT, perlu disempurnakan perangkat SDM (Dirkom, Urjab, KKJ) di lingkungan PT PLN Enjiniring.
- b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi (*Leading Industry Capabilities*-alignment misi PLN "SOLID")
 - i. Penguatan kompetensi inti di bidang enjiniring khususnya *Detail Engineering Design* (DED) dengan pengembangan program kepakaran sesuai Pohon Profesi, dahan Profesi dan nama Profesi di lingkungan PT PLN Enjiniring.
 - ii. Menyusun jenjang kepakaran sesuai Pohon Profesi, Dahan Profesi dan Nama Profesi dalam rangka membina karir para Enjinir

- h. *Help achieve the Company's KPI targets*
- i. *Increase the capacity and capability of HR in the fields of Accounting, Taxes and Insurance by proposing the provision of training, workshops and programs for the Accounting profession*
- j. *Assist in meeting the needs of other fields related to Corporate Ratings.*

4. *Human Resources and General Affairs*

In support of the PLN Group "SOLID" mission where PLNE has two mission directions, namely Leading Industry Capabilities and Optimizing Cost Efficiency, this will be aligned with the Human Resources and General Strategy. The implementation of strategy alignment will be described as follows:

- a. *Improvement of organizational structure*
 - i. *In order to strengthen the Detailed Engineering Design (DED) business process, a VP of Thermal Generator Engineering and a VP of EBT Generator Engineering will be formed. Each VP will supervise 2 Managers, namely those who handle Basic Engineering Design and Detailed Engineering Design (DED).*
 - ii. *In order to support the direction of shareholders for the implementation of PLN SOLID, strengthening and developing the core business of Detailed Engineering Design (DED) and EBT engineering, it is necessary to improve the HR tools (Directorate of Communication, Urjab, KKJ) within PT PLN Enjiniring.*
- b. *Capacity building and competence (Leading Industry Capabilities*-alignment PLN "SOLID" mission)
 - i. *Strengthening core competencies in the field of engineering, especially Detail Engineering Design (DED) by developing an expertise program according to the Professional Tree, Profession branch and Professional name within PT PLN Enjiniring.*
 - ii. *Develop the level of expertise according to the Professional Tree, Professional Branch and Professional Name in order to foster the careers of Engineers*

- iii. Melaksanakan *assessment* kompetensi mengacu kepada Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ) yang telah ditetapkan sesuai dengan penyempurnaan Organisasi.
- iv. Melaksanakan program pemenuhan gap kompetensi antara KKJ dan kompetensi pegawai melalui: a) *Knowledge Management*; b) *Training*; c) *Coaching Mentoring Counseling*; d) *Joint Operation* melalui *partnership* perusahaan internasional atau institusi penelitian.
- c. *Optimalisasi biaya (Optimizing Cost Efficiency – alignment misi PLN “SOLID”)*
 - i. Melakukan monitoring efektifitas biaya kepegawaian dengan tolak ukur rasio yang sama atau lebih baik dari rasio biaya SDM/Pendapatan tahun 2018, 2019 dan tahun 2020.
 - ii. Melaksanakan evaluasi peningkatan produktivitas pegawai dengan mempertahankan angka rasio yang sama lebih baik dari perhitungan pendapatan/pegawai (tahun 2018, 2019, dan 2020).

Untuk mendukung implementasi strategi perusahaan dan mendukung kegiatan proses bisnis PT PLN Enjiniring baik bidang Enjiniring maupun non Enjiniring maka dilakukan pengembangan SDM melalui *Human Capital Readiness (HCR)* dan *Organizational Capital Readiness (OCR)* sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapabilitas SDM melalui program sertifikasi, pembelajaran/pelatihan dan penugasan pegawai bisnis inti dan penunjang.
- b. Peningkatan keselarasan strategi perusahaan dengan setiap individu pegawai melalui program internalisasi strategi dan penyelarasan kontrak manajemen hingga level fungsional.
- c. Penyelarasan peraturan atau ketentuan yang berlaku di holding dalam dalam program ratifikasi keputusan direksi untuk mendukung program PLN SOLID.
- d. Konsep CoC dengan penentuan tema isu strategis setiap bulan.
- e. *Assessment* dan peningkatan Budaya Perusahaan (*corporate value*) pada setiap individu pegawai PLN Enjiniring.

- iii. *Carrying out a competency assessment referring to the Job Competency Needs (KKJ) that has been determined in accordance with organizational improvements.*
- iv. *Implementing competency gap fulfillment programs between KKJ and employee competencies through: a) Knowledge Management; b) Training; c) Coaching Mentoring Counseling; d) Joint Operation through partnership with international companies or research institutions.*
- c. *Cost optimization (Optimizing Cost Efficiency – PLN “SOLID” mission alignment)*
 - i. *Monitoring the effectiveness of staffing costs with a benchmark ratio that is equal to or better than the ratio of HR/Revenue costs in 2018, 2019 and 2020.*
 - ii. *Carry out an evaluation of increasing employee productivity by maintaining the same ratio, which is better than the calculation of income/employees (in 2018, 2019, and 2020).*

To support the implementation of the company’s strategy and support the business process activities of PT PLN Enjiniring, both in the engineering and non-engineering fields, HR development is carried out through Human Capital Readiness (HCR) and Organizational Capital Readiness (OCR) as follows:

- a. *Improvement of HR capabilities through certification programs, learning/training and assignment of core and supporting business employees.*
- b. *Increasing the alignment of the company’s strategy with each individual employee through a strategy internalization program and alignment of management contracts to the functional level.*
- c. *Alignment of regulations or provisions that apply to the holding in the ratification program of the board of directors’ decisions to support the PLN SOLID program.*
- d. *CoC concept with determining the theme of strategic issues every month.*
- e. *Assessment and improvement of Corporate Culture (corporate value) for each individual employee of PLN Enjiniring.*

- f. Kaderisasi jabatan structural yang berkualifikasi di dalam semua tingkatan dalam rangka memobilisasi penyelenggaraan strategi Perusahaan.
- g. Meningkatkan implemementasi *Knowledge Management* sebagai sarana dokumentasi Knowledge Asset dan materi pembelajaran untuk setiap pegawai PLN Enjiniring.
- h. Menciptkan hubungan industrial yang harmonis dengan pembinaan hubungan industrial dengan pegawai PLN Enjiniring.
- i. Implementasi inovasi tidak terbatas pada lomba karya inovasi dalam setiap *improvement* yang dilakukan untuk mendukung kinerja PLNE Enjiniring.
- j. *Benchmarking* dengan perusahaan ternama di dalam dan luar negeri.

Untuk prasarana umum, optimalisasi biaya administrasi dan umum kedepan dengan program penyatuan semua aktifitas perusahaan dalam satu gedung untuk efektifitas proses kegiatan perusahaan.

- a. Penyempurnaan pengelolaan ruang kerja dan fasilitas untuk terciptanya suasana kondusif dan kenyamanan bekerja.
 - b. Menerapkan manajemen K3 secara konsisten.
 - c. Tingkat preventif terkait kesehatan pegawai.
5. Pengembangan Usaha dan Inovasi
- a. Dukungan untuk Pencapaian Kinerja Anak Perusahaan dan Afiliasi
Bidang Pengembangan Usaha dan Perencanaan Korporat ikut berperan dalam pemberian dukungan dana untuk Anak Perusahaan melalui SHL/Bridging Loan dimana pemberian SHL/Bridging Loan dimana pemberian SHL/Bridging Loan diutamakan pada hal yang bersifat strategis atau emergency (berbasis risiko).
 - b. EBITDA Management Secara Menyeluruh
Bidang Pengembangan Usaha dan Perencanaan Korporat ikut berpartisipasi menggunakan EBITDA sebagai cascading tolak ukur kinerja korporat. Seluruh karyawan baik struktural maupun fungsional dapat memahami struktur EBITDA proses bisnisnya masing-masing, agar setiap anggaran yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat memberikan hasil yang nyata & terukur. Target Keuangan dan Target Produksi ditetapkan pada setiap langkah proses bisnis di setiap lini bisnis PLNE (level bidang & satuan).

- f. *The cadre of qualified structural positions at all levels in order to mobilize the implementation of the Company's strategy.*
- g. *Improving the implementation of Knowledge Management as a means of documenting Knowledge Assets and learning materials for every employee of PLN Enjiniring.*
- h. *Creating harmonious industrial relations by fostering industrial relations with PLN Enjiniring employees.*
- i. *The implementation of innovation is not limited to the innovation work competition in every improvement made to support the performance of PLNE Engineering.*
- j. *Benchmarking with well-known companies at home and abroad.*

For public infrastructure, optimizing administrative and general costs in the future with a program to unify all company activities in one building for the effectiveness of the company's activity processes.

- a. *Improving the management of workspaces and facilities to create a conducive and comfortable working atmosphere.*
- b. *Implement OHS management consistently.*
- c. *Preventive level related to employee health.*

5. *Business Development and Innovation*
- a. *Support for the Achievement of Subsidiaries and Affiliates*
The field of Business Development and Corporate Planning plays a role in providing financial support for Subsidiaries through SHL/Bridging Loans where the provision of SHL/Bridging Loans is prioritized on strategic or emergency (risk-based) matters.
 - b. *Overall EBITDA Management*
The Division of Business Development and Corporate Planning participates in using EBITDA as a cascading benchmark for corporate performance. All employees, both structural and functional, can understand the EBITDA structure of their respective business processes, so that every budget issued by the company can provide tangible & measurable results. Financial Targets and Production Targets are set at every step of the business process in every PLNE business line (field & unit level).

- c. **Pengelolaan Kepuasan Pelanggan dan Penanganan Keluhan Pelanggan**
Bidang Pengembangan Usaha dan Perencanaan Korporat ikut serta mengimplementasikan salah satu sasaran PLN pada Program Transformasi PLN yaitu proses kerja berbasis *Customer Focus* dimana pengelolaan kepuasan pelanggan dan penanganan keluhan pelanggan dilakukan di setiap proyek. Kepuasan pelanggan dan penanganan keluhan pelanggan memiliki korelasi yang signifikan terhadap keberlangsungan bisnis PLNE. Untuk sementara fungsi tersebut akan diatur melalui program tim KAM (*Key Account Management*) sebelum menjadi tupoksi yang melekat di masing-masing bidang.
- d. **Alignment Portofolio PLNE sesuai SOLID – Rencana Akuisisi PT REC**
PLNE siap untuk menjalankan seluruh rencana alignment sesuai dengan misi SOLID PLN dan RJP PLNE 2020-2024. Akuisisi PT REC direncanakan akan diimplementasikan tahun 2022, maka Bidang Pengembangan Usaha dan Perencanaan Korporat bersama bidang terkait lainnya akan mempersiapkan kajian untuk tahap kedua, yaitu *due diligence* PT REC di tahun 2021. Tahap pertama yang merupakan kajian dan valuasi telah diselesaikan pada tahun 2020. Untuk melanjutkan kajian tahap kedua, PLNE akan meminta ijin kepada PLN untuk dapat melakukan *due diligence* PT REC tahun 2021.

- c. **Customer Satisfaction Management and Customer Complaint Handling**
The Division of Business Development and Corporate Planning participates in implementing one of PLN's targets in the PLN Transformation Program, namely a Customer Focus-based work process where customer satisfaction management and customer complaint handling are carried out in each project. Customer satisfaction and handling customer complaints have a significant correlation to PLNE's business continuity. For the time being, these functions will be managed through the KAM (Key Account Management) team program before becoming the tupoksi inherent in each field.
- d. **PLNE Portfolio Alignment according to SOLID – PT REC Acquisition Plan**
PLNE is ready to carry out all alignment plans in accordance with PLN's SOLID mission and PLNE's RJP 2020-2024. The acquisition of PT REC is planned to be implemented in 2022, so the Business Development and Corporate Planning Division together with other related fields will prepare a study for the second phase, namely PT REC due diligence in 2021. The first stage, which is a study and valuation, has been completed in 2020. continuing the second phase of the study, PLNE will ask PLN for permission to carry out due diligence of PT REC in 2021.

KINERJA OPERASI PER SEGMENT USAHA

OPERATING PERFORMANCE PER BUSINESS SEGMENT

PELANGGAN PT PLN ENJINIRING

1. Pelanggan

Pelanggan PLNE dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok yaitu Pelanggan PLN, Pelanggan Anak Perusahaan PLN dan Pelanggan Non PLN Group. Pada tahun 2021, 79% (tujuh puluh Sembilan persen) pelanggan PLNE adalah PLN Holding, sedangkan 9% (sembilan persen) merupakan pelanggan Anak Perusahaan PLN dan 12% (dua belas persen) merupakan pelanggan Non PLN Group. Selalu berkembang dan bertumbuh, PLN Enjiniring senantiasa berupaya menjangkau Pelanggan lebih luas lagi.

Terdapat 27 (dua puluh tujuh) Pelanggan baru yang sebelumnya tidak memberikan pesanan jasa di tahun 2020, yaitu PLN UIP Sumatera Bagian Tengah, PLN UIK Sumatera Bagian Selatan, PLN UIW Bangka Belitung, PLN UIT Jawa Bagian Barat, PLN UID Jawa Barat, PLN UIT Jawa Bagian Timur dan Bali, PLN UID Bali, PLN UIP Kalimantan Bagian Timur, PLN UIW Suluttenggo, PLN UIW Sulselrabar, PLN UIKL Sulawesi, PLN UIW Nusa Tenggara Timur, PLN Batubara, PT PJB, PT Indo Green Power, PT Pertamina (Persero), PT Kilang Pertamina Internasional, PT Krakatau Posco Energy, PT Kayan Hydropower Nusantara, PT Puri Prakarsa Mabar, ThorCon International PTE. LTD., PT Dana Pensiun PLN, PT Synthetic Rubber Indonesia, Join Operation SCL – NEM, PT Kwarsa Hexagon, PT Gamma Utama Sejati, PT Mitrajaya Abadi Bersama.

Selaras dengan Visi Menjadi Perusahaan Konsultan Enjiniring Terintegrasi yang Terkemuka se Asia Tenggara dan Pilihan No. 1 Pelanggan, pada tahun 2021 PLNE berhasil mendapatkan kepercayaan untuk bekerja sama dengan Pelanggan Non PLN Group dari luar Indonesia sebagai berikut :

1. PT Kayan Hydropower Nusantara yang merupakan Perusahaan PMA yang dibentuk melalui usaha patungan antara PT Kayan Patria Pratama (KPP) dengan Sarawak Energy Berhad, melakukan kerja sama dengan PLNE untuk Jasa Profesional untuk Studi Sistem Evakuasi Tenaga Listrik PLTA Mentarang Induk

PT PLN ENJINIRING CUSTOMERS

1. Customers

PLNE customers are divided into 3 (three) groups, namely PLN Customers, PLN Subsidiary Customers and Non PLN Group Customers. In 2021, 79% (seventy-nine percent) of PLNE's customers are PLN Holding, while 9% (nine percent) are customers of PLN's Subsidiaries and 12% (twelve percent) are Non-PLN Group customers. Always developing and growing, PLN Enjiniring always strives to reach a wider range of customers.

There are 27 (twenty seven) new customers who previously did not provide service orders in 2020, namely PLN UIP Sumatera Bagian Tengah, PLN UIK Sumatera Bagian Selatan, PLN UIW Bangka Belitung, PLN UIT Jawa Bagian Barat, PLN UID Jawa Barat, PLN UIT Jawa Bagian Timur dan Bali, PLN UID Bali, PLN UIP Kalimantan Bagian Timur, PLN UIW Suluttenggo, PLN UIW Sulselrabar, PLN UIKL Sulawesi, PLN UIW Nusa Tenggara Timur, PLN Batubara, PT PJB, PT Indo Green Power, PT Pertamina (Persero), PT Kilang Pertamina Internasional, PT Krakatau Posco Energy, PT Kayan Hydropower Nusantara, PT Puri Prakarsa Mabar, ThorCon International PTE. LTD., PT Dana Pensiun PLN, PT Synthetic Rubber Indonesia, Join Operation SCL – NEM, PT Kwarsa Hexagon, PT Gamma Utama Sejati, PT Mitrajaya Abadi Bersama.

Aligned with the Vision to be the Leading Integrated Engineering Consulting Company in Southeast Asia and the No. 1 Customer, in 2021 PLNE succeeded in gaining the trust to cooperate with Non PLN Group Customers from outside Indonesia as follows:

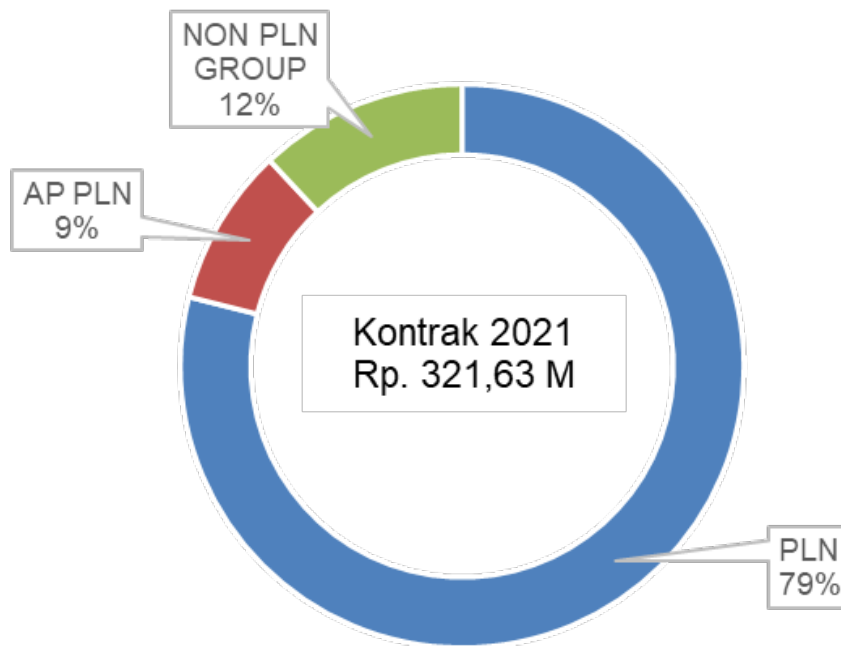
1. PT Kayan Hydropower Nusantara, which is a PMA Company formed through a joint venture between PT Kayan Patria Pratama (KPP) and Sarawak Energy Berhad, collaborates with PLNE for Professional Services for the Study of the Electric Power Evacuation System of the Mentarang Induk Hydropower Plant

2. ThorCon International PTE. LTD melakukan kerja sama dengan PLNE untuk Jasa Profesional untuk Jasa Konsultansi Enjiniring untuk Pembangkit Listrik Tenaga Thorium Thorcon 500 MW
3. Join Operation antara BUT Sinohydro Corporation Limited dengan PT Nusantara Energi Mandiri (Join Operation SCL – NEM) melakukan kerja sama dengan PLNE untuk Jasa Konsultansi Transmission Line & Substation Engineering Cirata 145 MW Floating Solar Power Project

2. ThorCon International PTE. LTD cooperated with PLNE for Professional Services for Engineering Consulting Services for Thorium Thorcon 500 MW Power Plant
3. Join Operation between BUT Sinohydro Corporation Limited and PT Nusantara Energi Mandiri (Join Operation SCL – NEM) in cooperation with PLNE for Consultancy Services for Transmission Line & Substation Engineering Cirata 145 MW Floating Solar Power Project

Komposisi penjualan per kelompok pelanggan dapat dilihat pada Gambar berikut :

The composition of sales per customer group can be seen in the following figure:



Gambar Komposisi Penjualan per Kelompok Pelanggan

Figure of Sales Composition per Customer Group

Berikut merupakan data kontrak per pelanggan :

The following is the contract data per customer:

A. Pelanggan PLN :

A. PLN customers:

Tabel Data Kontrak Pelanggan PLN

PLN Customer Contract Data Table

Pemberi Kerja	Volume Kontrak	Nilai Kontrak (Rp.)
PT PLN (Persero) KANTOR PUSAT	85	134,040,690,481
PT PLN (Persero) UNIT INDUK PUSAT PENGATUR BEBAN JAMALI	1	999,733,000
PT PLN (Persero) PUSENLIS	1	1,136,670,000
PT PLN (Persero) UIP SUMBAGTENG	2	6,206,735,069
PT PLN (Persero) UIK SUMATERA BAGIAN SELATAN	2	1,676,551,500
PT PLN (Persero) UIW RIAU DAN KEPULAUAN RIAU	3	1,512,015,300
PT PLN (Persero) UIW BABEL	1	50,687,500
PT PLN (Persero) UIT JAWA BAGIAN BARAT	5	18,257,684,200
PT PLN (Persero) PLN UID JAKARTA RAYA	3	8,161,797,000
PT PLN (Persero) PLN UID BANTEN	2	913,675,000
PT PLN (Persero) PLN UID JAWA BARAT	1	1,025,585,400
PT PLN (Persero) UIT JAWA BAGIAN TENGAH	2	4,817,618,600
PT PLN (Persero) UIK TANJUNG JATI B	1	552,806,667
PT PLN (Persero) UIP JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI	1	3,365,284,860
PT PLN (Persero) UIT JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI	5	5,509,590,361
PT PLN (Persero) UID JAWA TIMUR	1	698,232,900
PT PLN (Persero) UIP NUSATENGARA	3	8,886,811,292
PT PLN (Persero) UID BALI	1	764,474,250
PT PLN (Persero) UIP KALIMANTAN BAGIAN TIMUR	3	11,262,338,759
PT PLN (Persero) UIW KALIMANTAN BARAT	2	498,977,227
PT PLN (Persero) UIP SULAWESI BAGIAN UTARA	6	22,845,270,000
PT PLN (Persero) UIW SULAWESI UTARA TENGAH DAN GORONTALO	4	2,829,856,300
PT PLN (Persero) UIW SULAWESI SELATAN, TENGGARA DAN BARAT	3	2,071,573,000
PT PLN (Persero) UIKL SULAWESI	2	1,608,677,747
PT PLN (Persero) UIP MALUKU DAN PAPUA	1	1,042,839,800
PT PLN (Persero) UIW PAPUA DAN PAPUA BARAT	5	3,940,769,350
PT PLN (Persero) UIW NUSATENGGARATIMUR	2	872,833,953
PT PLN (Persero) UIW MALUKU DAN MALUKU UTARA	7	5,340,249,200
PT PLN (Persero) UIW NUSA TENGGARA BARAT	6	3,032,881,350
TOTAL	161	253,922,910,066

B. Pelanggan Anak Perusahaan PLN

Tabel Data Kontrak Pelanggan Anak Perusahaan PLN

Pemberi Kerja	Volume Kontrak	Nilai Kontrak (Rp.)
PT PLN BATAM	1	299,900,000
PT INDONESIA POWER	10	4,810,761,000
PLN BATUBARA	2	1,670,722,000
PT PLN GAS DAN GEOTHERMAL	4	6,709,712,710
PT PEMBANGKITAN JAWA BALI	5	15,697,588,694
TOTAL	22	29,188,684,404

B. PLN Subsidiary Customers

PLN Subsidiary Customer Contract Data Table

C. Pelanggan Non PLN Group

Tabel Data Kontrak Pelanggan Non PLN Group

Pemberi Kerja	Volume Kontrak	Nilai Kontrak (Rp.)
PT INDO GREEN POWER	1	190,950,000
PT HUADI NICKEL ALLOY INDONESIA	1	62,000,000
PT SUMBAWA JUTARAYA	1	2,659,087,700
PT PERTAMINA (PERSERO)	1	3,812,577,000
PT KILANG PERTAMINA INTERNATIONAL	1	613,497,400
PT KRAKATAU POSCO ENERGY	1	285,500,000
PT KAYAN HYDROPOWER NUSANTARA	1	19,960,802,073
PT PURI PRAKARSA MABAR	1	324,575,000
THORCON INTERNATIONAL PTE.LTD	1	5,181,818,182
PT DANA PENSIUN PLN	1	597,900,000
PT SYNTHETIC RUBBER INDONESIA	1	371,013,818
JO SCL-NEM	1	2,693,606,700
PT KWARSA HEXAGON	1	199,652,000
PT GAMMA UTAMA SEJATI	1	1,010,610,000
PT MITRAJAYA ABADI BERSAMA	1	561,446,200
TOTAL	15	38,525,036,073

C. Non-PLN Group Customers

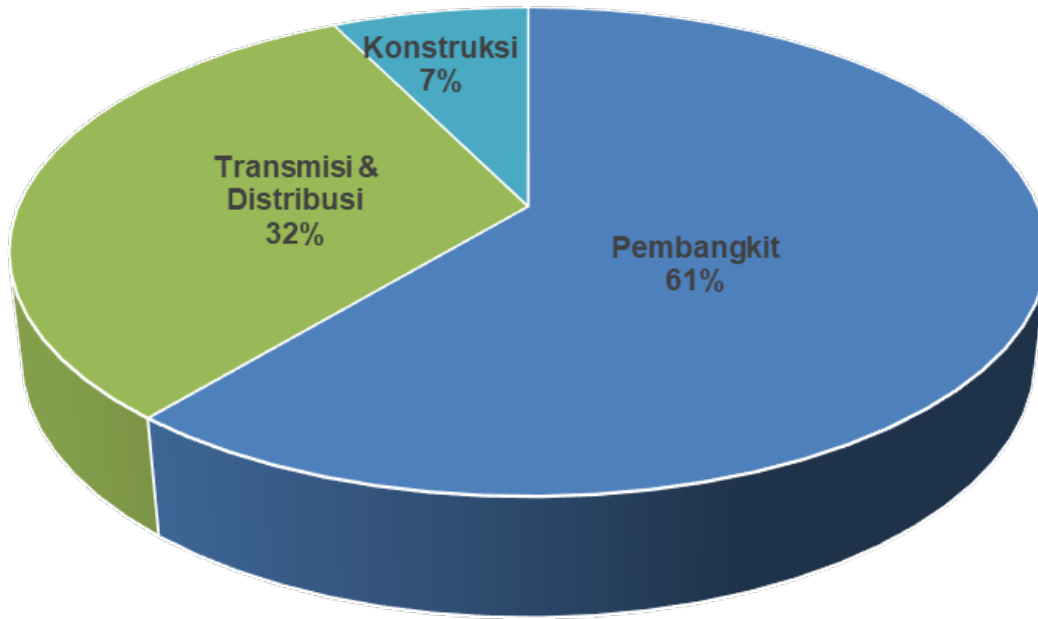
Table of Non-PLN Group Customer Contract Data

2. Produk

Berdasarkan tim produksi, Produk Enjiniring secara umum dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok yaitu Produk Enjiniring Pembangkit, Produk Enjiniring Transmisi dan Distribusi serta Produk Enjiniring Konstruksi. Pada tahun 2021, berikut komposisi penjualan produk enjiniring berdasarkan pengelompokan tersebut di atas :

2. Product

Based on the production team, Engineering Products are generally divided into 3 (three) groups, namely Generating Engineering Products, Transmission and Distribution Engineering Products and Construction Engineering Products. In 2021, the following is the composition of engineering product sales based on the above grouping:



Gambar Komposisi Penjualan per Kelompok Produksi
Figure of Sales Composition per Production Group

Selaras dengan aspirasi Green pada transformasi PLN yaitu membawa Indonesia transisi menuju ke energi terbarukan berskala besar secara cepat dan efisien, PLNE turut mengambil peran yang besar. Pada tahun 2021, 32% (tiga puluh dua persen) dari penjualan merupakan penjualan produk pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Produk yang dimaksud yaitu Penyusunan Pre-Feasibility Study, Feasibility Study, Grid Study, Bid Document, HPE, Dokumen Lingkungan, Request For Proposal, Draft PJBL, Pendampingan Lelang, Design Review, Supervisi Konstruksi, Desain Penyambungan, Kajian Teknis terkait EBT.

I. Produk Enjiniring Pembangkit

Penjualan produk enjiniring pembangkit sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) produk dengan daftar sebagai berikut:

In line with Green's aspirations for PLN's transformation, which is to bring Indonesia into a fast and efficient transition to large-scale renewable energy, PLNE also plays a big role. In 2021, 32% (thirty two percent) of sales will be sales of New and Renewable Energy (EBT) development products. The products in question are Preparation of Pre-Feasibility Study, Feasibility Study, Grid Study, Bid Document, HPE, Environmental Document, Request For Proposal, Draft PJBL, Auction Assistance, Design Review, Construction Supervision, Connection Design, Technical Studies related to EBT.

I. Generating Engineering Products

Sales of generator engineering products are 280 (two hundred and eighty) products with the following list:

Tabel Penjualan Produk Enjiniring Pembangkit

Generating Engineering Product Sales Table

Produk Enjiniring	Volume
Feasibility Study	39
Engineering Design	22
Survey	9
Soil Investigation	2
Bid Document	50
HPE	55
Pendampingan Tender	8
Design Review	14
Kajian Enjiniring / Lain - lain	81
Total Produk	280

II. Produk Enjiniring Transmisi dan Distribusi :

Penjualan produk enjiniring pembangkit sebanyak 314 (tiga ratus empat belas) produk dengan daftar sebagai berikut :

Tabel Penjualan Produk Enjiniring Transmisi dan Distribusi

II. Transmission and Distribution Engineering Products :

Sales of generator engineering products totaled 314 (three hundred and fourteen) products with the following list:

Transmission and Distribution Engineering Product Sales Table

Produk Enjiniring	Volume
Feasibility Study	3
Engineering Design	34
Survey	26
Soil Investigation	33
Bid Document	56
HPE	59
Pendampingan Tender	13
Design Review	13
Kajian Enjiniring / Lain - lain	77
Total Produk	314

III. Produk Enjiniring Konstruksi

Pada tahun 2021, Penjualan Produk Supervisi Konstruksi sebanyak 9 (sembilan) produk, di mana 2 (dua) diantaranya PLNE menjadi *consultant leading* yaitu untuk :

1. Jasa Konsultansi Supervisi Desain dan Supervisi Konstruksi Pekerjaan Penggantian Konduktor SUTET 500 kV Bojanegara - Balaraja
2. Pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Proyek Desain Revitalisasi Sistem Kelistrikan Istana Negara

III. Construction Engineering Products

In 2021, Sales of Construction Supervision Products totaled 9 (nine) products, of which 2 (two) PLNE became the leading consultants, namely for:

1. Consultancy Services for Design Supervision and Construction Supervision for Replacement Works for 500 kV SUTET Conductor Bojanegara - Balaraja
2. Project Management Consultancy Services Design for the Revitalization of the State Palace Electricity System

KINERJA OPERASI BIDANG

1. Bidang Pembangkit

REALISASI PENCAPAIAN KINERJA

Pada tahun 2021, realisasi pencapaian kinerja Bidang Pembangkit adalah sebagai berikut:

- Dalam hal kualitas, sesuai dengan target, Bidang Pembangkit mendapatkan 57 *Engineering First Pass Yield* dari 57 produk (*Bid Document/Feasibility Study/Kajian/HPE*) yang ditugaskan oleh Pemberi Kerja tahun 2021 dan menjadi target EFPY tahun 2021.
- Dalam hal ketepatan waktu, Bidang Pembangkit menyelesaikan 57 produk (*Bid Document/Feasibility Study/Kajian/HPE*) tepat waktu dari target 57 produk (*Bid Document/Feasibility Study/Kajian/HPE*) yang ditugaskan oleh Pemberi Kerja tahun 2021 dan menjadi target OTD tahun 2021.
- Dalam hal komposisi enjinir *subletting* untuk Produk Enjiniring (*Bid Document/Feasibility Study/Kajian/HPE*), pada tahun 2021 Bidang Pembangkit menggunakan 25,49% enjinir *subletting* dari target yang ditetapkan yaitu kurang dari 19,80%.

REALISASI PENCAPAIAN PEKERJAAN

PLN Enjiniring sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang *power Engineering company* untuk bidang pembangkitan mengerjakan pekerjaan antara lain:

- Pekerjaan *Feasibility Study (FS)*
- Penyusunan *Bid Document*
- Pembuatan Harga Perkiraan Enjinir (HPE)
- Pendampingan dalam Proses *Tender*
- Pekerjaan *Design Review*
- Kajian-Kajian

Pada tahun 2021, Bidang Pembangkit masih melanjutkan 3 (tiga) pekerjaan yang termasuk proyek strategis, yaitu: Jasa Konsultansi untuk Supervisi Desain dan Konstruksi PLTA Jatigede, pekerjaan Jasa Konsultansi Update Desain, Supervisi Desain dan Supervisi Konstruksi PLTA

FIELD OPERATION PERFORMANCE

1. Power Plant

REALIZED PERFORMANCE ACHIEVEMENTS

In 2021, the realization of the Power Generation Sector's performance achievements are as follows:

- In terms of quality, according to the target, the Power Generation Sector received 57 *Engineering First Pass Yields* from 57 products (*Bid Document/Feasibility Study/Kajian/HPE*) assigned by the Employer in 2021 and became the EFPY target in 2021.
- In terms of timeliness, the Generating Division completed 57 products (*Bid Document/Feasibility Study/Kjian/HPE*) on time from the target 57 products (*Bid Document/Feasibility Study/Kjian/HPE*) assigned by the Employer in 2021 and became the OTD target year 2021.
- In terms of the composition of *subletting engineers* for engineering products (*Bid Document/Feasibility Study/Kjian/HPE*), in 2021 the Power Plant uses 25.49% *subletting engineers* from the set target, which is less than 19.80%.

REALIZED JOB ACHIEVEMENT

PLN Enjiniring as a company engaged in the field of *power Engineering company* for the field of power generation works, among others:

- *Job Feasibility Study (FS)*
- *Bid Document Preparation*
- *Preparation of Engineer's Estimated Price (HPE)*
- *Assistance in the Tender Process*
- *Job Design Review*
- *Studies*

In 2021, the Power Plant sector will continue to work on 3 (three) strategic projects, namely: *Consultancy Services for Supervision of Design and Construction of the Jatigede Hydroelectric Power Plant, Consultancy Services for Design Updates, Design Supervision and Construction Supervision for the Upper Cisokan Pumped*

Upper Cisokan Pumped Storage (4x260 MW) dan Jasa Konsultansi Project Management Team PLTA Upper Cisokan. Termasuk proyek strategis tersebut, pada tahun 2021, total kontrak yang telah dilaksanakan oleh Bidang Pembangkit adalah 160 kontrak, dimana 59 kontrak merupakan kontrak carry over dari tahun sebelumnya dan 101 kontrak baru di tahun 2021 dimana di antaranya terdapat 65 kontrak yang sudah selesai pekerjaannya.

Pada tahun 2021 ini, Bidang Pembangkit melaksanakan penugasan-penugasan baru yang terkait dengan pembangkit thermal, pembangkit berbahan bakar gas, pembangkit EBT, dan infrastruktur gas. Total penugasan baru (termasuk yang telah terkontrak) Tahun 2021 yang sudah dikerjakan oleh Bidang Pembangkit pada tahun 2021 adalah 130 pekerjaan, diantaranya penugasan dari PT PLN (Persero) DIV EBT, PT PLN (Persero) DIV RPS, PT PLN (Persero) DIV MRE, PT PLN (Persero) DIV MPE, PT PLN (Persero) DIV KLP, PT PLN (Persero) DIV GBM, PLN PUSENLIS, PT PLN (Persero) UIW NTB, PT PLN (Persero) UID Banten, PT PLN (Persero) UIW MMU, PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo, PT PLN (Persero) UIW Sulselrabar, PT PLN (Persero) UIP Kalbagteng, PT PLN (Persero) UIP SUL, PT PLN (Persero) UIP NUS, PT PLN (Persero) UIP MPA, PT PLN (Persero) UIK SBS, PT PLN (Persero) UIK TJB, PT PLN (Persero) UIP SBT, PT PLN Batubara, PT PLN Batam, PT PJB, PT PLN GG dan PT Indonesia Power, serta dari Eksternal/diluar PLN Group yaitu PT Krakatau Poscoenergy, PT Puri Perkasa Surya dan Thorcon Internasional Pte. Ltd.

2. Bidang Transmisi dan Distribusi

REALISASI PENCAPAIAN KINERJA

Pada tahun 2021, realisasi pencapaian kinerja Bidang Transmisi dan Distribusi adalah sebagai berikut:

- Dalam hal kualitas Bidang Transmisi dan Distribusi mendapatkan 70 (tujuh puluh) *Engineering First Pass Yield* dari target 16 (enam belas) Produk oleh Pemberi Kerja untuk tahun 2021.
- Dalam hal ketepatan waktu atau *Engineering On-Time Delivery*, Bidang Transmisi dan Distribusi menyelesaikan 70 (tujuh puluh) produk untuk tahun 2021.

Storage Hydroelectric Power Plant (4x260 MW) and Project Management Consultancy Services for the Upper Cisokan Hydroelectric Power Plant. Including these strategic projects, in 2021, the total contracts that have been implemented by the Power Generation Sector are 160 contracts, of which 59 contracts are carry over contracts from the previous year and 101 new contracts in 2021, of which 65 contracts have been completed.

In 2021, the Power Plant will carry out new assignments related to thermal power plants, gas-fired power plants, EBT plants, and gas infrastructure. The total new assignments (including contracted ones) in 2021 that have been carried out by the Power Generation Sector in 2021 are 130 jobs, including assignments from PT PLN (Persero) DIV EBT, PT PLN (Persero) DIV RPS, PT PLN (Persero) DIV MRE, PT PLN (Persero) DIV MPE, PT PLN (Persero) DIV KLP, PT PLN (Persero) DIV GBM, PLN PUSENLIS, PT PLN (Persero) UIW NTB, PT PLN (Persero) UID Banten, PT PLN (Persero) UIW MMU, PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo, PT PLN (Persero) UIW Sulselrabar, PT PLN (Persero) UIP Kalbagteng, PT PLN (Persero) UIP SUL, PT PLN (Persero) UIP NUS, PT PLN (Persero) UIP MPA, PT PLN (Persero) UIK SBS, PT PLN (Persero) UIK TJB, PT PLN (Persero) UIP SBT, PT PLN Batubara, PT PLN Batam, PT PJB, PT PLN GG and PT Indonesia Power, as well as from External / outside the PLN Group namely PT Krakatau Poscoenergy, PT Puri Perkasa Surya and Thorcon International Pte. Ltd.

2. Transmission and Distribution Sector

REALIZED PERFORMANCE ACHIEVEMENTS

In 2021, the realization of performance achievements in the Transmission and Distribution Sector is as follows:

- *In terms of quality in the Transmission and Distribution Sector, the Employer will receive 70 (seventy) Engineering First Pass Yields from the target of 16 (sixteen) Products by the Employer.*
- *In terms of punctuality or Engineering On-Time Delivery, the Transmission and Distribution Division has completed 70 (seventy) products for 2021.*

- Dalam hal komposisi enjinir *subletting* untuk Produk Enjiniring (*Bid Document/Feasibility Study/Kajian/HPE*), Bidang Transmisi dan Distribusi menggunakan 18,87% enjinir *subletting* dari target yang ditetapkan yaitu kurang dari 19,80%.

- *In terms of the composition of subletting engineers for engineering products (Bid Document/Feasibility Study/Kjian/HPE), the Transmission and Distribution Sector uses 18.87% of subletting engineers of the set target, which is less than 19.80%.*

REALISASI PENCAPAIAN PEKERJAAN

REALIZED JOB ACHIEVEMENT

PLN Enjiniring sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang *power Engineering* company untuk Bidang Transmisi dan Distribusi mengerjakan pekerjaan antara lain:

PLN Enjiniring as a company engaged in the power Engineering company for the Transmission and Distribution Sector does the following work:

- Pekerjaan *Survey* dan *Soil Investigation*
- Penyusunan *Basic Design*
- Penyusunan *Bid Document*
- Pembuatan Harga Perkiraan Enjinir (HPE)
- Pendampingan dalam Proses *Tender*
- Pendampingan dalam proses *Contract Discussion Agreement*
- Pekerjaan *Design Review*
- Pengawasan QA/QC
- Pendampingan dalam *Due Diligent Visit*
- Studi Sistem Ketenagalistrikan
- Studi Lainnya

- *Survey and Soil Investigation Pekerjaan*
- *Preparation of Basic Design*
- *Bid Document Preparation*
- *Preparation of Engineer's Estimated Price (HPE)*
- *Assistance in the Tender Process*
- *Assistance in the Contract Discussion Agreement process*
- *Job Design Review*
- *QA/QC supervision*
- *Assistance in Due Diligent Visit*
- *Electricity System Study*
- *Other Studies*

Pada tahun 2021, Bidang Transmisi dan Distribusi mendapatkan 37 (tiga puluh tujuh) kontrak baru, sehingga total kontrak yang dilaksanakan oleh Bidang Transmisi dan Distribusi pada tahun ini adalah 108 (seratus delapan) kontrak, dimana 54 (lima puluh empat) kontrak diantaranya telah dilakukan penutupan kontrak dan 54 (lima puluh empat) kontrak lainnya masih dilanjutkan pekerjaannya hingga tahun berikutnya.

In 2021, the Transmission and Distribution Sector received 37 (thirty seven) new contracts, so that the total contracts executed by the Transmission and Distribution Sector this year are 108 (one hundred eight) contracts, of which 54 (fifty four) contracts have been executed. the closing of the contract and 54 (fifty four) other contracts are still being worked on until the following year.

Selain pekerjaan yang sudah terkontrak tersebut di atas, Bidang Transmisi dan Distribusi juga mengerjakan 11 (sebelas) surat tugas, diantaranya penugasan dari PT PLN (Persero) PUSAT DIV MRE, PT PLN (Persero) UIP Maluku Papua, PT PLN (Persero) UID JAYA, PT PLN (Persero) UID JABAR, PT PLN (Persero) UIP JBTB.

In addition to the work already contracted as mentioned above, the Transmission and Distribution Sector is also working on 11 (eleven) assignments, including assignments from PT PLN (Persero) DIV MRE CENTER, PT PLN (Persero) UIP Maluku Papua, PT PLN (Persero) UID JAYA, PT PLN (Persero) UID JABAR, PT PLN (Persero) UIP JBTB.

3. Bidang Konstruksi

REALISASI PENCAPAIAN KINERJA

Pada tahun 2021, realisasi pencapaian kinerja Bidang Konstruksi dalam hal produktivitas supervisi konstruksi, bidang Konstruksi mencapai 195,64% dari target 100% yang ditetapkan. Pada tahun 2021, Bidang Konstruksi mendapatkan 6 kontrak baru, sehingga total kontrak yang dilaksanakan oleh Bidang Konstruksi adalah 36 kontrak pekerjaan, dimana ada 2 proyek selesai pada akhir tahun ini. Diantara 36 kontrak yang masih dilaksanakan Bidang Konstruksi, 1 kontrak diantaranya adalah proyek strategis yaitu Jasa Konsultansi Untuk Supervisi Desain dan Konstruksi PLTA Jatigede.

Tabel Progres Pekerjaan Supervisi Desain dan Konstruksi PLTA Jatigede

Jasa Konsultansi Untuk Supervisi Konstruksi dan QA/QC Pembangunan PLTA Jatigede	
No. Kontrak	0295.PJ/613/DIR/2014
Tanggal	24 September 2014
Nilai Kontrak	IDR 69.827.942.833,58 USD 8.218.353,54
Kontrak Berakhir	31 Desember 2022 (Amd 3)
Progres Proyek	90.85%
Kendala Saat Ini	<ul style="list-style-type: none">- Pengeboran pada horizontal penstock telah memasuki zona transisi lapisan tanah breksia & claystone sehingga rawan terjadinya longsor- Pemasangan stoplog regulating dam terlambat- Keterlambatan tim komisioning kontraktor dari China karena masih ada kebijakan dari pemerintah perihal pembatasan penerbangan masuk & keluar
Charge Code	E.I.3.13.01

3. Construction Sector

REALIZED PERFORMANCE ACHIEVEMENTS

In 2021, the realization of the performance achievement of the Construction Sector in terms of productivity of construction supervision, the Construction sector reached 195.64% of the 100% target set. In 2021, the Construction Sector received 6 new contracts, so the total contracts executed by the Construction Sector were 36 work contracts, of which 2 projects were completed by the end of this year. Among the 36 contracts that are still being implemented in the Construction Sector, 1 of them is a strategic project, namely Consultancy Services for Supervision of Design and Construction of the Jatigede Hydroelectric Power Plant.

Table of Work Progress of Jatigede Hydropower Design and Construction Supervision

4. Bidang Pengusahaan

Sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2021, bidang Pengusahaan menyampaikan laporan kegiatan tahun 2021. Pelaksanaan kegiatan dalam memenuhi pencapaian target tahun 2021 sesuai dengan program kerja dan kontrak management bidang Pengusahaan. Pada periode tahun 2021 kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Pengusahaan adalah pengelolaan dan O&M CNG Plant Bangkanai 5,2 MMSCFD Kalimantan Tengah yang merupakan sebagai pendapatan pengembangan enjiniring PLNE diluar pendapatan enjiniring. RKAP tahun 2021 pendapatan dari pengembangan enjiniring ditargetkan sebesar Rp. 93,1 Milyar dari hasil pengelolaan CNG plant Bangkanai.

REALISASI PENCAPAIAN PEKERJAAN

CNG PLANT BANGKANAI

CNG Plant Bangkanai dibangun berdasarkan :

1. Surat No.1917/122/DIRUT/2014 tanggal 25 Juli 2014 perihal Penugasan Pelaksanaan Pembangunan CNG Plant di Bangkanai dan
2. Surat PT PLN (Persero) No.1012/122/DIVGBM/2014-R perihal penugasan sebagai investor pembangunan CNG Plant di KalimantanTengah dan
3. Perjanjian CNG Plant Bangkanai 5,2 MMSCFD antara PT PLN (Persero) Regional Kalimantan yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 2015 dengan Nomor Perjanjian No: 0514.PJ/EPI.01.01/DIR/2015 sebagai Penyediaan Jasa Pre-Treatment Gas dan CNG Kompresi Gas) Untuk Keperluan Pembangkit Peaker di Bangkanai–Kalimantan Tengah.

CNG Plant Bangkanai akan menyalurkan gas ke PLTMG Peaker Bangkanai Tahap I dengan kapasitas 155 MW pada saat peaking hour selama 5 jam.

4. Business Sector

In accordance with the Company's Work Plan and Budget (RKAP) 2021, the Business sector submits a 2021 activity report. The implementation of activities to meet the target achievement in 2021 is in accordance with the work program and management contract in the Concession sector. In the 2021 period, the activities carried out by the Business Sector are the management and O&M of the Bangkanai CNG Plant 5.2 MMSCFD Central Kalimantan which is the revenue for PLNE engineering development outside of engineering income. RKAP 2021 revenue from engineering development is targeted at Rp. 93.1 billion from the management of the Bangkanai CNG plant.

REALIZED JOB ACHIEVEMENT

CNG PLANT BANGKANAI

Bangkanai CNG Plant was built based on:

1. Letter No.1917/122/DIRUT/2014 dated July 5, 2014 regarding the Assignment of Implementation of CNG Plant Development in Bangkanai and
2. Letter of PT PLN (Persero) No. 1012/122/DIVGBM/2014-R regarding the assignment as an investor in the construction of CNG Plants in Central Kalimantan and
3. Bangkanai CNG Plant 5.2 MMSCFD agreement between PT PLN (Persero) Regional Kalimantan which was signed on October 5, 2015 with Agreement Number No: 0514.PJ/EPI.01.01/DIR/2015 as the Provision of Gas Pre-Treatment Services and Gas Compression CNG) for Peaker Power Plants in Bangkanai–Central Kalimantan.

CNG Plant Bangkanai will distribute gas to PLTMG Peaker Bangkanai Phase I with a capacity of 155 MW during peaking hour for 5 hours.

Ada dua pelaksanaan proses gas di CNG Plant Bangkanai yaitu

- a) proses Pre-treatment gas, dimana gas yang dialirkan dari sumur melalui PT Medco sebesar 20 MMSCFD masuk ke dalam proses pre-treatment, gas hasil proses dialirkan ke CNG system sebesar 5,2 MMCFD dan 0,3 MMCFD untuk digunakan sebagai pemakaian sendiri sisa gas sebesar 14,5 MMSCFD setelah dikurangi kondensat dialirkan langsung ke unit PLTMG Bangkanai.
- b) Proses CNG, dimana gas masuk sebesar 5,2 MMSCFD dikompresi menjadi 3000 Psi dan disimpan ke dalam tube skid yang kemudian dialirkan ke PLTMG bangkanai saat beban peaker, tekanan 3000 Psi diturunkan menjadi 180 psi sesuai kebutuhan unit PLTMG.

Tim O&M CNG Bangkanai sebanyak 36 Personil telah berada di CNG Plant dan telah mengoperasikan CNG Plant dengan kondisi base load & peaker. Untuk kegiatan Supply Base Load dan Peaker Gas ke PLTMG dibagi menjadi 4 group 3 shift kerja. Supply gas ke CNG Plant dari PLN maksimum 20 MMSCFD.

Adapun rencana pendapatan jasa pemrosesan gas CNG Plant Bangkanai RKAP tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut :

TABEL RENCANA PENDAPATAN RKAP 2021

Rencana Pendapatan Tahun 2021 2021 Revenue Plan				
Bulan	CNG (Rp)	PT (Rp)	Jumlah (Rp)	Rekap (Miliar Rp)
Jan	5.318.529.076,60	452102.964,01	5.770.632.040,62	5,77
Feb	7.684.782417,00	694.493.433,31	8.379.275.850,31	14,15
Mar	7.188.990.003,00	694.493.433,31	7.883.483.436,31	22,03
Apr	7.684.782417,00	694.493.433,31	8.379.275.850,31	30,41
Mei	7.436.886.210,00	694.493.433,31	8.131.379.643,31	38,54
Juni	7.684.782.417,00	694.493.433,31	8.379.275.850,31	46,92
Juli	7.436.886.210,00	694.493.433,31	8.131.379.643,31	55,05
Agust	4.351.955.634,00	694.493.433,31	5.046.449.067,31	60,10
Sept	7.684.782417,00	694.493.433,31	8.379.275.850,31	68,48
Okt	7.436.886.210,00	694.493.433,31	8.131.379.643,31	76,61
Nov	7.684.782.417,00	694.493.433,31	8.379.275.850,31	84,99
Des	7.436.886.210,00	694.493.433,31	8.131.379.643,31	93,12

There are two implementations of gas processes at the Bangkanai CNG Plant, namely

- a) Pre-treatment gas process, in which 20 MMSCFD of gas flowed from wells through PT Medco is entered into the pre-treatment process, 5.2 MMCFD of gas produced from the process is channeled to the CNG system and 0.3 MMCFD for use as the remaining gas itself. amounting to 14.5 MMSCFD after deducting condensate is channeled directly to the Bangkanai PLTMG unit.
- b) The CNG process, where 5.2 MMSCFD of incoming gas is compressed to 3000 Psi and stored in a tube skid which is then flowed to PLTMG Bangkanai when the peaker load is reduced, the pressure of 3000 Psi is reduced to 180 psi according to the needs of the PLTMG unit.

The Bangkanai CNG O&M Team of 36 Personnel has been at the CNG Plant and has operated the CNG Plant with base load & peaker conditions. For Supply Base Load and Peaker Gas activities to PLTMG, they are divided into 4 groups of 3 work shifts. The gas supply to the CNG Plant from PLN is a maximum of 20 MMSCFD.

The planned revenue for gas processing services at the Bangkanai CNG Plant RKAP in 2021 is described in the following table:

TABLE OF REVENUE PLAN RKAP 2021

PENDAPATAN

Sesuai dengan KPI tahun 2021 terhadap Kontrak Pekerjaan yang berjalan, untuk pendapatan sampai dengan bulan Desember 2021 CNG Plant adalah sebesar **Rp. 109.050.939.602,63,-** (diluar PPN 10%) 17,1 % lebih besar dari rencana pendapatan sampai dengan bulan Desember sebesar 100 %. Sampai dengan bulan Desember PLN telah menggunakan jasa Make up Gas sebesar 139.500,00 BBTU, sebagai pengurangan jasa make up gas dengan system pembayaran Term of Payment (TOP) sesuai Kontrak Kerja.

Berikut tabel dan grafik realisasi pendapatan tahun 2021 sampai dengan bulan Desember.

TABEL REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2021
TABLE OF REVENUE REALIZATION IN 2021

(PT+CNG)		TW 1		TW II		TW III		TW IV	
Rencana	Realisasi	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
5.770.632.100	8.364.202.085								
8.379.275.959	9.738.090.756	22.033.391.621	24%						
7.883.483.562	8.743.575.637	26.845.868.478	29%						
8.379.275.959	9.836.986.212								
8.131.379.760	9.622.079.949			46.923.323.298	50%				
8.379.275.959	6.804.591.943			53.109.526.582	57%				
8.131.379.760	9.522.998.490								
5.046.449.290	10.762.538.674					68.480.428.306	74%		
8.379.275.959	8.771.693.383					82.166.757.129	88%		
8.131.379.760	9.972.204.494								
8.379.275.959	7.053.729.445							93.122.463.785	100%
8.131.379.760	9.858.248.536							109.050.939.603	117%
93.122.463.785	109.050.939.603		5,17%		6,64%		14,70%		17,10%

INCOME

In accordance with the 2021 KPI for the current Work Contract, the revenue up to December 2021 for the CNG Plant is Rp. 109,050,939,602,63,- (excluding VAT 10%) 17.1% higher than the planned income up to December of 100%. As of December, PLN has used Make up Gas services amounting to 139,500.00 BBTU, as a reduction in gas make up services with a Term of Payment (TOP) payment system in accordance with the Work Contract.

The following is a table and graph of revenue realization from 2021 to December.

GRAFIK REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2021
REVENUE REALIZATION GRAPH IN 2021



PERFORMANCE CNG PLANT

Performance CNG Plant dapat dilihat pada jam operasi dari CNG Plant, kerja CNG Plant dalam satu hari penuh adalah 24 jam. Pada tahun 2021 dimana AF tetap terjaga hingga mencapai 100% dan tidak terjadi Force Outage baik terencana ataupun diluar rencana. Kondisi AF dapat dilihat pada tabel hasil perhitungan Availability Factor (AF) sampai dengan tahun 2021.

PERFORMANCE CNG PLANT

CNG Plant performance can be seen in the operating hours of the CNG Plant, CNG Plant work in a full day is 24 hours. In 2021 where AF is maintained to reach 100% and there is no Force Outage either planned or unplanned. AF conditions can be seen in the table of Availability Factor (AF) calculation results until 2021.

TABEL REALISASI AVAILABILITY FACTOR (AF) CNG PLANT BANGKANAI 2021

TABLE OF ACTUAL AVAILABILITY FACTOR (AF) CNG PLANT BANGKANAI 2021

Realisasi Availability Factor (AF) CNG Plant Bangkanai 2021						
Bulan	Day	Period Hours (PH)	Outage (hour)		Realisasi Available Hours (AH)	Availability Factor (AF)
			Scheduled	Force		
Januari	31	744	0	0	744	100,00%
Februari	28	672	0	0	672	100,00%
Maret	31	744	0	0	744	100,00%
April	30	720	0	0	720	100,00%
Mel	31	744	0	0	744	100,00%
Junl	30	720	0	0	720	100,00%
Jull	31	744	0	0	744	100,00%
Agustus	31	744	0	0	744	100,00%
September	30	720	0	0	720	100,00%
Oktober	31	744	0	0	744	100,00%
November	30	720	0	0	720	100,00%
Desember	31	744	0	0	744	100,00%
	365	8760	0		8760	100,00%

JASA LAINNYA

OTHER SERVICES

Bidang Informasi dan Teknologi

Information and Technology

Tidak ada

None





Aspek Pemasaran

Marketing Aspects

Sesuai dengan visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan layanan injiniring terintegrasi di ketenagalistrikan yang terkemuka dan salah satu misi perusahaan, yaitu menyediakan jasa injiniring serta jasa pengembangan dan konstruksi yang terkemuka, memiliki keunggulan daya saing strategis bagi PLN Group dan sesuai dengan standar desain yang berlaku secara internasional, maka pelanggan utama PLN Enjiniring adalah PLN Group. Produksi dan jasa yang dilakukan oleh PLN Enjiniring sebagian besar merupakan pekerjaan yang diterima dari PT PLN (Persero) sebagai induk perusahaan.

Selain mendapatkan pekerjaan dari PLN Group, PLN Enjiniring juga memiliki kebijakan untuk menyediakan jasa bagi pihak eksternal (pelanggan di luar PLN Group).

STRATEGI PEMASARAN

STRATEGI PEMASARAN PELANGGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

Pangsa pasar PLN Enjiniring sampai dengan saat ini masih didominasi oleh pelanggan internal (PLN Group) dan sebagian lagi pelanggan eksternal (pelanggan di luar PLN Group), sehingga strategi pemasarannya lebih difokuskan kepada pemenuhan kepuasan pelanggan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Pemenuhan kepuasan pelanggan ini dilakukan dengan cara mendengarkan suara pelanggan, baik pelanggan saat ini maupun pelanggan potensial. Sedangkan untuk membangun hubungan dengan pelanggan dilakukan dengan pengelolaan hubungan pelanggan dan pengelolaan keluhan/aspirasi pelanggan.

PLN Enjiniring memiliki strategi Pemasaran yang agresif dan *service development*, mendukung proyek-proyek strategis investasi prioritas PT PLN (Persero) dengan memasarkan produk injiniring *end to end*. PLN Enjiniring ikut berperan dalam setiap breakthrough PT PLN (Persero) dan melakukan upaya-upaya kerjasama dalam memperoleh pekerjaan termasuk diantaranya potensi pekerjaan eksternal.

Based on the company's vision, which is to become a leading integrated engineering services company in electricity and one of the company's missions, which is to provide a leading engineering, construction, and developing services, as well as to have advantages on competitive strategy for the PLN Group and in accordance to the internationally accepted design standards, therefore the main customer of PLN Enjiniring is PLN Group. Production and services performed by PLN Enjiniring are mostly jobs that have been received from PT PLN (Persero) as the holding company.

Apart from getting a job from the PLN Group, PLN Enjiniring has also a policy to provide services to external parties (customers outside the PLN Group).

MARKETING ASPECTS

INTERNAL AND EXTERNAL CUSTOMER MARKETING STRATEGY

PLN Enjiniring's market share is still dominated by internal customers (PLN Group) and some external customers (customers outside the PLN Group), so that its marketing strategy is more focused on fulfilling customer satisfaction and building relationships with customers. Fulfilling customer satisfaction is done by listening to the customers' aspirations, either current customers or potential customers. Meanwhile, building relationships with customers is carried out by managing customer relationships and managing customer complaints/aspirations.

PLN Enjiniring has an aggressive marketing strategy and service development, supporting strategic investment projects priority PT PLN (Persero) by marketing end-to-end engineering products. PLN Enjiniring plays a role in every breakthrough of PT PLN (Persero) and makes collaborative efforts in obtaining jobs, including the potential for external jobs.

1. Pemenuhan Kepuasan Pelanggan

PLN Enjiniring mendengarkan, berinteraksi dan mengamati perilaku pelanggan untuk memperoleh informasi atas produk dan layanan yang diberikan Perseroan kepada pelanggan internal dan eksternal melalui rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh pelanggan maupun yang pengenalan produk dan layanan yang diinisiasikan sendiri oleh PLN Enjiniring.

Perusahaan mendengarkan suara pelanggan saat ini untuk memperoleh informasi dan umpan balik (feedback) dengan melakukan pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

- a) Rapat koordinasi mingguan dan bulanan untuk mendapatkan informasi/masukan dan umpan balik pada setiap tahapan pekerjaan;
- b) Media komunikasi (telepon, SMS, email, website) untuk menampung masukan dan keluhan;
- c) Survei kinerja proyek yang dilakukan pada setiap proyek pekerjaan yang dilakukan oleh PLN Enjiniring;
- d) Survei kepuasan pelanggan korporat yang dilakukan pada semester 1 dan 2 untuk memperoleh informasi terkait nilai indeks kepuasan pelanggan berdasarkan penilaian dari persepsi pelanggan serta menampung kritik dan saran pelanggan;
- e) Pendekatan personal yang dilakukan oleh manajemen PLN Enjiniring dan;
- f) *Roadshow* secara tatap muka maupun virtual kepada pelanggan.

PLN Enjiniring menindaklanjuti informasi dan umpan balik yang diperoleh dari pelanggan untuk memperbaiki mutu produk dan layanan dengan cara:

- a) Mengoptimalkan fungsi tim proyek untuk berkoordinasi dengan pelanggan dan menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan bulanan;
- b) Kunjungan lapangan yang dilakukan oleh manajemen PLN Enjiniring untuk mendengarkan suara pelanggan, sehingga petugas dapat merespon langsung keluhan pelanggan

1. Customer Satisfaction Compliance

PLN Enjiniring listens, interacts and observes customer behavior to obtain some informations on products and services provided by the Company to internal and external customers through coordination meetings organized either by the customer and the introduction of products and services initiated by PLN Enjiniring or those initiated by PLN Enjiniring.

The company listens to the current customers' aspirations to obtain information and feedback by taking the following approaches:

- a) Perform some weekly and monthly coordination meetings to obtain information/input and feedback at each stage of work;*
- b) Communication media (telephone, SMS, email, website) to accommodate input and complaints;*
- c) Project performance survey conducted on each project work carried out by PLN Enjiniring;*
- d) Corporate customer satisfaction surveys conducted in semester 1 and in semester 2 to obtain information related to the customer satisfaction index scores based on assessments of customer perceptions and to accommodate customer criticism and suggestions;*
- e) The personal approach taken by the management of PLN Enjiniring and;*
- f) Face-to-face and virtual roadshows to customers*

PLN Enjiniring follows up on feedback and information obtained from the customers to improve products and services quality by taking the following approaches:

- a) Optimize the function of the project team to coordinate with customers and deliver monthly work progress reports;*
- b) Field visits conducted by PLN Enjiniring management to listen to the customers' aspirations so that the officers can respond directly to the customers' complaints*

Terkait dengan pelanggan potensial, suara pelanggan diperoleh melalui media rapat formal, diskusi informal, survei kepuasan pelanggan, pameran, serta media elektronik. Media elektronik yang digunakan yaitu *website, email, telepon, dan aplikasi pengiriman pesan.*

PLN Enjiniring juga membandingkan kepuasan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan pesaing berdasarkan hasil survei. Berdasarkan data tersebut, PLN Enjiniring membuat analisis untuk menentukan target kepuasan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan pesaing di tahun berikutnya. Aktifitas ini dilakukan oleh Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Usaha bekerja sama dengan Direktorat Enjiniring

2. Membangun Hubungan dengan Pelanggan

PLN Enjiniring memasarkan, membangun dan mengelola hubungan dengan pelanggan melalui kegiatan *Roadshow* kepada pelanggan yang dilakukan secara tatap muka sebelum pandemi Covid-19 dan secara virtual pada masa pandemi, yang bertujuan untuk menyediakan dukungan pelanggan agar mendapatkan *feedback* dari pelanggan serta agar keluhan pelanggan dapat diselesaikan dengan tuntas. PLN Enjiniring juga beradaptasi dengan kondisi marketing era digital yaitu dengan merilis brosur elektronik pada website dan mengoptimalkan media sosial yang dimiliki untuk memberikan informasi terkini terkait perusahaan.

Dalam membangun hubungan dengan pelanggan, PLN Enjiniring juga mengelola keluhan dan aspirasi pelanggan. PLN Enjiniring menetapkan Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Usaha sebagai pihak yang mengelola keluhan dan aspirasi pelanggan.

Data dan informasi keluhan dan aspirasi pelanggan dikumpulkan dan diidentifikasi melalui:

1. Surat keluhan yang dikirimkan oleh pelanggan;
2. Keluhan yang disampaikan secara langsung dan dicatat dalam formulir keluhan dan aspirasi pelanggan;
3. Survei kepuasan pelanggan kinerja proyek dan survei kepuasan pelanggan korporat;
4. Laporan *Roadshow*

Regarding the potential customers, their aspirations are obtained through the media of formal meetings, informal discussions, customer satisfaction surveys, exhibitions and electronic media. The electronic media used are the website, email, telephone, and messaging app.

PLN Enjiniring also compares customer satisfaction against competitor customer satisfaction based on survey results. Based on this data, PLN Enjiniring makes an analysis to determine customer satisfaction targets against competitor customer satisfaction in the following year. This activity is carried out by the Directorate of Marketing and Business Development in collaboration with the Directorate of Engineering.

2. Customers Relationships Building

PLN Enjiniring markets, builds and manages relationships with customers through roadshows to customers conducted face-to-face before the Covid-19 pandemic and virtually during the pandemic, which aim to provide customer support in order to get feedback from customers so that customer complaints can be resolved completely. PLN Enjiniring also adapts to the marketing conditions of the digital era, namely by releasing electronic brochures on the website and optimizing their social media to provide the latest information regarding the company.

In building relationships with customers, PLN Enjiniring also manages customer complaints and aspirations. PLN Enjiniring establishes the Directorate of Marketing and Business Development as the party that manages customer complaints and aspirations.

Data and information on customer complaints and aspirations are collected and identified through:

1. *Letter of complaint sent by the customer;*
2. *Complaints that are being submitted directly and are being recorded in the complaint form and customer aspirations;*
3. *Project performance customer satisfaction surveys and corporate customer satisfaction surveys;*
4. *Roadshow report*

Setelah diidentifikasi berdasarkan jenis keluhan, keluhan segera disampaikan kepada Direktorat terkait agar keluhan dapat ditangani secara efektif dan tuntas. Selain itu, Perseroan juga mengelola keluhan berdasarkan data rekaman (*record*) keluhan pelanggan selama pekerjaan berjalan. Untuk memastikan agar keluhan dapat ditangani dengan tuntas, PLN Enjiniring telah membuat Prosedur Enjiniring Penanganan Keluhan dan Aspirasi Pelanggan.

PANGSA PASAR

Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik nasional dibutuhkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sesuai dengan perencanaan yang tertuang di dalam RUPTL. Realisasi pada tahun 2020 yaitu, kapasitas terpasang pembangkit pada tahun sebesar 63.336 MW, penambahan kapasitas pembangkit 1,64 GWh, penambahan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) 143,63 MW, penambahan kapasitas transmisi 1.649 kms, penambahan kapasitas gardu induk 8.690 MVA. Untuk memenuhi kebutuhan listrik yang akan terus meningkat, masih diperlukan penambahan infrastruktur ketenagalistrikan.

PT PLN Enjiniring sebagai bagian dalam grup PT PLN (Persero) ikut serta dalam menyukseskan program 35.000 MW termasuk pada program listrik perdesaan untuk menerangi desa - desa di daerah terdepan, terluar, tertinggal. PT PLN Enjiniring juga ikut serta mendukung keberhasilan program PT PLN (Persero) dalam pengembangan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk meningkatkan bauran energi primer yang memanfaatkan EBT hingga mencapai 23% dari total energi primer yang dipakai pada tahun 2025.

Selaras dengan aspirasi Green pada transformasi PT PLN (Persero) yaitu membawa Indonesia transisi menuju ke energi terbarukan berskala besar secara cepat dan efisien, PLN Enjiniring turut mengambil peran yang besar. Dukungan yang dimaksud yaitu Penyusunan Pre-Feasibility Study, Feasibility Study, Grid Study, Bid Document, HPE, Dokumen Lingkungan, Request For Proposal, Draft PJBL, Pendampingan Lelang, Design Review, Supervisi Konstruksi, Desain Penyambungan, Kajian Teknis terkait EBT.

After being identified by the type of complaint, complaints are immediately submitted to the relevant Directorate so that those complaints can be handled effectively and thoroughly. In addition, the Company also manages complaints based on customer complaint records during work. To ensure that complaints can be handled throughly, PLN Enjiniring has developed an Engineering Procedure for Handling Customer Complaints and Aspirations.

MARKET SHARE

To meet the national electrical energy needs, it is necessary to develop electricity infrastructure in accordance with the planning contained in the RUPTL. Realizations in 2020 are, the installed capacity of power plants in 2016 was 63,336 MW, additional generating capacity of 1.64 GWh, addition of new and renewable energy generating capacity (EBT) of 143.63 MW, addition of transmission capacity of 1,649 kms, additional capacity of 8,690 MVA substations. To meet the increasing demand for electricity, it is still necessary to add electricity infrastructure.

PT PLN Enjiniring as part of the group of PT PLN (Persero) participated in the success of the 35,000 MW program including the rural electricity program to illuminate villages in the leading, outermost, lagging areas. PT PLN Enjiniring also participated in supporting the success of PT PLN (Persero) program for the development of New and Renewable Energy (EBT) to increase the primary energy mix utilizing EBT to reach 23% of the total primary energy used by 2025.

In line with Green's aspirations for the transformation of PT PLN (Persero) which is to bring Indonesia a fast and efficient transition to large-scale renewable energy, PLN Enjiniring also plays a big role. The support in question is Preparation of Pre-Feasibility Study, Feasibility Study, Grid Study, Bid Document, HPE, Environmental Document, Request For Proposal, Draft PJBL, Auction Assistance, Design Review, Construction Supervision, Connection Design, Technical Studies related to EBT.

Prospek Usaha

Business Prospect

Prospek Perusahaan di masa depan tidak terlepas dari perencanaan investasi Pemegang Saham yang secara umum tertuang dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) sebagai perusahaan induk. Merujuk pada Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, PLN selaku Pemegang Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum wajib menyediakan tenaga listrik secara terus-menerus, dalam jumlah yang cukup dan dengan mutu dan keandalan yang baik. Dengan demikian PLN harus mampu melayani kebutuhan tenaga listrik saat ini maupun di masa yang akan datang agar PLN dapat memenuhi kewajiban yang diminta oleh Undang- Undang tersebut. Sebagai langkah awal PLN harus dapat memperkirakan kebutuhan tenaga listrik paling tidak hingga 10 tahun ke depan.

Kebutuhan tenaga listrik pada suatu daerah didorong oleh tiga faktor utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, program elektrifikasi dan pengalihan *captive power* ke jaringan PLN. Pertumbuhan ekonomi dalam pengertian yang sederhana adalah proses meningkatkan *output* barang dan jasa. Proses tersebut memerlukan tenaga listrik sebagai salah satu input untuk menunjangnya, disamping input-input barang dan jasa lainnya. Di samping itu hasil dari pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan pendapatan masyarakat yang mendorong peningkatan permintaan barang-barang/peralatan listrik seperti televisi, pendingin ruangan, lemari es dan lainnya. Akibatnya permintaan tenaga listrik akan meningkat.

Faktor kedua adalah program elektrifikasi. Sebagai upaya PLN untuk mendukung program Pemerintah. Dalam meningkatkan rasio elektrifikasi maka PLN perlu melistriki semua masyarakat yang ada dalam wilayah usahanya. Hal ini secara langsung akan menjaga eksistensi wilayah usaha PLN dan sekaligus meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia khususnya pada daerah-daerah yang telah menjadi wilayah usaha PLN.

The Company's prospect cannot be separated from the Shareholders' investment planning in the near future which is generally stated in the General Plan of Electricity Supply (RUPTL) of PT PLN (Persero) as the holding company. Referring to Article 28 and Article 29 of Law Number 30 of 2009 concerning Electricity, PLN as the Holder of a Business Permit to Supply Electricity for the public interest is obliged to provide electricity continuously, in sufficient quantities and with good quality and reliability. Thus, PLN must be able to serve the current and the future electricity needs so that PLN can fulfill its obligations required by the Law. First off, PLN must be able to estimate the electricity needs for at least the next 10 years.

The electricity's needs in an area are driven by three main factors, namely the economic growth, the electrification program and the transfer of captive power to PLN's network. Economic growth in a more simple term is the process of increasing the output of goods and services. This process, in addition to other inputs for goods and services, requires electricity power to support it. In addition, the result of economic growth is an increase in people's income which will be encouraging increases in electrical goods' demands/equipments such as televisions, air conditioners, refrigerators and others. As a result, the demand for electricity will increase.

The second factor is the electrification program. It is one of PLN's efforts to support Government programs. PLN needs to establish electricity for all the people inside its business area to increase the electrification ratio. This will directly maintain the existence of PLN's business areas and at the same time will increase the electrification ratio in Indonesia, especially in areas that have become PLN's business areas.

Faktor ketiga yang menjadi pendorong pertumbuhan permintaan tenaga listrik PLN adalah pengalihan dari *captive power* (penggunaan pembangkit sendiri berbahan bakar minyak) menjadi pelanggan PLN. *Captive power* ini timbul sebagai akibat dari ketidakmampuan PLN memenuhi permintaan pelanggan di suatu daerah, terutama pelanggan industri dan bisnis. Bilamana kemampuan PLN untuk melayani di daerah tersebut telah meningkat, maka *captive power* ini dengan berbagai pertimbangannya akan beralih menjadi pelanggan PLN. Pengalihan *captive power* ke PLN juga didorong oleh tingginya harga BBM untuk membangkitkan tenaga listrik milik konsumen industri/bisnis, sementara harga jual listrik PLN relatif lebih murah. Faktor ketiga ini sangat bergantung kepada kemampuan pasokan PLN di suatu daerah/sistem kelistrikan dan skema bisnis jual beli listrik PLN dengan *captive power*, jadi tidak berlaku umum.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan kebutuhan listrik adalah kemampuan finansial perusahaan untuk melakukan investasi dalam rangka melayani pertumbuhan kebutuhan pelanggan dan masyarakat untuk mendapatkan pasokan listrik yang cukup dan andal.

Sesuai dengan prakiraan kebutuhan tenaga listrik yang telah dikemukakan oleh PLN tersebut serta kebutuhan investasi dalam rangka melayani pertumbuhan permintaan pelanggan, maka terlihat bahwa prospek PLN Enjiniring ke depan sangatlah terbuka lebar.

Selain itu, terdapat beberapa peluang yang dimiliki oleh PLN Enjiniring yang dapat dijadikan sebagai prospek usaha ke depan antara lain, yaitu:

1. Rencana investasi PT PLN (Persero) setiap tahun masih relatif besar untuk mengejar rasio elektrifikasi nasional yang masih rendah.
2. Jumlah pesaing terbatas, terutama dalam pekerjaan enjiniring hulu;
3. UU No.30 tahun 2009 membuka peluang untuk pengembangan listrik tidak hanya oleh PT PLN (Persero) sehingga terbuka peluang pasar di PEMDA dan IPP;

The third factor that drives the demand growth for PLN electricity is the transfer from the captive power (the use of self-propelled oil-fired power plants) to become PLN customers. This captive power arises as a result of PLN's inability to meet customer demand in an area, especially industrial and business customers. If PLN's ability to serve in the area has increased, then this captive power with various considerations will turn to become PLN customers. The transfer of captive power to PLN is also driven by the high price of fuel to generate electricity belonging to industrial/business consumers, while the selling price of PLN's electricity is relatively cheaper. This third factor really depends on the ability of PLN's supply in an area/electricity system and the PLN electricity buying and selling business scheme with captive power, so it does not apply in general.

Another factor that can affect the growth of electricity demand is the company's financial ability to invest in serving the growing of customers' and the public's needs to get an adequate and reliable electricity supply.

In accordance to the electricity estimated demand that has been put forward by PLN as well as the investment needs in order to serve customer demand's growth, it seems that the prospects for PLN Enjiniring are very wide open in the near future.

There are several opportunities owned by PLN Enjiniring that can be used as the future business prospects :

1. *PT PLN's (Persero) investment plan is still relatively large every year to catch up with the low national electrification ratio.*
2. *Limited number of competitors, particularly in upstream engineering work;*
3. *Laws of Republic of Indonesia Number 30 of 2009 opens up opportunities for electricity development not only by PT PLN (Persero) therefore there are market opportunities in Regional Government (PEMDA) and in IPP;*



4. Dapat menjadi pendorong atau pemrakarsa untuk implementasi teknologi baru;
5. Kecenderungan dunia untuk mengimplementasikan teknologi ramah lingkungan khususnya di bidang energi baru dan terbarukan;
6. Mitra kerja yang cukup banyak;
7. Akses pendanaan dari pasar modal akan diperoleh setelah *Initial Public Offering* (IPO);
8. Masih terbuka pasar di negara-negara Asia Tenggara yang perkembangan ketenagalistrikkannya belum maju dalam rangka kerja sama negara-negara ASEAN;
9. PERMEN BUMN No:PER-15/MBU/2012 yang membuka peluang penunjukkan langsung dari BUMN, Anak Perusahaan BUMN dan Perusahaan terafiliasi BUMN, maupun sebaliknya;
10. PERMEN BUMN No:PER-15/MBU/2012 juga membuka peluang penunjukkan langsung walaupun sudah Perusahaan Terbuka dengan syarat tertentu;
11. Rencana pemerintah untuk membangun infrastruktur pembangkit dengan total 35.000 MW dalam kurun waktu 5 tahun mendatang, yang terdiri atas 10.000 MW oleh PLN dan 25.000 MW oleh swasta/IPP.

PLN Enjiniring juga tengah berupaya untuk masuk ke dalam bisnis jasa layanan yang memberikan *income* berkelanjutan, antara lain dengan mengembangkan produk – produk seperti model *engineering integrated total solution* dengan membentuk paket pekerjaan *engineering* dimana setiap proyek investasi PT PLN (Persero), PLN Enjiniring diberi kesempatan untuk melakukan pekerjaan enjiniring secara menyeluruh dari mulai enjiniring tahap inisiasi, enjiniring tahap *procurement*, sampai dengan enjiniring tahap *construction*.

4. *To be a driving force or initiator for the implementation of new technologies;*
5. *The world's trends to implement environmentally friendly technologies, especially in the field of new and renewable energy;*
6. *A considerable number of partners;*
7. *Access to funding from the capital market will be obtained after the Initial Public Offering (IPO);*
8. *There is still an open market in Southeast Asian countries where the electricity development is not yet advanced in the framework of cooperation between ASEAN countries;*
9. *State Owned Enterprises Ministerial Regulations (PERMEN BUMN) No: PER-15 / MBU / 2012 which opens opportunities for direct appointment of State Owned Enterprises (BUMN), State Owned Enterprises (BUMN) Subsidiaries and State Owned Enterprises (BUMN) affiliated companies, or vice versa;*
10. *State Owned Enterprises Ministerial Regulations (PERMEN BUMN) No: PER-15 / MBU / 2012 also opens opportunities for direct appointment even though it is already a Public Company with certain conditions;*
11. *The government's plan to build a power plants infrastructure with a total of 35,000 MW in the next 5 years, consisting of 10,000 MW by PLN and 25,000 MW by the private sectors/IPP.*

PLN Enjiniring is also making a serious effort to get into the service business that provides a sustainable income by developing some products such as an engineering integrated total solution model by forming an engineering work packages of which PLN Enjiniring is given the opportunity to undertake comprehensive engineering work starting from the initiation stage of engineering, the procurement stage of engineering, and at the construction stage of engineering at each investment project of PT PLN (Persero).

Strategi Pengembangan Usaha

Business Development Strategy

Pada tahun 2018, PT PLN (Persero) melakukan redefinisi dan konsolidasi seluruh kegiatan usahanya. Dalam kegiatan ini, PLN (Persero) mengarahkan portofolio bisnisnya kedepan agar menjadi lebih optimal ke dalam sebuah pernyataan yang bernama "**SOLID**" (**S**ecuring Business Sustainability, **O**ptimizing Cost Efficiency, **L**eading Industry Capabilities, **I**ncreasing Profit Contribution, and **D**eveloping New Edge).

Sesuai dengan Core Business PLN Enjiniring sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa enjiniring, PLN Enjiniring mengemban misi strategis *Optimizing Cost Efficiency* dan *Leading Industry Capabilities*. Dengan 2 misi strategis tersebut, PLN Enjiniring mengaplikasikan pengembangan kegiatan bisnis yang selaras dengan misi strategis "PLN SOLID" sebagai berikut:

1. **Optimizing Cost Efficiency**, "mengoptimalkan struktur biaya PLN Group di sepanjang rantai nilai, sehingga PT PLN (Persero) dapat menjadi "price setter" dan memaksimalkan penciptaan nilai PLN Group melalui efisiensi biaya secara keseluruhan."
2. **Leading Industry Capabilities**, "mengembangkan kemampuan dalam bentuk pengetahuan, keahlian dan ketrampilan yang memberikan daya saing, dan atau keunggulan strategis ("capability setter") bagi PLN Group dengan standar terbaik dalam industri ketenagalistrikan nasional dan sesuai dengan standar yang berlaku secara internasional atau global.

Sehubungan dengan kedua misi di atas, beberapa hal yang menjadi fokus PLN Enjiniring, yaitu:

1. Pemantapan PLN Enjiniring sebagai Enjiniring terintegrasi

Sebagai suatu entitas bisnis, PT PLNE diharapkan tumbuh dan berkembang dengan efisien dan kompetitif sehingga unggul dan dapat

PT PLN (Persero) redefined and consolidated all of its business activities in 2018. PT PLN (Persero) directs its future business portfolio to be more optimal in a statement called "SOLID" (Securing Business Sustainability, Optimizing Cost Efficiency, Leading Industry Capabilities, Increasing Profit Contribution, and Developing New Edge).

Based on the PLN Enjiniring's Core Business as an engaged company in engineering services, PLN Enjiniring has a strategic mission of Optimizing Cost Efficiency and Leading Industry Capabilities. With these 2 strategic missions, PLN Enjiniring applies the development of business activities which is in line with the strategic mission of "PLN SOLID" as follows:

1. **Optimizing Cost Efficiency**, "optimizing the PLN Group's cost structure along the value chain, so that PT PLN (Persero) can become a "price setter" and maximizing the PLN Group value creation through the entire cost efficiency."
2. **Leading Industry Capabilities**, "developing capabilities in the form of knowledge, expertise and skills that provide competitiveness and /or strategic advantages ("capability setters") for the PLN Group with the best standards in the national electricity industry and in accordance to the internationally or globally accepted standards."

In connections to the two missions above, PLN Enjiniring has several things to focus on, namely:

1. Consolidating PLN Enjiniring as an integrated Engineering

As a business entity, PT PLNE is expected to growing and developing competitively and efficiently so that it is to be excellent and is able

mendukung proses bisnis di PT PLN (Persero) sesuai misi “PLN SOLID”. Pada kenyataannya, dalam menjalankan roda bisnis PLN Enjiniring terkadang mengalami benturan kepentingan dengan Anak Perusahaan dan Unit PT PLN (Persero), terutama dalam pengerjaan proyek – proyek PT PLN (Persero), karena misi “PLN SOLID” belum sepenuhnya mendapat dukungan. Oleh karena berkaitan dengan masalah di atas, perlu kiranya ditegaskan kembali dukungan penuh dari PT PLN (Persero) sesuai dengan misi “PLN SOLID”, agar PLN Enjiniring dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat sesuai harapan Pemegang Saham. Sisi lain yang perlu pula mendapat perhatian dari seluruh jajaran PLN Enjiniring, adalah mayoritas pekerjaan PT PLNE adalah berasal dari PT PLN (Persero), sehingga diperlukan program – program untuk meningkatkan keterikatan PT PLN (Persero) yang akan berdampak positif bagi kelangsungan dan pertumbuhan usaha PLN Enjiniring, salah satunya adalah dengan memperkuat hubungan antara PT PLN (Persero) dengan PLN Enjiniring melalui sistem *Key Account Management*, yang dimonitor dan dimitigasi langsung oleh Top Management PLN Enjiniring melalui aplikasi “PLN Enjiniring Commit” yang telah diluncurkan sejak bulan Oktober 2018.

2. Lingkup Usaha Enjiniring

Pada kenyataannya, bisnis jasa konsultansi enjiniring bersifat fluktuatif, tergantung dari potensi pasar dan kondisi persaingan di industri jasa enjiniring ketenagalistrikan itu sendiri. Tentunya hal ini juga akan mengakibatkan berfluktuasinya “*income*” bagi PLN Enjiniring, terutama pada Jasa *Conceptual Design*. Untuk dapat mengatasi hal ini, PT PLNE tengah berupaya untuk masuk ke dalam bisnis jasa layanan yang memberikan *income* berkelanjutan, antara lain dengan mengembangkan produk – produk seperti model *engineering integrated total solution* dengan membentuk paket pekerjaan engineering. Dimana untuk setiap proyek investasi PT PLN (Persero), PLN Enjiniring diberi kesempatan untuk melakukan pekerjaan

to support PT PLN (Persero) business processes in accordance to the “PLN SOLID” mission. In fact, there are several conflicts of interest in running the PLN Enjiniring business with the Subsidiaries and PT PLN (Persero) Units, because the mission of “PLN SOLID” has not been fully supported especially when working on PT PLN (Persero) projects. Therefore, relating to those mentioned problems, it is necessary of PT PLN (Persero) to reaffirm the full support in accordance to the mission of “PLN SOLID”, so that PLN Enjiniring can grow and develop as rapidly as expected by the Shareholders. The other part that needs to receive some attentions from all levels of PLN Enjiniring, is that the most important work for PT PLNE is from PT PLN (Persero), therefore, some programs which will have a positive impact on the growth and the sustainability of PT PLN (Persero) will be needed, to increase its engagement. One of PLN Enjiniring efforts is to improve the relationship between PT PLN (Persero) and PLN Enjiniring through the Key Account Management system, which is directly monitored and mitigated by PLN Enjiniring Top Management through an app called “PLN Enjiniring Commit” which has been launched since October 2018.

2. Scope of Engineering Business

In fact, the engineering consulting services business is fluctuating, it depends on the market potential and the competitive conditions in the electricity engineering services industry itself. Of course this will also result in fluctuating “income” for PLN Enjiniring, especially in Conceptual Design Services. To be able to overcome this matter, PT PLNE is also making a serious effort to get into the service business that provides a sustainable income by developing some products such as an engineering integrated total solution model by forming an engineering work packages of which PLN Enjiniring is given the opportunity to undertake comprehensive engineering work starting from the initiation stage of engineering, the procurement stage of engineering, and at

enjiniring secara menyeluruh dari mulai enjiniring tahap inisiasi, enjiniring tahap *procurement*, sampai dengan enjiniring tahap *construction*. Hingga saat ini bisnis atau lingkup usaha PLN Enjiniring sebagian besar bersifat *Partial Solution*. Artinya, bahwa pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan Pembangkit, Transmisi dan Gardu Induk dalam bidang ketenagalistrikan khususnya, dikemas dan dilaksanakan sebagai bagian yang terpisah. Akan tetapi ke depannya, PLN Enjiniring akan menjadikan kemasan atau pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan ini sebagai *Engineering Integrated Total Solution*, dimana PLN Enjiniring memulai pelaksanaan pekerjaan dengan menyusun *Feasibility Study, Engineering Cost Estimate, Bid Document, Design Review, Construction Supervision, Performance Test Evaluation, Plant Diagnostic, Plant Assessment dan Demolish Plant*.

One Package Engineering Integrated Total Solution ini akan memberikan nilai lebih, baik untuk PLN Enjiniring maupun PLN Group. Dengan paket pekerjaan ini, PLN Enjiniring dimungkinkan merencanakan *Man Month (MM)* dengan lebih baik dan mengkoordinasikan serta melakukan inventarisasi dokumen enjiniring dalam satu siklus pembangunan secara menyeluruh dan terstruktur. Selain itu juga membuat evaluasi dan koreksi atas penyempurnaan desain sesuai tahapannya, menyederhanakan proses pengadaan di PT PLN (Persero) yang memudahkan PT PLN (Persero) dalam melakukan koordinasi dan monitoring suatu proyek.

3. Lingkup Usaha Mendukung Pengembangan dan Konstruksi PLN Group

Bisnis atau lingkup usaha yang selama ini dilakukan oleh PLN Enjiniring masih berada dalam lingkup konsultasi di bidang Jasa Enjiniring berkaitan dengan sarana ketenagalistrikan. Untuk mencapai target yang dicita-citakan dalam mendukung *optimizing cost dan leading capability*, PLN Enjiniring tidak dapat hanya semata – mata mengandalkan *business as usual*, tetapi harus tumbuh dan berkembang sesuai harapan Pemegang Saham. Oleh karenanya, perusahaan secara bertahap akan berangsur – angsur masuk

the construction stage of engineering at each investment project of PT PLN (Persero).

Up to date, most of the PLN Enjiniring business or business scope have quality of Partial Solution. This means that some works relating to Power plants, Transmission and Substation particularly in the electricity sector are packaged and carried out as a separated part. However, PLN Enjiniring will make the packaging or the implementing of these works as an Engineering Integrated Total Solution in the near future, of which PLN Enjiniring starts the implementation of the works by compiling Feasibility Study, Engineering Cost Estimate, Bid Document, Design Review, Construction Supervision, Performance Test Evaluation, Plant Diagnostic, Plant Assessment and Demolish Plant.

This One Package Engineering Integrated Total Solution will provide extended values, both for PLN Enjiniring and the PLN Group. It is possible for PLN Enjiniring to plan a better Man Month (MM) and to coordinate and to carry out an engineering documents inventory in a more comprehensive and structured development cycle, with this work package. In addition, it also makes evaluations and corrections for design improvements according to the stages, simplifies the process of procurement at PT PLN (Persero) which makes it easier for PT PLN (Persero) to coordinate and monitor a project.

3. Business Scope to Support the Development and Construction of the PLN Group

The business or the business scope that has so far been carried out by PLN Enjiniring is still within the scope of consultation in the field of Engineering Services related to electricity facilities. In order to achieve the desired targets in support of optimizing cost and leading capability, PLN Enjiniring can not rely, solely on business as usual, but it must grow and develop according to the expectations of shareholders. Therefore, the company will gradually get into

dalam bisnis yang mendukung *Development and Construction* PLN Group yang terdiri atas enjiniring terintegrasi (enjiniring untuk *design*, enjiniring untuk *procurement* dan enjiniring untuk konstruksi). Persiapan yang harus dilakukan untuk masuk dalam bisnis tersebut juga tidak sedikit (Keuangan, kepakaran, SDM, teknologi, budaya, dan seterusnya), sehingga PLN Enjiniring perlu menyusun rencana dan tahapan transformasi bisnis tersebut dengan baik. Pemupukan modal, pengalaman, reputasi, jaringan, sertifikasi internasional, dan seterusnya merupakan contoh – contoh aspek yang memerlukan penanganan serius. Berkaitan dengan masalah keuangan, PLN Enjiniring memerlukan dukungan dana yang cukup besar untuk mempersiapkan tercapainya cita – cita bisnis di lingkup *Development and Construction* tersebut. Pemupukan kapabilitas dan kapasitas perlu dilakukan sejak dini, dengan berusaha meningkatkan kepercayaan kepada PT PLN (Persero) terkait kemampuan PLN Enjiniring dalam hal tersebut. Pada titik ini PLN Enjiniring memerlukan dukungan dari berbagai pihak, khususnya PT PLN (Persero).

the business that supports the Construction and the Development of the PLN Group which consists of integrated engineering (engineering for design, engineering for procurement and engineering for construction). The preparations that must be made to get into the business are also not insignificant (finance, expertise, human resources, technology, culture, and so on), thus PLN Enjiniring needs to prepare plans and stages of business transformation properly. Capital accumulations, experiences, reputations, networks, international certifications, and so on are examples of aspects that require serious handling. Regarding the financial problems, PLN Enjiniring requires substantial financial support to prepare the achievement of business goals in the scope of Construction and Development. Capability and capacity building needs to be done earlier by trying to increase trust in PT PLN (Persero) regarding the ability of PLN Enjiniring. At this point PLN Enjiniring needs some supports from various parties, especially PT PLN (Persero).

Rencana Investasi Bisnis Baru

The New Business Investment Plan

Agar rencana strategis perusahaan yang searah dengan dinamika proses bisnis korporat dapat berjalan, maka PLN Enjiniring ke depan akan melakukan investasi pada bidang IT guna menunjang bisnis enjiniring, baik bisnis enjiniring eksisting maupun bisnis enjiniring *detail design* yang fokus pada:

1. *Alignment* strategi teknologi informasi dengan proses bisnis perusahaan untuk membangun *enterprise system*.
2. Optimalisasi penggunaan aplikasi melalui rasionalisasi, standarisasi, konsolidasi, dan integrasi antara aplikasi yang ada.
3. Integrasi informasi dengan menggunakan arsitektur informasi dengan model tata kelola sesuai kebutuhan bisnis perusahaan.
4. Pengelolaan infrastruktur dan teknologi yang mendukung *agility*, kehandalan, ketersediaan, dan keamanan layanan TI.

In order for the company's strategic plans that are in line with the dynamics of corporate business processes to run, PLN Enjiniring in the future will invest in the IT sector to support the engineering business, both the existing engineering business and the detailed design of engineering business that will be focusing on:

1. *Alignment of information and technology strategies with the company's business processes to build an enterprise system.*
2. *Optimize the use of applications through rationalization, standardization, consolidation, and integration among existing applications.*
3. *Integration of information using the information architecture with a governance model according to the company's business needs.*
4. *Infrastructure and technology management that supports the agility, reliability, availability and security of it services.*

TINJAUAN KEUANGAN

Tinjauan keuangan yang akan diuraikan dalam bagian ini mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2020. Laporan Keuangan Konsolidasian telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik RSM Indonesia dan mendapat opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Prima Layanan Nasional Enjiniring tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

FINANCIAL REVIEW

The financial review that will be described in this section refers to the Consolidated Financial Reports for the years which were ended on December 31, 2019 and on December 31, 2020. The Consolidated Financial Reports have been audited by RSM Indonesia Public Accounting Firm and received a fair opinion in all material matters, PT Prima Jasa Nasional Enjiniring's financial position on the December 31, 2020 as well as the financial performance and cash flows for the year ended on that date have been in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Consolidated Financial Position Statements



TABEL LAPORAN POSISI KEUANGAN (DALAM JUTAAN RUPIAH)

TABLE OF FINANCIAL POSITION STATEMENT (IN MILION RUPIAH)

Uraian <i>Description</i>	2021	2020	2019		Pertumbuhan <i>Growth</i>		
1	2	3	4	5=2-3	6= 3-4	7=5/3	8=6/4
ASET ASSET							
Aset Lancar <i>Current Assets</i>	830,976	848,361	856,646	(17,385)	(8,285)	-2.05%	-0.97%
Aset Tidak Lancar <i>Non Current Assets</i>	294,824	314,852	309,311	(20,028)	5,541	-6.36%	1.79%
TOTAL ASET TOTAL ASSETS	1,125,800	1,163,213	1,165,957	(37,413)	(2,744)	-3.22%	-0.24%
LIABILITAS LIABILITY							
Liabilitas Jangka Pendek <i>Short - Term Liability</i>	309,987	382,140	391,642	(72,153)	(9,502)	-18.88%	-2.43%
Liabilitas Jangka Panjang <i>Long Term Liability</i>	56,907	81,621	105,305	(24,714)	(23,684)	-30.28%	-22.49%
TOTAL LIABILITAS TOTAL LIABILITY	366,894	463,761	496,947	(96,867)	(33,186)	-20.89%	-6.68%
TOTAL EKUITAS TOTAL EQUITY	758,906	699,452	669,010	59,454	30,442	8.50%	4.55%

POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Consolidated Financial Position

• Aset

Jumlah Aset Perusahaan pada tahun 2021 sebesar Rp 1.125,80 miliar, mengalami penurunan sebesar 3,22% atau Rp 37,41 miliar dibandingkan tahun 2020, yaitu sebesar Rp 1.163,21 miliar. Penurunan asset lancar antara lain berasal dari penurunan signifikan pada piutang usaha karena adanya pelunasan dari pemberi kerja, penurunan pajak dibayar di muka yang telah dilakukan proses restitusi, penurunan atas biaya dibayar di muka dan perhitungan kembali atas penerapan PSAK 72 pada tahun 2021.

Perlu untuk diketahui bersama bahwa pada tahun 2020 terdapat penyajian kembali terkait pencatatan Piutang Sewa baik pada Aset Lancar maupun pada Aset Tidak Lancar atas Aset CNG Plant Bangkanai.

Adapun penyajian kembali tersebut merupakan dampak dari penerapan PSAK 73 tentang Sewa dimana Perusahaan menjadi Pesewa atas asset CNG Plant Bangkanai.

• Assets

The Company's total assets in 2021 amounted to Rp 1,125.80 billion, a decrease of 3.22% or Rp 37.41 billion compared to 2020, which was Rp 1,163.21 billion. The decrease in current assets, among others, came from a significant decrease in trade receivables due to repayment from the employer, a decrease in prepaid taxes that had been repaid, a decrease in prepaid expenses and a recalculation of the implementation of PSAK 72 in 2021.

It is necessary to be aware that in 2020 there is a restatement of Assets so that Rent Receivables are recorded in both Current Assets and Non-Current Assets. It also evaluates the value of Fixed Assets on the Bangkanai CNG Plant Assets.

The restatement is the impact of the application of PSAK 73 concerning Leases where the Company becomes the lessee of the Bangkanai CNG Plant assets.

TABEL ASET LANCAR (DALAM JUTAAN RUPIAH)

TABLE OF CURRENT ASSETS (IN MILION RUPIAH)

Uraian <i>Description</i>	2021	2020	2019		Pertumbuhan <i>Growth</i>		
1	2	3	4	5=2-3	6=3-4	7=5/3	8=6/4
Kas dan Setara Kas <i>Cash and cash equipment</i>	450,783	338,591	226,822	112,192	111,769	33.13%	49.28%
Rekening bank yang dibatasi <i>Restricted bank account</i>	2,696	2,858	6,379	(162)	(3,521)	-5.67%	-55.20%
Piutang usaha <i>Accounts receivable</i>	68,163	159,060	204,548	(90,897)	(45,488)	-57.15%	-22.24%
Piutang Lain lain <i>Other receivable</i>	13,842	12,435	27,632	1,407	(15,197)	11.31%	-55.00%
Piutang sewa pembiayaan <i>Finance lease receivables</i>	31,158	27,665	24,563	3,493	3,102	12.63%	12.63%
Tagihan bruto kepada pelanggan <i>Gross bill to customers</i>	192,512	215,174	232,066	(22,662)	(16,892)	-10.53%	-7.28%
Pajak dibayar dimuka <i>Prepaid taxes</i>	59,265	74,829	91,354	(15,564)	(16,525)	-20.80%	-18.09%
Biaya dibayar dimuka dan uang muka <i>Prepaid expenses and down payment</i>	12,557	17,749	43,282	(5,192)	(25,533)	-29.25%	-58.99%
Jumlah aset lancar <i>Total Current Assets</i>	830,976	848,361	856,646	(17,385)	(8,285)	-2.05%	-0.97%

• **Aset Lancar**

Jumlah Aset lancar perusahaan pada tahun 2021 sebesar Rp 830,98 miliar, mengalami penurunan sebesar 2,05% atau Rp 17,39 miliar dibandingkan tahun 2020, yaitu sebesar Rp 848,36 miliar. Penurunan ini berasal dari piutang usaha, pajak dibayar di muka, biaya dibayar di muka dan perhitungan kembali atas penerapan PSAK 72.

• **Current assets**

The company's total current assets in 2021 amounted to Rp 830.98 billion, a decrease of 2.05% or Rp 17.39 billion compared to 2020, which was Rp 848.36 billion. This decrease was due to trade receivables, prepaid taxes, prepaid expenses and recalculation of the application of PSAK 72.

TABEL ASET TIDAK LANCAR (DALAM JUTAAN RUPIAH)

TABLE OF NON - CURRENT ASSETS (IN MILION RUPIAH)

Uraian <i>Description</i>	2021	2020	2019		Pertumbuhan <i>Growth</i>			
1	2	3	4	5=2-3	6=3-4	7=5/3	8=6/4	
Rekening yang dibatasi penggunaannya <i>Restricted cash in bank</i>	22,938	23,128	16,749	(190)	6,379	-0.82%	38.09%	
Piutang sewa pembiayaan <i>Finance lease receivables</i>	182,755	213,913	241,578	(31,158)	(27,665)	-14.57%	-11.45%	
Investasi pada asosiasi dan ventura bersama <i>Investment in association and joint venture</i>	11,764	9,851	13,726	1,913	(3,875)	19.42%	-28.23%	
Aset Tetap <i>Fixed Asset</i>	20,801	31,131	11,806	(10,330)	19,325	-33.18%	163.69%	
Aset Lain - lain <i>Other Assets</i>	56,566	36,829	25,452	19,737	11,377	53.59%	44.70%	
Jumlah Aset Tidak Lancar <i>Total - Non Current Assets</i>	294,824	314,852	309,311	(20,028)	5,541	-6.36%	1.79%	

• **Aset Tidak Lancar**

Perusahaan membukukan jumlah Aset Tidak Lancar sebesar Rp 294,82 miliar pada tahun 2021, mengalami penurunan sebesar 6,36% atau Rp 20,03 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp 314,85 miliar. Penurunan pada asset tidak lancar didominasi oleh piutang sewa pembiayaan, akumulasi penyusutan pada aset tetap, biaya dibayar di muka dan asset lainnya.

• **Non-current Assets**

The company recorded total Non-Current Assets of IDR 294.82 billion in 2021, a decrease of 6.36% or IDR 20.03 billion when compared to 2020 which was recorded at IDR 314.85 billion. The decline in non-current assets was dominated by finance lease receivables, accumulated depreciation on fixed assets, prepaid expenses and other assets.

TABEL LIABILITAS JANGKA PENDEK (DALAM JUTAAN RUPIAH)

TABLE OF SHORT - TERM LIABILITIES (IN MILION RUPIAH)

Uraian <i>Description</i>	2021	2020	2019	Pertumbuhan <i>Growth</i>			
	1	2	3	4	5=2-3	6=3-4	7=5/3
Utang Usaha <i>Account Payable</i>	66,764	103,490	134,096	(36,726)	(30,606)	-35.49%	-22.82%
Uang Muka dari Pelanggan <i>Advances From Costumer</i>	18,468	21,006	35,393	(2,538)	(14,387)	-12.08%	-40.65%
Utang Lain - lain <i>Other Payable</i>	15,465	8,977	5,472	6,488	3,505	72.27%	64.05%
Utang bruto kepada pelanggan <i>Gross debt to customers</i>	108,706	144,441	114,143	(35,735)	30,298	-24.74%	26.54%
Utang pajak <i>Tax payable</i>	10,826	7,491	14,242	3,335	(6,751)	44.52%	-47.40%
Biaya masih harus dibayar <i>Accured expenses</i>	54,739	53,779	54,645	960	(866)	1.79%	-1.58%
Liabilitas Sewa <i>Lease Liabilities</i>	502	7,979	-	(7,477)	7,979	-93.71%	0.00%
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja <i>Employee benefits liabilities</i>	1617	1999	673	(382)	1,326	-19.11%	197.03%
Pinjaman japan jatuh tempo dalam 1 tahun <i>Japan loan that matures in 1 year</i>	32,900	32,978	32,978	(78)	-	-0.24%	0.00%
Jumlah liabilitas jangka pendek <i>Total Short Term Liabilities</i>	309,987	382,140	391,642	(72,153)	(9,502)	-18.88%	-2.43%

• Liabilitas Jangka Pendek

Perusahaan membukukan liabilitas jangka pendek pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp 309,99 miliar, menurun sebesar Rp 72,15 miliar atau 18,88% dari Rp 382,14 miliar tahun 2020. Penurunan yang signifikan adalah pada utang usaha hal ini disebabkan adanya pelunasan kewajiban pada pihak ketiga, penurunan atas uang muka dari pelanggan, perhitungan kembali atas penerapan PSAK 72 (utang bruto) dan PSAK 73 (liabilitas sewa).

• Short-term liabilities

The company posted short-term liabilities in 2021, which amounted to Rp. 309.99 billion, decreased by Rp. 72.15 billion or 18.88% from Rp. 382.14 billion in 2020. A significant decrease was in accounts payable, this was due to the settlement of liabilities. to third parties, decrease in advances from customers, recalculation of the application of PSAK 72 (gross debt) and PSAK 73 (lease liability)..

TABEL LIABILITAS JANGKA PANJANG (DALAM JUTAAN RUPIAH)

TABLE OF LONG - TERM LIABILITIES (IN MILION RUPIAH)

Uraian <i>Description</i>	2021	2020	2019	Pertumbuhan <i>Growth</i>			
				5=2-3	6=3-4	7=5/3	8=6/4
1	2	3	4				
Utang Lain - lain <i>Other payable</i>	369	142	156	227	(14)	159.86%	-8.97%
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun <i>Long term loan after deducting by part of maturity due within one year</i>	23,119	55,050	87,062	(31,931)	(32,012)	-58.00%	-36.77%
Liabilitas imbalan kerja <i>Employee benefits liabilities</i>	31,705	25,554	18,087	6,151	7,467	24.07%	41.28%
Liabilitas Sewa <i>Lease Liabilities</i>	1,714	875	-	839	875	95.89%	0.00%
Jumlah liabilitas Jangka Panjang <i>Total Long Term Liabilities</i>	56,907	81,621	105,305	(24,714)	(23,684)	-30.28%	-22.49%

• Liabilitas Jangka Panjang

Pada tahun 2021, Liabilitas Jangka Panjang Perusahaan tercatat sebesar Rp 56,91 miliar, mengalami penurunan sebesar 30.28% dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar Rp 81,62 miliar. Penurunan tersebut didominasi oleh pelunasan atas pinjaman jangka Panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan.

• Long Term Liabilities

In 2021, the Company's Long-Term Liabilities were recorded at Rp. 56.91 billion, a decrease of 30.28% compared to 2020, which was Rp. 81.62 billion. The decline was dominated by repayment of long-term loans maturing in the current year.

TABEL EKUITAS (DALAM JUTAAN RUPIAH)

TABLE OF EQUITY (IN MILION RUPIAH)

Uraian <i>Description</i>	2021	2020	2019	Pertumbuhan <i>Growth</i>			
				5=2-3	6=3-4	7=5/3	8=6/4
1	2	3	4				
Modal Saham <i>Capital Stock</i>	25,000	25,000	25,000	-	-	0.00%	0.00%
Saldo Laba <i>Retain earning</i>							
Ditentukan penggunaanya <i>Determined to use</i>	5,169	5,169	5,169	-	-	0.00%	0.00%
Tidak ditentukan penggunaanya <i>Unappropriated</i>	729,811	659,940	644,444	69,871	15,496	10.59%	2.40%
Penghasilan Komprehensif Lainnya <i>Other Comprehensive Income</i>	(1,089)	9,329	(5,616)	(10,418)	14,945	-111.67%	-266.11%
Keuntungan Non Pengendali <i>Non-Controlling Interests</i>	15	14	13	1	1	7.14%	7.69%
Jumlah Ekuitas <i>Total Equity</i>	758,906	699,452	669,010	59,454	30,442	8.50%	4.55%

- **Ekuitas**

Pada tahun 2021, Ekuitas Perusahaan meningkat sebesar Rp 59,45 miliar atau 8,50% dari Rp 699,45 miliar menjadi Rp 758,91 miliar di 2021. Peningkatan Ekuitas ini sejalan dengan kenaikan Saldo Laba yaitu sebesar Rp 69,87 miliar atau 10,59%.

- **Equity**

In 2021, the Company's Equity increased by Rp. 59.45 billion or 8.50% from Rp. 699.45 billion to Rp. 758.91 billion in 2021. This increase in Equity was in line with the increase in retained earnings of Rp. 69.87 billion or 10,59%.

Laporan Laba (Rugi) Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Statements of Income (Loss) and Other Comprehensive Income

TABEL LAPORAN LABA RUGI PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (DALAM JUTAAN RUPIAH)

TABLE OF OTHER COMPREHENSIVE INCOME STATEMENT (IN MILION RUPIAH)

Uraian <i>Description</i>	2021	2020	2019	Pertumbuhan <i>Growth</i>			
	1	2	3	4	5=2-3	6=3-4	7=5/3
Pendapatan <i>Income</i>	736,732	625,344	978,680	111,388	(353,336)	17.81%	-36.10%
Beban Pokok Pendapatan <i>Cost Of Revenue</i>	(500,492)	(436,166)	(717,048)	(64,326)	280,882	14.75%	-39.17%
Laba Bruto <i>Gross Profit</i>	236,240	189,178	261,632	47,062	(72,454)	24.88%	-27.69%
Beban Usaha <i>Operating Expenses</i>	(170,916)	(190,713)	(136,740)	19,797	(53,973)	-10.38%	39.47%
Laba Sebelum Pos Keuangan dan Lain-lain <i>Gain Before Financial Post and Other</i>	65,324	(1,535)	124,892	66,859	(126,427)	-4355.64%	-101.23%
Pos Keuangan dan Lain-lain Netto <i>Financial and Other Posts - Net</i>	11,934	21,979	514	(10,045)	21,465	-45.70%	4176.07%
Laba Sebelum Pajak <i>Profit Before Taxes</i>	77,258	20,444	125,406	56,814	(104,962)	277.90%	-83.70%
Beban Pajak Penghasilan <i>Income Taxes Expense</i>	(7,386)	(4,947)	(7,392)	(2,439)	2,445	49.30%	-33.08%
Laba Tahun Berjalan <i>Current Year Profit</i>	69,872	15,497	118,014	54,375	(102,517)	350.87%	-86.87%
Pendapatan Komprehensif Lain Tahun Berjalan <i>Other Comprehensive Income Of The Current Year</i>	(10,418)	1,267	(679)	(11,685)	1,946	-922.26%	-286.60%
Jumlah Pendapatan Komprehensif <i>Total Comprehensive Income</i>	(10,418)	1,267	(679)	(11,685)	1,946	-922.26%	-286.60%
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan <i>Total Compregensive Income In Current Year</i>	59,454	16,764	117,335	42,690	(100,571)	254.65%	-85.71%
Laba Per Saham (nilai penuh) <i>Earning per share (full amount)</i>	2,795	620	4,721	2,175	(4,101)	350.87%	-86.87%

- **Laba Bruto**

Laba Bruto Perusahaan pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp 236,24 miliar, mengalami peningkatan sebesar 24,88% dibanding tahun 2020 yaitu sebesar Rp 189,18 miliar. Peningkatan laba bruto tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan, penyelesaian kontrak terkendala dan efisiensi biaya pada tahun 2021.

- **Laba Sebelum Pajak**

Perusahaan mencatat Laba Sebelum Pajak pada tahun 2021 sebesar Rp 77,26 miliar mengalami peningkatan 277,90% dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar Rp 20,44 miliar. Hal ini disebabkan adanya efisiensi Beban Usaha dan Peningkatan pendapatan lainnya atas investasi yang dimiliki oleh perusahaan.

- **Beban Pajak Penghasilan**

Beban Pajak Penghasilan Perusahaan tercatat mengalami peningkatan 49,30% dari tahun 2020 sebesar Rp 4,95 miliar menjadi Rp 7,39 miliar pada tahun 2021. Hal ini seiring dengan peningkatan persentase pendapatan non final perusahaan disertai efektifitas beban atas pendapatan non final dan penurunan beban bunga shl dari tahun 2020.

- **Laba Tahun Berjalan Dan Laba Komprehensif Tahun Berjalan**

Pada tahun 2021, Perusahaan membukukan Laba Tahun Berjalan dan Jumlah Laba Komprehensif sebesar Rp 59,45 miliar dan Rp 16,76 miliar meningkat 254,65% dari tahun 2020.

- **Laba Bersih Per Saham**

Laba per saham di tahun 2021 tercatat sebesar Rp 2.795 meningkat sebesar 350,87% atau Rp 2.175 dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp 620.

- **Gross Profit**

The Company's Gross Profit in 2021 was recorded at Rp. 236.24 billion, an increase of 24.88% compared to 2020, which was Rp. 189.18 billion. The increase in gross profit is in line with the increase in revenue, completion of constrained contracts and cost efficiency in 2021.

- **Profit Before Taxes**

The company recorded Profit Before Tax in 2021 of IDR 77.26 billion, an increase of 277.90% compared to 2020, which was IDR 20.44 billion. This is due to the efficiency of Operating Expenses and an increase in other income from investments owned by the company.

- **Income Taxes Expense**

The Company's income tax expense recorded an increase of 49.30% from 2020 of Rp. 4.95 billion to Rp. 7.39 billion in 2021. This was in line with the increase in the percentage of the company's non-final income accompanied by the effectiveness of expenses on non-final income and a decrease in expenses. shl flowers from 2020.

- **Current Year Profit and Comprehensive Income in Current Year**

In 2021, the Company posted Profit for the Year and Total Comprehensive Income of Rp 59.45 billion and Rp 16.76 billion, an increase of 254.65% from 2020.

- **Earning per Share**

Earnings per share in 2021 was recorded at IDR 2,795, an increase of 350.87% or IDR 2,175 compared to 2020 which was IDR 620.

LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

• Pendapatan

Pendapatan PLN Enjiniring di 2021 tercatat sebesar Rp 736,73 miliar, mengalami peningkatan sebesar 17,81% atau Rp 111,39 miliar jika dibandingkan dengan 2020 yaitu sebesar Rp 625,34 miliar. Peningkatan pendapatan yang signifikan adalah pada Jasa Enjiniring, Prokuremen dan Konstruksi (EPC) sebesar Rp 63,16 miliar atau 23,43%, Bidang Pembangkitan sebesar Rp 42,68 miliar atau 59,02%, dan Bidang Konstruksi sebesar Rp 20,26 miliar atau 15,94%.

Hal di atas secara general disebabkan karena adanya peningkatan pekerjaan terkontrak, penyelesaian kontrak terkendala pada tahun sebelumnya dan capaian pendapatan pada tahun berjalan.

CONSOLIDATED PROFIT (LOSS) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

• Revenue

PLN Enjiniring's revenue in 2021 was recorded at IDR 736.73 billion, an increase of 17.81% or IDR 111.39 billion compared to 2020, which was IDR 625.34 billion. Significant increase in revenue was in Engineering, Procurement and Construction Services (EPC) by Rp. 63.16 billion or 23.43%, Generation by Rp. 42.68 billion or 59.02%, and Construction by Rp. 20.26 billion or 15.94%.

The above is generally due to an increase in contracted work, constrained contract completion in the previous year and the achievement of income in the current year.

TABEL KONTRIBUSI PENDAPATAN JASA PERBIDANG (SEGMENT) (DALAM JUTAAN RUPIAH)

TABLE OF SERVICE REVENUE CONTRIBUTION PER SECTOR(SEGMENT) (IN MILION RUPIAH)

Uraian Description	2021	2020	2019	Pertumbuhan Growth			
				5=2-3	6=3-4	7=5/3	8=6/4
1	2	3	4				
Pembangkitan <i>Power Plant</i>	114,991	72,312	93,444	42,679	(21,132)	59.02%	-22.61%
Konstruksi <i>Construction</i>	147,381	127,123	237,516	20,258	(110,393)	15.94%	-46.48%
Transmisi & Distribusi <i>Transmission and Distribution</i>	60,282	71,847	121,004	(11,565)	(49,157)	-16.10%	-40.62%
Operasional dan Perawatan <i>Operation and Maintenance</i>	-	-	4,872	-	(4,872)	0.00%	-100.00%
Kompresi GAS <i>Compression Nature Gas</i>	54,001	54,042	48,601	(41)	5,441	-0.08%	11.20%
Pendapatan Bunga Dari Sewa Pembiayaan <i>Interest income frome finance lease receivables</i>	27,386	30,487	33,241	(3,101)	(2,754)	-10.17%	-8.28%
Enjiniring, Prokuremen dan Konstruksi <i>Engineering, Procurement and Construction</i>	332,691	269,533	440,002	63,158	(170,469)	23.43%	-38.74%
Jumlah Pendapatan <i>Total Revenue</i>	736,732	625,344	978,680	111,388	(353,336)	17.81%	-36.10%

- **Beban Pokok Pendapatan**

Pada tahun 2021, Perusahaan mengalami peningkatan beban pokok pendapatan sebesar 14,75%. Beban Pokok Pendapatan pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp 500,49 miliar sedangkan untuk tahun 2020 sebesar Rp 436,17 miliar. Peningkatan Beban pokok pendapatan ini yang signifikan adalah pada beban Sub Kontraktor sebesar Rp 285,93 miliar atau meningkat sebesar 29,04% dibandingkan tahun lalu. Hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan yang membutuhkan subletting. Adapun rincian terkait Beban pokok pendapatan disajikan dalam tabel berikut ini.

TABEL BEBAN JASA (DALAM JUTAAN RUPIAH)

TABLE OF COMPANY SERVICE EXPENSE (IN MILION RUPIAH)

Uraian <i>Description</i>	2021	2020	2019	Pertumbuhan <i>Growth</i>			
				5=2-3	6=3-4	7=5/3	8=6/4
1	2	3	4	5=2-3	6=3-4	7=5/3	8=6/4
Sub - Kontraktor <i>Sub - Contractor</i>	285,930	221,575	419,566	64,355	(197,991)	29.04%	-47.19%
Remunerasi Enjiniring <i>Engineering Remuneration</i>	107,466	117,627	151,570	(10,161)	(33,943)	-8.64%	-22.39%
Perjalanan Dinas dan Transportasi <i>Travel Service and Transportation</i>	16,676	16,728	48,566	(52)	(31,838)	-0.31%	-65.56%
Beban Pajak Final <i>Final Tax Expense</i>	21,670	19,259	28,563	2,411	(9,304)	12.52%	-32.57%
Sewa <i>Rent</i>	15,086	16,314	29,928	(1,228)	(13,614)	-7.53%	-45.49%
Penyusutan <i>Depreciation</i>	6,468	7,097	-	(629)	7,097	-8.86%	0.00%
Lain-lain <i>Other</i>	47,196	37,566	38,855	9,630	(1,289)	25.63%	-3.32%
Jumlah Beban Jasa <i>Total Service Expense</i>	500,492	436,166	717,048	64,326	(280,882)	14.75%	-39.17%

TABEL BEBAN USAHA (DALAM JUTAAN RUPIAH)

TABLE OF OPERATING EXPENSE (IN MILION RUPIAH)

Uraian <i>Description</i>	2021	2020	2019	Pertumbuhan <i>Growth</i>			
				5=2-3	6=3-4	7=5/3	8=6/4
1	2	3	4	5=2-3	6=3-4	7=5/3	8=6/4
Gaji dan kesejahteraan karyawan <i>Salary and employe benefit</i>	110,804	106,689	81,853	4,115	24,836	3.86%	30.34%
Jasa tenaga kerja <i>Emloye services</i>			4,525	-	(4,525)	0.00%	-100.00%

- **Cost of Revenue**

In 2021, the Company experienced an increase in cost of revenue by 14.75%. Cost of Revenue in 2021 was recorded at Rp 500.49 billion while for 2020 it was Rp 436.17 billion. The significant increase in the cost of revenue was the Sub-contractor's expense of Rp 285.93 billion or an increase of 29.04% compared to last year. This is in line with the increase in income which requires subletting. The details related to the cost of revenue are presented in the following table.

Tunjangan pajak penghasilan karyawan	11,411	7,861	8,385	3,550	(524)	45.16%	-6.25%
<i>Employee income tax benefits</i>							
Alat keperluan kantor	781	814	3,436	(33)	(2,622)	-4.05%	-76.31%
<i>Office supplies</i>							
Sewa	1,515	2,039	6,895	(524)	(4,856)	-25.70%	-70.43%
<i>Rent</i>							
Perjalanan Dinas dan Transportasi	1,255	2,132	5,965	(877)	(3,833)	-41.14%	-64.26%
<i>Travel Service and Transportation</i>							
Beban Imbal Kerja	7,090	7,637	3,250	(547)	4,387	-7.16%	134.98%
<i>Employee Benefit Expense</i>							
Telekomunikasi	1,326	2,100	2,036	(774)	64	-36.86%	3.14%
<i>Telecommunication</i>							
Konsultan	6,273	1,664	1,227	4,609	437	276.98%	35.62%
<i>Consultant</i>							
Alat Tulis Kantor	921	1,166	1,784	(245)	(618)	-21.01%	-34.64%
<i>Office stationary</i>							
Asuransi	-	-	2,164	-	(2,164)	0.00%	-100.00%
<i>Insurance</i>							
Konsumsi	322	799	2,580	(477)	(1,781)	-59.70%	-69.03%
<i>Consumption</i>							
Pemeliharaan	5,196	8,689	581	(3,493)	8,108	-40.20%	1395.52%
<i>Maintenance</i>							
Srtifikasi dan Perijinan	11	10	7	1	3	10.00%	42.86%
<i>Certification and licensing</i>							
Iklan dan promosi	228	294	191	(66)	103	-22.45%	53.93%
<i>Ads and promotion</i>							
Penyusutan	1,654	1,655	1,390	(1)	265	-0.08%	19.08%
<i>Depreciation</i>							
Beban Kerugian Penurunan Piutang Usaha	3,257	16,478	523	(13,221)	15,955	-80.23%	3050.67%
<i>Impairment Losses on Trade Receivables</i>							
Lain-lain	18,872	30,686	9,948	(11,814)	20,738	-38.50%	208.46%
<i>Other</i>							
Jumlah beban usaha	170,916	190,713	136,740	(19,797)	53,973	-10.38%	39.47%
<i>Total oprating expense</i>							

• **Beban Usaha**

Pada tahun 2021, Perusahaan membukukan Beban Usaha sebesar Rp 170,92 miliar, mengalami penurunan sebesar 10,38% dibandingkan tahun 2020. Penurunan pada beban usaha, penurunan signifikan adalah disebabkan atas penurunan beban kerugian penurunan piutang usaha sebagai dampak penerapan PSAK 71 dan penurunan pada beban pemeliharaan.

• **Operating expenses**

In 2021, the Company recorded Operating Expenses of Rp 170.92 billion, a decrease of 10.38% compared to 2020. The decrease in operating expenses, a significant decrease was due to a decrease in expenses, a decrease in trade receivables as a result of the implementation of PSAK 71 and a decrease in operating expenses. maintenance load..

POS KEUANGAN DAN LAIN-LAIN BERSIH

POS KEUANGAN DAN LAIN-LAIN BERSIH (DALAM JUTAAN RUPIAH)

NET FINANCIAL POSITION AND OTHER (IN MILLION RUPIAH)

Uraian <i>Description</i>	2021	2020	2019	Pertumbuhan <i>Growth</i>			
1	2	3	4	5=2-3	6=3-4	7=5/3	8=6/4
Penghasilan bunga <i>Interest Income</i>	8,321	9,637	13,955	(1,316)	(4,318)	-13.66%	-30.94%
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - neto <i>Gain (losses) on foreign exchangerates - net</i>	(36)	(166)	394	130	(560)	0.00%	-142.13%
Rugi atas investasi saham yang tidak tercatat <i>loss on stock investment not listed on the exchange</i>	2,138	(3,684)	(13,482)	5,822	9,798	-158.03%	-72.67%
Beban bunga <i>Interest expense</i>	(9,090)	(14,732)	(15,644)	5,642	912	-38.30%	-5.83%
Lain-lain - neto <i>Other - net</i>	10,601	30,924	15,291	(20,323)	15,633	-65.72%	102.24%
Jumlah pos keuangan dan lain-lain - neto <i>Number of financial post and other - net</i>	11,934	21,979	514	(10,045)	21,465	-45.70%	4176.07%

POS KEUANGAN DAN LAIN-LAIN BERSIH

• Pos Keuangan dan Lain-Lain Bersih

Pada tahun 2021, Perusahaan mencatat Pos Keuangan dan Lain-lain sebesar Rp 11,93 miliar, mengalami penurunan sebesar 45,70% dibanding tahun 2020 yang sebesar Rp 21,98 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya penurunan nilai perusahaan Asosiasi dan koreksi atas pencatatan tahun lalu.

• Laba Sebelum Pos Keuangan Dan Lain-Lain

Laba Sebelum Pos Keuangan dan lain-lain di 2021, tercatat sebesar Rp 65,32 miliar, mengalami peningkatan sebesar -4.355,64% atau Rp 66,86 miliar dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar minus Rp 1,5 miliar. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan perolehan kontrak, capaian revenue dan penyelesaian kontrak terkendala disertai efisiensi biaya baik pada biaya pokok produksi atau biaya usaha.

NET FINANCIAL POSITION AND OTHER

• Financial Posts and Others

In 2021, the Company recorded Finance and Other Items of Rp 11.93 billion, a decrease of 45.70% compared to 2020 which was Rp. 21.98 billion. The decrease was mainly due to a decrease in the value of Associated Companies and corrections to last year's listing.

• Profit Before Financial Posts and Others

Profit Before Financial Posts and others in 2021, was recorded at IDR 65.32 billion, an increase of -4,355.64% or IDR 66.86 billion compared to 2020, which was minus IDR 1.5 billion. This is due to an increase in contract acquisition, revenue achievement and constrained contract completion accompanied by cost efficiency in terms of production costs or operating costs.

Laporan Arus Kas Konsolidasian

Consolidated Cash Flows Statements

Peningkatan Bersih Kas dan Setara Kas pada tahun 2021 sebesar Rp 112,19 miliar atau sebesar Rp.33,13% disebabkan adanya peningkatan Arus Kas untuk Pendanaan sebesar Rp 16,98 miliar atau -29,44% dibanding tahun 2020.

The net increase in Cash and Cash Equivalents in 2021 by Rp 112.19 billion or Rp. 33.13% due to an increase in Cash Flow for Funding by Rp 16.98 billion or -29.44% compared to 2020.

TABEL ARUS KAS (DALAM JUTAAN RUPIAH)

TABLE OF CASH FLOW (IN MILION RUPIAH)

Uraian	2021	2020	2019		Pertumbuhan		
Description					Growth		
1	2	3	4	5=2-3	6=3-4	7=5/3	8=6/4
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	152,670	167,652	25,191	(14,982)	142,461	-8.94%	565.52%
<i>Cash Flows from Operating Activities</i>							
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	225	1,804	(3,631)	(1,579)	5,435	-87.53%	-149.68%
<i>Cash Flows from Investing Activities</i>							
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	(40,703)	(57,687)	(114,052)	16,984	56,365	-29.44%	-49.42%
<i>Cash Flows from Financing Activities</i>							
Penurunan Neto Kas dan Setara Kas	112,192	111,769	(92,492)	423	204,261	0.38%	-220.84%
<i>Decrease in Net Cash and Cash Equivalents</i>							
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	338,591	226,822	319,314	111,769	(92,492)	49.28%	-28.97%
<i>Cash and Cash Equivalents Early Years</i>							
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	450,783	338,591	226,822	112,192	111,769	33.13%	49.28%
<i>Cash and Year and Cash Equivalents</i>							

LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED PROFIT (LOSS) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

- Arus Kas Dari Aktivitas Operasi**

Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 14,98 miliar atau -8,94% hal ini disebabkan penyelesaian utang pada pihak ketiga pada anak perusahaan dalam rangka mendukung pelaksanaan aksi korporasi.

- Cash Flow From Operating Activities**

Net Cash Obtained from Operating Activities in 2021 decreased by Rp 14.98 billion or -8.94% this was due to the settlement of debts to third parties to subsidiaries in order to support the implementation of corporate actions.

- **Arus Kas Untuk Aktivitas Investasi**

Kas Bersih Yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp 225 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 1,58 miliar atau -87,53% dibanding tahun 2020, hal ini disebabkan penurunan investasi di Perusahaan.

- **Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan**

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2021 tercatat sebesar -Rp 40,70 miliar. Arus kas dari aktivitas pendanaan mengalami penurunan sebesar 29,44% dikarenakan adanya pelunasan piutang sewa CNG Bangkanai dan penurunan bunga pinjaman SHL sesuai schedule pembayaran pokok pinjaman.

- **Peningkatan/Penurunan Neto Kas Dan Setara Kas**

Secara keseluruhan pada tahun 2021, terjadi peningkatan bersih Kas dan Setara Kas jika dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan bersih Kas dan Setara Kas pada tahun 2021 sebesar Rp 423 juta atau sebesar 0,38%.

- **Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun**

Besarnya Kas dan Setara Kas Akhir Tahun pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp 450,78 miliar, meningkat Rp 112,19 miliar atau 33,13% dibanding tahun 2020.

- **Cash Flows for Investment Activities**

Net Cash Used for Investment Activities in 2021 was recorded at Rp 225 million, a decrease of Rp 1.58 billion or -87.53% compared to 2020, this was due to a decrease in investment in the Company.

- **Cash Flow From Funding Activities**

Net cash used for financing activities in 2021 was recorded at -Rp 40.70 billion. Cash flow from financing activities decreased by 29.44% due to the settlement of CNG Bangkanai's lease receivables and a decrease in SHL loan interest according to the schedule for principal repayments.

- **Increase / decrease in net cash and cash equivalents**

Overall in 2021, there was a net increase in Cash and Cash Equivalents when compared to 2020. The net increase in Cash and Cash Equivalents in 2021 was IDR 423 million or 0.38%.

- **End of Year Cash and Cash Equivalents**

The amount of Cash and Cash Equivalents at the end of the year in 2021 was recorded at Rp. 450.78 billion, an increase of Rp. 112.19 billion or 33.13% compared to 2020.

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Company Health Level

Hasil pencapaian selama tahun berjalan tersebut kemudian dinilai berdasarkan Petunjuk Teknis KPI PT Prima Layanan Nasional Enjiniring tahun 2021 yang mengacu kepada Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0007.P/DIR/2022 tanggal 23 Februari 2022 tentang Manajemen Kinerja Korporasi dan Penilaian Kinerja Organisasi serta penggolongan penilaian tingkat kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN dan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi BUMN. Berdasarkan penilaian tersebut, tingkat kesehatan Perusahaan pada tahun 2021 digolongkan dalam kondisi "SEHAT" kategori "AAA" dengan nilai "101,64" dengan rincian sebagai berikut:

The results of the achievement during the current year are then assessed based on the KPI Technical Guidelines for PT Prima Jasa Nasional Engineering in 2021 which refers to the Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0007.P/DIR/2022 dated February 23, 2022 concerning Corporate Performance Management and Organizational Performance Assessment and the classification of health level assessments in accordance with the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. 0007.P/DIR/2022. KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 concerning Assessment of the Health Level of SOEs and Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia No. PER-11/MBU/11/2020 dated November 12, 2020 regarding Management Contracts and Annual Management Contracts for SOE Directors. Based on this assessment, the Company's health level in 2021 is classified as "HEALTH" in the "AAA" category with a score of "101.64" with the following details:

TABEL TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN (DALAM JUTAAN RUPIAH)

TABLE OF COMPANY HEALTH LEVEL (IN MILLION RUPIAH)

No	Indikator Kinerja Kunci Key Performance Indicators	Bobot Weight	Nilai Value
1	Pelanggan Customer	8.00	7.70
2	Efektivitas Produk dan Proses Products effectivity and Process	32.00	33.50
3	Fokus Tenaga Kerja HR	12.00	12.20
4	Keuangan dan Pasar Finace and Markets	39.00	38.85
5	Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan Leadership, Governance and Community Responsibility	9.00	9.39
TOTAL BOBOT TOTAL WEIGHT		100.00	101.64

Rasio Keuangan

Financial Ratios

• Kolektibilitas Piutang

Umur Piutang (*Collection Period*) merupakan indikator dengan polaritas negatif yang pencapaiannya semakin baik jika realisasinya semakin kecil. Pengukurannya dilakukan dengan membandingkan rata-rata saldo piutang usaha dengan jumlah pendapatan dikalikan dengan jumlah hari dalam setahun (365 hari). Pada tahun 2021 tingkat kolektibilitas piutang perusahaan tercatat sebesar 56 hari lebih turun dari target yang ditetapkan sebesar 83 hari.

Sedangkan pada tahun 2020, tingkat kolektibilitas piutang perusahaan tercatat sebesar 106 hari, lebih lama dari target yang ditetapkan sebesar 30 hari.

• Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan membayar utang dapat dilihat melalui rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas yang menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek antara lain dapat diukur melalui rasio kas dan rasio lancar.

- Rasio Kas menjelaskan kemampuan perusahaan untuk melunasi liabilitas jangka pendeknya melalui kas dan setara kas (asset yang paling likuid) yang dimiliki.
- Rasio Lancar merupakan rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan untuk membayar hutang dengan menggunakan aktiva.

• Rasio Likuiditas

TABEL LIKUIDITAS (DALAM JUTAAN RUPIAH)

TABLE OF LIQUIDITY (IN MILION RUPIAH)

Uraian <i>Description</i>	2021	2020
1	2	3
Rasio Kas (%) <i>Cash Ratio (%)</i>	1,45	0,89
Rasio Lancar (%) <i>Current Ratio (%)</i>	2,68	2,22

• Receivable Collectibility

Accounts Receivable Age (Collection Period) is an indicator with negative polarity whose achievement is getting better if the realization is getting smaller. The measurement is done by comparing the average balance of trade receivables with the amount of income multiplied by the number of days in a year (365 days). In 2021 the collectibility rate of the company's receivables was recorded at 56 days, down from the target set at 83 days.

Meanwhile, in 2020, the collectibility of the company's receivables was recorded at 106 days, longer than the target set at 30 days.

• Ability to Pay Debt

The ability to pay debts can be seen through liquidity ratios and solvency ratios. Liquidity ratios that show the ability of the Company to meet short-term liabilities can be measured among others through cash ratios and current ratios.

- *The Cash Ratio describes the company's ability to pay off short-term liabilities through cash and cash equivalents (the most liquid assets) owned.*
- *Current Ratio is a ratio used to see the company ability to pay debts using assets.*

• Liquidity Ratio

Rasio likuiditas 2021 mengalami peningkatan dibandingkan 2020, diukur dengan menggunakan Rasio Lancar. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan membayar utang PLN Enjiniring di 2021 meningkat. Rasio likuiditas masih menunjukkan kondisi yang semakin baik yaitu dengan nilai 2,68.

The 2021 liquidity ratio has increased compared to 2020, measured using the Current Ratio. This shows that the ability to pay PLN Enjiniring's debt in 2021 will increase. The liquidity ratio still shows a better condition, with a value of 2.68.

- **Rasio Solvabilitas**

Rasio solvabilitas yang menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam membayar kewajiban- kewajibannya antara lain dapat diukur melalui rasio liabilitas terhadap ekuitas, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, dan rasio liabilitas terhadap aset, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset.

- **Solvency Ratio**

The solvency ratio which shows the Company's ability to pay its obligations, among others, can be measured through the ratio of liabilities to equity, which is by comparing total liabilities to total equity, and liabilities to assets ratio, which is calculated by comparing total liabilities to total assets.

TABEL SOLVABILITAS (DALAM JUTAAN RUPIAH)

TABLE OF SOLVENCY (IN MILION RUPIAH)

Uraian	2021	2020
Description		
1	2	3
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas <i>Ratio of Liabilities to Equity</i>	0,48	0,66
Rasio Liabilitas Terhadap Aset <i>Ratio of Liabilities to Assets</i>	0,33	0,40

Rasio solvabilitas Perusahaan mengalami penurunan, baik untuk rasio liabilitas terhadap ekuitas maupun rasio liabilitas terhadap aset. Hal ini menunjukkan kemampuan PLN Enjiniring dalam membayar kewajiban-kewajiban masih tergolong cukup baik dengan rasio 0,33 di tahun 2021.

The Company's solvency ratio has decreased, both for the ratio of liabilities to equity and the ratio of liabilities to assets. This shows that PLN Enjiniring's ability to pay its obligations is still quite good with a ratio of 0.33 in 2021.

Struktur Modal

Capital Structure

• Rincian Struktur Modal

Komposisi struktur modal pada tahun 2021 yang dimiliki oleh Perusahaan terdiri dari ekuitas dan liabilitas. Berasal dari Liabilitas sebesar 32,59% dan ekuitas sebesar 67,41%, komposisi ini mengalami perubahan jika dibandingkan dengan 2020, dengan komposisi struktur modal yang berasal dari Liabilitas mengalami penurunan 20,89% sedangkan Ekuitas meningkat 8,50%.

TABEL STRUKTUR MODAL (DALAM JUTAAN RUPIAH)

TABLE OF CAPITAL STRUCTURE (IN MILION RUPIAH)

Uraian Description	2021	Kontribusi (%) Contribution (%)	2020	Kontribusi (%) Contribution (%)	Perubahan (%) Change (%)
1	2	3	4	5	6=(2-4)/4
Liabilitas Liabilities	366,894	32.59%	463,761	39.87%	-20.89%
Jangka Pendek Short - Term	309,987	27.53%	382,140	32.85%	-18.88%
Jangka Panjang Long - Term	56,907	5.05%	81,621	7.02%	-30.28%
Ekuitas Equity	758,906	67.41%	699,452	60.13%	8.50%
Total Modal yang Diinvestasikan Total Capital Invested	1,125,800	100.00%	1,163,213	100.00%	-3.22%

• Kebijakan Struktur Modal

Perusahaan memiliki kebijakan menggunakan ekuitas sebagai sumber modalnya. Pada tahun 2021, rasio ekuitas terhadap liabilitas sebesar 48,35%.

• Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal

Selama tahun 2021, Perusahaan tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal.

• Investasi Barang Modal

Selama tahun 2021, Perusahaan melakukan penambahan barang modal untuk Aset Tetap dan Properti Investasi sebagai berikut.

• Details of Capital Structure

The composition of the capital structure in 2021 owned by the Company consists of equity and liabilities. Derived from Liabilities by 32.59% and equity by 67.41%, this composition has changed when compared to 2020, with the composition of capital structure derived from Liabilities decreased by 20.89% while Equity increased by 8.50%.

• Capital Structure Policy

The company has a policy of using equity as a source of capital. In 2021, the equity to liability ratio will be 48.35%.

• Material Commitments for Capital Goods Investment

During 2021, the Company has no material commitments for capital goods investment.

• Capital Investment

During 2021, the Company made additional capital goods for Fixed Assets and Investment Properties as follows.

TABEL INVESTASI BARANG MODAL (DALAM JUTAAN RUPIAH)

TABLE OF CAPITAL GOODS INVESTMENT (IN MILION RUPIAH)

Uraian <i>Description</i>	Nilai Investasi <i>Investment Value</i>	Tujuan Investasi <i>Investment Objective</i>
1	2	3
Tanah <i>Soil</i>	-	Ekspansi/Pengembangan usaha <i>Expansion/Busines Development</i>
Perabotan dan Peralatan <i>Furniture and equipment</i>	0.17	Kegiatan operasional <i>Operational Activities</i>
Perlengkapan Kantor <i>Office supplies</i>	-	Kegiatan operasional <i>Operational Activities</i>
Jumlah Amount	0.17	



Perbandingan Target dan Realisasi

Comparison of Targets and Realization

Pencapaian target PLN Enjiniring pada tahun 2021 menunjukkan hasil yang bervariasi. Dari sisi posisi keuangan, jumlah aset tercapai 96,13%, jumlah liabilitas tercapai 100%, dan jumlah ekuitas perusahaan tercapai 94,36% dari target yang telah di anggarkan pada RKAP tahun 2021.

The achievement of PLN Enjiniring's targets in 2021 shows mixed results. In terms of financial position, total assets reached 96.13%, total liabilities reached 100%, and total company equity reached 94.36% of the target budgeted in the 2021 RKAP.

Dari sisi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain,realisasi pendapatan mencapai 93.97% atau sebesar Rp 736,73 miliar dari RKAP tahun 2021 yang ditargetkan yaitu sebesar Rp 784 miliar. Beban Operasi pada triwulan IV tahun 2021 mencapai Rp 671,41 miliar atau sebesar 96,48% dibandingkan anggaran tahun 2021 yaitu sebesar Rp 695,92 miliar. Realisasi laba rugi operasi pada triwulan IV tahun 2021 tercapai sebesar Rp 65,32 miliar atau mencapai 74,17% dari RKAP tahun 2021 yang di targetkan yaitu sebesar Rp 88,08 miliar. Realisasi laba tahun berjalan pada triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp 69,87 miliar atau tercapai 87,74% dari RKAP tahun 2021 yaitu sebesar Rp 79,63 miliar. Sedangkan untuk realisasi kas dan setara kas akhir tahun pada Laporan Arus Kas tercatat sebesar Rp 450,78 miliar atau mencapai 172,30% dari RKAP yang telah dianggarkan yaitu sebesar Rp 261,63 miliar.

In terms of the Income Statement and other Comprehensive Income, revenue realization reached 93.97% or Rp. 736.73 billion from the 2021 RKAP which was targeted at Rp. 784 billion. Operating expenses in the fourth quarter of 2021 reached IDR 671.41 billion or 96.48% compared to the 2021 budget, which was IDR 695.92 billion. The realization of operating profit and loss in the fourth quarter of 2021 reached Rp 65.32 billion or reached 74.17% of the targeted 2021 RKAP of Rp 88.08 billion. The realization of profit for the year in the fourth quarter of 2021 was IDR 69.87 billion or 87.74% of the 2021 RKAP, which was IDR 79.63 billion. Meanwhile, the realization of cash and cash equivalents at the end of the year in the Cash Flow Statement was recorded at Rp. 450.78 billion or 172.30% of the RKAP that had been budgeted at Rp. 261.63 billion.

TABEL REALISASI DAN TARGET 2021 (DALAM JUTAAN RUPIAH)

TABLE OF 2020 REALIZATION AND TARGET (IN MILION RUPIAH)

Uraian Description	Realisasi 2021 Realization 2021	RKAP 2021	Pencapaian (%) Achievement (%)
1			4=(2/3)
LAPORAN POSISI KEUANGAN FINANCIAL POSITION REPORT			
ASET ASSET			
Aset Lancar Current Assets	830,976	799,819	103.90%
Aset Tidak Lancar Non Current Assets	294,824	371,345	79.39%
TOTAL ASET TOTAL ASSETS	1,125,800	1,171,164	96.13%
LIABILITAS LIABILITY			

Liabilitas Jangka Pendek <i>Short - Term Liability</i>	309,987	309,988	100.00%
Liabilitas Jangka Panjang <i>Long Term Liability</i>	56,907	56,908	100.00%
TOTAL LIABILITAS <i>TOTAL LIABILITY</i>	366,894	366,896	100.00%
TOTAL EKUITAS <i>TOTAL EQUITY</i>	758,906	804,268	94.36%
Laba Rugi dan Penghasilan Lainnya <i>Income Statement and Other Comprehensive Income</i>			
Pendapatan <i>Income</i>	736,732	784,000	93.97%
Beban Pokok Pendapatan <i>Cost Of Revenue</i>	(500,492)	(514,102)	97.35%
Laba Bruto <i>Gross Profit</i>	236,240	269,898	87.53%
Beban Usaha <i>Operating Expenses</i>	(170,916)	(181,819)	94.00%
Laba Sebelum Pos Keuangan dan Lain-lain <i>Gain Before Financial Post and Other</i>	65,324	88,079	74.17%
Pos Keuangan dan Lain-lain Netto <i>Financial and Other Posts - Net</i>	11,934	(4,786)	-249.35%
Laba Sebelum Pajak <i>Profit Before Taxes</i>	77,258	83,293	92.75%
Beban Pajak Penghasilan <i>Income Taxes Expense</i>	(7,386)	(3,659)	201.86%
Laba Tahun Berjalan <i>Current Year Profit</i>	69,872	79,634	87.74%
Pendapatan Komprehensif Lain Tahun Berjalan <i>Other Comprehensive Income Of The Current Year</i>	(9,592)	2,336	-410.62%
Jumlah Pendapatan Komprehensif <i>Total Comprehensive Income</i>	(10,418)	(689)	1512.05%
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan <i>Total Comprehensive Income In Current Year</i>	59,454	78,945	75.31%
Laporan Arus Kas <i>Cash Flow Statement</i>			
Arus Kas dari Aktivitas Operasi <i>Cash Flows from Operating Activities</i>	152,670	48,735	313.27%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi <i>Cash Flows from Investing Activities</i>	225	(1,425)	-15.79%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan <i>Cash Flows from Financing Activities</i>	(40,703)	(32,011)	127.15%
Penurunan Neto Kas dan Setara Kas <i>Decrease in Net Cash and Cash Equipalents</i>	112,192	15,299	733.35%
Kas dan Setara Kas Awal Tahun <i>Cash and Cash Equipalents Early Years</i>	338,591	246,327	137.46%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun <i>Cash and Year and Cash Equipalents</i>	450,783	261,626	172.30%

Proyeksi Tahun 2021

Projection of 2020

Proyeksi keuangan pada tahun 2021 didasarkan pada asumsi nilai Kurs 1 US \$ sama dengan Rp14.105,- berdasarkan asumsi tersebut, Perusahaan memproyeksikan jumlah aset pada tahun 2021 sebesar Rp 1.171,16 miliar, jumlah liabilitas sebesar Rp 366,9 miliar, dan jumlah ekuitas diproyeksikan sebesar Rp 804,27 miliar. Dari sisi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Pada tahun 2021 Perusahaan memproyeksikan pendapatan operasi sebesar Rp 784 miliar dan Biaya Operasi sebesar Rp 695,92 miliar. Terkait Laba Rugi Operasi, Perusahaan memproyeksikan pendapatan laba operasi sebesar Rp 88,08 miliar. Laba Bersih tahun berjalan dan laba komprehensif tahun berjalan diproyeksikan mencapai Rp 79,63 miliar. Dari sisi Laporan Arus Kas, Perusahaan memproyeksikan kas dan setara kas pada akhir tahun 2021 sebesar Rp 261,63 miliar.

Financial projections in 2021 are based on the assumption of an exchange rate of 1 US\$ equal to Rp. 14,105,- based on these assumptions, the Company projects total assets in 2021 to be Rp. 1,171.16 billion, total liabilities of Rp. 366.9 billion, and total equity. projected at Rp 804.27 billion. In terms of the Income Statement and Other Comprehensive Income, in 2021 the Company projects operating income of Rp 784 billion and Operating Expenses of Rp 695.92 billion. Regarding Operating Profit and Loss, the Company projects an operating profit of Rp 88.08 billion. Net Profit for the year and comprehensive income for the year are projected to reach Rp 79.63 billion. In terms of the Cash Flow Statement, the Company projects cash and cash equivalents at the end of 2021 at Rp 261.63 billion.

INFORMASI MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Selama tahun 2021, Perseroan tidak menerima informasi material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

MATERIAL INFORMATION THAT OCCURS AFTER THE DATE OF THE ACCOUNTANT'S REPORT

During 2021, the Company did not receive material information that occurred after the date of the accountant's report.

KEBIJAKAN DEVIDEN

Atas saldo laba tahun 2021, Perseroan tidak menerima informasi terkait pembagian Dividen.

DIVIDEND POLICY

On the balance of profit in 2021, the Company does not receive information related to the distribution of dividends.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN DAN/ATAU KARYAWAN

Perusahaan tidak melaksanakan program kepemilikan saham oleh manajemen dan/atau karyawan (ESOP/MSOP), hal ini dikarenakan PLN Enjiniring belum menjadi perusahaan publik.

SHARE OWNERSHIP PROGRAM BY MANAGEMENT AND / OR EMPLOYEES

The company does not implement a share ownership program by management and / or employees (ESOP / MSOP), this is because PLN Enjiniring has not yet become a public company.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Perusahaan tidak memiliki catatan mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, hal ini dikarenakan PLN Enjiniring belum menjadi perusahaan publik.

REALIZATION OF THE USE OF FUNDS FROM PUBLIC OFFERING

The company does not have a record of the realization of the use of funds resulting from a public offering, this is because PLN Enjiniring has not become a public company.



Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi atau Restrukturisasi Utang/Modal

Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Business Combinations, Acquisitions or Debt / Capital Restructuring

■ Investasi

Pada tahun 2021, Perseroan telah menjelaskan investasi sebagai berikut:

1. PT Crompton Prima Switchgear Indonesia, dimana merupakan perusahaan afiliasi PLN Enjiniring dengan kepemilikan saham sebesar 49% telah menyelesaikan pembangunan pabrik switchgear di kawasan industri modern Cikande, Banten pada tanggal 20 Agustus 2018.
2. CNG Plant Bangkanai, dimana merupakan unit bisnis PLN Enjiniring dengan ruang lingkup sebagai aset owner dan aset operator.

■ Ekspansi

Selama 2021, Perseroan tidak memiliki informasi atau tidak terdapat kegiatan terkait dengan Ekspansi.

■ Divestasi

Selama tahun 2021, Perseroan tidak memiliki informasi atau tidak terdapat kegiatan terkait dengan Divestasi.

■ Penggabungan/Peleburan Usaha

Sepanjang tahun 2021, Perseroan tidak memiliki informasi atau tidak terdapat kegiatan terkait dengan penggabungan/ peleburan usaha.

■ Akuisisi

Selama tahun 2021, Perseroan tidak memiliki informasi atau tidak terdapat kegiatan terkait dengan akuisisi perusahaan.

■ Investment

In 2020, the Company has explained the investment as follows:

1. *PT Crompton Prima Switchgear Indonesia, which is an PLN Enjiniring affiliated company with 49% ownership, has completed the construction of the switchgear plant in the modern industrial area of Cikande, Banten on August 20, 2018.*
2. *CNG Plant Bangkanai, which is the PLN Enjiniring business unit with scope as the owner's assets and operator assets.*

■ Expansion

During 2020, the Company has no information or activities related to the Expansion.

■ Divestment

During 2020, the Company have no information or there were no activities related to Divestment.

■ Business Merger / Consolidation

During 2020, the Company has no information or there were no activities related to business mergers / consolidations.

■ Acquisition

During 2020, the Company has no information or activities related to the company's acquisition.

■ Restrukturisasi Utang Dan/Atau Restrukturisasi Modal

Selama tahun 2021, Perseroan tidak memiliki informasi atau tidak terdapat kegiatan terkait dengan Restrukturisasi utang atau/Modal.

■ Debt Restructuring And / Or Capital Restructuring

During 2021, the Company has no information or there were no activities related to debt or / capital restructuring.



Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan Dan/Atau Transaksi Dengan Pihak Berelasi

Material Transaction Information Containing Conflicts of Interest and / or Transactions with Related Parties

Perusahaan menerapkan PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". PSAK ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan.

The company applies PSAK No. 7 (Revised 2010), "Disclosure of Related Parties". This PSAK requires disclosure of relationships, transactions and related party balances, including commitments, in the financial statements.

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan yang berlaku bagi pihak ketiga.

The Company carries out certain transactions with related parties with the same terms and conditions as those applicable to third parties.

Perusahaan tidak memiliki alasan khusus terkait pemberian transaksi dengan pihak berelasi. Pemberian transaksi kepada pihak berelasi dilakukan secara wajar sesuai ketentuan yang berlaku dengan tujuan yang sama terhadap transaksi dengan pihak ketiga lainnya.

The company has no specific reason related to the provision of transactions with related parties. The giving of transactions to related parties is carried out appropriately according to the provisions in force with the same purpose to transactions with other third parties.

Transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan sebagai berikut.

Significant transactions with related parties are disclosed as follows.

Sifat hubungan dengan pihak berelasi

The Nature of Relationships with related parties

- a) Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham PLN dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- b) PLN dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) merupakan pemegang saham Perusahaan.
- c) PT Indonesia Power (IP), PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam), PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), PT PLN Gas dan Geothermal (PLN Gas dan Geothermal), PT Haleyora Power (HP), dan PT Indonesia Comnets Plus (ICON) merupakan perusahaan yang pemegang sahamnya sama dengan pemegang saham utama Perusahaan dan atau sebagian pengurusnya sama dengan Perusahaan.
- d) Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan.

- a) The Government of the Republic of Indonesia is a shareholder of PLN and a State-Owned Enterprise (BUMN).*
- b) PLN and the Education and Welfare Foundation of PT PLN (Persero) are the Company's shareholders.*
- c) PT Indonesia Power (IP), PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam), PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), PT PLN Gas dan Geothermal (PLN Gas dan Geothermal), PT Haleyora Power (HP), and PT Indonesia Comnets Plus (ICON) are companies whose shareholders are the same as the major shareholders The company and / or some of its management are the same as the Company.*
- d) The Board of Commissioners and Board of Directors are key management personnel of the Company.*

TRANSAKSI PIHAK BERELASI

RELATED PARTY TRANSACTIONS

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Group :

The following is a list of related parties that have transactions with the Company:

Pihak berelasi <i>Related parties</i>	Sifat hubungan <i>Nature of relationship</i>	Sifat transaksi <i>Nature of transaction</i>
PT Crompton Prima Switchgear Indonesia	Pengendalian bersama CG International Holdings Singapore Pte. Ltd dan Perusahaan/ <i>Joint venture between CG International Holdings Singapore PTE. LTD and the Company</i>	Piutang usaha pihak berelasi, piutang lain-lain/ <i>Trade receivable related parties, other receivables</i> Pendapatan jasa supervisi enjiniring, procurement dan konstruksi/ <i>Revenue from engineering, procurement and construction</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	Penempatan kas dan setara kas/ <i>Placement of cash and cash equivalents</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Rakyat Indonesia")	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	Penempatan kas dan setara kas/ <i>Placement of cash and cash equivalents</i>
PT Bank BNI Syariah ("BNI Syariah")	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	Penempatan kas dan setara kas/ <i>Placement of cash and cash equivalents</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Negara Indonesia")	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	Rekening bank dibatasi penggunaannya dan Penempatan kas dan setara kas/ <i>Restricted cash in banks and placement of cash and cash equivalents</i>
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) ("PT Pelabuhan Indonesia II")	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	Pendapatan jasa supervisi enjiniring dan konstruksi/ <i>Revenue from engineering supervision and construction</i>
PT Angkasa Pura II (Persero) ("PT Angkasa Pura II")	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	Pendapatan jasa supervisi enjiniring dan konstruksi/ <i>Revenue from engineering supervision and construction</i>
PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("PT Waskita Karya")	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	Pendapatan jasa supervisi enjiniring dan konstruksi/ <i>Revenue from engineering supervision and construction</i>
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("PT Wijaya Karya")	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	Pendapatan jasa supervisi enjiniring dan konstruksi/ <i>Revenue from engineering supervision and construction</i>

TABEL TRANSAKSI PIHAK BERELASI

RELATED PARTIES TABLE

Uraian <i>Description</i>	2021		2020		2019	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Kas dan Setara Kas	dalam Rp. Juta					
<i>Cash and Cash equivalents</i>	<i>In Rp Million</i>					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	206,189	18.17%	175,982	15.13%	87,622	7.51%
PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk	30,331	2.67%	31,139	2.68%	13,935	1.19%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	206,075	18.16%	108,902	9.36%	111,959	9.60%
PT BNI Syariah	5,000	0.44%	10,000	0.86%	10,000	0.86%
Sub - Jumlah	447,595		326,023		223,516	
Sub - Total						
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya						
<i>Restricted account</i>						
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8,886	0.78%	9,047	0.77%	6,189	0.53%
Piutang usaha neto						
<i>Account receivable - net</i>						
PT PLN (Persero)	57,364	5.06%	143,602	12.35%	189,762	16.02%
PT Crompton Prima Switchgear	16,219	1.43%	16,219	1.39%	9,168	0.70%
PT PLN Gas Geothermal	-	-	2,699	0.23%	2,884	0.24%
PT PLN Batam	-	-	958	0.08%	1,118	0.09%
PT Indonesia Power	-	-	238	0.02%	1,007	0.08%
PT Waskita Tbk (Persero)	-	-	240	0.02%	240	0.02%
PT Indonesia Comnet Plus	8,464	0.75%	-	-	-	-
Lain-Lain	644	0.06%	-	-	-	-
Sub - Jumlah	82,691		163,956		204,179	
Sub - Total						
Piutang Lain-lain						
<i>Other Receivables</i>						
PT Crompton Prima Switchgear	-		-	0.93%	11,000	0.93%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-		-	0.02%	-	0.01%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-		-	0.00%	-	0.01%
PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk	-		-	0.00%	-	0.00%
PT PLN (Persero)	372	0.03%	7,657	0.64%	-	0.01%
Sub - Jumlah	372		7,657		11,000	
Sub - Total						
Aset Kontrak						
<i>Gross bill to customers</i>						
PT PLN (Persero)	171,293	15.10%	199,198	17.12%	216,478	18.56%
PT Indonesia Power	-	-	10,340	0.88%	338	0.02%

PT PLN Batam	-	-	-	0.02%	111	0.00%
PT Wijaya Karya (Persero)	-	-	-	0.01%	48	0.00%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	-	-	-	0.00%	5	0.00%
PT Angkasa Pura II (Persero)	-	-	174	0.01%	-	0.00%
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	-	-	347	0.03%	-	0.00%
PT Indonesia Comnet Plus	14,164	1.25%	-	0.00%	-	-
Lain-Lain	1,983	0.12%	-	-	-	-
Sub - Jumlah	187,440		210,059		216,980	
Sub - Total						

Uang muka dari pelanggan

Advances from Customer

PT PLN (Persero)	18,468	4.91%	21,006	4.52%	35,393	7.12%
------------------	--------	-------	--------	-------	--------	-------

Utang Lain-lain

Other Liabilities

PT PLN (Persero)	11,916	3.17%	2,370	0.48%	2,370	6.55%
PT Haleyora Power	1,707	0.45%	2,630	0.53%	2,630	0.08%
PT Indonesia Comnet Plus	1,727	0.46%	390	0.08%	390	0.12%
Sub - Jumlah	15,350		5,390		5,390	
Sub - Total						

Liabilitas Kontrak

Gross liabilities to customers

PT PLN (Persero)	98,400	26.20%	133,211	28.72%	100,180	20.16%
PT Indonesia Power	5,637	1.50%	3,302	0.71%	8,555	1.72%
PT PLN Gas Geothermal			120	0.03%	1,415	0.28%
PT Crompton Prima Switchgear	1,207	0.32%	-	0.00%	1,356	0.27%
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)			-	0.07%	347	0.07%
PT Angkasa Pura II (Persero)			-	0.04%	174	0.04%
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam			-	0.03%	130	0.03%
Lain-Lain	1,100	0.27%	-	0.00%	-	0.00%
Sub - Jumlah	106,344		136,633		112,157	
Sub - Total						

Pinjaman jangka panjang

Long term loan

PT PLN (Persero)	56,019	14.91%	88,028	18.98%	120,040	24.16%
------------------	--------	--------	--------	--------	---------	--------

Pendapatan jasa konsultasi pihak berelasi

Revenue from consulting service to related parties

Piutang Sewa Pembiayaan						
PT PLN (Persero)	213,913	18.85%	241,578	20.77%	266,141	22.83%
Pendapatan						
PT PLN (Persero)	550,216	74.68%	587,827	94.00%	943,900	96.44%
PT Indonesia Power	11,608	1.58%	7,521	1.20%	11,750	1.20%

PT Indonesia Comnet Plus	16,747	2.27%	-	0.00%	-	0.00%
PT Geo Dipa Energi	22,115	3%				
PT Pembangunan Jawa Bali	23,241	3.15%	12,780	2.04%	2,167	0.22%
Lain-Lain	9,177	1.24%	15,262	2.41%	2,086	0.21%
Sub - Jumlah	633,104		623,390		959,903	
<i>Sub - Total</i>						

Pada 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan memberikan kompensasi kepada Komisaris dan Direksi perusahaan berupa gaji, fasilitas, tunjangan dan tantiem masing-masing sebesar Rp 16.98 miliar dan Rp. 18.56 miliar. Perusahaan memiliki kebijakan untuk mereview setiap transaksi dengan pihak berelasi agar tidak melanggar peraturan dan ketentuan yang terkait.

As of December 31, 2021 and 2020, the Company provided compensation to the Commissioners and Directors of the company in the form of salaries, facilities, allowances and bonuses amounting to Rp 16.98 billion and Rp. 18.56 billion. The company has a policy to review every transaction with related parties so as not to violate the relevant rules and regulations.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan

Amendments to the Law and Regulations which have a Significant Effect on the Company

Selama Tahun 2021, Perseroan tidak memiliki informasi atau tidak terdapat kegiatan terkait perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan.

During 2021, the Company did not have information or there were no activities related to changes in laws and regulations that had a significant effect on the financial statements.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

a. Penerapan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020 Penerapan dari standar baru, interpretasi, amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan:

- Penyesuaian tahunan 2020: "Kerangka Konseptual 2019"
- PSAK No. 101: "Penyajian Laporan Keuangan Syariah"
- PSAK No. 102: "Akuntansi Murabahah"
- ISAK No. 35: "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba"
- ISAK No. 36: "Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK No. 16: Aset Tetap dan PSAK No 73, Sewa"
- ISAK No. 101: "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan"
- ISAK No. 102: "Penurunan Nilai Piutang Murabahah"
- Amandemen PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan"

a) Penerapan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020 Penerapan dari standar baru, interpretasi, amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan:

- 2020 annual adjustment: "2019 Conceptual Framework"
- PSAK No. 101: "Presentation of Islamic Financial Statements"
- PSAK No. 102: "Murabaha Accounting"
- ISAK No. 35: "Presentation of Financial Statements of Non-Profit Oriented Entities"
- ISAK No. 36: "Interpretation of the Interaction between Provisions on Land Rights in PSAK No. 16: Fixed Assets and PSAK No. 73, Leases"
- ISAK No. 101: "Recognition of Tangguh Murabahah Revenue Without Significant Risks related to Inventory Ownership"
- ISAK No. 102: "Impairment of Murabahah Receivables"
- Amendment to PSAK No. 1: "Presentation of Financial Statements concerning the Title of Financial Statements"

- Amandemen PSAK No. 15: "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- Amandemen PSAK No. 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"
- Amandemen PSAK No. 62: "Kontrak Asuransi"
- Amandemen PSAK No. 71: "Instrumen Keuangan - Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif"
- Amandemen PSAK No. 73: "Konsesi Sewa terkait COVID-19"
- Amandemen PSAK No. 71, PSAK No. 55, dan PSAK No. 60 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan"
- Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan ("PPSAK") No. 13 mengenai pencabutan PSAK No. 45: "Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba"

Standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 74: "Kontrak Asuransi"
- PSAK No. 112: "Akuntansi Wakaf"
- Amandemen PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amandemen PSAK No. 22: "Kombinasi Bisnis - Definisi Bisnis"
- Amandemen PSAK No. 22: "Kombinasi Bisnis - Referensi ke Kerangka Konseptual"
- Amandemen PSAK No. 57: "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi Kontrak Memberatkan – Biaya Memenuhi Kontrak"
- Amandemen PSAK No. 71, PSAK No. 55, PSAK No. 60, PSAK No. 62 dan PSAK No. 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga 2
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 69: "Agrikultur"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 71: "Instrumen Keuangan"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 73: "Sewa"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 110: "Akuntansi Sukuk"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 111: "Akuntansi Wa'd"

- *Amendment to PSAK No. 15: "Investments in Associates and Joint Ventures"*
- *Amendment to PSAK No. 25: "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors"*
- *Amendment to PSAK No. 62: "Insurance Contract"*
- *Amendment to PSAK No. 71: "Financial Instruments - Accelerated Repayment Features with Negative Compensation"*
- *Amendment to PSAK No. 73: "Covid-19-related Lease Concessions"*
- *Amendment to PSAK No. 71, PSAK No. 55, and PSAK No. 60 on Interest Rate Benchmark Reform*
- *Annual adjustment of PSAK No. 1: "Presentation of Financial Statements"*
- *Statement of PPSAK No. 13 regarding the revocation of PSAK No. 45: "Non-profit Organization Financial Reporting"*

The new standards, amendments and annual adjustments that have been issued, but not yet effective for the financial year starting on January 1, 2020 are as follows :

- *PSAK No. 74: "Insurance Contract"*
- *PSAK No. 112: "Accounting for Waqf"*
- *Amendment to PSAK No. 1: "Presentation of Financial Statements"*
- *Amendment to PSAK No. 22: "Business Combination - Business Definition"*
- *Amendment to PSAK No. 22: "Business Combinations - Reference to Conceptual Frameworks"*
- *Amendment to PSAK No. 57: "Aggravating Contract Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets – Cost of Fulfilling Contracts"*
- *Amendment to PSAK No. 71, PSAK No. 55, PSAK No. 60, PSAK No. 62 and PSAK No. 73 concerning Interest Rate Benchmark Reform 2*
- *Annual adjustment of PSAK No. 69: "Agriculture"*
- *Annual adjustment of PSAK No. 71: "Financial Instruments"*
- *Annual adjustment of PSAK No. 73: "Lease"*
- *Annual adjustment of PSAK No. 110: "Sukuk Accounting"*
- *Annual adjustment of PSAK No. 111: "Wa'd Accounting"*

Standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2021, kecuali Amandemen PSAK No. 22: "Kombinasi Bisnis - Referensi ke Kerangka Konseptual", Amandemen PSAK No. 57, Penyesuaian tahunan PSAK No. 69, Penyesuaian tahunan PSAK No. 71 dan Penyesuaian tahunan PSAK No. 73 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2022, Amandemen PSAK No. 1 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2023 dan PSAK No. 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan.

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan dan entitas anak masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen standar, dan interpretasi atas standar serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak.

- **Penerapan awal PSAK No. 71: "Instrumen Keuangan"**

PSAK No. 71: "Instrumen Keuangan" diterbitkan di bulan Juli 2017 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan. Grup menerapkan PSAK No. 71 mulai 1 Januari 2020.

Grup menerapkan PSAK No. 71 secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan dan tidak melakukan penyajian kembali untuk informasi komparasi.

Sesuai ketentuan transisi PSAK No. 71 terkait dengan klasifikasi, pengukuran dan penurunan nilai aset keuangan, Grup telah memilih untuk tidak menyajikan kembali periode komparatif. Dampak kumulatif atas penyesuaian nilai tercatat pada awal penerapan diakui pada saldo laba pada 1 Januari 2020 sebagaimana diizinkan berdasarkan ketentuan transisi dalam standar.

- **Penerapan awal PSAK No. 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"**

PSAK No. 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", diterbitkan di bulan Juli 2017 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020. Grup menerapkan PSAK No. 72 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2020,

The new standards, amendments and annual adjustments above are effective starting January 1, 2021, except for Amendments to PSAK No. 22: "Business Combinations - Reference to Conceptual Frameworks", Amendment to PSAK No. 57, Annual adjustment of PSAK No. 69, Annual adjustment of PSAK No. 73 which is effective from January 1, 2022, Amendment to PSAK No. 1 which is effective from January 1, 2023 and PSAK No. 74 which is effective from 1 January 2025, but early application is permitted.

At the time of issuance of the consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are still studying the impacts that may arise from the adoption of new standards, amendments to standards, and interpretations of the standards and their effects on the consolidated financial statements of the Company and subsidiaries.

- **Initial application of PSAK No. 71: "Financial Instruments"**

PSAK No. 71: "Financial Instruments" issued in July 2017 and effective January 1, 2020 with early application permitted. The Group applies PSAK No. 71 starting January 1, 2020.

The Group applies PSAK No. 71 retrospectively with cumulative impact at the start of application and not restatement for comparative information.

In accordance with the transitional provisions of PSAK No. 71 related to the classification, measurement and impairment of financial assets, the Group has chosen not to restate the comparative period. The cumulative effect of the initial carrying amount adjustment is recognized in retained earnings on January 1, 2020 as permitted under the transitional provisions of the standard.

- **Initial application of PSAK No. 72: "Revenue from Contracts with Customers"**

PSAK No. 72: "Revenue from Contracts with Customers", issued in July 2017 and effective January 1, 2020. The Group applies PSAK No. 72 effectively for the financial year starting January

yang berdampak pada perubahan atas kebijakan akuntansi dan adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap jumlah yang telah diakui pada laporan keuangan.

Standar baru menentukan pengakuan pendapatan yaitu terjadi ketika pengendalian barang atau jasa yang dijanjikan telah dialihkan kepada pelanggan Berdasarkan kajian yang telah dilakukan Grup terhadap kontrak pendapatan dengan mengacu 5 (lima) tahapan yang ada di dalam PSAK No. 72, terdapat perbedaan yang signifikan dengan kebijakan akuntansi sebelumnya terhadap laporan keuangan konsolidasian terkait transaksi pendapatan biaya penyambungan. Manajemen memilih metode transisi retrospektif dengan dampak kumulatif atas penerapan awal standar diakui pada penerapan awal (*modified retrospective*). Manajemen juga memilih untuk menerapkan PSAK No. 72 secara retrospektif hanya terhadap kontrak yang bukan merupakan kontrak selesai pada tanggal penerapan awal.

- **Penerapan awal PSAK No. 73: "Sewa"**

Grup menerapkan PSAK No. 73: "Sewa" secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan dan tidak melakukan penyajian kembali untuk informasi komparasi sebagaimana diizinkan berdasarkan ketentuan transisi dalam standar. Grup mengakui utang sewa dan aset hak-guna pada tanggal penerapan awal. Grup sebagai penyewa akan mengukur utang sewa pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan tingkat bunga implisit sewa (jika tersedia) atau pinjaman inkremental pada tanggal penerapan awal. Tingkat pinjaman inkremental penyewa yang diterapkan adalah 11,95%. Kemudian Grup mengukur aset hak-guna pada jumlah yang sama dengan utang sewa, yang disesuaikan dengan jumlah sewa dibayar dimuka atau terutang terkait dengan sewa tersebut, yang diakui segera dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal penerapan awal.

Dampak penerapan awal PSAK No. 73: "Sewa" terhadap saldo awal 1 Januari 2020 untuk aset hak-guna sebesar Rp34.080 dan utang sewa sebesar Rp34.080.

Dalam menerapkan PSAK No. 73 untuk pertama kalinya, Grup menerapkan cara praktis berikut yang diperkenankan oleh standar

1, 2020, which has an impact on changes to accounting policies and adjustments to amounts recognized in the financial statements. The new standard specifies that revenue recognition occurs when control of the promised goods or services has been transferred to the customer.

Based on the study conducted by the Group on revenue contracts with reference to the 5 (five) stages contained in PSAK No. 72, there is a significant difference with the previous accounting policies on the consolidated financial statements related to connection fee income transactions. Management chose the retrospective transition method with the cumulative effect on initial application of the standard recognized on initial application (modified retrospective). Management also chose to apply PSAK No. 72 retrospectively only on contracts that were not contracts completed at the date of initial application.

- **Initial application of PSAK No. 73: "Lease"**

The Group applies PSAK No. 73: "Lease" retrospectively with cumulative effect on initial application and not restatement for comparative information as permitted under the transitional provisions in the standard. The Group recognizes lease payables and right-of-use assets on the date of initial application. The Group as lessee will measure the lease payable at the present value of the remaining lease payments, discounted using the lease's implicit interest rate (if available) or incremental borrowing at the initial application date. The applied tenant incremental lending rate is 11.95%. The Group then measures the right-of-use asset at an amount equal to the lease payable, adjusted for the amount of any prepaid rent or payable relating to the lease, which is recognized immediately in the consolidated statement of financial position on the date of initial application.

The impact of the initial application of PSAK No. 73: "Lease" to the beginning balance of January 1, 2020 for right-of-use assets of Rp 34,080 and rental payables of Rp 34,080.

In applying PSAK No. 73 for the first time, the Group applies the following practical methods permitted by the standard

- menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa;
 - akuntansi sewa operasi yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari 1 Januari 2020 diperlakukan sebagai sewa jangka pendek;
 - pengecualian biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal penerapan awal;
 - menggunakan tinjauan ke belakang (*hindsight*) dalam menentukan masa alternatif kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa;
 - untuk tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa berdasarkan kelas aset pendasar; dan mengandalkan penilaian apakah sewa bersifat memberatkan sesuai PSAK No. 57: "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" segera sebelum tanggal penerapan awal sebagai alternatif untuk melakukan tinjauan penurunan nilai.
- *apply a single discount rate to a portfolio of leases with fairly similar characteristics;*
 - *accounting for operating leases whose leases expire within 12 months from January 1, 2020, are treated as short-term leases;*
 - *the exclusion of initial direct costs from the measurement of right-of-use assets at the initial application date;*
 - *use hindsight in determining alternative contract terms containing options to extend or terminate the lease;*
 - *not to separate the non-lease component from the lease component by underlying asset class; and rely on an assessment of whether the lease is onerous under PSAK No. 57: "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" immediately prior to the initial application date as an alternative to conducting an impairment review.*

Sumber Daya Manusia

Human Resources



Sumber Daya Manusia

Human Resources

Bagian SDM pada PLN Enjiniring terdiri dari sub bagian Pengembangan Organisasi dan Kinerja SDM, Administrasi dan Kesejahteraan SDM, dan Pengembangan SDM, sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 20.001.K/DIR/PLNE/VIII/2018 tentang Formasi Jabatan dan Formasi Tenaga Kerja Tahun 2018 PT PLN Enjiniring. Keputusan Direksi tersebut menunjukkan bahwa dimana secara tidak langsung fungsi dari bagian SDM PLN Enjiniring tidak sekedar sebagai fungsi administratif ataupun supporting, melainkan mempunyai fungsi yang lebih besar yaitu peningkatan produktifitas, kapabilitas serta meningkatkan nilai dan keunggulan organisasi untuk menghadapi dinamika tantangan bisnis global.

Aktivitas Bagian SDM yang menunjang kinerja perusahaan dalam setiap tahun tertuang dalam Kontrak Manajemen, dimana *Key Performance Indicator* (KPI) untuk perspektif tenaga kerja adalah kesiapan sumber daya manusia (*Human Capital Readiness – HCR*) dan kesiapan organisasi (*Organizational Capital Readiness – OCR*). Pada tahun 2021, KPI Rasio Enjinir *Subletting*, yang sebelumnya masuk dalam Perspektif Tenaga Kerja, dipindahkan menjadi masuk dalam Perspektif Efektifitas Produk dan Proses. Selain dua aktivitas penunjang KPI Perusahaan tersebut, Bagian SDM PLN Enjiniring tetap melaksanakan fungsi SDM sebagaimana mestinya, yang juga dikenal dengan sebutan “Tujuh Pilar SDM”, yaitu :

1. pengembangan organisasi dan perencanaan tenaga kerja,
2. rekrutmen dan seleksi,
3. pembinaan kompetensi dan karir,
4. pengelolaan pembelajaran,
5. pengelolaan manajemen kinerja (*performance appraisal*),
6. pengelolaan kompensasi dan manfaat, dan
7. pengelolaan hubungan industrial.

The HR section of PLN Enjiniring consists of sub-sections of Organizational and HR Performance Development, HR Administration and Welfare, and HR Development, in accordance with Decree of the Board of Directors No. 20.001.K / DIR / PLNE / VIII / 2018 regarding Position Formation and Workforce Formation. The Board of Directors decision shows that indirectly the function of the PLN Enjiniring Section is not just as personnel, but also has a function as for the development of human resources and organizations.

The HR Department activities that support the company's performance every year are contained in the Management Contract, where the Key Performance Indicator (KPI) for the workforce perspective is the Human Capital Readiness 'HCR' and Organizational Capital Readiness 'OCR'. In 2021, the Subletting Engineering Ratio KPI, which was previously included in the Labor Perspective, was transferred to the Product and Process Effectiveness Perspective. In addition to the two supporting activities of the Company's KPI, the Human Resources Department PLN Enjiniring continues to carry out the HR function as it should, also known as the "Seven Pillars of HR", namely:

1. *organizational development and workforce planning,*
2. *recruitment and selection,*
3. *competency and career development,*
4. *learning management,*
5. *performance management (performance appraisal),*
6. *compensation and benefit management, and*
7. *industrial relations management.*

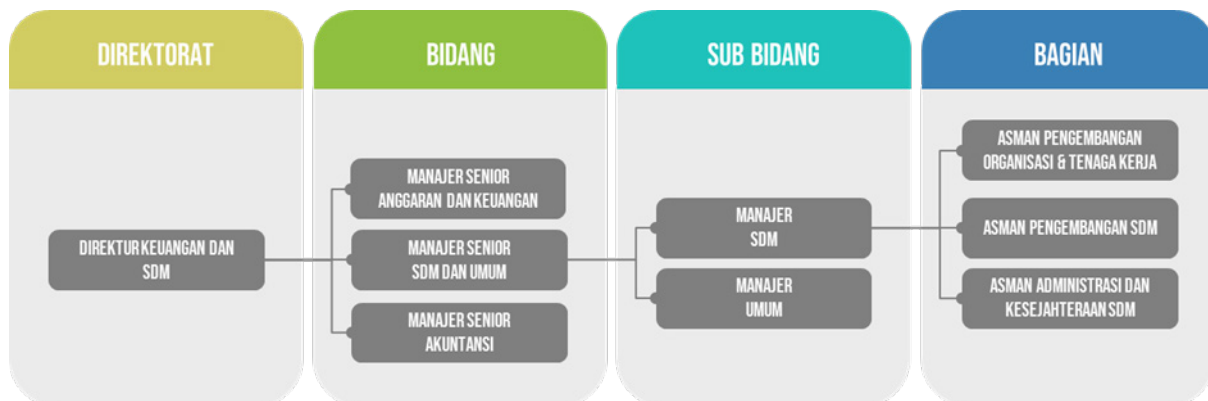
ORGANISASI PENGELOLA SUMBER DAYA MANUSIA

PLN Enjiniring menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan elemen penting yang akan menunjang produktivitas kinerja PLN Enjiniring. Persaingan dunia bisnis yang semakin ketat menuntut manusia untuk selalu berkembang menjadi lebih baik dan kompetitif. Untuk menjawab tantangan zaman yang semakin global saat ini, PLN Enjiniring berkomitmen untuk terus melakukan program pengembangan karyawan secara intensif guna mencetak insan PLN Enjiniring yang handal dan kompeten dalam dunia bisnis. Komitmen ini ditunjukkan dengan mengikutsertakan karyawan dalam berbagai pelatihan dan sertifikasi serta program pengembangan lainnya. Pengelolaan SDM PLN Enjiniring berada di bawah tanggung jawab Direktorat Keuangan dan SDM dan dijalankan oleh Bidang SDM dan Umum yang dipimpin oleh Manajer Senior SDM dan Umum. Struktur organisasi pengelola SDM adalah sebagai berikut.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ORGANIZATION

PLN Enjiniring is aware that human resources are an important element that supporting PLN Enjiniring's productivity performance. The increasingly fierce competition in the business world requires humans to always develop for the better and competitive. To answer the challenges of the increasingly global era today, PLN Enjiniring committed to continuing to conduct intensive employee development programs in order to produce PLN Enjiniring people who are reliable and competent in the business world. This commitment demonstrated by involving employees in various training and certifications and other development programs. The management of human resources PLN Enjiniring is under the responsibility of the Directorate of Finance and HR and is carried out by the HR and General Affairs Division which is led by the Senior HR and General Managers. The organizational structure of the HR manager is as follows.

Struktur Organisasi Pengelola SDM HR Management Organizational Structure



Profil Vice President Sdm Dan Umum

Vice President Of Hr And General Profile

■ Fransiska Widyastuti

PLT Vice President SDM dan Umum

Warga Negara Indonesia, usia 42 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi dari Universitas Indonesia Depok pada tahun 2003. PLT Vice President SDM dan Umum sejak tahun 2021, sebelumnya menjabat sebagai PH Manajer Senior SDM dan Umum pada PT PLN Enjiniring.

FUNGSI DAN RUANG LINGKUP TUGAS BIDANG SDM & UMUM

Pada Bidang SDM & Umum terdapat dua bagian yaitu:

1. Bagian SDM, memiliki fungsi dan ruang lingkup sebagai berikut
 - Pengembangan organisasi dan perencanaan tenaga kerja,
 - Rekrutmen dan seleksi,
 - Pembinaan kompetensi dan karir,
 - Pengelolaan pembelajaran (pendidikan dan pelatihan),
 - Pengelolaan manajemen kinerja,
 - Pengelolaan kompensasi dan manfaat,
 - Pengelolaan hubungan industrial,
2. Bagian Umum, memiliki fungsi dan ruang lingkup sebagai berikut
 - Rumah tangga kantor
 - Manajemen gedung dan aset
 - Pengelolaan keamanan dan kebersihan kantor
 - Pengelolaan kendaraan dan fasilitas dinas
 - Pengelolaan perjalanan dinas

■ Fransiska Widyastuti

PLT Vice President of HR and General

Indonesian citizen, 42 years old. Completed S1 Accounting from the University of Indonesia Depok in 2003. PLT Vice President of Human Resources and General Affairs since 2021, previously served as PH Senior Manager of Human Resources and General at PT PLN Enjiniring.

FUNCTIONS AND SCOPE OF DUTY IN THE SECTOR OF HUMAN RESOURCES & GENERAL AFFAIRS

In the field of HR & General there are two parts, namely:

1. HR, has the following functions and scope
 - Organizational development and workforce planning,
 - Recruitment and selection,
 - Competency and career development,
 - Management of learning (education and training),
 - Management of performance management,
 - Management of compensation and benefits,
 - Management of Industrial Relations,
2. General Section, has the following functions and scope
 - Office household
 - Management of building and asset
 - Management of office security and cleanliness
 - Management of vehicles and service facilities
 - Management of official travel

KEBIJAKAN REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Seiring dengan perkembangan bisnis perusahaan, PLN Enjiniring membutuhkan peningkatan SDM dalam hal kualitas maupun kuantitas. Rekrutmen yang dilakukan terutama untuk mengisi formasi jabatan dan formasi tenaga kerja berdasarkan keputusan Direksi Perusahaan. Rekrutmen dilakukan dengan pertimbangan hasil analisis kebutuhan tenaga kerja berdasarkan penguatan kompetensi bisnis Perusahaan serta peningkatan target kinerja dan pendapatan. Keberagaman latar belakang pendidikan, pengalaman, dan keahlian menjadi kriteria dalam melakukan seleksi calon pegawai PLN Enjiniring.

Terhitung mulai tahun 2020, rekrutmen calon pegawai PLN Enjiniring dilakukan melalui rekrutmen terpusat dalam lingkup PLN Grup. Rekrutmen tersebut dilakukan oleh PT PLN (Persero) melalui rekrutmen terbuka untuk umum, dengan membuka seluas-luasnya kesempatan rekrutmen dengan tidak membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. PLN Enjiniring menghitung jumlah kebutuhan tambahan tenaga kerja sekaligus klasifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengisi formasi tenaga kerja, kemudian diserahkan kepada Bagian Rekrutmen PT PLN (Persero) Kantor Pusat yang bertindak sebagai pelaksana rekrutmen. Sedangkan untuk proses rekrutmen karyawan *outsourcing* dan karyawan PKWT dilakukan berdasarkan kebutuhan proyek.

Dalam proses rekrutmen calon pegawai PLN Enjiniring, terdapat sejumlah tahap yang harus dilalui oleh para pelamar, yaitu (1) Seleksi administrasi, (2) Tes Potensi Akademik (TPA) dan Bahasa Inggris, (3) *General Aptitude Test* (GAT), (4) Psikotes, (5) Wawancara, dan (6) Tes Kesehatan.

Calon pegawai yang telah lulus melewati seluruh tahapan seleksi tersebut wajib mengikuti program pra-jabatan yang terdiri dari pendidikan dan pelatihan bimbingan fisik dan mental, pendidikan dan pelatihan pengenalan perusahaan, dan *on-the-job training* (OJT) dalam bentuk terjun langsung ke dalam pekerjaan di lingkungan PLN Enjiniring. Setelah selesai mengikuti program pra-jabatan dan dinyatakan lulus Uji Akhir, calon pegawai diangkat

HUMAN RESOURCES RECRUITMENT POLICY

Along with the company's business development, PLN Enjiniring requires an increase in human resources in terms of quality and quantity. Recruitment carried out primarily to fill in the position formation and workforce formation based on the decision of the Company's Board of Directors. Recruitment carried out with consideration of the analysis results of workforce needs based on strengthening the Company business competencies and increasing performance and revenue targets. The diversity of educational backgrounds, experiences, and expertise become the criteria in selecting the candidates for PLN Enjiniring.

Starting from 2020, the recruitment of prospective PLN Enjiniring employees carried out through a centralized recruitment within the scope of the PLN Group. The recruitment carried out by PT PLN (Persero) through open recruitment to the public, by opening up the broadest recruitment opportunities by not distinguishing ethnicity, religion, race, and between groups. PLN Enjiniring calculates the number of additional workforce needs as well as the classification of workforce needed to fill workforce formation, then submitted to the Recruitment Section of PT PLN (Persero) Head Office which acts as a recruitment executor. Whereas the recruitment process for outsourced employees and PKWT employees carried out based on project needs.

In the recruitment process of prospective PLN Enjiniring employees, there are a number of stages that must be passed by the applicants, namely (1) Administration selection, (2) Academic Potential Test (TPA) and English Test, (3) General Aptitude Test (GAT), (4) Psychology test, (5) Interview, and (6) Health Test.

Prospective employees who have passed all stages of the selection are required to take a pre-service program consisting of education and training in physical and mental guidance, education and company introduction training, and on-the-job training (OJT) in the form of working directly into employment within the environment of PLN Enjiniring. After completing the pre-service program, prospective employees appointed

menjadi Pegawai terhitung sejak tanggal selesai masa OJT dan/atau terbitnya Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai melalui Keputusan Direksi. Terhitung sejak tahun 2020, PLN Enjiniring tidak melakukan rekrutmen pegawai Organik sesuai dengan arahan PLN selaku pemegang saham. Sehingga, dalam upaya memenuhi formasi tenaga kerja pegawai Organik, sepanjang tahun 2021 PLN Enjiniring mendapatkan tambahan pegawai Tugas Karya dari PLN sejumlah 9 orang pada semester I dan 1 orang pada semester II tahun 2021, serta 1 orang organik yang telah selesai masa tugas belajar pada semester II tahun 2021.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROGRAM PENGEMBANGAN SDM

Pengembangan kompetensi SDM dilakukan untuk memastikan ketersediaan SDM yang handal dalam menjalankan aktivitas bisnis PLN Enjiniring. Salah satu media pengembangan kompetensi SDM adalah melalui pemberdayaan program pelatihan, sertifikasi, dan penugasan. PLN Enjiniring memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan dalam mendapatkan program pengembangan tersebut.

Program pengembangan didasarkan pada kebutuhan Perusahaan untuk mendukung pencapaian keberhasilan kinerja dan tujuan Perusahaan yang ditetapkan dalam Kontrak Manajemen. Selain itu, program pengembangan bagi tenaga kerja bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan sikap dalam menghadapi setiap pekerjaan atau penugasan.

Dalam melaksanakan pengembangan SDM, PLN Enjiniring bekerja sama dengan PLN Corporate University dan lembaga pelatihan dalam maupun luar negeri. Selama tahun 2021, Perusahaan melaksanakan pengembangan kompetensi karyawan yang terdiri dari 81 Program Pelatihan dengan diikuti oleh 539 orang, serta 25 Program Sertifikasi dengan diikuti oleh 68 orang terdiri dari Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai, dan Karyawan Kontrak/*Outsourcing*. Pengembangan kompetensi dilakukan dengan menerapkan menerapkan prinsip persamaan kesempatan bagi semua karyawan.

as Employees from the date of completion of the OJT period and / or the issuance of a Decision Letter on Appointment of Employees through a Decree of the Board of Directors. As of 2020, PLN Enjiniring has not recruited Organic employees in accordance with PLN's directives as shareholders. Thus, in an effort to fulfill the formation of the Organic employee workforce, throughout 2021 PLN Enjiniring received additional Work Tasks employees from PLN of 9 people in the first semester and 1 person in the second semester of 2021, as well as 1 organic person who had completed the study period in the 2nd semester in 2021.

DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES

HR DEVELOPMENT PROGRAM

HR competency development carried out to ensure the availability of reliable HR in carrying out PLN Enjiniring's business activities. One of the media for developing HR competencies is through empowering training programs, certifications, and assignments. PLN Enjiniring gives the same opportunity to all employees in getting the development program.

The development program is based on the Company's needs to support the successful achievement of the Company's performance and objectives stipulated in the Management Contract. In addition, the development program for the workforce aims to increase knowledge, competencies, and attitudes in the face of each job or assignment.

In implementing HR development, PLN Enjiniring works with PLN Corporate University and training institutions at home and abroad. During 2021, the Company carried out employee competency development which consisted of 81 Training Programs attended by 539 people, and 25 Certification Programs attended by 68 people consisting of Members of the Board of Commissioners, Directors, Employees, and Contract / Outsourcing Employees. Competency development is carried out by applying the principle of equality of opportunity for all employees.

TABEL PELAKSANAAN PELATIHAN TAHUN 2021
TABLE OF TRAINING IMPLEMENTATION FOR 2021

No.	Waktu Pelaksanaan <i>Execution Time</i>	Jenis/Judul Pelatihan <i>Type / Title of Training</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>	Jumlah Peserta* <i>Number of Participants*</i>
1	Januari <i>January</i>	Aspek Perpajakan PSAK 71, PSAK 72 dan PSAK 73 <i>Tax Aspects PSAK 71, PSAK 72 and PSAK 73</i>	IAI Jakarta <i>IAI Jakarta</i>	1
2	Januari <i>January</i>	Pembekalan PLTEBT <i>Renewable Energy Briefing</i>	ENEXDE HAKIT <i>ENEXDE HAKIT</i>	6
3	Februari <i>February</i>	Primavera Advance <i>Primavera Advance</i>	SARANA SOLUSINDO INFORMATIKA <i>SARANA SOLUSINDO INFORMATIKA</i>	6
4	Februari <i>February</i>	Technical Projects Management in Hydropower Projects <i>Technical Projects Management in Hydropower Projects</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	1
5	Maret <i>March</i>	Business Continuity Management <i>Business Continuity Management</i>	CRMS <i>CRMS</i>	1
6	Maret <i>March</i>	Financial and Economic Analysis for Feasibility Studies of Hydropower Projects <i>Financial and Economic Analysis for Feasibility Studies of Hydropower Projects</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	4
7	Maret <i>March</i>	Job Evaluation - Intermediate <i>Job Evaluation - Intermediate</i>	KORN FERRY <i>KORN FERRY</i>	6
8	April <i>April</i>	External Internal Lightning Protection Flammeable Area <i>External Internal Lightning Protection Flammeable Area</i>	IATKI <i>IATKI</i>	4
9	April <i>April</i>	IGNITION Masterclass #5 : Wireless Technologies for Electric Vehicle to X (V2X) <i>IGNITION Masterclass #5 : Wireless Technologies for Electric Vehicle to X (V2X)</i>	PLN PUSAT <i>PLN PUSAT</i>	2
10	April <i>April</i>	Refresh Training PLTEBT <i>Renewable Energy Refresh Training</i>	PT SKP TENAGA LISTRIK <i>PT SKP TENAGA LISTRIK</i>	25
11	April <i>April</i>	Risk Assessment Techniques ISO 31000 <i>Risk Assessment Techniques ISO 31000</i>	CRMS <i>CRMS</i>	1
12	Juni <i>June</i>	Bimtek Pengendalian Gratifikasi <i>Guidance on Gratification Control</i>	KPK <i>KPK</i>	8
13	Juni <i>June</i>	Contracts and Procurement Framework for Hydropower Projects <i>Contracts and Procurement Framework for Hydropower Projects</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	5
14	Juni <i>June</i>	Directorship Program - Building The Future Ready Organization <i>Directorship Program - Building The Future Ready Organization</i>	Pertamina Training & Consulting <i>Pertamina Training & Consulting</i>	1

15	Juni June	High Voltage – Insulation Technology <i>High Voltage – Insulation Technology</i>	IATKI <i>IATKI</i>	2
16	Juni June	High Voltage - Generation, Measurement & Testing <i>High Voltage - Generation, Measurement & Testing</i>	IATKI <i>IATKI</i>	3
17	Juni June	HIRARC, JSA & Working Permit <i>HIRARC, JSA & Working Permit</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	4
18	Juni June	Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) <i>Planning for Solar Power Plants</i>	Ir. Kadek Fendy Sutrisna, M.Eng. <i>Ir. Kadek Fendy Sutrisna, M.Eng.</i>	10
19	Juni June	Teknologi Reaktor Nuklir Generasi ke-IV <i>4th Generation Nuclear Reactor Technology</i>	PP-EBT ITB <i>PP-EBT ITB</i>	1
20	Juni June	Webinar – High Voltage Fundamental & Technology <i>Webinar – High Voltage Fundamental & Technology</i>	IATKI <i>IATKI</i>	10
21	Juni June	Workshop Sosialisasi Perangkat Enjiniring <i>Engineering Equipment Socialization Workshop</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	5
22	Juli July	Analisa Beban Kerja Berbasis Produktivitas <i>Productivity-Based Workload Analysis</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	5
23	Juli July	Analisa Gangguan Proteksi Gardu Induk dan Penghantar <i>Analysis of Substation Protection and Delivery Disturbances</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	1
24	Juli July	Analisa Laporan Keuangan dan Corporate Finance <i>Financial Statement Analysis and Corporate Finance</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	2
25	Juli July	Asesmen EE III - Batch XVII <i>EE III Assessment - Batch XVII</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	1
26	Juli July	Corporate Tax Planning <i>Corporate Tax Planning</i>	IAI JAKARTA <i>IAI JAKARTA</i>	1
27	Juli July	Executive Education (EE) III Batch 12 Tahun 2021 <i>Executive Education (EE) III Batch 12 Tahun 2021</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	1
28	Juli July	General Accounting <i>General Accounting</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	1
29	Juli July	Hubungan Industrial Terapan <i>Applied Industrial Relations</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	1
30	Juli July	Manajemen Keuangan Dasar Level SA/FIV <i>Basic Financial Management Level SA/FIV</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	9
31	Juli July	Manajemen Logistik dan Pergudangan <i>Logistics and Warehousing Management</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	1
32	Juli July	Manajemen Proyek Berbasis ARCGIS <i>ARCGIS Based Project Management</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	2
33	Juli July	Manajemen SDM Dasar Level SA/FIV <i>Basic HR Management Level SA/FIV</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	9
34	Juli July	Master Plan Distribusi <i>Master Plan Distribusi</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	1

35	Juli	Pengawasan Aspek Ketenagakerjaan pada Kontrak Alih Daya	PUSDIKLAT	1
	July	<i>Supervision of Labor Aspects on Outsourcing Contracts</i>	<i>PUSDIKLAT</i>	
36	Juli	Pengendalian Proyek dengan Aplikasi Primavera	PUSDIKLAT	1
	July	<i>Project Management with the Primavera App</i>	<i>PUSDIKLAT</i>	
37	Juli	Perencanaan PLTS	PUSDIKLAT	5
	July	<i>Solar power planning</i>	<i>PUSDIKLAT</i>	
38	Juli	Protokoler	PUSDIKLAT	1
	July	Protocol	PUSDIKLAT	
39	Juli	QA/QC Enjiniring	PUSDIKLAT	7
	July	<i>QA/QC Enjiniring</i>	<i>PUSDIKLAT</i>	
40	Juli	Risk Control Self Assessment	CRMS	1
	July	<i>Risk Control Self Assessment</i>	<i>CRMS</i>	
41	Juli	Teknologi PLTB	PUSDIKLAT	7
	July	<i>Wind power technology</i>	<i>PUSDIKLAT</i>	
42	Agustus	Analisa Dokumen Kontrak EPC Berbasis FIDIC	PUSDIKLAT	2
	August	<i>FIDIC-Based EPC Contract Document Analysis</i>	<i>PUSDIKLAT</i>	
43	Agustus	Analisa Kinerja PLTS	PUSDIKLAT	3
	August	<i>Solar Power Performance Analysis</i>	<i>PUSDIKLAT</i>	
44	Agustus	Dasar-Dasar PLTB	PUSDIKLAT	9
	August	<i>Wind power technology</i>	<i>PUSDIKLAT</i>	
45	Agustus	E-Procurement	PUSDIKLAT	2
	August	<i>E-Procurement</i>	<i>PUSDIKLAT</i>	
46	Agustus	Kajian Keekonomian PLTS	PUSDIKLAT	11
	August	<i>Solar Power Economic Study</i>	<i>PUSDIKLAT</i>	
47	Agustus	Key Risk Indicator	WIMCONSULT	25
	August	<i>Key Risk Indicator</i>	<i>WIMCONSULT</i>	
48	Agustus	Litigasi	PUSDIKLAT	1
	August	<i>Litigation</i>	<i>PUSDIKLAT</i>	
49	Agustus	Manajemen Keuangan Dasar Level SA/FIV	PUSDIKLAT	1
	August	<i>Basic Financial Management Level SA/FIV</i>	<i>PUSDIKLAT</i>	
50	Agustus	Manajemen SDM Dasar Level SA/FIV	PUSDIKLAT	1
	August	<i>Basic HR Management Level SA/FIV</i>	<i>PUSDIKLAT</i>	
51	Agustus	PEMELIHARAAN EKSITASI DAN AVR GENERATOR	PUSDIKLAT	2
	August	<i>MAINTENANCE OF EXCITATION AND AVR GENERATOR</i>	<i>PUSDIKLAT</i>	
52	Agustus	Pemeliharaan Kubikel 20 kV Gardu Induk	PUSDIKLAT	1
	August	<i>Maintenance of 20 kV substation cubicles</i>	<i>PUSDIKLAT</i>	
53	Agustus	Pengelolaan Daftar Penyedia Terseleksi	PUSDIKLAT	1
	August	<i>Preferred Provider List Management</i>	<i>PUSDIKLAT</i>	
54	Agustus	Perencanaan PLTS	PUSDIKLAT	4
	August	<i>Solar Power Planning</i>	<i>PUSDIKLAT</i>	
55	Agustus	Perhitungan Setting Proteksi Penghantar Tegangan Tinggi	PUSDIKLAT	1
	August	<i>Calculation of High Voltage Conductor Protection Settings</i>	<i>PUSDIKLAT</i>	

56	Agustus August	Prakiraan Beban dengan Aplikasi Simple-E <i>Load Forecast with Simple-E App</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	2
57	Agustus August	Supervisi Spesifikasi dan Gambar Teknik <i>Supervision of Technical Specifications and Drawings</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	1
58	Agustus August	Supervisory Education (SE I) Angkatan 2 Tahun 2021 <i>Supervisory Education (SE I) Angkatan 2 Tahun 2021</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	2
59	Agustus August	Teknik Pengolahan Data Soil Investigation <i>Soil Investigation Data Processing Techniques</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	2
60	Agustus August	Training iTechne - Metering and System <i>Training iTechne - Metering and System</i>	iTechne Technologies <i>iTechne Technologies</i>	22
61	Agustus August	Workshop Sosialisasi Perangkat Enjiniring – Acuan Dokumen Tender Gardu Induk <i>Engineering Equipment Socialization Workshop – Substation Tender Document Reference</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	5
62	Agustus August	Workshop Sosialisasi Perangkat Enjiniring – Acuan Dokumen Tender Kabel Laut <i>Engineering Equipment Socialization Workshop – Marine Cable Tender Document Reference</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	5
63	September September	Analisa Kinerja PLTS <i>Solar Power Performance Analysis</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	3
64	September September	Biomass Feedstock dan Teknologi PLTBM <i>Biomass Feedstock and Biomass Power Technology</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	7
65	September September	Customer Relationship Management <i>Customer Relationship Management</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	8
66	September September	Dasar-Dasar AMDAL dan ESIA <i>AMDAL and ESIA Basics</i>	PSLH UGM <i>PSLH UGM</i>	10
67	September September	EE II <i>EE II</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	2
68	September September	Financial Modelling dalam Kelayakan Investasi <i>Financial Modelling dalam Kelayakan Investasi</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	1
69	September September	Key Risk Indicator <i>Key Risk Indicator</i>	WIMCONSULT <i>WIMCONSULT</i>	31
70	September September	Mastering COBIT 5 - Process Assessor <i>Mastering COBIT 5 - Process Assessor</i>	PT ANDALAN NUSANTARA TEKNOLOGI <i>PT ANDALAN NUSANTARA TEKNOLOGI</i>	4
71	September September	Tanggung Jawab Komite Audit Saat Perseroan Tersangkut Masalah Hukum Terkait Laporan Keuangan <i>Responsibilities of the Audit Committee When the Company Is Involved in Legal Issues Related to Financial Statements</i>	IKAI (Ikatan Komite Audit Indonesia) <i>IKAI (Ikatan Komite Audit Indonesia)</i>	4
72	September September	Workshop Sosialisasi Perangkat Enjiniring – Acuan Dokumen Tender Pembangkit dan Infrastruktur Gas (LNG RTRF) <i>Workshop on Dissemination of Engineering Equipment – Reference for Gas Plant and Infrastructure Tender Documents (LNG RTRF)</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	5

73	Oktober <i>October</i>	Analisa Kinerja PLTS <i>Solar Power Performance Analysis</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	5
74	Oktober <i>October</i>	Basic Design Enjiniring Mekanikal PLTU <i>Basic Design Mechanical Engineering PLTU</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	2
75	Oktober <i>October</i>	EE III <i>EE III</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	1
76	Oktober <i>October</i>	Negotiation Skill <i>Negotiation Skill</i>	GML <i>GML</i>	4
77	Oktober <i>October</i>	Pengadaan Barang dan Jasa PT PLN (Persero) <i>Procurement of Goods and Services PT PLN (Persero)</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	78
78	Oktober <i>October</i>	Specialist Education (SPE I) <i>Specialist Education (SPE I)</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	8
79	Oktober <i>October</i>	Supervisory Education (SE I) <i>Supervisory Education (SE I)</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	1
80	Oktober <i>October</i>	Teknik Perhitungan Struktur Bawah (Pondasi), Stabilitas & Metode Proteksi Lereng <i>Substructure Calculation Technique (Foundation), Stability & Slope Protection Method</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	2
81	Oktober <i>October</i>	The Art and Science of Coaching Modul I <i>The Art and Science of Coaching Modul I</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	1
82	Oktober <i>October</i>	WORKSHOP SOSIALISASI PERANGKAT ENJINIRING - PANDUAN PENYUSUNAN DOKUMEN FS SUTT <i>ENGINEERING DEVICE SOCIALIZATION WORKSHOP - SUTT FS DOCUMENT DEVELOPMENT GUIDELINE</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	3
83	November <i>November</i>	Asesmen Digital Mindset <i>Digital Mindset Assessment</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	5
84	November <i>November</i>	Desain PLTS PV <i>PV Solar power Design</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	9
85	November <i>November</i>	Environmental Flows (Eflows) for Hydro Power Projects <i>Environmental Flows (Eflows) for Hydro Power Projects</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	2
86	November <i>November</i>	GCG (Good Corporate Governance) <i>GCG (Good Corporate Governance)</i>	DPS Consulting <i>DPS Consulting</i>	12
87	November <i>November</i>	Kontrak Berbasis FIDIC <i>FIDIC Based Contracts</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	2
88	November <i>November</i>	Manajemen Kontrak <i>Contract Management</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	2
89	November <i>November</i>	Manajemen Proyek <i>Project management</i>	PPM Manajemen <i>PPM Manajemen</i>	4
90	November <i>November</i>	Metode Geokimia Untuk Eksplorasi & Eksploitasi Panas Bumi <i>Geochemical Methods For Exploration & Geothermal Exploitation</i>	PUSDIKLAT <i>PUSDIKLAT</i>	1

91	November	Oil and Gas Law of Contract	Citra Inti	7
	November	<i>Oil and Gas Law of Contract</i>	<i>Citra Inti</i>	
92	November	QRGP (Qualified Risk Governance Professional)	CRMS	7
	November	<i>QRGP (Qualified Risk Governance Professional)</i>	<i>CRMS</i>	
93	November	PLTS Atap dan PLTS Hybrid	MKI	13
	November	<i>Roof Solar Power and Hybrid Solar Power</i>	<i>MKI</i>	
94	November	QA/QC Aspek Konstruksi	PUSDIKLAT	5
	November	<i>QA/QC Construction Aspect</i>	<i>PUSDIKLAT</i>	
95	November	Uji PA SE I	PUSDIKLAT	1
	November	<i>Uji PA SE I</i>	<i>PUSDIKLAT</i>	
96	Desember	Analisa Kinerja PLTS	PUSDIKLAT	1
	Desember	<i>Solar Power Performance Analysis</i>	<i>PUSDIKLAT</i>	
97	Desember	DESIGN REVIEW PLTA	Netto Mulyanto & Sudjarwo Singo Pawiro	11
	Desember	<i>Hydropower Design Review</i>	<i>Netto Mulyanto & Sudjarwo Singo Pawiro</i>	
98	Desember	Geological & Geotechnical Site Investigations For Hydro Power Plant	PUSDIKLAT	2
	Desember	Geological & Geotechnical Site Investigations For Hydro Power Plant	PUSDIKLAT	
99	Desember	Teknik Design & Review Menggunakan Aplikasi MS Tower	PUSDIKLAT	3
	Desember	Design & Review Techniques Using the MS Tower Application	PUSDIKLAT	
100	Desember	Workshop Sosialisasi Perangkat Enjiniring – Panduan Penyusunan Studi Kelayakan PLTMG dan Infrastruktur Gas Terintegrasi	PUSDIKLAT	5
	Desember	Workshop on Dissemination of Engineering Equipment – Guidelines for Compilation of Feasibility Studies for PLTMG and Integrated Gas Infrastructure	PUSDIKLAT	
Total Jumlah Peserta Pelatihan				539
Total Number of Training Participants				539

(Catatan: jumlah peserta* sebanyak 539 orang karena terdapat beberapa orang Pegawai yang mendapatkan pelatihan lebih dari satu kali)

(Note: the number of participants* is 539 people because there are some employees who received training more than once)

TABEL PELAKSANAAN SERTIFIKASI TAHUN 2021

TABLE OF CERTIFICATION IMPLEMENTATION FOR 2021

No.	Waktu Pelaksanaan <i>Execution Time</i>	Jenis/Judul Sertifikasi <i>Type / Title of Certification</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>	Jumlah Peserta <i>Number of Participants*</i>
1	Maret <i>March</i>	Manajer Konsultasi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan unit PLTS <i>Consultant Manager for solar power planning and installation</i>	ELESKA HAKIT <i>ELESKA HAKIT</i>	1
2	Maret <i>March</i>	Supervisor Junior Konsultasi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan PLTS <i>Junior Supervisor Consulting for solar power construction and installation</i>	ELESKA HAKIT <i>ELESKA HAKIT</i>	4
3	Maret <i>March</i>	Supervisor Senior Konsultasi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Generator <i>Senior Supervisor of Generator Construction Planning and Installation Consultancy</i>	ELESKA HAKIT <i>ELESKA HAKIT</i>	1
4	April <i>April</i>	Manajer Konsultasi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTA <i>Consultant Manager for Development Planning and Installation of Hydropower Units</i>	SKP Tenaga Listrik <i>SKP Tenaga Listrik</i>	1
5	April <i>April</i>	Supervisor konsultasi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen <i>Supervisor for planning consultancy Construction and Installation of Controls and Instruments</i>	SKP Tenaga Listrik <i>SKP Tenaga Listrik</i>	4
6	April <i>April</i>	Supervisor konsultasi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Pemadam Kebakaran <i>Supervisor for Construction Planning and Installation of Fire Extinguishers</i>	SKP Tenaga Listrik <i>SKP Tenaga Listrik</i>	4
7	April <i>April</i>	Supervisor konsultasi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Pengolahan Limbah <i>Supervisor of Consultancy Planning for Construction and Installation of Waste Treatment</i>	SKP Tenaga Listrik <i>SKP Tenaga Listrik</i>	1
8	April <i>April</i>	Supervisor konsultasi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Pemadam Kebakaran <i>Supervisor for planning consultancy for the construction and installation of fire fighting equipment</i>	SKP Tenaga Listrik <i>SKP Tenaga Listrik</i>	2
9	April <i>April</i>	Supervisor konsultasi perencanaan Pembangunan dan Pemasangan PLTS <i>Supervisor of solar power construction and installation planning consultancy</i>	SKP Tenaga Listrik <i>SKP Tenaga Listrik</i>	6
10	April <i>April</i>	Supervisor konsultasi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Sistem Pendingin <i>Consultant Supervisor for Cooling System Development Planning and Installation</i>	SKP Tenaga Listrik <i>SKP Tenaga Listrik</i>	2

11	April	Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Biomas	SKP Tenaga Listrik	4
	<i>April</i>	<i>Senior Supervisor of Biomass Development Planning and Installation Consultancy</i>	<i>SKP Tenaga Listrik</i>	
12	Juni	Ahli K3 Umum	Mitra Dinamis Yang Utama (Midiatama)	2
	<i>June</i>	<i>Occupational Safety and Health Specialist</i>	<i>Mitra Dinamis Yang Utama (Midiatama)</i>	
13	Juni	Ahli K3 Listrik	Mitra Dinamis Yang Utama (Midiatama)	2
	<i>June</i>	<i>Electrical Safety Specialist</i>	<i>Mitra Dinamis Yang Utama (Midiatama)</i>	
14	Juli	Qualified Internal Auditor Tingkat Dasar	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	3
	<i>July</i>	<i>Qualified Internal Auditor Basic Level</i>	<i>Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)</i>	
15	September	Operator Mekanik Level 2	PPSDM Migas Cepu	1
	<i>September</i>	<i>Mechanical Operator Level 2</i>	<i>PPSDM Migas Cepu</i>	
16	September	Certified in Accounting, Finance and Business (CAFB)	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)	1
	<i>September</i>	<i>Certified in Accounting, Finance and Business (CAFB)</i>	<i>Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)</i>	
17	September	Ahli K3 Umum	Phitagoras Global Duta	4
	<i>September</i>	<i>Occupational Safety and Health Specialist</i>	<i>Phitagoras Global Duta</i>	
18	Oktober	Auditor Sistem Manajemen Pengamanan	Pragas Gadatama	1
	<i>October</i>	<i>Security Management System Auditor</i>	<i>Pragas Gadatama</i>	
19	November	BREVET C	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)	1
	<i>November</i>	<i>BREVET C</i>	<i>Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)</i>	
20	November	QRMA (Qualified Risk Management Analyst)	CRMS	9
	<i>November</i>	<i>QRMA (Qualified Risk Management Analyst)</i>	<i>CRMS</i>	
21	November	Operator Mekanik Level 2	PPSDM Migas Cepu	1
	<i>November</i>	<i>Mechanical Operator Level 2</i>	<i>PPSDM Migas Cepu</i>	
22	November	QRGP (Qualified Risk Governance Professional)	CRMS	5
	<i>November</i>	<i>QRGP (Qualified Risk Governance Professional)</i>	<i>CRMS</i>	
23	November	Teknisi Instrumentasi	PPSDM Migas Cepu	4
	<i>November</i>	<i>Instrumentation Technician</i>	<i>PPSDM Migas Cepu</i>	
24	Desember	K3 Tingkat Operator	PPSDM Migas Cepu	3
	<i>December</i>	<i>Occupational Safety and Health Operator</i>	<i>PPSDM Migas Cepu</i>	
25	Desember	BREVET AB	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)	1
	<i>December</i>	<i>BREVET AB</i>	<i>Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)</i>	
Total Jumlah Peserta Sertifikasi				68
Total Number of Certification Participants				

Untuk mengukur efektivitas atas program pengembangan yang telah dilakukan, Perusahaan melakukan evaluasi dengan menghitung tingkat pengembalian investasi pada pelatihan/sertifikasi (*Return on Training Investment – ROTI*) dan evaluasi pencapaian kinerja Perusahaan serta Hari Orang Pelatihan (*HOP*).

BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Total biaya pengembangan kompetensi karyawan pada tahun 2021 melalui pelatihan/sertifikasi sebesar Rp 792.748.165, menurun sebesar 31,42% dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp 1.155.878.330. Di lain hal, pendapatan Perusahaan tahun 2021 (stand alone/ bukan konsolidasi) adalah sebesar Rp 404.040.398.894, meningkat sebesar 13,55% dibandingkan dengan tahun 2020 adalah sebesar Rp 355.811.578.023. Maka, dengan asumsi best practice tingkat dampak pelatihan/sertifikasi sebesar 10%, didapatkan nilai ROTI 2021 sebesar 49,97, sedangkan nilai ROTI 2020 sebesar 29,78. Nilai pencapaian KPI/kinerja Perusahaan tahun 2021 adalah 101,89, sementara itu pencapaian Kinerja tahun 2020 adalah 91,95. Sedangkan untuk HOP tahun 2021 adalah 1,16, sementara HOP tahun 2020 adalah 1,20.

Berdasarkan nilai ROTI, nilai ROTI tahun 2021 lebih besar 20,18 poin dibandingkan tahun 2020. Selain itu, pencapaian skor KPI tahun 2021 juga lebih tinggi 9,94 poin dibandingkan tahun 2020. Maka didapatkan kesimpulan bahwa tingkat efektivitas program pengembangan tahun 2021 adalah efektif karena nilai Return Of Training Investment (ROTI) meningkat sebesar 67,77%, pencapaian KPI meningkat 10,81%, dan pendapatan meningkat 13,55% dibanding tahun 2020. Sementara tingkat efisiensi program pengembangan tahun 2021 adalah lebih efisien 31,42% dari segi biaya dan 2,86% dari segi jumlah HOP dibandingkan tahun 2020.

To measure the effectiveness of the development program that has been carried out, the Company conducts an evaluation by calculating the return on investment in training / certification (Return on Training Investment - ROTI) and evaluates the achievement of the Company performance and Hari Orang Pelatihan (HOP).

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT COSTS

The total cost of developing employee competence in 2021 through training/certification is Rp. 792,748,165, a decrease of 31.42% compared to 2020, which is Rp. 1,155,878,330. On the other hand, the Company's revenue in 2021 (stand alone/not consolidated) was IDR 404,040,398,894, an increase of 13.55% compared to 2020 which was IDR 355,811,578,023. So, assuming best practice, the level of impact of training/certification is 10%, the 2021 ROTI value is 49.97, while the 2020 ROTI value is 29.78. The achievement value of the Company's KPI/performance in 2021 is 101.89, while the achievement of Performance in 2020 is 91.95. Meanwhile, the HOP in 2021 is 1.16, while the HOP in 2020 is 1.20.

Based on the ROTI value, the value of ROTI in 2021 is 20.18 points greater than in 2020. In addition, the achievement of KPI scores in 2021 is also 9.94 points higher than in 2020. It is concluded that the level of effectiveness of the development program in 2021 is effective because Return Of Training Investment (ROTI) value increased by 67.77%, KPI achievement increased by 10.81%, and income increased by 13.55% compared to 2020. Meanwhile, the efficiency level of the 2021 development program was 31.42% more efficient in terms of costs and 2.86% in terms of total HOP compared to 2020.

RENCANA PELATIHAN DAN SERTIFIKASI TAHUN 2021

Dalam menjaga kualitas SDM, kesinambungan program pengembangan kompetensi pegawai menjadi komitmen Perusahaan agar dapat mendukung kinerja perusahaan dan memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan. PLN Enjiniring telah merencanakan dan merumuskan kebutuhan pelatihan dan sertifikasi bagi Pegawai untuk periode tahun 2022 dalam kegiatan Initiation Training Need (ITN) mengikuti jadwal yang ditentukan oleh PLN Pusdiklat dan kegiatan Training Need Analysis (TNA) secara mandiri mengikuti Prosedur Enjiniring (PE) 6.13, sebagai berikut.

TRAINING AND CERTIFICATION PLANNING 2021

In maintaining the quality of human resources, the continuity of the employee competency development program is the Company's commitment to be able to support the company's performance and make a positive contribution to the company's business sustainability. PLN Enjiniring has planned and formulated training and certification needs for employees for the 2022 period in the Initiation Training Need (ITN) activity following the schedule determined by the PLN Pusdiklat and Training Need Analysis (TNA) activities independently following the Engineering Procedure (PE) 6.13, as follows.

TABEL RENCANA PELATIHAN DAN SERTIFIKASI TAHUN 2022

TABLE OF TRAINING AND CERTIFICATION PLANS FOR 2022

No.	Kebutuhan Pembelajaran <i>Learning Needs</i>	Peserta Pembelajaran <i>Learning Participants</i>	Tujuan pembelajaran <i>Learning objectives</i>
1	Advance Project Finance <i>Advance Project Finance</i>	Staff KIT <i>Staff KIT</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai advance project finance <i>After participating in this learning, the participants able to master advance project finance</i>
2	Analisa Beban Kerja Berbasis Produktivitas (Digital Learning) <i>Workload Analysis Based On Productivity (Digital Learning)</i>	Staff SDM & MUM, PPK <i>Staff SDM & MUM, PPK</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu membuat analisa beban kerja berbasis produktivitas (digital learning) <i>After participating in this learning, the participants able to make workload analysis based on productivity (digital learning)</i>
3	Analisa Dan Evaluasi Pengembangan Usaha (Digital Learning) <i>Business Development Analysis And Evaluation (Digital Learning)</i>	Staff PPK <i>Staff PPK</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu membuat analisa dan evaluasi pengembangan usaha (digital learning) <i>After participating in this learning, the participants able to make business development analysis and evaluation (digital learning)</i>
4	Analisa Statistik (Digital Learning) <i>Statistical Analysis (Digital Learning)</i>	Staff SDM & MUM <i>Staff SDM & MUM</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai analisa statistik (digital learning) <i>After participating in this learning, the participants able to master statistical analysis (digital learning)</i>

5	Aplikasi Software Transient Atpdraw - Emtp (DI)	Staff TND	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai aplikasi software transient atpdraw - emtp (dl)
	<i>Software Application Transient Atpdraw - Emtp (DI)</i>	<i>Staff TND</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master software application transient atpdraw - emtp (dl)</i>
6	Asesmen Peralatan Primer Gardu Induk	Staff TND	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu membuat asesmen peralatan primer gardu induk
	<i>Primary Equipment Assessment Of Substations</i>	<i>Staff TND</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to make primary equipment assessment of substations</i>
7	Audit Internal Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Ai Smk3) (DI)	Staff USH	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu melakukan audit internal sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (ai smk3) (dl)
	<i>Internal Audit Of Occupational Safety And Health Management Systems (Ai Smk3) (DI)</i>	<i>Staff USH</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to do internal audit of occupational safety and health management systems (ai smk3) (dl)</i>
8	Audit Proses Manajemen Risiko	Staff SPI	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu melakukan audit proses manajemen risiko
	<i>Risk Management Process Audit</i>	<i>Staff SPI</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to do risk management process audit</i>
9	Behavior Based Safety (Bbs)	Staff SAR, SDM & MUM	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai behavior based safety (bbs)
	<i>Behavior Based Safety (Bbs)</i>	<i>Staff SAR, SDM & MUM</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master behavior based safety (bbs)</i>
10	Brand Management (Digital Learning)	Staff SAR	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai brand management (digital learning)
	<i>Brand Management (Digital Learning)</i>	<i>Staff SAR</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master brand management (digital learning)</i>
11	Capital Budgeting With Risk (Digital Learning)	Staff ANGKEU, KIT	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai capital budgeting with risk (digital learning)
	<i>Capital Budgeting With Risk (Digital Learning)</i>	<i>Staff ANGKEU, KIT</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master capital budgeting with risk (digital learning)</i>
12	Contractor Safety Management System (Csms) Tingkat Dasar	Staff KONS	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai contractor safety management system (csms) tingkat dasar
	<i>Contractor Safety Management System (Csms) Tingkat Dasar</i>	<i>Staff KONS</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master contractor safety management system (csms) tingkat dasar</i>
13	Dasar - Dasar Pltb	Staff KIT, KONS, SAR	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai dasar - dasar pltb
	<i>Basics Wind Power Plant</i>	<i>Staff KIT, KONS, SAR</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master basics wind power plant</i>

14	Dasar - Dasar Plts <i>Basic Solar Power</i>	Staff KIT, KONS, SPI, USH <i>Staff KIT, KONS, SPI, USH</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai dasar - dasar plts <i>After participating in this learning, the participants able to master basic solar power</i>
15	Dasar-Dasar Data Analitik <i>Data Analytic Basics</i>	Staff SPMR <i>Staff SPMR</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai dasar-dasar data analitik <i>After participating in this learning, the participants able to master data analytic basics</i>
16	Data Analytics Dasar <i>Data Analytic Basics</i>	Staff SAR <i>Staff SAR</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai data analytics dasar <i>After participating in this learning, the participants able to master data analytic basics</i>
17	Demand, Forecasting, And Resources Planning For Scm <i>Demand, Forecasting, And Resources Planning For Scm</i>	Staff TND <i>Staff TND</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai demand, forecasting, and resources planning for scm <i>After participating in this learning, the participants able to master demand, forecasting, and resources planning for scm</i>
18	Desain Enjiniring Transmisi Dan Gardu Induk <i>Transmission Engineering And Substation Design</i>	Staff KIT <i>Staff KIT</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai desain enjiniring transmisi dan gardu induk <i>After participating in this learning, the participants able to master transmission engineering and substation design</i>
19	Desain Plts Pv <i>Pv Solar Panel Design</i>	Staff KIT, TND <i>Staff KIT, TND</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai desain plts pv <i>After participating in this learning, the participants able to master pv solar panel design</i>
20	Design Enjiniring Listrik Pembangkit <i>Power Plant Engineering Design</i>	Staff KIT <i>Staff KIT</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai design enjiniring listrik pembangkit <i>After participating in this learning, the participants able to master power plant engineering design</i>
21	Design Review Plta <i>Hydropower Design Review</i>	Staff KIT <i>Staff KIT</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai design review plta <i>After participating in this learning, the participants able to master hydropower design review</i>
22	Electricity Long Term Strategies <i>Electricity Long Term Strategies</i>	Staff KIT <i>Staff KIT</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai electricity long term strategies <i>After participating in this learning, the participants able to master electricity long term strategies</i>

23	E-Procurement (Apln) - Digital Learning	Staff USH	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai e-procurement (aplن) - digital learning
	<i>E-Procurement (Aplن) - Digital Learning</i>	<i>Staff USH</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master e-procurement (aplن) - digital learning</i>
24	Evakuasi Dan Tanggap Darurat	Staff SDM & MUM	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai evakuasi dan tanggap darurat
	<i>Evacuation And Emergency Response</i>	<i>Staff SDM & MUM</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master evacuation and emergency response</i>
25	Evaluasi Kinerja Transmisi (DI)	Staff TND	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai evaluasi kinerja transmisi (dl)
	<i>Transmission Performance Evaluation (DI)</i>	<i>Staff TND</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master transmission performance evaluation (dl)</i>
26	Fraud Akuntansi (Digital Learning)	Staff AKT	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai fraud akuntansi (digital learning)
	<i>Accounting Fraud (Digital Learning)</i>	<i>Staff AKT</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master accounting fraud (digital learning)</i>
27	Fraud Risk Management Tingkat Dasar (Digital Learning)	Staff SPI	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai fraud risk management tingkat dasar (digital learning)
	<i>Fraud Risk Management Basic (Digital Learning)</i>	<i>Staff SPI</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master fraud risk management basic (digital learning)</i>
28	Fraud Risk Management Tingkat Lanjutan (Digital Learning)	Staff SPI	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai fraud risk management tingkat lanjutan (digital learning)
	<i>Advanced Fraud Risk Management (Digital Learning)</i>	<i>Staff SPI</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master advanced fraud risk management (digital learning)</i>
29	Hubungan Industrial Terapan (Digital Learning)	Staff SDM & MUM	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai hubungan industrial terapan (digital learning)
	<i>Applied Industrial Relations (Digital Learning)</i>	<i>Staff SDM & MUM</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master applied industrial relations (digital learning)</i>
30	Identifikasi Dan Penilaian Risiko Lanjutan	Staff SPMR	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai identifikasi dan penilaian risiko lanjutan
	<i>Advanced Risk Identification And Assessment</i>	<i>Staff SPMR</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master advanced risk identification and assessment</i>
31	Implementasi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (Hps) - (Digital Learning)	Staff SPMR	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai implementasi penyusunan harga perkiraan sendiri (hps) - (digital learning)
	<i>Implementation Of Own Estimate Price (Hps) - (Digital Learning)</i>	<i>Staff SPMR</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master implementation of own estimate price (hps) - (digital learning)</i>

32	Information Technology Infrastructure Library (Itil) (Digital Learning)	Staff SETPER	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai information technology infrastructure library (itil) (digital learning)
	<i>Information Technology Infrastructure Library (Itil) (Digital Learning)</i>	<i>Staff SETPER</i>	<i>After participating in this learning, the participants able tomaster information technology infrastructure library (itil) (digital learning)</i>
33	Infrastruktur Development (Digital Learning)	Staff SETPER	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai infrastruktur development (digital learning)
	<i>Infrastructure Development (Digital Learning)</i>	<i>Staff SETPER</i>	<i>After participating in this learning, the participants able tomaster infrastruktur development (digital learning)</i>
34	Keterampilan Bernegosiasi Lanjutan (Digital Learning)	Staff SAR	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai keterampilan bernegosiasi lanjutan (digital learning)
	<i>Advanced Negotiation Skills (Digital Learning)</i>	<i>Staff SAR</i>	<i>After participating in this learning, the participants able tomaster advanced negotiation skills (digital learning)</i>
35	Keterampilan Komunikasi Lanjutan	Staff SAR	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai keterampilan komunikasi lanjutan
	<i>Advanced Communication Skills</i>	<i>Staff SAR</i>	<i>After participating in this learning, the participants able tomaster advanced communication skills</i>
36	Komisioning Dan Slo Untuk Pengambil Keputusan (DI)	Staff KIT, KONS	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai komisioning dan slo untuk pengambil keputusan (dl)
	<i>Commissioning And Slo For Decision Makers (DI)</i>	<i>Staff KIT, KONS</i>	<i>After participating in this learning, the participants able tomaster commissioning and slo for decision makers (dl)</i>
37	Komunikasi Proyek (BI)	Staff KIT	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai komunikasi proyek (bl)
	<i>Project Communications (BI)</i>	<i>Staff KIT</i>	<i>After participating in this learning, the participants able tomaster project communications (bl)</i>
38	Maintenance Excellent	Staff USH	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai maintenance excellent
	<i>Maintenance Excellent</i>	<i>Staff USH</i>	<i>After participating in this learning, the participants able tomaster maintenance excellent</i>
39	Manajemen Administrasi Perkantoran (Digital Learning)	Staff SAR, SDM & MUM	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai manajemen administrasi perkantoran (digital learning)
	<i>Office Administration Management (Digital Learning)</i>	<i>Staff SAR, SDM & MUM</i>	<i>After participating in this learning, the participants able tomaster office administration management (digital learning)</i>

40	Manajemen Aset Properti <i>Property Asset Management</i>	Staff KIT <i>Staff KIT</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai manajemen aset properti <i>After participating in this learning, the participants able to master property asset management</i>
41	Manajemen Keuangan Untuk Pelaksana (Digital Learning) <i>Financial Management For Implementation (Digital Learning)</i>	Staff ANGKEU <i>Staff ANGKEU</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai manajemen keuangan untuk pelaksana (digital learning) <i>After participating in this learning, the participants able to master financial management for implementation (digital learning)</i>
42	Manajemen Kinerja Scm (Digital Learning) <i>Scm (Digital Learning) Performance Management</i>	Staff KIT <i>Staff KIT</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai manajemen kinerja scm (digital learning) <i>After participating in this learning, the participants able to master scm (digital learning) performance management</i>
43	Manajemen Komunikasi Perusahaan (Digital Learning) <i>Corporate Communication Management (Digital Learning)</i>	Staff SETPER <i>Staff SETPER</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai manajemen komunikasi perusahaan (digital learning) <i>After participating in this learning, the participants able to master corporate communication management (digital learning)</i>
44	Manajemen Kontrak <i>Contract Management</i>	Staff KIT, KONS, SETPER, TND <i>Staff KIT, KONS, SETPER, TND</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai manajemen kontrak <i>After participating in this learning, the participants able to master contract management</i>
45	Manajemen Pengelolaan Bahan Bakar Gas <i>Gas Fuel Management</i>	Staff KIT, USH <i>Staff KIT, USH</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai manajemen pengelolaan bahan bakar gas <i>After participating in this learning, the participants able to master gas fuel management</i>
46	Manajemen Perpajakan (Digital Learning) <i>Tax Management (Digital Learning)</i>	Staff AKT <i>Staff AKT</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai manajemen perpajakan (digital learning) <i>After participating in this learning, the participants able to master tax management (digital learning)</i>
47	Manajemen Persediaan (Digital Learning) <i>Inventory Management (Digital Learning)</i>	Staff SPMR <i>Staff SPMR</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai manajemen persediaan (digital learning) <i>After participating in this learning, the participants able to master inventory management (digital learning)</i>
48	Manajemen Proyek Konstruksi Untuk Supporting <i>Construction Project Management For Supporting</i>	Staff KONS <i>Staff KONS</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai manajemen proyek konstruksi untuk supporting <i>After participating in this learning, the participants able to master construction project management for supporting</i>

49	Manajemen Risiko Ketenagalistrikan (Digital Learning) <i>Electricity Risk Management (Digital Learning)</i>	Staff SPMR, KIT <i>Staff SPMR, KIT</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai manajemen risiko ketenagalistrikan (digital learning) <i>After participating in this learning, the participants able to master electricity risk management (digital learning)</i>
50	Manajemen TKDN Bidang Ketenagalistrikan <i>TKDN Management In Electricity Field</i>	Staff SAR <i>Staff SAR</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai manajemen tkdn bidang ketenagalistrikan <i>After participating in this learning, the participants able to master tkdn management in electricity field</i>
51	Marketing Intelligence (Digital Learning) <i>Marketing Intelligence (Digital Learning)</i>	Staff PPK <i>Staff PPK</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai marketing intelligence (digital learning) <i>After participating in this learning, the participants able to master marketing intelligence (digital learning)</i>
52	Marketing Intelligence Based On Big Data <i>Marketing Intelligence Based On Big Data</i>	Staff PPK <i>Staff PPK</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai marketing intelligence based on big data <i>After participating in this learning, the participants able to master marketing intelligence based on big data</i>
53	Menganalisis Public Speaking Juru Bicara Perusahaan <i>Analyzing Public Speaking Corporate Speaker</i>	Staff SETPER <i>Staff SETPER</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai menganalisis public speaking juru bicara perusahaan <i>After participating in this learning, the participants able to master analyzing public speaking corporate speaker</i>
54	Mengantisipasi Dan Menanggulangi Resiko Konflik Sosial (DI) <i>Anticipating And Managing The Risk Of Social Conflict (DI)</i>	Staff SETPER <i>Staff SETPER</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai mengantisipasi dan menanggulangi resiko konflik sosial (dl) <i>After participating in this learning, the participants able to master anticipating and managing the risk of social conflict (dl)</i>
55	Negotiation Skill Komunikasi (Digital Learning) <i>Negotiation Skill Communication (Digital Learning)</i>	Staff SETPER, TND, USH <i>Staff SETPER, TND, USH</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai negotiation skill komunikasi (digital learning) <i>After participating in this learning, the participants able to master negotiation skill communication (digital learning)</i>
56	Pembelajaran Dan Pengembangan (Tnd) (Digital Learning) <i>Learning And Development (Tnd) (Digital Learning)</i>	Staff PPK <i>Staff PPK</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai pembelajaran dan pengembangan (tnd) (digital learning) <i>After participating in this learning, the participants able to master learning and development (tnd) (digital learning)</i>

57	Pembelajaran Implementasi Sistem Pembinaan Karir Dan Kompetensi Pegawai	Staff SDM & MUM	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai pembelajaran implementasi sistem pembinaan karir dan kompetensi pegawai
	<i>Learning Of Career Development System Implementation And Employee Competency</i>	<i>Staff SDM & MUM</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master learning of career development system implementation and employee competency</i>
58	Pemeliharaan Dcs Plta	Staff KIT	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai pemeliharaan dcs plta
	<i>Plta Dcs Maintenance</i>	<i>Staff KIT</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master plta dcs maintenance</i>
59	Pemeliharaan Generator	Staff KIT	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai pemeliharaan generator
	<i>Generator Maintenance</i>	<i>Staff KIT</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master generator maintenance</i>
60	Pemeliharaan Proteksi Elektrikal Pembangkit	Staff KIT	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai pemeliharaan proteksi elektrikal pembangkit
	<i>Power Plant Electrical Protection Maintenance</i>	<i>Staff KIT</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master power plant electrical protection maintenance</i>
61	Pemeliharaan Proteksi Mekanikal Pembangkit	Staff USH	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai pemeliharaan proteksi mekanikal pembangkit
	<i>Maintenance Of Power Plant Mechanical Protection</i>	<i>Staff USH</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master maintenance of power plant mechanical protection</i>
62	Pemetaan Row	Staff KIT	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai pemetaan row
	<i>Row Mapping</i>	<i>Staff KIT</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master row mapping</i>
63	Pemulihan Sistem Tenaga Pasca Gangguan	Staff TND	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai pemulihan sistem tenaga pasca gangguan
	<i>Post Disturbance Power System Recovery</i>	<i>Staff TND</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master post disturbance power system recovery</i>
64	Penganggaran Perusahaan (Digital Learning)	Staff ANGKEU	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai penganggaran perusahaan (digital learning)
	<i>Corporate Budgeting (Digital Learning)</i>	<i>Staff ANGKEU</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master corporate budgeting (digital learning)</i>

65	Pengantar Perpajakan (Digital Learning) <i>Introduction To Taxation (Digital Learning)</i>	Staff ANGKEU <i>Staff ANGKEU</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai pengantar perpajakan (digital learning) <i>After participating in this learning, the participants able to master introduction to taxation (digital learning)</i>
66	Pengantar Strategi Bisnis, Korporat, Global <i>Introduction To Business, Corporate, Global Strategies</i>	Staff PPK <i>Staff PPK</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai pengantar strategi bisnis, korporat, global <i>After participating in this learning, the participants able to master introduction to business, corporate, global strategies</i>
67	Pengawasan Pengujian Peralatan Tegangan Tinggi (Sktt, Sktet) (DI) <i>Supervision Of Testing Of High Voltage Equipment (Sktt, Sktet) (DI)</i>	Staff KONS, TND <i>Staff KONS, TND</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai pengawasan pengujian peralatan tegangan tinggi (sktt, sktet) (dl) <i>After participating in this learning, the participants able to master supervision of testing of high voltage equipment (sktt, sktet) (dl)</i>
68	Pengelolaan Daftar Penyedia Terseleksi <i>Management Of The List Of Selected Providers</i>	Staff SAR <i>Staff SAR</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai pengelolaan daftar penyedia terseleksi <i>After participating in this learning, the participants able to master management of the list of selected providers</i>
69	Pengelolaan Pajak Lanjutan (Digital Learning) <i>Advanced Tax Management (Digital Learning)</i>	Staff AKT <i>Staff AKT</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai pengelolaan pajak lanjutan (digital learning) <i>After participating in this learning, the participants able to master advanced tax management (digital learning)</i>
70	Pengembangan Akuntansi Biaya <i>Cost Accounting Development</i>	Staff AKT <i>Staff AKT</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai pengembangan akuntansi biaya <i>After participating in this learning, the participants able to master cost accounting development</i>
71	Pengembangan Evaluasi Kinerja Penjualan Dan Pendapatan (Digital Learning) <i>Development Of Sales And Income Performance Evaluation (Digital Learning)</i>	Staff SAR <i>Staff SAR</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai pengembangan evaluasi kinerja penjualan dan pendapatan (digital learning) <i>After participating in this learning, the participants able to master development of sales and income performance evaluation (digital learning)</i>
72	Pengembangan Organisasi Dasar <i>Basic Organizational Development</i>	Staff SDm & MUM <i>Staff SDm & MUM</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai pengembangan organisasi dasar <i>After participating in this learning, the participants able to master basic organizational development</i>

73	Pengembangan Pengelolaan Anggaran <i>Budget Management Development</i>	Staff ANGKEU <i>Staff ANGKEU</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai pengembangan pengelolaan anggaran <i>After participating in this learning, the participants able to master budget management development</i>
74	Pengembangan Pengelolaan Pembayaran <i>Payment Management Development</i>	Staff ANGKEU <i>Staff ANGKEU</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai pengembangan pengelolaan pembayaran <i>After participating in this learning, the participants able to master payment management development</i>
75	Pengenalan Manajemen Energi <i>Introduction To Energy Management</i>	Staff TND, USH <i>Staff TND, USH</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai pengenalan manajemen energi <i>After participating in this learning, the participants able to master introduction to energy management</i>
76	Pengenalan Project Management Body Of Knowledge (Pmbok) (DI) <i>Introduction To Project Management Body Of Knowledge (Pmbok) (DI)</i>	Staff KIT, KONS <i>Staff KIT, KONS</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai pengenalan project management body of knowledge (pmbok) (dl) <i>After participating in this learning, the participants able to master introduction to project management body of knowledge (pmbok) (dl)</i>
77	Pengenalan Sistem Proteksi (DI) <i>Introduction To Protection System (DI)</i>	Staff TND <i>Staff TND</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai pengenalan sistem proteksi (dl) <i>After participating in this learning, the participants able to master introduction to protection system (dl)</i>
78	Pengendalian Administrasi Kontrak Proyek Infrastruktur Ketenagalistrikan <i>Control Of Electricity Infrastructure Project Contract Administration</i>	Staff KIT, KONS <i>Staff KIT, KONS</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai pengendalian administrasi kontrak proyek infrastruktur ketenagalistrikan <i>After participating in this learning, the participants able to master control of electricity infrastructure project contract administration</i>
79	Pengendalian Gas dan BBM <i>Gas and Fuel Control</i>	Staff KIT <i>Staff KIT</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai pengendalian gas dan bbm <i>After participating in this learning, the participants able to master gas and fuel control</i>

80	Pengendalian Proyek Dengan Aplikasi Ms. Project <i>Project Control With Ms Application. Project</i>	Staff TND <i>Staff TND</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai pengendalian proyek dengan aplikasi ms. Project <i>After participating in this learning, the participants able tomaster project control with ms application. Project</i>
81	Pengolahan Data Survey Geoteknik <i>Geotechnical Survey Data Processing</i>	Staff KIT <i>Staff KIT</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai pengolahan data survey geoteknik <i>After participating in this learning, the participants able tomaster geotechnical survey data processing</i>
82	Pengoperasian Peralatan Kelistrikan Pembangkit <i>Operation Of Generating Electric Equipment</i>	Staff USH <i>Staff USH</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai pengoperasian peralatan kelistrikan pembangkit <i>After participating in this learning, the participants able tomaster operation of generating electric equipment</i>
83	Peningkatan Implementasi Sistem Manajemen Mutu <i>Improvement Of Quality Management System Implementation</i>	Staff SETPER <i>Staff SETPER</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai peningkatan implementasi sistem manajemen mutu <i>After participating in this learning, the participants able tomaster improvement of quality management system implementation</i>
84	Penyediaan Dokumen Secara Akurat Untuk Proses Pengadaan Barang Dan Jasa <i>Accurate Provision Of Documents For The Procurement Of Goods And Services</i>	Staff SPMR <i>Staff SPMR</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai penyediaan dokumen secara akurat untuk proses pengadaan barang dan jasa <i>After participating in this learning, the participants able tomaster accurate provision of documents for the procurement of goods and services</i>
85	Penyelesaian Permasalahan Administrasi Kontrak Pada Proyek Ketenagalistrikan <i>Settlement Of Contract Administration Problems In Electricity Projects</i>	Staff KONS <i>Staff KONS</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai penyelesaian permasalahan administrasi kontrak pada proyek ketenagalistrikan <i>After participating in this learning, the participants able tomaster settlement of contract administration problems in electricity projects</i>
86	Penyusunan Dan Evaluasi Dokumen Lingkungan (Bl) <i>Development And Evaluation Of Environmental Documents (Bl)</i>	Staff KIT <i>Staff KIT</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai penyusunan dan evaluasi dokumen lingkungan (bl) <i>After participating in this learning, the participants able tomaster development and evaluation of environmental documents (bl)</i>
87	Penyusunan Jadwal Proyek Dengan Primavera Project Planner <i>Development Of Project Schedule With Primavera Project Planner</i>	Staff KONS <i>Staff KONS</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai penyusunan jadwal proyek dengan primavera project planner <i>After participating in this learning, the participants able tomaster development of project schedule with primavera project planner</i>

88	Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek (KKP) (DI) <i>Development Of Project Feasibility Assessment (KKP) (DI)</i>	Staff TND <i>Staff TND</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai penyusunan kajian kelayakan proyek (kkp) (dl) <i>After participating in this learning, the participants able to master development of project feasibility assessment (kkp) (dl)</i>
89	Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek (KKP) Dan Kajian Risiko <i>Development Of Project Feasibility Assessment (KKP) And Risk Assessment</i>	Staff KIT, TND <i>Staff KIT, TND</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai penyusunan kajian kelayakan proyek (kkp) dan kajian risiko <i>After participating in this learning, the participants able to master development of project feasibility assessment (kkp) and risk assessment</i>
90	Penyusunan Program Kerja Dan Anggaran Berbasis Risiko (Digital Learning) <i>Development Of Risk-Based Work Program And Budget (Digital Learning)</i>	Staff SPMR <i>Staff SPMR</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai penyusunan program kerja dan anggaran berbasis risiko (digital learning) <i>After participating in this learning, the participants able to master development of risk-based work program and budget (digital learning)</i>
91	Penyusunan Spesifikasi Teknik & Rab Sipil (DI) <i>Development Of Engineering & Civil Rab Specifications (DI)</i>	Staff KIT, KONS, TND <i>Staff KIT, KONS, TND</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai penyusunan spesifikasi teknik & rab sipil (dl) <i>After participating in this learning, the participants able to master development of engineering & civil rab specifications (dl)</i>
92	Penyusunan Spesifikasi Teknis Dan Rab Elektrikal Mekanik (Em) (DI) <i>Development Of Technical Specifications And Electrical Mechanical Rab (Em) (DI)</i>	Staff KIT, KONS <i>Staff KIT, KONS</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai penyusunan spesifikasi teknis dan rab elektrikal mekanik (em) (dl) <i>After participating in this learning, the participants able to master development of technical specifications and electrical mechanical rab (em) (dl)</i>
93	Perencanaan Operasi Penyaluran <i>Delivery Operation Planning</i>	Staff TND <i>Staff TND</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai perencanaan operasi penyaluran <i>After participating in this learning, the participants able to master delivery operation planning</i>
94	Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (Plts) (DI) <i>Planning Of Solar Power Plant (Plts) (DI)</i>	Staff KIT <i>Staff KIT</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai perencanaan pembangkit listrik tenaga surya (plts) (dl) <i>After participating in this learning, the participants able to master planning of solar power plant (plts) (dl)</i>
95	Perencanaan Tenaga Kerja (Digital Learning) <i>Manpower Planning (Digital Learning)</i>	Staff SDM & MUM <i>Staff SDM & MUM</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai perencanaan tenaga kerja (digital learning) <i>After participating in this learning, the participants able to master manpower planning (digital learning)</i>

96	Perhitungan Efisiensi Pltu Batubara Dengan Metode Manual	Staff KIT	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai perhitungan efisiensi pltu batubara dengan metode manual
	<i>Coal Pltu Efficiency Calculation Using Manual Method</i>	<i>Staff KIT</i>	<i>After participating in this learning, the participants able tomaster coal pltu efficiency calculation using manual method</i>
97	Perizinan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (DI)	Staff TND	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai perizinan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan (dl)
	<i>Electricity Infrastructure (DI) Development License</i>	<i>Staff TND</i>	<i>After participating in this learning, the participants able tomaster electricity infrastructure (dl) development license</i>
98	Php Advance : Framework Laravel (Digital Learning)	Staff SETPER	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai php advance : framework laravel (digital learning)
	<i>Php Advance : Framework Laravel (Digital Learning)</i>	<i>Staff SETPER</i>	<i>After participating in this learning, the participants able tomaster php advance : framework laravel (digital learning)</i>
99	Program Management Office (Pmo) - Project Management Methodology (Pmm) (DI)	Staff KONS	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai program management office (pmo) - project management methodology (pmm) (dl)
	<i>Program Management Office (Pmo) - Project Management Methodology (Pmm) (DI)</i>	<i>Staff KONS</i>	<i>After participating in this learning, the participants able tomaster program management office (pmo) - project management methodology (pmm) (dl)</i>
100	Project Administration (Pa) (DI)	Staff KIT	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai project administration (pa) (dl)
	<i>Project Administration (Pa) (DI)</i>	<i>Staff KIT</i>	<i>After participating in this learning, the participants able tomaster project administration (pa) (dl)</i>
101	Project Finance Dasar (Digital Learning)	Staff KIT	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai project finance dasar (digital learning)
	<i>Project Finance Dasar (Digital Learning)</i>	<i>Staff KIT</i>	<i>After participating in this learning, the participants able tomaster project finance dasar (digital learning)</i>
102	Proses Enjiniring	Staff SDM & MUM	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai proses enjiniring
	<i>Engineering Process</i>	<i>Staff SDM & MUM</i>	<i>After participating in this learning, the participants able tomaster engineering process</i>
103	Proses Penyelesaian Kontrak Dan Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan Pembangunan Ketenagalistrikan (DI)	Staff KONS	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai proses penyelesaian kontrak dan pembuatan laporan akhir kegiatan pembangunan ketenagalistrikan (dl)
	<i>Process Of Contract Settlement And Processing Of Final Report On Electricity Development Activities (DI)</i>	<i>Staff KONS</i>	<i>After participating in this learning, the participants able tomaster process of contract settlement and processing of final report on electricity development activities (dl)</i>

104	QA dan QC Pekerjaan Pemeliharaan Sistem Proteksi	Staff TND	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai qa dan qc pekerjaan pemeliharaan sistem proteksi
	<i>QA and QC Protection System Maintenance Work</i>	<i>Staff TND</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master qa and qc protection system maintenance work</i>
105	Saham (Digital Learning)	Staff USH	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai saham (digital learning)
	<i>Share (Digital Learning)</i>	<i>Staff USH</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master share (digital learning)</i>
106	Simulasi Pengoperasian PLTU CFB	Staff KIT	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai simulasi pengoperasian pltu cfb
	<i>CFB PLTU Operation Simulation</i>	<i>Staff KIT</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master cfb pltu operation simulation</i>
107	Sistem Proteksi Pembangkit	Staff KIT	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai sistem proteksi pembangkit
	<i>Power Plant Protection System</i>	<i>Staff KIT</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master power plant protection system</i>
108	Site Survey And Site Selection (DI)	Staff KIT, TND	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai site survey and site selection (dl)
	<i>Site Survey And Site Selection (DI)</i>	<i>Staff KIT, TND</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master site survey and site selection (dl)</i>
109	Skema Bisnis Independent Power Producer (Ipp)	Staff KIT, SPI	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai skema bisnis independent power producer (ipp)
	<i>Independent Power Producer (Ipp) Business Scheme</i>	<i>Staff KIT, SPI</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master independent power producer (ipp) business scheme</i>
110	Standar Dan Prosedur Ppa Untuk Ipp Ebt S.d 10 Mw	Staff KIT, SPI	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai standar dan prosedur ppa untuk ipp ebt s.d 10 mw
	<i>Ppa Standards And Procedures For Ebt Ipps Up To 10 Mw</i>	<i>Staff KIT, SPI</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master ppa standards and procedures for ebt ipp up to 10 mw</i>
111	Standar Konstruksi Jaringan Distribusi (DI)	Staff TND	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai standar konstruksi jaringan distribusi (dl)
	<i>Standards Of Distribution Network Construction (DI)</i>	<i>Staff TND</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master standards of distribution network construction (dl)</i>
112	Strategi Bisnis, Korporat, Dan Global	Staff PPK, SETPER, SPMR	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai strategi bisnis, korporat, dan global
	<i>Business, Corporate And Global Strategies</i>	<i>Staff PPK, SETPER, SPMR</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master business, corporate and global strategies</i>

113	Strategi, Kebijakan, Program, Dan Anggaran Sdm Dasar <i>Strategy, Policy, Program And Budget Human Resources</i>	Staff SDM & MUM <i>Staff SDM & MUM</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai strategi, kebijakan, program, dan anggaran sdm dasar <i>After participating in this learning, the participants able tomaster strategy, policy, program and budget human resources</i>
114	Strategic Management Stakeholder & Communication Skill <i>Strategic Management Stakeholder And Communication Skill</i>	Staff PPK, SETPER, USH <i>Staff PPK, SETPER, USH</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai strategic management stakeholder & communication skill <i>After participating in this learning, the participants able tomaster strategic management stakeholder and communication skill</i>
115	Supervisi Aspek Hukum Agraria <i>Supervision Of Agrarian Legal Aspects</i>	Staff SETPER <i>Staff SETPER</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai supervisi aspek hukum agraria <i>After participating in this learning, the participants able tomaster supervision of agrarian legal aspects</i>
116	Supervisi Design Enjiniring Gardu Induk <i>Supervision Of Engineering Design Substations</i>	Staff KIT, TND <i>Staff KIT, TND</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai supervisi design enjiniring gardu induk <i>After participating in this learning, the participants able tomaster supervision of engineering design substations</i>
117	Supervisi Konstruksi Peralatan Scada & Sas <i>Scada And Sas . Equipment Construction Supervision</i>	Staff TND <i>Staff TND</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai supervisi konstruksi peralatan scada & sas <i>After participating in this learning, the participants able tomaster scada and sas . Equipment construction supervision</i>
118	Supervisi Konstruksi Proyek Pembangkit <i>Supervision Of Power Plant Projects</i>	Staff KIT, KONS <i>Staff KIT, KONS</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai supervisi konstruksi proyek pembangkit <i>After participating in this learning, the participants able tomaster supervision of power plant projects</i>
119	Supervisi Pengoperasian Pltmg <i>Supervision Of Pltmg Operations</i>	Staff KIT <i>Staff KIT</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai supervisi pengoperasian pltmg <i>After participating in this learning, the participants able tomaster supervision of pltmg operations</i>
120	Supervisi Penyusunan Dan Pendokumentasian Perjanjian/Kontrak (Digital Learning) <i>Supervision Of Agreement/Contract Development And Documentation (Digital Learning)</i>	Staff SPMR <i>Staff SPMR</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai supervisi penyusunan dan pendokumentasian perjanjian/kontrak (digital learning) <i>After participating in this learning, the participants able tomaster supervision of agreement/contract development and documentation (digital learning)</i>

121	Supply Chain Management (Digital Learning)	Staff KIT, PPK	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai supply chain management (digital learning)
	<i>Supply Chain Management (Digital Learning)</i>	<i>Staff KIT, PPK</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master supply chain management (digital learning)</i>
122	Tata Kelola Dan Standarisasi Pengembangan Aplikasi (Digital Learning)	Staff SETPER	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai tata kelola dan standarisasi pengembangan aplikasi (digital learning)
	<i>Governance And Standardization Of Application Development (Digital Learning)</i>	<i>Staff SETPER</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master governance and standardization of application development (digital learning)</i>
123	Tata Kelola Teknologi Informasi (It Governance) - Digital Learning	Staff SETPER	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai tata kelola teknologi informasi (it governance) - digital learning
	<i>Information Technology Governance (It Governance) - Digital Learning</i>	<i>Staff SETPER</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master information technology governance (it governance) - digital learning</i>
124	Tata Kelola, Manajemen Risiko, Dan Pengendalian	Staff SDM & MUM, USH	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian
	<i>Governance, Risk Management, And Control</i>	<i>Staff SDM & MUM, USH</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master governance, risk management, and control</i>
125	Teknik Design & Review Menggunakan Aplikasi Ms Tower (DI)	Staff TND	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai teknik design & review menggunakan aplikasi ms tower (dl)
	<i>Design & Review Techniques Using Ms Tower (DI) Application</i>	<i>Staff TND</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master design & review techniques using ms tower (dl) application</i>
126	Teknik Perhitungan Struktur Bawah (Pondasi), Stabilitas & Metode Proteksi Lereng (DI)	Staff KIT, TND	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai teknik perhitungan struktur bawah (pondasi), stabilitas & metode proteksi lereng (dl)
	<i>Engineering Calculation Of Bottom Structure (Foundation), Stability & Slope Protection Method (DI)</i>	<i>Staff KIT, TND</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master engineering calculation of bottom structure (foundation), stability & slope protection method (dl)</i>
127	Tjsl/Csr Untuk Pencapaian Kinerja	Staff SETPER	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai tjsl/csr untuk pencapaian kinerja
	<i>Tjsl/Csr For Performance Achievement</i>	<i>Staff SETPER</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master tjsl/csr for performance achievement</i>
128	Troubleshooting Plta	Staff KIT	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai troubleshooting plta
	<i>Plta Troubleshooting</i>	<i>Staff KIT</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master plta troubleshooting</i>

129	Workshop Project Completion	Staff TND	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai workshop project completion
	<i>Workshop Project Completion</i>	<i>Staff TND</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master workshop project completion</i>

Selain itu, PLN Enjiniring mengimplementasikan *Knowledge Management* dalam wadah *knowledge sharing* dalam lingkungan kerja PLN Enjiniring yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin dan Rabu. Setiap materi *knowledge sharing* tersebut di-upload dalam aplikasi *Document Management (DM)* sebagai media portal *Knowledge Management*.

Diharapkan media yang sekarang ini berguna sebagai *data storage* yang dapat berkembang menjadi media yang berfungsi menjembatani kebutuhan perusahaan akan *knowledge sharing* dari enjinir senior ke junior, pimpinan ke bawahan, dan juga sebagai sarana mempermudah proses *coaching* dan *mentoring*.

In addition, PLN Enjiniring implements Knowledge Management in a knowledge sharing platform within the PLN Enjiniring work environment which is routinely carried out every Monday and Wednesday. Each knowledge sharing material is uploaded in the Document Management (DM) application as a Knowledge Management portal media.

It is hoped that the current media is useful as data storage that can develop into a media that serves to bridge the needs of companies for knowledge sharing from senior to junior engineers, leaders to subordinates, and also as a means to facilitate the coaching and mentoring process.

Employee Engagement

Employee Engagement

Pada tahun 2021, tingkat kerekatan karyawan PLN Enjiniring diukur dalam *Employee Engagement Survey* (EES) dengan metode online survey. Persentase *Employee Engagement Index* (EEI) tahun 2021 sebesar 76,46%, dimana angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata EEI di Indonesia, yaitu 74%. Sementara hasil EEI tahun 2020 sebesar 70,45%. Maka dapat disimpulkan bahwa pada EEI tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 6,05%.

Tantangan terbesar di tahun 2021 dalam peningkatan engagement karyawan dapat terjawab dengan meningkatnya *Employee Engagement* di tahun 2021 sebesar 6,05% meskipun dibanding dengan 2019 yang memiliki hasil lebih tinggi yaitu 84%, tetapi manajemen PLN Enjiniring cukup mampu memastikan kontribusi dan pencapaian karyawan, manajemen menunjukkan bukti kuat mengenai kepemimpinan yang efektif, memastikan bahwa karyawan adalah aset terpenting perusahaan dan kesempatan untuk promosi dianggap adil dan transparan bagi karyawan.

MANAJEMEN KINERJA

PLN Enjiniring melaksanakan penilaian kinerja berdasarkan Sistem Manajemen Kinerja yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 03.001.K/DIR/PLNE/VI/2019 tanggal 3 Juni 2019 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai. Tujuan ditetapkannya Sistem Manajemen Kinerja Pegawai adalah (1) terwujudnya pengukuran kinerja yang berkeadilan guna membina budaya pembelajar dan berprestasi serta memotivasi Pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan kontribusi Pegawai bagi Perusahaan, dan (2) sebagai pedoman untuk mengevaluasi kinerja Pegawai secara transparan, terukur, dan obyektif. Siklus penilaian kinerja Pegawai dilaksanakan dalam setiap 1 (satu) semester yang terdiri atas kegiatan:

In 2021, PLN Enjiniring's employee engagement level is measured in the Employee Engagement Survey (EES) using the online survey method. The percentage of Employee Engagement Index (EEI) in 2021 is 76.46%, which is higher than the average EEI in Indonesia, which is 74%. Meanwhile, the EEI result for 2020 is 70.45%. So it can be concluded that the EEI in 2021 has increased by 6.05%.

The biggest challenge in 2021 in increasing employee engagement can be answered by increasing Employee Engagement in 2021 by 6.05% even though compared to 2019 which had a higher yield of 84%, PLN Enjiniring management is quite able to ensure employee contributions and achievements, management shows strong evidence of effective leadership, ensuring that employees are the company's most important asset and opportunities for promotion are considered fair and transparent to employees.

PERFORMANCE MANAGEMENT

PLN Enjiniring conducts a performance appraisal based on the Performance Management System stipulated in Decision Letter of the Board of Directors No. 03.001.K / DIR / PLNE / VI / 2019 dated June 3, 2019 concerning the Employee Performance Management System. The objectives of establishing the Employee Performance Management System are (1) the realization of fair performance measurements in order to foster a culture of learners and achievement and motivate Employees to improve Employee competencies and contributions to the Company, and (2) as a guideline for evaluating Employee performance in a transparent, measurable, and objective. The employee performance appraisal cycle is carried out in every 1 (one) semester consisting of activities:

1. Perencanaan

Merupakan tahap diskusi formal antara Atasan Langsung dengan Pegawai atau yang bersangkutan, tentang rencana pekerjaan utama yang akan dilakukan pada semester tersebut.

2. Pemantauan

Pemantauan yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung terhadap kinerja Pegawai pada semester berjalan dengan cara melakukan pembinaan, bimbingan, konsultasi dan konseling serta penugasan-penugasan yang mendorong pegawai dalam pencapaian KPI.

3. Penilaian

Pelaksanaan penilaian yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung setiap akhir semester. Hasil penilaian diketahui dan divalidasi oleh Karyawan dan Atasan Langsung.

Kriteria penilaian kinerja pegawai adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Individu, adalah penilaian yang dilakukan berdasarkan pemenuhan terhadap target kinerja individu Pegawai yang ditetapkan pada periode penilaian berjalan.
2. Kompetensi individu, adalah daftar kompetensi yang dimiliki oleh individu pegawai yang merupakan pemetaan dari *assessment* individu dengan menggunakan alat ukur yang telah ditentukan dengan merujuk kepada Direktori Kompetensi dan Kebutuhan Kompetensi Jabatan.
3. Kontribusi Individu yang terdiri dari:
 - a. Inovasi, yaitu inovasi alat, metode atau konsep yang memenuhi kriteria pada keputusan direksi yang berlaku.
 - b. **Knowledge Management**, adalah serangkaian langkah-langkah pengelolaan aset pengetahuan (mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan/menyebarkan pengetahuan) dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan secara berkelanjutan seperti *knowledge sharing*, *knowledge capturing* dan *community of practice*.

1. Planning

This is the formal discussion stage between the Direct Supervisor and the Employee or concerned, about the main work plan that will be carried out in the following semester.

2. Monitoring

Monitoring conducted by the Direct Supervisor on the performance of Employees in the current semester by providing guidance, guidance, consultation and counseling.

3. Rating

The assessment is carried out by the Direct Supervisor at the end of the semester. The assessment results are known and validated by Employees and Direct Supervisors.

The criteria for evaluating employee performance are as follows:

1. *Individual Targets*, are assessments based on the fulfillment of the Employee's individual performance targets that are set in the current assessment period.
2. *Individual competencies*, is a list of competencies possessed by individual employees which is a mapping of individual assessments by using predetermined measurement tools by referring to the Competency Directory and Position Competency Needs.
3. *Individual contributions* consisting of:
 - a. *Innovation*, namely the innovation of tools, methods or concepts that meet the Company's innovation criteria.
 - b. *Knowledge Management*, is a series of steps for managing knowledge assets (collecting, storing, and using / disseminating knowledge) in order to continuously improve the Company's performance on an ongoing basis such as knowledge sharing, knowledge capturing and community of practice.

Penilaian Kinerja setiap individu berdasarkan pada *Key Performance Indicator* (KPI), yaitu ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja Pegawai dalam menunjang kinerja Perusahaan yang dijabarkan dalam inisiatif strategis, ukuran kinerja, dan target. Penetapan KPI masing-masing individu Pegawai didasarkan pada KPI Perusahaan yang diturunkan ke KPI Direktorat. Dari KPI Direktorat akan diturunkan ke KPI Bidang dan selanjutnya digunakan sebagai dasar penetapan KPI individu.

The performance appraisal of each individual is based on the Key Performance Indicator (KPI), which is a quantitative or qualitative measure that is used to measure the achievement of employee performance in supporting Company performance that is outlined in strategic initiatives, performance measures, and targets. The determination of the KPI for each individual employee is based on the Company's KPI which is downgraded to the Directorate's KPI. From the KPI the Directorate will be demoted to the Field KPI and subsequently used as the basis for determining individual KPIs.

KEBIJAKAN PENGHARGAAN KEPADA KARYAWAN

EMPLOYEE POLICY TO EMPLOYEES

Kebijakan sistem penghargaan kepada Pegawai mengacu pada Peraturan Perusahaan Nomor 21.002.K/DIR/PLNE/II/2020 Pasal 19 Ayat (2) huruf d yaitu Pemberian Penghargaan, dimana bertujuan untuk mendorong profesionalisme Pegawai, memelihara dan mengembangkan motivasi dan ketenagakerjaan, memelihara dan mengembangkan kemampuan dan produktivitas kerja, dan memberikan kepastian adanya pengembangan karir Pegawai, memberikan kesempatan pengembangan karir Pegawai.

The reward system policy for Employees refers to Decision Letter of the Board of Directors No. 21.002.K / DIR / PLNE / II / 2020 Article 19 Paragraph (2) letter d, concerning awarding, which aims to encourage employee professionalism, maintain and develop motivation and employment, maintain and develop work ability and productivity, and provide certainty for employee career development, provide opportunities for employee career development.

Penghargaan yang diberikan oleh PLN Enjiniring terdiri dari dua jenis, yaitu penghargaan ekstrinsik dan intrinsik. Penghargaan ekstrinsik diberikan kepada Pegawai dalam bentuk kompensasi dan manfaat. Kompensasi terdiri dari (1) kompensasi tetap bulanan (*Pay for Person – P1*), (2) tunjangan posisi (*Pay for Position – P2*), tunjangan prestasi (*Pay for Performance – P3*), tunjangan hari raya, cuti tahunan, cuti besar, bantuan ganti rugi, dan jaminan sosial pegawai, (3) imbal jasa dalam bentuk bonus kinerja, (4) penghargaan kesetiaan kerja. Manfaat terdiri dari (1) manfaat umum, antara lain pemeliharaan kesehatan, hak cuti, pakaian dinas, bantuan penggantian fasilitas perumahan, bantuan pinjaman pemilikan rumah, dan program pensiun, serta (2) manfaat khusus, antara lain bantuan pemilikan kendaraan, alat komunikasi, laptop, dan fasilitas kerja.

*Awards given by PLN Enjiniring are of two types, namely extrinsic and intrinsic awards. Extrinsic awards are given to employees in the form of compensation and benefits. Compensation consists of (1) monthly fixed compensation (*Pay for Person - P1*), (2) position allowance (*Pay for Position - P2*), performance allowance (*Pay for Performance - P3*), holiday allowance, annual leave, large leave, compensation assistance, and employee social security, (3) remuneration in the form of performance bonuses, (4) work loyalty awards. Benefits consist of (1) general benefits, including health care, leave entitlements, official clothing, housing facility replacement assistance, housing loan assistance, and pension programs, and (2) special benefits, including vehicle ownership assistance, communication tools, laptops, and work facilities.*

Penghargaan intrinsik diberikan kepada Pegawai dalam bentuk

1. Program pendidikan formal dan sertifikasi profesi, yang diberikan bagi Pegawai yang memenuhi persyaratan kriteria talenta tertentu,
2. Fasilitas kerja khusus, yang diberikan atas dasar kontribusi dan/atau pencapaian inovasi yang memberikan keuntungan bagi Perusahaan dalam bentuk efisiensi biaya dan/atau peningkatan pendapatan,
3. Program keseimbangan khusus, yang diberikan atas dasar efisiensi biaya kesehatan pribadi dan keluarga dan/atau pencapaian loyalitas kerja Pegawai,
4. Bantuan hukum, yang diberikan dalam bentuk pembelaan atas tuntutan hukum terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan,
5. Pengakuan, yang diberikan atas dasar penghargaan Direksi.

FASILITAS KESEHATAN

Fasilitas pemeliharaan kesehatan adalah bagian dari penghargaan ekstrinsik yang masuk dalam kategori manfaat umum. PLN Enjiniring memberikan bantuan pemeliharaan kesehatan kepada Pegawai dan keluarganya diatur dalam Keputusan Direksi Nomor 01.001.K/DIR/PLNE/XI/2020 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pegawai dan Keluarga yang Ditanggung PT PLN Enjiniring. Bentuk pemeliharaan kesehatan yang ditanggung Perusahaan terdiri dari:

- a) Rawat jalan,
- b) Rawat inap,
- c) Pemeriksaan penunjang atas rekomendasi dokter untuk peneguhan diagnosa di laboratorium,
- d) Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan sampai dengan anak ketiga,
- e) Gugur kandung,
- f) Perawatan di Unit Gawat Darurat (UGD),
- g) Program Keluarga Berencana (KB), imunisasi dan vaksinasi, khitan, pengobatan infertilitasi dan program bayi tabung,
- h) Perawatan gigi,

Intrinsic awards are given to employees in the form of

1. *Formal education and professional certification programs, which are provided for employees who meet certain talent criteria requirements,*
2. *Special work facilities, which are provided on the basis of contributions and / or achievement of innovations that benefit the Company in the form of cost efficiency and / or increased revenue,*
3. *Special balance program, which is given on the basis of cost efficiency of personal and family health and / or achievement of employee work loyalty,*
4. *Legal assistance, which is given in the form of defense of lawsuits related to the implementation of duties and responsibilities of the position,*
5. *Recognition, which is given on the basis of the Directors' award.*

HEALTH FACILITIES

Health care facilities are part of extrinsic awards that fall into the general benefit category. PLN Enjiniring to provide health care assistance to employees and their families is regulated in Decision Letter of the Board of Directors No. 01.001.K / DIR / PLNE / XI / 2020 concerning the Implementation of Health Care for Employees and Families Covered by PT PLN Enjiniring. Forms of health care borne by the Company consist of:

- a) *Outpatient,*
- b) *Inpatient,*
- c) *Supporting examinations on the doctor's recommendation for confirmation of the diagnosis in the laboratory,*
- d) *Pregnancy examinations and assistance with childbirth up to the third child,*
- e) *Biological death,*
- f) *Care in the Emergency Unit (UGD),*
- g) *Family Planning Program (KB), immunization and vaccination, circumcision, infertilization treatment and IVF program,*
- h) *Dental care,*

- i) Alat-alat rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi alat tubuh,
- j) Alat-alat cangkok/transplantasi,
- k) Alat-alat kesehatan terkait jantung,
- l) Obat untuk penyembuhan sesuai dengan formularium obat dan Daftar Obat Perusahaan (DOP),
- m) Tindakan bedah plastik khusus akibat kecelakaan kerja,
- n) Terapi kejiwaan,

- i) *Rehabilitation tools to restore the function of organs,*
- j) *Graft / transplant tools,*
- k) *Heart related medical devices,*
- l) *Medicines for healing in accordance with the drug formulary and the Company Drug List (DOP),*
- m) *Special plastic surgery due to occupational accidents,*
- n) *Psychiatric therapy,*

PROGRAM PENSIUN

PLN Enjiniring mengatur Program Pensiun Pegawai dalam Keputusan Direksi No. 01.001.K/DIR/PLNE/IX/2017. Usia pensiun untuk seluruh Pegawai PLN Enjiniring adalah 56 tahun. Bagi Pegawai yang telah berusia 55 tahun dapat mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP). Untuk mempersiapkan Pegawai yang memasuki masa MPP tersebut, PLN Enjiniring memberikan pelatihan purna bakti. Diharapkan dengan bekal pelatihan ini, Pegawai dapat mempersiapkan diri di masa pensiun. Sementara itu, bagi Pegawai yang telah memasuki usia purna bakti diberikan kompensasi. Pegawai diikutsertakan dalam Program Jaminan Hari Tua (JHT), yaitu Kompensasi Jaminan Hari Tua sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku dan PSAK 24. Kompensasi yang diberikan oleh Perusahaan mengacu pada Peraturan Perusahaan Nomor 21.002.K/DIR/PLNE/II/2020 Bab XI Pasal 50 tentang Penghargaan Pensiun.

Bagi Pegawai tugas karya dari PT PLN (Persero), ketentuan pensiun mengacu pada ketentuan yang berlaku pada PT PLN (Persero). PT PLN (Persero) menanggung liabilitas imbalan pasca kerja meliputi imbalan pensiun lain berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja dan ganti kerugian, tunjangan tambahan penghasilan, dan penghargaan purna jabatan, dan pemeliharaan kesehatan, serta menyediakan program dana pensiun imbalan pasti bagi Pegawai yang diperbantukan. Program dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun PLN (Persero). Selama Pegawai diperbantukan bekerja di PLN Enjiniring, Perusahaan wajib membayar iuran program pensiun kepada PT PLN (Persero) berdasarkan keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 332.K/010/

RETIREMENT PROGRAM

PLN Enjiniring regulates the Employee Pension Program in Decision Letter of the Board of Directors No. 01.001.K / DIR / PLNE / IX / 2017. The retirement age for all PLN Enjiniring Employees is 56 years. Employees who are 55 years old can take the Retirement Preparation Period (MPP). To prepare for the Employees entering the MPP period, PLN Enjiniring provides after-service training. It is expected that with the provision of this training, employees can prepare themselves in retirement. Meanwhile, employees who have entered retirement age are compensated. Employees are included in the Old Age Insurance Program (JHT), which is Old Age Insurance Compensation in accordance with applicable Labor Law and PSAK 24. The compensation provided by the Company refers to Company Regulation Number 21.002.K/DIR/PLNE/II/2020 Chapter XI Article 50 concerning Pension Awards.

For employees of work assignments from PT PLN (Persero), the pension provision refers to the provisions that apply to PT PLN (Persero). PT PLN (Persero) bears post-employment benefits liabilities including other pension benefits in the form of severance pay, long service awards and compensation, additional income allowances, and post-service awards, and health care, as well as providing a defined benefit pension plan for seconded employees. This pension program is managed by the PLN (Persero) Pension Fund. As long as an employee is employed to work at PLN Enjiniring, the Company is obliged to pay pension plan contributions to PT PLN (Persero) based on the decision letter of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 332.K / 010

DIR/2003. Iuran yang dibayar Perusahaan diakui sebagai beban pada tahun berjalan, karena Perusahaan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut.

/ DIR / 2003. Contributions paid by the Company are recognized as expenses in the current year, because the Company has no legal or constructive obligation to pay further contributions.

PENGELOLAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PLN Enjiniring senantiasa berkomitmen untuk memelihara hubungan industrial yang baik antara karyawan dengan manajemen serta menghormati hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan organisasi diwujudkan dengan penyaluran aspirasi karyawan yang baik dan sesuai dengan etika. Media komunikasi yang dapat digunakan untuk menyalurkan aspirasi karyawan tersebut berupa forum komunikasi yang diadakan pada dalam peringatan acara-acara Perusahaan, hari besar kenegaraan dan keagamaan.

PLN Enjiniring telah memiliki Serikat Pekerja yang terbentuk pada tanggal 29 Januari 2020, dimana beberapa Pegawai PLN Enjiniring membentuk sebuah Serikat Pekerja dengan nama Persatuan Pekerja Prima Enjiniring (P3E) dan telah dicatat dalam Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 3027/-1.838 tanggal 10 November 2020.

PLN Enjiniring memiliki komitmen untuk menciptakan kondisi yang sehat dan serasi sekaligus terciptanya ketenangan kerja sesuai dengan azas hubungan industrial. Tidak pernah terjadi pemogokan kerja, demonstrasi atau gangguan lainnya, yang menghentikan kegiatan operasional PLN Enjiniring maupun gugatan terkait peradilan hubungan industrial. Hal ini dikarenakan adanya pemahaman dan saling pengertian yang baik antara manajemen PLN Enjiniring dengan karyawan sebagai mitra yang saling mendukung satu sama lain.

MANAGEMENT OF INDUSTRIAL RELATIONS

PLN Enjiniring is always committed to maintaining good industrial relations between employees and management and respecting the rights and obligations of employees in accordance with applicable laws and regulations. Organizational freedom is realized by channeling the aspirations of good employees and in accordance with ethics. Communication media that can be used to channel employee aspirations are in the form of a communication forum held in commemoration of Company events, state and religious holidays.

PLN Enjiniring already has a Workers Union which was formed on January 29, 2020, where several PLN Enjiniring employees formed a Workers Union with the name Persatuan Pekerja Prima Enjiniring (P3E) and has been recorded in the Decree of the Head of the Manpower and Transmigration Sub-Department of West Jakarta Administration Number 3027 /-1,838 on November 10, 2020.

PLN Enjiniring has a commitment to create healthy and harmonious conditions while at the same time creating work peace in accordance with the principles of industrial relations. There were never any strikes, demonstrations or other disturbances, which stopped the PLN Enjiniring operational activities or lawsuits related to industrial relations justice. This is due to a good understanding and mutual understanding between PLN Enjiniring management and employees as partners who support each other.

SURVEI BUDAYA

Rancangan Program dan Sasaran Budaya Perusahaan dirumuskan dalam Roadmap Penguatan Budaya Perusahaan Tahun 2020-2024 yang telah disusun mengacu kepada Visi maupun Aspirasi PLN Group 2024. Implementasi Program Budaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 difokuskan pada Tata Nilai AKLAK, yaitu tata nilai yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN dan diselaraskan ke perusahaan BUMN. Untuk mendorong komunikasi dan internalisasi implementasi Budaya, ditetapkan Ranger Budaya Perusahaan yang merupakan gabungan pejabat struktural dan fungsional. Dalam mengevaluasi kegiatan budaya dilakukan metode survei lewat kuisisioner serta survei tanya jawab/diskusi melalui site visit yang dilakukan secara online. PLN Pusat sebagai pengelola program budaya perusahaan akan mengevaluasi dan memantau progress dan menilai implementasi di PLN Enjiniring. Site Visit ke-3 yang terakhir kali dilakukan pada bulan Juni 2021, PLN Enjiniring mendapatkan hasil exceeding artinya passing grade penilaian budaya PLN Enjiniring pada kategori angka 66-80. Hasil tersebut menunjukkan masih terdapat beberapa faktor yang harus ditingkatkan dalam implementasi budaya tersebut.

KESIMPULAN HASIL SURVEI

Dari hasil analisis melalui *site visit* dan survei yang dilakukan PLN Pusat, terdapat kekuatan, perbaikan dan faktor program budaya PLN Enjiniring, sebagai berikut :

Hal-hal yang harus dipertahankan dan menjadi kekuatan Program Budaya PLN Enjiniring :

1. Implementasi program PLN 1, 2 dan 3 sudah berjalan dengan baik, karena telah melibatkan seluruh unsur Pegawai yang dilakukan secara rutin dan konsisten. Keterlibatan *Ranger Master*, *Ranger Leader* dan *Ranger* menjadi kunci dalam implementasi program *Stop Start Continue Behaviour*,

CULTURAL SURVEY

The Program Design and Corporate Culture Goals are formulated in the Roadmap for Strengthening Corporate Culture for the Year 2020-2024 which has been prepared referring to the Vision and Aspirations of the PLN Group 2024. The implementation of the Cultural Program that has been implemented in 2020 is focused on the AKLAK Values, namely the values that have been set by the Ministry of SOEs and aligned to state-owned companies. To encourage communication and internalization of the implementation of Culture, a Corporate Culture Ranger is appointed which is a combination of structural and functional officials. In evaluating cultural activities, a survey method was carried out through questionnaires and a question and answer survey/discussion through site visits conducted online. PLN Central as the manager of the corporate culture program will evaluate and monitor progress and assess implementation at PLN Enjiniring. The 3rd Site Visit which was last carried out in June 2021, PLN Enjiniring received exceeding results, meaning that the passing grade of PLN Enjiniring's cultural assessment was in category numbers 66-80. These results indicate that there are still several factors that must be improved in the implementation of the culture.

CONCLUSION OF SURVEY RESULTS

From the results of the analysis through site visits and surveys conducted by PLN, there are strengths, improvements and factors for the PLN Enjiniring cultural program, as follows:

Things that must be maintained and become strengths of the PLN Enjiniring Culture Program:

1. *The implementation of the PLN 1, 2 and 3 programs has been going well, because it has involved all elements of the employee which is carried out regularly and consistently. The involvement of the Ranger Master, Ranger Leader and Ranger is the key in implementing the Stop Start Continue Behavior program,*

2. Pemetaan *Fraud* dan mitigasi risiko sudah dilaksanakan dan telah dilakukan inisiatif-inisiatif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko *fraud* dan dampak risiko *fraud* diantaranya dengan mengimplementasikan *E-Procurement*,
3. Secara umum insan PLN Enjiniring telah mengetahui tata nilai AKHLAK serta menjadi pedoman dalam perilaku di aktivitas maupun pekerjaan sehari-hari.

2. *Fraud mapping and risk mitigation have been implemented and initiatives have been taken to reduce the possibility of fraud risk and the impact of fraud risk, including by implementing E-Procurement,*
3. *In general, PLN Enjiniring employee already know the AKHLAK values and serve as guidelines for behavior in daily activities and work.*

Hal-hal yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki dalam Program Budaya PLN Enjiniring:

Things that need to be improved and improved in the PLN Enjiniring Culture Program:

1. Diharapkan metode *enforcement/dukungan* yang sudah berjalan dengan baik agar tetap dapat secara konsisten dilaksanakan untuk mengawal dan menjaga jalannya program PLN 1,2 dan 3 serta peran *leader* menjadi prioritas utama untuk tetap dapat memastikan program tetap *sustain* dan berjalan dengan baik,
2. Tetap konsisten melakukan *refreshment program* yang diluar kebiasaan sehingga diharapkan dari kegiatan kegiatan tersebut bisa didapatkan perspektif baru,
3. Untuk menjaga keberlanjutan program penguatan, perlu dilakukan pembinaan yang terstruktur untuk mempersiapkan kandidat *ranger* yang akan menjadi *ranger* dan perlu ditentukan target penambahan jumlah *ranger* setiap tahun untuk memastikan estafet *ranger* berjalan dengan lancar,
4. Untuk meningkatkan evaluasi efektivitas program budaya, perlu dilaksanakan pengukuran dampak program khususnya terhadap perubahan perilaku yang sesuai dengan sasaran perilaku yang ditetapkan pada masing-masing program,
5. Birokrasi yang masih berbelit dan hirarki yang panjang mengakibatkan pengambilan keputusan yang lama,
6. Perlunya transparansi dalam aturan-aturan perusahaan.

1. *It is hoped that the enforcement/support method that has been running well can continue to be consistently implemented to oversee and maintain the running of the PLN 1,2 and 3 programs and the role of the leader becomes a top priority to ensure that the program remains sustainable and runs well,*
2. *Continue to consistently carry out refreshment programs that are out of the ordinary so that it is hoped that from these activities new perspectives can be obtained,*
3. *To maintain the sustainability of the strengthening program, it is necessary to carry out structured coaching to prepare ranger candidates who will become rangers and it is necessary to determine a target for increasing the number of rangers every year to ensure the ranger relay runs smoothly,*
4. *To improve the evaluation of the effectiveness of cultural programs, it is necessary to measure the impact of the program, especially on behavior change in accordance with the behavioral targets set in each program,*
5. *The bureaucracy is still convoluted and the long hierarchy results in long decision making,*
6. *The need for transparency in company rules.*

PEMBINAAN KOMPETENSI DAN KARIR

Pegawai diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk kinerja yang optimal. Sedangkan, Perusahaan wajib memberikan pembinaan dalam hal pengembangan kompetensi dan karir bagi Pegawai, dalam rangka memelihara dan memotivasi Pegawai untuk berkontribusi lebih dalam kinerja individu. Dalam hal ini, PLN Enjiniring telah memiliki ketentuan dalam Keputusan Direksi No. 05.001.K/DIR/PLNE/XII/2014 tentang Sistem Pembinaan Kompetensi dan Karir.

Pembinaan kompetensi terdiri dari pembinaan level kompetensi dan pembinaan *grade*. Level kompetensi didasarkan pada bidang keilmuan, pengalaman, dan/ atau kemampuan Pegawai dalam mengembangkan kompetensi sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Setiap level kompetensi terdiri dari beberapa *grade* yang menunjukkan tingkat penguasaan kompetensi individu pada level kompetensi tertentu. Level kompetensi dan *grade* melekat pada Pegawai, bukan pada Jabatan.

Pembinaan karir terdiri dari pembinaan profesi dan pembinaan jabatan. Profesi adalah mengacu pada ketentuan tentang pohon profesi atau nama profesi, dimana belum diterapkan di PLN Enjiniring. Sedangkan jabatan terdiri dari jabatan struktural dan jabatan fungsional, dimana pembinaannya terdiri dari promosi, rotasi, dan demosi.

Promosi jabatan merupakan alih tugas dari satu jabatan ke jabatan yang lain yang memiliki persyaratan Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ) dan level kompetensi yang lebih tinggi. Rotasi jabatan merupakan alih tugas dari satu jabatan ke jabatan yang lain yang memiliki persyaratan Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ) dan level kompetensi yang sama. Demosi merupakan alih tugas dari satu jabatan ke jabatan yang lain yang memiliki persyaratan Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ) dan level kompetensi yang lebih rendah. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pegawai yang memenuhi persyaratan pembinaan jabatan.

DEVELOPMENT OF COMPETENCY AND CAREER

Employees are expected to contribute in the form of optimal performance. Meanwhile, the Company is required to provide guidance in terms of competency and career development for employees, in order to maintain and motivate employees to contribute more in individual performance. In this case, PLN Enjiniring has the provisions in Decision Letter of the Board of Directors No. 05.001.K / DIR / PLNE / XII / 2014 concerning Competency and Career Development Systems.

Competency development consists of competency level and grade development. The competency level is based on the field of science, experience, and / or the ability of employees to develop competencies in accordance with job requirements. Each competency level consists of several grades that indicate the level of mastery of individual competencies at a certain level of competency. The level of competency and grade is inherent in the Employee, not the Position.

Career development consists of professional development and position development. Profession is referring to the provisions regarding the professional tree or the profession name, which has not been applied in PLN Enjiniring. While the position consists of structural positions and functional positions, where the development consists of promotion, rotation, and demotion.

Job promotion is a transfer of duties from one position to another that has the requirements of the Position Competency Requirement (KKJ) and a higher level of competency. Position rotation is a transfer of duties from one position to another that has the requirements of the Position Competency Requirement (KKJ) and the same level of competency. Demotion is a shift of assignment from one position to another that has a requirement of Position Competency Requirement (KKJ) and a lower level of competency. The company provides equal opportunities for all employees who meet the requirements for coaching positions.

PROFIL KARYAWAN

EMPLOYEE PROFILE



Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

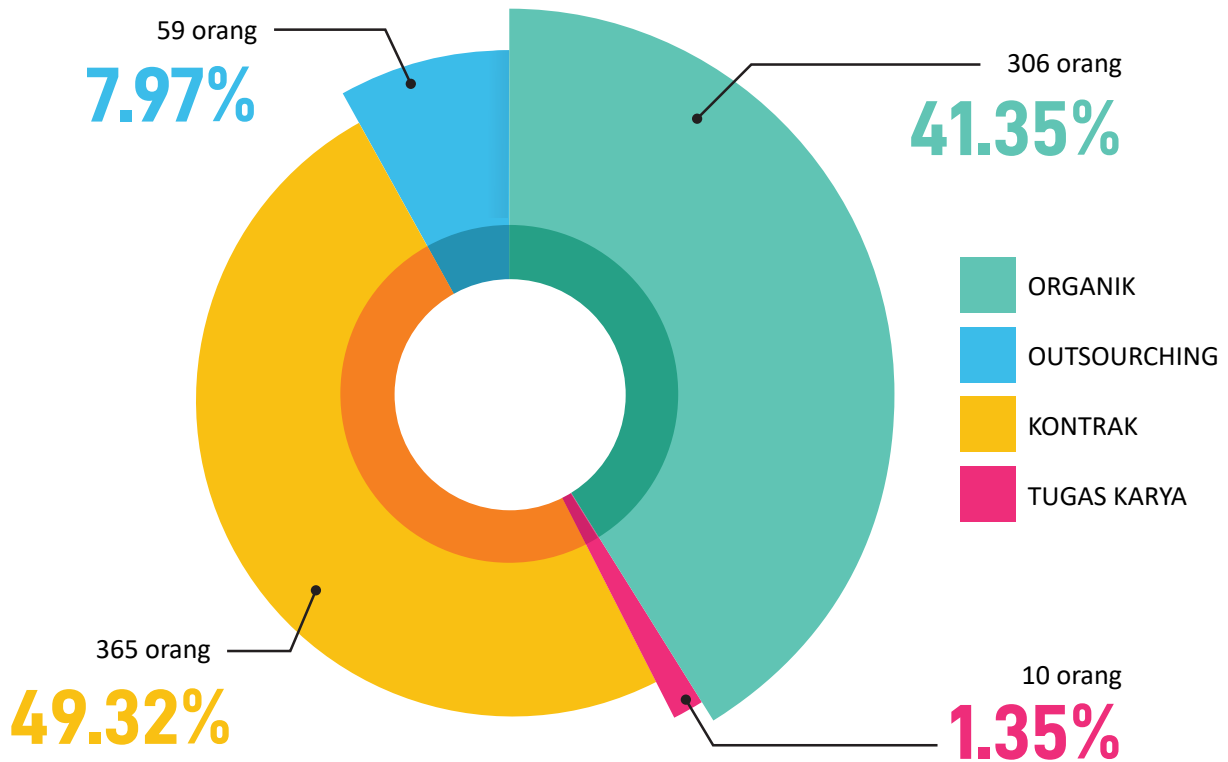
Employee Composition Based on Civil Service Status

TABEL KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

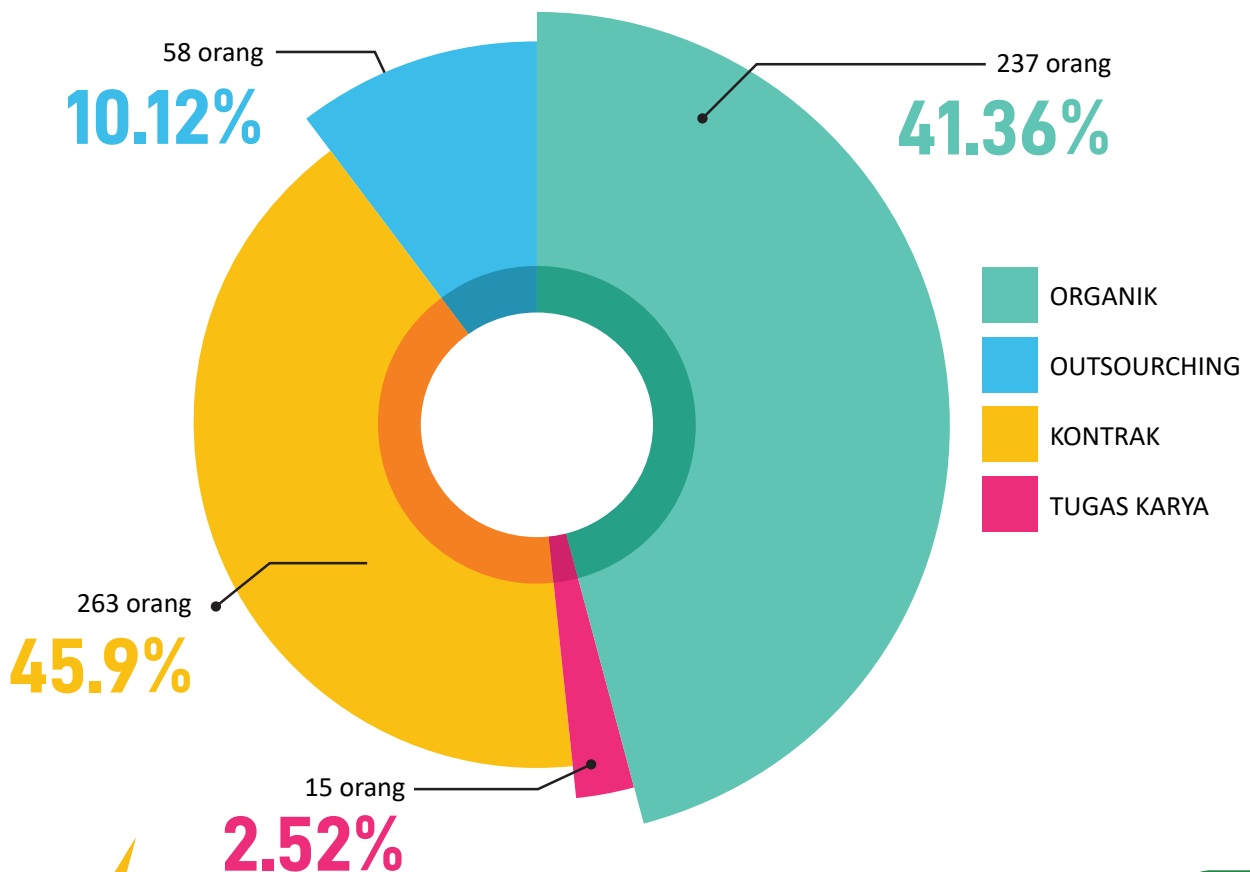
TABLE OF EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON CIVIL SERVICE STATUS

Status Kepegawaian Employment Status	Jumlah Pegawai Number of Employees				Perubahan (orang) Change (Person)	Perubahan (%) Change (%)	
	Tahun 2021 (orang) (%)	Tahun 2020 (orang) (%)	Tahun 2019 (orang) (%)				
	Year 2021 (Person) (%)	Year 2020 (Person) (%)	Year 2019 (Person) (%)				
Organik Organic	237	41.36%	41.35%	284	32.68%	-69	-22.55%
Tugas Karya Work Assignments	15	2.62%	1.35%	9	1.04%	5	50.00%
Kontrak Contract	263	45.90%	49.32%	519	59.72%	-102	-27.95%
Outsourcing Outsourcing	58	10.12%	7.97%	57	6.56%	-1	-1.69%
TOTAL	573	100%	100%	869	100%	-167	-2.19%

GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN TAHUN 2020
GRAPH OF EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON CIVIL SERVICE STATUS IN 2020



GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN TAHUN 2021
GRAPH OF EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON CIVIL SERVICE STATUS IN 2021



Komposisi karyawan PLN Enjiniring berdasarkan status kepegawaian didominasi oleh karyawan kontrak (PKWT), diikuti oleh pegawai organik, karyawan *outsourcing*, dan pegawai tugas karya. Pada 2021, komposisi karyawan kontrak (PKWT) sebesar 45,90%, pegawai Organik sebesar 41,36%, karyawan *outsourcing* sebesar 10,12%, dan pegawai tugas karya sebesar 2,52%. Besarnya dominasi karyawan kontrak di PLN Enjiniring disebabkan oleh proses bisnis perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultan enjiniring dan supervisi konstruksi, sehingga kebutuhan terhadap tenaga kerja ahli sangat tinggi, yang berbasis pada proyek, tetapi masa kerjanya tertentu. Hal ini dilakukan sebagai strategi perusahaan dalam mengefisienkan biaya kepegawaian dengan tidak memelihara tenaga kerja yang digunakan pada masa tertentu saja.

Pada tahun 2021, jumlah pegawai dengan status PKWT dan *Outsourcing* mengalami penurunan karena mengundurkan diri dan habis masa kontrak proyeknya. Sementara pegawai Organik mengalami penurunan dikarenakan adanya program optimalisasi enjinir muda dengan cara menugaskaryawan ke unit-unit PLN yang membutuhkan pengisian formasi tenaga kerja. Selain itu, terjadi penurunan jumlah pegawai Organik karena pensiun dan mengundurkan diri. Sedangkan pegawai Tugas Karya mengalami kenaikan karena adanya penambahan Tugas Karya untuk mengisi formasi jabatan struktural yang kosong dan mengisi formasi jabatan sebagai enjinir berpengalaman.

The composition of PLN Enjiniring employees based on employment status is dominated by contract employees (PKWT), followed by organic employees, outsourcing employees, and work assignments. In 2021, the composition of contract employees (PKWT) is 45.90%, Organic employees are 41.36%, outsourcing employees are 10.12%, and work-duty employees are 2.52%. The large dominance of contract employees in PLN Enjiniring caused by the company's business processes that engaged in engineering consulting services and construction supervision, so that the need for skilled workers is very high, based on the project, but a certain working period. This is conducted as a corporate strategy in streamlining staffing costs by not maintaining the workforce that is used only at certain times.

In 2021, the number of employees with PKWT and Outsourcing status has decreased due to resignations and the expiration of their project contracts. Meanwhile, Organic employees have decreased due to the optimization program for young engineers by assigning employees to PLN units that require filling in the workforce formation. In addition, there was a decrease in the number of Organic employees due to retirement and resignation. Meanwhile, the Task Force employees increased due to the addition of the Karya Karya to fill the vacant structural position formations and fill the position formations as experienced engineers.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan Organisasi

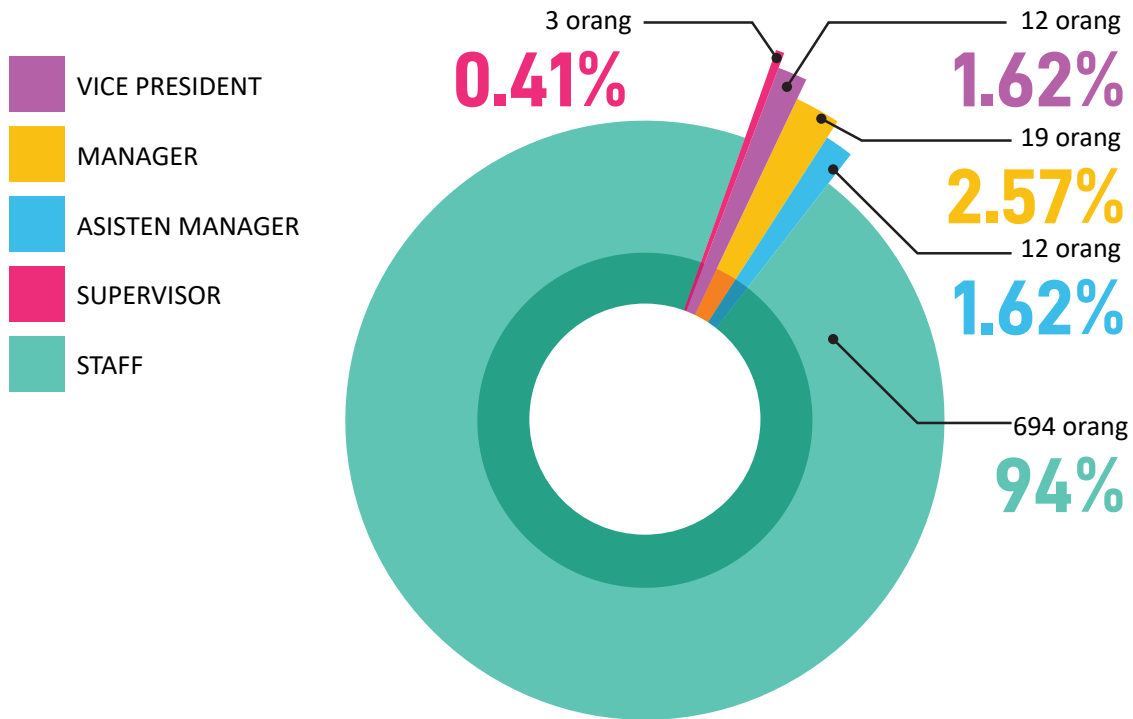
Employee Composition Based on Organization Position Levels



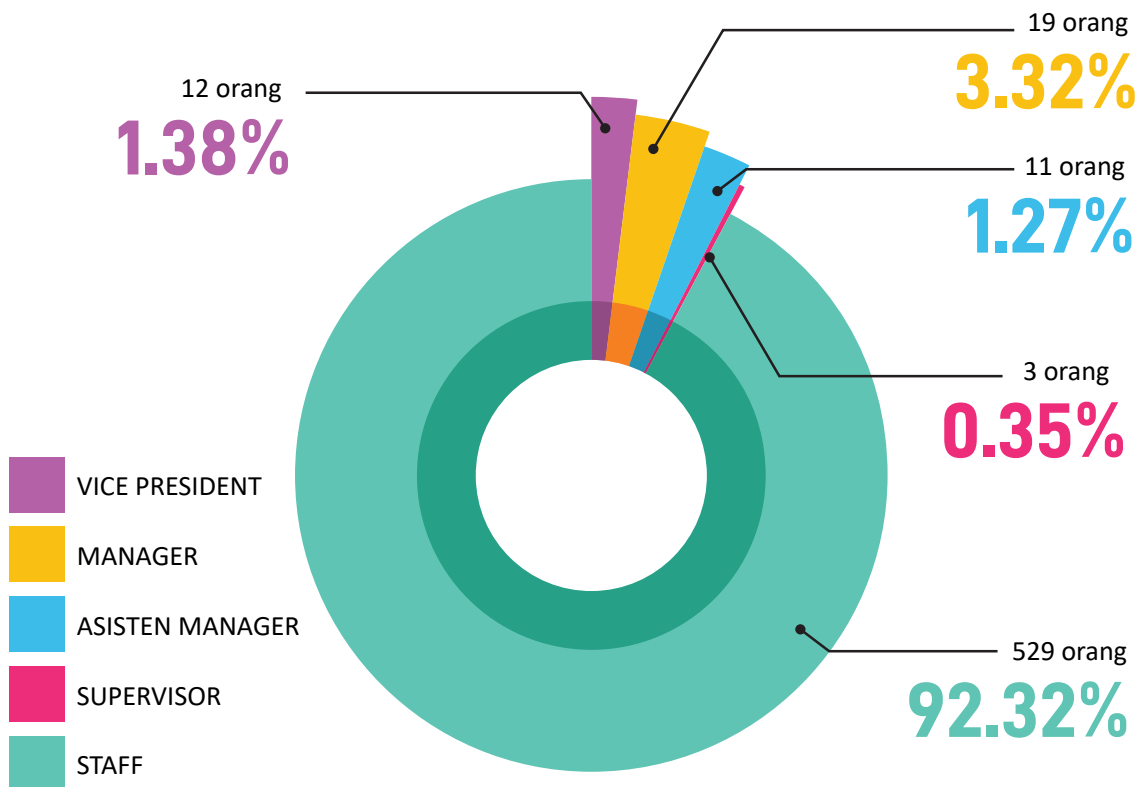
TABEL KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL JABATAN ORGANISASI
TABLE OF EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON ORGANIZATION POSITION LEVELS

Level Jabatan Organisasi <i>Organizational Position Level</i>	Jumlah Pegawai <i>Number of Employees</i>						Perubahan (orang)	Perubahan (%)
	Tahun 2021 (orang) (%)		Tahun 2020 (orang) (%)		Tahun 2019 (orang) (%)		Change (Person)	Change (%)
	<i>Year 2021 (Person) (%)</i>	<i>Year 2021 (Person) (%)</i>	<i>Year 2020 (Person) (%)</i>	<i>Year 2020 (Person) (%)</i>	<i>Year 2019 (Person) (%)</i>	<i>Year 2019 (Person) (%)</i>		
Vice President	11	1.92%	12	1.62	12	1.38	0	0.00
Manajer Sub Bidang	19	3.32%	19	2.57	18	2.07	1	5.56
Asst. Manager	12	2.09%	12	1.62	11	1.27	1	9.09
Supervisor	2	0.35%	3	0.41	3	0.35	0	0.00
Staf Fungsional	529	92.32%	694	93.78	825	94.94	-131	-15.88
TOTAL	573	100%	740	100	869	100	-129	-1.23

GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL JABATAN ORGANISASI TAHUN 2020
GRAPH OF EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON ORGANIZATIONAL POSITION LEVEL IN 2020



GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL JABATAN ORGANISASI TAHUN 2021
GRAPH OF EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON ORGANIZATIONAL POSITION LEVEL IN 2021



Komposisi karyawan PLN Enjiniring berdasarkan level organisasi secara jumlah didominasi oleh level Staf Fungsional yaitu sebesar 92,32%, selanjutnya diikuti level Manajer Sub Bidang sebesar 3,32%, Assistant Manajer sebesar 2,09%, Vice President sebesar 1,92%, dan Supervisor 0,35%. Pada tahun 2021, terdapat pengurangan jumlah karyawan pada level staf fungsional sebesar 165 orang, yang terdiri dari karyawan PKWT, karena selesainya masa kontrak proyek dan mengundurkan diri, dan pegawai Organik karena pensiun dan mengundurkan diri.

The composition of PLN Enjiniring employees based on the organizational level is dominated by the Functional Staff level, which is 92.32%, followed by the Sub-Sector Manager level at 3.32%, Assistant Manager at 2.09%, Vice President at 1.92%, and Supervisors 0.35%. In 2021, there will be a reduction in the number of employees at the functional staff level by 165 people, consisting of PKWT employees, due to the completion of the project contract period and resigning, and Organic employees due to retirement and resignation.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Pendidikan

Employee Composition Based on Education Level

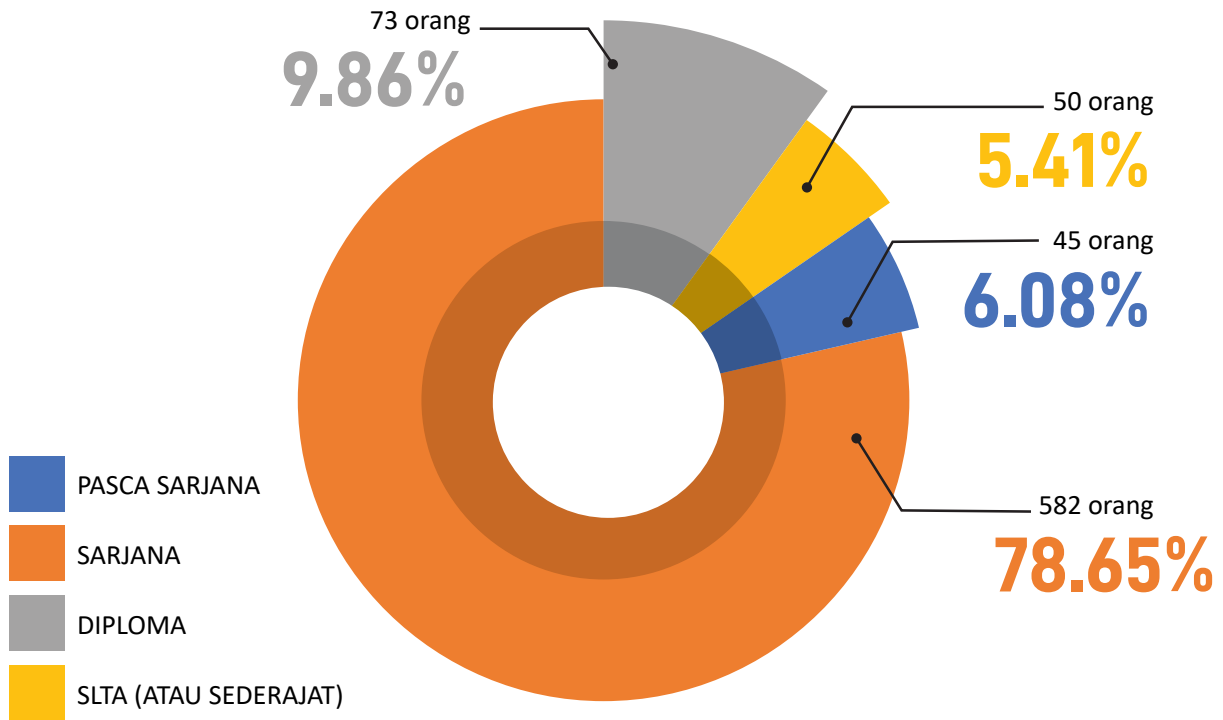


TABEL KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL PENDIDIKAN

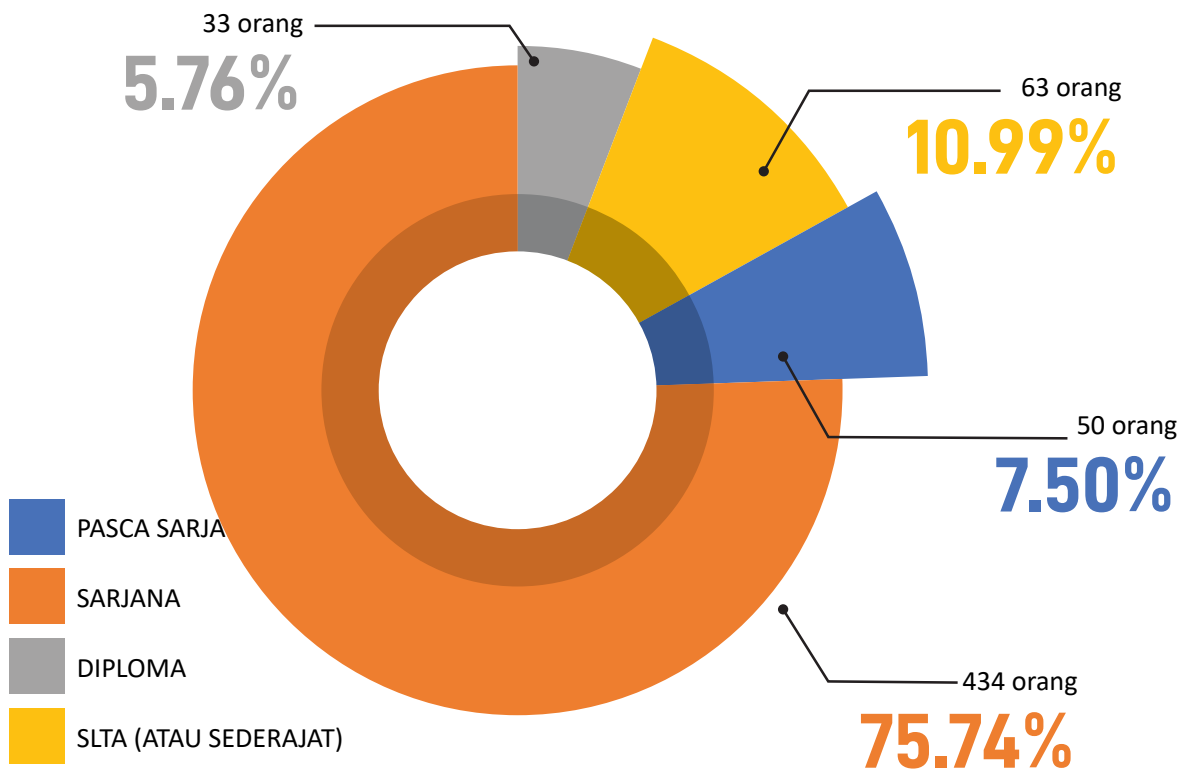
TABLE OF EMPLOYEE COMPOSITION BY EDUCATION LEVEL

Level Pendidikan Education Level	Jumlah Pegawai Number of Employees							
	Tahun 2021 (orang) (%)		Tahun 2020 (orang) (%)		Tahun 2019 (orang) (%)		Perubahan (orang)	Perubahan (%)
	Year 2021 (Person) (%)	Year 2020 (Person) (%)	Year 2020 (Person) (%)	Year 2019 (Person) (%)	Year 2019 (Person) (%)	Change (Person)	Change (%)	
Pasca Sarjana Postgraduate	43	7.50%	45	6.08%	50	5.75%	-2	-4.44%
Sarjana Bachelor	434	75.74%	582	78.65%	716	82.39%	-148	-25.43%
Diploma Diploma	33	5.76%	73	9.86%	68	7.83%	-40	-54.79%
SLTA (atau sederajat) High School (or equivalent)	63	10.99%	40	5.41%	35	4.03%	23	57.50%
TOTAL	573	100%	740	100%	869	100%	-167	-27.17%

GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL PENDIDIKAN TAHUN 2020
GRAPH OF EMPLOYEE COMPOSITION BY EDUCATION LEVEL IN 2020



GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL PENDIDIKAN TAHUN 2021
GRAPH OF EMPLOYEE COMPOSITION BY EDUCATION LEVEL IN 2021



Komposisi karyawan PLN Enjiniring berdasarkan level pendidikan didominasi oleh karyawan dengan level pendidikan Sarjana, yaitu berjumlah 75,74%, selanjutnya level pendidikan SLTA (sederajat) sebesar 10,99%, level Pasca Sarjana sebesar 7,50%, dan level Diploma sebesar 5,76%. Jumlah tenaga kerja di seluruh level pendidikan mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2020 dikarenakan perubahan komposisi karyawan mulai dari Tugas Karya, Organik, karyawan kontrak (PKWT), sampai dengan *outsourcing*.

The composition of PLN Enjiniring employees based on education level is dominated by employees with a bachelor's level of education, which is 75.74%, followed by a high school education level (equivalent) of 10.99%, a postgraduate level of 7.50%, and a Diploma level of 5.76%. The number of workers at all levels of education has changed compared to 2020 due to changes in the composition of employees ranging from work assignments, organics, contract employees (PKWT), to *outsourcing*.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Employee Composition by Age

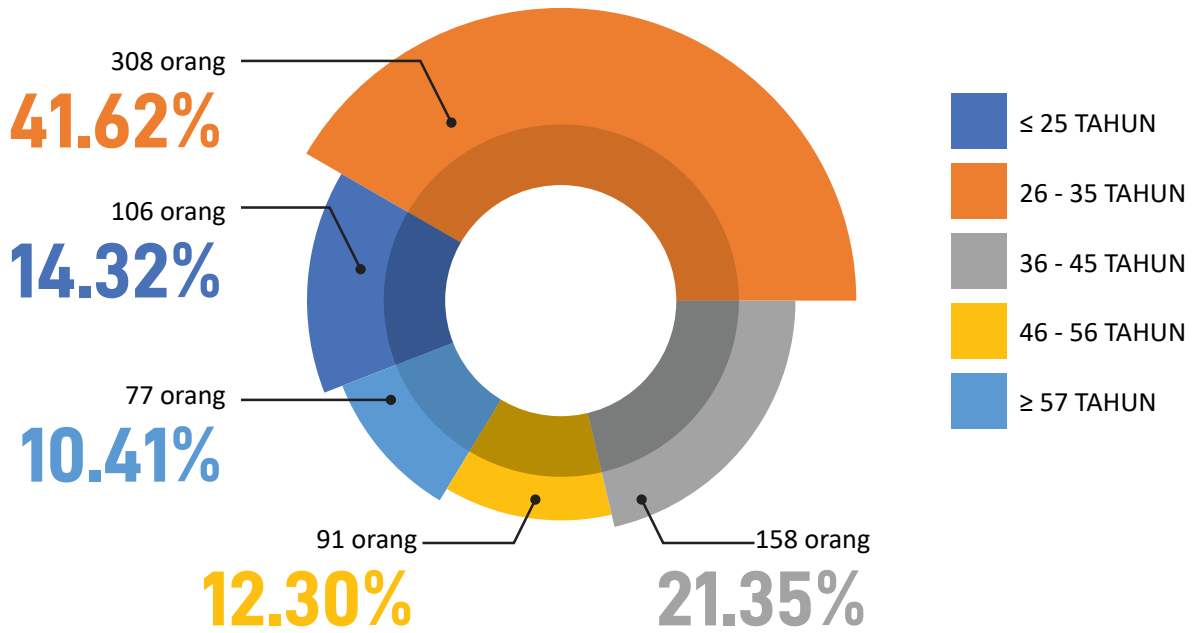


TABEL KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN USIA

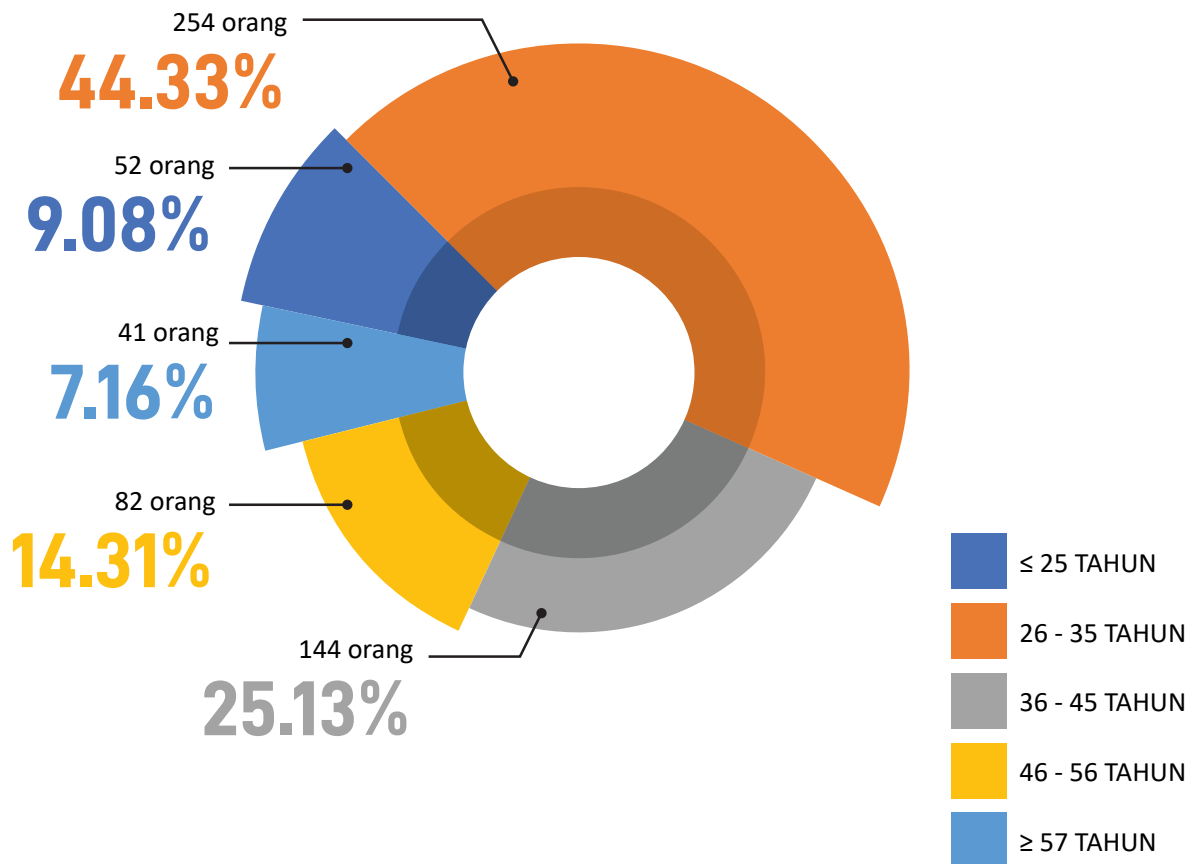
TABLE OF EMPLOYEE COMPOSITION BY AGE

Usia Age	Tahun 2021 (orang) (%) Year 2021 (Person) (%)		Tahun 2020 (orang) (%) Year 2020 (Person) (%)		Tahun 2019 (orang) (%) Year 2019 (Person) (%)		Perubahan (orang) Change (Person)	Perubahan (%) Change (%)
≤ 25 tahun ≤ 25 years	52	9.08%	106	14.32	222	25.55	-116	-52.25
26 - 35 tahun 26 - 35 years	254	44.33%	308	41.62	267	30.72	41	15.36
36 - 45 tahun 36 - 45 years	144	25.13%	158	21.35	178	20.48	-20	-11.24
46 - 56 tahun 46 - 56 years	82	14.31%	91	12.30	115	13.23	-24	-20.87
≥ 57 tahun ≥ 57 years	41	7.16%	77	10.41	87	10.01	-10	-11.49
TOTAL	573	100%	740	100	869	100	-129	-80.50

GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN USIA TAHUN 2020
GRAPH OF EMPLOYEE COMPOSITION BY AGE IN 2020



GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN USIA TAHUN 2021
GRAPH OF EMPLOYEE COMPOSITION BY AGE IN 2021



Komposisi karyawan PLN Enjiniring berdasarkan usia, paling banyak berada pada usia produktif yaitu 26-35 tahun sebesar 44,33%, selanjutnya diikuti oleh kelompok usia 36-45 tahun sebesar 25,13%, kelompok usia 46-56 tahun sebesar 14,31%, kelompok usia di bawah 25 tahun sebesar 9,08%, dan terakhir kelompok usia di atas 56 tahun yaitu sebesar 7,16%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi sedikit peningkatan jumlah dan persentase pada kelompok usia produktif 26-35 tahun. Sementara yang lainnya terjadi penurunan jumlah pada seluruh kelompok usia, mulai di bawah 25 tahun sampai dengan di atas 56 tahun.

The composition of PLN Enjiniring employees based on age, mostly in the productive age of 26-35 years at 44.33%, followed by the 36-45 year age group at 25.13%, the 46-56 year age group at 14.31%, the age group under 25 years is 9.08%, and finally the age group above 56 years is 7.16%. When compared to the previous year, there was a slight increase in the number and percentage in the productive age group of 26-35 years. Meanwhile, the number of others decreased in all age groups, ranging from below 25 years to over 56 years.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Gender

Employee Composition by Gender



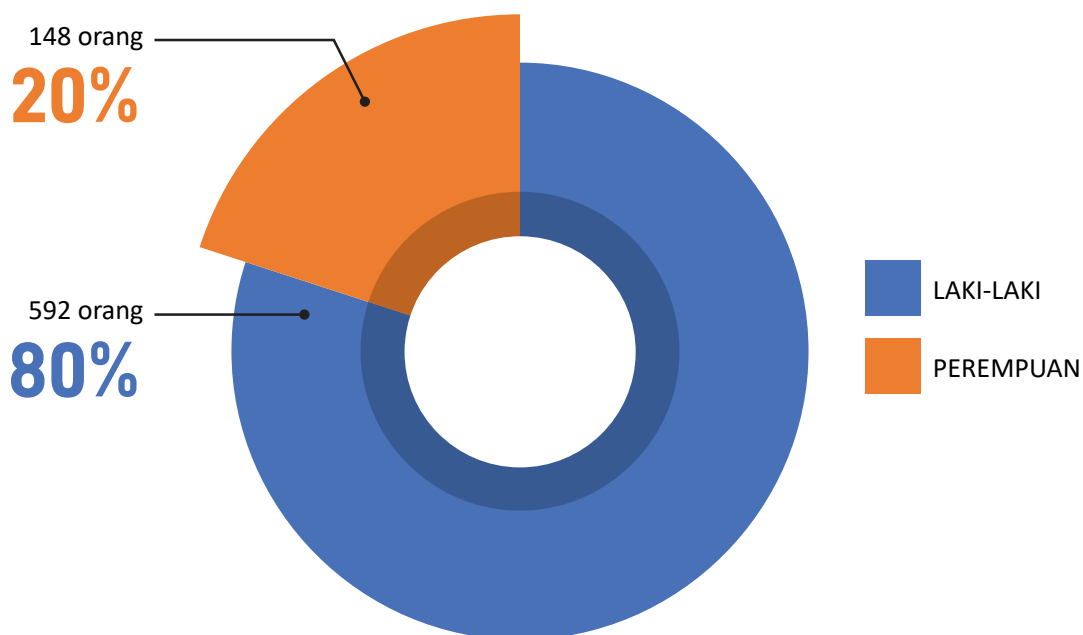
TABEL KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN GENDER

TABLE OF EMPLOYEE COMPOSITION BY GENDER

Jenis Kelamin Gender	Jumlah Pegawai Number of Employees						Perubahan (orang) Change (Person)	Perubahan (%) Change (%)
	Tahun 2021 (orang) (%) Year 2021 (Person) (%)	Tahun 2020 (orang) (%) Year 2020 (Person) (%)	Tahun 2019 (orang) (%) Year 2019 (Person) (%)	Tahun 2019 (orang) (%) Year 2019 (Person) (%)	Tahun 2019 (orang) (%) Year 2019 (Person) (%)	Tahun 2019 (orang) (%) Year 2019 (Person) (%)		
Laki-laki Male	476	83.07%	592	80.00	715	82.28	-123	-17.20
Perempuan Female	97	16.93%	148	20.00	154	17.72	-6	-3.90
TOTAL	573	100%	740	100.00	869	100	223	-21.10

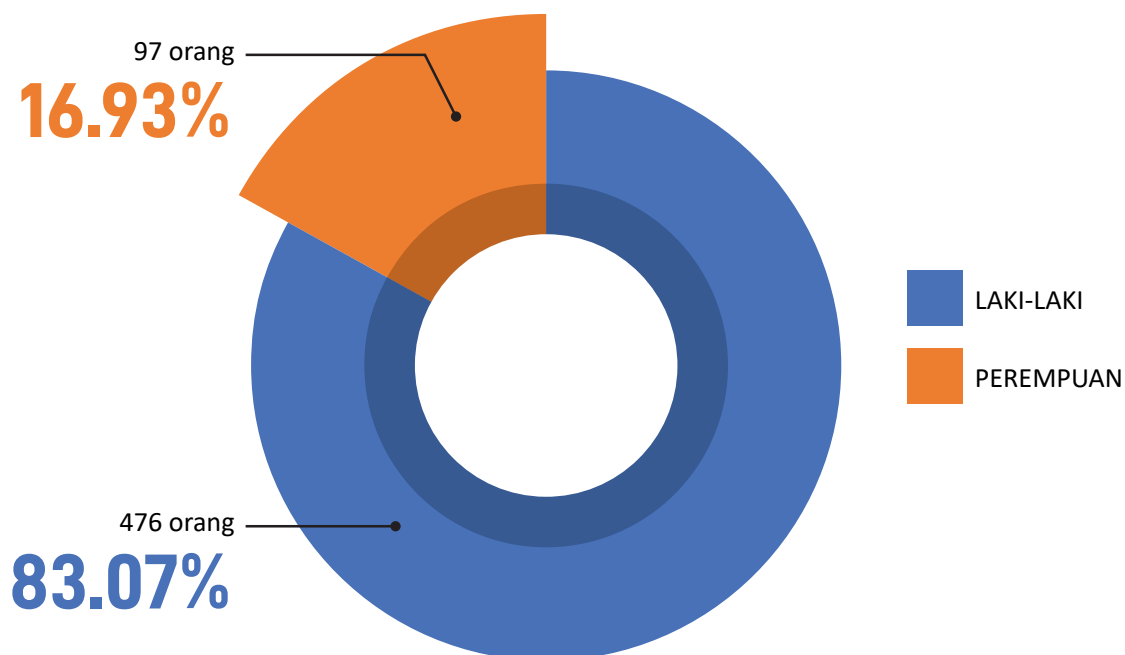
GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN GENDER TAHUN 2020

GRAPH OF EMPLOYEE COMPOSITION BY GENDER IN 2020



GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN GENDER TAHUN 2021

GRAPH OF EMPLOYEE COMPOSITION BY GENDER IN 2021



Komposisi karyawan PLN Enjiniring berdasarkan gender didominasi oleh pegawai laki-laki yaitu sebesar 83,07%, sedangkan pegawai perempuan sebesar 16,93%. Secara jumlah, terjadi penurunan jumlah baik karyawan laki-laki maupun perempuan. Penurunan terjadi karena penurunan jumlah karyawan PLN Enjiniring dibanding tahun 2020. PLN Enjiniring memberikan kesempatan yang sama bagi calon karyawan laki-laki maupun perempuan pada saat pelaksanaan rekrutmen, namun berdasarkan bidang usaha dan jenis pekerjaan maka jumlah karyawan lebih banyak didominasi oleh karyawan laki-laki.

The composition of PLN Enjiniring employees based on gender is dominated by male employees, namely 83.07%, while female employees are 16.93%. In terms of numbers, there was a decrease in the number of both male and female employees. The decrease occurred due to a decrease in the number of PLN Enjiniring employees compared to 2020. PLN Enjiniring provides equal opportunities for male and female prospective employees at the time of recruitment, but based on the field of business and type of work, the number of employees is dominated by male employees.

BIAYA TENAGA KERJA

Biaya Gaji dan Kesejahteraan Karyawan yang dikeluarkan oleh PLN Enjiniring pada 2021 mencapai Rp. 111.218.946.525. Besarnya biaya gaji dan kesejahteraan karyawan ini meningkat sebesar 15% atau sebesar Rp 14.744.596.577 jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan pada tahun 2020, yaitu sebesar Rp 96.474.349.948. Hal ini dapat disebabkan karena terisinya formasi jabatan struktural oleh pegawai Tugas Karya yang berdampak pada biaya gaji, serta banyaknya pegawai Organik yang telah bekeluarga dan masih terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak pada anggaran biaya pemeliharaan kesehatan.

LABOR COSTS

2021 to reach Rp. 111,218,946,525. The amount of salary and employee welfare costs increased by 15% or Rp. 14,744,596,577 when compared to the costs incurred in 2020, which was Rp. 96,474,349,948. This can be due to the filling of structural position formations by Task Force employees which has an impact on salary costs, as well as the large number of Organic employees who are married and the Covid-19 pandemic is still happening which has an impact on the health care budget.

TINGKAT TURNOVER PEGAWAI

Tingkat turnover Pegawai menunjukkan *level of engagement* Pegawai dalam sebuah perusahaan, dimana semakin rendah tingkat *turnover* Pegawai menunjukkan bahwa Pegawai memiliki *level of engagement* yang tinggi terhadap perusahaan. Selama 5 (lima) tahun terakhir tingkat *turnover* karyawan pada PLN Enjiniring relatif fluktuatif. Pada tahun 2017 tingkat turnover 0%. Tetapi pada 2 tahun berturut-turut yaitu 2018-2019 terjadi turnover Pegawai sebesar 1,71% dan 1,06%. Sementara pada tahun 2020 tingkat turnover kembali ke persentase 0%. Pada tahun 2021 terjadi turnover Pegawai tertinggi, yaitu 2,11%, dimana tercatat ada 5 orang Pegawai keluar/resign. Selain itu, pada tahun 2021 terdapat 4 orang pegawai Organik pensiun dan 60 orang pegawai Organik melaksanakan Tugas Karya. Jumlah *turnover* didasarkan atas jumlah Pegawai dengan status kepegawaian Organik atau Pegawai tetap dan dapat dilihat pada tabel di bawah.

TURNOVER OF EMPLOYEES

Employee turnover rate shows the level of employee engagement in a company, where the lower employee turnover rate shows that employees have a high level of engagement towards the company. During the last 5 (five) years the employee turnover rate at PLN Enjiniring relatively volatile. In 2017 the turnover rate was 0%. But in 2 consecutive years, 2018-2019, there was an employee turnover of 1.71% and 1.06%. Meanwhile, in 2020 the turnover rate will return to 0%. In 2021, the highest employee turnover occurred, namely 2.11%, where there were 5 employees who left/resigned. In addition, in 2021 there will be 4 retired Organic employees and 60 Organic employees carrying out Work Tasks.. Turnover is based on the number of Employees with Organic employment status can be seen in the table below.

Keterangan	Tahun					
	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Jumlah Pegawai di Awal Periode	305	284	175	158	133	104
Jumlah Pegawai Masuk	1	23	115	25	25	29
Jumlah Pegawai Keluar (<i>resign</i>)	5	0	3	3	0	0
Jumlah Pegawai Keluar (tugas karya/tugas belajar)	60	0	1	4	0	0
Jumlah Pegawai Keluar (pensiun)	4	1	2	1	0	0
Jumlah Pegawai di Akhir Periode	237	306	284	175	158	133
<i>Turnover</i>	5	0	3	3	0	0
% Turnover	2.11%	0.00%	1.06%	1.71%	0.00%	0.00%



Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Implementation of Corporate Governance

Pengelolaan Perseroan berdasarkan prinsip GCG pada dasarnya merupakan upaya untuk menjadikan GCG sebagai kaidah dan pedoman bagi pengelola perseroan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Penerapan prinsip-prinsip GCG saat ini sangat diperlukan agar Perseroan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. GCG diharapkan merupakan sarana untuk mencapai tujuan Perseroan secara lebih baik antara lain dengan mendorong efisiensi pengelolaan Perseroan dan meningkatkan disiplin anggaran, mendayagunakan pengawasan serta menghambat praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme atau gratifikasi.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu proses dan mekanisme yang digunakan oleh Perseroan untuk mewujudkan dan/atau mendorong nilai Perseroan (corporate value) dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham (shareholders) dan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk kelangsungan usaha (sustainability) Perseroan dalam jangka pendek dan jangka Panjang. Sehingga dalam memenuhi tuntutan perubahan perlu diimbangi dengan penerapan GCG secara berkesinambungan dan konsisten berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral, etika. Perseroan melakukan penyempurnaan Panduan GCG dengan menyesuaikan kondisi internal dan eksternal Perseroan agar terintegrasi dan mengikuti perkembangan regulasi GCG maupun best practice yang berlaku.

The management of the Company based on the principles of GCG is basically an effort to make GCG as the rules and guidelines for company managers in carrying out their business activities. The application of GCG principles is currently very necessary so that the Company can survive and be resilient in the face of increasingly fierce competition. GCG is expected to be a means to better achieve the Company's goals, among others, by encouraging the efficiency of the Company's management and increasing budgetary discipline, utilizing supervision and inhibiting the practices of corruption, collusion and nepotism or gratification.

Good Corporate Governance (GCG) is a process and mechanism used by the Company to realize and/or promote corporate value by taking into account the interests of shareholders and stakeholders for the Company's business continuity in the long term, short and long term. So that in meeting the demands of change, it needs to be balanced with the implementation of GCG in a sustainable and consistent manner based on laws and regulations, morals, ethics. The Company made improvements to the GCG Guidelines by adjusting the Company's internal and external conditions so that they are integrated and follow the development of GCG regulations and applicable best practices.

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

PURPOSE, OBJECTIVES AND OBJECTIVES OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

MAKSUD PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

PURPOSE OF IMPLEMENTING GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Adapun maksud dari penerapan Tata Kelola Perusahaan ini adalah :

The purposes of implementing this Corporate Governance are:

1. Memaksimalkan keberadaan Perseroan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, bertanggung jawab, independen dan adil agar Perseroan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kinerja Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham.
3. Mendorong agar pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perseroan terhadap pihak yang berkepentingan (stakeholder) maupun lingkungan Perseroan.

1. *Maximizing the existence of the Company for shareholders by increasing the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness so that the Company has strong competitiveness, both nationally and internationally.*
2. *Encouraging the management of the Company in a professional, transparent and efficient manner, as well as empowering the functions and improving the performance of the Board of Commissioners, Directors and Shareholders.*
3. *Encouraging shareholders, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors in making decisions and carrying out actions based on high moral values and compliance with applicable laws and regulations as well as awareness of the Company's social responsibility towards interested parties (stakeholders) and the environment Company.*

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Adapun tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan adalah :

1. Memberikan keyakinan kepada pemegang saham, bahwa Perseroan dikelola secara baik dan benar dengan tujuan agar memberikan "return" yang wajar dan bernilai tinggi;
2. Mendorong terhadap pencapaian visi dan misi Perseroan;
3. Mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan sumberdaya dan pengelolaan risiko Perseroan secara lebih hati-hati (prudent), akuntabel, dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip-prinsip GCG;
4. Menciptakan nilai tambah Perseroan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan;
5. Mendorong terciptanya budaya kerja Perseroan ke arah yang lebih baik;
6. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan.

PURPOSE OF IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

The objectives of the Implementation of Good Corporate Governance are:

1. *Provide confidence to shareholders that the Company is managed properly and correctly with the aim of providing a reasonable and high-value "return";*
2. *Encouraging the achievement of the Company's vision and mission;*
3. *Encourage and support the development, resource management and risk management of the Company in a more prudent, accountable, and responsible manner in line with GCG principles;*
4. *Creating added value for the Company for shareholders and stakeholders;*
5. *Encouraging the creation of a better working culture for the Company;*
6. *Preventing irregularities in the management of the Company*

SASARAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Adapun sasaran Penerapan Tata Kelola Perusahaan adalah :

1. Terlaksananya sistem manajemen strategis yang handal, sehingga mampu merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang sejalan dengan rencana strategis (strategic plna) Perseroan baik jangka pendek maupun jangka Panjang;
2. Adanya keterbukaan serta Komunikasi dua arah baik dengan regulator, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya;
3. Berfungsinya dengan baik organ-organ pendukung kegiatan pengendalian internal dan pengembangan Perseroan, antara lain Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan GCG, Komite Nominasi dan Remunerasi, Internal Audit, Manajemen Risiko, Sekretaris Perusahaan, dan sebagainya;
4. Tegaknya komitmen dan aturan main dari praktik penyelenggaraan bisnis yang beretika;
5. Tersedianya sumber daya manusia yang andal, unggul, profesional dan bebas dari benturan kepentingan;
6. Memastikan seluruh jajaran Perseroan mengetahui dan mampu menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku serta mengetahui punishment dan reward nya;
7. Tegaknya kepedulian pada masyarakat sekitar dan pada kelestarian lingkungan melalui penerapan program CS yang tepat di area sekitar lingkungan Perseroan.

TARGETS FOR THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

The targets for implementing good corporate governance are:

1. Implementation of a reliable strategic management system, so as to be able to formulate Vision, Mission, Objectives and Targets that are in line with the Company's strategic plan (strategic plna) both short term and long term;
2. Openness and two-way communication with regulators, shareholders and other stakeholders;
3. Well functioning of the supporting organs of the Company's internal control and development activities, including the Audit Committee, Risk Management Committee and GCG, Nomination and Remuneration Committee, Internal Audit, Risk Management, Corporate Secretary, and so on;
4. Upholding of commitments and rules of the game from ethical business practices;
5. Availability of human resources that are reliable, superior, professional and free from conflicts of interest;
6. Ensure that all levels of the Company know and are able to carry out their duties, obligations and responsibilities in accordance with applicable regulations and know the punishments and rewards;
7. Upholding concern for the surrounding community and environmental sustainability through the implementation of appropriate CS programs in the area surrounding the Company's environment.

DASAR HUKUM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam melaksanakan penerapan GCG, PLN Enjiniring menyadari bahwa Kebijakan GCG selain menjadi acuan yang wajib diterapkan oleh Perusahaan telah menjadi instrument yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, Perusahaan

LEGAL BASIS FOR IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

In implementing the implementation of GCG, PLN Enjiniring realizes that the GCG Policy, apart from being a reference that must be applied by the Company, has become an instrument needed to ensure that the management of the company runs well in accordance with applicable regulations. Therefore,

menerapkan GCG pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan terkait dengan pelaksanaan GCG bagi Perusahaan. Dasar penerapan GCG di Perseroan mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU Dokumen Perusahaan)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Umum Milik Negara j.o. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara j.o Peraturan Menteri Badan usaha Milik Negara Nomor Per-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan usaha Milik Negara Nomor Per-03/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;

the Company implements GCG at all levels and levels of the organization by referring to the provisions and regulations related to the implementation of GCG for the Company. The basis for implementing GCG in the Company refers to:

1. *Law Number 8 of 1997 concerning Company Documents (Company Documents Law)*
2. *Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption j.o Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption (Corruption Law)*
3. *Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;*
4. *Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions;*
5. *Law number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure;*
6. *Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Public Agencies j.o. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises ;*
7. *Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises Number Per-03/MBU/2012 concerning Guidelines for Appointing Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of Subsidiaries of State-Owned Enterprises j.o Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number Per-04/MBU/06/2020 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises Number Per-03/MBU/2012 concerning Guidelines for Appointing Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of Subsidiaries of State-Owned Enterprises;*



8. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha j.o Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
9. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;
10. Anggaran Dasar PT PLN Enjiniring beserta perubahannya;
11. Keputusan Direksi PT PLN Enjiniring Nomor 14.001.K/DIR/PLNE/XI/2017, tanggal 14 November 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Jabatan PT PLN Enjiniring;
12. Keputusan Direksi PT PLN Enjiniring No. 02.006.K/DIR/PLNE/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan PT PLN Enjiniring;
13. Keputusan Direksi PT PLN Enjiniring No. 28.002.K/DIR/PLNE/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019 tentang Kebijakan Umum Penerapan Tata Kelola Manajemen Risiko dan Kepatuhan/Governance, Risk dan Compliance (GRC) di Lingkungan PLN Enjiniring;
14. Keputusan Direksi PT PLN Enjiniring No. 12.002.K/DIR/PLNE/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019 tentang Kebijakan Anti Fraud di Lingkungan PT PLN Enjiniring;
15. Keputusan Direksi Nomor 01.007.K/DIR/PLNE/IV/2020 tanggal 1 April 2021 tentang Mekanisme Penyusunan dan Pemantauan Kajian Risiko Untuk Kegiatan dan Rancangan Keputusan di Lingkungan PT PLN Enjiniring;
16. Keputusan Direksi Nomor 10.001.K/DIR/PLNE/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Budaya Perusahaan.

8. Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Business Entity Supervisory Board j.o Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises No. PER-06/MBU/04/2021 concerning Amendment to Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises.
9. Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Parameter Indicators for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;
10. Articles of Association of PT PLN Enjiniring and its amendments;
11. Decree of the Board of Directors of PT PLN Enjiniring Number 14.001.K/DIR/PLNE/XI/2017, dated November 14, 2017 concerning the Organizational Structure and Main Duties of PT PLN Enjiniring;
12. Decree of the Board of Directors of PT PLN Enjiniring No. 02.006.K/DIR/PLNE/XII/2019 dated December 2, 2019 concerning Management of Conflicts of Interest within PT PLN Enjiniring;
13. Decree of the Board of Directors of PT PLN Enjiniring No. 28.002.K/DIR/PLNE/X/2019, October 28, 2019 regarding the General Policy for the Implementation of Risk Management and Compliance/Governance, Risk and Compliance (GRC) in the PLN Enjiniring Environment;
14. Decree of the Board of Directors of PT PLN Enjiniring No. 12.002.K/DIR/PLNE/XII/2019, December 12, 2019 regarding the Anti-Fraud Policy within PT PLN Enjiniring;
15. Decision of the Board of Directors Number 01.007.K/DIR/PLNE/IV/2020 dated April 1, 2021 concerning the Mechanism of Preparation and Monitoring of Risk Studies for Activities and Draft Decisions within PT PLN Enjiniring;
16. Decision of the Board of Directors Number 10001.K/DIR/PLNE/XII/2020 dated December 10, 2020 regarding Corporate Culture.

STRUKTUR GCG

GCG STRUCTURE

ORGAN PERSEROAN

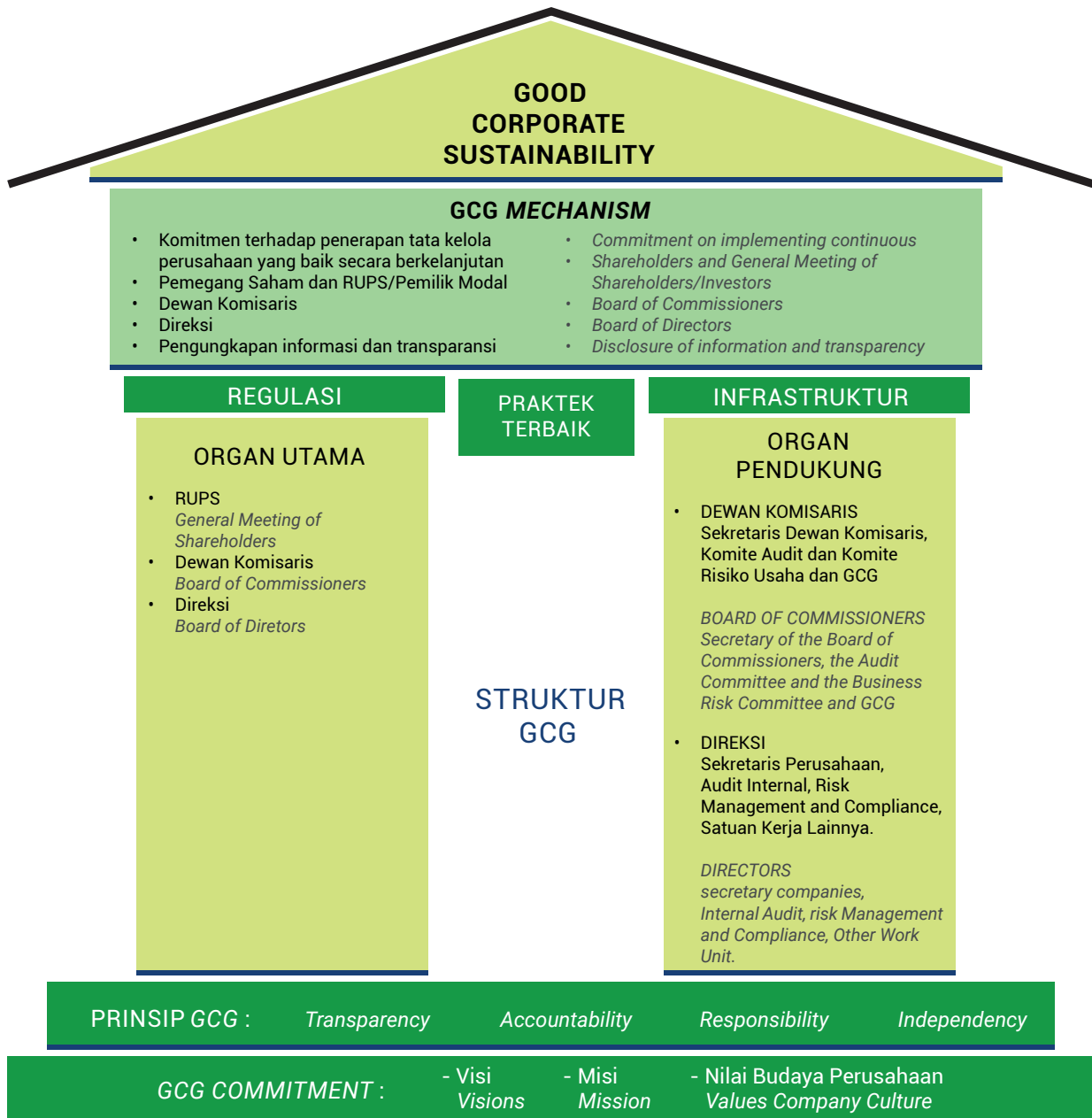
Organ Perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Organ Perseroan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan Perseroan.

Prinsip-prinsip GCG senantiasa disosialisasikan keseluruhan elemen Perusahaan sebagai salah satu cara menyadarkan seluruh elemen Perusahaan akan nilai-nilai yang harus dipenuhi untuk mencapai praktik GCG. Internalisasi dari berbagai peraturan perundang-undangan dan pedoman di atas ke dalam kebijakan internal Perusahaan merupakan komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi dan seluruh karyawan. Berdasarkan asas-asas GCG, PLN Enjiniring mengembangkan struktur GCG yang meliputi GCG Organ Utama dan Organ Pendukung guna menjalankan mekanisme GCG sesuai peraturan perundang-undangan serta best practices yang ada sehingga tercipta kesinambungan usaha dalam jangka Panjang. Komitmen Perusahaan terhadap penerapan GCG ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.

COMPANY ORGANS

The Company's organs, which consist of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors, have an important role in the effective implementation of GCG. The Company's organs must carry out their functions in accordance with applicable regulations based on the principle that each organ has independence in carrying out its duties, functions and responsibilities solely for the benefit of the Company.

The principles of GCG are continuously socialized to all elements of the Company as a way to make all elements of the Company aware of the values that must be met in order to achieve GCG practices. The internalization of the various laws and regulations and guidelines above into the Company's internal policies is a commitment from the Board of Commissioners and Directors and all employees. Based on the principles of GCG, PLN Enjiniring has developed a GCG structure which includes GCG Main Organs and Supporting Organs to carry out GCG mechanisms in accordance with laws and regulations as well as existing best practices so as to create business continuity in the long term. The Company's commitment to the implementation of GCG is shown in the image below.

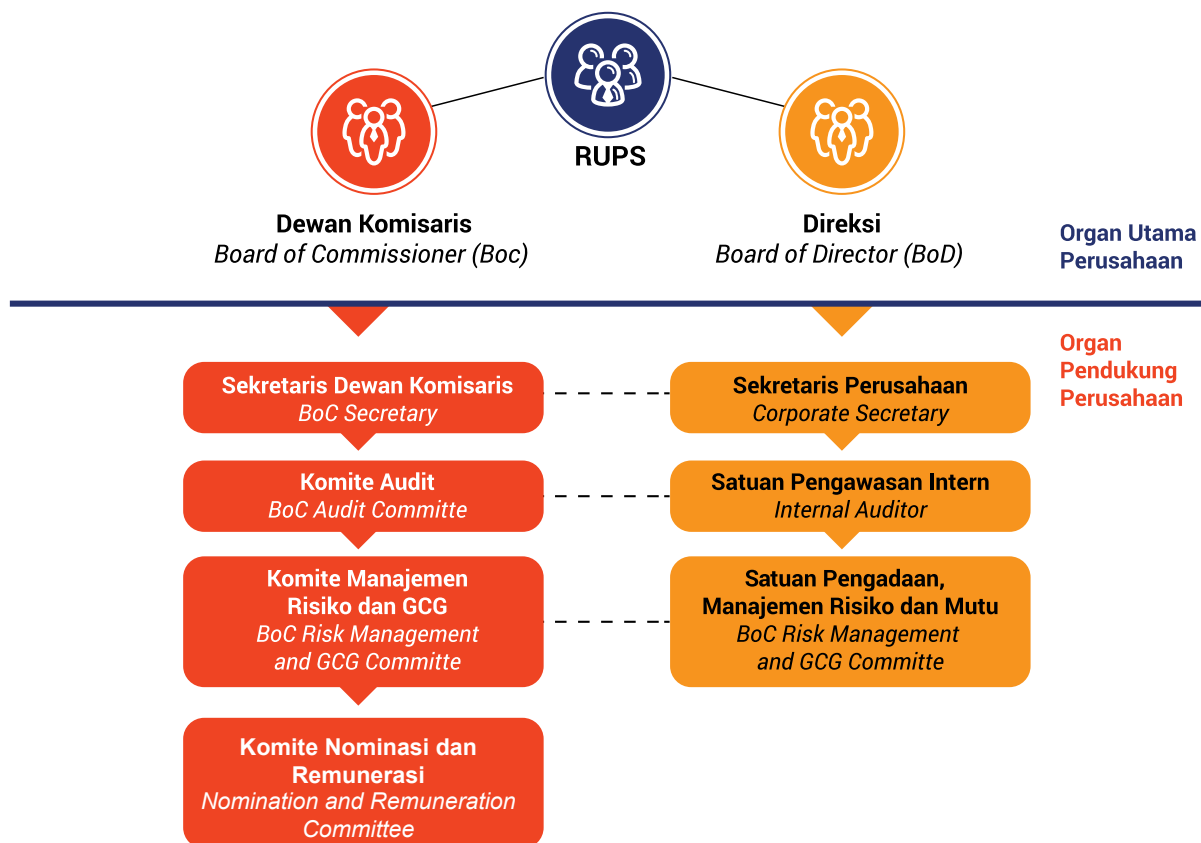


Sebagai infrastruktur pendukung dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, di bawah Dewan Komisaris telah dibentuk Komite Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris. Demikian juga dibawah Direksi dibentuk unit kerja yang bertanggung jawab dalam implementasi GCG serta menjadi mitra kerja dari Komite Dewan Komisaris.

As a supporting infrastructure in carrying out its duties and responsibilities, under the Board of Commissioners a Committee of the Board of Commissioners and the Secretary of the Board of Commissioners have been formed. Likewise, under the Board of Directors a work unit is formed which is responsible for implementing GCG and becomes a working partner of the Committee of the Board of Commissioners.

Struktur Tata Kelola Perusahaan di PLN Enjiniring dapat dilihat pada gambar berikut ini :

The structure of Corporate Governance at PLN Enjiniring can be seen in the following figure:



Setiap Organ Perusahaan memiliki peranan penting dalam penerapan GCG dengan menjalankan fungsi hak dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan meliputi fungsi pembuatan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan.

Each Company Organ has an important role in the implementation of GCG by carrying out its rights and responsibilities for the benefit of the Company including the functions of policy making, implementation and supervision.

RUPS merupakan organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Kewenangan RUPS, bentuk dan luasannya ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Para Pemegang Saham memiliki kewenangan utama untuk memperoleh informasi mengenai Perseroan baik dari Direksi maupun Dewan Komisaris sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menyusun kebijakan strategis Perseroan. Dewan Komisaris sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menyusun kebijakan strategis Perseroan. Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab penuh dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi baik atas kebijakan Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan sesuai amanah yang diberikan. Kewenangan yang dimiliki Direksi secara tak terbatas dan tak bersyarat selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Anggaran Dasar serta Keputusan RUPS

The GMS is an organ of a Limited Liability Company that has exclusive authority which is not granted to the Board of Directors and the Board of Commissioners. The authority of the GMS, its form and extent are determined in the Limited Liability Company Law and the Company's Articles of Association. Shareholders have the main authority to obtain information about the Company from both the Board of Directors and the Board of Commissioners as the basis for making decisions in formulating the Company's strategic policies. The Board of Commissioners is the basis for making decisions in formulating the Company's strategic policies. The Board of Commissioners has full responsibility in supervising the management of the Company which is carried out by the Board of Directors both at the discretion of the Board of Directors in managing the Company. The Board of Directors is fully responsible for the management of the Company in accordance with the mandate given. The authority of the Board of Directors is unlimited and unconditional as long as it does not conflict with the Law and the Articles of Association and the GMS Resolutions.

PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan menetapkan Direktur Keuangan dan SDM sebagai Penanggung Jawab Penerapan GCG di lingkungan PLN Enjiniring dan untuk mengelola pelaksanaan program-program GCG yang telah direncanakan dikelola oleh Sekretaris Perusahaan.

Perseroan membentuk Tim Penerapan GCG guna memaksimalkan pemantauan dan mengukur sejauh mana efektivitas program-program GCG dijalankan oleh Perusahaan. Kunci keberhasilan penerapan GCG di Perseroan menitikberatkan kepada :

17. Penerapan Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku guna memastikan pengelolaan perusahaan telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
18. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan tata kelola perusahaan agar dapat terselenggara dengan baik dan terdokumentasikan dengan baik di setiap Bidang;
19. Melakukan evaluasi, koordinasi dan memantau pelaksanaan kebijakan/proses bisnis perusahaan agar sesuai dengan ketentuan yang ada;
20. Memonitor melakukan evaluasi dan mendorong pelaksanaan kegiatan penerapan Kode Etik Perseroan telah dilakukan dengan baik diseluruh kegiatan Perseroan;
21. Memonitor melakukan evaluasi dan mendorong pelaksanaan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) telah dilakukan dengan baik dan sesuai.

RESPONSIBLE FOR IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

The Company has appointed the Director of Finance and HR as the Person in Charge of GCG Implementation within PLN Enjiniring and to manage the implementation of GCG programs that have been planned to be managed by the Corporate Secretary.

The Company formed a GCG Implementation Team to maximize monitoring and measure the effectiveness of the Company's GCG programs. The key to the successful implementation of GCG in the Company focuses on:

1. *Implementation of compliance with applicable laws and regulations to ensure that the management of the company is in accordance with the applicable laws and regulations;*
2. *Directing and controlling corporate governance activities so that they can be well implemented and well documented in each field;*
3. *Evaluating, coordinating and monitoring the implementation of the company's business policies/ processes to comply with existing regulations;*
4. *Monitoring, evaluating and encouraging the implementation of the Company's Code of Ethics implementation activities that have been carried out properly throughout the Company's activities;*
5. *Monitoring, evaluating and encouraging the implementation of Good Corporate Governance practices that have been carried out properly and appropriately.*

TAHAPAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

PLN Enjiniring menyusun strategi dan rencana kerja penerapan kebijakan GCG untuk mencapai tujuan yang akan dicapai perusahaan. Sebagai bentuk komitmen PLN Enjiniring terhadap penerapan GCG, perusahaan berusaha memenuhi ketentuan dari setiap tahapan penerapan GCG. Tahapan penerapan GCG ini memiliki fungsi sebagai acuan dalam menyempurnakan penerapan GCG PLN Enjiniring dan menjadi media antara rencana kerja dengan rencana strategi.

STAGES OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

PLN Enjiniring prepares strategies and work plans for implementing GCG policies to achieve the goals to be achieved by the company. As a form of PLN Enjiniring's commitment to the implementation of GCG, the company strives to comply with the provisions of each stage of GCG implementation. This stage of GCG implementation has a function as a reference in perfecting PLN Enjiniring's GCG implementation and becomes a medium between work plans and strategic plans.



ROAD MAP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sebagai panduan dalam penerapan GCG, Perseroan menyusun Roadmap GCG sebagai bagian dari perencanaan strategis dalam implementasi GCG secara berkelanjutan. Roadmap CGC menggambarkan tahapan-tahapan yang akan dicapai terkait dengan penerapan GCG dalam jangka panjang secara konsisten dan berkesinambungan.

CORPORATE GOVERNANCE ROAD MAP

As a guide in the implementation of GCG, the Company prepares a GCG Roadmap as part of strategic planning in implementing GCG in a sustainable manner. The CGC Roadmap describes the stages to be achieved related to the consistent and sustainable implementation of GCG in the long term.

GCG ROADMAP 2008-2022



Pada saat ini, PLN Enjiniring telah berada pada fase Good Governance Conformance yang secara berkelanjutan dan berkesinambungan terus melakukan internalisasi implementasi prinsip-prinsip GCG dan melengkapi soft structure dan memutakhirnya pedoman yang ada. Perusahaan berupaya menerapkan prinsip-prinsip GCG pada semua proses bisnis dengan didukung oleh tersedianya pedoman perusahaan dari tingkat

At this time, PLN Enjiniring is in the Good Governance Conformance phase which continuously and continuously continues to internalize the implementation of GCG principles and complete the soft structure and update existing guidelines. The company seeks to apply the principles of GCG in all business processes, supported by the availability of company guidelines from the top management level to the operational level

manajemen puncak hingga tingkat operasional dan terintegrasi antara rencana kerja dengan rencana strategis guna mencapai tujuan akhir tahapan penerapan GCG pada face Good Corporate Citizen.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Perusahaan guna mendukung fase Good Corporate Governance antara lain adalah :

1. Implementasi program PLNE Bersih dan Berintegritas dengan kegiatan : Multistakeholder Forum (collective action), Pengendalian Gratifikasi Pelaporan LHKPN.
2. Melakukan review dan penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik edisi 3 (Pedoman GCG) , dan Buku Panduan bagi Dekom dan Direksi (Board Manual) khusus untuk organ utama dalam struktur GCG.
3. Melakukan review dan menyempurnakan Piagam Komite Audit dan Piagam Komite Manajemen Risiko sebagai pedoman bagi organ pendukung Dewan Komisaris.
4. Melakukan review dan menyempurnakan Buku Pedoman Perilaku (code of conduct) yang berlaku bagi seluruh organ dalam struktur perusahaan.

PENILAIAN (ASSESSMENT) TAHUN BUKU 2021

Penerapan GCG merupakan salah satu Key Performance Indicator (KPI) dalam Kontrak Manajemen Perseroan dalam bentuk pencapaian skor Penerapan GCG sejak tahun 2009. Penilaian atas Penerapan GCG di Perseroan dilakukan oleh Assesor Independen dan pada tahun 2013 Perseroan pertama kali melaksanakan penilaian secara mandiri (self assessment). Untuk penilaian secara mandiri dibentuk Tim Verifikator yang diketuai dari Satuan Pengawasan Intern bersama-sama dengan Tim Penerapan GCG PLNE. Sesuai dengan arahan Pemegang Saham, penilaian GCG dilakukan secara berkala.

Untuk tahun 2021, Penilaian Penerapan GCG secara Self Assessment dengan menggunakan parameter Kementerian BUMN sebagai tercantum dalam Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

and the integration between work plans and strategic plans in order to achieve the final goal of the stages of implementing GCG on the face of Good Corporate Citizen.

Activities that have been carried out by the Company to support the Good Corporate Governance phase include:

1. *Implementation of the Clean and Integrity PLNE program with the following activities: Multistakeholder Forum (collective action), Gratification Control for LHKPN Reporting.*
2. *Review and refine the Guidelines for Good Corporate Governance 3rd edition (GCG Guidelines), and the Board Manual for the Board of Commissioners and Directors (Board Manual) specifically for the main organs in the GCG structure.*
3. *Review and refine the Audit Committee Charter and the Risk Management Committee Charter as guidelines for the supporting organs of the Board of Commissioners.*
4. *Review and improve the Code of Conduct that applies to all organs within the company structure.*

ASSESSMENT FISCAL YEAR 2021

The implementation of GCG is one of the Key Performance Indicators (KPI) in the Company's Management Contract in the form of achieving a GCG Implementation score since 2009. The assessment of the implementation of GCG in the Company is carried out by an Independent Assessor and in 2013 the Company conducted a self-assessment for the first time. . For independent assessment, a Verification Team was formed, chaired by the Internal Audit Unit together with the PLNE GCG Implementation Team. In accordance with the direction of the Shareholders, GCG assessment is carried out periodically.

For 2021, Self-Assessment of GCG Implementation using the parameters of the Ministry of SOEs as stated in the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs Number SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/ Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

Aspek pengujian dalam assessment GCG meliputi :

1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan,
2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal,
3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas,
4. Direksi,
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi, dan Transparansi
6. Aspek lainnya. Indikator pengujian berjumlah 43 indikator sedangkan parameter pengujian berjumlah 153 parameter.

Berdasarkan hasil assessment, penerapan GCG di Perseroan masuk dalam kategori Sangat Baik dengan total skor sebesar 91,653 dari total bobot sebesar 100,00 atau memperoleh capaian sebesar 91,653%.

Aspects of testing in the GCG assessment include:

1. Commitment to the Implementation of Good Corporate Governance in a Sustainable manner,
2. Shareholders and GMS/Capital Owners,
3. Board of Commissioners/Supervisory Board,
4. Directors,
5. Information Disclosure and Transparency, and Transparency
6. Other aspects. The test indicators are 43 indicators while the test parameters are 153 parameters.

Based on the results of the assessment, the implementation of GCG in the Company is in the Very Good category with a total score of 91,653 out of a total weight of 100.00 or an achievement of 91.653%.

TABEL PENILAIAN (ASSESSMENT) TAHUN BUKU 2021
GCG ASSESSMENT TABLE FOR 2021

No.	Indikator <i>Indicators</i>	Capaian Tahun 2021 <i>Achievements in 2021</i>		Tingkat Pemenuhan (%) <i>Fullfilment Rate(%)</i>
		Bobot <i>Target</i>	Skor <i>Score</i>	
1	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan <i>Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance</i>	7,00	6,884	98,34
2	Pemegang Saham dan RUPS/ Pemilik Modal <i>Shareholders and GMS/Capital Owners</i>	9,00	7,905	87,83
3	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	35,00	33,725	96,36
4	Direksi <i>Board of Directors</i>	35,00	31,889	91,11
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Information Disclosure and Transparency</i>	9,00	7,500	83,33
6	Aspek Lainnya <i>Other Aspects</i>	5,00	3,750	75,00
Total Skor Total Score		100,00	91,653	91,653

PENILAIAN (ASSESSMENT) TAHUN BUKU 2020

Pelaksanaan Assessment GCG untuk periode tahun 2020 dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Skor Penerapan GCG PT PLN Enjiniring tahun 2020 adalah 90,015% dengan predikat "Sangat Baik". Berikut ini disampaikan pencapaian skor untuk masing-masing aspek penilaian, sebagai berikut :

TABEL PENILAIAN (ASSESSMENT) TAHUN BUKU 2020

GCG ASSESSMENT TABLE FOR 2020

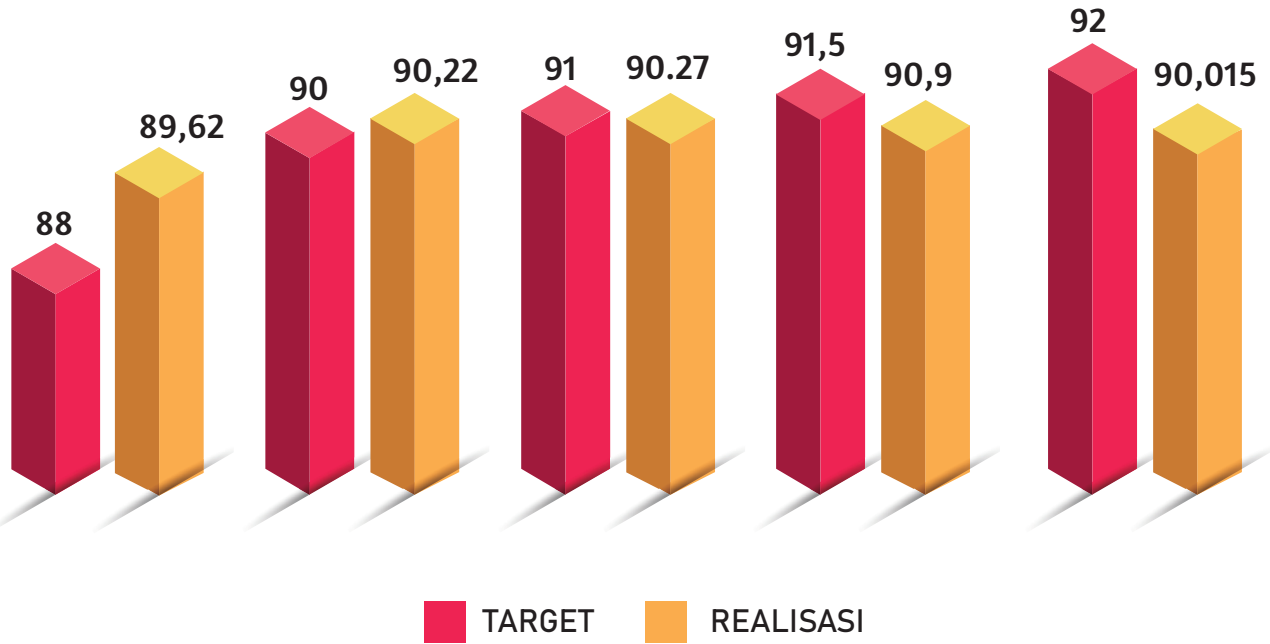
No.	Indikator <i>Indicators</i>	Capaian Tahun 2020 <i>Achievements in 2020</i>		Tingkat Pemenuhan (%)
		Bobot <i>Target</i>	Skor <i>Score</i>	<i>Fullfilment Rate(%)</i>
1	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan <i>Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance</i>	7,00	6,658	95,114
2	Pemegang Saham dan RUPS/ Pemilik Modal <i>Shareholders and GMS/Capital Owners</i>	9,00	7,905	87,833
3	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	35,00	33,241	94,974
4	Direksi <i>Board of Directors</i>	35,00	31,736	90,674
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Information Disclosure and Transparency</i>	9,00	7,350	81,667
6	Aspek Lainnya <i>Other Aspects</i>	5,00	3,125	72,500
Total Skor Total Score		100,00	90,015	90,015

Sehingga pencapaian skor GCG pada Kontrak Manajemen PT PLN Enjiniring mengalami trend peningkatan, sebagai mana ditunjukkan pada grafik ini :

ASSESSMENT FISCAL YEAR 2020

The implementation of the GCG Assessment for the 2020 period was carried out by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) with the PT PLN Enjiniring GCG Implementation Score in 2020 being 90.015% with the predicate "Very Good". The following is the achievement score for each aspect of the assessment, as follows:

So that the achievement of the GCG score on the PT PLN Enjiniring Management Contract has an increasing trend, as shown in this graph:



SINERGI DENGAN INDUK PERUSAHAAN DAN ANAK PERUSAHAAN DALAM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Untuk mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan Perseroan berintegrasi dengan PLN Holding guna memonitoring dan mengendalikan secara efektif penerapan GCG di PLN dan Anak Perusahaannya dengan menggunakan aplikasi.

Perseroan merupakan salah satu anak perusahaan PT PLN (Persero), bersama-sama dengan Anak Perusahaan lainnya memandang perlunya sinergi dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan implementasi GCG di Perseroan. Perseroan membentuk "Forum GCG" AP PLN sejak tahun 2016 yang bertujuan :

1. Berkomitmen untuk menerapkan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dalam organisasi perusahaan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan terpercaya guna meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan.

SYNERGY WITH THE PARENT COMPANY AND SUBSIDIARIES IN THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

To support the implementation of Good Corporate Governance, the Company integrates with PLN Holding in order to effectively monitor and control the implementation of GCG in PLN and its Subsidiaries by using an application.

The Company is one of the subsidiaries of PT PLN (Persero), together with other Subsidiaries see the need for synergy in the Implementation of Corporate Governance which has an important role in supporting the successful implementation of GCG in the Company. The Company has established the "GCG Forum" AP PLN since 2016 which aims to:

1. Committed to implementing the Principles of Good Corporate Governance (GCG) in a transparent, accountable and trusted company organization in order to increase added value for the company.

2. Membentuk dan meningkatkan komunikasi antar anak perusahaan sebagai wadah komunitas yang efektif di lingkungan Anak Perusahaan PT PLN (Persero).
3. Membentuk persepsi yang sama terhadap penerapan dan pengukuran prinsip-prinsip GCG sehingga mendukung peningkatan penerapan GCG di lingkungan Anak Perusahaan PT PLN (Persero).
4. Saling mendukung penerapan dan peningkatan tata kelola perusahaan yang baik antar anak perusahaan PT PLN (Persero).

2. *Establish and improve communication between subsidiaries as an effective community forum within the Subsidiary of PT PLN (Persero).*
3. *Establishing a common perception of the implementation and measurement of GCG principles so as to support the improvement of GCG implementation within the Subsidiary of PT PLN (Persero).*
4. *Mutual support for the implementation and improvement of good corporate governance among subsidiaries of PT PLN (Persero). AP GCG Forum Pictures.*



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perseroan yang merupakan wadah para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan. RUPS dan/atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan hak nya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi. RUPS Perseroan terdiri dari RUPS Tahunan, RUPS Persetujuan RKAP dan RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa).

PEDOMAN PELAKSANAAN RUPS

- 1) Pengambilan keputusan dalam RUPS harus dilakukan secara wajar dan transparan, dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - i. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat dalam RUPS harus terdiri dari orang-orang yang patut dan layak (*fit and proper*) bagi Perseroan;
 - ii. Perseroan yang memiliki komite nominasi dan remunerasi, dalam pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus mempertimbangkan pendapat komite tersebut;
 - iii. Dalam mengambil keputusan menerima atau menolak laporan Dewan Komisaris dan Direksi, perlu dipertimbangkan kualitas laporan yang berhubungan dengan GCG;
 - iv. Dalam menetapkan auditor eksternal harus berdasarkan calon-calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris;

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The General Meeting of Shareholders (GMS) is an organ of the Company which is a forum for Shareholders to make decisions by taking into account the provisions of the Company's Articles of Association and laws and regulations. The GMS has powers that are not given to the Board of Directors or the Board of Commissioners, within the limits specified in the Company's Articles of Association and the laws and regulations. The GMS and/or Shareholders may not intervene in the duties, functions and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors without reducing the authority of the GMS to exercise its rights in accordance with the Company's Articles of Association and laws and regulations, including to replace or dismiss members of the Board of Commissioners and or the Board of Directors. The Company's GMS consists of the Annual GMS, RKAP Approval GMS and other GMS (Extraordinary GMS).

GMS IMPLEMENTATION GUIDELINES

- 1) *Decision-making in the GMS must be carried out fairly and transparently, taking into account matters needed for the long-term business interests of the Company, including but not limited to:*
 - i. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors appointed at the GMS must consist of people who are fit and proper for the Company;*
 - ii. Companies that have a nomination and remuneration committee, in the appointment of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors must consider the opinion of the committee;*
 - iii. In making decisions to accept or reject reports from the Board of Commissioners and Directors, it is necessary to consider the quality of reports related to GCG;*
 - iv. In determining the external auditor, it must be based on the candidates proposed by the Board of Commissioners;*

- v. Dalam hal anggaran dasar Perseroan dan atau peraturan perundang-undangan mengharuskan adanya keputusan RUPS, maka keputusan yang diambil harus memperhatikan kepentingan wajar para pemangku kepentingan;
 - vi. Dalam mengambil keputusan pemberian bonus, tantiem dan dividen harus memperhatikan kondisi dan kesehatan keuangan Perseroan.
- 2) RUPS diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan dengan persiapan yang memadai, sehingga dapat mengambil keputusan yang sah. Keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS harus ditujukan untuk kepentingan Perseroan, diantaranya:
- i. Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan usul mata acara RUPS;
 - ii. Panggilan RUPS harus mencakup informasi mengenai mata acara, tanggal, waktu dan tempat RUPS;
 - iii. Bahan (materi) setiap mata acara dalam panggilan RUPS harus tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS, dan jika bahan tersebut belum tersedia saat dilakukan panggilan untuk RUPS, maka bahan itu harus disediakan sebelum RUPS diselenggarakan;
 - iv. Penjelasan mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan mata acara RUPS dapat diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung;
 - v. Risalah RUPS harus tersedia di kantor Perseroan, dan Perseroan menyediakan fasilitas agar Pemegang Saham dapat membaca risalah tersebut.
 - vi. Risalah RUPS wajib ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan sebagaimana dimaksud tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris.
 - vii. Setiap pemegang saham berhak untuk memperoleh salinan risalah RUPS.
- 3) Penyelenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab Direksi. Dalam hal Direksi berhalangan, maka penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris atau Pemegang Saham sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
- v. *In the event that the Company's articles of association and/or laws and regulations require a GMS decision, the decisions taken must take into account the reasonable interests of the stakeholders;*
 - vi. *In making decisions to award bonuses, bonuses and dividends, the Company's financial condition and health must be taken into account.*
- 2) *GMS is held in accordance with the Company's Articles of Association and the laws and regulations with adequate preparation, so that it can take legal decisions. The decisions taken at the GMS must be aimed at the interests of the Company, including:*
- i. *Shareholders are given the opportunity to submit proposals for the agenda of the GMS;*
 - ii. *The invitation to the GMS must include information regarding the agenda, date, time and place of the GMS;*
 - iii. *Materials (materials) for each agenda item in the invitation to the GMS must be available at the Company's office from the date of the GMS invitation, and if the materials are not yet available at the time of the invitation for the GMS, then the materials must be provided before the GMS is held;*
 - iv. *An explanation of other matters relating to the agenda of the GMS can be given before and/or during the GMS;*
 - v. *The minutes of the GMS must be available at the Company's office, and the Company provides facilities so that Shareholders can read the minutes.*
 - vi. *Minutes of the GMS must be signed by the chairman of the GMS and at least 1 (one) Shareholder appointed from and by the participants of the GMS. The signature as referred to is not required if the minutes of the GMS are made with a notarial deed.*
 - vii. *Every shareholder has the right to obtain a copy of the minutes of the GMS.*
- 3) *The holding of the GMS is the responsibility of the Board of Directors. In the event that the Board of Directors is unable to attend, the GMS will be held by the Board of Commissioners or Shareholders in accordance with the Company's Articles of Association and the laws and regulations.*

- 4) RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

HAK PEMEGANG SAHAM

- 1) Mengubah Anggaran Dasar Perseroan;
- 2) Memutuskan perubahan modal Perseroan;
- 3) Memberikan persetujuan atau menolak pemindahan hak atas saham Perseroan;
- 4) Memutuskan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, pemisahan bentuk badan hukum Perseroan serta pembubaran Perseroan;
- 5) Memutuskan untuk mengalihkan, menjadikan jaminan hutang, melepaskan hak atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku;
- 6) Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - ii. Melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - iii. Menetapkan pengangkatan anggota dan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris;
 - iv. Menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - v. Memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundangundangan dan Anggaran Dasar;
 - vi. Memberikan respon terhadap lowongan jabatan dan/atau pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris;
 - vii. Menetapkan sistem dan prosedur penjurangan dan penilaian yang salah satunya dilakukan melalui *fit & proper test* dalam memilih Anggota Dewan Komisaris dan Direksi;

- 4) *GMS can also be conducted through teleconference media, video conference or other electronic media facilities that allow all GMS participants to see and hear each other directly and participate in meetings.*

SHAREHOLDERS' RIGHTS

- 1) *Amend the Company's Articles of Association;*
- 2) *Decide on changes to the Company's capital;*
- 3) *Approving or rejecting the transfer of rights to the Company's shares;*
- 4) *Decide on the merger, consolidation, and acquisition, separation of the legal entity form of the Company and the dissolution of the Company;*
- 5) *Decide to transfer, make debt collateral, relinquish rights to all or most of the Company's assets within one financial year;*
- 6) *Appoint and dismiss members of the Board of Directors and Board of Commissioners, with the following provisions:*
 - i. *Establish guidelines for the appointment and dismissal of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners;*
 - ii. *Carry out an assessment of the candidates for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners;*
 - iii. *Determine the appointment of members and the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners;*
 - iv. *Establish arrangements regarding concurrent positions for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners;*
 - v. *Dismissing members of the Board of Directors and the Board of Commissioners in accordance with the laws and regulations and the Articles of Association;*
 - vi. *Responding to job vacancies and/or temporary dismissal of the Board of Directors by the Board of Commissioners;*
 - vii. *Establish systems and procedures for screening and assessment, one of which is carried out through a fit & proper test in selecting Members of the Board of Commissioners and Board of Directors;*

- 7) Menyetujui dan menolak Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
 - 8) Memberikan pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) atau Revisi RJPP;
 - i. Memberikan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
 - ii. Memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS.
 - iii. Memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS.
 - 9) Memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar;
 - 10) Memberikan persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta tugas pengawasan Dewan komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar, melalui langkah sebagai berikut:
 - i. Memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja Dewan Komisaris;
 - ii. Menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris;
 - iii. Menetapkan auditor eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan Perseroan;
 - iv. Memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris;
 - v. Menetapkan penggunaan laba bersih;
 - vi. Mengesahkan dan menyetujui Laporan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu.
 - 11) Mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - 12) Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, dengan prinsip sebagai berikut:
 - i. Memberikan arahan/pembinaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
- 7) *Approve and reject the Company's Work and Budget Plan (RKAP) and the Company's Long-Term Plan (RJPP);*
 - 8) *Provide approval of the Company's Long Term Plan (RJPP) or Revised RJPP;*
 - i. *Approving the Company's Work Plan and Budget (RKAP);*
 - ii. *Give approval/decision on the proposed corporate action that needs approval/decision of the GMS.*
 - iii. *Give approval/decision on the proposed corporate action that needs approval/decision of the GMS.*
 - 9) *Provide the necessary decisions to safeguard the long-term and short-term business interests of the Company in accordance with the laws and regulations and/or the Articles of Association;*
 - 10) *Approval of the Annual Report including the ratification of the Financial Statements as well as the supervisory duties of the Board of Commissioners in accordance with the laws and regulations and/or the Articles of Association, through the following steps:*
 - i. *Provide an assessment of the performance of the Board of Directors and the performance of the Board of Commissioners;*
 - ii. *Determine salary/honorarium, allowances, facilities and tantiem/performance incentives for the Board of Directors and the Board of Commissioners;*
 - iii. *Establish an external auditor to audit the Company's Financial Statements;*
 - iv. *Approval of the annual report including the ratification of financial statements as well as the supervisory duties of the Board of Commissioners;*
 - v. *Determine the use of net income;*
 - vi. *Approving and approving Financial Statements that are carried out on time.*
 - 11) *Making decisions through an open and fair and accountable process;*
 - 12) *Implement Good Corporate Governance in accordance with the authority and responsibility, with the following principles:*
 - i. *Provide direction/guidance on the implementation of Good Corporate Governance to the Board of Directors and the Board of Commissioners;*

- ii. Tidak mencampuri kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi;
- iii. Merespon informasi yang diterima dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris mengenai gejala penurunan kinerja dan kerugian Perseroan yang signifikan.

- ii. *Not to interfere with the Company's operational activities which are the responsibility of the Board of Directors;*
- iii. *Responding to information received from the Board of Directors and/or Board of Commissioners regarding the symptoms of a significant decline in the Company's performance and losses.*

KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM

Dalam menjalankan perannya, Pemegang Saham berkewajiban untuk:

- a. Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tidak melakukan kegiatan pengawasan dan kepengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
- c. Tidak memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, Perseroan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- d. Melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi melalui mekanisme RUPS.

SHAREHOLDERS' OBLIGATIONS

In carrying out their roles, Shareholders are obliged to:

- a. *Comply with the provisions of the Articles of Association and applicable laws and regulations.*
- b. *Not carrying out supervision and management activities of the Company carried out by the Board of Commissioners and Board of Directors.*
- c. *Not using the Company for personal, family, Company or business group interests in a spirit and way that is contrary to the laws and regulations*
- d. *Evaluating the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors through the GMS mechanism.*

PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUN 2021

Pada tahun 2021, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali terdiri dari RUPS Pengesahan RKAP 2021 dan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 .

Seluruh kegiatan RUP telah dilaksanakan Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku, baik terkait tempat, pemberitahuan, pemanggilan RUPS, pimpinan dan berita acara RUPS berikut ketentuan kuorum, hak suara dan keputusan RUPS. RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Sekretaris Perusahaan, Manajer Senior dan Manajer terkait.

IMPLEMENTATION OF THE 2021 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

In 2021, the Company has held a GMS for 2 (two) times, consisting of the GMS Ratification of the 2021 RKAP and the GMS for Approval of the Annual Report for the 2020 Financial Year.

All GMS activities have been carried out by the Company in accordance with applicable regulations, both regarding the place, notification, invitation to the GMS, leadership and minutes of the GMS as well as provisions for quorum, voting rights and resolutions of the GMS. The GMS was attended by Shareholders, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Corporate Secretary, Senior Managers and related Managers.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Decision of the General Meeting of Shareholders (GMS)

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PENGESAHAN RKAP 2021

Sebelum pelaksanaan RUPS, Perseroan menyampaikan undangan RUPS melalui surat tercatat nomor : 07.008/M00/PLNE/I/2021 tanggal 07 Januari 2021 perihal Surat Undangan RUPS RKAP 2021 PT PLN Enjiniring dengan Agenda RUPS :

1. Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021
 - a. Isu Strategis
 - b. Sasaran Utama Perseroan
 - c. Program Prioritas Perseroan Tahun 2021
 - d. Asumsi RKAP 2021
 - e. Proyeksi Keuangan
 - f. Tindak Lanjut Arahan RUPS dan Rekomendasi Dekom
 - g. Tindak Lanjut Penugasan Pemegang Saham SHL
2. Persetujuan dan Pengesahan KPI
 - a. Pemaparan dan Penjelasan KPI 2021
 - b. Usulan Keputusan RUPS

KEPUTUSAN RUPS :

1. Agenda Pertama

Setelah menilai RKAP PT PLN Enjiniring Tahun Buku 2021 yang diajukan oleh Direksi dan dilakukan pembahasan serta memperhatikan pendapat dan saran Dewan Komisaris, maka RUPS memutuskan menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 dengan pokok-pokok sasaran sebagai berikut :

- a. Perhitungan Laba (Rugi) dan Komprehensif Konsolidasian

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS) RATIFICATION OF RKAP 2021

Prior to the implementation of the GMS, the Company submitted an invitation to the GMS through registered letter number: 07.008/M00/PLNE/I/2021 dated January 7, 2021 regarding the Invitation Letter for the 2021 RKAP GMS of PT PLN Enjiniring with the GMS Agenda:

1. *Approval and Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) 2021*
 - a. *Strategic Issues*
 - b. *The Company's Main Target*
 - c. *Company Priority Program for 2021*
 - d. *Assumption of RKAP 2021*
 - e. *Financial Projections*
 - f. *Follow-up on GMS Directives and Recommendations from the Board of Commissioners*
 - g. *Follow-up on Assignment of SHL Shareholders*
2. *KPI Approval and Approval*
 - a. *Presentation and explanation of KPI 2021*
 - b. *Proposed GMS Decision GMS Resolutions:*

GMS RESOLUTIONS:

1. First Agenda

After assessing PT PLN Enjiniring's RKAP for the 2021 Fiscal Year proposed by the Board of Directors and discussing and taking into account the opinions and suggestions of the Board of Commissioners, the GMS decided to approve and ratify the 2021 Company Work Plan and Budget (RKAP) with the following main objectives:

- a. *Calculation of Profit (Loss) and Comprehensive*

- b. Laba (Rugi) Setelah Pajak Tahun Buku 2021 dianggarkan sebesar Rp. 79,63 Milliar.
- c. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
- d. Total Aset/Liabilitas dan Ekuitas per 31 Desember 2021 dianggarkan masing-masing sebesar Rp. 1.193,63 Milliar.
- e. Laporan Arus Kas Konsolidasian
- f. Saldo Kas per 31 Desember 2021 dianggarkan sebesar Rp. 261,63 Milliar
- g. Investasi
- h. Investasi Tahun Buku 2021 dianggarkan sebesar Rp. 3,00 Milliar, dengan Disburse sebesar Rp. 1,43 Milliar.

2. Agenda Kedua

- a. RUPS menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen/Key Performance Indikator (KPI) 2021 antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham PT PLN Enjiniring.
- b. Kontrak Manajemen/Key Performance Indicator (KPI) 2021 PT PLN Enjiniring terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari risalah ini.

RUPS LPT TAHUN BUKU 2020

Dalam rangka menjalankan perannya, Pemegang Saham telah meminta penjelasan dan menyampaikan arahan secara langsung dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

1. RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2020

Sebelum pelaksanaan RUPS, Perseroan menyampaikan undangan RUPS melalui surat tercatat Nomor : 16.029/M00/PLNE/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 dengan agenda RUPS :

- a) Persetujuan dari Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*Volledig Acquit Et De Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan Yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2020;

- b. *Consolidation Profit (Loss) After Tax for Financial Year 2021 is budgeted at Rp. 79.63 Billion.*
- c. *Consolidated Statement of Financial Position*
- d. *Total Assets/Liabilities and Equity as of December 31, 2021 are budgeted at Rp. 1.193.63 Billion.*
- e. *Consolidated Statement of Cash Flows*
- f. *Cash balance as of December 31, 2021 is budgeted at Rp. 261.63 Billion*
- g. *Investation*
- h. *The investment for the 2021 Fiscal Year is budgeted at Rp. 3.00 billion, with a Disburse of Rp. 1.43 Billion.*

2. Second Agenda

- a. *The GMS approved and ratified the Management Contract/Key Performance Indicator (KPI) 2021 between the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders of PT PLN Enjiniring.*
- b. *The Management Contract/Key Performance Indicator (KPI) 2021 PT PLN Enjiniring attached is an integral part of this minutes.*

GMS ANNUAL REPORT FISCAL YEAR 2020

In order to carry out its role, the Shareholders have requested an explanation and delivered directives at the General Meeting of Shareholders.

1. GMS Approval of the 2020

Fiscal Year Annual Report Prior to the implementation of the GMS, the Company submits the GMS invitation via registered letter Number: 16,029/M00/PLNE/VI/2021 dated June 16, 2021 with the agenda for the GMS:

- a) *Approval of the Ratification of the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2020 including the Report on the Implementation of Supervision of the Board of Commissioners during Fiscal Year 2020 as well as the Granting of Full Settlement and Release of Liability (Volledig Acquit Et De Charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for Management and Supervision Actions Executed During the Year Books 2020;*

- b) Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2020;
- c) Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2020 dan Remunerasi Tahun Buku 2021 Bagi Direksi dan Komisaris, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2020; dan
- d) Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.

- b) *Determination of the Use of Net Profit for Fiscal Year 2020;*
- c) *Approval of Tantiem for Fiscal Year 2020 and Remuneration for Fiscal Year 2021 for Directors and Commissioners, as well as Employee Bonuses for Fiscal Year 2020; and*
- d) *Determination of a Public Accounting Firm to Audit the Company's Financial Statements for the 2021 Financial Year.*

KEPUTUSAN RUPS LPT TAHUN BUKU 2020

DECISION OF GMS ANNUAL REPORT FISCAL YEAR 2020

1. Agenda Pertama :

- 1) RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 yang terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan.
- 2) RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020.
- 3) RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan pendapat **"Wajar dalam semua hal yang material"** sebagaimana dimaksud dalam laporannya No. 01160/2.1025/AU.1/03/1130-1/1/VI/2021, Tanggal 25 Juni 2021.
- 4) RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta termuat dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan. Pengesahan dan Pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap

1. First Agenda:

- 1) *The GMS approves and accepts the Annual Report regarding the Condition and Operation of the Company during the 2020 Financial Year which consists of the Financial Statements, Performance Evaluation Reports and Compliance Reports.*
- 2) *The GMS approved and received the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners during the 2020 Financial Year.*
- 3) *The GMS ratified the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2020 containing the Consolidated Statements of Financial Position, Consolidated Statements of Profit and Loss and Other Comprehensive Income, Consolidated Cash Flow Statements and Consolidated Statements of Changes in Equity along with their explanations which have been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners with the opinion "Fair in all material respects" as referred to in his report No. 01160/2.1025/AU.1/03/1130-1/1/VI/2021, 25 June 2021.*
- 4) *The GMS grants full release (Volledig Acquit Et De Charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision in accordance with the responsibilities and actions in their respective fields that have been carried out during the 2020 Financial Year, as long as these actions do not conflict with applicable laws and regulations and contained in the Financial Statements that have been audited by the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners. The ratification and discharge of responsibility does not release legal responsibility for the Board*

Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila Laporan yang diungkapkan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan/atau ternyata dikemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perseroan.

2. Agenda Kedua :

RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2020.

3. Agenda Ketiga :

RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2020 dan Remunerasi Tahun Buku 2021 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi karyawan untuk Tahun Buku 2020.

4. Agenda Keempat :

RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk Tahun Buku 2021.

of Directors and/or Board of Commissioners if the disclosed report is proven to have violated applicable legal provisions and procedures and/ or it is later proven that there have been deviant actions and/or detrimental to the Company.

2. Second Agenda:

The GMS grants power of attorney to the majority shareholder to determine the use of net profit for the financial year 2020.

3. Third Agenda:

The GMS authorizes the majority Shareholders to determine the Tantiem for Fiscal Year 2020 and Remuneration for Fiscal Year 2021 for the Board of Directors and Board of Commissioners as well as Bonuses for employees for Fiscal Year 2020.

4. Fourth Agenda:

The GMS authorizes the majority shareholder to determine the appointment of a Public Accounting Firm as the auditor who will audit the Company's Financial Statements, Performance Evaluation Reports and Compliance Reports for the 2021 Financial Year.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perusahaan maupun usaha perusahaan yang dilakukan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, ketentuan Anggaran Dasar, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Setiap anggota Dewan Komisaris harus memiliki integritas yang tinggi, pengetahuan, kemampuan dan komitmen untuk menyediakan waktu dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, peran Dewan Komisaris sangat strategis. Oleh karena itu, komposisi Dewan Komisaris Perusahaan harus memungkinkan pengambil keputusan yang efektif, tepat dan cepat. Selain itu, Dewan Komisaris juga dituntut untuk dapat bertindak secara independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan (conflict of interest) yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi.

The Board of Commissioners is in charge of supervising management policies, the general course of management both regarding the company and the company's business carried out by the Board of Directors, providing advice to the Board of Directors, including supervision of the implementation of the Company's Long Term Plan, Work Plan and Company Budget, provisions of the Articles of Association, Meeting Resolutions General Shareholders, as well as the prevailing laws and regulations for the benefit of the company and in accordance with the aims and objectives of the company. Each member of the Board of Commissioners must have high integrity, knowledge, ability and commitment to spend time in carrying out their duties. Thus, the role of the Board of Commissioners is very strategic. Therefore, the composition of the Company's Board of Commissioners must enable effective, precise and fast decision makers. In addition, the Board of Commissioners is also required to be able to act independently, in the sense of not having a conflict of interest (conflict of interest) that can interfere with its ability to carry out tasks independently and critically, both in relation to one another and the relationship to the Board of Directors.

BOARD MANUAL DEWAN KOMISARIS

Pedoman kerja Dewan Komisaris diatur dalam *Board Manual*. *Board Manual* antara lain berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris, yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan harus dapat dijalankan dengan konsisten, sehingga dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan. Dengan adanya *Board Manual* diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi, selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

BOARD MANUAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners work guidelines are regulated in the Board Manual. The Board Manual, among others, contains guidelines for the work procedures of the Board of Commissioners, which explains the stages of activities in a structured, systematic, easy to understand manner and must be carried out consistently, so that it can be a reference for the Board of Commissioners in carrying out their respective duties to achieve the Company Vision and Mission. With the Board Manual it is expected that high work standards will be achieved in line with the principles of GCG.

Adapun isi dari *Board Manual* sebagai berikut.

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Direksi;
- Bab III : Dewan Komisaris;
- Bab IV : Tata Laksana Wewenang Direksi dengan Persetujuan Dewan Komisaris;
- Bab V : Tata Laksana Wewenang Direksi dengan Persetujuan RUPS Berdasarkan Rekomendasi Dewan Komisaris .

The contents of the Board Manual are as follows.

- Chapter I : Introduction;*
- Chapter II : Board of Directors;*
- Chapter III : Board of Commissioners;*
- Chapter IV : Procedure for Board of Directors Authority with Board of Commissioners Approval;*
- Chapter V : Procedure for Board of Directors Authority with General Meeting of Shareholders Approval Based on the Recommendations of the Board of Commissioners.*

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

- Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang anggota atau lebih.
- Dewan Komisaris yang terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri – sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota maka salah seorang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.

COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

- The Board of Commissioners consists of 1 (one) member or more.*
- The Board of Commissioners which consists of more than 1 (one) member is an assembly and each member of the Board of Commissioners cannot act alone, but based on the decision of the Board of Commissioners.*
- In the event that the Board of Commissioners consists of more than 1 (one) member, one member of the Board of Commissioners is appointed as the President Commissioner.*

TABEL KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

TABLE OF BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

No.	Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Domisili <i>Domicile</i>	Tanggal Pengangkatan <i>Appointment Date</i>	Dasar Pengangkatan <i>Basis of Appointment</i>
1	Ahmad Rofik	Komisaris Utama	Tangerang	- 08 Desember 2020	- RUPS (Sirkuler) Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tanggal 08 Desember 2020.
		<i>President Commissioner</i>	<i>Tangerang</i>	- <i>December 08, 2020</i>	- <i>GMS (Circular) Appointment and dismissal and appointment of the Commissioner Members on December 08, 2020.</i>
2	Edward Siagian	Komisaris	Jakarta	- 08 Desember 2020	- RUPS (Sirkuler) Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tanggal 08 Desember 2020.
		<i>Board of Commissioner</i>	<i>Jakarta</i>	- <i>December 08, 2020</i>	- <i>GMS (Circular) Appointment and dismissal and appointment of the Commissioner Members on December 08, 2020.</i>
3	Muhammad Rizali Karliansyah	Komisaris	Jakarta	- 19 Februari 2021	- RUPS (Sirkuler) Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tanggal 19 Februari 2021 dan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 05 tanggal 09 Maret 2021

4	Hardiv Harris Situmeang	Commissioner	Jakarta	- February 19, 2021	- AGM Dismissal and Appointment of Board of Commissioner Members on February 19, 2021 and Notary Deed Lenny Janis Ishak, SH Number 05 dated March 09, 2021
		Komisaris Independen	Jakarta	- 15 Maret 2021	- RUPS (Sirkuler) Pemberitahuan dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tanggal 15 Maret 2021 dan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 02 tanggal 05 April 2021
				- 25 November 2021	- RUPS (Sirkuler) Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tanggal 25 November 2021 dan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 30 tanggal 30 November 2021
		Independent Commissioner	Jakarta	- March 15, 2021	AGM Dismissal and Appointment of Board of Commissioner Members on March 21, 2021 and Notary Deed Lenny Janis Ishak, SH Number 02 dated April 05, 2021
				- November 25, 2021	- AGM Dismissal and Appointment of Board of Commissioner Members on November 25, 2021 and Notary Deed Lenny Janis Ishak, SH Number 30 dated November 30, 2021

Komisaris Independen

INDEPENDENT COMMISSIONER

Anggota Dewan Komisaris PLN Enjiniring telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011. Paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris harus merupakan Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan saat ini adalah 4 (empat) orang, yang 3 (tiga) orang diantaranya atau sama dengan 75% anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Dengan demikian, komposisi tersebut juga telah memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN mengenai Komisaris Independen.

KRITERIA PENENTUAN KOMISARIS INDEPENDEN

1. RUPS/Pemegang Saham menetapkan Anggota Komisaris Independen paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Anggota Dewan Komisaris secara eksplisit dalam keputusan pengangkatannya. Komisaris Independen memiliki kompetensi dibidang auditing, keuangan dan akuntansi.
2. Anggota Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
3. Jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari Komisaris Independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.

Members of the Board of Commissioners of PLN Enjiniring have met the number, composition, criteria and independence in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. Per-01/MBU/2011. At least 20% (twenty percent) of the members of the Board of Commissioners must be Independent Commissioners. The current number of members of the Company's Board of Commissioners is 4 (four) people, of which 3 (three) people or equal to 75% of the members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners. Thus, the composition has also complied with the regulations set by the Ministry of SOEs regarding Independent Commissioners.

CRITERIA FOR DETERMINING INDEPENDENT COMMISSIONERS

1. *The GMS/Shareholders determine the Independent Commissioners at least 20% (twenty percent) of the members of the Board of Commissioners explicitly in the decision on their appointment. The Independent Commissioner has competence in auditing, finance and accounting.*
2. *Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who has no financial, management, share ownership and/or family relationship with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or controlling shareholder or relationship with the Company, which may affect their ability to act independently .*
3. *The number of Independent Commissioners must be able to ensure that the supervisory mechanism runs effectively and in accordance with the laws and regulations. One of the Independent Commissioners must have an accounting or finance background.*

PERNYATAAN KOMISARIS INDEPENDEN

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali, yang meliputi:

- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.
- Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.
- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

STATEMENT OF THE INDEPENDENT COMMISSIONER

Affiliation relationship between members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Controlling Shareholders, which includes:

- Affiliation relationship between members of the Board of Directors and other members of the Board of Directors.
- Affiliation relationship between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.
- Affiliation relationship between members of the Board of Directors and the Major and/or controlling Shareholders.
- Affiliation relationship between members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Commissioners; and e) Affiliation relationship between members of the Board of Commissioners and the Major and/or controlling Shareholders.
- Affiliation relationship between members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Controlling Shareholders, can be seen in the table below:

TABEL HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

TABLE OF AFFILIATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris <i>Financial, Family and Management Relations of the Commissioners</i>														
Komisaris <i>Commissioners</i>	Hubungan Keuangan Dengan <i>Financial Relations with</i>						Hubungan Keluarga Dengan <i>Financial Relations with</i>						Hubungan Kepengurusan <i>Management Relations</i>	
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
	<i>Board of Commissioners</i>		<i>Directors</i>		<i>Controlling Shareholders</i>		<i>Board of Commissioners</i>		<i>Directors</i>		<i>Controlling Shareholders</i>			
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak		
	<i>Yes</i>	<i>No</i>	<i>Yes</i>	<i>No</i>	<i>Yes</i>	<i>No</i>	<i>Yes</i>	<i>No</i>	<i>Yes</i>	<i>No</i>	<i>Yes</i>	<i>No</i>	<i>Yes</i>	<i>No</i>
Ahmad Rofik		√		√		√		√		√		√		√
Edward Siagian		√		√		√		√		√		√		√
Muhammad Rizali Karliansyah		√		√		√		√		√		√		√
Hardiv Harris Situmeang		√		√		√		√		√		√		√

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

1. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatn.
2. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarangan dan pengunduran diri.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan anggaran dasar dan wewenang yang diberikan oleh RUPS, yang tertuang dalam Board Manual yang berisi Petunjuk dan Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Perusahaan yang secara umum mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Secara rinci, tugas pokok Dewan Komisaris yang berhubungan dengan pengawasan adalah:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta

THE SERVICE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. The term of office for members of the Board of Commissioners is set at 4 (four) years and may be reappointed for 1 (one) term of office.
2. The position of a member of the Board of Commissioners ends when:
 - a. Pass Away;
 - b. His term of office ends;
 - c. Dismissed based on the General Meeting of Shareholders; and/or
 - d. No longer meets the requirements as a member of the Board of Commissioners based on these articles of association and other laws and regulations.
3. The provisions as referred to in number 2 above include but are not limited to prohibited concurrent positions and resignation.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners has clear functions, duties and responsibilities in accordance with the articles of association and the authority granted by the GMS, which are contained in the Board Manual which contains the Instructions and Work Procedures of the Board of Directors and the Board of Commissioners. The Board of Commissioners is responsible to shareholders in terms of overseeing the policies of the Board of Directors on the Company's operations which generally refers to the approved business plan, as well as ensuring compliance with all applicable laws and regulations.

In detail, the main duties of the Board of Commissioners related to supervision are:

1. The Board of Commissioners is in charge of supervising management policies, the course of management in general both regarding the Company and the Company's business carried out by the Board of Directors as well as providing advice to the Board of Directors including supervision of the implementation of the Company's Long-Term Plan, Work Plan and Company's Budget as well as the provisions of the Articles of Association and Decisions General Meeting of Shareholders, as well as the

- peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian dan akuntabilitas.
 - b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi.
 4. Pengawasan oleh Komisaris dilakukan dengan cara:
 - a. Meminta keterangan secara tertulis kepada Direksi tentang suatu permasalahan di Perusahaan.
 - b. Melakukan kunjungan ke unit kerja/pembangkit/proyek tertentu, baik dengan (atau tanpa) pemberitahuan kepada Direksi sebelumnya.
 - c. Memberikan tanggapan atas laporan berkala dari Direksi.
 5. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan BUMN telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMN yang bersangkutan.

prevailing laws and regulations for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company.

2. *In carrying out these duties, each member of the Board of Commissioners must:*
 - a. *Comply with the Articles of Association and laws and regulations as well as the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence and accountability.*
 - b. *Good intentions, full of prudence and responsibility in carrying out supervisory duties and providing advice to the Board of Directors for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company.*
3. *The Board of Commissioners/Supervisory Board is responsible and authorized to supervise the management policies, the general course of management, both regarding the Company and the Company's business and provide advice to the Board of Directors.*
4. *Supervision by the Commissioners is carried out by:*
 - a. *Requesting written information from the Board of Directors regarding a problem in the Company.*
 - b. *Conducting visits to certain work units/plants/projects, either with (or without) prior notification to the Board of Directors.*
 - c. *Provide feedback on periodic reports from the Board of Directors.*
5. *The Board of Commissioners/Supervisory Board must ensure that the SOE Annual Report contains information regarding the identity, main jobs, positions of the Board of Commissioners/Supervisory Board in other companies, including the meetings held in one financial year (internal meetings and other corporate meetings). joint venture with the Board of Directors), as well as honorarium, facilities, and/or other allowances received from the relevant BUMN.*

WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berwenang untuk:

AUTHORITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out its duties, the Board of Commissioners is authorized to:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan Verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan perusahaan.
2. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh perusahaan.
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan /atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan perusahaan.
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
5. Meminta Direksi dan /atau pejabat lainnya dibawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
6. Mengangkat Sekretaris Dewan komisaris jika dianggap perlu.
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar perusahaan.
8. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban perusahaan, jika dianggap perlu.
10. Melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar perusahaan.
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan / atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

1. *View books, letters, and other documents, check cash for verification purposes and other securities and check company assets.*
2. *Entering yards, buildings and offices used by the company.*
3. *Requesting an explanation from the Board of Directors and/or other officials regarding all issues related to the management of the company.*
4. *Knowing all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors.*
5. *Requesting the Board of Directors and/or other officers under the Board of Directors with the knowledge of the Board of Directors to attend the Board of Commissioners meeting.*
6. *Appoint the Secretary to the Board of Commissioners if deemed necessary.*
7. *Temporarily dismiss members of the Board of Directors in accordance with the provisions of the company's Articles of Association.*
8. *Establish other committees other than the Audit Committee, if deemed necessary by taking into account the company's capabilities.*
9. *Using experts for certain matters and for a certain period of time at the expense of the company, if deemed necessary.*
10. *Take actions to manage the company under certain conditions for a certain period of time in accordance with the provisions of the company's Articles of Association.*
11. *Attending Board of Directors meetings and providing views on the matters discussed.*
12. *Carry out other supervisory powers as long as they do not conflict with the laws and regulations, the Articles of Association, and/or the decisions of the General Meeting of Shareholders.*

KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugasnya, maka Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan.

OBLIGATIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out its duties, the Board of Commissioners is obliged to:

1. *Provide advice to the Board of Directors in carrying out the management of the Company.*

2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disiapkan Direksi, sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
 3. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJP dan RKAP.
 4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan.
 5. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala-gejala menurunnya kinerja Perseroan.
 6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menanda-tangani laporan tahunan.
 7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai laporan tahunan, apabila diminta.
 8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
 9. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan perseroan lainnya.
 10. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 11. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. *Researching and reviewing and signing the Company's Long-Term Plan and the Company's Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.*
 3. *Provide opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the Company's Long-Term Plan and the Company's Work Plan and Budget regarding the reasons for the Board of Commissioners signing the RJP and RKAP.*
 4. *Following the development of the Company's activities, providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding any issues deemed important to the management of the Company.*
 5. *Report immediately to the General Meeting of Shareholders if there are signs of a decline in the Company's performance.*
 6. *Researching and reviewing periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and signing the annual report.*
 7. *Provide explanations, opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the annual report, if requested.*
 8. *Prepare the minutes of the Board of Commissioners' meeting and keep a copy there of.*
 9. *Report to the Company regarding the ownership of shares and/or their families in the Company and other companies.*
 10. *Provide reports on supervisory duties that have been carried out during the last financial year to the General Meeting of Shareholders.*
 11. *Carry out other obligations in the context of supervisory duties and providing advice, as long as they do not conflict with the laws and regulations, articles of association and/or decisions of the General Meeting of Shareholders.*

PEMBAGIAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Board Manual Perusahaan, pembagian kerja diantara anggota Dewan Komisaris diatur sendiri oleh Perusahaan dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris dibagi atas bidang tugas sebagai berikut :

DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Based on the Company's Board Manual, the division of work among members of the Board of Commissioners is regulated by the Company and for the smooth running of its duties the Board of Commissioners can be assisted by the Secretary of the Board of Commissioners who is appointed by the Board of Commissioners divided into the following areas of duty:

TABEL PEMBAGIAN BIDANG TUGAS DEWAN KOMISARIS

TABLE OF DIVISION OF DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Bidang Tugas <i>Task Field</i>
Ahmad Rofik	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Bertanggung jawab mengkoordinasikan pengawasan perusahaan dan tugas Dewan Komisaris 2 Mengundang, memimpin rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, dan menandatangani dokumen Perseroan antara lain Risalah RUPS, Laporan Manajemen Tahunan dan lain-lain. 3 Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), perubahan dan tambahannya; Laporan Berkala, Laporan-Laporan lainnya dari Direksi, serta persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan. 4 Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan dan menyampaikan hasil Pengawasannya serta menyampaikan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham. 5 Mengikuti perkembangan Perseroan 6 Melakukan tugas-tugas lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham 7 Melakukan pengawasan secara keseluruhan terhadap KPI Manajemen 8 Meneliti dan menelaah laporan berkala dan tahunan yang disampaikan Direksi serta menandatangani laporan tahunan <ol style="list-style-type: none"> 1 <i>Responsible for coordinating company supervision and the duties of the Board of Commissioners.</i> 2 <i>Inviting, chairing the Board of Commissioners' meetings with the Board of Directors, and signing the Company's documents including Minutes of the General Meeting of Shareholders, Annual Management Reports, etc.</i> 3 <i>Providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the company's development plan; Work Plan and Annual Budget, as well as changes and additions; periodic reports, other reports from the Board of Directors, as well as other issues that considered important for the management of the Company.</i> 4 <i>Overseeing the implementation of the Company's Work Plan and Budget and submit the result of research and opinions to the General Meeting of Shareholders.</i> 5 <i>Following the development of the Company.</i> 6 <i>Performing other tasks determined by the General Meeting of Shareholders.</i> 7 <i>Carrying out overall supervision of the Management KPI.</i> 8 <i>Researching and analyzing periodic and annual reports prepared by the Board of Directors and signing Annual Report.</i>
Edward Siagian	Komisaris <i>Commissioner</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Bertanggung jawab utamanya pada Bidang Keuangan, Bidang Enjiniring, Pengawasan Internal dan Komite Audit, meliputi antara lain : <ol style="list-style-type: none"> (a) Mengawasi Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perusahaan (b) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan internal, dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan eksternal (c) Mengawasi Keuangan dan Organisasi Perusahaan dan Strategi Pengembangan SDM

(d) Mengawasi Pelaksanaan Kegiatan Enjiniring, termasuk proses produksi dan Pengendalian Mutu.

(e) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris

- 2 Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) serta perubahan dan tambahannya; Laporan Berkala; Laporan-Laporan lainnya dari Direksi, serta persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan.
 - 3 Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil pengawasan dan menyampaikan pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham
 - 4 Melakukan monitoring terhadap KPI Bidang Administrasi, Keuangan dan SDM serta Bidang Enjiniring
 - 5 Mengikuti Perkembangan Perusahaan
 - 6 Melakukan tugas-tugas lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
- 1 *Mainly responsible for the Financial sector, Engineering sector, Internal Control, Marketing and Audit Committee, including the following activities ;*
- (a) Supervising the implementation of the Annual Work Plan and Budget including Financial Statements and Company Performance Reports.*
- (b) Supervising the implementation of internal controls, ensure the effectiveness of internal and external control systems.*
- (c) Supervising the company organizations and HR development strategy.*
- (d) Supervising the Implementation of Engineering Activities, including the production process and Quality Control*
- (e) Identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners.*
- 2 *Providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the company's development plan; Work Plan and Annual Budget of the Company, as well as changes and additions; periodic reports, other reports from the Board of Directors, as well as other issues deemed important for the management of the Company.*
 - 3 *Overseeing the implementation of the Company Work Plan and Budget and submit the result of research and opinions to the General Meeting of Shareholders.*
 - 4 *Monitoring KPI in administration, finance and HR as well as in Engineering*
 - 5 *Following the development of the company.*
 - 6 *Perform other tasks determined by the General Meeting of Shareholders.*

Hardiv Harris
Situmeang

Komisaris
Commissioner

- 1 Bertanggung jawab utamanya dalam Bidang Pengembangan Usaha dan Investasi, Bidang Organisasi dan SDM, Komite Manajemen Risiko dan pelaksanaan GCG dan sasaran nya serta Issue Strategis perusahaan, meliputi kegiatan antara lain:
 - (a) Mengawasi Penyiapan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan secara berkala melaksanakan review dan mengusulkan updating jika diperlukan
 - (b) Mengawasi Penyiapan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan
 - (c) Mengawasi atas perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Usaha, rencana Investasi termasuk Sasaran Strategis dan Issue Issue strategis lainnya



- (d) Mengawasi Organisasi Perusahaan dan Strategi Pengembangan SDM
 - (e) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris
 - 2 Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, serta perubahan dan tambahannya; Laporan Berkala; Laporan-Laporan lainnya dari Direksi, serta persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan perusahaan
 - 3 Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil pengawasannya dan menyampaikan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham
 - 4 Melakukan monitoring terhadap KPI Bidang Pemasaran dan Pengembangan Usaha, Bidang Organisasi dan Pengembangan SDM serta pelaksanaan GCG.
 - 5 Mengikuti perkembangan perusahaan
 - 6 Melakukan tugas-tugas lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
- 1 *Mainly responsible for Engineering Sector, Bussiness Development and Investment, Risk Management Committee and GCG and other strategic targets and issues, including activities including :*
- (a) *Supervising the preparation of the Company's Long-Term Plan and periodically conduct reviews and propose updating if needed.*
 - (b) *Supervising the preparation of the Annual Company Budget Work Plan.*
 - (c) *Supervising the implementation of business development, investment plans including strategic targets and other strategic issues.*
 - (d) *Supervising company organizations and HR development strategy.*
 - (e) *Identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners.*
- 2 *Providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the company's development plan; Work Plan and Annual Budget of the Company, as well as changes and additions; periodic reports, other reports from the Board of Directors, as well as other issues considered important for the management of the Company.*
 - 3 *Supervising the implementation of the Company's Work Plan and Budget and submit the result of research and opinions to the General Meeting of Shareholders.*
 - 4 *Monitoring KPI in the fields of Marketing and Bussiness Development, Organization, HR Organization and Development and the implementation of GCG.*
 - 5 *Following the development of the company.*
 - 6 *Performing other tasks determined by the General Meeting of Shareholders.*

Muhammad Rizali Karliansyah

Komisaris
Commissioner

- 1 Bertanggung jawab utamanya dalam Bidang Pemasaran, Bidang Pengusahaan, Komite Audit dan sasaran serta Issue Strategis lainnya, meliputi kegiatan antara lain:
 - (a) Mengawasi Pelaksanaan Pemasaran termasuk Kebijakan Pemasaran dan *Pricing Policy*
 - (b) Mengawasi Pelaksanaan Pengusahaan
 - (c) Mengawasi Penyiapan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan
 - (d) Mengawasi Penyiapan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan secara berkala melaksanakan review dan mengusulkan *updating* jika diperlukan.
 - (e) Mengawasi Organisasi Perusahaan dan Strategi Pengembangan SDM
 - (f) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris

- 2 Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Kerja Anggaran Perseroan, serta perubahan dan tambahannya; Laporan Berkala; Laporan-Laporan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan
 - 3 Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil Pengawasannya dan menyampaikan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham
 - 4 Melakukan monitoring terhadap KPI Bidang Pemasaran dan Pengusahaan, Bidang Organisasi dan Pengembangan SDM
 - 5 Mengikuti Perkembangan Perusahaan
 - 6 Melakukan tugas-tugas lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
- 1 *Mainly responsible for the Marketing Sector, Business Sector, Audit Committee and other strategic issues and targets, including activities below :*
- (a) *Supervising the implementation of marketing including marketing and pricing policy.*
 - (b) *Supervising the implementation of business.*
 - (c) *Supervising the preparation of the Annual Corporate Budget Work Plan.*
 - (d) *Supervising the preparation of the Company's Long Term Plan and Periodically conduct reviews and propose updating if necessary.*
 - (e) *Supervising the organization of the company and the development of HR.*
 - (f) *Identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners.*
- 2 *Providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the company's development plan; Company's Annual Work Plan and Budget, as well as changes and additions; periodic reports, other reports from the Board of Directors, as well as other issues considered important for the management of the Company.*
 - 3 *Supervising the implementation of the Company's Work Plan and Budget and submit the result of the research and opinions to the General Meeting of Shareholders.*
 - 4 *Monitoring KPI in the fields of marketing and business, as well as HR organization and development.*
 - 5 *Following the development of the company.*
 - 6 *Performing other tasks determined by the General Meeting of Shareholders.*

Dewan Komisaris selalu mengawasi kebijakan yang diambil Direksi berdasarkan laporan yang diterima atau temuan langsung di lapangan. Dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan tiga komite yang terdiri dari Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan Komisaris membagi tugas dan wewenang di antara anggota Dewan Komisaris dalam bentuk penetapan Komisaris sebagai ketua maupun anggota pada komite-komite tersebut. Per 31 Desember 2021 anggota Dewan Komisaris yang bertugas di Komite Dewan Komisaris adalah :

The Board of Commissioners always supervises the policies taken by the Board of Directors based on reports received or direct findings in the field. In carrying out its duties, the Board of Commissioners is assisted by the Secretary of the Board of Commissioners and three committees consisting of the Audit Committee, Risk Management Committee and the Nomination and Remuneration Committee. The Board of Commissioners divides the duties and authorities among the members of the Board of Commissioners in the form of appointing the Commissioner as chairman or member of these committees. As of December 31, 2021, the members of the Board of Commissioners serving on the Committee of the Board of Commissioners are:

TABEL DEWAN KOMISARIS BERTUGAS PADA KOMITE**TABLE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN CHARGE OF THE COMMITTEE**

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Edward Siagian	Ketua Komite Audit, merangkap anggota <i>Chairman of the Audit Committee, concurrently member</i>
2	M.R. Karliansyah	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, merangkap anggota <i>Chairman of the Nomination and Remuneration Committee , concurrently member</i>
3	Hardiv Harris Situmeang	Ketua Komite, merangkap anggota <i>Chairman of the Risk Management & Good Corporate Governance Committee, concurrently member</i>

KRITERIA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas terbuka, maka dasar penetapan kriteria Dewan Komisaris PLN Enjiniring sesuai ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Seluruh ketentuan dimaksud telah tercantum di dalam Anggaran dasar dan *board manual* PLN Enjiniring. Adapun kriteria anggota Dewan Komisaris, sebagai berikut.

1. Pihak yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. Dinyatakan Pailit;
 - b. Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau
 - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
2. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perseroan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan di bidang usaha perseroan,

CRITERIA FOR MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

As a subsidiary of PT PLN (Persero) which is a State-Owned Enterprise in the form of Limited Liability Company is open, then the basis for determining the criteria for the Board of Commissioners of PLN Enjiniring is in accordance with the provisions of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. All of these provisions have been stated in the Articles of Association and the PLN Enjiniring board manual. The criteria for members of the Board of Commissioners are as follows.

1. Parties who may be appointed as members of the Board of Commissioners are individuals who are capable of carrying out legal actions, unless within 5 (five) years prior to their appointment:
 - a. Declared bankrupt;
 - b. Become a member of the Board of Directors or the Board of Commissioners or a member of the Supervisory Board who is found guilty of causing a Company or Perum to be declared bankrupt; or
 - c. Sentenced for committing a crime that is detrimental to state finances and/or BUMN and/or related to the financial sector.
2. In addition to meeting the criteria as referred to in point 1, the appointment of members of the Board of Commissioners is carried out by considering integrity, dedication, understanding of the company's management issues related to one of the management functions, having knowledge in the company's business field, and

- dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Persyaratan lain anggota Dewan Komisaris, yaitu:
 - a. Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II;
 - b. Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah;
 - c. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
 - d. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter;
 - e. Bagi bakal calon dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dari instansi yang bersangkutan.
 4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas, batal demi hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
 5. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
 6. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 7. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh para pemegang saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham.
- being able to provide sufficient time. to carry out their duties and other requirements based on statutory regulations.*
3. *Other requirements for members of the Board of Commissioners, namely:*
 - a. *Not administrators of Political Parties and/ or candidates for members of the legislature and/or members of the legislature. Candidates for legislative members or members of the legislature consist of candidates/members of DPR, DPD, Level I DPRD, and Level II DPRD;*
 - b. *Not a candidate for Regional Head/Deputy Head and/or Regional Head/Deputy Head;*
 - c. *Not serving as a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board of the relevant BUMN for 2 (two) consecutive periods;*
 - d. *Physically and mentally healthy (not suffering from an illness that can hinder the performance of duties as a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board), as evidenced by a health certificate from a doctor;*
 - e. *For prospective candidates from the Technical Ministry or other Government Agencies, it must be based on a proposal letter from the relevant agency.*
 4. *Appointment of members of the Board of Commissioners who do not meet the requirements as referred to in points 1 and 2 above, is null and void from the moment the other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors know that these requirements are not fulfilled.*
 5. *The appointment of members of the Board of Commissioners does not coincide with the appointment of members of the Board of Directors.*
 6. *Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders.*
 7. *Members of the Board of Commissioners are appointed from the candidates proposed by the shareholders and the nominations are binding for the General Meeting of Shareholders.*

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Seluruh Dewan Komisaris PLN Enjiniring telah memenuhi kriteria dan ketentuan dalam *Fit and Proper Test* berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan GCG, serta peraturan dan ketentuan lain yang terkait, termasuk ketentuan tentang Komisaris Independen.

CAPABILITY AND FITNESS ASSESSMENT

The entire Board of Commissioners of PLN Enjiniring has met the criteria and provisions in the *Fit and Proper Test* based on the Limited Liability Company Law and the provisions of GCG, as well as other relevant rules and regulations, including the provisions regarding the Independent Commissioner.

TABEL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN
TABEL OF ABILITY AND COMPLIANCE ASSESSMENT

Nama <i>Name</i>	Pelaksana <i>Administrator</i>	Hasil <i>Result</i>
Ahmad Rofik	PT PLN (Persero)	Lulus <i>Pass</i>
Edward Siagian	PT PLN (Persero)	Lulus <i>Pass</i>
Muhammad Rizali Karliansyah	PT PLN (Persero)	Lulus <i>Pass</i>
Hardiv Harris Situmeang	PT PLN (Persero)	Lulus <i>Pass</i>

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

PLN Enjiniring memiliki Pedoman Good Corporate Governance yang antara lain mengatur keberagaman komposisi Dewan Komisaris. Berdasarkan pedoman tersebut, komposisi Dewan Komisaris hendaknya sedemikian rupa sehingga memungkinkan diambilnya keputusan secara efektif, tepat, cepat, dan independen.

BOARD OF COMMISSIONERS' DIVERSITY POLICY

PLN Enjiniring has Good Corporate Governance Guidelines which, among other things, regulate the diversity of the composition of the Board of Commissioners. Based on these guidelines, the composition of the Board of Commissioners should be in such a way as to enable effective, precise, fast and independent decisions to be made.

Komposisi Dewan Komisaris merupakan bauran yang tepat antara pengalaman manajerial dan kepemimpinan, pendidikan yang memadai dan sesuai dengan tanggung jawab yang diemban, serta memiliki karakter yang baik. Perusahaan juga senantiasa berupaya agar komposisi Dewan Komisaris memiliki keberagaman dalam usia, pendidikan, pengalaman kerja dan keahlian.

The composition of the Board of Commissioners is the right mix of managerial and leadership experience, adequate education and in accordance with the responsibilities carried out, and has good character. The Company also strives to ensure that the composition of the Board of Commissioners has diversity in terms of age, education, work experience and expertise.

Pada periode 2021, keberagaman komposisi Dewan Komisaris dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

In the 2021 period, the diversity of the composition of the Board of Commissioners can be seen in the table below:

TABEL KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

TABLE OF DIVERSITY IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Nama Dewan Komisaris <i>Name of the Board of Commissioners</i>	Lahir <i>Birth</i>	Jenis Kelamin <i>Sex</i>	Pendidikan <i>Education</i>	Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	Keahlian <i>Expertise</i>
Ahmad Rofik	Desember 1967	Laki-laki	S1 Teknik Mesin - Universitas Indonesia	Menjabat sebagai Komisaris Utama PT PLN Enjiniring sejak 08 Desember 2020. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara pada PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada Desember 2019 – Mei 2020, Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua pada PT PLN (Persero) PT PLN (Persero) pada Agustus 2017 – Desember 2019	Teknik Mesin Manajemen Pemasaran
	<i>December 1967</i>	<i>Male</i>	<i>Bachelor Degree in Mechanical Engineering - University of Indonesia</i>	<i>Served as President Commissioner of PT PLN Enjiniring since December 08, 2020. Previously he had experience as Regional Business Director of Maluku, Papua and Nusa Tenggara at PT PLN (Persero) Head Office in December 2019 – May 2020, Regional Business Director of Maluku and Papua at PT PLN (Persero) PT PLN (Persero) in August 2017 – December 2019</i>	<i>Mechanical Engineering Marketing Management</i>
Edward Siagian	Desember 1967	Laki-laki	S1 Tehnik Tenaga Listrik - Institut Teknologi Bandung S2 Manajemen - Institut Teknologi Bandung	Menjabat sebagai Komisaris PT PLN Enjiniring sejak 08 Desember 2020. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Expert Pengendalian Proyek (TK) pada (Tugas Karya ke PT PLN Enjiniring) PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada tahun 2014 – 2016, Senior Specialist I Pengendalian Proyek (TK) pada (Tugas Karya PT PLN Enjiniring) PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada tahun 2010 – 2014.	Tehnik Tenaga Listrik Manajemen
	<i>December 1967</i>	<i>Male</i>	<i>Bachelor Degree in Electrical Engineering - Bandung Institute of Technology Master of Management - Bandung Institute of Technology</i>	<i>Served as Commissioner of PT PLN Enjiniring since December 08, 2020. Previously, he had experience as a Project Control Expert (TK) at PT PLN (Persero) Head Office (Task Work to PT PLN Enjiniring) Head Office in 2014 – 2016, Senior Specialist I Project Control (Kindergarten) at (PT PLN Enjiniring) PT PLN (Persero) Head Office in 2010 – 2014.</i>	<i>Electric Power Engineering Management</i>



Muhammad Rizali Karliansyah	Maret 1961	Laki-laki	S1 Biologi - Universitas Indonesia S2 Ilmu Lingkungan - Universitas Indonesia	Menjabat sebagai Komisaris PT PLN Enjiniring sejak 19 Februari 2021 Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015 – 2021, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2010 – 2015, dan Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran Pertambangan, Energi dan Migas di Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2007 – 2010.	Biologi Lingkungan Hidup
	March 1961	Male	Bachelor Degree in Biology - University of Indonesia Master of Environmental Science - University of Indonesia	He has served as Commissioner of PT PLN Enjiniring since 19 February 2021. Previously he had experience as Director General of Environmental Pollution and Damage Control at the Ministry of Environment and Forestry in 2015 – 2021, Deputy for Environmental Pollution Control at the Ministry of Environment in 2010 – 2015, and Assistant Deputy for Environmental Affairs Mining, Energy and Oil and Gas Pollution Control at the Ministry of Environment 2007 – 2010.	Biology Environment
Hardiv Harris Situmeang	Mei 1953	Laki-laki	S1 Tenaga Listrik - Institut Teknologi Bandung S2 Electrical Engineering - Union College, Schenectady, New York S3 System Science & Mathematics - Washington University	Menjabat sebagai Komisaris Independen PT PLN Enjiniring sejak 25 November 2021 Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Ahli Utama di PT PLN (Persero) dari tahun 2003, Direktur Perencanaan PT PLN (Persero) tahun 2001 dan Direktur Perencanaan PT PLN (Persero) tahun 1998.	Kelistrikan

May 1953	Male	<p>Bachelor Degree in Electrical Power - Bandung Institute of Technology</p> <p>Master's Degree in Electrical Engineering - Union College, Schenectady, New York</p> <p>Master's Degree in System Science & Mathematics - Washington University</p>	<p>He has served as Independent Commissioner of PT PLN Enjiniring since November 25, 2021. Previously, he had experience as a Principal Expert at PT PLN (Persero) from 2003, Planning Director at PT PLN (Persero) in 2001 and Planning Director at PT PLN (Persero) in 1998.</p>	Electricity
----------	------	---	--	-------------

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Board Manual Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai :

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.
2. Jabatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislative, dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan/atau ;
3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Untuk perangkapan jabatan Dewan Komisaris yang tidak termasuk dalam ketentuan di atas atau untuk pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud di atas maka diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Bagi anggota Direksi Perusahaan yang tidak lagi menjabat, tidak dapat diangkat menjadi Komisaris Utama Perusahaan yang sama selama 2 (dua) tahun sejak yang bersangkutan tidak menjabat anggota Direksi.

DUAL POSITION OF BOARD OF COMMISSIONERS

Based on the Articles of Association and the Company's Board Manual, Members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as:

1. Members of the Board of Directors in State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, Private-Owned Enterprises.
2. Other positions in accordance with the provisions of laws and regulations, political party administrators and/or candidates for legislative members, and/or candidates for Regional Head/Deputy Regional Head and/or;
3. Other positions that may cause a conflict of interest.

For concurrent positions of the Board of Commissioners that are not included in the above provisions or for exceptions to the provisions referred to above, approval from the General Meeting of Shareholders is required.

For members of the Board of Directors of the Company who are no longer in office, cannot be appointed as President Commissioner of the same Company for 2 (two) years since the person concerned is not a member of the Board of Directors.

Dewan Komisaris telah mengungkapkan jabatan rangkap yang dimilikinya. Jabatan rangkap Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

The Board of Commissioners has disclosed his concurrent positions. The concurrent positions of the Board of Commissioners can be seen in the table below as follows:

TABEL RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS
TABLE CONCURRENT POSITIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONER

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris <i>Concurrent Positions of the Board Manual of Commissioner</i>		
Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Positions</i>	Rangkap Jabatan <i>Concurrent Positions</i>
Ahmad Rofik	Komisaris Utama	-
	President Commissioner	
Edward Siagian	Komisaris	-
	Commissioner	
Muhammad Rizali Karliansyah	Komisaris	-
	Commissioner	
Hardiv Harris Situmeang	Komisaris	-
	Commissioner	

PROGRAM PENGENALAN UNTUK KOMISARIS BARU

INTRODUCTION PROGRAM FOR NEW COMMISSIONERS

1. Dewan Komisaris yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan.
 - a. Dewan Komisaris menyampaikan kepada Direksi untuk diadakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris.
 - b. Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat mengikuti program pengenalan perusahaan.
 - c. Tingkat kehadiran/keaktifan anggota Dewan Komisaris dalam mengikuti program pengenalan perusahaan.
 2. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai sekretaris perusahaan.
 3. Program pengenalan meliputi:
 - a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;
1. *The newly appointed Board of Commissioners participates in the introduction program organized by the company.*
 - a. *The Board of Commissioners conveys to the Board of Directors to hold an introduction program for members of the Board of Commissioners.*
 - b. *Newly appointed members of the Board of Commissioners participate in the company introduction program.*
 - c. *The level of attendance/activity of members of the Board of Commissioners in participating in the company introduction program.*
 2. *The responsibility for conducting the introduction program rests with the Corporate Secretary or anyone who performs the function as a corporate secretary.*
 3. *The introduction program includes:*
 - a. *Implementation of GCG principles by the Company;*

- b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
 - c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.
 - d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.
4. Program pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perseroan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perseroan dimana program tersebut dilaksanakan.

- b. *Description of the Company in relation to the objectives, nature and scope of activities, financial and operating performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive position, risks and other strategic issues;*
 - c. *Information relating to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee.*
 - d. *Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as things that are not allowed.*
4. *Company introduction programs can be in the form of presentations, meetings, visits to the Company and review of documents or other programs deemed appropriate to the Company where the program is implemented.*

PEMBERHENTIAN DAN PENGUNDURAN DIRI DEWAN KOMISARIS

Mekanisme pemberhentian dan pengunduran diri Dewan Komisaris yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* Perusahaan adalah sebagai berikut.

1. Pemberhentian Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya.
2. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan komisaris:
 - a. Tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik;
 - b. Tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan dan/atau ketentuan Anggaran dasar Perseroan;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;

DISCLAIMER AND REGISTRATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The mechanism for the dismissal and resignation of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and the Company's Board Manual is as follows.

1. Termination of The Board of Commissioners

1. *Members of the Board of Commissioners may be dismissed at any time based on the Decision of the General Meeting of Shareholders by stating the reasons.*
2. *Dismissal of members of the Board of Commissioners as referred to in number 1 above, is carried out if based on the facts, members of the Board of Commissioners:*
 - a. *Unable to perform their duties properly;*
 - b. *Not implementing or violating the provisions of laws and regulations and/or the provisions of the Company's Articles of Association;*
 - c. *Engage in actions that are detrimental to the Company and/or the State;*



- d. Dinyatakan bersalah sehubungan dengan huruf a, b dan c berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau
 - e. Mengundurkan diri.
3. Disamping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
 4. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 2, diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh pemegang saham.
 5. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, b dan c, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
 6. Dalam hal pemberhentian di luar forum Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada angka 5 disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada angka 4.
 7. Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 2 masih dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
 8. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dan d merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

2. Pengunduran Diri

1. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.

d. Is declared guilty in connection with letters a, b and c based on a court decision which has permanent legal force; and/or

e. Resign.

3. *In addition to the reasons for the dismissal of members of the Board of Commissioners as referred to in number 2 above, members of the Board of Commissioners may be dismissed by the General Meeting of Shareholders for the interests and objectives of the Company.*
4. *The plan to dismiss members of the Board of Commissioners as referred to in number 2 shall be notified to the relevant member of the Board of Commissioners orally or in writing by the shareholders.*
5. *The decision to dismiss for reasons as referred to in number 2 letters a, b and c, is taken after the person concerned has been given the opportunity to defend himself.*
6. *In the event of dismissal outside the General Meeting of Shareholders forum, the self-defense as referred to in number 5 shall be submitted in writing to the Shareholders within 15 (fifteen) days from the date the member of the Board of Commissioners concerned is notified as referred to in number 4.*
7. *As long as the termination plan as referred to in number 2 is still in process, the member of the Board of Commissioners concerned must carry out his duties properly.*
8. *Dismissal for reasons as referred to in number 3 letters c and d is a dismissal with disrespect.*

2. Resignation

1. *A member of the Board of Commissioners has the right to resign from his position by notifying in writing of his intention to the Company with a copy to the shareholders, other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors no later than 30 (thirty) days before the date of his resignation. If the resignation letter mentions an effective date of less than 30 (thirty) days from the date the letter is received, it is considered not to mention the effective date of resignation.*

2. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengunduran diri diterima dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari Rapat Umum Pemegang saham, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut diatas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun pada masa jabatan berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung-jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggung-jawabannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

2. *If up to the date requested by the member of the Board of Commissioners concerned or within 30 (thirty) days from the date of receipt of the resignation letter is received in the event that the effective date of resignation is not stated, there is no decision from the General Meeting of Shareholders, then The member of the Board of Commissioners resigns automatically on the date requested above or with the lapse of 30 (thirty) days from the date the resignation letter is received without requiring the approval of the General Meeting of Shareholders.*
3. *For members of the Board of Commissioners who resign before or at the end of their term of office, unless they resign due to death, then the person concerned remains responsible for his actions for which his accountability has not been received by the General Meeting of Shareholders.*

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Dewan komisaris/Pengawas memiliki kebijakan benturan kepentingan dan melaksanakan secara konsisten kebijakan tersebut.

1. Terdapat kebijakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai (potensi) benturan kepentingan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dan menyatakan secara tertulis hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan terhadap dirinya dan menyampaikannya kepada RUPS/Pemilik Modal:
 - a. Adanya surat pernyataan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan pada awal pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun:
 - 1) Untuk pernyataan tahunan dapat dilaksanakan dengan menambahkan pernyataan tersebut sebagai lampiran atau bagian dari Kontrak Kinerja atau RKAT Dewan Komisaris.

MANAGEMENT OF CONFLICTS OF INTEREST BOARD OF COMMISSIONERS

The board of commissioners/supervisors has a conflict of interest policy and consistently implements the policy.

1. *There is a policy of the Board of Commissioners/ Supervisory Board regarding (potential) conflicts of interest that may interfere with the implementation of the duties of the Board of Commissioners/Supervisory Board.*
2. *The Board of Commissioners/Supervisory Board signs a statement that they do not have a conflict of interest and states in writing matters that have the potential to cause a conflict of interest to themselves and submits them to the GMS/Capital Owners:

 - a. *There is a statement letter from the Board of Commissioners that there is no conflict of interest at the beginning of the appointment which is renewed at the beginning of each year:

 - 1) *For the annual statement, it can be implemented by adding the statement as an attachment or part of the Performance Contract or RKAT of the Board of Commissioners.***

2) Bila dalam periode pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengalami (potensi) benturan kepentingan terdapat surat pernyataan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai hal tersebut dan disampaikan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.

b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas membuat Pakta Integritas yang dilampirkan dalam Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan persetujuan RUPS/Pemilik Modal.

3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam Daftar Khusus mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan tersebut dan perusahaan lain.

2) *If during the period of carrying out their duties, the Board of Commissioners/Supervisory Board experiences a (potential) conflict of interest, there is a statement from the Board of Commissioners/Supervisory Board regarding this matter and submitted to the Shareholders/Equity Owners.*

3) *The Board of Commissioners/Supervisory Board shall make an Integrity Pact attached to the Proposed Action of the Board of Directors which must obtain a recommendation from the Board of Commissioners/Supervisory Board and approval of the GMS/Equity Owner.*

4. *The Board of Commissioners/Supervisory Board is required to report to the company (Corporate Secretary) to be recorded in the Special Register regarding share ownership and/or family members in the company and other companies.*

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan keluarga di PLN Enjiniring dan perusahaan lain, serta telah menandatangani Pakta Integritas. Hal ini merupakan bentuk komitmen Dewan Komisaris dalam menghindari aktivitas yang berpotensi benturan kepentingan.

Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki saham, baik di PLN Enjiniring maupun di perusahaan lainnya. Kepemilikan saham Dewan Komisaris sebagai berikut.

SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners has organized a Special Register containing share ownership of members of the Board of Commissioners and their families in PLN Enjiniring and other companies, and has signed an Integrity Pact. This is a form of the commitment of the Board of Commissioners in avoiding activities that have the potential to conflict of interest.

The Board of Commissioners does not own any shares, either in PLN Enjiniring or in other companies. The share ownership of the Board of Commissioners is as follows.

TABEL KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

TABLE OF SHAREHOLDERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Nama	Kepemilikan Saham di PLN Enjiniring	Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain
Name	Share Ownership at PLN Enjiniring	Share Ownership in Other Companies
Ahmad Rofik	Nihil Nil	Nihil Nil
Edward Siagian	Nihil Nil	Nihil Nil
Muhammad Rizali Karlansyah	Nihil Nil	Nihil Nil
Hardiv Harris Situmeang	Nihil Nil	Nihil Nil

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mendapat sejumlah remunerasi dan fasilitas lainnya. Kebijakan pemberian remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris didasarkan pada pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI

Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

FASILITAS ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas sebagai berikut:
 - a. Fasilitas kesehatan; dan
 - b. Fasilitas bantuan hukum
2. Ketentuan mengenai fasilitas kesehatan anggota Direksi, mutatis mutandis berlaku bagi Fasilitas kesehatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Dalam hal seseorang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas pada lebih dari satu BUMN dan/atau pada anak perusahaan/perusahaan patungan, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan satu Fasilitas kesehatan.
3. Fasilitas kesehatan bagi anggota Dewan Komisaris diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan wajib memberikan fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan kepada Anggota Dewan Komisaris.

BOARD OF COMMISSIONERS' REMUNERATION POLICY

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners receives a number of remuneration and other facilities. The policy for providing remuneration and other facilities for the Board of Commissioners is based on Article 6 paragraph (1) of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Decree of the Board of Directors of PT PLN (Persero) as the Proxy of Shareholders.

REMUNERATION DETERMINATION PROCEDURE

Members of the Board of Commissioners are given honoraria and allowances/facilities including post-service benefits, the types and amounts of which are determined by the General Meeting of Shareholders with due observance of the provisions of the prevailing laws and regulations.

BOARD OF COMMISSIONERS' FACILITIES

1. *Members of the Board of Commissioners/Supervisory Board may be granted the following facilities:*
 - a. *Medical facility; and*
 - b. *Legal aid facilities*
2. *Provisions regarding health facilities for members of the Board of Directors, mutatis mutandis apply to health facilities for members of the Board of Commissioners/Supervisory Board. In the event that a person serves as a member of the Board of Commissioners and the Supervisory Board in more than one BUMN and/or in a subsidiary/joint venture, then the person concerned is only given one health facility.*
3. *Health facilities for members of the Board of Commissioners are provided with the following conditions:*
 - a. *The Company is obliged to provide health facilities in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses to Members of the Board of Commissioners.*

- b. Fasilitas Kesehatan diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris beserta seorang isteri atau suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapat fasilitas kesehatan.
 - c. Fasilitas kesehatan diberikan berupa: (i) Rawat jalan dan obat; (ii) Rawat inap dan obat; dan (iii) *Medical Check-up*.
 - d. Dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri, pemberian fasilitas kesehatan dapat diberikan penuh atau sebagian dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan.
 - e. *Medical Check-up* diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) *Medical check-up* diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.
 - 2) *Medical check-up* dilakukan di dalam negeri.
 - f. Dalam hal Direksi merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris anak perusahaan/ perusahaan patungan, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan satu fasilitas Kesehatan yaitu fasilitas kesehatan pada Perseroan.
7. Ketentuan mengenai fasilitas bantuan hukum anggota Direksi dan mantan anggota Direksi, mutatis mutandis berlaku bagi Fasilitas bantuan hukum bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas serta mantan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
8. Fasilitas bantuan hukum bagi anggota Dewan Komisaris diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Fasilitas bantuan hukum diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
 - b. Anggota Dewan Komisaris yang akan menggunakan fasilitas bantuan hukum, wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menerangkan posisi yang bersangkutan dalam kasus

- b. *Health facilities are provided to Members of the Board of Commissioners along with a wife or husband and a maximum of 3 (three) children who have not reached the age of 25 (twenty five) years with the stipulation that if the child who is not yet 25 years old has been married or has worked, the person concerned is not entitled to health facilities.*
 - c. *Health facilities are provided in the form of: (i) Outpatient and medication; (ii) Hospitalization and medication; and (iii) Medical Check-ups.*
 - d. *In the event that the treating doctor provides a referral for treatment abroad, the provision of health facilities can be provided in full or in part by taking into account the financial capacity of the Company.*
 - e. *Medical Check-up is provided with the following conditions:*
 - 1) *Medical check-up is given 1 (one) time every year.*
 - 2) *Medical check-ups are carried out in the country.*
 - f. *In the event that the Board of Directors concurrently serves as a member of the Board of Commissioners of a subsidiary/ joint venture, then the person concerned is only given one Health facility, namely health facility in the Company.*
7. *Provisions regarding legal aid facilities for members of the Board of Directors and former members of the Board of Directors, mutatis mutandis apply to legal aid facilities for members of the Board of Commissioners/Supervisory Board and former members of the Board of Commissioners/Supervisory Board.*
8. *Legal aid facilities for members of the Board of Commissioners are provided with the following conditions:*
- a. *Legal aid facilities are provided in the event of an action/deed for and on behalf of the position related to the aims and objectives as well as the Company's business activities.*
 - b. *Members of the Board of Commissioners who will use legal aid facilities are required to make a statement on paper with sufficient stamps explaining the position in question in a particular case, not as a person and willing*

tertentu bukan sebagai pribadi dan bersedia mengembalikan fasilitas bantuan hukum tersebut kepada perusahaan apabila ternyata kepada perusahaan apabila ternyata terbukti posisi yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi.

- c. Fasilitas bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka dan terdakwa di lembaga peradilan.
- d. Jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang dapat dibebankan pembiayaannya kepada Perseroan hanya untuk satu kantor pengacara /atau konsultan hukum untuk satu kasus tertentu.
- e. Penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Perseroan.
- f. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan dihukum oleh pengadilan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya pengacara/konsultan hukum baik yang telah dikeluarkan maupun yang belum dibayar oleh Perseroan menjadi beban yang bersangkutan.
- g. Dalam hal yang bersangkutan diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya kantor pengacara/konsultan hukum menjadi beban Perseroan.
- h. Biaya kantor pengacara/konsultan hukum diberikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan.
- i. Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka santunan purna jabatan bagi anggota Dewan Komisaris tidak dibayarkan dan dimasukkan kedalam rekening khusus yang diadakan oleh Direksi Perseroan sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan Perseroan.

to return the legal aid facility to the company if it turns out to be to the company if it is proven that the position in question is in the case is as private.

- c. *Legal aid facilities are provided in the form of financing for the services of a lawyer/legal consultant office covering the examination process as witnesses, suspects and defendants in a judicial institution.*
- d. *The services of a lawyer's office/legal consultant whose financing can be charged to the Company are only for one attorney's office/ or legal consultant for one particular case.*
- e. *The appointment of a lawyer/legal consultant office is carried out by the Company in accordance with the provisions of the procurement of goods and services that apply in the Company.*
- f. *In the event that the person concerned is found guilty and sentenced by a court of judgment which has permanent legal force, then the costs of the attorney/legal consultant, whether issued or not yet paid by the Company, shall be borne by the person concerned.*
- g. *In the event that the person concerned is acquitted/declared not guilty by the court with a decision that has permanent legal force, the costs of the attorney's office/legal consultant will be borne by the Company.*
- h. *The cost of the attorney's office/legal consultant is given by taking into account the principles of fairness, transparency and accountability in accordance with applicable regulations, and taking into account the financial capacity of the Company.*
- i. *As long as the legal issue does not have permanent legal force, the post-employment compensation for members of the Board of Commissioners is not paid and is deposited into a special account held by the Board of Directors of the Company as collateral for court costs incurred by the Company.*

Anggota Dewan Komisaris yang menerima fasilitas bantuan hukum wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menerangkan bahwa yang bersangkutan bersedia menjadikan asuransi purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh Perseroan.

- j. Dalam hal anggota Dewan Komisaris menggunakan pengacara/konsultan hukum atas pilihannya sendiri baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh Perseroan.
- k. Anggota Dewan Komisaris yang dalam penggunaan kantor pengacara/konsultan hukum dibiayai Perseroan maka yang bersangkutan wajib membuat pernyataan akan mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- l. Perseroan tidak menanggung biaya pengacara/konsultan hukum dalam hal anggota Dewan Komisaris menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana yang dilaporkan oleh Perseroan yang bersangkutan, Negara (Negara sebagai Badan Hukum atau Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintah) atau pihak tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- m. Anggota Dewan Komisaris yang diperkarakan dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum.
- n. Dalam kasus Perdata atau Tata Usaha Negara, biaya perkara ditanggung oleh Perseroan sepanjang:
 - i. Pengacara/konsultan hukum yang digunakan hanya satu kantor pengacara/konsultan hukum untuk satu kasus tertentu.
 - ii. Penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Perseroan.

Members of the Board of Commissioners who receive legal aid facilities are required to make a statement on paper with sufficient stamps explaining that the person concerned is willing to make his post-employment insurance as collateral for court costs incurred by the Company.

- j. In the event that a member of the Board of Commissioners uses a lawyer/legal consultant of their own choice, either at the level of investigation/investigation, court of first instance, appeal, cassation or review, the costs of the attorney/legal consultant are not borne/reimbursed by the Company.*
- k) The Board of Commissioner Members whose lawyer / legal consultant office are financed by the Company, then they are required to make a statement that they will replace / refund the costs incurred by the Company if they abided by the law and the court found guilty.*
- l. The Company does not bear the costs of a lawyer/legal consultant in the event that a member of the Board of Commissioners becomes a witness, suspect or defendant due to a criminal process reported by the Company concerned, the State (State as a Legal Entity or State Institution or Government Institution) or certain parties determined by the General Meeting Shareholders.*
- m. The litigated member of the Board of Commissioners is prohibited from being involved in making decisions regarding the appointment of a lawyer/legal consultant office.*
- n. In cases of Civil or State Administration, the costs of the case shall be borne by the Company as long as:

 - i. Only one attorney/legal consultant is used for one particular case.*
 - ii. The appointment of a lawyer/legal consultant office is carried out by the Company in accordance with the provisions of the procurement of goods and services that apply in the Company.**

- iii. Biaya pengacara/konsultan hukum adalah biaya-biaya yang resmi dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.
 - iv. Anggota Dewan Komisaris Perseroan digugat karena permasalahan hukum yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - v. Penggugat atau tergugat adalah pihak selain Perseroan yang bersangkutan, Negara (Negara sebagai Badan Hukum atau Lembaga Hukum atau Lembaga Pemerintah) atau pihak tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - o. Perseroan wajib memberikan fasilitas bantuan hukum kepada mantan anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi permasalahan hukum yang timbul karena yang bersangkutan melakukan tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya tersebut berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, yang dilakukannya selama yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 - p. Ketentuan mengenai pemberian fasilitas bantuan hukum di atas, mutatis mutandis berlaku bagi pemberian fasilitas bantuan hukum bagi mantan anggota Dewan Komisaris.
- iii. *Lawyer/legal consultant fees are official fees and can be legally accounted for.*
 - iv. *Members of the Company's Board of Commissioners were sued because of legal problems that arose in the context of carrying out the duties of the Company in accordance with applicable regulations.*
 - v. *The plaintiff or defendant is a party other than the company concerned, the State (the State as a Legal Entity or Legal Institution or Government Institution) or certain parties determined by the General Meeting of Shareholders.*
 - o. *The Company is obliged to provide legal assistance facilities to former members of the Board of Commissioners in the event of legal problems arising because the person concerned takes actions/deeds for and on behalf of his position in relation to the purposes and objectives as well as the Company's business activities, which he did while he was serving as a member of the Board of Commissioners. Commissioner of the Company.*
 - p. *The provisions regarding the provision of legal aid facilities above, mutatis mutandis apply to the provision of legal aid facilities for former members of the Board of Commissioners.*

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris terdiri dari :

1. Rapat Internal Dewan Komisaris yang hanya dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris
2. Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi

Sepanjang tahun 2021, Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners meeting is a meeting held by the Board of Commissioners. The Board of Commissioners' meeting consists of:

1. Internal Meeting of the Board of Commissioners which is only attended by members of the Board of Commissioners
2. Meeting of the Board of Commissioners by inviting the Board of Directors

Throughout 2021, the agenda, dates and participants of the Board of Commissioners' Meetings are as follows :

TABEL FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS
TABLE OF FREQUENCY AND ATTENDANCE OF BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Dewan Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi		
		<i>Internal Meeting of the Board of Commissioner</i>			<i>Joint Meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors</i>		
		Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran		
		<i>Number and (%) Attendance</i>			<i>Number and (%) Attendance</i>		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
<i>Number of Meeting</i>	<i>Number of Attendance</i>	<i>%</i>	<i>Number of Meeting</i>	<i>Number of Attendance</i>	<i>%</i>		
Ahmad Rofik	Komisaris Utama	17	17	100%	13	13	100%
Ahmad Rofik	President Commissioner	17	17	100%	13	13	100%
Edward Siagian	Komisaris	17	17	100%	13	13	100%
Edward Siagian	Commissioner	17	17	100%	13	13	100%
Djoko Prasetyo	Komisaris	17	5	29%	13	2	15%
Djoko Prasetyo	Commissioner	17	5	29%	13	2	15%
Marzuqi	Komisaris	17	5	29%	13	2	15%
Marzuqi	Commissioner	17	5	29%	13	2	15%
Muhammad Rizali Karlansyah	Komisaris	17	12	71%	13	11	85%
Muhammad Rizali Karlansyah	Commissioner	17	12	71%	13	11	85%
Hardiv Harris Situmeang	Komisaris	17	12	71%	13	11	85%
Hardiv Harris Situmeang	Commissioner	17	12	71%	13	11	85%

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris mengadakan rapat internal Dewan Komisaris dengan ketentuan:

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris.
2. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh Anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

INTERNAL MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners holds an internal meeting of the Board of Commissioners with the following provisions:

1. All decisions of the Board of Commissioners are taken at the meeting of the Board of Commissioners.
2. Decisions can also be taken outside the meeting of the Board of Commissioners as long as all members of the Board of Commissioners agree on the method and material to be decided.

3. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.
4. Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Komisaris tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
5. Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
6. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak biasa.
7. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.
8. Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan rapat memutuskan hasil rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 3.7 angka 2 di atas, kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan pemilihan secara tertutup.
9. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat.
10. Dalam hal usulan lebih dari 2 (dua) alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan suatu alternatif dengan suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap 2 (dua) usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
11. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Sepanjang tahun 2021, Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Internal Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Throughout 2021, the Agenda, Dates and Participants of the Internal Meeting of the Board of Commissioners are as follows.

TABEL RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING TABLE

No	Tanggal <i>Date</i>	Agenda Rapat <i>Meeting Agenda</i>	Peserta Rapat <i>Meeting Participants</i>
1	07 Januari 2021 <i>January 07, 2021</i>	1. Persiapan RUPS LPT Tahun Buku 2020 <i>1. Preparation of GMS Annual Report for Fiscal Year 2020</i>	1. Ahmad Rofik 2. Edward Siagian 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi
2	09 Januari 2021 <i>January 09, 2021</i>	1. Persiapan RUPS LPT Tahun Buku 2020 <i>1. Preparation of GMS Annual Report for Fiscal Year 2020</i>	1. Ahmad Rofik 2. Edward Siagian 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi
3	10 Januari 2021 <i>January 10, 2021</i>	1. Persiapan RUPS LPT Tahun Buku 2020 <i>1. Preparation of GMS Annual Report for Fiscal Year 2020</i>	1. Ahmad Rofik 2. Edward Siagian 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi
4	19 Januari 2021 <i>January 19, 2021</i>	1. Persiapan RUPS LPT Tahun Buku 2020 2. Pembahasan Kinerja Semester II Tahun Buku 2020 <i>1. Preparation of GMS Annual Report for Fiscal Year 2020</i> <i>2. Discussion on the Performance of Semester II for Fiscal Year 2020</i>	1. Ahmad Rofik 2. Edward Siagian 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi
5	16 Februari 2021 <i>February 16, 2021</i>	1. Laporan Komite - Komite Dekom <i>1. Committee Report - Board of Commissioners Committee</i>	1. Ahmad Rofik 2. Edward Siagian 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi
6	24 Maret 2021 <i>March 24, 2021</i>	1. Laporan Komite - Komite Dekom 2. Pembahasan CPSI <i>1. Committee Report - Board of Commissioners Committee</i> <i>2. CPSI Discussion</i>	1. Ahmad Rofik 2. Edward Siagian 3. Muhammad Rizali Karliansyah 4. Hardiv Harris Situmeang
7	11 Juni 2021 <i>June 11, 2021</i>	1. Finalisasi Laporan Tahun Buku 2020 <i>1. Finalization of the 2020 Fiscal Year Report</i>	1. Ahmad Rofik 2. Edward Siagian 3. Muhammad Rizali Karliansyah 4. Hardiv Harris Situmeang

8	23 Juni 2021	<ol style="list-style-type: none"> Persiapan RUPS LPT Pembahasan CPSI Pembahasan Road Map Pembahasan Revisi RKAP Tahun 2021 	<ol style="list-style-type: none"> Ahmad Rofik Edward Siagian Muhammad Rizali Karliansyah Hardiv Harris Situmeang
	<i>June 23, 2021</i>	<ol style="list-style-type: none"> <i>Preparation of GMS Annual Report</i> <i>CPSI Discussion</i> <i>Road Map Discussion</i> <i>Discussion on Revised RKAP 2021</i> 	
9	12 Juli 2021	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Revisi RKAP Tahun 2021 	<ol style="list-style-type: none"> Ahmad Rofik Edward Siagian Muhammad Rizali Karliansyah Hardiv Harris Situmeang
	<i>July 12, 2021</i>	<ol style="list-style-type: none"> <i>Discussion on Revised RKAP 2021</i> 	
10	26 Juli 2021	<ol style="list-style-type: none"> Laporan - Laporan Komite 	<ol style="list-style-type: none"> Ahmad Rofik Edward Siagian Muhammad Rizali Karliansyah Hardiv Harris Situmeang
	<i>July 26, 2021</i>	<ol style="list-style-type: none"> <i>Committee Report - Board of Commissioners Committee</i> 	
11	23 Agustus 2021	<ol style="list-style-type: none"> Laporan - Laporan Komite 	<ol style="list-style-type: none"> Ahmad Rofik Edward Siagian Muhammad Rizali Karliansyah Hardiv Harris Situmeang
	<i>August 23, 2021</i>	<ol style="list-style-type: none"> <i>Committee Report - Board of Commissioners Committee</i> 	
12	20 September 2021	<ol style="list-style-type: none"> Laporan - Laporan Komite 	<ol style="list-style-type: none"> Ahmad Rofik Edward Siagian Muhammad Rizali Karliansyah Hardiv Harris Situmeang
	<i>September 20, 2021</i>	<ol style="list-style-type: none"> <i>Committee Report - Board of Commissioners Committee</i> 	
13	30 September 2021	<ol style="list-style-type: none"> Penilaian Kinerja Dekom Semester I Tahun 2021 	<ol style="list-style-type: none"> Ahmad Rofik Edward Siagian Muhammad Rizali Karliansyah Hardiv Harris Situmeang
	<i>September 30, 2021</i>	<ol style="list-style-type: none"> <i>Performance Assessment of the First Semester of 2021</i> 	
14	8 Oktober 2021	<ol style="list-style-type: none"> Penilaian Kinerja Dekom Semester I Tahun 2021 	<ol style="list-style-type: none"> Ahmad Rofik Edward Siagian Muhammad Rizali Karliansyah Hardiv Harris Situmeang
	<i>October 8, 2021</i>	<ol style="list-style-type: none"> <i>Performance Assessment of the First Semester of 2021</i> 	
15	13 Oktober 2021	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Board Manual Tahun 2021 	<ol style="list-style-type: none"> Ahmad Rofik Edward Siagian Muhammad Rizali Karliansyah Hardiv Harris Situmeang
	<i>October 13, 2021</i>	<ol style="list-style-type: none"> <i>2021 Board Manual Discussion</i> 	

16	13 Desember 2021	1. Pembahasan Penghapusan Piutang	1. Ahmad Rofik 2. Edward Siagian 3. Muhammad Rizali Karliansyah 4. Hardiv Harris Situmeang
	<i>December 13, 2021</i>	<i>1. Discussion on Write-off of Accounts Receivable</i>	
17	20 Desember 2021	1. Pembahasan RKAP Tahun 2022	1. Ahmad Rofik 2. Edward Siagian 3. Muhammad Rizali Karliansyah 4. Hardiv Harris Situmeang
	<i>December 20, 2021</i>	<i>1. Discussion of the 2022 RKAP</i>	

RAPAT DEWAN KOMISARIS DENGAN MENDANG DIREKSI

MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS BY INVITE THE BOARD OF DIRECTORS

Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat dengan mengundang Direksi dengan ketentuan:

The Board of Commissioners may hold a meeting by inviting the Board of Directors with the following conditions:

1. Rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri Direksi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.
2. Panggilan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau Anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan kepada anggota Komisaris lain maupun Direksi dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

1. *Meetings of the Board of Commissioners in the presence of the Board of Directors are held as needed.*
2. *The summons for the meeting of the Board of Commissioners as referred to in number 1 above shall be made in writing by the President Commissioner or a Member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner and delivered to other members of the Board of Commissioners Commissioners and the Board of Directors at least 3 (three) days prior to the meeting.*
3. *The summons for the meeting must include the agenda, date, time and place of the meeting.*

Sepanjang tahun 2021, Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi adalah sebagai berikut.

Throughout 2021, the Agenda, Date and Participants of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors are as follows.

TABEL RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS JOINT MEETING TABLE

No	Tanggal <i>Date</i>	Agenda Rapat <i>Meeting Agenda</i>	Peserta Rapat – Dewan Komisaris <i>Meeting Participants - Board of Commissioners</i>	Peserta Rapat -Direksi <i>Meeting Participants - Directors</i>
1	20 Januari 2021 <i>January 20, 2021</i>	1. Persiapan RUPS RKAP 2021 2. Self Maturity Level ERM 3. Pencapaian Kinerja Tahun 2021 <i>1. Preparation for the 2021 RKAP GMS 2. Self Maturity Level ERM 3. Performance Achievements in 2021</i>	1. Ahmad Rofik 2. Edward Siagian 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi	1. Hernadi Buhron 2. Alfi Zamzami 3. Yanuar Hakim 4. Ultrisza Mednawarman

2	18 Februari 2021 <i>February 18, 2021</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update KPI Tahun 2021 2. Hasil Rapat Kerja Tahun 2021 3. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>KPI Update 2021</i> 2. <i>2021 Work Meeting Results</i> 3. <i>Follow-up to Previous Meeting</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Rofik 2. Edward Siagian 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Alfi Zamzami 3. Yanuar Hakim 4. Ultrisza Mednawarman
3	25 Maret 2021 <i>March 25, 2021</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update RKAP Tahun Buku 2021 2. Rencana Kinerja Direksi Baru 3. Program Pencapaian Pendapatan dan Biaya TW I Tahun 2021 4. Laporan Pencapaian KPI TW I Tahun 2021 5. Pembahasan CPSI <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Update RKAP for Fiscal Year 2021</i> 2. <i>New Board of Directors Performance Plan</i> 3. <i>First Quarter 2021 Revenue and Expense Achievement Program</i> 4. <i>Quarter I KPI Achievement Report 2021</i> 5. <i>CPSI discussion</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Rofik 2. Edward Siagian 3. Muhammad Rizali Karliansyah 4. Hardiv Harris Situmeang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didik Sudarmadi 2. Martono 3. Bernadus Sudarmanta
4	29 April 2021 <i>April 29, 2021</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan CPSI 2. Pembahasan Laporan Manajemen TW I Tahun 2021 3. Pembahasan Peta SDM 4. Updating Program Kerja KSPMR Tahun 2021 5. Peta Risiko TW I Tahun 2021 6. Rencana Tingkat Lanjut Arah RUPS RKAP Tahun 2021 <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>CPSI discussion</i> 2. <i>Discussion of the First Quarter 2021 Management Report</i> 3. <i>HR Map Discussion</i> 4. <i>Updating the 2021 KSPMR Work Program</i> 5. <i>Risk Map Quarter I Year 2021</i> 6. <i>Next Level Plan for 2021 RKAP GMS Directions</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Rofik 2. Edward Siagian 3. Muhammad Rizali Karliansyah 4. Hardiv Harris Situmeang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didik Sudarmadi 2. Martono 3. Bernadus Sudarmanta

5	24 Mei 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan CPSI 2. Progres Audit Laporan Keuangan oleh PWC 3. Upaya Pencapaian Target Keuangan dan KPI Tahun 2021 4. Tantangan dan Kendala Penilaian RMM pada Anak Perusahaan tahun 2021 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Rofik 2. Edward Siagian 3. Muhammad Rizali Karliansyah 4. Hardiv Harris Situmeang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didik Sudarmadi 2. Martono 3. Bernadus Sudarmanta
	May 24, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. CPSI discussion 2. Financial Report Audit Progress by PWC 3. Efforts to Achieving Financial Targets and KPIs in 2021 4. Challenges and Constraints of RMM Assessment in Subsidiaries in 2021 		
6	23 Juni 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan RUPS LPT Tahun Buku 2020 2. Pembahasan CPSI 3. Road Map SDM 4. Revisi RKAP Tahun 2021 5. Target Pemasaran Tahun 2021 dan Rencana Diversifikasi Produk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Rofik 2. Edward Siagian 3. Muhammad Rizali Karliansyah 4. Hardiv Harris Situmeang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didik Sudarmadi 2. Martono 3. Bernadus Sudarmanta
	June 23, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preparation of GMS Annual Report for Fiscal Year 2020 2. CPSI discussion 3. HR Road Map 4. Revised RKAP 2021 5. 2021 Marketing Target and Product Diversification Plan 		
7	29 Juli 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Kinerja TW II Tahun 2021 2. Revisi RKAP Tahun 2021 3. Manajemen Risiko Terintegrasi 4. Road Map SDM 5. Rencana Model Bisnis Perseroan dan APPA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Rofik 2. Edward Siagian 3. Muhammad Rizali Karliansyah 4. Hardiv Harris Situmeang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didik Sudarmadi 2. Martono 3. Bernadus Sudarmanta
	July 29, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on TW II Performance in 2021 2. Revised RKAP 2021 3. Integrated Risk Management 4. HR Road Map 5. Company Business Model Plan and APPA 		

8	26 Agustus 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Asumsi dan Penyesuaian RKAP 2021 2. Laporan Keuangan PT PPN Semester I Tahun 2021 3. Evidence KPI SDM Tahun 2021 4. Program Pencapaian Maturity ERM Tahun 2021 5. OFI Risk Maturity Assessment Semester I Tahun 2021 6. Kebijakan, Strategi dan Program Integrasi Manajemen Risiko dengan Proses Bisnis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tumpal M. simarmata 2. Julius Bobo 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didik Sudarmadi 2. Martono 3. Bernadus Sudarmanta
	Áugust 26, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Changes in Assumptions and Adjustments to the 2021 RKAP</i> 2. <i>Financial Report of PT PPN Semester I 2021</i> 3. <i>Evidence of HR KPI in 2021</i> 4. <i>2021 ERM Maturity Achievement Program</i> 5. <i>OFI Risk Maturity Assessment Semester I 2021</i> 6. <i>Policies, Strategies and Programs for Integration of Risk Management with Business Process</i> 		
9	23 September 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi Mempertahankan Sustainability serta Peningkatan Kinerja Perusahaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Rofik 2. Edward Siagian 3. Muhammad Rizali Karliansyah 4. Hardiv Harris Situmeang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didik Sudarmadi 2. Martono 3. Bernadus Sudarmanta 4. Muhamad Reza
	September 21, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Strategy to Maintain Sustainability and Improve Company Performance</i> 		
10	11 Oktober 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Realisasi Pendapatan dan Biaya Operasi s.d TW III Tahun 2021 2. Realisasi KPI Enjiniring TW III Tahun 2021 3. Permohonan Ijin Kerjasama Operasi Pemanfaatan Kolam Labuh PLTU Nagan Raya 4. Optimalisasi Enjinir untuk Pencapaian Kinerja dan Target RKAP Tahun 2021 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Rofik 2. Edward Siagian 3. Muhammad Rizali Karliansyah 4. Hardiv Harris Situmeang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didik Sudarmadi 2. Martono 3. Bernadus Sudarmanta 4. Muhamad Reza
	October 11, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Report on Realization of Operating Income and Costs up to Q3 2021</i> 2. <i>TW III Engineering KPI realization in 2021</i> 3. <i>Application for Cooperation Operation Permit for the Utilization of the PLTU Nagan Raya Harbor Pool</i> 4. <i>Optimization of Engineers for Achievement of RKAP Performance and Targets in 2021</i> 		

11	19 Oktober 2021	1. Pemaparan dan Pembahasan RJP 2021 - 2025	1. Ahmad Rofik 2. Edward Siagian 3. Muhammad Rizali Karliansyah 4. Hardiv Harris Situmeang	1. Didik Sudarmadi 2. Martono 3. Bernadus Sudarmanta 4. Muhamad Reza
	<i>October 19, 2021</i>	<i>1. Presentation and Discussion of RJP 2021 - 2025</i>		
12	25 November 2021	1. Prognosa Pencapaian Kinerja Tahun 2021 2. Pembahasan RKAP Tahun 2022	1. Ahmad Rofik 2. Edward Siagian 3. Muhammad Rizali Karliansyah 4. Hardiv Harris Situmeang	1. Didik Sudarmadi 2. Martono 3. Bernadus Sudarmanta 4. Muhamad Reza
	<i>November 25, 2021</i>	<i>1. Prognosis of Performance Achievement in 2021 2. Discussion of the 2022 RKAP</i>		
13	09 Desember 2021	1. Persiapan RUPS PLNE terkait Quick Win A15 & A16 2. Pembahasan Road Map SDM 3. KPI Kepuasan Pelanggan	1. Ahmad Rofik 2. Edward Siagian 3. Muhammad Rizali Karliansyah 4. Hardiv Harris Situmeang	1. Didik Sudarmadi 2. Martono 3. Bernadus Sudarmanta 4. Muhamad Reza
	<i>December 09, 2021</i>	<i>1. PLNE GMS preparation related to Quick Win A15 & A16 2. HR Road Map Discussion 3. Customer Satisfaction KPI</i>		

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan pencapaian kerjanya. Untuk mendukung hal tersebut, telah dilakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris melalui *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris dan *Assessment Good Corporate Governance* (GCG).

The Board of Commissioners is committed to continuously improving its performance achievements. To support this, an assessment of the performance of the Board of Commissioners has been carried out through the Board of Commissioners' Key Performance Indicators (KPI) and the Good Corporate Governance (GCG) Assessment.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Adapun kriteria penilaian berdasarkan KPI yang telah ditetapkan dalam RUPS melalui Kontrak Manajemen adalah sebagai berikut:

1. Fokus Pelanggan
2. Efektifitas Produk dan Proses
3. Fokus Tenaga Kerja
4. Keuangan dan Pasar
5. Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Masyarakat

BOARD OF COMMISSIONERS' PERFORMANCE ASSESSMENT CRITERIA

The assessment criteria based on the KPIs that have been determined in the GMS through the Management Contract are as follows:

1. Customer Focus
2. Effectiveness of Products and Processes
3. HR
4. Finance and Markets
5. Leadership, Governance and Social Responsibility

PROSEDUR PELAKSANAAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris melalui KPI dilakukan oleh Pemegang Saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE IMPLEMENTATION PROCEDURES

The performance appraisal of the Board of Commissioners through KPI is carried out by the Shareholders through the mechanism of the Annual General Meeting of Shareholders.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS BERDASARKAN KPI

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris melalui *Key Performance Indicator* (KPI) tahun 2021 yang telah disahkan oleh Pemegang Saham pada tanggal 30 Januari 2021.

BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE ASSESSMENT BASED ON KPI

Performance appraisal of the Board of Commissioners through the 2021 Key Performance Indicator (KPI) which was approved by the Shareholders on January 30, 2021.

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Pihak yang melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris adalah Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kewajiban yang tercantum dalam Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat Pemegang Saham. Dewan Komisaris akan mempertanggungjawabkan kinerja mereka pada periode 2021 dalam RUPS yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.

PARTIES THAT CONDUCT THE BOARD OF COMMISSIONERS' PERFORMANCE ASSESSMENT

The party that evaluates the performance of the Board of Commissioners is the Shareholders in the GMS based on the obligations contained in the applicable laws and the Articles of Association as well as the mandate of the Shareholders. The Board of Commissioners will be responsible for their performance in the 2021 period at the GMS which will be held in 2022.

HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris melekat pada KPI Perusahaan. Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris berdasarkan KPI pada tahun 2021, sebagai berikut.

RESULTS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' PERFORMANCE ASSESSMENT

The performance appraisal of the Board of Commissioners is attached to the Company's KPIs. The results of the Board of Commissioners' performance assessment based on KPI in 2021, are as follows.

TABEL HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

TABLE OF RESULTS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE ASSESSMENT

No	Indikator Indicator	Bobot Weight	Nilai Score
1	Fokus Pelanggan Customer Focus	8	7.70
2	Efektifitas Produk dan Proses Effectiveness of Products and Processes	32	33.50
3	Fokus Tenaga Kerja HR	12	12.20
4	Keuangan dan Pasar Finance and Markets	39	38.85
5	Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan Leadership, governance and social responsibility	9	9.39
TOTAL		100	101.64

Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris digolongkan dalam kondisi "SEHAT" kategori "AAA" dengan nilai 101.64.

The results of the performance assessment of the Board of Commissioners are classified as "HEALTH" in the "AAA" category with a score of 101.64.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS BERDASARKAN ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Dewan Komisaris berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan pencapaian kerjanya. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris melalui Assessment GCG. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris melalui Assessment Good Corporate Governance (GCG) yang telah dilakukan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS BASED ON GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) ASSESSMENT

The Board of Commissioners is committed to continuously improving its performance achievements. To support this, the Board of Commissioners Performance Assessment is carried out through the GCG Assessment. The Board of Commissioners' Performance Assessment through the Good Corporate Governance (GCG) Assessment that has been carried out in 2021 is as follows.

TABEL ASSESSMENT GCG DEWAN KOMISARIS TAHUN BUKU 2021

TABLE OF GCG ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS 2021

No.	Indikator <i>Indicators</i>	Capaian Tahun 2021 <i>Achievements in 2021</i>		Tingkat Pemenuhan (%)
		Bobot <i>Target</i>	Skor <i>Score</i>	<i>Fullfilment Rate(%)</i>
1	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan <i>Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance</i>	7,00	6,884	98,340
2	Pemegang Saham dan RUPS/ Pemilik Modal <i>Shareholders and GMS/Capital Owners</i>	9,00	7,905	87,830
3	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	35,00	33,725	96,360
4	Direksi <i>Board of Directors</i>	35,00	31,889	91,110
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Information Disclosure and Transparency</i>	9,00	7,500	83,330
6	Aspek Lainnya <i>Other Aspects</i>	5,00	3,750	75,000
Total Skor		100,00	91,653	91,653
Total Score				

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris tersebut meliputi :

1. Pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran Dewan Komisaris.
2. Pembagian tugas dan penetapan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
3. Pemberian persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.
4. Pemberian arahan dan pengawasan kepada Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.
5. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/ perusahaan patungan.
6. Peran dalam pencalonan anggota Direksi, penilaian kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan pengusulan tantiem/insentif kinerja Direksi,
7. Pelaksanaan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut Dewan Komisaris.
8. Pemantauan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
9. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dan tingkat kehadirannya dalam rapat tersebut.
10. Terdapatnya Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite-Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

BOARD OF COMMISSIONERS' PERFORMANCE ASSESSMENT CRITERIA

The criteria for evaluating the performance of the Board of Commissioners include:

1. Implementation of training/learning programs for the Board of Commissioners.
2. The division of tasks and determination of the factors needed to support the implementation of the duties of the Board of Commissioners.
3. Approval of the draft RJPP and RKAP submitted by the Board of Directors.
4. Providing direction and supervision to the Board of Directors on the implementation of company plans and policies.
5. Implementation of supervision on the implementation of policies on the management of subsidiaries/joint ventures.
6. Role in nominating members of the Board of Directors, evaluating the performance of the Board of Directors (individual and collegial) and proposing tantiem/incentives for the performance of the Board of Directors,
7. Implementation of actions against potential conflicts of interest involving the Board of Commissioners.
8. Monitoring the implementation of Good Corporate Governance principles.
9. The holding of the Board of Commissioners' Meeting and the level of attendance at the meeting.
10. There is a Secretary to the Board of Commissioners and Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners.

PROSEDUR PELAKSANAAN ASSESSMENT KINERJA DEWAN KOMISARIS

Prosedur Pelaksanaan Assessment GCG terkait Kinerja Dewan Komisaris adalah, sebagai berikut.

1. BPKP menugaskan Tim Assessment dalam pelaksanaan Assessment GCG 2020 PT PLN Enjiniring.

PROCEDURE FOR IMPLEMENTING THE BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE ASSESSMENT THE GCG

Assessment Implementation Procedures related to the Performance of the Board of Commissioners are as follows.

1. BPKP assigned the Assessment Team to implement the 2020 GCG Assessment of PT PLN Enjiniring.

2. Tim *Assessment* mengkoordinir seluruh unit kerja terkait termasuk berkoordinasi dengan Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan *Assessment GCG 2021*.
3. Tim *Assessment* memberikan nilai komposit termasuk faktor positif dan negatif untuk disampaikan kepada Direksi dan kemudian dimintakan persetujuan Dewan Komisaris.
4. Pelaksanaan *Assessment GCG* ini dilaksanakan secara periodik setiap tahun.

2. *The Assessment Team coordinates all related work units including coordinating with the Board of Commissioners in order to carry out the 2021 GCG Assessment.*
3. *The Assessment Team assigns a composite score including positive and negative factors to be submitted to the Board of Directors and then asks for approval from the Board of Commissioners.*
4. *Implementation of the GCG Assessment is carried out periodically every year.*

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Pihak yang melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris adalah Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kewajiban yang tercantum dalam Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat Pemegang Saham. Dewan Komisaris akan mempertanggungjawabkan kinerja mereka pada periode 2021 dalam RUPS yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.

PARTIES THAT PERFORM THE BOARD OF COMMISSIONERS' PERFORMANCE ASSESSMENT

The party that evaluates the performance of the Board of Commissioners is the Shareholders in the GMS based on the obligations contained in the applicable laws and the Articles of Association as well as the mandate of the Shareholders. The Board of Commissioners will account for their performance in the 2021 period at the GMS which will be held in 2022.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/ pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai kebutuhan.

1. Terdapat rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan bagi Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris direalisasikan sesuai dengan rencana kerja Dewan Komisaris.
3. Terdapat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Dewan Komisaris.

COMPETENCY DEVELOPMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners carries out training/ learning programs on an ongoing basis in order to improve the competence of members of the Board of Commissioners as needed.

1. *There is a work plan and budget for training activities for the Board of Commissioners.*
2. *The implementation of training for members of the Board of Commissioners is realized in accordance with the work plan of the Board of Commissioners.*
3. *There is a report on the results of the training that has been undertaken by members of the Board of Commissioners.*

Sepanjang tahun 2021, anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, workshop, konferensi, seminar, sebagaimana tabel berikut ini :

Throughout 2021, members of the Company's Board of Commissioners who have participated in various competency improvement programs in the form of training, workshops, conferences, seminars, as shown in the following table:



Dewan Komisaris <i>Board of Commissioner</i>	Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan <i>Competency/Training Development Materials</i>	Waktu Pelaksanaan <i>Execution Time</i>		Penyelenggara <i>Organizers</i>
		<i>Start</i>	<i>Finished</i>	
Ahmad Rofik	GCG	03 November 2021	03 November 2021	DPS Consulting
	Pelatihan QRGP (Qualified Risk Governance Professional)	22 November 2021	23 November 2021	CRMS
	GCG	<i>November 03, 2021</i>	<i>November 03, 2021</i>	<i>DPS Consulting</i>
	<i>QRGP training (Qualified Risk Governance Professional)</i>	<i>November 22, 2021</i>	<i>November 23, 2021</i>	<i>CRMS</i>
Edward Siagian	Tanggung Jawab Komite Audit Saat Perseroan Tersangkut Masalah Hukum Terkait Laporan Keuangan	23 September 2021	23 September 2021	IKAI (Ikatan Komite Audit Indonesia)
	GCG	03 November 2021	03 November 2021	DPS Consulting
	Pelatihan QRGP (Qualified Risk Governance Professional)	22 November 2021	23 November 2021	CRMS
	<i>Responsibilities of the Audit Committee When the Company Is Involved in Legal Issues Related to Financial Statements</i>	<i>September 23, 2021</i>	<i>September 23, 2021</i>	<i>IKAI (Ikatan Komite Audit Indonesia)</i>
	GCG	<i>November 03, 2021</i>	<i>November 03, 2021</i>	<i>DPS Consulting</i>
M.R Karlansyah	<i>QRGP training (Qualified Risk Governance Professional)</i>	<i>November 22, 2021</i>	<i>November 23, 2021</i>	<i>CRMS</i>
	Pelatihan QRGP (Qualified Risk Governance Professional)	22 November 2021	23 November 2021	CRMS
	<i>QRGP training (Qualified Risk Governance Professional)</i>	<i>November 22, 2021</i>	<i>November 23, 2021</i>	<i>CRMS</i>
Hardiv Harris Situmeang	GCG	03 November 2021	03 November 2021	DPS Consulting
	Pelatihan QRGP (Qualified Risk Governance Professional)	22 November 2021	23 November 2021	CRMS
	GCG	November 03, 2021	November 03, 2021	DPS Consulting
	<i>QRGP training (Qualified Risk Governance Professional)</i>	<i>November 22, 2021</i>	<i>November 23, 2021</i>	<i>CRMS</i>

Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2021

Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners in 2021

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris Perusahaan terus proaktif melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi dan memberikan masukan kepada Direksi. Bentuk pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris tentunya mengacu pada implementasi atas rekomendasi yang telah diberikan Dewan Komisaris terhadap Direksi maupun melalui komite-komite yang dibentuk. Pada periode Januari sampai dengan Desember 2021, Dewan Komisaris melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 13 (tiga belas) kali yang diadakan pada setiap bulan.
2. Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 17 (tujuh belas) kali yang diadakan pada setiap bulan.
3. Dewan Komisaris telah mengikuti RUPS sebanyak 2 (dua) kali yaitu RUPS RKAP Tahun 2021 dan RUPS LPT Tahun Buku 2020 PT PLN Enjiniring.
4. Dewan Komisaris telah menerbitkan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahunan 2021.
5. Dewan Komisaris telah melakukan kunjungan kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan bisnis atau proyek PLN Enjiniring.
6. Dewan Komisaris telah melakukan penelaahan terhadap hal-hal yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris.
7. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap persoalan strategis, serta efektifitas pelaksanaan internal kontrol dan GCG di perusahaan.

As part of its duties and responsibilities, the Company's Board of Commissioners continues to proactively supervise the performance of the Board of Directors and provide input to the Board of Directors. The form of supervision carried out by the Board of Commissioners of course refers to the implementation of the recommendations given by the Board of Commissioners to the Board of Directors as well as through the committees formed. In the period from January to December 2021, the Board of Commissioners does the following.

1. *The Board of Commissioners has conducted Coordination Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors for 13 (thirteen) times which are held every month.*
2. *The Board of Commissioners has held Internal Meetings of the Board of Commissioners 17 (seventeen) times which are held every month.*
3. *The Board of Commissioners has attended the GMS for 2 (two) times, namely the 2021 RKAP GMS and the LPT GMS for the 2020 Financial Year of PT PLN Enjiniring.*
4. *The Board of Commissioners has issued the 2021 Annual Supervisory Report of the Board of Commissioners.*
5. *The Board of Commissioners has made a working visit related to the implementation of a PLN Enjiniring business or project.*
6. *The Board of Commissioners has reviewed matters that require the approval of the Board of Commissioners.*
7. *The Board of Commissioners has carried out supervision and monitoring of strategic issues, as well as the effectiveness of the implementation of internal control and GCG in the company.*

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

Organ Pendukung Dewan komisaris adalah perangkat Dewan Komisaris yang berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

1. Organ pendukung Dewan Komisaris, terdiri dari:
 - a. Komite Audit;
 - b. Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama;
 - c. Sekretariat Dewan komisaris, jika diperlukan;
 - d. Satu komite lain, jika diperlukan
2. Seorang atau lebih anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota Dewan Komisaris
3. Anggota Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama dan komite lain yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris, maksimal berjumlah 2(dua) orang.
4. Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain lebih dari 2 (dua) dan/atau menetapkan jumlah anggota komite yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang, apabila:
 - a. Diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Disetujui oleh Menteri berdasarkan kompleksitas dan beban yang dihadapi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas di BUMN yang bersangkutan.
5. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

• SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Sekretaris Dewan Komisaris

REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Supporting Organs for the Board of Commissioners are the instruments of the Board of Commissioners whose function is to assist the Board of Commissioners in carrying out their duties.

1. *Supporting organs of the Board of Commissioners, consisting of:*
 - a. *Audit Committee;*
 - b. *Nomination and Remuneration Committee or other nomenclature with the same function;*
 - c. *Secretariat of the Board of Commissioners, if required;*
 - d. *One more committee, if needed*
2. *One or more committee members as referred to in paragraph (1) are members of the Board of Commissioners*
3. *Members of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee or other nomenclature with the same function and other committees that are not members of the Board of Commissioners, a maximum of 2 (two) people.*
4. *The Board of Commissioners may form more than 2 (two) other committees and/or determine the number of committee members who are not members of the Board of Commissioners more than 2 (two) people, if:*
 - a. *Required based on statutory regulations; or*
 - b. *Approved by the Minister based on the complexity and burden faced by the Board of Commissioners in carrying out their duties in the relevant BUMN.*
5. *The Committee is responsible to the Board of Commissioners.*

• SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Appointment and Dismissal of Members of the Secretary to the Board of Commissioners

1. Dewan Komisaris dapat membentuk Sekretariat Dewan Komisaris yang dipimpin oleh seorang Dewan Komisaris dibantu staf Sekretariat Dewan Komisaris.
2. Sekretaris Dewan Komisaris dan staf Sekretariat Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
3. Sekretaris Dewan Komisaris berasal dari luar Perseroan.

1. *The Board of Commissioners may establish a Secretariat of the Board of Commissioners which is led by a Board of Commissioners assisted by the staff of the Secretariat of the Board of Commissioners.*
2. *The Secretary of the Board of Commissioners and the staff of the Secretariat of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the Board of Commissioners.*
3. *Secretary to the Board of Commissioners comes from outside the Company.*

TUGAS SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris. Sekretariat Dewan Komisaris memiliki uraian tugas yang jelas, dengan ketentuan:

1. Adanya uraian tugas bagi Sekretariat Komisaris yang ditetapkan oleh Komisaris Utama.
2. Tugas pokok dan fungsi adalah membantu Dewan Komisaris dalam bidang kegiatan kesekretariatan paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris;
 - b. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham/Pemilik Modal, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya;
 - c. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan (a) monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris; (b) Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola perusahaan; (c) Dukungan administrasi serta monitoring berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;

DUTIES OF THE SECRETARIAT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners has a Secretary to the Board of Commissioners to support the secretarial duties of the Board of Commissioners. The Secretariat of the Board of Commissioners has a clear job description, with the following provisions:

1. *There is a job description for the Secretariat of the Commissioners determined by the President Commissioner.*
2. *The main duties and functions are to assist the Board of Commissioners in secretarial activities, at least covering the following matters:*
 - a. *Organizing secretarial administration activities within the Board of Commissioners;*
 - b. *Organizing Board of Commissioners meetings and meetings/meetings between the Board of Commissioners and Shareholders/Capital Owners, Directors and other related parties;*
 - c. *Provide data/information needed by the Board of Commissioners and the committees within the Board of Commissioners in relation to (a) monitoring the follow-up to the decisions, recommendations and directions of the Board of Commissioners; (b) Administrative materials regarding reports/activities of the Board of Directors in managing the company; (c) Administrative support and monitoring related to matters that must obtain approval or recommendation from the Board of Commissioners in connection with the company management activities carried out by the Board of Directors;*

d. Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari Komite-Komite di lingkungan Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris.

3. Sekretaris Dewan Komisaris melakukan administrasi dan penyimpanan dokumen berupa:
 - a. Mempunyai fasilitas penyimpanan dokumen Komisaris yang disediakan oleh perusahaan.
 - b. Mengadministrasikan surat keluar dan surat masuk ke Dewan Komisaris dan dokumen lainnya dengan tertib.
4. Berdasarkan penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Sekretariat Dewan Komisaris dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

d. Collecting technical data originating from the Committees within the Board of Commissioners for the purposes of the Board of Commissioners.

3. *The Secretary to the Board of Commissioners performs the administration and storage of documents in the form of: a. Has a Board of Commissioners document storage facility provided by the company. b. Administering outgoing and incoming letters to the Board of Commissioners and other documents in an orderly manner.*
4. *Based on a written assignment from the Board of Commissioners, the Secretariat of the Board of Commissioners can access records or information about employees, funds, assets, and other resources of the Company related to the implementation of their duties.*

MASA JABATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS

Masa jabatan Sekretaris dan staf Sekretariat Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

TERM OF OFFICE OF SECRETARY AND SECRETARIAT STAFF OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The term of office of the Secretary and staff of the Secretariat of the Board of Commissioners is determined by the Board of Commissioners for a maximum of 3 (three) years and can be reappointed for a maximum of 2 (two) years without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

EVALUASI KINERJA SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS

Evaluasi terhadap kinerja Sekretariat Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dilakukan setiap 1 (satu) tahun dengan menggunakan metoda yang ditetapkan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

PERFORMANCE EVALUATION OF THE SECRETARIAT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Evaluation of the performance of the Secretariat of the Board of Commissioners/Supervisory Board is carried out every 1 (one) year using the method determined by the Board of Commissioners/Supervisory Board.

PROFIL SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

■ Hadeyanti Sylviani

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris sejak tahun 2020. Pernah menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha di Rekadaya ElektriKA (2019-2020), menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Pemasaran di PT Rekadaya ElektriKA (2017-2019), menjabat sebagai Dewan Komisaris di PT Rekadaya ElektriKA Consult (2013-2017). Menamatkan pendidikan Sarjana Akuntansi dari Universitas Padjadjaran dan Magister Management Keuangan dari Universitas Padjadjaran.

KOMITE DEWAN KOMISARIS

Organ pendukung Dewan Komisaris Perseroan saat ini terdiri dari: Sekretaris Dewan komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Manajemen Risiko dan Good Corporate Governance. Adapun pembentukan Komite Dewan Komisaris tersebut selaras dengan PERMEN BUMN PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan PERMEN BUMN No. Per-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan dengan tugas dan tanggung jawab telah mencerminkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Board Manual, dengan keanggotaan sebagai berikut :

BOARD OF COMMISSIONERS' SECRETARY PROFILE

■ Hadeyanti Sylviani

Indonesian citizens. Served as Secretary to the Board of Commissioners since 2020. He served as Director of Marketing and Business Development at Rekadaya ElektriKA (2019-2020), served as Director of Finance and Marketing at PT Rekadaya ElektriKA (2017-2019), served as Board of Commissioners at PT Rekadaya ElektriKA Consult (2013-2017). Graduated with a Bachelor's degree in Accounting from Padjadjaran University and a Masters in Financial Management from Padjadjaran University.

COMMITTEE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The supporting organs of the Company's Board of Commissioners currently consist of: Secretary to the Board of Commissioners, the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Management and Good Corporate Governance Committee. The formation of the Committee for the Board of Commissioners is in line with PERMEN BUMN PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises and PERMEN BUMN No. Per-06/MBU/04/2021 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee was formed based on the decision of the Company's Board of Commissioners with the duties and responsibilities reflecting the provisions as stipulated in the Board Manual, with the following memberships:

TABLE JUMLAH DAN KOMPOSISI KOMITE AUDIT

TABLE OF THE NUMBER AND COMPOSITION OF THE AUDIT COMMITTEE

No	Nama Name	Jabatan Position
1	Edward Siagian	Ketua Komite Audit, merangkap anggota <i>Chairman of the Audit Committee, concurrently member</i>
2	Bowo Setiadji	Sekretaris, merangkap anggota <i>Secretary, concurrently member</i>
3	Risma Royani	Anggota <i>Member</i>
4	Julita Safitri Evawani	Anggota <i>Member</i>

PROFIL KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE PROFILE

No	Nama Name	Jabatan Office	Profil Profile
1	Edward Siagian	Ketua Komite Audit, merangkap anggota <i>Chairman of the Audit Committee, concurrently member</i>	<p>Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Ketua Komite Audit sejak tahun 2021. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Expert Pengendalian Proyek (TK) pada (Tugas Karya ke PT PLN Enjiniring) PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada tahun 2014 – 2016, Senior Specialist I Pengendalian Proyek (TK) pada (Tugas Karya PT PLN Enjiniring) PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada tahun 2010 – 2014. Menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Teknik Tenaga Listrik di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1982, kemudian melanjutkan Pendidikan S2 Bidang Manajemen di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1997.</p> <p><i>Indonesian citizen. Served as a Chairman of the Audit Committee since 2021. Previously he had experience as an Project Control Expert (TK) at (work assignment at PT PLN Enjiniring) PT PLN (Persero) Head Office in 2014 – 2016, Senior Specialist I Project Control (TK) at (work assignment at PT PLN Enjiniring) PT PLN (Persero) Head Office in 2010 – 2014. Graduated from the Faculty of Electrical Engineering at the Bandung Institute of Technology (IRB) in 1982, then continued his Masters in Management at the Bandung Institute of Technology (ITB) in 1997.</i></p>

2	Bowo Setiadji	Sekretaris, merangkap anggota <i>Secretary, concurrently member</i>	<p>Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Sekretaris Komite Audit sejak tahun 2021. Pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Enjiniring dan Teknologi PT PLN (Persero) (2009-2011), Deputi Direktur PLN Transmisi Luar Jawa- Bali (2008-2009), General Manager PLN Jasa Enjiniring (2002-2008), Direktur Transmisi dan Distribusi PT Delta Rekadaya Mandiri (2002), Asisten Kepala Divisi Transmisi dan Gardu Induk PLN Jasa Enjiniring (1996-2002), Senior Enjinir dan Ketua Tim berbagai Proyek Transmisi dan Gardu Induk 150kV dan 500kV PLN Jasa Enjiniring (1988-2002), serta Kepala Seksi Teknik Listrik, pada Sub Direktorat Teknik Jaringan dan Gardu (SUBDITRING), PT PLN (Persero) (1984-1988). Menamatkan pendidikan Sarjana Teknik Listrik dari Universitas Indonesia dan Master of Science dari The University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), Inggris.</p> <p><i>Indonesian citizen. Served as Secretary of the Audit Commite since 2020. He served as Head of Engineering and Technology Division of PT PLN (Persero) (2009-2011), Deputy Director of PLN Transmission Outside Java-Bali (2008-2009), General Manager of PLN Enjiniring Services (2002-2008), Director of Transmission and Distribution of PT Delta Rekadaya Mandiri (2002), Assistant Head of the Transmission Division and PLN Enjiniring Service Sub-Station (1996-2002), Senior Engineering and Team Leader of PLN 150kV and 500kV transmission and substation projects(1988-2002), and head of Electricity Section, Network Construction Divisio PT PLN (Persero) (1984-1988). He graduated with Bachelor of Electrical Engineering from the Universitas Indonesia and Master of Science in Electrical Engineering from The University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), England.</i></p>
3	Risma Royani	Anggota <i>Member</i>	<p>Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tahun 2021. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Vice President Pengeluaran Operasi pada Divisi Perbendaharaan Direktorat Keuangan PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2021 - sekarang), Vice President Treasury Business Management pada Divisi Treasury Direktorat Keuangan PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2020 -2021), Senior, Senior Manager Keuangan pada PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat (2018-2020) . Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Lampung pada tahun 1994, kemudian melanjutkan Pendidikan Magister Manajemen Keuangan di Universitas Lampung.</p> <p><i>Indonesian citizens. Has served as a Member of the Audit Committee since 2021. Previously he had experience as Vice President of Operational Expenditure at the Treasury Division of the Finance Directorate of PT PLN (Persero) Head Office (2021 - present), Vice President of Treasury Business Management at the Treasury Division of the Finance Directorate of PT PLN (Persero)) Head Office (2020 -2021), Senior, Senior Finance Manager at PT PLN (Persero) West Java Transmission Main Unit (2018-2020) . Completed his Bachelor of Economics at the University of Lampung in 1994, then continued his Masters in Financial Management at the University of Lampung.</i></p>

4 Julita Safitri Anggota
Evawani Member

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tahun 2021. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Senior Specialist 1 Perbendaharaan Divisi Treasury pada PT PLN (Persero) Kantor Pusat(2016 – sekarang), PLT Direktur Utama merangkap sebagai Direktur Keuangan & SDM PT Haleyora Power (2015 -2016). Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Parahyangan Bandung pada tahun 1989, kemudian melanjutkan Pendidikan Magister Manajemen di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta pada tahun 2003.

Indonesian citizens. Served as a Member of the Audit Committee since 2021. Previously he had experience as Senior Specialist 1 Treasury Division of Treasury at PT PLN (Persero) Head Office(2016 – present), PLT President Director concurrently as Director of Finance & HR at PT Haleyora Power (2015 -2016). Completed Bachelor of Economics at Parahyangan University, Bandung in 1989, then continued his Masters in Management at Atmajaya Catholic University, Jakarta in 2003.

PENGGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMITE AUDIT

Pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit.
- b. Ketua dan Anggota Komite Audi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- c. Ketua Komite Audit adalah anggota Dewan Komisaris yang merupakan Anggota Dewan Komisaris Independen atau Anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen.
- d. Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar perusahaan.
- e. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite Audit dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- f. Anggota Komite Audir merupakan anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.

APPOINTMENT AND DISMISSAL OF THE AUDIT COMMITTEE

The appointment and dismissal of the Audit Committee is carried out under the following conditions:

- a. The Board of Commissioners is required to establish an Audit Committee.
- b. The Chairman and Members of the Audi Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners.
- c. The Chairman of the Audit Committee is a member of the Board of Commissioners who is an Independent Member of the Board of Commissioners or a member of the Board of Commissioners who can act independently.
- d. Members of the Audit Committee can come from members of the Board of Commissioners or from outside the company.
- e. The appointment and dismissal of members of the Audit Committee is reported to the General Meeting of Shareholders.
- f. Members of the Audit Committee are members of the Board of Commissioners, terminate automatically when their term of office as a member of the Board of Commissioners ends.

- g. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Audit wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

TUGAS KOMITE AUDIT

Tugas Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
- b. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
- c. Komite Audit bertugas untuk:
 - i. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
 - ii. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal.
 - iii. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
 - iv. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan.
 - v. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris.
 - vi. Selain tugas di atas Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Audit yang ditetapkan dalam piagam komite audit.

MASA JABATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu

- g. In the event that a member of the Board of Commissioners who serves as Chairman of the Audit Committee ceases to be a member of the Board of Commissioners, the Chairman of the Audit Committee must be replaced by another member of the Board of Commissioners within 30 (thirty) days at the latest.*

AUDIT COMMITTEE DUTIES

The duties of the Audit Committee are as follows:

- a. *The Audit Committee works collectively in carrying out its duties to assist the Board of Commissioners.*
- b. *The Audit Committee is independent both in carrying out its duties and in reporting and reporting directly to the Board of Commissioners.*
- c. *The Audit Committee is tasked with:*
 - i. *Assist the Board of Commissioners to ensure the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the external and internal auditors' duties.*
 - ii. *Assess the implementation of activities as well as the results of audits carried out by the Internal Audit Unit and external auditors.*
 - iii. *Provide recommendations regarding the improvement of the management control system and its implementation.*
 - iv. *Ensure that there is a satisfactory evaluation procedure for all information issued by the Company.*
 - v. *Identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners and the duties of the Board of Commissioners.*
 - vi. *In addition to the above duties, the Board of Commissioners may give other assignments to the Audit Committee as stipulated in the audit committee charter.*

TERM OF OFFICE OF AUDIT COMMITTEE MEMBERS

The term of office for members of the Audit Committee who are not members of the Company's Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and can be extended once for a period of 2 (two) years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss at any time.

PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

- a. Persyaratan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:
- 1) Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
 - 2) Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
 - 3) Mampu berkomunikasi secara efektif;
 - 4) Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
 - 5) Persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam komite audit, jika diperlukan.
- b. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang harus memahami industri/bisnis perusahaan.

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko menjalankan peran secara profesional dan independen, serta tidak menerima/melakukan intervensi dari/kepada pihak lainnya. Anggota Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko tidak terkait dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, maupun Direksi. Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko yang berasal dari luar perusahaan tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan (conflict of interest) dengan perusahaan. Independensi Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko sebagai berikut :

AUDIT COMMITTEE MEMBERSHIP REQUIREMENTS

- a. The requirements for members of the Audit Committee are as follows:
- 1) Have good integrity and sufficient knowledge and work experience in the field of supervision/ inspection;
 - 2) Do not have any personal interests/relationships that can have a negative impact and conflict of interest on the Company;
 - 3) Able to communicate effectively;
 - 4) Can provide sufficient time to complete the task; and
 - 5) Other requirements set out in the audit committee charter, if necessary.
- b. One of the members of the Audit Committee must have an educational background or have expertise in accounting or finance, and one must understand the company's industry/business.

INDEPENDENCE OF THE AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee and the Risk Management Committee carry out their roles professionally and independently, and do not accept/intervene from/to other parties. Members of the Audit Committee and Risk Management Committee are not related to the Shareholders, the Board of Commissioners, or the Board of Directors. The Audit Committee and the Risk Management Committee who come from outside the company do not have personal interests/relationships that can have a negative impact and conflict of interest with the company. The independence of the Audit Committee and the Risk Management Committee is as follows:

TABEL INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

TABLE OF THE INDEPENDENCE OF AUDIT COMMITTEE

Aspek Independensi <i>Independence Aspect</i>	Edward Siagian	Bowo Setiadji	Risma Royani	Julita Safitri Evawani
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi <i>Having no financial relations with the Board of Commissioners and Directors</i>	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi. <i>Having no share ownership relationship at the company</i>	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit <i>Having no family relationship with the Board of Commissioners, Directors and/or fellow Audit Committee members</i>	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah <i>Not serving as administrator of political parties, officials and government</i>	√	√	√	√

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan dengan tugas dan tanggung jawab tealh mencerminkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Board Manual , dengan keanggotaan sebagai berikut :

The Nomination and Remuneration Committee was formed based on the Decree of the Company's Board of Commissioners with the duties and responsibilities reflecting the provisions as stipulated in the Board Manual, with membership as follows:

TABLE JUMLAH DAN KOMPOSISI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

TABLE OF THE NUMBER AND COMPOSITION OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

No	Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>
1	M.R. Karliansyah	Ketua Komite, merangkap anggota <i>Chairman of the Committee, concurrently member</i>
2	Furqan Tanzala	Sekretaris, merangkap anggota <i>Secretary, concurrently member</i>
3	Robert Aprianto Purba	Anggota <i>Member</i>

PROFIL KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE PROFILE

No	Nama Name	Jabatan Position	Profil Profile
1	M.R Karliansyah	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, merangkap anggota <i>Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, concurrently member</i>	<p>Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2021. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015 – 2021, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2010 – 2015, dan Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran Pertambangan, Energi dan Migas di Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2007 – 2010. Menyelesaikan Pendidikan S1 Biologi di Universitas Indonesia pada tahun 1985, kemudian menyelesaikan Pendidikan S2 Ilmu Lingkungan di Universitas Indonesia pada tahun 1989</p> <p><i>Indonesia Citizen. Served as Commissioner of PT PLN Enjiniring since 2021. Previously he had experience as Director General of Environmental Pollution and Damage Control at the Ministry of Environment and Forestry in 2015 – 2021, Deputy for Environmental Pollution Control at the Ministry of Environment in 2010 – 2015, and Assistant Deputy for Environmental Affairs Mining, Energy and Oil and Gas Pollution Control at the Ministry of Environment 2007 – 2010. Completed his Bachelor of Biology at the University of Indonesia in 1985, then completed his Masters in Environmental Science at the University of Indonesia in 1989</i></p>
2	Furqan Tanzala	Sekretaris, merangkap anggota <i>Secretary, concurrently member</i>	<p>Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2021. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Vice President Human Capital Development di PT Indonesia Power (2019), Senior Specialist I Mutu & Kepatuhan di PT PLN (Persero) Corporate University (2020). Menyelesaikan Pendidikan S1 Ekonomi Perusahaan dari Universitas Krisna Dwipayana pada tahun 1986</p> <p><i>Indonesian citizens. Served as Secretary of the Nomination and Remuneration Committee in 2021. Previously he had experience as Vice President of Human Capital Development at PT Indonesia Power (2019), Senior Specialist I Quality & Compliance at PT PLN (Persero) Corporate University (2020). Completed Bachelor Degree in Corporate Economics from Krisna Dwipayana University in 1986</i></p>

3	Robert Aprianto Purba	Anggota Member	<p>Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2021. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Executive Vice President Konstruksi Regional Maluku dan Papua pada Direktorat Bisnis Regional Maluku dan Papua di PT PLN (Pers, ero) Kantor Pusat (2018-sekarang), Kepala Divisi Konstruksi Regional Maluku dan Papua pada Direktorat Bisnis Regional Maluku dan Papua di PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2018). Menyelesaikan Pendidikan S1 Listrik di Universitas Sumatera Utara pada tahun 1994, kemudian menyelesaikan Pendidikan S2 bidang Manajemen di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2006.</p> <p><i>Indonesian citizens. Served as Member of the Nomination and Remuneration Committee in 2021. Previously he had experience as Executive Vice President of Regional Construction of Maluku and Papua at the Directorate of Regional Business of Maluku and Papua at PT PLN (Pers, ero) Head Office (2018-present), Head of Regional Construction Division Maluku and Papua at the Maluku and Papua Regional Business Directorate at PT PLN (Persero) Head Office (2018). Completed his Bachelor Degree in Electrical at the University of North Sumatra in 1994, then completed his Masters in Management at the University of North Sumatra in 2006.</i></p>
---	-----------------------	----------------	---

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Pengangkatan dan pemberhentian Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama yang terdiri dari Ketua dan Anggota.
- Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama adalah Komisaris Utama/Anggota Dewan Komisaris Independen atau Anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independent
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perusahaan.

APPOINTMENT AND DISMISSAL OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The appointment and dismissal of the Nomination and Remuneration Committee is carried out under the following conditions:

- The Board of Commissioners is required to establish a Nomination and Remuneration Committee or other nomenclature with the same function consisting of the Chairman and Members.
- The Chairman and Members of the Nomination and Remuneration Committee or other nomenclature with the same function are appointed and dismissed by the Board of Commissioners.
- The Chairman of the Nomination and Remuneration Committee or other nomenclature with the same function is the President Commissioner/Independent Member of the Board of Commissioners or Member of the Board of Commissioners who can act independently
- Members of the Nomination and Remuneration Committee or other nomenclature with the same function may come from members of the Board of Commissioners or from outside the Company.

- e. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham/Pemilik Modal.
- f. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama yang merupakan anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Berakhir.
- g. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

TUGAS KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama bekerja secara kolektif yang sama bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
- b. Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
- c. Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama bertugas untuk :
 - 1) melakukan review secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (Talent Management System) perusahaan serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya;
 - 2) melakukan evaluasi terhadap system dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (Talent Classification) yang dilakukan oleh Direksi;

- e. *The appointment and dismissal of members of the Nomination and Remuneration Committee or other nomenclature with the same function is reported to the General Meeting of Shareholders/Capital Owners.*
- f. *Members of the Nomination and Remuneration Committee or other nomenclature with the same function who are members of the Board of Commissioners, terminate automatically when their term of office as a member of the Board of Commissioners expires.*
- g. *In the event that a member of the Board of Commissioners who serves as Chairman of the Nomination and Remuneration Committee or other nomenclature with the same function ceases to be a member of the Board of Commissioners, the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee or other nomenclature with the same function must be replaced by another member of the Board of Commissioners at the latest. no later than 30 (thirty) days.*

DUTIES OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

- a. *The Nomination and Remuneration Committee or other nomenclature with the same function works collectively and works collectively in carrying out its duties to assist the Board of Commissioners.*
- b. *The Nomination and Remuneration Committee or other nomenclature with the same function is independent both in carrying out its duties and in reporting, and is directly responsible to the Board of Commissioners.*
- c. *The Nomination and Remuneration Committee or other nomenclature with the same function is tasked with:*
 - 1) *conduct periodic reviews of the company's Talent Management System as well as monitoring and evaluation of its implementation;*
 - 2) *evaluate the Talent Classification system and procedures carried out by the Board of Directors;*

- 3) melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris (Selected Talents), untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS/Menteri (Nominated Talent);
 - 4) melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota dewan Komisaris perusahaan anak, sebelum diajukan kepada RUPS/Menteri;
 - 5) melakukan evaluasi atas usulan Key Performance Indicators Individu anggota Direksi;
 - 6) menyiapkan usulan system evaluasi Kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 7) menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan komisaris;
 - 8) melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi pegawai yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris;
 - 9) Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi perusahaan.
- d. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama yang ditetapkan dalam piagam Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama.

MASA JABATAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Masa jabatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

TERM OF OFFICE FOR NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEMBERS

The term of office for members of the Nomination and Remuneration Committee or other nomenclature with the same function who are not members of the Company's Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and can be extended 1 (one) time for 2 (two) years, without prejudice to the rights of the Board of Directors. Commissioner to dismiss him at any time.

PERSYARATAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama yang berasal dari selain Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan :

- Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang nominasi dan remunerasi;
- Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
- Mampu berkomunikasi secara efektif;
- Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
- Persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama jika diperlukan.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEMBER REQUIREMENTS

Members of the Nomination and Remuneration Committee or other nomenclature with the same function originating from other than the Board of Commissioners must meet the following requirements:

- Have good integrity and sufficient knowledge and work experience in the field of nomination and remuneration;
- Do not have any personal interests/relationships that may have a negative impact and conflict of interest on the Company;
- Able to communicate effectively;
- Can provide sufficient time to complete the task; and
- Other requirements stipulated in the charter of the Nomination and Remuneration Committee or other nomenclature with the same function if necessary.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN GCG

Komite Manajemen Risiko dan GCG dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan dengan tugas dan tanggung jawab telah mencerminkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Board Manual , dengan keanggotaan sebagai berikut :

RISK MANAGEMENT AND GCG COMMITTEE

The Risk Management and GCG Committee was established based on the Decision of the Company's Board of Commissioners with the duties and responsibilities reflecting the provisions as stipulated in the Board Manual, with the following memberships :

TABLE JUMLAH DAN KOMPOSISI KOMITE MANAJEMEN RISIKO & GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TABLE OF THE NUMBER AND COMPOSITION OF THE RISK MANAGEMENT & GOOD CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE

No	Nama Name	Jabatan Position
1	Hardiv Harris Situmeang	Ketua Komite, merangkap anggota <i>Chairman of the Committee, concurrently member</i>
2	Fajar Seno Utomo	Sekretaris, merangkap anggota <i>Secretary, concurrently member</i>
3	Budhi Wicaksono	Anggota <i>Member</i>
4	Erwin Siagian	Anggota <i>Member</i>

PROFIL KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN GCG

RISK MANAGEMENT AND GCG COMMITTEE PROFILE

No	Nama Name	Jabatan Office	Profil Profile
1	Hardiv Harris Situmeang	Ketua Komite Manajemen Risiko dan GCG, merangkap anggota <i>Chairman of the Risk Management and GCG Committee, concurrently member</i>	<p>Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko & GCG sejak tahun 2021. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Ahli Utama di PT PLN (Persero) dari tahun 2003, Direktur Perencanaan PT PLN (Persero) tahun 2001 dan Direktur Perencanaan PT PLN (Persero) tahun 1998. Menyelesaikan Pendidikan S1 Teknik Tenaga Listrik di Institut Teknologi Bandung tahun 1976, Pendidikan S2 Electrical Engineering di Union College, Schenectady, New York tahun 1985, dan menyelesaikan S3 System Science & Mathematics di Washington University tahun 1993.</p> <p><i>Indonesian citizen. Served as a Chairman of the Risk Management and GCG Committee since 2021. Previously he had experience as a Principal Expert at PT PLN (Persero) from 2003, Planning Director at PT PLN (Persero) in 2001 and Planning Director at PT PLN (Persero) in 1998. He completed his Bachelor's Degree in Electrical Engineering at the Bandung Institute of Technology in 1976, Master's Degree in Electrical Engineering at Union College, Schenectady, New York in 1985, and completed his Doctoral Degree in System Science & Mathematics at Washington University in 1993.</i></p>
2	Fajar Seno Utomo	Sekretaris, merangkap anggota <i>Secretary, concurrently member</i>	<p>Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Sekretaris Komite Manajemen Risiko dan GCG sejak tahun 2021. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Manajer Senior Pelaksana Pengadaan III pada Divisi Pengadaan Strategis Direktorat Pengadaan PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2018), Vice President Pelaksana Pengadaan III pada Divisi Pengadaan Strategis Direktorat Pengadaan Strategis I PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2018). Menamatkan pendidikan Sarjana Teknik Geodesi dari Institute Teknologi Bandung dan S1 Manajemen Bisnis dari Universitas Indonesia</p> <p><i>Indonesian citizens. Served as Secretary of the Risk Management and GCG Committee since 2021. Previously he had experience as Senior Manager of Procurement III in the Strategic Procurement Division of the Procurement Directorate of PT PLN (Persero) Head Office (2018), Vice President of Procurement III in the Strategic Procurement Division of the Directorate of Procurement Strategic I PT PLN (Persero) Head Office (2018). Graduated with a Bachelor of Geodetic Engineering from the Bandung Institute of Technology and a Bachelor of Business Management from the University of Indonesia</i></p>

3 Budhi Wicaksono

Anggota
Member

Warga Negara Indonesia, Menjabat sebagai anggota Komite Manajemen Risiko dan GCG sejak tahun 2021. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Enjinir Prinsipal di PT Indo Koppe Enjiniring (2016 - 2021), Enjinir Konsultan pada PT PLN (Persero) PUSENLIS (2015-2016). Menyelesaikan Pendidikan Insinyur dari Departemen Teknik Listrik, Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1985 dan melanjutkan Master of Science dari Departemen Teknik Listrik, Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1998.

Indonesian citizen, Served as a member of the Risk Management and GCG Committee since 2021. Previously he had experience as a Principal Engineer at PT Indo Koppe Engineering (2016 - 2021), Consultant Engineer at PT PLN (Persero) PUSENLIS (2015-2016). Completed his Engineering Education from the Department of Electrical Engineering, Bandung Institute of Technology (ITB) in 1985 and continued his Master of Science from the Department of Electrical Engineering, Bandung Institute of Technology (ITB) in 1998.

4 Erwin Siagian

Anggota
Member

Warga Negara Indonesia, Menjabat sebagai anggota Komite Manajemen Risiko dan GCG sejak tahun 2021. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Senior Enjinir Mechanical PE di PT Indo Koppe Enjiniring (2015 - sekarang), PT PLN (Persero) PUSENLIS (1990-2015). Menyelesaikan Pendidikan S1 Teknik Mesin di Institut Teknologi Bandung tahun 1984 dan melanjutkan S2 Tehnik Mesin di Institut Teknologi Bandung tahun 1998.

Indonesian citizen, Serving as a member of the Risk Management and GCG Committee since 2021. Previously he had experience as a Senior Mechanical PE Engineer at PT Indo Koppe Engineering (2015 - present), PT PLN (Persero) PUSELLIS (1990-2015). Completed his Bachelor of Mechanical Engineering at the Bandung Institute of Technology in 1984 and continued his Masters in Mechanical Engineering at the Bandung Institute of Technology in 1998.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO & GCG

Komite Manajemen Risiko dan GCG bertugas membantu Dewan Komisaris untuk :

- Melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang penerapan Manajemen Risiko dan GCG.
- Membantu pengkajian dan penilaian efektivitas penerapan Good Corporate Governance di Perseroan.
- Memastikan efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan praktek Good Corporate Governance di Perseroan.

RISK MANAGEMENT & GCG COMMITTEE DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Risk Management and GCG Committee is tasked with assisting the Board of Commissioners to:

- Conduct regular assessments and provide recommendations on the implementation of Risk Management and GCG.
- Assist in the assessment and assessment of the effectiveness of the implementation of Good Corporate Governance in the Company.
- Ensuring the effectiveness of the implementation of Risk Management and Good Corporate Governance practices in the Company.

- d. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Komite Manajemen Risiko dan GCG melaksanakan tugasnya dengan lingkup kerja :

- a. Melakukan penelaahan Risiko Sasaran Strategis Perseroan dan isu-isu Strategis Internal dan Eksternal Perseroan.
- b. Melaksanakan monitoring atas efektifitas pengelolaan risiko perusahaan.
- c. Memastikan pencapaian maturity level ERM (Enterprise Risk Management) Perseroan.
- d. Melaksanakan monitoring atas efektivitas pelaksanaan GCG di Perseroan.
- e. Membantu melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan GCG di Perseroan.
- f. Membuat laporan tertulis tentang pelaksanaan tugas Komite MR dan GCG kepada Dewan Komisaris.

- d. *Identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners.*

The Risk Management and GCG Committee carries out its duties with the following scope of work:

- a. *Reviewing the Risks of the Company's Strategic Targets and the Company's Internal and External Strategic Issues.*
- b. *Carry out monitoring of the effectiveness of the company's risk management.*
- c. *Ensuring the achievement of the Company's ERM (Enterprise Risk Management) maturity level.*
- d. *Carry out monitoring on the effectiveness of GCG implementation in the Company.*
- e. *Assist in assessing the effectiveness of GCG implementation in the Company.*
- f. *Make a written report on the implementation of the duties of the MR and GCG Committee to the Board of Commissioners.*

MASA JABATAN ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN GCG

Masa jabatan Anggota Komite Manajemen Risiko dan GCG yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

TERM OF OFFICE FOR RISK MANAGEMENT AND GCG COMMITTEE MEMBERS

The term of office for members of the Risk Management and GCG Committee who are not members of the Company's Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and can be extended 1 (one) time for 2 (two) years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time. .

PERSYARATAN ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN GCG

Anggota Komite Manajemen Risiko dan GCG yang berasal dari selain Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang Manajemen Risiko dan GCG;
- b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;

RISK MANAGEMENT AND GCG COMMITTEE MEMBER REQUIREMENTS

Members of the Risk Management and GCG Committee who come from other than the Board of Commissioners must meet the following requirements:

- a. *Have good integrity and sufficient knowledge and work experience in the field of Risk Management and GCG;*
- b. *Do not have any personal interests/relationships that may have a negative impact and conflict of interest on the Company;*

- c. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidangnya, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
- d. Mampu bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif.

- c. *Have adequate knowledge in the field, and can provide sufficient time to complete the task; and*
- d. *Able to work together and communicate effectively.*

TATA KERJA KOMITE

COMMITTEE WORKING PROCEDURES

PIAGAM KOMITE

COMMITTEE CHARTER

Piagam Komite disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

The Committee's Charter is prepared with the following provisions:

- a. Dewan Komisaris menetapkan Piagam Komite berdasarkan usulan Komite.
- b. Asli Piagam Komite disampaikan kepada Direksi untuk didokumentasikan.

- a. *The Board of Commissioners determines the Committee Charter based on the Committee's proposal.*
- b. *The original Committee Charter is submitted to the Board of Directors for documentation.*

PAKTA INTEGRITAS

INTEGRITY PACT

Komite wajib menandatangani pakta integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

The Committee is required to sign an integrity pact which is a statement and commitment to comply with all provisions of laws and regulations and the principles of Good Corporate Governance.

RENCANA KERJA DAN PENGANGGARAN

WORK PLAN AND BUDGET

Rencana kerja dan penganggaran disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

The work plan and budgeting are prepared with the following provisions:

- a. Sebelum tahun buku berjalan, Komite wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan.
- b. Salinan rencana kerja dan anggaran Komite disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui.
- c. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

- a. *Prior to the current financial year, the Committee is required to prepare and submit an annual work plan and budget to the Board of Commissioners for approval.*
- b. *A copy of the Committee's work plan and budget is submitted by the Board of Commissioners to the Board of Directors for information.*
- c. *The implementation of the Committee's annual work plan and budget is reported to the Board of Commissioners.*

RAPAT KOMITE

Rapat Komite dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Komite mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- b. Setiap rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir.
- c. Risalah rapat disampaikan secara tertulis oleh Komite kepada Dewan Komisaris.
- d. Kehadiran anggota Komite dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite.

PELAPORAN

Ketentuan pelaporan Komite adalah sebagai berikut:

- a. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
- b. Komite membuat laporan triwulan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris.
- c. Laporan Komite ditandatangani oleh Ketua Komite dan anggota Komite.

AKSES DAN KERAHASIAAN INFORMASI

Ketentuan akses dan kerahasiaan informasi Komite adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Komite wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan kepada Dewan Komisaris.

COMMITTEE MEETING

Committee meetings are held under the following conditions:

- a. *The Committee holds a meeting at least equal to the minimum requirements for the meeting of the Board of Commissioners set out in the articles of association.*
- b. *Each Committee meeting is stated in the minutes of the meeting signed by all Committee members present.*
- c. *The minutes of the meeting are submitted in writing by the Committee to the Board of Commissioners.*
- d. *The attendance of Committee members at meetings is reported in the quarterly reports and annual reports of the Committee.*

REPORTING

The Committee's reporting requirements are as follows:

- a. *The Committee is responsible to the Board of Commissioners and is required to submit reports to the Board of Commissioners on each task implementation, accompanied by recommendations if necessary.*
- b. *The Committee makes quarterly reports and annual reports to the Board of Commissioners.*
- c. *The Committee Report is signed by the Committee Chair and Committee members.*

ACCESS AND CONFIDENTIALITY OF INFORMATION

The provisions for access and confidentiality of Committee information are as follows:

- a. *Based on a written assignment letter from the Board of Commissioners, the Committee can access records or information about the Company's employees, funds, assets, and other resources related to the implementation of its duties.*
- b. *The Committee is required to report in writing the results of the assignment to the Board of Commissioners.*

Komite wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

EVALUASI KINERJA KOMITE

Evaluasi terhadap kinerja Komite dilakukan secara berkala sebagai bagian dari laporan berkala Dewan Komisaris dengan menggunakan metoda yang ditetapkan Dewan Komisaris.

The Committee is required to maintain the confidentiality of Company documents, data and information, both from internal and external parties and is only used for the purpose of carrying out its duties.

COMMITTEE PERFORMANCE EVALUATION

Evaluation of the Committee's performance is carried out periodically as part of the Board of Commissioners' periodic reports using the method determined by the Board of Commissioners.



DIREKSI DIRECTORS

Direksi merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS dan dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS.

PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN DIREKSI

Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang Anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Adapun Kriteria Persyaratan Anggota Direksi adalah sebagai berikut.

1. Yang dapat diangkat sebagai Anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. Dinyatakan pailit.
 - b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit, atau;
 - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
2. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) di atas, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon Anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan.

The Board of Directors is an authorized organ of the company and fully responsible for the management of the company in the interests of the company in accordance with the aims and objectives of the company, and represents the company, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association. The appointment and dismissal of the Board of Directors shall be carried out by the General Meeting of Shareholders and in carrying out their duties, the Board of Directors shall be responsible to the General Meeting of Shareholders.

REQUIREMENTS AND APPOINTMENT OF BOARD OF DIRECTORS

The Company is managed and led by a Board of Directors whose number is adjusted to the needs of the Company. In the event that the Board of Directors consists of more than 1 (one) member of the Board of Directors, one of whom is appointed as the President Director.

The Criteria for Requirements for Members of the Board of Directors are as follows.

1. *Those who can be appointed as members of the Board of Directors are individuals who are capable of carrying out legal actions, unless within 5 (five) years prior to their appointment they have:*
 - a. *Declared bankrupt.*
 - b. *Become a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners or a member of the Supervisory Board who is found guilty of causing a Company or Perum to be declared bankrupt, or;*
 - c. *Sentenced for committing a crime that is detrimental to state finances and/or BUMN and/or related to the financial sector.*
2. *The fulfillment of the requirements as referred to in number 1 (one) above, is evidenced by a statement letter signed by the candidate for the Board of Directors and the letter is kept by the Company.*

3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas pengangkatan Anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan persyaratan peraturan perundangan.
4. Pengangkatan Anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 3 (tiga) tersebut di atas batal demi hukum sejak saat Anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

3. *In addition to meeting the requirements as referred to in number 1 (one) above, the appointment of Members of the Board of Directors is carried out by taking into account the expertise, experience and other requirements based on the requirements of the legislation.*
4. *The appointment of a member of the Board of Directors who does not meet the requirements as referred to in number 1 (one) and number 3 (three) above is null and void from the moment the other members of the Board of Directors or the Board of Commissioners become aware of the non-fulfillment of these requirements.*

BOARD MANUAL DIREKSI

Pedoman kerja Direksi diatur dalam Board Manual. Board Manual antara lain berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Direksi, yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan harus dapat dijalankan dengan konsisten, sehingga dapat menjadi acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan. Dengan adanya Board Manual diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi, selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Adapun isi dari *Board Manual* sebagai berikut.

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Direksi;
- Bab III : Dewan Komisaris;
- Bab IV : Tata Laksana Wewenang Direksi dengan Persetujuan Dewan Komisaris;
- Bab V : Tata Laksana Wewenang Direksi dengan Persetujuan RUPS Berdasarkan Rekomendasi Dewan Komisaris.

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

BOARD MANUAL BOARD OF DIRECTORS

The work guidelines of the Board of Directors are regulated in the Board Manual. The Board Manual, among others, contains instructions for the work of the Board of Directors, which explains the stages of activities in a structured, systematic, easy-to-understand manner and must be carried out consistently, so that they can become a reference for the Board of Directors in carrying out their respective duties to achieve the Company's Vision and Mission. With the Board Manual, it is hoped that high work standards will be achieved, in line with GCG principles.

The contents of the Board Manual are as follows.

- Chapter I : Introduction;*
- Chapter II : Directors;*
- Chapter III : Board of Commissioners;*
- Chapter IV : Management of the Authority of the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners;*
- Chapter V : Management of the Authority of the Board of Directors with the Approval of the GMS Based on Recommendations Board of Commissioners.*

DUTIES, AUTHORITIES AND OBLIGATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is a company organ that is authorized and fully responsible for managing the company for the benefit of the company in accordance with the aims and objectives of the company, as well as representing the company, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association.

Secara khusus, tugas Direksi mencakup beberapa hal sebagai berikut :

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka :
 - a. Direksi berwenang untuk;
 - 1) Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;
 - 2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perseroan baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama atau kepada orang lain;
 - 3) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 4) Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) Mengangkat seorang Sekretaris Perseroan;
 - 6) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

In particular, the duties of the Board of Directors include the following:

1. *The Board of Directors is in charge of carrying out all actions related to the management of the Company for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company and representing the Company both inside and outside the Court on all matters and all events with restrictions as stipulated in the laws and regulations, the Articles of Association and/or General Meeting of Shareholders.*
2. *In carrying out its duties as referred to in number 1, then:*
 - a. *The Board of Directors is authorized to;*
 - 1) *To determine the management policy of the Company;*
 - 2) *Regulate the transfer of power of the Board of Directors to represent the Company inside and outside the court to a person or several members of the Board of Directors specifically appointed for that purpose or to one or several employees of the Company, either individually or jointly or to other people;*
 - 3) *Regulating provisions regarding the Company's employment including the determination of salaries, pensions or old-age benefits and other income for the Company's employees based on the prevailing laws and regulations and decisions of the General Meeting of Shareholders;*
 - 4) *Appointing and dismissing the Company's employees based on the Company's employment regulations and applicable laws and regulations;*
 - 5) *Appoint a Corporate Secretary;*
 - 6) *Take all other actions and actions regarding the management and ownership of the Company's assets, bind the Company with other parties and/or other parties with the Company, and represent the Company inside and outside the court on all matters and all events, with the restrictions as regulated in the legislation, the Articles of Association and/or the decision of the General Meeting of Shareholders;*



- b. Direksi berkewajiban untuk ;
- 1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
 - 2) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 3) Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana kerja dan Anggaran Perseroan;
 - 4) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Risalah Rapat Direksi;
 - 5) Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan;
 - 6) Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada akuntan publik untuk diaudit;
 - 7) Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan;
 - 8) Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan;
 - 9) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 10) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan
- b. *The Board of Directors is obliged to;*
- 1) *Strive for and ensure the implementation of the Company's business and activities in accordance with the aims and objectives as well as its business activities;*
 - 2) *Prepare on time the Company's Long-Term Plan, Work Plan and Budget and its amendments and submit it to the Board of Commissioners and Shareholders for approval at the General Meeting of Shareholders;*
 - 3) *Provide an explanation to the General Meeting of Shareholders regarding the Company's Long-Term Plan and the Company's Work Plan and Budget;*
 - 4) *Make a Register of Shareholders, Special Register, Minutes of General Meeting of Shareholders and Minutes of Meeting of the Board of Directors;*
 - 5) *Prepare an Annual Report as a form of accountability for the management of the Company as well as the Company's financial documents as referred to in the Law on Company Documents;*
 - 6) *Prepare Financial Statements based on Financial Accounting Standards and submit to public accountants for auditing;*
 - 7) *Submitting the Annual Report including Financial Statements to the General Meeting of Shareholders for approval and ratification;*
 - 8) *Provide explanation to the General Meeting of Shareholders regarding the Annual Report;*
 - 9) *Submitting the Balance Sheet and Profit and Loss Report which has been approved by the General Meeting of Shareholders to the Minister in charge of Law and Human Rights in accordance with the provisions of the legislation;*
 - 10) *Maintain the Register of Shareholders, Special Register, Minutes of General Meeting of Shareholders, Minutes of Meeting of the Board of Commissioners and Minutes of Meeting of the Board of Directors, Annual*

Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5 di atas, dan dokumen Perseroan lainnya;

- 11) Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan yaitu :
 - a) Daftar Pemegang Saham;
 - b) Daftar Khusus;
 - c) Risalah Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi;
 - e) Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perseroan;
 - f) Dokumen Perseroan lainnya.
 - 12) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
 - 13) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham;
 - 14) Menyiapkan susunan Organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
 - 15) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham;
 - 16) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh kepada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.
 4. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung-jawaban serta kewajaran.

Report and Financial Documents of the Company as referred to in numbers 4 and 5 above, and other Company documents;

- 11) *Save at the domicile of the Company, namely:*
 - a) *Register of Shareholders;*
 - b) *Special Lists;*
 - c) *Minutes of the General Meeting of Shareholders;*
 - d) *Minutes of Meeting of the Board of Commissioners and Minutes of Meeting of the Board of Directors;*
 - e) *Annual Report and Financial Documents of the Company;*
 - f) *Other Company documents.*
 - 12) *Develop an accounting system in accordance with Financial Accounting Standards and based on the principles of internal control, especially the functions of management, recording, storage and supervision;*
 - 13) *Provide periodic reports according to the method and time in accordance with applicable regulations, as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners and/or Shareholders;*
 - 14) *Prepare the organizational structure of the Company complete with details and duties;*
 - 15) *Provide an explanation of all matters asked or requested by members of the Board of Commissioners and the Shareholders;*
 - 16) *Carry out other obligations in accordance with the provisions stipulated in this Articles of Association and as determined by the General Meeting of Shareholders based on the laws and regulations.*
3. *In carrying out its duties, the Board of Directors is required to devote full thought, attention and dedication to the duties, obligations and achievement of the Company's goals.*
 4. *In carrying out their duties, the Board of Directors must comply with the Company's Articles of Association and laws and regulations and must implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility and fairness.*



5. Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan.
7. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi diluar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai tindakan tersebut disetujui oleh Rapat Direksi.
8. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:
 - a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek (sampai dengan 1 (satu) tahun);
 - b. Mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan/atau kerja sama dengan badan usaha/pihak lain dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
Batasan pagu pelimpahan kewenangan kepada Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :
 - 1) Kewenangan Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dilakukan dengan ketentuan, transaksi, pekerjaan, kerjasama, kontrak atau kegiatan tersebut nilainya per transaksi maksimal 15% (lima belas persen) dari ekuitas Perseroan yang telah di audit tahun buku terakhir.

Pembatasan tersebut di atas diberikan tanpa memperhatikan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, kerjasama, kontrak atau kegiatan dimaksud;
 - 2) Kewenangan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) dilakukan dengan ketentuan pekerjaan, transaksi, kerjasama, kontrak atau kegiatan tersebut nilainya per transaksi melebihi 15% (lima belas persen)

5. *Each member of the Board of Directors must in good faith and full responsibility carry out their duties for the interests and business of the Company by observing the applicable laws and regulations.*
6. *Each member of the Board of Directors is personally responsible if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his duties for the interests and business of the company.*
7. *Actions taken by members of the Board of Directors other than those decided by the Meeting of the Board of Directors are the personal responsibility of the person concerned until the action is approved by the Meeting of the Board of Directors.*
8. *The following acts of the Board of Directors must obtain written approval from the Board of Commissioners for:*
 - a. *As collateral for fixed assets for short-term loan withdrawal (up to 1 (one) year);*
 - b. *Conduct transactions, contracts, agreements, agreements and/or cooperation with business entities/other parties with a certain value or period determined by the General Meeting of Shareholders;*
The limits for the delegation of authority to the Board of Directors and the Board of Commissioners are as follows:
 - 1) *The authority of the Board of Directors as referred to in letter (b) which does not require the approval of the Board of Commissioners is carried out with the provisions, transactions, work, cooperation, contracts or activities that the value per transaction is a maximum of 15% (fifteen percent) of the Company's equity that has been audited last financial year.*

The restrictions mentioned above are given without regard to the period of execution of the work, cooperation, contract or activity in question;
 - 2) *The authority of the Board of Directors that requires the approval of the Board of Commissioners as referred to in letter (b) is exercised with the provisions of the work, transaction, cooperation, contract or activity whose value per transaction*

sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari ekuitas perseroan yang telah di audit tahun buku terakhir.

Pembatasan tersebut di atas diberikan tanpa memperhatikan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, kerjasama, kontrak atau kegiatan dimaksud;

- 3) Menyimpang dari hal-hal sebagaimana diatur pada angka (1) dan (2) di atas, khusus untuk kegiatan, transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan/atau kerjasama dimana Perseroan bertindak sebagai penyedia layanan bidang enjiniring, Direksi Perseroan dapat memutuskan tanpa memperhatikan pengaturan pembatasan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (2) di atas, sepanjang harga penyediaan layanan tidak lebih rendah dari biaya produksi.
 - c. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang (lebih dari 1 (satu) tahun), kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang diberikan kepada Anak Perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada Anak Perusahaan Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
 - d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
 - e. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - f. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, tidak termasuk pengangkatan pejabatnya.
9. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk:
- a. Mengagunkan penyertaan modal pada perseroan lain, termasuk penambahan modal pada Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan patungan;
 - b. Melakukan penyertaan modal pada perseroan lain, termasuk penambahan modal pada Anak Perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
 - c. Mendirikan Anak Perusahaan dan/atau perusahaan patungan;

exceeds 15% (fifteen percent) to 50% (fifty percent) of the company's equity which has been audited for the last financial year.

The restrictions mentioned above are given without regard to the period of execution of the work, cooperation, contract or activity in question;

- 3) *Notwithstanding the matters as regulated in numbers (1) and (2) above, specifically for activities, transactions, contracts, agreements, agreements and/or cooperation where the Company acts as a service provider in the field of engineering, the Company's Board of Directors may decide without regard to the regulation of restrictions as referred to in numbers (1) and (2) above, as long as the price for providing services is not lower than the cost of production.*
 - c. *Receive or provide medium/long term loans (more than 1 (one) year), except for loans (debts or receivables) granted to Subsidiaries provided that loans to the Company's Subsidiaries are reported to the Board of Commissioners;*
 - d. *To write off bad debts and dead goods inventory from the books;*
 - e. *Dispose of movable fixed assets with an economic life that is generally valid in the industry in general up to 5 (five) years;*
 - f. *Determine the organizational structure of 1 (one) level below the Board of Directors, excluding the appointment of its officers.*
9. *The following actions can only be carried out by the Board of Directors after receiving a written response from the Board of Commissioners and approval from the General Meeting of Shareholders for:*
- a. *As collateral for equity participation in other companies, including additional capital in Subsidiaries and/or joint ventures;*
 - b. *Make equity participation in other companies, including additional capital in Subsidiaries and/or joint ventures;*
 - c. *Establishing Subsidiaries and/or joint ventures;*



- d. Melepaskan penyertaan baik sebagian maupun keseluruhan modal pada Anak Perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
 - e. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran Anak Perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
 - f. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dan jaminan lainnya (Corporate Guarantee dan sejenisnya), kecuali untuk penerbitan Standby Letter of Credit/SBLC, Letter of Credit/LC yang timbul karena transaksi bisnis;
 - g. Mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan/atau kerjasama dengan badan usaha/pihak lain yang melebihi nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - h. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan;
 - i. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - j. Menetapkan blue print organisasi Perseroan;
 - k. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
 - l. Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 pasal ini yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran-- Perusahaan (RKAP) termasuk melakukan perubahan RKAP, kecuali untuk perubahan pos anggaran maupun peruntukannya wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
 - m. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang berdampak bagi Perseroan;
 - n. Pembebanan biaya Perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan;
 - o. Pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan atau Anak Perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai
- d. Releasing participation in part or all of the capital in Subsidiaries and/or joint ventures;*
 - e. Merging, consolidating, taking over, separating and dissolving Subsidiaries and/or joint ventures;*
 - f. Bind the Company as guarantor (borg or avalist) and other guarantees (Corporate Guarantee and the like), except for the issuance of Standby Letter of Credit/SBLC, Letter of Credit/LC arising from business transactions;*
 - g. Entering into transactions, contracts, agreements, agreements and/or cooperation with other business entities/parties exceeding a certain value or period determined by the General Meeting of Shareholders;*
 - h. No longer collect bad debts that have been written off;*
 - i. To release and write off the Company's fixed assets, except for movable fixed assets with an economic life which is generally applicable in the industry up to 5 (five) years;*
 - j. To determine the blue print of the Company's organization;*
 - k. Establish and change the Company's logo;*
 - l. Take actions as referred to in paragraph 8 of this article that have not been stipulated in the Company's Work Plan and Budget (RKAP), including making changes to the RKAP, except for changes to budget items and their allocations, which must obtain approval from the Board of Commissioners;*
 - m. Establishing foundations, organizations and/or associations that are directly or indirectly related to the Company which have an impact on the Company;*
 - n. The imposition of fixed and routine Company fees for the activities of foundations, organizations and/or associations either directly or indirectly related to the Company;*
 - o. Proposing the Company's representatives to become candidates for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners in joint ventures and or Subsidiaries that make significant contributions to the Company*

strategis yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.

10. Apabila dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan, maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi.
11. Penetapan pagu pelimpahan kewenangan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan atas suatu transaksi sebagaimana dimaksud pada poin 2.4.1 angka 8 huruf b, baik jangka waktu atau nilai/besarannya akan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah adanya usulan tertulis dari Direksi dan Dewan Komisaris.
12. Perbuatan-perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan rekomendasi Dewan Komisaris, apabila dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan rekomendasi, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.
13. Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk:
 - a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
14. Transaksi sebagaimana dimaksud pada poin 2.4.1 angka 13 adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku.
15. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada poin 2.4.1 angka 13 tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

and/or have strategic value as determined by the General Meeting of Shareholders.

10. *If within 30 (thirty) days from the receipt of the application or explanation and complete documents from the Board of Directors, the Board of Commissioners does not make a decision, then the Board of Commissioners is deemed to have approved the proposal of the Board of Directors.*
11. *Determination of the ceiling on the delegation of authority to the Board of Directors and the Board of Commissioners to make decisions on a transaction as referred to in point 2.4.1 number 8 letter b, both the time period or the value/ amount will be decided by the General Meeting of Shareholders after a written proposal from the Board of Directors and Board of Commissioners.*
12. *Acts of the Board of Directors that require the approval of the General Meeting of Shareholders with the recommendation of the Board of Commissioners, if within 30 (thirty) days from the receipt of the application or explanation and complete documents by the General Meeting of Shareholders from the Board of Directors, the Board of Commissioners does not provide a recommendation, then The General Meeting of Shareholders may make decisions without a written response from the Board of Commissioners.*
13. *The Board of Directors is required to seek approval from the General Meeting of Shareholders for:*
 - a. *transfer the Company's assets; or*
 - b. *make collateral for the Company's assets debt which is more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company in 1 (one) transaction or more, whether related to each other or not.*
14. *The transaction as referred to in point 2.4.1 number 13 is a transaction for the transfer of the Company's net assets that occurs within a period of 1 (one) financial year. letter a is a transaction for the transfer of the Company's net assets that occurs within a period of 1 (one) financial year.*
15. *The legal action as referred to in point 2.4.1 number 13 without the approval of the General Meeting of Shareholders, remains binding on the Company as long as the other party in the legal action has good intentions.*



16. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 pasal ini harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut. Dalam hal kuorum kehadiran tidak dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan kehadiran paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.
17. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur Anggaran Dasar ini.
18. Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perseroan Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh Rapat Direksi.
19. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.
20. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka Anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melakukan tugas-tugas Direktur Utama.
21. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang terlama dalam jabatan, maka Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam angka 15 di atas yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama

16. *Legal actions to transfer or make as collateral for debt or relinquish rights to the Company's assets as referred to in paragraph 13 of this article must obtain approval from the General Meeting of Shareholders attended or represented by Shareholders who own at least 3/4 (three quarters) part of the total number of shares with valid voting rights and approved by at least 3/4 (three quarters) of the total votes. In the event that a quorum of attendance cannot be held a second General Meeting of Shareholders with the attendance of at least 2/3 (two thirds) of the total shares with valid voting rights and approved by at least 3/4 (three quarters) of the total number of shareholders. the voice.*
17. *The General Meeting of Shareholders may reduce restrictions on the actions of the Board of Directors stipulated in this Articles of Association or determine other restrictions on the Board of Directors other than those stipulated in these Articles of Association.*
18. *In order to implement the policy on the management of the Company, the President Director has the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company provided that all the actions of the said President Director have been approved by the Meeting of the Board of Directors.*
19. *If the President Director is absent or unavailable for any reason, which does not need to be proven to a third party, then a member of the Board of Directors appointed in writing by the President Director is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and carry out the duties of the President Director.*
20. *In the event that the President Director does not make an appointment, then the Member of the Board of Directors who has served the longest in office is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and perform the duties of the President Director.*
21. *In the event that there are more than 1 (one) member of the Board of Directors who has served the longest in office, then the Member of the Board of Directors as referred to in number 15 above is the oldest in age who is authorized to*

- Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.
22. Dalam hal salah seorang Anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang Anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas Anggota Direksi yang berhalangan tersebut.
 23. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawab sendiri berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.
 24. Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas diantara Direksi ditetapkan oleh Direksi.
 25. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau Anggaran Dasar ini.
 26. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
 - a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 27. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam poin 2.4.1 angka 26 di atas, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- act for and on behalf of the Board of Directors and carry out the duties of the President Director.*
22. *In the event that a Member of the Board of Directors other than the President Director is absent for any reason, which does not need to be proven to a third party, the other Member of the Board of Directors shall appoint a Member of the Board of Directors to carry out the duties of the absent Member of the Board of Directors.*
 23. *The Board of Directors for certain actions on their own responsibility has the right to appoint one or more persons as their representatives or proxies, by granting them or them the power to carry out certain actions as regulated in a power of attorney.*
 24. *The division of duties and authorities of each member of the Board of Directors is determined by the General Meeting of Shareholders. In the case of the General Meeting of Shareholders does not determine the division of tasks and authorities, then the division of tasks among the Board of Directors is determined by the Board of Directors.*
 25. *The Board of Directors in managing the Company carries out the instructions given by the General Meeting of Shareholders as long as they do not conflict with the laws and regulations and/or these Articles of Association.*
 26. *Members of the Board of Directors are not authorized to represent the Company if:*
 - a. *There is a case before the court between the Company and the relevant member of the Board of Directors; or*
 - b. *The member of the Board of Directors concerned has a conflict of interest with the Company.*
 27. *In the event that there are conditions as referred to in point 2.4.1 number 26 above, those who are entitled to represent the Company are:*
 - a. *Other members of the Board of Directors who do not have a conflict of interest with the Company;*
 - b. *the Board of Commissioners in the event that all members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Company; or*
 - c. *Other parties appointed by the General Meeting of Shareholders in the event that all members of the Board of Directors or Board of Commissioners have a conflict of interest with the Company*

MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGUNDURAN DIRI DIREKSI

MASA JABATAN

1. Masa jabatan Anggota Direksi ditetapkan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
2. Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatan berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.
4. Dalam hal masa jabatan Anggota Direksi berakhir dan Rapat Umum Pemegang Saham belum dapat menetapkan penggantinya, maka tugas-tugas Anggota Direksi yang lowong tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan Anggota Direksi yang lowong.
5. Bagi Anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun pada masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

PEMBERHENTIAN SEWAKTU-WAKTU ANGGOTA DIREKSI

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan para Anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
2. Alasan pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, Anggota Direksi:

TERM OF SERVICE, TERMINATION AND REDEMPTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

LENGTH OF SERVICE

1. *The term of office for members of the Board of Directors is set at 4 (four) years and may be reappointed for 1 (one) term of office.*
2. *The position of a member of the Board of Directors ends when:*
 - a. *Passed Away;*
 - b. *Term of office ends;*
 - c. *Dismissed based on the decision of the General Meeting of Shareholders;*
 - d. *No longer meets the requirements as a Member of the Board of Directors based on the provisions of the Articles of Association and the laws and regulations.*
3. *The provisions as referred to in number 2 letter d above include but are not limited to prohibited concurrent positions and resignation.*
4. *In the event that the term of office of the Member of the Board of Directors ends and the General Meeting of Shareholders has not been able to determine a replacement, the duties of the vacant Member of the Board of Directors shall be carried out in accordance with the provisions for filling the position of the vacant Member of the Board of Directors.*
5. *For members of the Board of Directors who resign before or at the end of their term of office, unless they resign due to death, then the person concerned must submit accountability for his actions whose accountability has not been received by the General Meeting of Shareholders.*

TERMINATION OF A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. *The General Meeting of Shareholders may dismiss members of the Board of Directors at any time by stating the reasons.*
2. *The reason for the dismissal of a Member of the Board of Directors as referred to in number 1 above is made if based on the facts, the Member of the Board of Directors:*

- a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - c. Tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - d. Terlibat dalam tindakan merugikan Perseroan dan/atau Negara;
 - e. Dinyatakan bersalah sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - f. Mengundurkan diri.
3. Di samping alasan pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a sampai dengan f tersebut di atas, Direksi dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
 4. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, b, c dan d dan angka 3 di atas, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
 5. Rencana pemberhentian sewaktu-waktu Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, diberitahukan kepada Anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.
 6. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut di atas, disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas.
 7. Dalam hal Anggota Direksi yang diberhentikan telah melakukan pembelaan diri dan menyatakan tidak keberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas dianggap telah terpenuhi.
 8. Dalam hal pemberhentian dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas, dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengabaikan ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas.
- a. *Unable to fulfill its obligations as agreed in the management contract;*
 - b. *Unable to carry out their duties properly;*
 - c. *Not implementing or violating the provisions of the legislation and/or the provisions of the Articles of Association;*
 - d. *Engage in actions that are detrimental to the Company and/or the State;*
 - e. *Found guilty in connection with letters a, b and c above based on a court decision that has permanent legal force.*
 - f. *Resign.*
3. *In addition to the reasons for dismissing the members of the Board of Directors as referred to in numbers 2 letters a to f above, the Board of Directors may be dismissed by the General Meeting of Shareholders based on other reasons deemed appropriate by the General Meeting of Shareholders for the interests and objectives of the Company.*
 4. *The decision to dismiss as referred to in number 2 letters a, b, c and d and number 3 above, is taken after the person concerned is given the opportunity to defend himself.*
 5. *The plan to dismiss at any time the members of the Board of Directors as referred to in number 1 above, shall be notified to the member of the Board of Directors concerned orally or in writing by the Shareholders.*
 6. *In the event that the dismissal is carried out outside the General Meeting of Shareholders, the self-defense as referred to in number 4 above, shall be submitted in writing to the Shareholders within 14 (fourteen) days as of the date the member of the Board of Directors concerned is notified as referred to in paragraph (1). number 5 above.*
 7. *In the event that the dismissed Member of the Board of Directors has defended himself and expressed no objection to his dismissal plan when notified, the time provision as referred to in item 6 above is deemed to have been fulfilled.*
 8. *In the event that the dismissal is carried out at the General Meeting of Shareholders, the self-defense as referred to in number 4 above, shall be carried out at the General Meeting of Shareholders by ignoring the provisions of the time limit as referred to in number 6 above.*

9. Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas, masih dalam proses, maka Anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
10. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d dan e tersebut di atas, adalah merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA DIREKSI

Anggota Direksi dapat diberhentikan sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara Anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris.
2. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Pemegang Saham dan Direksi.
3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut.
4. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
5. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Dewan Komisaris yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.

9. *As long as the dismissal plan as referred to in number 5 above is still in process, the relevant Member of the Board of Directors must carry out his duties properly.*
10. *Dismissal for the reasons as referred to in number 2 letters d and e above, is a dismissal with no respect.*

TEMPORARY TERMINATION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Members of the Board of Directors may be temporarily dismissed by the Board of Commissioners if they act contrary to the Company's Articles of Association or there are indications of causing losses to the Company or neglecting their obligations or there are urgent reasons for the Company, taking into account the following provisions:

1. *The decision of the Board of Commissioners regarding the temporary dismissal of members of the Board of Directors shall be made in accordance with the procedures for making decisions of the Board of Commissioners.*
2. *The said temporary dismissal must be notified in writing to the person concerned along with the reasons causing the action with a copy to the Shareholders and the Board of Directors.*
3. *The notification as referred to in number 2 above shall be submitted no later than 2 (two) days after the stipulation of the temporary suspension.*
4. *Members of the Board of Directors who are temporarily dismissed are not authorized to carry out the management of the Company and represent the Company both inside and outside the court.*
5. *Within a period of no later than 30 (thirty) days after the temporary suspension, a General Meeting of Shareholders must be held by the Board of Commissioners which will decide whether to revoke or strengthen the decision on the temporary dismissal.*

6. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas, Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
 7. Rapat sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara Pemegang Saham yang hadir.
 8. Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat, Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas tidak diselenggarakan atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.
 9. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara menjadi batal sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas.
 10. Keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara Anggota Direksi, dapat pula dilakukan oleh Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menanda-tangani keputusan yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas.
 11. Dalam hal keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara Anggota Direksi di luar Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada angka 10 di atas, maka Anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara lisan atau tertulis, dengan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan.
 12. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham atau Pemegang Saham membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas, maka Anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
6. *In the General Meeting of Shareholders as referred to in number 5 above, the member of the Board of Directors concerned is given the opportunity to defend himself.*
 7. *The meeting as referred to in number 5 above is chaired by one of the Shareholders who is elected by and from among the Shareholders present.*
 8. *In the event that the period of 30 (thirty) days has elapsed, the General Meeting of Shareholders as referred to in number 5 above is not held or the General Meeting of Shareholders cannot make a decision, then the temporary suspension will be cancelled.*
 9. *Temporary dismissal cannot be extended or re-assigned for the same reason, if the temporary suspension becomes void as referred to in number 8 above.*
 10. *The decision to revoke or strengthen the decision to temporarily suspend a Member of the Board of Directors, may also be made by the Shareholders outside the General Meeting of Shareholders on condition that all Shareholders with voting rights agree in writing by signing the relevant decision with due observance of the time provisions as referred to in number 5 above.*
 11. *In the event of a decision to revoke or strengthen the decision to temporarily suspend a Member of the Board of Directors outside the General Meeting of Shareholders as referred to in number 10 above, the relevant Member of the Board of Directors shall be notified orally or in writing, with the opportunity to present his/her self-defense in writing within a period of time. 14 (fourteen) days after receiving the notification.*
 12. *If the General Meeting of Shareholders or Shareholders cancels the temporary suspension or there is a situation as referred to in number 8 above, the Member of the Board of Directors concerned must carry out his duties again as appropriate.*

PENGUNDURAN DIRI

1. Seorang Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran dirinya disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.
2. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh Anggota Direksi yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengunduran diri dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif tanggal pengunduran diri, tidak ada keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka Anggota Direksi tersebut berhenti pada tanggal yang diminta tersebut diatas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

PELAKSANA TUGAS ANGGOTA DIREKSI YANG LOWONG

1. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih Anggota Direksi Perseroan lowong, maka:
 - a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi jabatan Anggota Direksi yang lowong tersebut.
 - b. Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi jabatan Anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka untuk sementara salah seorang Anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris atau pihak lain selain Anggota Direksi yang ada yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menjalankan

RESIGNATION

1. A member of the Board of Directors has the right to resign from his position by notifying in writing of his intention to the Company with a copy to the Shareholders, the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors of the Company no later than 30 (thirty) days prior to the date of his resignation. If the resignation letter mentions an effective date of less than 30 (thirty) days from the date the letter is received, it is considered not to mention the effective date of resignation.
2. If up to the date requested by the relevant Member of the Board of Directors or within 30 (thirty) days from the date of receipt of the resignation letter, in the event that the effective date of the resignation date is not stated, there is no decision from the General Meeting of Shareholders, then the Member The Board of Directors resigns on the date requested above or with the lapse of 30 (thirty) days from the date the resignation letter is received without requiring the approval of the General Meeting of Shareholders.

IMPLEMENTATION OF DUTIES FOR MEMBERS OF THE VACANT BOARD OF DIRECTORS

1. If for any reason the position of one or more members of the Board of Directors of the Company is vacant, then:
 - a. Within 30 (thirty) days after the vacancy occurs, a General Meeting of Shareholders must be held to fill the vacant position of the Member of the Board of Directors.
 - b. As long as the position is vacant and the General Meeting of Shareholders has not filled the vacant position of the Member of the Board of Directors as referred to in letter a above, then temporarily another Member of the Board of Directors appointed by the Board of Commissioners or other party other than the existing Member of the Board of Directors is determined by the General Meeting Shareholders, to carry out the

- pekerjaan Anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama, sampai dengan ditetapkannya Anggota Direksi yang definitif.
- c. Dalam hal jabatan itu lowong karena berakhirnya masa jabatan dan Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi jabatan Anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka untuk sementara Anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh Dewan Komisaris untuk tetap menjalankan pekerjaannya dengan kekuasaan dan wewenang yang sama, sampai ditetapkannya Anggota Direksi yang definitif.
 - d. Bagi Pelaksana Tugas Anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c di atas selain Anggota Direksi yang masih menjabat, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan Anggota Direksi yang lowong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.
2. Apabila oleh sebab apapun seluruh jabatan Anggota Direksi Perseroan lowong, maka:
 - a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi jabatan Anggota Direksi yang lowong tersebut.
 - b. Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, atau pihak lain yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
 - c. Dalam hal jabatan Direksi lowong karena berakhirnya masa jabatan dan Rapat Umum Pemegang Saham belum menetapkan penggantinya, maka untuk sementara Anggota-Anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh Dewan Komisaris untuk menjalankan pekerjaannya dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
- work of the vacant Member of the Board of Directors with the same power and authority, until the appointment of a definitive Member of the Board of Directors.*
- c. *In the event that the position is vacant due to the end of the term of office and the General Meeting of Shareholders has not filled the vacant position of the Member of the Board of Directors as referred to in letter a above, then for the time being the Member of the Board of Directors whose term of office has ended may be determined by the Board of Commissioners to continue to carry out his work with authority. and the same authority, until a definitive Member of the Board of Directors is determined.*
 - d. *For the vacant members of the Board of Directors as referred to in letters b and c above, other than the members of the Board of Directors who are still in office, receive the same salary and allowances/facilities as the vacant members of the Board of Directors, excluding post-employment benefits.*
2. *If for any reason all positions of the members of the Board of Directors of the Company are vacant, then:*
 - a. *Within 30 (thirty) days after the vacancy occurs, a General Meeting of Shareholders must be held to fill the vacant position of the Member of the Board of Directors.*
 - b. *As long as the position is vacant and the General Meeting of Shareholders has not filled the vacant position of the Board of Directors as referred to in letter a above, the Company is temporarily managed by the Board of Commissioners, or other parties determined by the General Meeting of Shareholders, with the same power and authority.*
 - c. *In the event that the position of the Board of Directors is vacant due to the end of the term of office and the General Meeting of Shareholders has not determined a replacement, then the members of the Board of Directors whose term of office has ended may be appointed by the Board of Commissioners to carry out their work with the same power and authority.*

- d. Bagi pelaksana tugas Anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c tersebut di atas, selain Dewan Komisaris, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan Anggota Direksi yang lowong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.
3. Bagi Pelaksana Tugas Direksi yang lowong diberikan fasilitas santunan/asuransi purna jabatan atau fasilitas lain selama hal tersebut ditentukan oleh Pemegang Saham baik melalui RUPS maupun keputusan yang diambil di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

- d. For those who carry out the duties of the vacant members of the Board of Directors as referred to in letters b and c above, other than the Board of Commissioners, they receive the same salary and allowances/facilities as the vacant members of the Board of Directors, excluding post-employment benefits.
3. The vacant Acting Directors are provided with post-service compensation/insurance facilities or other facilities as long as this is determined by the Shareholders either through the GMS or decisions taken outside the GMS on condition that all shareholders with voting rights agree in writing by signing the proposed proposal.

PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

1. Kepada Anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai Perseroan yang bersangkutan.
2. Tanggung Jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai sekretaris perusahaan.
3. Program Pengenalan meliputi:
 - a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;
 - b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya;
 - c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
 - d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.
4. Program pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke perusahaan

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW BOARD OF DIRECTORS

1. Members of the Board of Directors who are appointed for the first time must be given an introduction program regarding the Company in question.
2. The responsibility for conducting the introduction program rests with the Corporate Secretary or anyone who performs the function as a corporate secretary.
3. The Introductory Program includes:
 - a. Implementation of GCG principles by the Company;
 - b. A description of the Company in relation to the objectives, nature and scope of activities, financial and operating performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive position, risks and various other strategic issues;
 - c. Information relating to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee;
 - d. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners/Supervisory Board and the Board of Directors as well as things that are not allowed.
5. Company introduction programs can be in the form of presentations, meetings, company visits

dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perseroan dimana program tersebut dilaksanakan.

5. Anggota Direksi yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan:
 - a. Direksi menyampaikan kepada Sekretaris Perusahaan untuk diadakan program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat.
 - b. Tingkat kehadiran/keaktifan Anggota Direksi dalam mengikuti rangkaian program pengenalan perusahaan.

and document review or other programs deemed appropriate to the Company where the program is implemented.

6. *Newly appointed members of the Board of Directors participate in the introduction program organized by the company:*
 - a. *The Board of Directors submits to the Corporate Secretary to hold an introduction program for newly appointed members of the Board of Directors.*
 - b. *The level of attendance/activity of members of the Board of Directors in participating in a series of company introduction programs.*

RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING ANGGOTA DIREKSI

SCOPE OF WORK AND RESPONSIBILITIES OF EACH MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI

DEVELOPMENT OF DUTIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas diantara Direksi ditetapkan oleh Direksi.
2. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
3. Setiap Anggota Direksi bertanggung-jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan.
4. Tindakan yang dilakukan oleh Anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung-jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan yang dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi.
5. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak

1. *The division of duties and authorities of each Member of the Board of Directors shall be determined by the General Meeting of Shareholders. In the event that the General Meeting of Shareholders does not determine the division of duties and authorities, then the division of tasks among the Board of Directors is determined by the Board of Directors.*
2. *The Board of Directors in managing the Company carries out the instructions given by the General Meeting of Shareholders as long as they do not conflict with the laws and regulations and/or the Company's Articles of Association.*
3. *Each member of the Board of Directors is personally responsible if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his duties for the interests and business of the Company.*
4. *Actions taken by members of the Board of Directors other than those decided by the Meeting of the Board of Directors shall be the personal responsibility of the person concerned until the said action is approved by the Meeting of the Board of Directors.*
5. *If the President Director is absent or unavailable for any reason, which does not need to be proven to a third party, then a member of the Board of Directors appointed in writing by the President Director is authorized to act for and on behalf of*

untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

6. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka Anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melakukan tugas-tugas Direktur Utama.
7. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi terlama dalam jabatan, maka Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada butir (6) di atas yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.
8. Dalam hal salah seorang Anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang Anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas Anggota Direksi yang berhalangan tersebut.
9. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawab sendiri berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.
10. Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perseroan Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh Rapat Direksi.

the Board of Directors and carry out the duties of the President Director.

6. *In the event that the President Director does not make an appointment, the member of the Board of Directors who has served the longest in office is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and perform the duties of the President Director.*
7. *In the event that there are more than 1 (one) member of the Board of Directors who has served the longest in office, then the Member of the Board of Directors as referred to in point (6) above is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and carry out the duties of the President Director.*
8. *In the event that a Member of the Board of Directors other than the President Director is absent for any reason, which does not need to be proven to a third party, the other Member of the Board of Directors shall appoint a Member of the Board of Directors to carry out the duties of the absent Member of the Board of Directors.*
9. *The Board of Directors for certain actions on their own responsibility has the right to appoint one or more persons as their representatives or proxies, by granting them or them the power to carry out certain actions as regulated in a power of attorney.*
10. *In order to implement the management policy of the Company, the President Director has the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company provided that all the actions of the said President Director have been approved by the Meeting of the Board of Directors.*

TABEL PEMBIDANGAN TUGAS DIREKSI

TABLE OF ASSIGNMENTS FOR DIRECTORS DUTIES

Jabatan <i>Position</i>	Bidang Tugas <i>Task Field</i>
PLT Direktur Utama <i>President Director</i>	Menentukan, memutuskan dan menetapkan strategi perencanaan serta pelaksanaan seluruh kegiatan PLN Enjiniring. <i>Establish, decide and determine the planning strategy and implementation of all PLN Enjiniring activities.</i>
Direktur Enjiniring <i>Director of Engineering</i>	Menentukan, memutuskan, menetapkan dan mengendalikan kegiatan produksi dan operasi guna mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan secara efektif dan efisien. <i>Establish, decide, determine and control the production and operating activities to achieve the Company's goals and objectives effectively and efficiently.</i>

Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha <i>Director of Marketing and Business Development</i>	Menentukan, memutuskan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan kegiatan pemasaran serta pengembangan usaha dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. <i>Establish, decide, determine and control the policies of marketing and business development activities in order to achieve the targets determined.</i>
Direktur Keuangan dan SDM <i>Director of Finance and HR</i>	Menentukan, memutuskan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan dan strategi keuangan dan SDM guna mencapai tujuan dan sasaran perusahaan secara efektif dan efisien. <i>Establish, decide, determine and control the financial and HR policies and strategies to achieve the company goals and objectives effectively and efficiently.</i>

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Seluruh Direksi PLN Enjiniring telah memenuhi kriteria dan ketentuan dalam *Fit and proper Test* berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan GCG, serta peraturan dan ketentuan lain yang terkait.

FITNESS ASSESSMENT

All Directors of PLN Enjiniring have met the criteria and provisions in the Fit and Proper Test based on the Limited Liability Company Law and the provisions of GCG, as well as other related rules and regulations.

TABEL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

FIT AND PROPER TEST TABLE

Nama <i>Name</i>	Pelaksana <i>Administrator</i>	Hasil <i>Result</i>
Didik Sudarmadi	PT PLN (Persero)	Lulus <i>Pass</i>
Bernadus Sudarmanta	PT PLN (Persero)	Lulus <i>Pass</i>
Martono	PT PLN (Persero)	Lulus <i>Pass</i>
Muhamad Reza	PT PLN (Persero)	Lulus <i>Pass</i>

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI

PLN Enjiniring memiliki Buku Pedoman *Good Corporate Governance* yang antara lain mengatur keberagaman komposisi Direksi. Berdasarkan pedoman tersebut, komposisi Direksi hendaknya sedemikian rupa sehingga memungkinkan diambilnya keputusan secara efektif, tepat, cepat, dan independen. Komposisi Direksi merupakan bauran yang tepat antara pengalaman manajerial dan kepemimpinan, pendidikan yang memadai dan sesuai dengan tanggung jawab yang diemban, serta memiliki karakter yang baik.

DIVERSITY POLICY COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

PLN Enjiniring has a Good Corporate Governance Manual which, among other things, regulates the diversity of the composition of the Board of Directors. Based on these guidelines, the composition of the Board of Directors should be in such a way as to enable effective, precise, fast and independent decisions to be made. The composition of the Board of Directors is the right mix of managerial and leadership experience, adequate education and in accordance with the responsibilities carried out, and has good character.

Pada periode 2021, keberagaman komposisi Direksi yang tercermin dalam usia, pendidikan, dan pengalaman kerja, dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

In the 2021 period, the diversity of the composition of the Board of Directors, which is reflected in age, education, and work experience, can be seen in the table below:

TABEL KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI

TABLE OF COMPOSITION DIVERSITY OF BOARD OF DIRECTORS

Nama Direksi <i>Name of Directors</i>	Lahir <i>Birth</i>	Pendidikan <i>Education</i>	Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>
Didik Sudarmadi	Januari 1969	S1 Listrik di Institut Teknologi Bandung S2 Bidang Kelistrikan di Delft University of Technology, Netherlands	Executive Vice President Pengembangan Regional Jawa Bagian Barat pada Direktorat Bisnis Regional Jawa Bagian Barat PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada tahun 2019 - 2021, General Manager PT PLN (Persero) Pusat Enjiniring Ketenagalistrikan pada tahun 2017 - 2019, General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku pada tahun 2016 - 2017
	January 1969	Bachelor Degree in Electrical at Bandung Institute of Technology Master's Degree in Electrical at Delft University of Technology, Netherlands	Executive Vice President of West Java Regional Development at the West Java Regional Business Directorate of PT PLN (Persero) Head Office in 2019 - 2021, General Manager of PT PLN (Persero) Electricity Engineering Center in 2017 - 2019, General Manager of PT PLN (Persero) Maluku Development Main Unit in 2016 - 2017
Martono	Mei 1970	D3 Manajemen Bisnis di Politeknik UI S1 Manajemen Keuangan di UNIBA	Vice Presiden Anggaran III Pada Divisi Anggaran Direktorat Keuangan PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Manajer Senior Anggaran III pada Divisi Anggaran Direktorat Keuangan PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Manajer Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia pada PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan III
	May 1970	Associate Degree in Business Management at Polytechnic - University of Indonesia Bachelor Degree in Financial Management at UNIBA	Vice President of Budget III at the Budget Division of the Directorate of Finance of PT PLN (Persero) Head Office, Senior Manager of Budget III at the Budget Division of the Directorate of Finance of PT PLN (Persero) Head Office, Manager of Finance and Human Resources at PT PLN (Persero) Main Development Unit III
Bernadus Sudarmanta	September 1968	S1 Mesin di Institut Teknologi Sepuluh November S2 Bidang Manajemen di Institut Teknologi Bandung	Komisaris Utama di PT Rekadaya Elekrika Consult, Direktur Utama di PT Pembangkit Jawa Bali Investasi, General Manajer PT PLN SUMBAGUT

	September, 1968	Bachelor Degree in Engineering at Sepuluh November Institute of Technology	President Comisioner PT Rekadaya Elekrika Consult, President Director PT Pembangkit Jawa Bali Investasi, General Manajer PT PLN SUMBAGUT
		Masters Degree in Management at Bandung Institute of Technology	
Muhamad Reza	November 1974	S1 Electrical Engineering di Institut Teknologi Bandung	Technical Expert, Business Development & Business Line Manager Power System, Advisory & Advanced Analytics di Tractebel Engineering Indonesia,
		S2 Electrical Engineering di Delft University of Technology, Netherlands	Business Development Manager, Power System Specialist & Country Representative di Solvina International, Jakarta-Indonesia,
		S3 Electrical Power Systems di Delft University of Technology, Netherlands	Business Development Manager, Power System Specialist & Country Representative di Solvina International, Goteborg-Sweden
	November 1974	Bachelor Degree in Electrical Engineering at Bandung Institute of Technology	Technical Expert, Business Development & Business Line Manager Power System, Advisory & Advanced Analytics di Tractebel Engineering Indonesia,
		Master's Degree in Electrical Engineering at Delft University of Technology, Netherlands	Business Development Manager, Power System Specialist & Country Representative di Solvina International, Jakarta-Indonesia,
		Doctoral Degree in Electrical Power Systems at Delft University of Technology, Netherland	Business Development Manager, Power System Specialist & Country Representative di Solvina International, Goteborg-Sweden

JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI

Sesuai Anggaran Dasar dan *Board Manual*, Perusahaan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang Anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Direksi PLN Enjiniring terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu seorang Direktur Utama dan 3 orang Direktur. Seluruh Direksi telah memenuhi kriteria dan ketentuan dalam *fit and proper test* berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan GCG, serta peraturan dan ketentuan lain yang terkait. Setiap anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang memadai.

NUMBER AND COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTOR

In accordance with the Articles of Association and the Board Manual, the Company is managed and led by a Board of Directors whose number is adjusted to the needs of the Company. In the event that the Board of Directors consists of more than 1 (one) member of the Board of Directors, one of whom is appointed as the President Director.

The Board of Directors of PLN Enjiniring consists of 4 (four) people, namely a President Director and 3 Directors. The entire Board of Directors has met the criteria and provisions in the fit and proper test based on the Limited Liability Company Law and the provisions of GCG, as well as other related rules and regulations. Each member of the Board of Directors has sufficient integrity, competence and reputation.

Komposisi Direksi PLN Enjiniring sebagai berikut.

The composition of the Board of Directors of PLN Enjiniring is as follows.

TABEL KOMPOSISI DIREKSI

TABLE OF BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

No	Nama Name	Jabatan Position
1	Didik Sudarmadi	Direktur Utama <i>President Director</i>
2	Martono	Direktur Keuangan dan SDM <i>Director of Finance and HR</i>
3	Bernadus Sudarmanta	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha <i>Director of Marketing and Business Development</i>
4	Muhamad Reza	Direktur Enjiniring <i>Director of Engineering</i>

DASAR PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN MULAI BERLAKUNYA JABATAN DIREKSI

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi dilakukan melalui Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham, maka mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut dimuat dalam keputusan Pemegang Saham tersebut. Dalam hal keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi tersebut berlaku sejak keputusan Pemegang Saham tersebut ditetapkan.
4. Anggota Direksi diangkat dari calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham

BASIS FOR APPOINTMENT, TERMINATION AND ENTRY INTO THE POSITION OF BOARD OF DIRECTORS

1. *Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders.*
2. *The decision of the General Meeting of Shareholders regarding the appointment and dismissal of members of the Board of Directors shall also determine the effective date of the appointment and dismissal. In the event that the General Meeting of Shareholders does not determine, the appointment and dismissal of the members of the Board of Directors shall take effect as of the closing of the General Meeting of Shareholders.*
3. *In the event that the appointment and dismissal of the members of the Board of Directors is carried out through a decision of the shareholders outside the general meeting of shareholders, the appointment and dismissal shall take effect in the decision of the shareholders. In the event that the decision of the Shareholders outside the General Meeting of Shareholders does not stipulate, then the appointment and dismissal of the Member of the Board of Directors is effective as of the decision of the Shareholders.*
4. *Members of the Board of Directors are appointed from the candidates proposed by the Shareholders and the nominations are binding for the General Meeting of Shareholders*

Dasar pengangkatan tiap-tiap anggota Direksi adalah sebagai berikut.

The basis for the appointment of each member of the Board of Directors is as follows.

TABEL DASAR PENGANGKATAN DIREKSI

TABLE OF BASIS OF DIRECTORS APPOINTMENT

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Dasar Pengangkatan <i>Basis of Appointment</i>
Didik Sudarmadi	Direktur Utama	1. RUPS Pengangkatan Direksi tanggal 19 Februari 2021 2. Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 19 tanggal 26 Februari 2021
	<i>President Director</i>	<i>1. AGM Appointment of Directors on February 19, 2021 2. Notary Deed Lenny Janis Ishak, SH Number 19 on February 26, 2021</i>
Martono	Direktur Keuangan dan SDM	1. RUPS Pengangkatan Direksi tanggal 19 Februari 2021 2. Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 19 tanggal 26 Februari 2021
	<i>Director of Finance and HR</i>	<i>1. AGM Appointment of Directors on February 19, 2021 2. Notary Deed Lenny Janis Ishak Number, SH Number 19 on February 26, 2021</i>
Bernadus Sudarmanta	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha	1. RUPS Pengangkatan Direksi tanggal 19 Februari 2021 2. Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 19 tanggal 26 Februari 2021
	<i>Director of Marketing and Business Development</i>	<i>1. AGM Appointment of Directors on February 19, 2021 2. Notary Deed Lenny Janis Ishak, SH Number 19 on February 26, 2021</i>
Muhamad Reza	Direktur Enjiniring	1. RUPS Pengangkatan Direksi tanggal 20 September 2021 2. Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 40 tanggal 29 September 2021
	<i>Director of Engineering</i>	<i>1. AGM Appointment of Directors on 2 December 2016 2. Notary Deed Lenny Janis Ishak, SH Number 40 on September 29, 2021</i>

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Direksi senantiasa bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Dewan Komisaris.

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali

BOARD OF DIRECTORS AFFILIATE RELATIONSHIPS

The Board of Directors always acts independently, in the sense that they do not have a conflict of interest that can interfere with their ability to carry out their duties independently and critically, both in relation to each other and the relationship to the Board of Commissioners.

The Board of Directors has no financial relationship, management relationship, share ownership and/or family relationship with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling

atau hubungan dengan Perseroan, sehingga, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Direksi tidak memangku jabatan rangkap sebagai Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perseroan, maupun jabatan struktural, dan jabatan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali, yang meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Shareholder or relationship with the Company, so that they can carry out their duties and responsibilities independently.

The Board of Directors does not hold concurrent positions as President Director or other Director in State-Owned, Regional and Private Enterprises or other positions related to the management of the Company, as well as structural positions, and other functional positions in central and local government agencies/institutions, as well as other positions. in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and other applicable laws and regulations.

Affiliation relationship between members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Major and/or controlling Shareholders, which includes:

1. *Affiliation relationship between members of the Board of Directors and other members of the Board of Directors.*
2. *Affiliation relationship between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.*
3. *Affiliation relationship between members of the Board of Directors and the Major and/or controlling Shareholders.*
4. *Affiliate relationship between members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Commissioners; and*
5. *Affiliation relationship between members of the Board of Commissioners and the Major and/or controlling Shareholders.*

TABEL HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

TABEL OF BOARD OF DIRECTORS AFFILIATION

Direksi <i>Directors</i>	Hubungan Keuangan dan Keluarga Direksi <i>Financial and Family Relations</i>													
	Hubungan Keuangan Dengan <i>Financial Relation With</i>						Hubungan Keluarga Dengan <i>Family Relations With</i>						Hubungan Kepengurusan Dengan <i>Management Relation With</i>	
	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Direksi <i>Directors</i>		Pemegang Saham <i>Shareholders</i>		Dewan Komisaris <i>Boards of Commissioners</i>		Direksi <i>Directors</i>		Pemegang Saham <i>Shareholders</i>		Perusahaan lain <i>Other Companies</i>	
	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>
	Didik Sudarmadi		√		√		√		√		√		√	
Martono		√		√		√		√		√		√		√
Bernadus Sudarmanta		√		√		√		√		√		√		√
Muhamad Reza		√		√		√		√		√		√		√

Antar anggota Direksi dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda.

Between members of the Board of Directors and between members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors there is no blood relationship up to the third degree, either in a straight line or a sideways line or by marriage.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Direksi tidak ada yang memiliki saham, baik di PLN Enjiniring maupun di perusahaan lainnya. Kepemilikan saham Direksi sebagai berikut.

SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors does not own any shares, either in PLN Enjiniring or in other companies. The share ownership of the Board of Directors is as follows.

TABEL KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI**TABLE OF BOARD OF DIRECTORS' SHARE OWNERSHIP**

Direksi	Jabatan	Kepemilikan Saham di PLN Enjiniring	Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain
<i>Board of Directors</i>	<i>Position</i>	<i>Share Ownership at PLN Enjiniring</i>	<i>Share Ownership in Other Companies</i>
Didik Sudarmadi	PLT Direktur Utama <i>PLT President Director</i>	Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>
Martono	Direktur Keuangan dan SDM <i>Director of Finance and HR</i>	Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>
Bernadus Sudarmanta	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha <i>Director of Marketing and Business Development</i>	Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>
Muhamad Reza	Direktur Enjiniring <i>Director of Engineering</i>	Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>

RANGKAP JABATAN DIREKSI**DUAL POSITIONS OF BOARD OF DIRECTORS****PENGATURAN RANGKAP JABATAN****MULTIPLE POSITION ARRANGEMENTS**

1. Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:
 - a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. Anggota Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus dan/atau calon/anggota legislatif ; dan/atau
 - e. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
2. Selain jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada poin 1, anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain, kecuali:

1. Members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions as mentioned below, namely:
 - a. Members of the Board of Directors in State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, Private-Owned Enterprises;
 - b. Member of the Board of Commissioners in State-Owned Enterprises;
 - c. Other structural and functional positions in central and/or regional government agencies/institutions;
 - d. Other positions in accordance with the provisions of laws and regulations, management and/or legislative candidates/ members; and/or
 - e. Other positions that may cause a conflict of interest.
2. In addition to concurrent positions as referred to in point 1, members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions as members of the Board of Commissioners in other companies, except:

- a. Anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan/perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, dengan ketentuan hanya berhak atas akumulasi penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris pada satu atau lebih anak perusahaan/perusahaan patungan maksimal sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari gaji Anggota Direksi yang bersangkutan di BUMN, sedangkan penghasilan lain/ selebihnya diserahkan menjadi penghasilan BUMN yang bersangkutan.
- b. Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain untuk mewakili/memperjuangkan kepentingan BUMN sepanjang memperoleh ijin dari Menteri.
- c. Direksi yang memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada angka 1, masa jabatannya sebagai Direksi berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan tersebut.
4. Pada Tahun 2021 tidak ada Direksi yang melakukan rangkap Jabatan di Perusahaan lain.
- a. *Members of the Board of Commissioners in the relevant SOE subsidiary/joint venture company, provided that they are only entitled to the accumulated income as a member of the Board of Commissioners in one or more subsidiaries/joint venture companies of a maximum of 30% (thirty percent) of the salary of the member of the Board of Directors concerned in the SOE , while the remaining/other income shall be turned over to the income of the relevant SOE.*
- b. *Members of the Board of Commissioners in other companies to represent/fight for the interests of SOEs as long as they obtain permission from the Minister.*
- c. *Directors who hold concurrent positions as referred to in number 1, their term of office as Directors ends as of the occurrence of these concurrent positions.*
4. *In 2021 there are no Directors who hold concurrent positions in other companies.*

TABEL RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

TABLE CONCURRENT POSITIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Nama Direksi <i>Name of Directors</i>	Jabatan <i>Position</i>	Rangkap Jabatan <i>Concurrent Positions</i>
Didik Sudarmadi	Direktur Utama	Tidak Ada
	<i>President Director</i>	<i>None</i>
Martono	Direktur Keuangan dan SDM	Tidak Ada
	<i>Director of Finance and HR</i>	<i>None</i>
Bernadus Sudarmanta	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha	Tidak Ada
	<i>Director of Marketing and Business Development</i>	<i>None</i>
Muhamad Reza	Direktur Enjiniring	Tidak Ada
	<i>Director of Engineering</i>	<i>None</i>

Untuk meminimalisir terjadinya benturan kepentingan yang disebabkan adanya rangkap jabatan, setiap anggota Direksi diwajibkan untuk menandatangani Pakta Integritas yang berisikan keterangan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi tidak akan melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Pakta Integritas tersebut disimpan dan diadministrasikan oleh Sekretaris

In order to minimize the occurrence of conflicts of interest due to concurrent positions, each member of the Board of Directors is required to sign an Integrity Pact which contains information that in carrying out their duties, members of the Board of Directors will not do things that may cause a conflict of interest. The Integrity Pact is kept and administered by the Secretary.

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN

Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan.

1. Menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan, meliputi:
 - a. Menyusun mekanisme untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi Direksi dan pejabat struktural Perusahaan yang disebabkan benturan kepentingan;
 - b. Mensosialisasikan kebijakan tentang mekanisme untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi bagi Direksi dan pejabat struktural Perusahaan;
 - c. Menandatangani surat pernyataan Direksi tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi/keluarga, jabatan lain, atau golongan dengan kepentingan Perusahaan pada awal pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun.
2. Menetapkan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan.
 - a. Menyampaikan laporan kepemilikan Saham pada Perusahaan lainnya kepada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam daftar khusus;
 - b. Menandatangani Pakta Integritas yang dilampirkan dalam Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan/atau rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS;
 - c. Tidak terdapat pengambilan keputusan transaksional yang mengandung benturan kepentingan.

CONFLICT OF INTEREST MANAGEMENT

The Board of Directors monitors and manages potential conflicts of interest.

1. *Establish policies on mechanisms for the Board of Directors and structural officers to prevent personal and other party profits from being taken due to conflicts of interest, including:*
 - a. *Develop a mechanism to prevent the taking of personal benefits of the Board of Directors and structural officers of the Company due to conflicts of interest;*
 - b. *Disseminate policies on mechanisms to prevent the taking of personal benefits for the Board of Directors and structural officers of the Company;*
 - c. *Signing a statement that the Board of Directors does not have a conflict of interest between personal/family interests, other positions, or groups with the interests of the Company at the beginning of the appointment which is renewed at the beginning of each year.*
2. *Establish policies to prevent conflicts of interest.*
 - a. *Submit a report on share ownership in other companies to the Company (Corporate Secretary) to be recorded in a special register;*
 - b. *Signing the Integrity Pact attached to the Proposed Action of the Board of Directors which must obtain approval from the Board of Commissioners and/or recommendation from the Board of Commissioners and approval of the GMS;*
 - c. *There is no transactional decision making that contains a conflict of interest.*

BENTURAN KEPENTINGAN

1. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan berbenturan kepentingan dengan kepentingan salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh dan dari anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
2. Apabila benturan kepentingan tersebut menyangkut semua Anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau diwakili oleh seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris secara tertulis.
3. Dalam hal tidak ada Dewan Komisaris, maka RUPS dapat mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut pada angka 1 dan 2 di atas.

CONFLICT OF INTEREST

1. *If something happens where the interests of the Company conflict with the interests of a member of the Board of Directors, the Company will be represented by another member of the Board of Directors appointed by and from members of the Board of Directors who do not have a conflict of interest.*
2. *If the conflict of interest concerns all members of the Board of Directors, the Company will be represented by the Board of Commissioners or represented by one or more persons appointed by the Board of Commissioners in writing.*
3. *In the absence of a Board of Commissioners, the GMS may appoint one or more persons to represent the Company in carrying out the duties referred to in points 1 and 2 above.*

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI TAHUN 2021

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2021

Selama tahun 2021, Direksi telah melaksanakan tugas pengurusan PT PLN Enjiniring sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar, antara lain:

1. Penyusunan perencanaan perusahaan, antara lain RKAP Tahun 2021.
2. Pemenuhan target kinerja perusahaan.
3. Pelaksanaan *Cost Revenue Management Program* (CRMP).
4. Penjajakan *Partnership* dengan investor *reputable* dalam pengembangan energi terbarukan.
5. Sistem penilaian kinerja Direksi secara Individu/ Direktorat dan Kolegial.
6. KKG, KKO, Kajian Risiko dan Mitigasinya untuk *project* yang didanai oleh SHL.
7. *Compliance* terhadap *covenant* obligasi
8. Penyelenggaraan rapat Direksi, menghadiri rapat Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham;
9. Pengawasan dan perbaikan proses bisnis internal; serta
10. Pelaksanaan tugas lainnya terkait kepengurusan perusahaan.

During 2021, the Board of Directors has carried out the duties of managing PT PLN Enjiniring in accordance with the applicable laws and regulations and the Articles of Association, including:

1. *Preparation of company plans, including the 2021 RKAP.*
2. *Fulfillment of company performance targets.*
3. *Implementation of Cost Revenue Management Program (CRMP).*
4. *Scoping partnerships with reputable investors in the development of renewable energy.*
5. *Individual/Directorate and Collegial Board of Directors performance appraisal system.*
6. *KKG, KKO, Risk Assessment and Mitigation for projects funded by SHL.*
7. *Compliance with bond covenants*
8. *Organizing meetings of the Board of Directors, attending meetings of the Board of Commissioners and General Meeting of Shareholders;*
9. *Supervision and improvement of internal business processes; as well as*
10. *Implementation of other duties related to the management of the company.*

RAPAT DIREKSI

Pelaksanaan rapat Direksi PLN Enjiniring diselenggarakan minimal sekali dalam seminggu. Rapat Direksi tersebut dapat berupa rapat internal Direksi, maupun rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi.

BOARD OF DIRECTORS MEETING

The PLN Enjiniring Board of Directors meeting is held at least once a week. The Board of Directors meeting can be in the form of an internal meeting of the Board of Directors, or a joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI

FREQUENCY AND ATTENDANCE OF BOARD OF DIRECTORS' MEETINGS

TABEL FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI

TABLE OF FREQUENCY AND ATTENDANCE OF BOARD OF DIRECTORS' MEETINGS

No	Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris		
			<i>Board of Directors' Meeting</i>			<i>Joint Meeting of Board of Directors and Board of Commissioners</i>		
			Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat	Persentase Tingkat Kehadiran	Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat	Persentase Tingkat Kehadiran
			<i>Number of Meetings</i>	<i>Frequency of Meetings</i>	<i>Percentage of Attendance rate</i>	<i>Number of Meetings</i>	<i>Frequency of Meetings</i>	<i>Percentage of Attendance rate</i>
1	Didik Sudarmadi	Direktur Utama	26	25	96%	13	11	85%
	<i>Didik Sudarmadi</i>	<i>President Director</i>	26	25	96%	13	11	85%
2	Martono	Direktur Keuangan dan SDM	26	25	96%	13	11	85%
	<i>Martono</i>	<i>Director of Finance and HR</i>	26	25	96%	13	11	85%
3	Bernadus Sudarmanta	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha	26	25	96%	13	11	85%
	<i>Bernadus Sudarmanta</i>	<i>Director of Marketing and Business Development</i>	26	25	96%	13	11	85%
4	Muhamad Reza	Direktur Enjiniring	26	7	27%	13	5	38%
	<i>Muhamad Reza</i>	<i>Director of Engineering</i>	26	7	27%	13	5	38%

AGENDA, TANGGAL DAN PERSIAPAN RAPAT INTERNAL DIREKSI

AGENDA, DATE AND PREPARATION FOR INTERNAL MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS

Sepanjang tahun 2021, agenda, tanggal dan peserta Rapat Internal Direksi adalah sebagai berikut.

Throughout 2021, the agenda, dates and participants of the Internal Meeting of the Board of Directors are as follows.

TABEL AGENDA, TANGGAL DAN PESERTA RAPAT INTERNAL DIREKSI

THE AGENDA, DATE AND PARTICIPANTS OF INTERNAL DIRECTORS' MEETINGS

No	Tanggal Rapat <i>Date of Meeting</i>	Agenda Rapat <i>Meeting Agenda</i>	Peserta Rapat <i>Meeting Participants</i>
1	18 Januari 2021	1. Pemaparan Kajian Financial and Legal Advisor dalam Rangka Evaluasi dan Rekomendasi Terkait Permasalahan dan Solusi PT CPSI	1. Hernadi Buhron 2. Ultrisza Mednawarman 3. Yanuar Hakim 4. Alfi Zamzami

	January 18, 2021	1. Presentation of Financial and Legal Advisor Studies in the Context of Evaluation and Recommendations Regarding PT CPSI's Problems and Solutions	
2	09 Februari 2021	1. Pembahasan Peningkatan Modal PT EPE dan PT MPE 2. Persiapan Rapat Dekom - Direksi	1. Didik Sudarmadi 2. Martono 3. Bernadus Sudarmanta
	February 09, 2021	1. Discussion on Capital Increase of PT EPE and PT MPE 2. Preparation for Board of Directors Meetings	
3	01 Maret 2021 March 01, 2021	1. Pemaparan Permohonan SHL PT Prima Power Nusantara 1. Presentation of PT Prima Power Nusantara's SHL Application	1. Didik Sudarmadi 2. Martono 3. Bernadus Sudarmanta
4	03 Maret 2021	1. Program Pengenalan Direksi 2. Review Anak Perusahaan dan Afiliasi Tahap I (Pembahasan CPSI dan Action Plan)	1. Didik Sudarmadi 2. Martono
	March 03, 2021	1. Board of Directors Introductory Program 2. Review Anak Perusahaan dan Afiliasi Tahap I (Pembahasan CPSI dan Action Plan)	
5	10 Maret 2021 March 10, 2021	1. Rencana Anggaran Kerja Perusahaan 2021 1. 2021 Company Work Budget Plan	1. Didik Sudarmadi 2. Martono 3. Bernadus Sudarmanta
6	14 Maret 2021 March 14, 2021	1. Pembahasan Recovery Plan PT CPSI 1. Discussion of PT CPSI's Recovery Plan	1. Didik Sudarmadi 2. Martono 3. Bernadus Sudarmanta
7	17 Maret 2021	1. Paparan Bidang SDM & Umum 2. Profil Risiko Korporat	1. Didik Sudarmadi 2. Martono 3. Bernadus Sudarmanta
	March 17, 2021	1. Human Resources & General Exposure 2. Corporate Risk Profile	
8	24 Maret 2021	1. Update RKAP 2021 dan Rencana Kerja Direksi 2. Program Pencapaian Pendapatan dan Beban Biaya di TW I - 2021 3. Laporan Pencapaian KPI s.d TW I - 2021 4. Tindak Lanjut Pembahasan Strategi & Usulan Pengembangan Bisnis CPSI	1. Didik Sudarmadi 2. Martono 3. Bernadus Sudarmanta
	March 24, 2021	1. Update RKAP 2021 and Work Plan of the Board of Directors 2. Program for Achievement of Income and Costs in Q1 - 2021 3. KPI Achievement Report up to Q1 I - 2021 4. Follow-up to CPSI's Strategy & Business Development Proposal Discussion	

9	14 April 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut Rapat Sebelum nya 2. Persiapan Pelaksanaan General Meeting Shareholder dengan CGS terkait Situasi CPSI dan Paparan Kajian Hukum oleh Konsultan Hukum 3. Persiapan PLNE agar Mendapat Penunjukan dari PLN Terkait Penugasan Layanan Fasilitas Ekstra serta Proses Pemilihan Mitra Fasilitas Ekstra 4. Persiapan PLNE sebagai Engineering Center 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didik Sudarmadi 2. Martono 3. Bernadus Sudarmanta
	April 14, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Follow up on the previous meeting 2. Preparation for the General Meeting of Shareholders with CGS regarding the CPSI Situation and Exposure to Legal Studies by Legal Consultants 3. PLNE Preparation to Get Appointment from PLN Regarding the Assignment of Extra Facilities Services and the Process for Selection of Extra Facilities Partners 4. PLNE Preparation as Engineering Center 	
10	28 April 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut Pembahasan Strategi & Usulan Pengembangan Bisnis PT CPSI 2. Laporan Manajemen s.d TW I - 2021 3. Peta SDM PT PLNE 4. Rencana Tindak Lanjut Arahan RUPS RKAP 2021 5. Updating Program Kerja SPMR Tahun 2021 6. Peta Tingkat Risiko PT PLNE TW I - 2021 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didik Sudarmadi 2. Martono 3. Bernadus Sudarmanta
	April 28, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Follow-up to the Discussion of PT CPSI's Strategy & Business Development Proposal 2. Management Report up to Q1 I - 2021 3. PT PLNE HR Map 4. Plan for Follow-up on the Directives of the 2021 RKAP GMS 5. Updating Program Kerja SPMR Tahun 2021 6. PT PLNE TW I Risk Level Map - 2021 	
11	05 Mei 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi RJPP PLNE 2020 - 2024 2. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didik Sudarmadi 2. Martono 3. Bernadus Sudarmanta
	May 05, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Socialization of RJPP PLNE 2020 - 2024 2. Other things that need attention 	
12	28 Mei 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Draft Materi RUPS LPT PLNE Tahun Buku 2020 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didik Sudarmadi 2. Martono 3. Bernadus Sudarmanta
	May 28 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on Draft Material for LPT PLNE GMS for Financial Year 2020 	



13	22 Juni 2021	<ol style="list-style-type: none"> Persiapan RUPS LPT Tahun 2020 Tindak Lanjut Aksi Korporasi PT CPSI Implementasi Program Roadmap SDM Tahun 2021 Revisi RKAP Tahun 2021 Target Pemasaran Tahun 2021 dan Rencana Diversifikasi Produk 	<ol style="list-style-type: none"> Didik Sudarmadi Martono Bernadus Sudarmanta
	June 22, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Preparation for the 2020 LPT GMS Follow-up to PT CPSI's Corporate Action Implementation of the 2021 HR Roadmap Program Revised RKAP 2021 2021 Marketing Target and Product Diversification Plan 	
14	09 Juli 2021	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Usulan RKAP Tahun 2022 	<ol style="list-style-type: none"> Didik Sudarmadi Martono Bernadus Sudarmanta
	July 09, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Discussion on the Proposed RKAP for 2022 	
15	28 Juli 2021	<ol style="list-style-type: none"> Kinerja Perusahaan s.d TW II Tahun 2021 Penjelasan Revisi RKAP 2021 Penjelasan Program & Roadmap Pengembangan SDM Penjelasan Rencana Model Bisnis Perseroan termasuk Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi Perseroan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Lain-lain 	<ol style="list-style-type: none"> Didik Sudarmadi Martono Bernadus Sudarmanta
	July 28, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Company Performance up to Q2 2021 Explanation of Revised RKAP 2021 Explanation of HR Development Program & Roadmap Explanation of the Company's Business Model Plan, including the Company's Subsidiaries and Affiliated Companies Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Others 	
16	25 Agustus 2021	<ol style="list-style-type: none"> Program Pencapaian Target Pendapatan Enjiniring Tahun 2021 Laporan Kondisi Keuangan PT PPN Semester I - 2021 Penyampaian Evident Indikator KPI SDM Tahun 2021 Program Kerja Pencapaian Maturity Level ERM Tahun 2021 Program Pelaksanaan OFI Risk Maturity Assessment Semester I - 2021 Kebijakan, Strategi, dan Program Integrasi Manajemen Risiko dengan Proses Bisnis Perseroan 	<ol style="list-style-type: none"> Didik Sudarmadi Martono Bernadus Sudarmanta

	August 25, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2021 Engineering Revenue Target Achievement Program 2. PT PPN Financial Condition Report Semester I - 2021 3. Submission of Evidence for HR KPI Indicators in 2021 4. ERM Maturity Level Achievement Work Program in 2021 5. OFI Risk Maturity Assessment Implementation Program Semester I - 2021 6. Policies, Strategies, and Programs for Integration of Risk Management with the Company's Business Processes 	
17	08 September 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Laporan Progress Implementasi Quick Win Transformasi Portfolio PLN Group Inisiatif A07, A15, dan A16 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didik Sudarmadi 2. Martono 3. Bernadus Sudarmanta
	September 08, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Submission of Progress Reports on Implementation of Quick Win Portfolio Transformation of PLN Group Initiatives A07, A15, and A16 	
18	16 September 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan Terkait Kajian hasil Review Tim Portfolio atas Permohonan Perpanjangan Masa Pinjaman SHL PT PPN Tahun 2021 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didik Sudarmadi 2. Martono 3. Bernadus Sudarmanta
	September 16, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reporting Related to the Study on the results of the Portfolio Team Review on the Application for Extension of the SHL PT PPN 2021 Loan Period 	
19	21 September 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Rapat Dekom - Direksi : Pembahasan Strategi Mempertahankan Sustainability serta Meningkatkan Kinerja Perseroan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didik Sudarmadi 2. Martono 3. Bernadus Sudarmanta
	September 21, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preparation of the Board of Commissioners - Board of Directors Meeting : Discussion of Strategies to Maintain Sustainability and Improve Company Performance 	
20	22 September 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal SMT Tahun 2021 2. Tindak Lanjut dan Progress Tindak Lanjut Audit Internal SMT Tahun 2021 3. Hasil Survey Kepuasan Pelanggan, Penanganan Keluhan dan Monitoring, Laporan Umpan Balik 4. Kinerja Proses : Laporan QA/QC, OTD, EFPY, dan Produktivitas Supervisi Konstruksi 5. Tindak Lanjut Rapat Tinjauan Manajemen Tahun 2020 dan Progresnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didik Sudarmadi 2. Martono 3. Bernadus Sudarmanta 4. Muhamad Reza



	September 22, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMT Internal Audit Report 2021 2. Follow-up and Progress of SMT Internal Audit Follow-up in 2021 3. Customer Satisfaction Survey Results, Complaint Handling and Monitoring, Feedback Report 4. Process Performance: QA/QC, OTD, EFPY, and Construction Supervision Productivity Reports 5. Follow-up to the 2020 Management Review Meeting and its Progress 	
21	21 Oktober 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Pinjaman Jangka Pendek untuk Operasional Proyek PT PPN (Proyek Infrastruktur BMPP Nusantara I Ambon) 2. Rapat Koordinasi Direksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didik Sudarmadi 2. Martono 3. Bernadus Sudarmanta 4. Muhamad Reza
	October 21, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Application for Short-Term Loans for PT PPN Project Operations (BMPP Nusantara I Ambon Infrastructure Project) 2. Board of Directors Coordination Meeting 	
22	26 Oktober 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Progress CPSI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didik Sudarmadi 2. Martono
	October 26, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. CPSI Progress Report 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Bernadus Sudarmanta 4. Muhamad Reza
23	27 Oktober 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Gap Draft Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Kajian Transformasi Bisnis PT CPSI dalam Rangka Going Concern Terkait Permasalahan dan Solusi PT CPSI 2. Rapat Koordinasi Direksi <ol style="list-style-type: none"> a. Pembahasan Pending Items b. Pembahasan Progress RKAP 2022 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didik Sudarmadi 2. Martono 3. Bernadus Sudarmanta 4. Muhamad Reza
	October 27, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on the Gap in the Draft Contract for the Procurement of Consultancy Services for the Study of PT CPSI's Business Transformation in the Context of Going Concern Regarding PT CPSI's Problems and Solutions 2. Board of Directors Coordination Meeting <ol style="list-style-type: none"> a. Discussion of Pending Items b. Discussion on RKAP 2022 Progress 	
24	12 November 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan Draft Hasil Kajian Bisnis dan Diskusi Dampak M&A oleh Konsultan LAPI ITB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didik Sudarmadi 2. Martono 3. Bernadus Sudarmanta 4. Muhamad Reza
	November 12, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 2. Presentation of the Draft Business Study Results and Discussion on the Impact of M&A by LAPI ITB Consultants 	

25	24 November 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan RKAP Tahun 2022 2. Permasalahan yang harus segera diselesaikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didik Sudarmadi 2. Martono 3. Bernadus Sudarmanta 4. Muhamad Reza
	<i>November 24, 2021</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Proposed RKAP for 2022</i> 2. <i>Problems that need to be resolved</i> 	
26	15 Desember 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Pengembangan Usaha PLNE Terkait dengan Fasilitas Pembuatan Modul kWh Meter 2. Kepuasan Pelanggan 3. QA/QC 4. Koordinasi Pending Items BOD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didik Sudarmadi 2. Martono 3. Bernadus Sudarmanta 4. Muhamad Reza
	<i>December 15, 2021</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>PLNE Business Development Plan Related to the Facility for Making the kWh Meter Module</i> 2. <i>Customer Satisfaction</i> 3. <i>QA/QC</i> 4. <i>Coordination of Pending Items BOD</i> 	

Agenda, tanggal dan peserta rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris telah dijabarkan pada bagian agenda, tanggal dan peserta rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dalam laporan tahunan ini.

The agenda, date and participants of the joint meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners have been described in the agenda, date and participants of the joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors in this annual report.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi sesuai kebutuhan.

1. Terdapat kebijakan tentang pelatihan bagi anggota Direksi sesuai kebutuhan.
2. Terdapat rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan bagi anggota Direksi.
3. Pelatihan bagi anggota Direksi direalisasikan sesuai dengan rencana kerja Dewan Komisaris.
4. Terdapat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Direksi.

Sepanjang tahun 2021, anggota Direksi Perseroan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, workshop, konferensi, seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

BOARD OF DIRECTORS' COMPETENCE DEVELOPMENT

The Board of Directors carries out training programs in order to improve the competence of members of the Board of Directors as needed.

1. *There is a policy on training for members of the Board of Directors as needed.*
2. *There is a work plan and budget for training activities for members of the Board of Directors.*
3. *Training for members of the Board of Directors is realized in accordance with the work plan of the Board of Commissioners.*
4. *There is a report on the results of the training that has been undertaken by members of the Board of Directors.*

Throughout 2021, members of the Company's Board of Directors have participated in various competency improvement programs in the form of training, workshops, conferences, seminars, as shown in the following table:

TABEL PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

TABLE OF DIRECTORS COMPETENCY DEVELOPMENT

Direksi <i>Board of Directors</i>	Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan <i>Competency/Training Development Materials</i>	Waktu Pelaksanaan <i>Execution Time</i>		Jenis Pelatihan dan Penyelenggara <i>Types of Training and Organizers</i>
		Start	Finished	
Didik Sudarmadi	GCG	03 November 2021	03 November 2021	DPS Consulting
<i>Didik Sudarmadi</i>	<i>GCG</i>	<i>November 03, 2021</i>	<i>November 03, 2021</i>	<i>DPS Consulting</i>
Martono	Certified in Accounting, Finance and Business (CAFB)	29 Mei 2021	04 September 2021	IAI (PLN PUSAT)
	<i>Directorship Program - Building The Future Ready Organization</i>	<i>22 Juni 2021</i>	<i>25 Juni 2021</i>	<i>Pertamina Training & Consulting</i>
Martono	GCG	03 November 2021	03 November 2021	DPS Consulting
	Sertifikasi QRGP (Qualified Risk Governance Professional)	22 November 2021	24 November 2021	CRMS
	<i>Certified in Accounting, Finance and Business (CAFB)</i>	<i>May 29, 2021</i>	<i>September 04, 2021</i>	<i>IAI (PLN PUSAT)</i>
	<i>Directorship Program - Building The Future Ready Organization</i>	<i>June 22, 2021</i>	<i>June 25, 2021</i>	<i>Pertamina Training & Consulting</i>
	GCG	November 03, 2021	November 03, 2021	DPS Consulting
	<i>QRGP (Qualified Risk Governance Professional) Certification</i>	<i>November 22, 2021</i>	<i>November 24, 2021</i>	<i>CRMS</i>
Bernadus Sudarmanta	GCG	03 November 2021	03 November 2021	DPS Consulting
	Sertifikasi QRGP (Qualified Risk Governance Professional)	22 November 2021	24 November 2021	CRMS
<i>Bernadus Sudarmanta</i>	<i>GCG</i>	<i>November 03, 2021</i>	<i>November 03, 2021</i>	<i>DPS Consulting</i>
	<i>QRGP (Qualified Risk Governance Professional) Certification</i>	<i>November 22, 2021</i>	<i>November 24, 2021</i>	<i>CRMS</i>
Muhammad Reza	Sertifikasi QRGP (Qualified Risk Governance Professional)	22 November 2021	24 November 2021	CRMS

	GCG	03 November 2021	03 November 2021	DPS Consulting
Muhammad Reza	QRGP (Qualified Risk Governance Professional) Certification	November 22, 2021	November 24, 2021	CRMS
	GCG	November 03, 2021	November 03, 2021	DPS Consulting

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Direksi telah berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan pencapaian kerjanya. Untuk mendukung hal tersebut, telah dilakukan penilaian kinerja Direksi melalui *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris dan pelaksanaan *Assessment GCG*.

- PENILAIAN KINERJA DIREKSI BERDASARKAN KPI**

Penilaian kinerja Direksi melalui *Key Performance Indicator* (KPI) tahun 2021 yang telah disahkan oleh Pemegang Saham melalui Kontrak Manajemen tanggal 28 Januari 2021.

- PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI**

Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui mekanisme RUPS Tahunan. Keputusan RUPS Tahunan sudah diuraikan dalam bagian RUPS dalam laporan ini.

- KRITERIA PENILAIAN KINERJA DIREKSI**

Adapun kriteria penilaian berdasarkan KPI yang telah ditetapkan dalam RUPS melalui kontrak manajemen adalah sebagai berikut.

1. Fokus Pelanggan
2. Efektifitas Produk dan Proses
3. Fokus Tenaga Kerja
4. Keuangan dan Pasar
5. Kepemimpinan, Tata kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan

BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENT

The Board of Directors has committed to continuously improve its performance achievement. To support this, the Board of Directors' performance assessment has been carried out through the Board of Commissioners' Key Performance Indicators (KPI) and the implementation of the GCG Assessment.

- PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS BASED ON KPI**

Performance appraisal of the Board of Directors through the 2021 Key Performance Indicator (KPI) which has been approved by the Shareholders through the Management Contract on January 28, 2021.

- PROCEDURE FOR THE PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS**

The procedure for implementing the performance appraisal of the Board of Directors is carried out through the mechanism of the Annual GMS. The resolutions of the Annual GMS have been described in the GMS section of this report.

- BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE ASSESSMENT CRITERIA**

The assessment criteria based on KPIs that have been determined in the GMS through a management contract are as follows.

1. Customer Focus
2. Product and Process Effectiveness
3. Workforce Focus
4. Finance and Markets
5. Leadership, Governance and Community Responsibility

• **PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI**

Pihak yang melakukan penilaian kinerja Direksi adalah Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kewajiban yang tercantum dalam Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat Pemegang Saham. Direksi akan mempertanggungjawabkan kinerja mereka pada periode 2021 dalam RUPS yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.

• **PARTIES THAT CONDUCT THE PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS**

The party that evaluates the performance of the Board of Directors is the Shareholders in the GMS based on the obligations contained in the applicable legislation and the Articles of Association as well as the mandate of the Shareholders. The Board of Directors will account for their performance in the 2021 period at the GMS which will be held in 2022.

• **HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI**

Hasil penilaian kinerja Direksi berdasarkan KPI pada tahun 2021, sebagai berikut ;

• **BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENT RESULTS**

The results of the Board of Directors' performance assessment based on KPI in 2021, are as follows;

TABEL HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN DIREKSI
TABLE OF RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTOR PERFORMANCE ASSESSMENT

No	Indikator / Indicator	Bobot / Weight	Nilai / Score
1	Fokus Pelanggan Customer Focus	8	7.70
2	Efektifitas Produk dan Proses Effectiveness of Products and Processes	32	33.50
3	Fokus Tenaga Kerja HR	12	12.20
4	Keuangan dan Pasar Finance and Markets	39	38.85
5	Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Masyarakat Leadership, governance and social responsibility	9	9.39
TOTAL		100	101.64

Hasil penilaian kinerja Direksi berdasarkan KPI digolongkan dalam kondisi "SEHAT" kategori "AAA" dengan nilai **101.64**

The results of the Board of Directors' performance assessment based on KPI are classified as "HEALTH" in the "AAA" category with a score of **101.64**.

• **PENILAIAN KINERJA DIREKSI BERDASARKAN ASSESSMENT GCG**

Direksi berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan pencapaian kerjanya. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan penilaian kinerja Direksi melalui pelaksanaan Assessment GCG.

• **PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS BASED ON GCG ASSESSMENT**

The Board of Directors is committed to continuously improving its performance achievements. To support this, an assessment of the performance of the Board of Directors is carried out through the implementation of the GCG Assessment.

- **PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI**

Prosedur pelaksanaan Pelaksanaan Assessment GCG terkait Kinerja Direksi adalah, sebagai berikut.

1. PLN Enjiniring menugaskan tim assessment Perseroan dalam melaksanakan Assessment GCG.
2. Tim Assessment GCG mengkoordinir seluruh unit kerja terkait, termasuk berkoordinasi dengan Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan Assessment GCG
3. Tim Assessment memberikan nilai komposit termasuk faktor positif dan negatif untuk disampaikan kepada Direksi dan kemudian dimintakan persetujuan Dewan Komisaris
4. Pelaksanaan Assessment GCG ini dilaksanakan secara periodik setiap tahun

- **KINERJA PENILAIAN KINERJA DIREKSI**

Kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja Direksi tersebut meliputi:

1. Pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran Direksi;
2. Pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab Direksi yang jelas;
3. Penyusunan perencanaan perusahaan;
4. Pemenuhan target kinerja perusahaan;
5. Pelaksanaan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan;
6. Pelaksanaan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar;
8. Pelaksanaan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan pemangku kepentingan;
9. Memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi;
10. Pelaksanaan keterbukaan informasi dan komunikasi, serta penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham secara tepat waktu;

- **PROCEDURE FOR THE PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS**

The procedure for implementing the GCG Assessment related to the Performance of the Board of Directors is as follows.

1. *PLN Enjiniring assigns the Company's assessment team to carry out the GCG Assessment.*
2. *The GCG Assessment Team coordinates all related work units, including coordinating with the Board of Commissioners in carrying out the GCG Assessment*
3. *The Assessment Team assigns a composite score including positive and negative factors to be submitted to the Board of Directors and then asks for approval from the Board of Commissioners*
4. *Implementation of this GCG Assessment is carried out periodically every year*

- **PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE**

The criteria used in assessing the performance of the Board of Directors include:

1. *Implementation of training/learning programs for the Board of Directors;*
2. *Clear division of duties/functions, authorities and responsibilities of the Board of Directors;*
3. *Preparation of corporate planning;*
4. *Fulfillment of company performance targets;*
5. *Implementation of operational and financial controls on the implementation of plans and company policy;*
7. *Implementation of company management in accordance with applicable laws and regulations and the Articles of Association;*
8. *Implementation of value-added relationships for the company and stakeholders;*
9. *Monitor and manage potential conflicts of interest of members of the Board of Directors and management under the Board of Directors;*
10. *Implementation of information disclosure and communication, as well as timely delivery of information to the Board of Commissioners and Shareholders;*

11. Penyelenggaraan rapat Direksi dan kehadiran pada rapat Dewan Komisaris;
12. Penyelenggaraan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif;
13. Penyelenggaraan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif;
14. Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

- **PIHAK YANG MELAKSANAKAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI**

Pihak yang melakukan Penilaian Kinerja Direksi terdiri dari Tim Assessment PLN Enjiniring yang diketuai oleh Sekretaris Perusahaan.

- **HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI**

Pada tahun 2021, hasil penilaian kinerja Direksi mencapai skor **31.889** dengan capaian **91.11** dan predikat Sangat Baik.

- **KEBIJAKAN REMUNERASI DIREKSI**

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi mendapat sejumlah remunerasi dan fasilitas lainnya. Kebijakan pemberian remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Direksi didasarkan pada pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham.

- **PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI**

Anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota Direksi juga dapat diberikan fasilitas yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak boleh bertentangan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

11. Organizing meetings of the Board of Directors and attendance at meetings of the Board of Commissioners;
12. Implementation of quality and effective internal control;
13. Quality and effective implementation of the function of the Corporate Secretary;
14. The holding of the Annual GMS and other GMS in accordance with the laws and regulations.

- **PARTIES PERFORMING THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE ASSESSMENT**

The party conducting the Board of Directors Performance Assessment consists of the PLN Enjiniring Assessment Team which is chaired by the Corporate Secretary.

- **BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE ASSESSMENT RESULTS**

In 2021, the results of the Board of Directors' performance assessment reached a score of 31,889 with an achievement of 91.11 and a very good predicate.

- **BOARD OF DIRECTORS' REMUNERATION POLICY**

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors receives a number of remuneration and other facilities. The policy for providing remuneration and other facilities for the Board of Directors is based on Article 6 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Decree of the Board of Directors of PT PLN (Persero) as the Shareholder's Proxy.

- **PROCEDURE FOR DETERMINING THE REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Members of the Board of Directors are given salaries and allowances/facilities including post-employment benefits, the type and amount of which is determined by the General Meeting of Shareholders with due observance of the provisions of the laws and regulations. Members of the Board of Directors may also be provided with facilities that are adjusted to the Company's financial conditions and capabilities and must not conflict with the laws and regulations and may not conflict with the decisions of the General Meeting of Shareholders.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

ORGANS AND COMMITTEES BELOW THE BOARD OF DIRECTORS

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibantu oleh Organ Perusahaan. Perusahaan tidak memiliki Komite yang berada di bawah Direksi.

• SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan sebagai organ pendukung dalam struktur organ tata kelola Perusahaan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, Sekretaris Perusahaan berperan dalam memfasilitasi komunikasi antara organ Perusahaan, bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan, perencanaan serta memastikan efektivitas dan transparansi komunikasi perusahaan, hubungan kelembagaan, hubungan investor dengan tetap memperhatikan prinsip standar etika Perusahaan, prinsip tata kelola Perusahaan, dan nilai-nilai Perusahaan.

• PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pada tahun 2021, fungsi Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Fajar Suroyo sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor : 12.001.K/S11/DIR/PLNE/VIII/2021 tentang Mutasi Jabatan.

Profil Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut.

Warga Negara Indonesia, lahir pada April 1968. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak September 2021. Sebelumnya pernah menjabat sebagai PLT General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan (2018-2020) dan PLT Manajer UPK Kalimantan Barat PT PLN (Persero) Regional Kalimantan Indonesia Bagian Tengah. Menyelesaikan Pendidikan S1 Teknik Sipil dari Universitas Diponegoro Semarang, S2 Bidang Manajemen Bisnis Administration dari Universiti Tenaga Nasional Malaysia dan S3 Universitas Padjadjaran DMB UNPAD Bandung.

• STRUKTUR SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dalam menjalankan fungsinya, Sekretaris Perusahaan PLN Enjiniring didukung oleh beberapa unit kerja. Unit kerja pendukung fungsi Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN Enjiniring

In carrying out their duties, the Board of Directors is assisted by Company Organs. The company does not have a Committee that is under the Board of Directors.

• CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary as a supporting organ in the corporate governance structure has an important role in ensuring that the company complies with the regulations regarding disclosure requirements in line with the principles of good corporate governance. In addition, the Corporate Secretary plays a role in facilitating communication between the Company's organs, responsible for formulating policies, planning and ensuring the effectiveness and transparency of corporate communications, institutional relations, investor relations while still paying attention to the principles of the Company's ethical standards, principles of corporate governance, and values. Company.

• CORPORATE SECRETARY PROFILE

In 2021, the function of the Corporate Secretary was held by Fajar Suroyo based on Directors Decree number 12.001.K / S11 / DIR / PLNE / VIII / 2021 concerning Position Transfer.

Profile of the Corporate Secretary is as follows.

Indonesian citizen, born in April 1968. He has been serving as Corporate Secretary since September 2021. Previously, he served as PLT General Manager of PT PLN (Persero) Southern Sumatra Development Main Unit (2018-2020) and PLT Manager of West Kalimantan UPK PT PLN (Persero) Regional Central Kalimantan Indonesia. Completed Bachelor Degree in Civil Engineering from Diponegoro University Semarang, Master Degree in Business Administration Management from Universiti Tenaga Nasional Malaysia and Doctoral Degree from Padjadjaran University DMB UNPAD Bandung.

• STRUCTURE OF CORPORATE SECRETARY

In carrying out its functions, the Corporate Secretary of PLN Enjiniring is supported by several work units. The work unit supporting the function of the Corporate Secretary based on the Decree of the Directors of PT

Nomor: 01.004.K/DIR/PLNE/XI/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Jabatan PT PLN Enjiniring.

PLN Enjiniring Number: 01.004.K / DIR / PLNE / XI / 2021 dated November 01, 2021 concerning Organizational Structure and Main Duties of PT PLN Enjiniring.



• **TANGGUNG JAWAB DAN TUGAS POKOK SEKRETARIS PERUSAHAAN**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tentang Struktur Organisasi PLN Enjiniring, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagai berikut.

- a. Memastikan terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengelolaan kesekretariatan Perusahaan, termasuk didalamnya pengelolaan rapat, keadministrasian, fasilitas dan keprotokolan Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. Memastikan terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengelolaan tata Kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), memastikan Perusahaan memiliki peangkat dan pedoman GCG serta melakukan pemantauan dan implementasi GCG;
- c. Mengelola hubungan kemasyarakatan dan kelembagaan dalam dan luar negeri antara lain institusi/Lembaga negara, dewan perwakilan rakyat, pemerintah daerah/pusat, dan kedutaan besar;
- d. Mengelola perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi data operasional dan laporan Perusahaan, termasuk di dalamnya Laporan Manajemen (LM), laporan tahunan/Annual Report (AR), dan laporan Perusahaan lainnya yang diperlukan oleh pemangku kepentingan;
- e. Mengelola perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sebagai fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan keterbukaan informasi publik;

• **DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF CORPORATE SECRETARY**

Based on the Decree of the Board of Directors regarding the PLN Enjiniring Structure, the duties and responsibilities of the Corporate Secretary are as follows.

- a. Ensuring the planning, implementation and evaluation of the Company's secretarial management policies, including meeting management, administration, facilities and protocols for the Board of Directors and the Board of Commissioners;
- b. Ensuring the implementation of planning, implementation and evaluation of Good Corporate Governance management policies, ensuring that the Company has GCG standards and guidelines as well as monitoring and implementing GCG;
- c. Manage community relations and domestic and foreign institutions, including state institutions/ agencies, people's representative councils, regional/ central governments, and embassies;
- d. Manage the planning, implementation and evaluation of operational data and Company reports, including Management Reports (LM), Annual Reports (AR), and other Company reports required by stakeholders;
- e. Manage planning, implementation and evaluation as functions of information and documentation management officials in accordance with the needs of public information disclosure;

- f. Memastikan terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan program strategis Perusahaan, termasuk di dalamnya mengelola program KPKU (Kriteria Penilaian Kinerja Unggul) BUMN;
 - g. Memastikan terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dalam pengelolaan program Corporate Social Responsibilities (CSR) sesuai dengan strategi Perusahaan;
 - h. Memastikan terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan strategi Perusahaan dalam fungsi pelayanan hukum atas perjanjian-perjanjian Perusahaan termasuk di dalamnya mensupervisi pembuatan kontrak, memberikan pendapat hukum atas kontrak, dan untuk penyelesaian masalah kontrak serta operasional di seluruh Bidang dan Satuan;
 - i. Memberikan masukan untuk penyusunan peraturan perundangan, mengelola hubungan dengan Lembaga hukum atau pembuatan kebijakan hukum serta melakukan pendokumentasian atas produk hukum Perusahaan;
 - j. Memastikan terlaksananya pengelolaan proses bisnis berbasis risiko, kepatuhan, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) secara berkelanjutan termasuk merencanakan dan menindaklanjuti mitigasi risiko terkait program yang menjadi kewenangannya pada Sekretariat Perusahaan;
 - k. Memastikan dan bertanggung jawab terhadap manajemen sumber daya manusia pada Sekretariat Perusahaan yang berupa optimasi pengelolaan Formasi Tenaga Kerja (FTK) pengembangan kompetensi Pegawai dan pelaksanaan kegiatan Knowledge Management (KM);
 - l. Memastikan penggunaan aplikasi di lingkungan PT PLN Enjiniring, antara lain : Knowledge Management System (KMS), Dokumen Manajemen (DM), RICO, Inteling, Erbas, Virtual Cubicle (VC), Sunfish, Aplikasi Manajemen Surat (AMS), dan Business One, secara optimal dan selaras dengan bidang atau fungsinya, dalam rangka pengelolaan data dan informasi beserta pemutakhirannya, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas.
- f. *Ensuring the implementation of planning, implementation and evaluation of the management of the Company's strategic programs, including managing the KPKU (Excellent Performance Assessment Criteria) SOE program;*
 - g. *Ensure the implementation of planning, implementation and evaluation of policies in the management of the Corporate Social Responsibilities (CSR) program in accordance with the Company's strategy;*
 - h. *Ensuring the implementation of the planning, implementation and evaluation of the Company's policies and strategies in the legal service function of the Company's agreements, including supervising the making of contracts, providing legal opinions on contracts, and for resolving contractual and operational problems in all fields and units;*
 - i. *Provide input for drafting laws and regulations, managing relationships with legal institutions or making legal policies and documenting the Company's legal products;*
 - j. *Ensuring the implementation of risk-based business process management, compliance, and the principles of good corporate governance in a sustainable manner including planning and following up on risk mitigation related to programs under the authority of the Corporate Secretariat;*
 - k. *Ensure and be responsible for human resource management at the Corporate Secretariat in the form of optimizing the management of the Manpower Formation (FTK), developing employee competencies and implementing Knowledge Management (KM) activities;*
 - l. *Ensure the use of applications within PT PLN Enjiniring, including: Knowledge Management System (KMS), Document Management (DM), RICO, Inteling, Erbas, Virtual Cubicle (VC), Sunfish, Mail Management Application (AMS), and Business One, optimally and in line with its field or function, in the context of managing data and information and updating it, as well as supporting a quality decision-making process.*

• **PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2021**

Sebagai wujud akuntabilitas atas pelaksanaan fungsi dan program kerja yang ditetapkan, Sekretaris Perusahaan telah menyusun dan menyampaikan laporan dalam bentuk Laporan Sekretaris Perusahaan 2021 sesuai dengan pembagian sub-bidang dalam struktur organisasi meliputi:

1. Sub-bidang Kinerja dan Komunikasi
 - a. Melaksanakan Rapat Direksi, yang selama tahun 2021 telah terselenggara sebanyak 26 (dua puluh enam) kali;
 - b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris - Direksi yang selama tahun 2021 telah terselenggara sebanyak 9 (Sembilan) kali;
 - c. Pelaksanaan RUPS Tahunan Perusahaan tahun 2021 yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu RUPS Pengesahan RKAP 2021 pada 28 Januari 2021 dan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 pada tanggal 30 Juni 2021;
 - d. Melakukan Self Assessment Good Corporate Governance (GCG) Tahun Buku 2021 ;
 - e. Melakukan Monitoring atas tindak lanjut keputusan RUPS Tahun 2020 dan 2021;
 - f. Melaksanakan Rapat Kerja tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2021;
 - g. Menyusun Laporan Manajemen Perusahaan yang diterbitkan dan disampaikan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris;
 - h. Menyusun Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 (*Annual Report*) yang telah didistribusikan kepada *stakeholder* PLN Enjiniring dan diunggah di *website* PLN Enjiniring;
 - i. Memberikan pelayanan data dan informasi kepada para pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan yaitu Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi serta pihak ketiga lainnya;
 - j. Melaksanakan program komunikasi perusahaan melalui pengelolaan media sosial PLN Enjiniring berupa Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Pengelolaan Website dan Majalah Korporat Perusahaan;

• **DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF CORPORATE SECRETARY IN 2021**

As a manifestation of accountability for the implementation of the specified functions and work programs, the Corporate Secretary has compiled and submitted a report in the form of the 2021 Corporate Secretary Report based on the task sub-division in the organizational structure including:

1. *Performance and Communication Sub-Division*
 - a. *Conducting Board of Director Meeting, which in 2021 have been held 26 (twenty-six) times;*
 - b. *Coordinator the Board of Commissioner - Director Meeting, which in 2021 have been held 9 (nine) times;*
 - c. *Implementation of the Company's Annual General Meeting of Shareholder which in 2021 was held 2 (two)times, namely GMS 2021 concerning APBD's Approval on January 28,2021 and the Annual General Meeting of Financial Statements Approval and Ratification of the 2020 Financial Statements on June 30,2021;*
 - d. *Conducting a GCG self-assessment in 2021;*
 - e. *Monitoring the follow-up to the resolutions of GMS 2020 and 2021;*
 - f. *Organizing a Work Meeting in 2021 on January 29, 2021;*
 - g. *Preparing Corporate Management Reports publised and submitted to the Shareholders and the Board of Commisioners.*
 - h. *Preparing the 2021 Annual Report which have been distributed to PLN Enjiniring stakeholder and have been uploaded on PLN Enjiniring website;*
 - i. *Providing data and information services to all parties interested in company namely Shareholders, Board of Commissioners, Directors and other third parties;*
 - j. *Implement corporate communication programs through PLN Enjiniring social media management in the form of Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Website Management and Corporate Magazines;*

- k. Melaksanakan Kegiatan Protokoler Perusahaan;
 - l. Pelaksanaan Program CSR Perusahaan.
2. Sub-bidang Hukum
 - a. Memberikan pendampingan hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi;
 - b. Melakukan analisa hukum atas permasalahan hukum perseroan;
 - c. Membuat kajian hukum;
 - d. Melakukan review terhadap seluruh produk hukum perseroan;
 - e. Mengevaluasi, mengelola dan memantau ketaatan perusahaan terhadap regulasi dan peraturan perundang-undangan;
 - f. Memberikan pendampingan hukum;
 - g. Kepengurusan Perizinan Perusahaan.
 3. Sub-bidang Teknologi dan Informasi
 - a. Mengelola sistem teknologi dan informasi;
 - b. Membangun sistem kerja berbasis aplikasi;
 - c. Pelaksanaan IT Master Plan;
 - d. Mengelola kesediaan layanan IT untuk kebutuhan perusahaan.

• **PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI BIDANG SEKRETARIS PERUSAHAAN**

Selama tahun 2021, Bidang Sekretaris Perusahaan PLN Enjiniring mengikuti Pengembangan kompetensi sebagai berikut.

- k. Acting as a Coordinator of Corporate Protocol Activities;
 - l. Implementation as the CSR Company Program
2. Legal Sub-division
 - a. Provide legal assistance in solving legal issues both litigation and non-litigation;
 - b. Conduct a legal analysis of the company's legal issues;
 - c. Providing legal opinion;
 - d. Conduct a review of all the company's legal products;
 - e. Evaluate, manage and monitor the company's compliance with regulations and laws and regulations;
 - f. Provide legal assistance
 - g. Company Licensing Management
 3. Technology and Information Sub-division
 - a. Manage information and technology system;
 - b. Build an application-based work system;
 - c. Implementation of the IT Master Plan;
 - d. Manage the availability of IT service for company needs

• **PROGRAM FOR ENHANCING COMPETENCE SECRETARY OF THE COMPANY**

During 2021, the Corporate Secretary of PLN Enjiniring participated in the development of competencies as follows.

TABEL PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

TABLE OF CORPORATE SECRETARY COMPETENCY DEVELOPMENT

Nama	Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan	Waktu Pelaksanaan		Penyelenggara
		Start	Finished	
Name	Competency/Training Development Materials	Execution Time		Organizers
Fajar Suroyo	GCG	03 November 2021	03 November 2021	DPS Consulting
	Sertifikasi QRGP (Qualified Risk Governance Professional)	22 November 2021	24 November 2021	CRMS
Fajar Suroyo	GCG	November 03, 2021	November 03, 2021	DPS Consulting
	QRGP (Qualified Risk Governance Professional) Certification	November 22, 2021	November 24, 2021	CRMS
Titi Oktiva Dewi	Key Risk Indicator	01 September 2021	02 September 2021	WIMCONSULT
	Pengadaan Barang dan Jasa PT PLN (Persero)	18 Oktober 2021	26 Oktober 2021	PUSDIKLAT



	QRMA	02 November 2021	05 November 2021	CRMS
Titi Oktiva Dewi	Key Risk Indicator	September 01, 2021	September 02, 2021	WIMCONSULT
	Procurement of Goods and Services PT PLN (Persero)	October 18, 2021	October 26, 2021	PUSDIKLAT
	QRMA	November 02, 2021	November 05, 2021	CRMS
Luthfi Kurniawan	Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi	29 Juni 2021	29 Juni 2021	KPK
	GCG	03 November 2021	03 November 2021	DPS Consulting
	Key Risk Indicator	01 September 2021	25 Agustus 2021	WIMCONSULT
	Litigasi	23 Agustus 2021	25 Agustus 2021	PUSDIKLAT
	Manajemen Keuangan Dasar Level SA/ FIV	12 Agustus 2021	13 Agustus 2021	PUSDIKLAT
	Manajemen SDM Dasar Level SA/FIV	16 Agustus 2021	19 Agustus 2021	PUSDIKLAT
	Pengadaan Barang dan Jasa PT PLN (Persero)	18 Oktober 2021	26 Oktober 2021	PUSDIKLAT
	Supervisory Education (SE I)	20 September 2021	05 Oktober 2021	PUSDIKLAT
Luthfi Kurniawan	Gratification Control Technical Guidance	June 29, 2021	June 29, 2021	KPK
	GCG	November 03, 2021	November 03, 2021	DPS Consulting
	Key Risk Indicator	September 01, 2021	September 02, 2021	WIMCONSULT
	Litigation	August 23, 2021	August 25, 2021	PUSDIKLAT
	Basic Financial Management Level SA/ FIV	July 12, 2021	July 13, 2021	PUSDIKLAT
	Basic HR Management Level SA/FIV	July 14, 2021	July 16, 2021	PUSDIKLAT
	Procurement of Goods and Services PT PLN (Persero)	October 18, 2021	October 26, 2021	PUSDIKLAT
	Supervisory Education (SE I)	September 20, 2021	October 05, 2021	PUSDIKLAT
Ronald Bachner Lubis	Key Risk Indicator	01 September 2021	02 September 2021	WIMCONSULT
	Manajemen Keuangan Dasar Level SA/ FIV	12 Juli 2021	13 Juli 2021	PUSDIKLAT
	Manajemen SDM Dasar Level SA/FIV	14 Juli 2021	16 Juli 2021	PUSDIKLAT

	Specialist Education (SPE I)	06 Oktober 2021	18 Oktober 2021	PUSDIKLAT
Ronald Bachner Lubis	Key Risk Indicator	September 01, 2021	September 02, 2021	WIMCONSULT
	Basic Financial Management Level SA/FIV	July 12, 2021	July 13, 2021	PUSDIKLAT
	Basic HR Management Level SA/FIV	July 14, 2021	July 16, 2021	PUSDIKLAT
	Specialist Education (SPE I)	October 06, 2021	October 18, 2021	PUSDIKLAT
Laura Karina	Key Risk Indicator	18 Agustus 2021	19 Agustus 2021	WIMCONSULT
Laura Karina	Key Risk Indicator	September 01, 2021	September 02, 2021	WIMCONSULT
Fransiska Sinaga	Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi	29 Juni 2021	29 Juni 2021	KPK
	Hubungan Industrial Terapan	21 Juli 2021	28 Juli 2021	PUSDIKLAT
	Key Risk Indicator	18 Agustus 2021	19 Agustus 2021	WIMCONSULT
Fransiska Sinaga	Gratification Control Technical Guidance	June 29, 2021	June 29, 2021	KPK
	Applied Industrial Relations	July 21, 2021	July 28, 2021	PUSDIKLAT
	Key Risk Indicator	September 01, 2021	September 02, 2021	WIMCONSULT
Mohammad Gardatama Atmadibrata	Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi	29 Juni 2021	29 Juni 2021	KPK
	Pengadaan Barang dan Jasa PT PLN (Persero)	18 Oktober 2021	26 Oktober 2021	PUSDIKLAT
Mohammad Gardatama Atmadibrata	Gratification Control Technical Guidance	June 29, 2021	June 29, 2021	KPK
	Procurement of Goods and Services PT PLN (Persero)	October 18, 2021	October 26, 2021	PUSDIKLAT
Rifqi Jiyad	Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi	29 Juni 2021	29 Juni 2021	KPK
	Key Risk Indicator	01 September 2021	02 September 2021	WIMCONSULT
Rifqi Jiyad	Gratification Control Technical Guidance	June 29, 2021	June 29, 2021	KPK
	Key Risk Indicator	September 01, 2021	September 02, 2021	WIMCONSULT
Nunit Prihatoni Siregar	Key Risk Indicator	01 September 2021	02 September 2021	WIMCONSULT
	Mastering COBIT 5 - Process Assessor	13 September 2021	14 September 2021	PT ANDALAN NUSANTARA TEKNOLOGI



	Pengadaan Barang dan Jasa PT PLN (Persero)	18 Oktober 2021	26 Oktober 2021	PUSDIKLAT
Nunit Prihatoni Siregar	Key Risk Indicator	September 01, 2021	September 02, 2021	WIMCONSULT
	Mastering COBIT 5 - Process Assessor	September 13, 2021	September 14, 2021	PT ANDALAN NUSANTARA TEKNOLOGI
	Procurement of Goods and Services PT PLN (Persero)	October 18, 2021	October 26, 2021	PUSDIKLAT
Hendro Setiawan	Key Risk Indicator	01 September 2021	02 September 2021	WIMCONSULT
	Pengadaan Barang dan Jasa PT PLN (Persero)	18 Oktober 2021	26 Oktober 2021	PUSDIKLAT
Hendro Setiawan	Key Risk Indicator	September 01, 2021	September 02, 2021	WIMCONSULT
	Procurement of Goods and Services PT PLN (Persero)	October 18, 2021	October 26, 2021	PUSDIKLAT
Anang Apriyanto	Mastering COBIT 5 - Process Assessor	13 September 2021	14 September 2021	PT ANDALAN NUSANTARA TEKNOLOGI
Anang Apriyanto	Mastering COBIT 5 - Process Assessor	September 13, 2021	September 14, 2021	PT ANDALAN NUSANTARA TEKNOLOGI
Ikhsan Nur Rahman	Mastering COBIT 5 - Process Assessor	13 September 2021	14 September 2021	PT ANDALAN NUSANTARA TEKNOLOGI
Ikhsan Nur Rahman	Mastering COBIT 5 - Process Assessor	September 13, 2021	September 14, 2021	PT ANDALAN NUSANTARA TEKNOLOGI
Elizabet Lastiur Lumbantoruan	Mastering COBIT 5 - Process Assessor	13 September 2021	14 September 2021	PT ANDALAN NUSANTARA TEKNOLOGI
	Pengadaan Barang dan Jasa PT PLN (Persero)	18 Oktober 2021	26 Oktober 2021	PUSDIKLAT
Elizabet Lastiur Lumbantoruan	Mastering COBIT 5 - Process Assessor	September 13, 2021	September 14, 2021	PT ANDALAN NUSANTARA TEKNOLOGI
	Procurement of Goods and Services PT PLN (Persero)	October 18, 2021	October 26, 2021	PUSDIKLAT

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

ORGANS AND COMMITTEES BELOW THE BOARD OF DIRECTORS

• SATUAN PENGAWASAN INTERN

Satuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan unit kerja independen yang berkedudukan langsung di bawah Direktur Utama. SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

SPI memiliki landasan yang kuat dalam menjalankan fungsinya untuk memantau dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian intern di Perusahaan. SPI memiliki komitmen untuk melakukan fungsi pemantauan pengendalian intern secara efektif dan efisien, serta dapat mencapai sasaran yang ditetapkan.

• VISI SATUAN PENGAWASAN INTERN

Visi Satuan Pengawasan Intern PLN Enjiniring yaitu "To be trusted partner yang diandalkan oleh stakeholder internal audit."

• MISI SATUAN PENGAWASAN INTERN

Misi Satuan Pengawasan Intern PLN Enjiniring dijabarkan sebagai berikut.

1. Membantu Direktur Utama dalam meningkatkan pemahaman dan komitmen pimpinan Perusahaan untuk secara terus menerus mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengendalian manajemen yang efektif;
2. Menumbuhkan persamaan persepsi dalam proses pengawasan internal antara SPI (auditor dan konsultan internal) dan unit operasional untuk mendorong terwujudnya Good Corporate Government (GCG);
3. Mengembangkan kompetensi auditor dan konsultan internal dalam melaksanakan audit dan layanan konsultasi sesuai dengan IIA's International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing (Standards); dan
4. Meningkatkan efektivitas informasi hasil pengawasan SPI untuk mencegah, mendeteksi, dan mengungkapkan praktek kecurangan (fraud) di Lingkungan Perseroan.

• INTERNAL SUPERVISORY UNIT

Internal Supervisory Unit (SPI) is an independent work unit that is located directly under the President Director. SPI is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.

SPI has a strong foundation in carrying out its functions to monitor and evaluate the adequacy and effectiveness of internal control in the Company. SPI has a commitment to carry out internal control monitoring functions effectively and efficiently, and can achieve the targets set.

• VISION OF INTERNAL SUPERVISORY UNIT

The Vision of the PLN Enjiniring Internal Supervisory Unit is "To be a trusted partner that is relied on by internal audit stakeholders."

• MISSION OF INTERNAL SUPERVISORY UNIT

The mission of the PLN Enjiniring Internal Supervisory Unit is elaborated as follows.

1. *Assist the President Director of the company in enhancing the understanding and commitment of company leaders to continuously develop and implement an effective management control system.*
2. *Growing and developing common perception and cooperation between SPI (auditors and internal consultants) and operational units to encourage the realization of Good Corporate Government (GCG);*
3. *Develop the competence of internal auditors and consultants in carrying out audits and consulting services in accordance with The IIA's International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing (Standards);*
4. *Increasing the effectiveness of information on the results of SPI's supervision to prevent, detect, and disclose fraudulent practices in the corporate environment.*

• **PROFIL KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN**

Kepala Satuan Pengawasan Intern mulai dari Juli 2019 dijabat oleh Izhar Syafril berdasarkan SK Direksi No. 0057.K/SDM.03.01/DIR/2019. Profil Kepala SPI sebagai berikut:

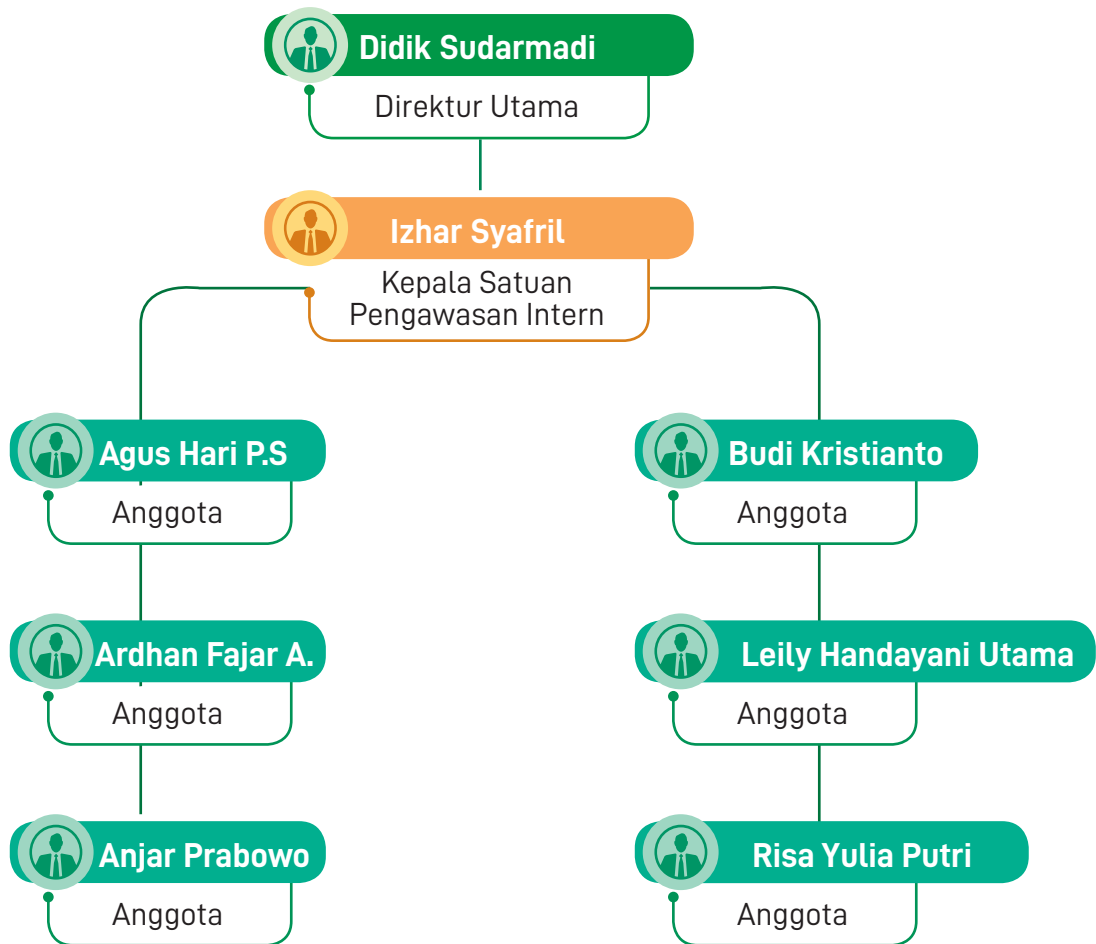
Warga Negara Indonesia, umur 52 tahun. Menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern sejak 01 Juli 2019 sebelumnya menjabat sebagai *Group Head Audit* Maluku Papua 20 pada 01 Maret 2018 menamatkan pendidikan D3 Mesin UNSRI 1990, S1 Teknik Mesin UNITAS tahun 2001.

• **PROFILE OF THE HEAD OF INTERNAL SUPERVISORY UNIT**

The Head of Internal Supervisory Unit starting from July 2019 is held by Izhar Syafril based on Directors Decree 0057.K / SDM.03.01 / DIR / 2019. The profile of the Head of SPI is as follows:

Indonesian citizen, 52 years old. Served as Head of the Internal Supervision Unit since July 01, 2019. Previously he served as Group Head Audit for Maluku Papua on March 2018. Graduated from D3 Mechanical Engineering UNSRI 1990, S1 Mechanical Engineering UNITAS in 2001.

Struktur Organisasi Satuan Pengawasan Intern
Internal Audit Unit Organizational Structure



- **Komposisi Kepala Satuan Pengawasan Intern**

Satuan Pengawasan Intern (SPI) dipimpin oleh seorang Kepala SPI dan dibantu oleh 6 (enam) orang auditor internal. 6 (enam) orang Auditor anggota SPI memiliki keterampilan/ keahlian yang dipersyaratkan untuk menjadi auditor internal.

Komposisi SPI PLN Enjiniring sebagai berikut.

- **Composition of Head of Internal Supervisory Unit**

The Internal Supervisory Unit (SPI) is led by a Head of SPI and is assisted by 6 (six) internal auditors. 6 (six) internal auditors have the skills / expertise required to become internal auditors.

The composition of the SPI PLN Enjiniring is as follows

TABEL KOMPOSISI SATUAN PENGAWASAN INTERN

TABLE OF COMPOSITION OF INTERNAL CONTROL UNIT

No	Nama Name	Jabatan Position
1	Izhar Syafril	Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit Unit
2	Agus Hari P.S	Auditor
3	Ardan Fajar Alam	Auditor
4	Anjar Prabowo	Auditor
5	Budi Kristianto	Auditor
6	Leily Handayani Utama	Auditor
7	Risa Yulia Putri	Auditor

- **Sertifikasi Profesi Audit Internal**

- **Certification of Internal Audit Professions**

TABEL SERTIFIKASI PROFESI AUDIT INTERNAL

TABLE OF INTERNAL AUDIT PROFESSIONAL CERTIFICATION

No	Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
1	Izhar Syafril	Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit Unit	QIA
2	Agus Hari P.S	Auditor	QIA Basic
3	Ardan Fajar Alam	Auditor	QIA Intermediate
4	Anjar Prabowo	Auditor	QIA Basic
5	Budi Kristianto	Auditor	QIA Basic
6	Leily Handayani Utama	Auditor	QIA Basic
7	Risa Yulia Putri	Auditor	QIA Basic

• **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA LINGKUP PEKERJAAN SATUAN PENGAWASAN INTERN**

Satuan Pengawasan Intern berperan memastikan dan memberikan konsultasi yang independen dan obyektif bagi manajemen sehingga dapat mendorong penciptaan nilai tambah dan memperbaiki operasional bisnis. Tugas dan tanggung jawab Satuan Pengawasan Intern meliputi:

1. Menyusun dan menyempurnakan strategi SPI sesuai dengan visi dan misi;
2. Menyusun dan menyempurnakan Piagam Pengawasan Intern Terintegrasi/Integrated Audit Charter dan Pedoman RBIA;
3. Menyusun dan menyempurnakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Terintegrasi;
4. Melaksanakan evaluasi kualitas audit dan jasa konsultasi oleh jajaran SPI maupun pihak independen alas seluruh proses audit;
5. Melaksanakan analisis dan penyusunan laporan hasil audit bagi manajemen dan pihak eksternal, pengelolaan anggaran SPI, evaluasi dan pelaporan realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Terintegrasi, Rencana Kerja Anggaran sesuai kewenangan bidang tugasnya;
6. Melaksanakan kajian dan pengembangan organisasi SPI, pengembangan SDM, pengelolaan pendidikan SPI serta administrasi SDM, logistik dan kesekretariatan SPI;
7. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di SPI maupun bidang dan unit lainnya, lembaga atau instansi/lembaga pengawasan lainnya, guna memperlancar pencapaian target yang ditetapkan, peningkatan kinerja SPI dan Perusahaan sesuai kewenangannya;
8. Memastikan sistem pengendalian internal Perusahaan berjalan efisien dan efektif;
9. Melaksanakan fungsi pengawasan operasional dan audit investigasi;
10. Memberikan konsultasi atau saran perbaikan yang diperlukan manajemen; dan
11. Menindaklanjuti WBS dengan melakukan audit terhadap laporan pengaduan WBS untuk menciptakan iklim kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial dan citra Perusahaan.

• **DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE INTERNAL SUPERVISORY UNIT**

The Internal Audit Unit has the role of ensuring and providing independent and objective consultancy to management so as to encourage the creation of added value and improve business operations. Duties and responsibilities of the Internal Audit Unit include:

1. *Develop and refine the SPI strategy in accordance with the vision and mission;*
2. *Develop and improve the Integrated Audit Charter and the RBIA Guidelines;*
3. *Develop and improve the Integrated Annual Supervision Work Program (PKPT);*
4. *To evaluate the quality of audits and consulting services by the SPI staff and independent parties for the entire audit process;*
5. *Carry out analysis and preparation of audit reports for management and external parties, SPI budget management, evaluation and reporting of the realization of the Integrated Annual Supervision Work Program (PKPT), Budget Work Plans in accordance with the authority of their field of duty;*
6. *Carry out studies and development of the SPI organization, human resource development, management of SPI education as well as HR administration, logistics and secretariat of SPI;*
7. *Carry out coordination and cooperation in SPI as well as other fields and units, institutions or other supervisory agencies/institutions, in order to facilitate the achievement of the set targets, improve the performance of SPI and the Company according to their authority;*
8. *Ensuring that the Company's internal control system runs efficiently and effectively;*
9. *Carry out operational supervision and investigative audit functions;*
10. *Provide consultation or suggestions for improvement required by management; and*
11. *Following up on WBS by conducting an audit of WBS complaint reports to create a conducive climate and encourage reporting on matters that may cause financial and non-financial losses and the image of the Company.*

• PIAGAM SATUAN PENGAWASAN INTERN

Dalam melaksanakan pengendalian intern, SPI telah dilengkapi Pedoman Kerja yang Piagam Pengawasan Intern Terintegrasi/*Integrated Audit Charter* yang ditetapkan oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama pada Tanggal 06 Oktober 2020. Selain sebagai pedoman kerja, Piagam Pengawasan Intern Terintegrasi/*Integrated Audit Charter* juga berperan dalam penguatan peran dan tanggung jawab serta dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan bagi SPI. Oleh karena itu Piagam Pengawasan Intern Terintegrasi/*Integrated Audit Charter* disebarluaskan agar diketahui oleh seluruh karyawan dan pihak lain yang terkait sehingga terjalin saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan PLN Enjiniring.

Isi dari *Internal Audit Charter* adalah

1. Visi;

To be trusted partner yang diandalkan oleh stakeholder internal audit.

2. Misi;

a) Membantu Direktur Utama dalam meningkatkan pemahaman dan komitmen pimpinan Perusahaan untuk secara terus menerus mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengendalian manajemen yang efektif;

b) Menumbuhkan persamaan persepsi dalam proses pengawasan internal antara SPI (auditor dan konsultan internal) dan unit operasional untuk mendorong terwujudnya Good Corporate Government (GCG);

c) Mengembangkan kompetensi auditor dan konsultan internal dalam melaksanakan audit dan layanan konsultasi sesuai dengan The IIA's International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing (Standards); dan

d) Meningkatkan efektivitas informasi hasil pengawasan SPI untuk mencegah, mendeteksi, dan mengungkapkan praktek kecurangan (fraud) di Lingkungan Perseroan.

3. Tugas dan Tanggung Jawab serta Lingkup Pekerjaan ;

a) Menyusun dan menyempurnakan strategi SPI sesuai dengan visi dan misi;

b) Menyusun dan menyempurnakan Piagam Pengawasan Intern Terintegrasi/*Integrated Audit Charter* dan Pedoman RBIA;

• CHARTER OF INTERNAL SUPERVISION UNIT

In carrying out internal control, SPI has been equipped with Work Guidelines with the Integrated Audit Charter established by the President Commissioner and President Director on October 6, 2020. Apart from being a work guideline, the Integrated Audit Charter also plays a role in strengthening roles and responsibilities as well as the basis for the existence and implementation of supervisory duties for SPI. Therefore, the Integrated Audit Charter is disseminated so that it is known by all employees and other related parties so that mutual understanding and good cooperation can be established in realizing the Vision, Mission, and Objectives of PLN Enjiniring.

The contents of the Internal Audit Charter are

1. Vision;

"To be a trusted partner that is relied on by internal audit stakeholders."

2. Mission;

a) *Assist the President Director of the company in enhancing the understanding and commitment of company leaders to continuously develop and implement an effective management control system.*

b) *Growing and developing common perception and cooperation between SPI (auditors and internal consultants) and operational units to encourage the realization of Good Corporate Government (GCG);*

c) *Develop the competence of internal auditors and consultants in carrying out audits and consulting services in accordance with The IIA's International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing (Standards);*

d) *Increasing the effectiveness of information on the results of SPI's supervision to prevent, detect, and disclose fraudulent practices in the corporate environment.*

3. Duties and Responsibilities and Scope of Work;;

a) *Develop and refine the SPI strategy in accordance with the vision and mission;*

b) *Develop and improve the Integrated Audit Charter and the RBIA Guidelines;*



- c) Menyusun dan menyempurnakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Terintegrasi;
- d) Melaksanakan evaluasi kualitas audit dan jasa konsultasi oleh jajaran SPI maupun pihak independen alas seluruh proses audit;
- e) Melaksanakan analisis dan penyusunan laporan hasil audit bagi manajemen dan pihak eksternal, pengelolaan anggaran SPI, evaluasi dan pelaporan realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Terintegrasi, Rencana Kerja Anggaran sesuai kewenangan bidang tugasnya;
- f) Melaksanakan kajian dan pengembangan organisasi SPI, pengembangan SDM, pengelolaan pendidikan SPI serta administrasi SDM, logistik dan kesekretariatan SPI;
- g) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di SPI maupun bidang dan unit lainnya, lembaga atau instansi/lembaga pengawasan lainnya, guna memperlancar pencapaian target yang ditetapkan, peningkatan kinerja SPI dan Perusahaan sesuai kewenangannya;
- h) Memastikan sistem pengendalian internal Perusahaan berjalan efisien dan efektif;
- i) Melaksanakan fungsi pengawasan operasional dan audit investigasi;
- j) Memberikan konsultasi atau saran perbaikan yang diperlukan manajemen; dan
- k) Menindaklanjuti WBS dengan melakukan audit terhadap laporan pengaduan WBS untuk menciptakan iklim kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial dan citra Perusahaan.

4. Kewenangan;

- a) Dapat mengakses dan melakukan forensik seluruh data dan informasi yang relevan dengan tupoksi unit kerja dan pegawai yang tersimpan dalam peralatan kerja, antara lain yang tidak terbatas pada handphone, personel computer (PC) dan laptopnya, juga melakukan pengegedahan (searching), analisis rekening koran bank dan pelaksanaan polygraph sesuai ketentuan yang berlaku;
- b) Memiliki continuous access terhadap data di database perusahaan untuk keperluan continuous auditing;

- c) *Develop and improve the Integrated Annual Supervision Work Program (PKPT);*
- d) *To evaluate the quality of audits and consulting services by the SPI staff and independent parties for the entire audit process;*
- e) *Carry out analysis and preparation of audit reports for management and external parties, SPI budget management, evaluation and reporting of the realization of the Integrated Annual Supervision Work Program (PKPT), Budget Work Plans in accordance with the authority of their field of duty;*
- f) *Carry out studies and development of the SPI organization, human resource development, management of SPI education as well as HR administration, logistics and secretariat of SPI;*
- g) *Carry out coordination and cooperation in SPI as well as other fields and units, institutions or other supervisory agencies/institutions, in order to facilitate the achievement of the set targets, improve the performance of SPI and the Company according to their authority;*
- h) *Ensuring that the Company's internal control system runs efficiently and effectively;*
- i) *Carry out operational supervision and investigative audit functions;*
- j) *Provide consultation or suggestions for improvement required by management; and*
- k) *Following up on WBS by conducting an audit of WBS complaint reports to create a conducive climate and encourage reporting on matters that may cause financial and non-financial losses and the image of the Company.*

4. Authority;

- a) *Can access and perform forensics on all data and information relevant to the main tasks of work units and employees stored in work equipment, including but not limited to cellphones, computer personnel (PCs) and laptops, also conduct searches, analyze bank statements and implementation of polygraphs in accordance with applicable regulations;*
- b) *Have continuous access to data in the company database for continuous auditing purposes;*

- c) Dapat melakukan komunikasi, rapat secara berkala dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan atau Komite Audit;
 - d) Dapat melakukan koordinasi dengan auditor eksternal (BPK, BPKP, KAP, SPI PT PLN (Persero) dll);
 - e) Memberikan rekomendasi yang terkait penegakan disiplin pegawai sebagai dasar yang cukup bagi tindak lanjut proses disiplin pegawai oleh pihak – pihak terkait; dan
 - f) KSPI dapat menentukan rencana, metodologi, organisasi dan SDM SPI, serta melakukan pengawasan terhadap Audit Internal Perusahaan Anak
5. Sasaran;
- Melaksanakan pemeriksaan untuk memastikan semua pengendalian internal telah dilaksanakan dengan efektif dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam pengendalian internal di setiap aktivitas agar lebih ekonomis, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta 3E (Ekonomis, Efisien dan Efektif).
6. Hubungan Kemitraan dengan Komite Audit;
- a) Komunikasi Periodik, yaitu SPI melakukan komunikasi kepada Komite Audit untuk mendapatkan masukan mengenai Perencanaan Audit Tahunan; dan
 - b) Komunikasi Non Periodik, yaitu komunikasi yang dilakukan atas inisiasi dari SPI maupun atas permintaan Komite Audit.
7. Hubungan dengan Auditor Eksternal;
- a) Komunikasi Periodik yaitu komunikasi dengan Auditor BPK, BPKP, KAP, SPI PT PLN (Persero) dan lainnya; dan
 - b) Komunikasi Non Periodik atas persetujuan Direktur Utama dapat melakukan komunikasi bersifat insidental dengan pihak eksternal terkait hasil pengawasan yang menjadi lingkup tugas SPI.
8. Kode Etik
- a) Auditor Internal.
Auditor Internal harus memiliki kode etik dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan profesinya dan standar yang berlaku yaitu:
- c) *Able to communicate, held regular meeting with the Board of Directors,, Board of Commissioners, and or the Audit Committee;*
 - d) *Can coordinate with external auditors (BPK, BPKP, KAP, SPI PT PLN (Persero) etc.);*
 - e) *Provide recommendations related to the enforcement of employee discipline as a sufficient basis for the follow-up of the employee discipline process by related parties; and*
 - f) *KSPI can determine the plan, methodology, organization and HR of SPI, as well as supervise the Internal Audit of Subsidiaries*
5. *Targets;*
- Carry out inspections to ensure that all internal controls have been implemented effectively and provide recommendations for improvements in internal control in each activity to make it more economical, efficient and effective in accordance with applicable regulations with the principles of Good Corporate Governance (GCG) and 3E (Economic, Efficient and Effective)*
6. *Partnership with the Audit Committee;*
- a) *Periodic Communication, namely SPI communicates to the Audit Committee to get input on the Annual Audit Planning; and*
 - b) *Non-Periodic Communication, which is communication initiated by SPI or at the request of the Audit Committee*
7. *Relationship with External Auditor;*
- a) *Periodic Communication, namely communication with the Auditor of BPK, BPKP, KAP, SPI PT PLN (Persero) and others; and*
 - b) *Non-Periodic Communication with the approval of the President Director may conduct incidental communication with external parties related to the results of supervision within the scope of SPI's duties.*
8. *Code of Ethics;*
- a) *Internal Auditor*
Internal Auditors must have a code of ethics in carrying out their duties in accordance with their profession and applicable standards, namely:



1) Integritas

- Melakukan pekerjaan audit internal dengan jujur, produktif, profesional dan tanggung jawab;
- Mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan internal PLNE yang berlaku; Tidak ikut serta dalam kegiatan yang tidak legal atau melakukan kegiatan yang dilarang oleh profesi Auditor;
- Menghormati dan berkontribusi pada tujuan hukum dan etika yang ditetapkan PLNE.

2) Objektivitas

- Tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat mempengaruhi penilaian Auditor;
- Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya; dan
- Mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya dalam melaksanakan tugasnya dan jika tidak dilaporkan dapat merugikan PLNE.

3) Kerahasiaan

- Bijaksana dalam menggunakan dan melindungi informasi yang didapat dalam melakukan pekerjaan; dan Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya; dan
- Tidak menggunakan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan sendiri dengan cara yang tidak legal atau tidak berjalan dengan tujuan hukum dan etika di PLNE.

4) Kompetensi

- Melakukan audit pada objek yang sesuai keterampilan, pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki dalam melaksanakan audit;
- Melaksanakan audit sesuai dengan Piagam dan Pedoman Audit Internal PLNE yang sejalan dengan Standar Profesi Auditor Internal; dan

1) Integrity

- *Perform internal audit work honestly, productively, professionally and responsibly;*
- *Complying with applicable laws and regulations and internal PLNE regulations; Not participating in illegal activities or carrying out activities prohibited by the Auditor profession;*
- *Respect and contribute to the legal and ethical objectives set by PLNE.*

2) Objectivity

- *Not participating in activities that may affect the Auditor's assessment;*
- *Do not accept anything in any form that can affect his professional judgment; and*
- *Disclosing all important facts that he knows in carrying out his duties and if not reported it can harm PLNE.*

3) Confidentiality

- *Wisely in using and protecting the information obtained in carrying out their duties; and not accept anything in any form that can affect his professional judgment; and*
- *Do not use the information obtained in carrying out their duties for their own interests in a way that is not legal or does not work with legal and ethical purposes at PLNE.*

4) Competence

- *Conduct audits on objects that are in accordance with the skills, knowledge, expertise and experience possessed in carrying out audits;*
- *Carry out audits in accordance with the PLNE Internal Audit Charter and Guidelines which are in line with the Internal Auditor Professional Standards; and*

- Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan profesional berkelanjutan untuk tujuan peningkatan kualitas dan efisiensi kerja.

b) Kode Etik Investigator

Selain memiliki kode etik integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi, Investigator harus memiliki etika kerja dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan profesinya dan standar yang berlaku yaitu:

- 1) Investigator selalu menunjukkan komitmen profesionalisme dan kehati-hatian dalam melaksanakan investigasi;
- 2) Investigator tidak terlibat dalam tindakan ilegal atau melanggar kode etik atau segala aktivitas yang menimbulkan *conflict of interest*;
- 3) Investigator selalu menunjukkan integritas yang tinggi dalam setiap pelaksanaan investigasi dan hanya akan menerima penugasan investigasi apabila terdapat keyakinan yang memadai bahwa penugasan tersebut dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional;
- 4) Investigator patuh pada perintah pengadilan/pihak yang berwajib dan memberikan kesaksian yang jujur tanpa bias atau prasangka (*prejudice*);
- 5) Investigator mendapatkan bukti atau dokumentasi lain selama pelaksanaan investigasi sebagai dasar memadai untuk pemberian pendapat, namun tidak menyatakan pendapat apakah orang/badan tertentu bersalah atau tidak bersalah;
- 6) Investigator tidak membuka informasi yang didapatkan selama penugasan investigasi tanpa adanya persetujuan dari pihak yang berwenang;
- 7) Investigator melaporkan hal-hal relevan yang ditemukan selama penugasan, yang apabila dihilangkan dapat menyebabkan distorsi fakta; dan
- 8) Investigator selalu meningkatkan kompetensi secara berkesinambungan dan efektivitas aktivitas investigasi yang dilakukan/dipimpinnya.

- *Improving competence through continuing professional education for the purpose of improving work quality and efficiency.*

b) *Investigator Code of Conduct*

In addition to having a code of ethics of integrity, objectivity, confidentiality and competence, the Investigator must have a work ethic in carrying out his duties in accordance with his profession and applicable standards, namely:

- 1) *Investigators always demonstrate a commitment to professionalism and prudence in carrying out investigations;*
- 2) *The investigator is not involved in illegal acts or violates the code of ethics or any activity that creates a conflict of interest;*
- 3) *Investigators always show high integrity in every investigation and will only accept investigative assignments if there is sufficient confidence that the assignment can be completed with professional competence;*
- 4) *Investigators comply with court orders/ authorized parties and provide honest testimony without bias or prejudice;*
- 5) *The investigator obtains evidence or other documentation during the course of the investigation as a sufficient basis for giving an opinion, but does not express an opinion whether a certain person/entity is guilty or not;*
- 6) *The investigator does not disclose the information obtained during the investigation assignment without the approval of the authorized party;*
- 7) *Investigators report relevant matters found during the assignment, which if omitted can cause distortion of facts; and*
- 8) *Investigators always improve their competence on an ongoing basis and the effectiveness of the investigative activities they carry out/lead.*

• **KEBIJAKAN SATUAN PENGAWASAN INTERN**

Dalam melaksanakan pengawasan intern, Perusahaan memiliki berbagai kebijakan yang mendasari dan mengatur penerapan sistem pengendalian intern di perusahaan. Perusahaan memiliki Pedoman Pengawasan Intern berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN Enjiniring Nomor: 13.001.K/DIR/II/2018 tanggal 13 Februari 2018. Perusahaan juga telah memiliki Standar Prosedur Audit yang diperbaharui dan dimutakhirkan secara berkala.

Adapun Standar Prosedur Audit (SPA) yang sudah berlaku adalah:

1. SPA – 01 tentang Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
2. SPA – 02 tentang Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan Audit
3. SPA – 03 tentang Penentuan Sampel
4. SPA – 04 tentang Pemantauan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Hasil Audit
5. SPA – 06 tentang Pelaksanaan Audit Khusus
6. SPA – 07 tentang Layanan Konsultasi
7. SPA – 09 tentang Pelaporan Kegiatan Fungsi SPI dengan Manajemen

• **PELAKSANAAN TUGAS SATUAN PENGAWASAN INTERN**

Untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Manajemen dan keyakinan tentang pencapaian tujuan Perusahaan untuk meminimalkan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan PLN Enjiniring, maka Satuan Pengawasan pada tahun 2020 telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut.

1. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
2. Audit Operasional
3. Asesmen *Maturity Level* Manajemen Risiko
4. Asesmen GCG
5. Pemutakhiran Piagam Pengawasan Intern Terintegrasi/*Integrated Audit Charter*
6. Penyusunan dan Pemutakhiran Standar Prosedur Audit (SPA)
7. Dan lainnya

• **INTERNAL SUPERVISORY UNIT POLICY**

In carrying out internal control, the Company has various policies that underlie and regulate the implementation of the internal control system in the company. The Company has Internal Control Guidelines based on the Decree of the Board of Directors of PT PLN Enjiniring Number: 13.001.K/DIR/II/2018 dated February 13, 2018. The Company also has Standard Audit Procedures which are updated and updated regularly.

The Standard Audit Procedures (SPA) that have been applied are:

1. SPA – 01 concerning the Preparation of the Annual Supervision Work Program (PKPT)
2. SPA – 02 on Planning, Implementation and Reporting of Audit Activities
3. SPA – 03 on Sampling
4. SPA – 04 on Follow-up Monitoring and Recommendations on Audit Results
5. SPA – 06 concerning the Implementation of Special Audits
6. SPA – 07 on Consulting Services
7. SPA – 09 concerning Reporting of SPI Function Activities with Management

• **IMPLEMENTATION OF THE TASKS OF THE INTERNAL SUPERVISORY UNIT**

In order to improve the Management Control System and confidence in the achievement of the Company's goals to minimize risks that may hinder the achievement of objectives for the implementation of activities within PLN Enjiniring, the Supervisory Unit in 2020 has carried out the following activities.

1. *Preparation of the Annual Supervision Work Program (PKPT)*
2. *Operational Audit*
3. *Risk Management Maturity Level Assessment*
4. *GCG Assessment*
5. *Update the Integrated Audit Charter*
6. *Preparation and Update of Standard Audit Procedures (SPA)*
7. *And more*

• **PELAKSANAAN AUDIT OPERASIONAL 2021**

Selama tahun 2021, evaluasi system pengendalian intern dilakukan melalui pelaksanaan audit operasional. Audit dilaksanakan di 8 Bidang dengan detail sebagai berikut:

• **OPERATIONAL AUDIT IMPLEMENTATION IN 2021**

During 2021, the evaluation of the internal control system will be carried out through the implementation of an operational audit. The audit was carried out in 8 fields with the following details:

TABEL PELAKSANAAN AUDIT OPERASIONAL TAHUN 2021

TABLE OF OPERATIONAL AUDIT IMPLEMENTATION IN 2021

No	Jenis Audit <i>Auditee</i>	Periode Pelaksanaan <i>Period</i>	Ruang Lingkup Audit <i>Audited</i>
1	PT Prima Power Nusantara (PT PPN) <i>PT Prima Power Nusantara (PT PPN)</i>	Januari 2021 <i>January 2021</i>	Audit Risk Based dan Audit Kepatuhan <i>Risk Based Audit and Compliance Audit</i>
2	Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i>	Juli 2021 <i>July 2021</i>	Audit Risk Based dan Audit Kepatuhan <i>Risk Based Audit and Compliance Audit</i>
3	Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Usaha - Bidang Pengusahaan <i>Directorate of Marketing and Business Development - Business Division</i>	Juli 2021 <i>July 2021</i>	Audit Risk Based dan Audit Kepatuhan <i>Risk Based Audit and Compliance Audit</i>
4	Direktorat Enjiniring - Bidang Pembangkit - Bidang Transmisi dan Distribusi - Bidang Konstruksi <i>Directorate of Engineering - Power Plant Division - Transmission and Distribution Division - Construction Division</i>	Februari 2021 Maret 2021 April 2021 <i>February 2021 March 2021 April 2021</i>	Audit Risk Based dan Audit Kepatuhan Audit Risk Based dan Audit Kepatuhan Audit Risk Based dan Audit Kepatuhan <i>Risk Based Audit and Compliance Audit Risk Based Audit and Compliance Audit Risk Based Audit and Compliance Audit</i>

5	Direktorat Keuangan dan SDM		
	- Bidang Anggaran dan Keuangan	Agustus 2021	Audit Risk Based dan Audit Kepatuhan
	- SDM dan Umum	Agustus 2021	Audit Risk Based dan Audit Kepatuhan
	<i>Directorate of Finance and HR</i>		
	- Budget and Finance Division	August 2021	Risk Based Audit and Compliance Audit
	- HR and General	August 2021	Risk Based Audit and Compliance Audit

Pelaksanaan audit tersebut telah disampaikan oleh SPI kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk mendapatkan masukan dan saran.

The audit has been submitted by SPI to the President Director and the Board of Commissioners for input and suggestions.

• **TEMUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT**

Berdasarkan audit yang telah dilaksanakan, diperoleh sejumlah temuan dan tindak lanjut sebagai berikut.

• **FINDINGS AND FOLLOW-UP ON AUDIT RESULTS**

Based on the audits that have been carried out, a number of findings and follow-ups were obtained as follows.

AUDIT TAHUN 2021

AUDITEE IN 2021

No.	Audit <i>Auditee</i>	Jumlah Temuan <i>Number of Findings</i>	Temuan Selesai <i>Finding Completed</i>	Keterangan <i>Description</i>
1	PT Prima Power Nusantara (PT PPN)	3	3	Selesai
	<i>PT Prima Power Nusantara (PT PPN)</i>	3	3	<i>Completed</i>
2	Sekretaris Perusahaan	1	1	Selesai
	<i>Corporate Secretary</i>	1	1	<i>Completed</i>
3	Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Usahaan,			
	- Bidang Pengusahaan	2	2	Selesai
	<i>Directorate of Marketing and Business Development</i>			
	- Business Division	2	2	Completed
4	Direktorat Enjiniring			
	- Bidang Pembangkit	3	3	Selesai
	- Bidang Transmisi dan Distribusi	3	3	Selesai
	- Bidang Konstruksi	3	3	Selesai
	<i>Directorate of Engineering</i>			
	- Power Plant Division	3	3	Completed
- Transmission and Distribution Division	3	3	Completed	
	- Construction Division	3	3	Completed

	Direktorat Keuangan dan SDM			
	- Bidang Anggaran dan Keuangan	1	1	Selesai
5	- Bidang SDM dan Umum	4	4	Selesai
	<i>Directorate of Finance and HR</i>			
	- <i>Budget and Finance Division</i>	1	1	Completed
	- <i>HR and General</i>	4	4	Completed

• **PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN PENGAWASAN INTERN**

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, SPI telah mengikuti program pengembangan kompetensi, berupa pendidikan dan pelatihan. Pengembangan kompetensi yang diikuti SPI selama 2021 sebagai berikut.

• **COMPETENCY DEVELOPMENT OF THE INTERNAL SUPERVISION UNIT**

To support the implementation of its duties, SPI has participated in competency development programs, in the form of education and training. Competency development that will be followed by SPI during 2021 is as follows

TABEL PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN PENGAWASAN INTERN
INTERNAL BOARD OF SUPERVISION COMPETITION DEVELOPMENT TABLE

No	Nama	Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan	Waktu Pelaksanaan		Penyelenggara
	Name	Competency/Training Development Materials	Start	Finished	Organizers
1	Izhar Syafril	Pelatihan untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Certified Anti Fraud Manager (CAFM) & Ujian Sertifikasi CAFM	15 November 2021	17 November 2021	Asia Anti Fraud (AAF)
		Key Risk Indicator	18 Agustus 2021	19 Agustus 2021	WIMCONSULT
		Inhouse Training Good Corporate Governance (GCG)	03 November 2021	03 November 2021	DPS Consulting
	Izhar Syafril	Training to take the Certified Anti Fraud Manager (CAFM) Certification Exam & CAFM Certification Exam	November 15, 2021	November 17, 2021	Asia Anti Fraud (AAF)
		Key Risk Indicator	August 18, 2021	August 19, 2021	WIMCONSULT
		Inhouse Training Good Corporate Governance (GCG)	November 03, 2021	November 03, 2021	DPS Consulting
2	Agus Hari P.S	Pembelajaran Manajemen SDM/KEU Dasar Level SA/FIV Persyaratan Pembelajaran SE/ SPE I	12 Juli 2021	16 Juli 2021	PUSDIKLAT PT PLN (Persero)
		Penugasan Pembelajaran Specialist Education (SPE I)	06 Oktober 2021	18 Oktober 2021	PUSDIKLAT PT PLN (Persero)
	Agus Hari P.S	Basic Human Resources/KEU Management Learning Level SA/ FIV Learning Requirements SE/ SPE I	July 12 2021	July 16 2021	PUSDIKLAT PT PLN (Persero)
			Specialist Education Learning Assignment (SPE I)	October 06, 2021	October 18, 2021



3	Ardhan Fajar Alam	Key Risk Indicator	01 September 2021	02 September 2021	WIMCONSULT
	<i>Ardhan Fajar Alam</i>	<i>Key Risk Indicator</i>	<i>September 01, 2021</i>	<i>September 02, 2021</i>	<i>WIMCONSULT</i>
4	Anjar Prabowo	Qualified Internal Auditor - Tingkat Dasar	21 Juni 2021	03 Juli 2021	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
	<i>Anjar Prabowo</i>	<i>Qualified Internal Auditor - Basic</i>	<i>June 21 2021</i>	<i>July 03, 2021</i>	<i>Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)</i>
5	Budi Kristianto	-	-	-	-
	<i>Budi Kristianto</i>	-	-	-	-
6	Leily Handayani Utama	Qualified Internal Auditor - Tingkat Dasar	21 Juni 2021	03 Juli 2021	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
	<i>Leily Handayani Utama</i>	<i>Qualified Internal Auditor - Basic</i>	<i>June 21, 2021</i>	<i>July 03, 2021</i>	<i>Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)</i>
7	Risa Yulia Putri	Qualified Internal Auditor - Tingkat Dasar	05 Juli 2021	17 Juli 2021	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
		Key Risk Indicator	18 Agustus 2021	19 Agustus 2021	WIMCONSULT
		Bimtek Pengendalian Gratifikasi	28 Juni 2021	28 Juni 2021	KPK
	<i>Risa Yulia Putri</i>	<i>Qualified Internal Auditor - Basic</i>	<i>July 05, 2021</i>	<i>July 17,2021</i>	<i>Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)</i>
		Key Risk Indicator	August 18, 2021	August 19, 2021	WIMCONSULT
	Gratification Control technical guidance	June 28, 2021	June 28, 2021	KPK	

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Sistem pengendalian intern merupakan aspek penting dalam manajemen perusahaan yang sehat dan aman. Sistem pengendalian intern dibangun untuk memenuhi beberapa tujuan, antara lain menjamin semua kegiatan usaha Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut terdiri atas undang-undang, peraturan pemerintah, otoritas pengawas dan ketentuan intern Perusahaan. Selain itu, system pengendalian intern yang efektif dapat membantu Perusahaan menjaga asset yang dimiliki, menjamin tersedianya pelaporan keuangan yang akurat, meningkatkan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Penerapan sistem pengendalian intern pada tingkat Dewan Komisaris adalah dengan melakukan pengawasan dan pemberian nasehat terkait kecukupan dan kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan serta pengelolaan risiko dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Sedangkan, penerapan sistem pengendalian intern pada tingkat Direksi adalah dengan menerapkan kebijakan dan prosedur Perusahaan secara konsisten dan memenuhi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penerapan tersebut antara lain terkait dengan kegiatan operasional, manajemen risiko, rencana strategis, pembagian tugas, pendelegasian wewenang, serta kebijakan akuntansi yang memadai.

Perusahaan terus mendorong upaya peningkatan system pengendalian intern yang efektif. Pengendalian intern menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur dalam setiap kegiatan di unit kerja sehingga apabila terjadi penyimpangan, maka dapat diketahui secara dini dan dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Perusahaan memiliki Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang berperan dalam mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian intern yang dilakukan oleh manajemen Perusahaan. SPI senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip-prinsip GCG dapat berjalan sesuai koridornya.

The internal control system is an important aspect in the management of a healthy and safe company. The internal control system was built to fulfill several objectives, including ensuring that all of the Company's business activities comply with applicable regulations. These provisions consist of laws, government regulations, supervisory authorities and the Company's internal regulations. In addition, an effective internal control system can help the Company maintain its assets, ensure the availability of accurate financial reporting, increase the Company's compliance with applicable regulations, and reduce the risk of losses, deviations and violations of prudential aspects.

The implementation of the internal control system at the Board of Commissioners level is to supervise and provide advice regarding the adequacy and fairness in the preparation of financial reports and risk management by taking into account the principle of prudence. Meanwhile, the implementation of the internal control system at the Board of Directors level is by consistently implementing the Company's policies and procedures and complying with applicable regulations. The implementation includes, among others, related to operational activities, risk management, strategic planning, division of tasks, delegation of authority, and accounting policies. adequate.

The company continues to encourage efforts to improve an effective internal control system. Internal control is an integrated part of systems and procedures in every activity in the work unit so that if there is a deviation, it can be detected early and corrective steps are taken by the work unit concerned. The Company has an Internal Supervisory Unit (SPI) which plays a role in evaluating the adequacy and effectiveness of the internal control carried out by the Company's management. SPI always carries out internal supervision by taking a systematic approach so that the implementation of GCG principles can run according to the corridor.

Dalam melaksanakan audit, SPI menggunakan pendekatan berbasis risiko (Risk Based Audit). SPI memiliki Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang antara lain mengatur tentang sasaran pemeriksaan yang akan dilakukan pada tahun bersangkutan. Sasaran pemeriksaan dalam PKPT mencakup pemeriksaan pengendalian keuangan dan pengendalian operasional dan kepatuhan. Pemeriksaan operasional keuangan meliputi pemeriksaan penyusunan RKAP dan Laporan Keuangan, pemenuhan kebutuhan pendanaan, pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan Perusahaan, pemantauan persekot dinas, mitigasi risiko finansial, pelaksanaan evaluasi realisasi RAB, penagihan dan pengelolaan piutang pelanggan, laporan kinerja Perusahaan, pemantauan utang Perusahaan, pencatatan dan penghapusan aset, pengembangan sistem dan prosedur akuntansi, serta pelaksanaan pengakuan, pencatatan dan pelaporan secara menyeluruh/ sampling. Sedangkan, pemeriksaan operasional meliputi pemeriksaan bidang pemasaran, pengembangan usaha, keuangan, akuntansi, SDM, umum, transmisi dan distribusi, pembangkitan, Sekretaris Perusahaan, serta Satuan Manajemen Mutu dan Risiko.

In carrying out the audit, SPI uses a risk-based approach (Risk Based Audit). SPI has an Annual Supervision Work Program (PKPT) which, among other things, regulates the target of the audit to be carried out in the relevant year. The audit objectives in the PKPT include audits of financial controls and operational and compliance controls. The audit of financial operations includes examination of the preparation of the RKAP and Financial Statements, fulfillment of funding needs, management of the company's revenue and financing budgets, monitoring of service plans, financial risk mitigation, implementation of evaluation of RAB realization, collection and management of customer receivables, company performance reports, monitoring of company debt, recording and asset write-off, development of accounting systems and procedures, as well as the implementation of recognition, recording and reporting as a whole/sampling. Meanwhile, operational audits include inspections in the fields of marketing, business development, finance, accounting, HR, general, transmission and distribution, generation, Corporate Secretary, as well as the Quality and Risk Management Unit.

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Perusahaan senantiasa melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian intern di Perusahaan dan memberikan usulan perbaikan dalam mencapai peningkatan yang berkelanjutan dari proses lini yang ada. Segala sesuatu terkait dengan permasalahan kecukupan pengendalian intern telah dilaporkan kepada Direksi. Langkah-langkah tindak lanjut telah dilakukan untuk meminimalkan risiko. Laporan juga disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite-Komite yang telah dibentuk.

INTERNAL CONTROL SYSTEM EVALUATION

The Company always evaluates the implementation of the internal control system in the Company and provides suggestions for improvement in achieving continuous improvement of existing line processes. Everything related to the problem of adequacy of internal control has been reported to the Board of Directors. Follow-up steps have been taken to minimize the risk. Reports are also submitted to the Board of Commissioners through the Committees that have been established.

KESESUAIAN PENGENDALIAN INTERN DENGAN KERANGKA COSO

Sistem pengendalian intern Perusahaan telah sesuai dengan *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)* di tahun 2013. Tujuan pengendalian intern menurut

CONFORMITY OF INTERNAL CONTROL WITH COSO FRAMEWORK

The Company's internal control system is in accordance with the Internal Control Integrated Framework developed by The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) in 2013. The objectives of internal control according to COSO

COSO meliputi tujuan operasional, tujuan pelaporan dan tujuan kepatuhan. Hal ini sesuai dengan tujuan sistem pengendalian intern Perusahaan yang telah diuraikan di atas.

Tujuan operasional berkaitan dengan efektivitas efisiensi operasi. Tujuan pelaporan berkaitan dengan kepentingan pelaporan keuangan yang memenuhi kriteria andal, tepat waktu, transparan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh regulator maupun Perseroan. Sedangkan tujuan kepatuhan berkaitan dengan kepatuhan Perseroan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Menurut COSO, unsur-unsur pengendalian intern meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian;
2. Penilaian risiko;
3. Kegiatan pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi;
5. Kegiatan pemantauan.

include operational objectives, reporting objectives and compliance objectives. This is in accordance with the objectives of the Company's internal control system as described above.

Operational objectives are related to the effectiveness of operating efficiency. Reporting objectives are related to the importance of financial reporting that meets the criteria of being reliable, timely, transparent and other requirements set by the regulator and the Company. Meanwhile, the compliance objective relates to the Company's compliance with laws and regulations. According to COSO, the elements of internal control include the following components:

1. *Control environment;*
2. *Risk assessment;*
3. *Control activities;*
4. *Information and Communication;*
5. *Monitoring activities.*

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

ORGANS AND COMMITTEES BELOW THE BOARD OF DIRECTORS

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibantu oleh Organ Perusahaan. Perusahaan tidak memiliki Komite yang berada di bawah Direksi.

In carrying out their duties, the Board of Directors is assisted by Company Organs. The company does not have a Committee that is under the Board of Directors.

SATUAN PENGADAAN, MANAJEMEN MUTU DAN RISIKO

Kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko mengacu kepada SNI 8651:2018 Manajemen Risiko-Pedoman yang diadopsi dari Standard ISO 31000:2018 Risk Management sebagai upaya untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan manajemen risiko di Perseroan. Perseroan menetapkan Pedoman Manajemen Risiko dalam kerangka pengelolaan risiko yang menyeluruh dalam Enterprise Risk Management (ERM), guna meminimalkan potensi kerugian yang mengakibatkan kerugian dan mengoptimalkan profitabilitas, mendorong praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan menciptakan nilai tambah bagi Perseroan serta budaya risiko yang terinternalisasi sebagai bagian dari Budaya Perusahaan.

Fungsi pengelolaan Manajemen Risiko bertugas untuk memastikan terlaksananya Manajemen Risiko berdasarkan kaidah sehingga dapat menjadi referensi dalam pengambilan keputusan. Pengelolaan Manajemen Risiko berada di bawah koordinasi Kepala Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu dan Risiko (KSPMR) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Kepala Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu dan Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

• PROFIL KEPALA SATUAN PENGADAAN, MANAJEMEN MUTU DAN RISIKO

■ Runggun Fredo Amarta

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Kepala Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu dan Risiko sejak April 2020, sebelumnya menjabat sebagai Manajer Unit Pelaksana Produksi & Workshop III pada PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan (2016 – 2020). Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Mesin dari Universitas Indonesia dan S2 Administrasi Bisnis dari Universiti Tenaga Nasional, Malaysia.

PROCUREMENT UNIT, QUALITY AND RISK MANAGEMENT

Risk Management implementation policies and strategies refer to SNI 8651:2018 Risk Management-Guidelines adopted from the ISO 31000:2018 Risk Management Standard as an effort to ensure the sustainability of risk management implementation in the Company. The Company establishes Risk Management Guidelines within a comprehensive risk management framework in Enterprise Risk Management (ERM), in order to minimize potential losses that result in losses and optimize profitability, encourage Good Corporate Governance practices, increase stakeholder trust and create added value for the Company and culture. internalized risk as part of the Corporate Culture.

The Risk Management function is tasked with ensuring the implementation of Risk Management based on rules so that it can be used as a reference in decision making. Risk Management is under the coordination of the Head of the Procurement, Quality and Risk Management Unit (KSPMR) who reports directly to the President Director. The Head of the Procurement, Quality and Risk Management Unit is appointed and dismissed by the President Director.

• PROFILE OF THE HEAD OF PROCUREMENT, QUALITY AND RISK MANAGEMENT

■ Runggun Fredo Amarta

Indonesian citizens. Served as Head of the Procurement, Quality and Risk Management Unit since April 2020, previously served as Manager of Production & Workshop III Implementation Unit at PT PLN (Persero) Electricity Maintenance Center (2016 - 2020). Completed Bachelor of Mechanical Engineering from University of Indonesia and Master of Business Administration from Universiti Tenaga Nasional, Malaysia.

- **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN PENGADAAN, MANAJEMEN MUTU DAN RISIKO**

Kepala Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu dan Risiko (KSPMR) berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN Enjiniring No. 01.004.K/DIR/PLNE/XI/2021 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Jabatan PT PLN Enjiniring berperan untuk memastikan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, pengelolaan Sistem Manajemen Terintegrasi dan pengendalian Manajemen Risiko dapat memberikan nilai tambah untuk menjaga keberlangsungan bisnis Perseroan. Tugas dan tanggung jawab KSPMR meliputi:

1. Memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Perusahaan, terlaksananya pembinaan atau pendampingan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Satuan, Bidang, dan Sekretariat Perusahaan, dan pengelolaan administrasi pengadaan barang/jasa dan kontrak;
2. Memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi Perusahaan dalam pengelolaan risiko termasuk penerapan 3 Lines Model dan 4 Eyes Principle, maturity framework serta memastikan penerapannya baik dalam proses pengambilan keputusan, maupun kegiatan strategis lainnya;
3. Memastikan terlaksananya pengelolaan kebijakan terpusat termasuk harmonisasi kebijakan dan dampaknya, penanggung jawab *governance, risk management, and compliance* (GRC) serta pengelolaan *integrated management system*;
4. Memastikan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan kajian risiko Perusahaan, dan mitigasi risiko bekerja sama dengan pemilik risiko, serta melakukan *assessment*, pemantauan dan pelaporan risiko-risiko utama (*key risks*) Perusahaan;
5. Memastikan perencanaan dan standarisasi mutu produk eksisting dan produk baru termasuk di dalamnya menetapkan persyaratan mutu produk eksisting dan produk baru, mengelola ketidaksesuaian produk eksisting dan produk

- **DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE PROCUREMENT UNIT, QUALITY AND RISK MANAGEMENT**

Head of the Procurement, Quality and Risk Management Unit (KSPMR) based on the Decree of the Board of Directors of PT PLN Enjiniring No. 01.004.K/DIR/PLNE/XI/2021 concerning the Organizational Structure and Main Duties of PT PLN Enjiniring's role is to ensure that the Procurement of Goods and Services is carried out in accordance with GCG principles, the management of Integrated Management Systems and Risk Management control can provide added value to maintain the Company's business continuity. The duties and responsibilities of KSPMR include:

1. *Ensuring the implementation of policies and strategies for the implementation of the Company's procurement of goods/services, the implementation of guidance or assistance in the implementation of the procurement of goods/services in the Units, Divisions, and Corporate Secretariats, and the management of the administration of procurement of goods/services and contracts;*
2. *Ensuring the implementation of the Company's policies and strategies in risk management including the implementation of the 3 Lines Model and 4 Eyes Principles, the maturity framework and ensuring its implementation both in the decision-making process, as well as in other strategic activities;*
3. *Ensure the implementation of centralized policy management including harmonization of policies and their impacts, those in charge of governance, risk management, and compliance (GRC) as well as the management of integrated management systems;*
4. *Ensure the planning, implementation, management of the Company's risk studies, and risk mitigation in collaboration with risk owners, as well as conducting assessment, monitoring and reporting of the Company's key risks;*
5. *Ensuring planning and standardization of the quality of existing and new products, including establishing quality requirements for existing and new products, managing non-conformances of existing and new products, conducting*

baru, melakukan operasi intelijen pasar untuk melihat respons pelanggan terhadap produk dan menganalisis keefektifan proses penyampaian produk dan layanan kepada pelanggan;

6. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan terkait proses bisnis dan mekanisme kerja terkait pengembangan mutu produk dan penetapan kualitas produk dengan Bidang terkait;
7. Memimpin, merencanakan, dan mengendalikan pelaksanaan audit mutu internal maupun eksternal untuk mencapai sasaran yang konsisten dan tujuan Perusahaan;
8. Memastikan terlaksananya pengelolaan proses bisnis berbasis risiko, kepatuhan, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) secara berkelanjutan termasuk merencanakan dan menindaklanjuti mitigasi risiko terkait program yang menjadi kewenangannya pada Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu dan Risiko;
9. Memastikan dan bertanggung jawab terhadap manajemen sumber daya manusia pada Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu dan Risiko yang berupa optimasi pengelolaan Formasi Tenaga Kerja (FTK), pengembangan kompetensi Pegawai, dan pelaksanaan kegiatan *Knowledge Management* (KM);
10. Memastikan penggunaan aplikasi di lingkungan PT PLN Enjiniring, antara lain : *Knowledge Management System* (KMS), Dokumen Manajemen (DM), RICO, Inteling, eRBAS, Virtual Cubicle (VC), Sunfish, Aplikasi Manajemen Surat (AMS), dan Business One, secara optimal dan selaras dengan bidang atau fungsinya, dalam rangka pengelolaan data dan informasi beserta pemutakhirannya, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas

market intelligence operations to see customer responses to products and analyzing the effectiveness of product and service delivery processes to customers;

6. *Ensure the planning, implementation and evaluation of policies related to business processes and work mechanisms related to product quality development and product quality determination with related fields;*
7. *Lead, plan, and control the implementation of internal and external quality audits to achieve consistent goals and objectives of the Company;*
8. *Ensure the implementation of risk-based business process management, compliance, and the principles of good corporate governance in a sustainable manner, including planning and following up on risk mitigation related to programs under the authority of the Procurement, Quality and Risk Management Unit;*
9. *Ensure and be responsible for human resource management in the Procurement Unit, Quality and Risk Management in the form of optimizing the management of Manpower Formation (FTK), developing employee competencies, and implementing Knowledge Management (KM) activities;*
10. *Ensure the use of applications within PT PLN Enjiniring, including: Knowledge Management System (KMS), Management Documents (DM), RICO, Inteling, eRBAS, Virtual Cubicle (VC), Sunfish, Mail Management Application (AMS), and Business One, optimally and in line with its field or function, in the context of managing data and information and updating it, as well as supporting a quality decision-making process.*

• **PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN PENGADAAN MANAJEMEN MUTU DAN RISIKO**

Dalam meningkatkan dan mengembangkan kompetensi Tim SPMR dalam melaksanakan tugasnya, setiap awal tahun 2021 diusulkan untuk mengikuti program pengembangan kompetensi, berupa Pendidikan dan pelatihan, antara lain sebagai berikut:

• **COMPETENCY DEVELOPMENT OF QUALITY AND RISK MANAGEMENT PROCUREMENT UNITS**

In improving and developing the competence of the SPMR Team in carrying out their duties, every early 2021 it is proposed to take part in a competency development program, in the form of education and training, including the following:

TABEL PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN MANAJEMEN MUTU DAN RISIKO

TABLE OF COMPETENCY DEVELOPMENT FOR QUALITY AND RISK MANAGEMENT UNITS

Nama <i>Name</i>	Pengembangan Kompetensi Tahun 2021 <i>Competency Development</i>
Runggun Fredo Amarta	<p>Sertifikasi <i>Qualified Risk Governance Professional (QRGP)</i></p> <p>Sertifikasi <i>Qualified Risk Management Professional (QRMP)</i></p> <p>Insinyur Profesional Madya (IPM)</p> <p>In House Training Good Corporate Governance</p> <p>Pelatihan Key Risk Indicator (KRI)</p>
Katherine Amaranila	<p>Digital Leadership Series 2021 #10: Toward Energy Revolution Through 3D Trend Acceleration</p> <p>Digital Leadership Series 2021 #6 : Leading Across Generation : Cultivating Diverse And Inclusive Teams</p> <p>Digital Leadership Series 2021 #4 : Are You Ready To Thrive In Interconnected Global Business World?</p> <p>Instructure for Root Cause Problem Solving and Decision Making</p> <p>Instructure for Developing People</p> <p>Instructure for Customer Centric</p> <p>Instructure for Winning Customer Heart</p> <p>Pelatihan Key Risk Indicator (KRI)</p> <p>Business Continuity Management System ISO 22301</p> <p>GRC Summit 2021</p>
Indratno Hariyanto	-
Achiarli Khalilul Rahman	-
Wizasko Ardiansyah	<p>Self Learning Pedoman Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>Diskusi Pedoman Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>Project Talk Series 8 : PLTP <i>Binary Bottoming Cycle</i> sebagai Solusi Pengembangan EBT yang Kompetitif, Cepat, dan Risiko Rendah (Case Study : PLTP <i>Lahendong Binary</i>)</p> <p>Kontrak Berbasis Fidic (<i>Digital Learning</i>)</p>
Ahmad Ihsani	<p>Self Learning Pedoman Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>Diskusi Pedoman Pengadaan Barang/Jasa</p>
M. Agung Saputra	<p>Self Learning Pedoman Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>Diskusi Pedoman Pengadaan Barang/Jasa</p>
Citra Resmi	<i>E-learning</i> Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi
Dewi Safitri	<p>DIGITAL LEADERSHIP SERIES 2021 #4 : ARE YOU READY TO THRIVE IN INTERCONNECTED GLOBAL BUSINESS WORLD?</p> <p>Pelatihan Key Risk Indicator (KRI)</p> <p>Pelatihan <i>Qualified Risk Management Analyst (QRMA)</i></p>
Nurroh Habibah	<p><i>E-learning</i> Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi</p> <p>Pelatihan <i>Risk Control Self-Assessment (RCSA)</i></p> <p>Pelatihan Key Risk Indicator (KRI)</p>
Galuh Wijayanto	<p>Kajian Keekonomian PLTS</p> <p>Pelatihan Key Risk Indicator (KRI)</p> <p>Sertifikasi <i>Qualified Risk Management Analyst (QRMA)</i></p>

• **ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

Dalam rangka penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Perseroan melaksanakan pengelolaan dan pengendalian risiko untuk memastikan tercapainya sasaran perusahaan dengan mengendalikan risiko tertentu yang secara spesifik dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha Perseroan. Agar penerapan Manajemen Risiko berjalan dengan efektif, Perseroan membentuk unit kerja Satuan Mutu dan Manajemen Risiko yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan proses pengelolaan dan pengendalian risiko yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Manajemen (Risk Owner) di Perseroan. Berikut adalah Organisasi Manajemen Risiko, Wewenang, dan Tanggung Jawab sesuai dengan Keputusan Direksi PT PLN Enjiniring No. 22.001.K/DIR/PLNE/X/2021 tentang Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi PT PLN Enjiniring.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Penerapan Manajemen Risiko, melibatkan seluruh organ perusahaan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Jajaran Manajemen Perusahaan, Pemilik Risiko, Audit Internal, fungsi Manajemen Risiko dan sub-Bidang Manajemen Risiko.

Adapun wewenang dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris
Peran dan kewenangan Dewan Komisaris sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar PLNE.
2. Direksi
 - **Peran**
Berperan sebagai pemegang delegasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk melaksanakan pengelolaan perusahaan, termasuk di dalamnya melaksanakan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi maupun praktik pengelolaan Risiko perusahaan, mulai dari perencanaan strategis hingga 'pada eksekusinya dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran perusahaan.

• **RISK MANAGEMENT ORGANIZATION, AUTHORITY AND RESPONSIBILITY**

In the context of implementing Good Corporate Governance practices, the Company carries out risk management and control to ensure the achievement of company goals by controlling certain risks that can specifically affect the Company's business continuity. In order for the implementation of Risk Management to run effectively, the Company establishes a Quality and Risk Management Unit which is responsible for coordinating the risk management and control processes carried out by all levels of Management (Risk Owner) in the Company. The following are the Risk Management Organizations, Authorities, and Responsibilities in accordance with the Decree of the Board of Directors of PT PLN Enjiniring No. 22.001.K/DIR/PLNE/X/2021 concerning General Guidelines for Integrated Risk Management of PT PLN Enjiniring.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Implementation of Risk Management, involves all organs of the company starting from the Board of Commissioners, Directors, Board of Management of the Company, Risk Owners, Internal Audit, Risk Management function and sub-Sector of Risk Management.

The respective authorities and responsibilities are as follows:

1. Board of Commissioners
The roles and authorities of the Board of Commissioners are in accordance with the laws and articles of association of PLNE.
2. Directors
 - **Role**
Acting as the holder of the delegation of the General Meeting of Shareholders (GMS) to carry out company management, including implementing Integrated Risk Management and corporate Risk management practices, from strategic planning to execution in order to achieve company goals.

- Akuntabilitas
 - a) Menetapkan kebijakan dan arahan strategis penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - b) Memimpin penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan memberikan komitmen untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi serta menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengelolaan Risiko perusahaan di direktoratnya masing-masing.
 - c) Membangun dan memperkuat budaya Risiko perusahaan.
 - d) Menetapkan, mengelola, dan memantau Risiko Utama yang dihadapi perusahaan dalam pencapaian sasaran strategis perusahaan.
 - e) Mengambil keputusan pengelolaan Risiko sesuai batasan kewenangan yang berlaku di lingkungan perusahaan
3. Satuan Manajemen Mutu dan Risiko

- Peran
 - a) Sebagai penanggung jawab penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi perusahaan sesuai dengan desain kerangka kerja dan tata kelola Risiko, beserta upaya pengembangannya.
 - b) Sebagai pendamping dan *Checker/Reviewer*, dan *Approval* sesuai mekanisme pendelegasian wewenang terhadap penilaian Risiko maupun tindak lanjut Risiko perusahaan.
 - c) Sebagai pemberi masukan terhadap penilaian Risiko maupun tindak lanjut Risiko yang dijalankan oleh *Risk Leader* dan *Risk Champion* di Satuan Kerja.
- Kewenangan
 - a) Mengusulkan pembentukan entitas kerja untuk membantu Direksi dalam hal mengkoordinasikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi perusahaan untuk disetujui Direktur Pembina Manajemen Risiko (DPMR).

- *Accountability*
 - a) *Establish policies and strategic directions for the implementation of Integrated Risk Management.*
 - b) *Leading the implementation of Integrated Risk Management and providing a commitment to support the implementation of Integrated Risk Management as well as providing the necessary resources in managing the company's risk in their respective directorates.*
 - c) *Build and strengthen the company's Risk culture.*
 - d) *Determine, manage, and monitor the Main Risks faced by the company in achieving the company's strategic goals.*
 - e) *Take risk management decisions according to the limits of authority that apply within the company*
3. *Quality and Risk Management Unit*

- *Role*
 - a) *As the person in charge of implementing the company's Integrated Risk Management in accordance with the framework design and risk management, along with its development efforts.*
 - b) *As a companion and Checker/Reviewer, and Approval according to the mechanism of delegation of authority for Risk assessment and follow-up to the company's Risk.*
 - c) *As a provider of input on Risk assessment and Risk follow-up carried out by Risk Leaders and Risk Champions in the Work Unit.*
- *Authority*
 - a) *Propose the establishment of a working entity to assist the Board of Directors in coordinating the implementation of the company's Integrated Risk Management for approval by the Director of Risk Management Development (DPMR).*



- b) Mengusulkan rumusan arahan strategis penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi perusahaan maupun tata kelola Risiko perusahaan untuk disetujui Direktur Pembina Manajemen Risiko (DPMR).
- c) Mengusulkan kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, termasuk di dalamnya kriteria Risiko perusahaan untuk disetujui Direktur Pembina Manajemen Risiko (DPMR).
- d) Menyediakan rumusan target kinerja efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi maupun praktik pengelolaan Risiko yang dijalankan perusahaan untuk disetujui Direktur Pembina Manajemen Risiko (DPMR).
- e) Melaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja pengelolaan Risiko secara berkala, serta pengembangan berkelanjutan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- f) Meminta informasi dari para pihak internal PLNE untuk kebutuhan penyusunan kajian Risiko, perumusan laporan Profil Risiko, dan efektivitas pengelolaan Risiko PLNE untuk dilaporkan kepada Direktur Pembina Manajemen Risiko (DPMR) serta informasi lain yang dibutuhkan Direktur Pembina Manajemen Risiko (DPMR) dalam menjalankan perannya.
- g) Merancang program peningkatan kapabilitas internal di bidang Manajemen Risiko, termasuk di dalamnya kesadaran dan budaya Risiko dalam menjalankan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, serta tingkat maturitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, sesuai kebutuhan perusahaan bersama fungsi kerja terkait.

- **Akuntabilitas**

- a) Merumuskan usulan kebijakan dan arahan strategis penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi untuk diajukan kepada Direktur Pembina Manajemen Risiko (DPMR).

- **Accountability**

- a) Formulate policy proposals and strategic directions for the implementation of Integrated Risk Management to be submitted to the Director of Risk Management Development (DPMR).

- b) Merekomendasikan strategi maupun keputusan pengelolaan Risiko di tingkatan perusahaan, sesuai permintaan Direksi.
 - c) Menjalankan kepemimpinan Manajemen Risiko Terintegrasi dengan memimpin operasional penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan memberikan komitmen untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi serta merencanakan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengelolaan Risiko perusahaan untuk diajukan kepada Direktur Pembina Manajemen Risiko (DPMR).
 - d) Merancang program pembangunan dan penguatan budaya Risiko perusahaan sebagai bagian dari program kerja, termasuk di dalamnya sosialisasi/ pelatihan/*capacity building* kepada para pegawai dalam pengelolaan Risiko.
 - e) Merumuskan usulan upaya kepastian efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi maupun praktik pengelolaan Manajemen Risiko Terintegrasi serta mengusulkan tindakan antisipatif terhadap perkembangan internal dan eksternal PLNE untuk diajukan kepada Direktur Pembina Manajemen Risiko (DPMR).
 - f) Melaporkan Profil Risiko perusahaan, efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan praktik pengelolaan Risiko perusahaan kepada Direktur Pembina Manajemen Risiko (DPMR).
 - g) Mengukur efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - h) Merumuskan usulan pengembangan berkelanjutan serta tingkat maturitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi untuk diajukan kepada Direktur Pembina Manajemen Risiko (DPMR).
 - i) Mengelola informasi dan data terkait Manajemen Risiko untuk kebutuhan peningkatan efektivitas penerapan dan praktik Manajemen Risiko Terintegrasi.
- b) Recommend risk management strategies and decisions at the company level, according to the request of the Board of Directors.*
 - c) Carry out Integrated Risk Management leadership by leading the operational implementation of Integrated Risk Management and providing a commitment to support the implementation of Integrated Risk Management as well as planning the resources needed in managing the company's Risk to be submitted to the Director of Risk Management Development (DPMR).*
 - d) Designing development programs and strengthening the company's Risk culture as part of the work program, including socialization/training/capacity building to employees in risk management.*
 - e) Formulate proposals for ensuring the effectiveness of the implementation of Integrated Risk Management and Integrated Risk Management management practices as well as proposing anticipatory actions to PLNE's internal and external developments to be submitted to the Director of Risk Management Development (DPMR).*
 - f) Reporting the company's Risk Profile, the effectiveness of the implementation of Integrated Risk Management and the company's Risk management practices to the Director of Risk Management (DPMR).*
 - g) Measuring the effectiveness of the implementation of Integrated Risk Management.*
 - h) Formulate proposals for sustainable development and maturity level of Integrated Risk Management implementation to be submitted to the Director of Risk Management Development (DPMR).*
 - i) Manage information and data related to Risk Management for the need to increase the effectiveness of the implementation and practice of Integrated Risk Management.*

- j) Mengambil keputusan pengelolaan Risiko di Bidang/Satuan/SETPER sesuai batasan kewenangan yang berlaku di lingkungan PLNE.

4. Satuan Pengawas Intern (SPI) Perusahaan

- Peran

- a) Berperan sebagai entitas kerja yang dibentuk Direksi untuk membantu direksi melaksanakan perannya sesuai delegasi yang diberikan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), khususnya dalam melaksanakan fungsi audit internal PLNE.
- b) Sebagai *reviewer* sekaligus *independent assurance provider* terhadap pelaksanaan penerapan manajemen Risiko terintegrasi dan praktik pengelolaan Risiko perusahaan.

- Kewenangan

- a) Mengelola audit *universe* dalam rangka perumusan rencana audit internal tahunan.
- b) Meminta informasi dari Satuan Kerja Manajemen Risiko serta *auditee* dalam rangka menjalankan perannya.
- c) Melaksanakan fungsi audit internal, merumuskan laporan hasil audit internal, dan melaporkannya kepada Direktur Utama dan komite audit.
- d) Meminta *auditee* untuk melaksanakan usulan tindakan perbaikan atau rekomendasi pengembangan berdasarkan hasil audit.

- Akuntabilitas

- a) Merencanakan dan melaksanakan audit berbasis Risiko, audit kepatuhan, dan atau audit *surveillance* terhadap penerapan sistem 16 manajemen sebagai upaya pemastian independen terhadap efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi maupun praktik pengelolaan Risiko perusahaan.
- b) Menetapkan laporan hasil audit dan efektivitas pelaksanaan pelaporannya.

- j) *Make decisions in risk management in the Bidang/Satuan/SETPER according to the limits of authority that apply within the PLNE environment.*

4. Company Internal Supervisory Unit (SPI)

- Role

- a) *Act as a working entity established by the Board of Directors to assist the Board of Directors in carrying out their roles according to the delegation given by the General Meeting of Shareholders (GMS), particularly in carrying out the PLNE internal audit function.*
- b) *As a reviewer as well as an independent assurance provider for the implementation of integrated risk management and corporate risk management practices.*

- Authority

- a) *Manage the audit universe in the framework of the formulation of the annual internal audit plan.*
- b) *Request information from the Risk Management Unit and auditees in order to carry out their roles.*
- c) *Carry out the internal audit function, formulate a report on the results of the internal audit, and report it to the President Director and the audit committee.*
- d) *Request the auditee to implement the proposed corrective actions or development recommendations based on the audit results.*

- Accountability

- a) *Plan and carry out Risk-based audits, compliance audits, and/or surveillance audits of the implementation of the management system as an effort to independently ensure the effectiveness of the implementation of Integrated Risk Management and the company's Risk management practices.*
- b) *Determine the audit result report and the effectiveness of the reporting implementation.*

- c) Melaksanakan upaya pemastian terhadap tindak lanjut *auditee* atas laporan hasil audit.
 - d) Mengevaluasi efektivitas pengendalian internal terhadap Risiko yang dilakukan oleh *auditee* di seluruh lingkungan dan tingkatan perusahaan, beserta merumuskan usulan tindakan perbaikan atau rekomendasi pengembangannya.
 - e) Melakukan penilaian kematangan implementasi Manajemen Risiko Terintegrasi di Bidang/Satuan/SETPER serta Anak Perusahaan jika diperlukan
5. Direksi Anak Perusahaan
- a. Menetapkan pedoman penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di lingkungan Anak Perusahaan, diselaraskan dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang berlaku di PLNE, termasuk di dalamnya adalah penetapan matriks Risiko yang digunakan di Anak Perusahaan yang menggambarkan Selera Risiko Anak Perusahaan dengan kategori yang mengacu pada skala tingkat kemungkinan kejadian, skala tingkat dampak, dan Tingkat Risiko yang ditetapkan oleh PLNE.
 - b. Membentuk satuan kerja di bawah Direksi Anak Perusahaan yang bertugas sebagai *framework owner* dalam implementasi manajemen Risiko terintegrasi di lingkungan Anak Perusahaan, dengan fungsi utama mengacu pada fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam Keputusan ini.
 - c. Menetapkan, mengelola, dan memantau Risiko Utama yang dihadapi Anak Perusahaan dalam pencapaian sasaran strategis PLNE.
 - d. Menciptakan lingkungan internal Anak Perusahaan yang kondusif untuk penerapan dan peningkatan kematangan implementasi Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkelanjutan, dan untuk menanamkan budaya Manajemen Risiko di Anak Perusahaan.
 - e. Menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Anak Perusahaan.
- c) *Carry out efforts to ensure the auditee's follow-up on the audit report.*
 - d) *Evaluating the effectiveness of internal control against Risks carried out by auditees at all levels and levels of the company, as well as formulating recommendations for corrective actions or recommendations for their development.*
 - e) *Assessing the maturity of the implementation of Integrated Risk Management in the Field/Unit/SETPER and Subsidiaries if necessary*
5. *Subsidiary Directors*
- a. *Establishing guidelines for the implementation of Integrated Risk Management within the Subsidiaries, aligned with the guidelines for implementing Integrated Risk Management applicable at PLNE, including the determination of the Risk matrix used in Subsidiaries which describes the Risk Appetite of Subsidiaries with categories that refer to the scale of the likelihood of an event occurring, impact level scale, and Risk Level determined by PLNE.*
 - b. *Establish a work unit under the Board of Directors of the Subsidiary which serves as the framework owner in the implementation of integrated Risk management within the Subsidiary, with the main function referring to the function of the Risk Management Work Unit in this Decree.*
 - c. *Determine, manage, and monitor the Main Risks faced by Subsidiaries in achieving PLNE's strategic goals.*
 - d. *Creating a conducive internal environment for the Subsidiaries to implement and improve the maturity of the implementation of Integrated Risk Management in a sustainable manner, and to instill a Risk Management culture in the Subsidiaries.*
 - e. *Provide the necessary resources in the implementation of Integrated Risk Management in Subsidiaries.*



6. Risk Leader

• Peran

- a) Sebagai *reviewer* dan *approver* atas:
 - 1) penilaian dan tindak lanjut Kajian Risiko dalam proses pengambilan keputusan kritikal;
 - 2) penilaian dan tindak lanjut Profil Risiko pada unit kerjanya; dan
 - 3) pelaporan Risiko kepada atasan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- b) *Risk Leader* bertanggung jawab kepada Direktur, atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi serta pengendalian internal pada entitas kerjanya.

• Kewenangan

- a) Meminta laporan penilaian Risiko dan tindak lanjut Risiko, beserta informasi terkait lainnya dari *Risk Champion* pada unit kerjanya.
- b) *Risk Leader* Bidang/Satuan/SETPER dapat meminta pendampingan dari Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam melaksanakan akuntabilitasnya.
- c) Mengambil keputusan pengelolaan Risiko sesuai dengan batasan kewenangan yang berlaku.

• Akuntabilitas

- a) Melakukan persetujuan terhadap penilaian Risiko dan tindak lanjut Risiko pada entitas kerjanya.
- b) Bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dalam pengelolaan Risiko sesuai dengan batasan kewenangan yang berlaku.
- c) Memimpin unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya dalam menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- d) Memperkuat kesadaran dan budaya Risiko dalam menjalankan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi maupun praktik pengelolaan Risiko, beserta peningkatan maturitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

6. Risk Leader

• Role

- a) As a *reviewer* and *approver* of:
 - 1) *assessment and follow-up of the Risk Assessment in the critical decision-making process;*
 - 2) *assessment and follow-up of the Risk Profile in the work unit; and*
 - 3) *Risk reporting to superiors and the Risk Management Work Unit.*
- b) *The Risk Leader is responsible to the Director, for the effectiveness of the implementation of Integrated Risk Management and internal control in his working entity.*

• Authority

- a) *Request a Risk assessment report and Risk follow-up, along with other related information from the Risk Champion in his work unit.*
- b) *The Risk Leader of the Division/Unit/SETPER may request assistance from the Risk Management Unit in carrying out its accountability.*
- c) *Take risk management decisions in accordance with the applicable authority limits.*

• Accountability

- a) *Approve the Risk assessment and follow-up Risk in the working entity.*
- b) *Responsible for decisions taken in risk management in accordance with the applicable authority limits.*
- c) *Lead the work unit that is his responsibility in implementing Integrated Risk Management.*
- d) *Strengthening Risk awareness and culture in implementing Integrated Risk Management and Risk management practices, as well as increasing the maturity of Integrated Risk Management implementation.*

• PROFIL RISIKO KORPORAT

Profil Risiko korporat disusun untuk memastikan pencapaian sasaran strategis PT PLN Enjiniring yang tertuang dalam RKAP 2021. Profil Risiko Korporat PT PLN Enjiniring digunakan sebagai acuan utama bagi manajemen perusahaan untuk memonitor *Key Risk Indicator* risiko perusahaan sebagai bahan manajemen untuk mengambil keputusan. Adapun risiko-risiko utama yang ditetapkan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

• CORPORATE RISK PROFILE

The corporate risk profile is prepared to ensure the achievement of PT PLN Enjiniring's strategic objectives as stated in the 2021 RKAP. The PT PLN Enjiniring Corporate Risk Profile is used as the main reference for company management to monitor the company's risk Key Risk Indicators as management material for making decisions. The main risks determined in 2021 are as follows:

PROFIL RISIKO KORPORAT

CORPORATE RISK PROFILE

No	Sasaran Target	Deskripsi Risiko <i>Risk Description</i>	Controlled Risk	Target Risk	Residual Risk (Actual per Des)
1	Indeks Kepuasan Pelanggan mencapai 83	Kualitas Layanan tidak sesuai dengan ekspektasi pelanggan Karena pengelolaan dan penanganan keluhan pelanggan yang belum optimal Sehingga indeks kepuasan pelanggan tidak tercapai	C.4 / Tinggi	B.3 / Moderat	B.4 / Tinggi
	<i>Customer Satisfaction Index reached 83</i>	<i>Service quality does not match customer expectations Because the management and handling of customer complaints has not been optimal So that the customer satisfaction index is not achieved</i>	<i>C.4 / High</i>	<i>B.3 / Moderate</i>	<i>B.4 / High</i>
2	Pendapatan Proyek Internal (PLN) dari produk enjiniring di luar sinergi anak perusahaan	PLNE tidak memperoleh pekerjaan/penugasan baru dengan nilai kontrak/penugasan yang mendukung target pendapatan Karena kurang optimalnya perencanaan dan pelaksanaan program kerja pemasaran dan ketidaksiapan menerima pelimpahan pekerjaan dari PUSENLIS Sehingga pertumbuhan Nilai Proyek Internal (PLN) dan target perolehan kontrak tidak tercapai	D.5 / Ekstrem	B.3 / Moderat	C.5 / Ekstrem
	<i>Internal Project Revenue (PLN) from engineering products outside the subsidiary synergies</i>	<i>PLNE does not get a new job/ assignment with a contract/ assignment value that supports the revenue target Due to less than optimal planning and implementation of marketing work programs and unpreparedness to accept work assignments from PUSENLIS So that the growth of the Internal Project Value (PLN) and the contract acquisition target is not achieved</i>	<i>D.5 / Extreme</i>	<i>B.3 / Moderate</i>	<i>C.5 / Extreme</i>

No	Sasaran Target	Deskripsi Risiko Risk Description	Controlled Risk	Target Risk	Residual Risk (Actual per Des)
3	Pendapatan Proyek Internal (PLN) dari produk enjiniring di luar sinergi anak perusahaan; Engineering First Pass Yield; Engineering On-Time Delivery (OTD); Penyerapan MM	Penyelesaian pekerjaan Enjiniring terkendala Karena Proses pekerjaan dan administrasi yang belum optimal Sehingga pertumbuhan Nilai Proyek Internal (PLN) dan Peningkatan Pendapatan PLNE tidak terpenuhi	C.4 / Tinggi	B.2 / Rendah	B.4 / Tinggi
	<i>Internal Project Revenue (PLN) from engineering products outside the subsidiary synergies; Engineering First Pass Yield; Engineering On-Time Delivery (OTD); Absorption Man Month</i>	<i>Completion of engineering work is constrained Because the work and administrative processes are not optimal So that the growth of the Internal Project Value (PLN) and the increase in PLNE Revenues are not met</i>	<i>C.4 / High</i>	<i>B.2 / Low</i>	<i>B.4 / High</i>
4	Produktivitas Supervisi Kontruksi	Mobilisasi Personil supervisi konstruksi terlambat Karena Proses pemenuhan personil sesuai kualifikasi kontrak terkendala Sehingga terjadi opportunity loss	C.4 / Tinggi	B.3 / Moderat	A.3 / Moderat
	<i>Construction Supervision Productivity</i>	<i>Late construction supervision personnel mobilization Because the process of fulfilling personnel according to contract qualifications is constrained So there is an opportunity loss</i>	<i>C.4 / High</i>	<i>B.3 / Moderate</i>	<i>A.3 / Moderate</i>
5	Komposisi Enjinir subletting untuk Produk Enjiniring (FS, Biddoc dan Engineering Design)	Jumlah pekerjaan yang dilakukan secara mandiri oleh PLNE masih rendah Karena kapasitas enjinir untuk menyelesaikan pekerjaan masih terbatas Sehingga target enjinir subletting 19,8% tidak tercapai	C.3 / Tinggi	B.3 / Moderat	E.3 / Tinggi
	<i>Subletting Engineer Composition for Engineering Products (FS, Biddoc and Engineering Design)</i>	<i>The amount of work done independently by PLNE is still low Because the capacity of engineers to complete the work is still limited So the subletting engineer target of 19.8% is not achieved</i>	<i>C.3 / High</i>	<i>B.3 / Moderate</i>	<i>E.3 / High</i>
6	Organizational Capital Readiness (OCR) memiliki nilai sebesar 4,45	Budaya Inovasi di perusahaan belum terbangun Karena belum adanya mekanisme lomba karya inovasi di PLNE Sehingga nilai OCR teamwork tidak tercapai	C.4 / Tinggi	B.3 / Moderat	A.4 / Tinggi

No	Sasaran Target	Deskripsi Risiko Risk Description	Controlled Risk	Target Risk	Residual Risk (Actual per Des)
	<i>Organizational Capital Readiness (OCR) has a value of 4.45</i>	<i>The innovation culture in the company has not yet been developed Because there is no mechanism for the innovation work competition at PLNE So that the OCR value of teamwork is not achieved</i>	<i>C.4 / High</i>	<i>B.3 / Moderate</i>	<i>A.4 / High</i>
7	Peningkatan Pendapatan PLN Enjiniring bagian perusahaan	Turunnya jam produksi CNG Bangkanai Karena banyaknya pemeliharaan (terjadwal dan tidak terjadwal) di tahun 2021 Sehingga jasa pre-treatment dan penyimpanan yang diberikan menurun	B.4 / Tinggi	A.2 / Rendah	B.1 / Rendah
	<i>Increase in PLN Enjiniring Revenues for the Concession Section</i>	<i>Lower Bangkanai CNG production hours Due to a lot of maintenance (scheduled and unscheduled) in 2021 So that the pre-treatment and storage services provided decreased</i>	<i>B.4 / High</i>	<i>A.2 / Low</i>	<i>B.1 / Low</i>
8	Peningkatan Pendapatan PLN Enjiniring untuk PT PPN	PT PPN tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan terjadi cost overrun Karena jumlah piutang dan durasi COP yang besar Sehingga peningkatan pendapatan PPN tidak dapat mendukung pencapaian target PLNE	D.5 / Ekstrem	B.3 / Moderat	A.3 / Moderat
	<i>PLN Enjiniring Revenue Increase for PT PPN</i>	<i>PT PPN cannot complete the work and there is a cost overrun Due to the large amount of receivables and duration of COP So that the increase in VAT revenue cannot support the achievement of the PLNE target</i>	<i>D.5 / Extreme</i>	<i>B.3 / Moderate</i>	<i>A.3 / Moderate</i>
9	Skor Good Corporate Governance (GCG) sebesar 92.6	Penerapan three lines of defense belum selaras Karena kurangnya kontrol terkait implementasi pedoman GRC Sehingga penerapan GCG tidak sesuai target	C.3 / Tinggi	B.2 / Rendah	C.3 / Tinggi
	<i>Good Corporate Governance (GCG) score of 92.6</i>	<i>The implementation of the three lines of defense has not been aligned Due to the lack of control over the implementation of the GRC guidelines So that the implementation of GCG is not on target</i>	<i>C.3 / High</i>	<i>B.2 / Low</i>	<i>C.3 / High</i>

No	Sasaran Target	Deskripsi Risiko Risk Description	Controlled Risk	Target Risk	Residual Risk (Actual per Des)
10	Progress Pencapaian Investasi - Go Live Aplikasi Database Enjiniring	Keterlambatan persiapan proses pengadaan aplikasi dan pemenuhan database enjiniring Karena kurangnya monitoring terhadap implementasi milestone yang telah direncanakan Sehingga kegiatan Go Live tidak sesuai dengan Jadwal	C.3 / Tinggi	B.2 / Rendah	A.2 / Rendah
	<i>Investment Achievement Progress - Go Live Database Engineering Application</i>	<i>Delays in the preparation of the application procurement process and the fulfillment of the engineering database Due to the lack of monitoring of the implementation of the planned milestones So that Go Live activities don't match the schedule</i>	<i>C.3 / High</i>	<i>B.2 / Low</i>	<i>A.2 / Low</i>
11	IT Maturity level (2,75)	Pemenuhan maturity level IT tidak tercapai Karena sumber daya belum memadai Sehingga maturity level IT tidak tercapai	C.3 / Tinggi	B.2 / Rendah	A.1 / Rendah
	<i>IT Maturity level (2,75)</i>	<i>IT maturity level was not met Due to insufficient resources So that IT maturity level is not reached</i>	<i>C.3 / High</i>	<i>B.2 / Low</i>	<i>A.1 / Low</i>

• **KAJIAN RISIKO BIDANG**

Pada tahun 2021 tidak hanya untuk proyek-proyek strategis, penerapan manajemen risiko sudah mencapai ke level bidang dan Sekper sebanyak 69 dokumen kajian risiko, sebagaimana berikut:

• **FIELD RISK ASSESSMENT**

In 2021, not only for strategic projects, the implementation of risk management has reached the sector level and Sekper as many as 69 risk assessment documents, as follows:

KAJIAN RISIKO BIDANG
FIELD RISK ASSESSMENT

No	Bidang Field	Judul Kajian Risiko Risk Study Title
1	Transmisi dan Distribusi	<ul style="list-style-type: none"> a. Keterlambatan proses pengadaan aplikasi (disisi pengguna) dan pemenuhan database enjiniring b. Budaya Inovasi di Perusahaan belum terbangun c. Jumlah pekerjaan yang dilakukan secara mandiri oleh PLNE masih rendah d. Penyelesaian pekerjaan Enjiniring TND (EFPY OTD) terkendala e. Kualitas Layanan tidak sesuai dengan ekspektasi pelanggan

No	Bidang Field	Judul Kajian Risiko Risk Study Title
2	Transmission and Distribution	<ul style="list-style-type: none"> a. Delays in the application procurement process (on the user side) and the fulfillment of the engineering database b. The Innovation Culture in the Company has not been developed c. The amount of work done independently by PLNE is still low d. Completion of TND Engineering work (EFPY OTD) is hampered e. Service quality does not match customer expectations
	Pembangkit	<ul style="list-style-type: none"> a. Keterlambatan persiapan proses pengadaan aplikasi dan pemenuhan database enjiniring b. Jumlah pekerjaan yang dilakukan secara mandiri oleh PLNE masih rendah c. Penyelesaian pekerjaan Enjiniring terkendala d. Kualitas Layanan tidak sesuai dengan ekspektasi pelanggan
3	Power Plant	<ul style="list-style-type: none"> a. Delays in the preparation of the application procurement process and the fulfillment of the engineering database b. The amount of work done independently by PLNE is still low c. Completion of engineering work is constrained d. Service quality does not match customer expectations
	Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pekerjaan Konstruksi terhambat dan tidak ada kontrak baru karena adanya penundaan proses pengadaan proyek/kontrak dari pemberi kerja (PLN) Sehingga pertumbuhan Nilai Proyek Internal (PLN) dan Peningkatan Pendapatan PLNE tidak terpenuhi b. Mobilisasi Personil supervisi konstruksi terlambat Karena Proses pemenuhan personil sesuai kualifikasi kontrak terkendala Sehingga terjadi opportunity loss c. Kualitas Layanan tidak sesuai dengan ekspektasi pelanggan Karena pengelolaan dan penanganan keluhan pelanggan yang belum optimal Sehingga indeks kepuasan pelanggan tidak tercapai
4	Construction	<ul style="list-style-type: none"> a. Construction work is hampered and there are no new contracts due to delays in the project/contract procurement process from the employer (PLN). So that the growth of the Internal Project Value (PLN) and the increase in PLNE Revenues are not met b. Mobilization of construction supervision personnel is delayed because the process of fulfilling personnel according to contract qualifications is constrained, resulting in an opportunity loss c. Service quality is not in accordance with customer expectations Due to the management and handling of customer complaints that have not been optimal so that the customer satisfaction index is not achieved
	SDM dan Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Sosialisasi dan LKS Bipartit belum berjalan karena pelaksanaan tidak sesuai jadwal sehingga peningkatan efektivitas sistem SDM dan Organisasi tidak tercapai. b. Program knowledge management kurang efektif karena belum tersedia aplikasi/portal KM online yang user friendly sehingga Peningkatan Efektivitas Sistem SDM dan Organisasi tidak tercapai c. Program budaya unggul belum berjalan karena keterlibatan leader kurang optimal sehingga Peningkatan Efektivitas Sistem SDM dan Organisasi tidak tercapai d. Program pengembangan talent belum berjalan karena metode pengembangan diri belum direncanakan dengan baik sehingga Peningkatan Efektivitas Sistem SDM dan Organisasi tidak tercapai e. Program pengembangan pegawai (sertifikasi bisnis inti) belum berjalan karena pengalaman proyek EBT & enjiniring distribusi yang dikerjakan PLNE terbatas sehingga Peningkatan Efektivitas Sistem SDM dan Organisasi tidak tercapai f. Tidak termonitornya peralatan dan Fasilitas Kerja yang rusak atau hilang

No	Bidang Field	Judul Kajian Risiko Risk Study Title
	HR and General	<ul style="list-style-type: none"> g. Terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja karena tidak terlaksananya audit SMK3 sebagai pengukur efektivitas dan efisiensi penerapan SMK3 sehingga menimbulkan tempat kerja yang tidak aman dan tidak nyaman h. Kenyamanan dan kebersihan ruang kerja karyawan terganggu karena kurangnya perhatian terhadap kebersihan sehingga Karyawan tidak merasa nyaman dalam bekerja i. Pencabutan status Obyek Vital Nasional j. Menyiapkan program kerja Sistem Manajemen Pengamanan <p><i>a. The Bipartite Socialization and LKS Program has not run because the implementation is not according to schedule so that the increase in the effectiveness of the HR and Organizational systems is not achieved.</i></p> <p><i>b. The knowledge management program is not effective because there is no user friendly online KM application/portal available so that the Improvement of the Effectiveness of HR and Organizational Systems is not achieved.</i></p> <p><i>c. The superior culture program has not run because the involvement of the leader is not optimal so that the Improvement of the Effectiveness of HR and Organizational Systems is not achieved</i></p> <p><i>d. The talent development program has not run because the self-development method has not well planned so that the Improvement of the Effectiveness of HR and Organizational Systems does not achieved</i></p> <p><i>e. Employee development program (core business certification) has not been implemented due to experience</i></p> <p><i>NRE projects & distribution engineering carried out by PLNE are limited so that the increase</i></p> <p><i>The effectiveness of the HR system and organization is not achieved</i></p> <p><i>f. Unmonitored equipment and work facilities that are damaged or missing</i></p> <p><i>g. Work accidents or occupational diseases occur due to not implementing a SMK3 audit as a measure of the effectiveness and efficiency of SMK3 implementation, resulting in an unsafe and uncomfortable workplace.</i></p> <p><i>h. The comfort and cleanliness of the employee's workspace is disturbed due to lack of attention to cleanliness so that employees do not feel comfortable at work</i></p> <p><i>i. Revocation of National Vital Object status</i></p> <p><i>j. Prepare the Security Management System work program</i></p>
5	Anggaran & Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan Kas Perusahaan tidak tersedia sehingga Likuiditas Terganggu b. Ketersediaan Kas untuk Dana SHL dan Bridging Loan Anak Perusahaan tidak tersedia sehingga Kinerja Operasional Anak Perusahaan Terganggu c. Meningkatnya utang yang harus dibayar kepada vendor disebabkan karena ketidaktersediaan anggaran d. Pengumpulan data yang lama karena data data yang belum terorganisir secara baik sehingga terlambat dalam penyampaian RKAP e. Meningkatnya piutang karena belum optimalnya monitoring piutang menyebabkan proses penagihan terhambat sehingga sasaran Collection of Period (COP) tidak tercapai f. PLNE terlambat menerbitkan invoice karena adanya permasalahan BAPP sehingga sasaran pendapatan tidak tercapai g. Proses realisasi investasi terkendala sehingga sasaran pencapaian investasi tidak tercapai <p><i>a. The Company's Cash Availability is not available so Liquidity Is Disturbed</i></p> <p><i>b. Availability of Cash for Subsidiaries' SHL and Bridging Loan Funds is not available so that the Subsidiary's Operational Performance is Disrupted</i></p> <p><i>c. Increased debt to be paid to vendors due to budget unavailability</i></p>
	Budget and Finance	

No	Bidang Field	Judul Kajian Risiko Risk Study Title
6	Akuntansi	<p>d. Long data collection due to data that is not well organized so that it is late in submitting the RKAP</p> <p>e. The increase in receivables due to the non-optimal monitoring of receivables causes the collection process to be hampered so that the Collection of Period (COP) target is not achieved</p> <p>f. PLNE was late in issuing invoices due to BAPP problems so that the revenue target was not achieved</p> <p>g. The investment realization process is constrained so that the investment achievement target is not achieved</p> <p>a. Kerusakan aset menjadi kerugian perusahaan karena tidak diasuransikan</p> <p>b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan tidak dapat dimanfaatkan karena Vendor PLN E tidak setor lapor pajak (tidak tertib pajak).</p> <p>c. Rasio Ebitda Tidak Tercapai 100% karena penyerapan biaya tidak sesuai dengan RKAP</p> <p>d. Rasio Operasi Tidak Tercapai 100% dari KPI Karena pendapatan belum memenuhi target</p> <p>e. Nilai Sinergi AP sebesar 100% tidak tercapai karena target pendapatan dan penyerapan biaya anak perusahaan tidak sesuai RKAP</p> <p>f. Perolehan Nilai Subletting Cost Ratio tidak Tercapai 100% karena masih kurangnya kompetensi SDM dalam penyelesaian pekerjaan</p>
	Accounting	<p>a. Damage to assets is a loss for the company because it is not insured</p> <p>b. Input Value Added Tax (VAT) cannot be used because the PLN E Vendor does not submit tax reports (tax irregularities).</p> <p>c. Ebitda Ratio Not Reached 100% due to cost absorption not in accordance with RKAP</p> <p>d. Operational Ratio Not Reached 100% of KPI Because revenue has not met the target</p> <p>e. The AP Synergy value of 100% was not achieved because the subsidiary's revenue and cost absorption targets were not in accordance with the RKAP</p> <p>f. The Subletting Cost Ratio Value is not 100% achieved because there is still a lack of HR competence in completing work</p>
7	Pengusahaan	<p>a. Kurang terpantaunya realisasi anggaran karena tidak adanya monitoring pengeluaran setiap bulan sehingga berpotensi tingginya pengeluaran terhadap RAB yang ada.</p> <p>b. Kurangnya kesadaran dalam pelaksanaan K3LH karena minimnya sosialisasi sehingga menyebabkan naiknya potensi kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan.</p> <p>c. Tidak lengkapnya dokumen untuk mengukung pengoperasian CNG Bangkanai sehingga berpotensi penghentian pengoperasian unit pada saat adanya audit dari internal maupun eksternal.</p> <p>d. Turunnya jam produksi CNG Bangkanai karena banyaknya pemeliharaan di tahun 2021 sehingga jasa Pre Treatment dan CNG yang diberikan menurun</p> <p>e. Tidak tercapainya penyerapan gas alam 20 BBTUD karena turunnya suplai gas alam dari PT Medco dan penyerapan gas alam oleh PLTMG sehingga adanya jasa makeup yang menjadi pengurangan pendapatan terhadap Take or Pay.</p>
	Business	<p>a. Lack of monitoring of budget realization due to the absence of monitoring of expenditures every month so that there is a potential for high spending on the existing RAB.</p> <p>b. Lack of awareness in the implementation of K3LH due to the lack of socialization, causing an increase in the potential for work accidents and environmental pollution.</p>

No	Bidang Field	Judul Kajian Risiko Risk Study Title
		<p>d. <i>The delay in submitting the follow-up to the auditor's recommendations in accordance with the stipulated time period due to lack of monitoring in the implementation of the follow-up so that there are still auditor findings that have not been followed up</i></p> <p>e. <i>The Quick Win Transformation of PLN's Portfolio at PLNE failed because the Puseulis Transformation affected PLNE, dormant VAT resulted in PLNE's revenue decreasing and REC failing to be acquired, and the ineffective alignment of engineering work with PLN GG</i></p> <p>f. <i>PLNE will experience missleads in short-term strategic programs due to limited human resource capacity and capability so that PLNE does not meet the expectations of shareholders</i></p> <p>g. <i>The results of the corporate customer satisfaction survey and analysis are not well socialized due to the lack of awareness of PLNE personnel towards customer aspirations so that the customer satisfaction KPI for future improvement (OFI) does not increase</i></p> <p>h. <i>Initiating new job opportunities is difficult to implement due to limited resources and expertise in the field of PPK so that PLNE business development is not achieved</i></p> <p>i. <i>The performance of Subsidiaries and Affiliated Companies is not in line with the expectations of Shareholders because the role of the company management is not optimal, resulting in consolidated income and PLNE's consolidated KPI not being achieved, and the value of PLNE's investment in the company decreasing.</i></p>
9	Pemasaran Marketing	<p>a. Penyelesaian Pekerjaan Enjiniring KIT dan TND Terkendala</p> <p>b. PLNE tidak memperoleh pekerjaan/penugasan baru dengan nilai kontrak/penugasan yang mendukung target pendapatan</p> <p>c. Kualitas Layanan tidak sesuai dengan ekspektasi pelanggan</p> <p>a. <i>Completion of KIT and TND Engineering Work is Constrained</i></p> <p>b. <i>PLNE does not get a new job/assignment with a contract/assignment value that supports the revenue target</i></p> <p>c. <i>Service quality does not match customer expectations</i></p>
10	Sekper	<p>a. Penyampaian kelengkapan evidence KPI Korporat belum optimal karena belum maksimalnya monitoring dalam pemenuhan evidence sesuai dengan SE Kinerja terbaru sehingga skor pencapaian Kontrak Manajemen tidak maksimal</p> <p>b. Pelaksanaan CSR di PLNE belum optimal karena belum maksimalnya monitoring pelaksanaan sesuai pedoman yang berlaku sehingga persentase ketercapaian pelaksanaan dari program CSR yang telah disusun sangat minim</p> <p>c. Pengesahan Laporan Manajemen yang terlambat karena kurang maksimalnya monitoring dalam penyusunan laporan tiap bidang sesuai dengan PE sehingga Laporan Manajemen disahkan lewat dari tanggal 12 setiap triwulannya</p> <p>d. Kontrol SMKI yang melekat pada subbidang TI tidak terpenuhi karena keterbatasan resource TI sehingga peningkatan manajemen stakeholder dan regulasi tidak tercapai</p> <p>e. Ketidakhandalan Aplikasi VC karena banyaknya bug pada Aplikasi sehingga Peningkatan Pemanfaatan IT dan Teknologi Ketenagalistrikan tidak tercapai</p> <p>f. Hak-hak dan kepentingan hukum PLNE di dalam perjanjian antara pemberi kerja dengan PLNE tidak terlindungi karena Sub Bidang Hukum tidak memiliki referensi template perjanjian yang sama.</p> <p>g. Penyampaian hasil review perjanjian antara pemberi kerja dengan PLNE tidak tepat waktu karena tingginya permintaan asistensi hukum secara tiba-tiba sehingga draft tidak dapat segera difinalkan.</p>

No	Bidang Field	Judul Kajian Risiko Risk Study Title
	Corporate Secretary	<p>h. Tidak diterimanya draft perubahan atas keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 208.K/DIR/2010 tentang Pengamanan Layanan Jasa Enjiniring untuk Optimalisasi Investasi dan Operasi Sistem Ketenagalistrikan sehingga Pekerjaan yang diterima oleh PLNE dari PLN tidak pasti karena pemberian pekerjaan dari GM/EVP PLN (Pejabat 1 level di bawah Direksi PLN) hanya dapat dilakukan melalui proses pengadaan barang/jasa</p> <p>i. Kajian hukum tidak memberikan opini hukum yang komprehensif sesuai permasalahan yang dihadapi karena kebutuhan yang mendesak</p> <p>j. Tidak terpantaunya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses bisnis PLNE sehingga peraturan internal PLNE tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>k. Insan PLNE tidak memahami ketentuan dalam peraturan internal PLNE terkait kepatuhan karena kurangnya informasi.</p> <p>a. <i>Submission of complete evidence of Corporate KPIs is not optimal because monitoring is not maximal in fulfilling evidence in accordance with the latest SE performance so that the achievement score for Management Contracts is not optimal</i></p> <p>b. <i>The implementation of CSR at PLNE has not been optimal because monitoring of the implementation has not been maximized in accordance with applicable guidelines so that the percentage of achievement of the implementation of the CSR program that has been prepared is very minimal.</i></p> <p>c. <i>Late approval of Management Reports due to lack of maximum monitoring in the preparation of reports for each sector in accordance with PE so that Management Reports are ratified after the 12th of every quarter</i></p> <p>d. <i>The control of the ISMS inherent in the IT sub-sector is not fulfilled due to limited IT resources so that the improvement of stakeholder management and regulation is not achieved</i></p> <p>e. <i>The unreliability of the VC application due to the many bugs in the application so that the increase in the utilization of IT and electricity technology is not achieved</i></p> <p>f. <i>PLNE's legal rights and interests in the agreement between the employer and PLNE are not protected because the Legal Sub-Sector does not have a reference to the same agreement template.</i></p> <p>g. <i>The submission of the results of the review of the agreement between the employer and PLNE was not timely due to the sudden high demand for legal assistance so that the draft could not be finalized immediately.</i></p> <p>h. <i>No acceptance of the draft amendments to the decision of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 208.K/DIR/2010 concerning Securing Engineering Services for Optimizing Investment and Operation of the Electricity System so that the work received by PLNE from PLN is uncertain because the assignment of work from the GM/EVP PLN (Officer 1 level below the PLN Directors) can only be done through process of procurement of goods/services</i></p> <p>i. <i>Legal studies do not provide a comprehensive legal opinion according to the problems faced due to urgent needs</i></p> <p>j. <i>The laws and regulations related to PLNE's business processes are not monitored so that PLNE's internal regulations are not in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.</i></p> <p>k. <i>PLNE personnel do not understand the provisions in PLNE's internal regulations regarding compliance due to lack of information.</i></p>

No	Bidang Field	Judul Kajian Risiko Risk Study Title
11	Satuan Pengawasan Intern <i>Internal Control Unit</i>	<p>a. Temuan auditor internal dan eksternal belum terselesaikan sesuai dengan target yang telah ditentukan karena kurangnya pemahaman auditee sehingga target kinerja satuan tidak tercapai</p> <p>b. Audit Internal tidak terlaksana sesuai perencanaan karena belum mencukupinya kapabilitas auditor sehingga Target kinerja satuan tidak tercapai</p> <p>a. <i>The findings of the internal and external auditors have not been resolved in accordance with the predetermined targets due to lack of understanding of the auditee so that the unit's performance targets are not achieved</i></p> <p>b. <i>Internal audit was not carried out according to plan because the auditor's capability was not sufficient so that the unit's performance target was not achieved</i></p>
12	Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu dan Risiko	<p>a. Risiko RKAP belum bisa mewakili risiko utama perusahaan secara komprehensif karena penetapan indikator penyebab risiko belum tepat sehingga penyusunan RKAP berbasis Risiko menjadi tidak sempurna</p> <p>b. Pengambilan keputusan sesuai peran 2nd lines of defense belum sepenuhnya didukung oleh kajian risiko yang komprehensif karena kurangnya pemahaman insan PLNE mengenai risiko sehingga pelaksanaan three lines of defense belum bisa maksimal</p> <p>c. Implementasi Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT) tidak konsisten karena komitmen Manajemen Puncak kurang, keterlibatan insan PLNE masih secara parsial dan ketidakcukupan dokumen sehingga sasaran perusahaan tidak tercapai;</p> <p>d. Jadwal Pengadaan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan tidak memenuhi prinsip GCG karena Tinjauan RKS yang berulang, durasi evaluasi dokumen penawaran yang lama dan penyusunan kontrak yang memakan waktu lama sehingga operasional pekerjaan terhambat</p>

• **IMPLEMENTASI PROGRAM KERJA MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2021**

Berikut kegiatan-kegiatan Manajemen Risiko yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 :

1. Mereview Profil Risiko Korporat tahun 2021 yang telah disusun pada akhir tahun 2020;
2. Ratifikasi dan sosialisasi Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi dan Statment of Corporat Intent (SCI);
3. Membentuk Tim *Enterprise Risk Management* Tahun 2021;
4. Mengadakan Pelatihan Manajemen Risiko untuk BOC, BOD, beberapa Vice President, dan anggota Fungsi Manajemen Risiko di SPMR;
5. Penyusunan Profil Risiko Bidang untuk setiap Bidang, Satuan dan Sekper;
6. Pemantauan mitigasi Profil Risiko Bidang pada aplikasi RICO setiap bulan;

• **RISK MANAGEMENT WORK PROGRAM IMPLEMENTATION IN 2021**

The following are the Risk Management activities that have been carried out in 2021:

1. *Reviewing the 2021 Corporate Risk Profile which has been prepared at the end of 2020;*
2. *Ratification and dissemination of the General Guidelines for Integrated Risk Management and the Statement of Corporate Intent (SCI);*
3. *Establishing an Enterprise Risk Management Team in 2021;*
4. *Conducting Risk Management Training for BOC, BOD, several Vice Presidents, and members of the Risk Management Function at SPMR;*
5. *Preparation of Field Risk Profiles for each Field, Unit and Secretariat;*
6. *Monitoring of the Field Risk Profile mitigation on the RICO application every month;*

7. Pemantauan mitigasi Profil Risiko Korporat dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada PT PLN (Persero) SDT MRO setiap akhir Triwulan;
8. Pembuatan *Roadmap* MRT bersama Konsultan;
9. Ratifikasi dan email *blasting* Juknis dan kriteria RMM PT PLN (Persero);
10. Telah dilaksanakan kegiatan *By One Get Excellent* (BOGE) terkait *Refreshment* Mekanisme Kajian Risiko Pengambilan Keputusan, Manajemen Risiko Terintegrasi, dan Four Eyes Principle.
11. Pemenuhan *Risk Maturity Level* PT PLN Enjiniring Tahun 2021 yang diverifikasi oleh PT PLN (Persero) SDT MRO dengan skor akhir 3,22.

7. *Monitoring the mitigation of the Corporate Risk Profile and reporting the results of its implementation to PT PLN (Persero) SDT MRO at the end of each Quarter;*
8. *Making MRT Roadmap with Consultants;*
9. *Ratification and email blasting of Technical Guidelines and RMM criteria of PT PLN (Persero);*
10. *By One Get Excellent (BOGE) activities have been carried out related to Refreshment of Decision-Making Risk Study Mechanisms, Integrated Risk Management, and the Four Eyes Principle.*
11. *Fulfillment of PT PLN Enjiniring's 2021 Risk Maturity Level verified by PT PLN (Persero) SDT MRO with a final score of 3.22.*

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI

Perusahaan mengaplikasikan sistem manajemen yang terdiri atas Sistem Manajemen Mutu (SMM), Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) secara terintegrasi.

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

The company applies a management system consisting of an integrated Quality Management System (QMS), Occupational Health and Safety Management System (SMK3) and Anti-Bribery Management System (SMAP).

SISTEM MANAJEMEN MUTU

Perseroan mempunyai komitmen untuk menerapkan manajemen mutu guna meningkatkan kualitas produk secara berkesinambungan. Dalam rangka penerapan manajemen mutu tersebut, Perseroan secara terus menerus memperbaiki dan mendokumentasikan prosedur-prosedur yang ada sehingga dapat memenuhi kriteria sertifikasi manajemen mutu. Perseroan secara berkala melakukan audit internal pelaksanaan manajemen mutu di tiap unit kerja. Perseroan juga senantiasa meningkatkan sertifikasi manajemen mutu yang telah dimiliki, di samping berupaya memperoleh sertifikasi-sertifikasi lain yang dipersyaratkan dalam aktivitas usaha.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

The Company is committed to implementing quality management in order to continuously improve product quality. In order to implement the quality management, the Company continuously improves and documents the existing procedures so that it can meet the quality management certification criteria. The Company periodically conducts internal audits of the implementation of quality management in each work unit. The Company also continuously improves the quality management certification that it already has, in addition to trying to obtain other certifications required in business activities.

Perusahaan telah memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2015 PLN Enjiniring dengan Lingkup Sistem Manajemen Mutu yang berlaku untuk Desain Enjiniring (*Feasibility Study, Design Review, Bidding Document*) dan Supervisi Konstruksi Instalasi Ketenagalistrikan; di samping itu perlu untuk memperluas secara keseluruhan Lingkup Enjiniring, yaitu Desain Rinci, Pembuatan Dokumen Lelang dan *Design Review* Proyek sesuai lingkup kerja

The company has obtained the PLN Enjiniring ISO 9001:2015 Certification with a Quality Management System Scope that applies to Engineering Design (Feasibility Study, Design Review, Bidding Document) and Supervision of Electricity Installation Construction; In addition, it is necessary to expand the overall Scope of Engineering, namely Detailed Design, Preparation of Bidding Documents and Project Design Reviews according to the existing scope of work. As a main

yang sudah ada. Sebagai pertimbangan utama, bahwa Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, sebagai tool dalam rangka menjaga dan mendukung proses bisnis serta produk yang dihasilkan PLN Enjiniring.

Sistem Manajemen Mutu ini telah banyak membantu dalam rangka pengelolaan proses bisnis di Perusahaan untuk menyelesaikan setiap penugasan agar supaya tepat waktu dan sesuai dengan persyaratan mutu, baik dari sisi kontrak penugasan maupun standar lingkup enjiniring yang berlaku. Sertifikasi yang diperoleh berlaku dalam periode 3 (tiga) tahun, dengan periode *surveillance* tiap semester, dan pada tahun 2020 Sertifikat tersebut telah diperbaharui yang berlaku sampai dengan tahun 2023.

Pada tahun 2021, PT PLN Enjiniring telah berhasil:

1. Mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015 dengan lingkup Desain Enjiniring (*Feasibility Study, Design Review, Bidding Document*) dan Supervisi Konstruksi Instalasi Ketenagalistrikan melalui audit survailen ISO 9001:2015.
2. Memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai ISO 37001:2016 dengan lingkup proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Perusahaan yang melibatkan fungsi Perencana Pengadaan dan Pelaksana Pengadaan termasuk pengadaan yang dilaksanakan oleh Bidang sesuai dengan batasan kewenangannya dan didukung oleh fungsi lainnya yaitu Keuangan dan Non Keuangan.

1. Pelaksanaan Manajemen Mutu

Selama tahun 2021 kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka implementasi manajemen mutu perusahaan sebagai berikut :

1. Menyusun dan melakukan *review* terhadap beberapa Prosedur Enjiniring
2. Pemutakhiran Pedoman, Kebijakan, Sasaran & Tujuan
3. Sosialisasi Pedoman Sistem Manajemen Terintegrasi
4. Sosialisasi Kebijakan dan Komitmen SMT
5. Sosialisasi Sasaran dan Tujuan SMT
6. Sosialisasi Prosedur setiap semester

consideration, the ISO 9001:2015 Quality Management System, as a tool in order to maintain and support business processes and products produced by PLN Enjiniring.

This Quality Management System has helped a lot in managing business processes in the Company to complete each assignment so that it is timely and in accordance with quality requirements, both in terms of the assignment contract and the applicable engineering scope standards. The certification obtained is valid for a period of 3 (three) years, with a surveillance period each semester, and in 2020 the certificate has been renewed which is valid until 2023.

In 2021, PT PLN Enjiniring has succeeded in:

1. *Maintaining ISO 9001:2015 certification with the scope of Engineering Design (Feasibility Study, Design Review, Bidding Document) and Supervision of Electricity Installation Construction through ISO 9001:2015 surveillance audit.*
2. *Obtained an Anti-Bribery Management System (SMAP) certificate in accordance with ISO 37001:2016 with the scope of the procurement process for goods/services within the Company involving the functions of the Procurement Planner and Procurement Executor, including procurement carried out by the Division in accordance with the limits of their authority and supported by other functions, namely Financial and Non-Financial.*

1. Implementation of Quality Management

During 2021 the activities that have been carried out in the context of implementing the company's quality management are as follows:

1. *Develop and review several Engineering Procedures*
2. *Update on Guidelines, Policies, Goals & Objectives*
3. *Dissemination of Integrated Management System Guidelines*
4. *Socialization of SMT Policy and Commitment*
5. *Socialization of SMT Goals and Objectives*
6. *Procedure socialization every semester*

7. Pelaksanaan Audit Internal SMT yang terdiri dari SMM, SMK3 dan SMAP sesuai dengan nya
8. Melaksanakan tinjauan manajemen atas pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu, SMK3 dan SMAP
9. Pelaksanaan Audit Surveiln-1 ISO 9001:2015
10. Pelaksanaan Audit Sertifikasi ISO 37001:2016

7. *Implementation of SMT Internal Audit consisting of SMM, SMK3 and SMAP in accordance with it*
8. *Carry out a management review of the implementation of the Quality Management System, SMK3 and SMAP*
9. *Implementation of ISO 9001:2015 Surveillance-1 Audit*
10. *Implementation of ISO 37001:2016 Certification Audit*

2. Pengelolaan Sistem Manajemen Mutu

Satuan Manajemen Mutu & Risiko secara berkala membuat Jadwal Program Audit Mutu Internal, pemeriksaan pemastian mutu (*quality assurance*) dengan rujukan Standard, pedoman mutu, prosedur enjiniring dan acuan lainnya termasuk regulasi atau peraturan pemerintah. Pemeriksaan mutu lainnya adalah pemeriksaan mutu produk (*quality control*) yang berkaitan dengan Pemeriksaan Teknis Manajemen yang di atur dalam Prosedur Enjiniring yang berlaku. Pada prinsipnya hierarki sistem manajemen mutu terdiri:

Level 1 (satu) merupakan Kebijakan-Kebijakan dan Pedoman Sistem Manajemen Terintegrasi;

Level 2 (dua) merupakan Prosedur Enjiniring PLN Enjiniring (PE PLNE);

Level 3 (tiga) merupakan Petunjuk Teknis Enjiniring PLN Enjiniring (PTE);

Level 4 (empat) merupakan Formulir dan *Logsheet* di atur di dalam masing-masing Bidang sesuai dengan kebutuhannya.

Pada tahun 2021 telah dilakukan review dan melakukan revisi terhadap beberapa Prosedur Enjiniring untuk perbaikan proses serta melakukan penyusunan prosedur baru dalam rangka implementasi Sistem Manajemen Terintegrasi. Total keseluruhan Prosedur Enjiniring (PE) sebanyak 91 dokumen dan Petunjuk Teknis Enjiniring (PTE) sebanyak 31 dokumen. Adapun Prosedur Enjiniring yang telah ditetapkan, antara lain:

2. Quality Management System Management

The Quality & Risk Management Unit periodically makes Internal Quality Audit Program Schedules, quality assurance checks with reference to Standards, quality guidelines, engineering procedures and other references including government regulations or regulations. Other quality inspections are product quality checks (quality control) related to Management Technical Inspections regulated in the applicable Engineering Procedures. In principle, the quality management system hierarchy consists of:

Level 1 (one) is the Integrated Management System Policies and Guidelines;

Level 2 (two) is the PLN Enjiniring Procedure (PE PLNE);

Level 3 (three) is the PLN Enjiniring Technical Guidelines (PTE);

Level 4 (four) is a Form and Logsheet arranged in each Field according to their needs.

In 2021, a review and revision of several Engineering Procedures was carried out for process improvement as well as the preparation of new procedures for the implementation of the Integrated Management System. The total number of Engineering Procedures (PE) is 91 documents and Engineering Technical Instructions (PTE) are 31 documents. The Engineering Procedures that have been established include:

- | | | | |
|---------------------|--|---------------------|---|
| 1. PE.PLNE.P.01.01 | Prosedur Siklus Proyek Enjiniring | 1. PE.PLNE.P.01.01 | Engineering Project Cycle Procedure |
| 2. PE.PLNE.P.01.02 | Prosedur Pengelolaan Risiko dan Monitoring KRI | 2. PE.PLNE.P.01.02 | KRI Risk Management and Monitoring Procedures |
| 3. PE.PLNE.P.01.03 | Prosedur Penyusunan Dokumen Lelang/RKS Pengadaan Barang/Jasa | 3. PE.PLNE.P.01.03 | Procedure for Preparation of Auction Documents/RKS for the Procurement of Goods/Services |
| 4. PE.PLNE.P.01.04 | Prosedur Penyusunan Harga Perkiraan Enjinir (HPE) Pengadaan Barang/Jasa | 4. PE.PLNE.P.01.04 | Procedure for Preparation of Engineer's Estimated Price (HPE) for the Procurement of Goods/Services |
| 5. PE.PLNE.P.01.05 | Prosedur Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa | 5. PE.PLNE.P.01.05 | Procedure for Preparation of Self-Estimated Prices (HPS) for the Procurement of Goods/Services |
| 6. PE.PLNE.P.01.06 | Prosedur Tinjauan Dokumen Lelang/RKS dan HPE Pengadaan Barang/Jasa | 6. PE.PLNE.P.01.06 | Procedure for Reviewing Tender Documents/RKS and HPE for the Procurement of Goods/Services |
| 7. PE.PLNE.D.01.01 | Prosedur Penyusunan, Pengendalian & Penggunaan Dokumen SMT | 7. PE.PLNE.D.01.01 | Procedure for Preparation, Control & Use of SMT Documents |
| 8. PE.PLNE.D.01.02 | Prosedur Pengendalian Dokumen Non Proyek | 8. PE.PLNE.D.01.02 | Procedure for Non-Project Document Control |
| 9. PE.PLNE.D.01.03 | Prosedur Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Barang/Jasa | 9. PE.PLNE.D.01.03 | Procedure for Evaluation of Documents for Procurement of Goods/Services |
| 10. PE.PLNE.D.01.04 | Prosedur Klarifikasi dan Negosiasi Dokumen Penawaran Pengadaan Barang/Jasa | 10. PE.PLNE.D.01.04 | Procedure for Clarification and Negotiation of Documents for Procurement of Goods/Services |
| 11. PE.PLNE.D.01.05 | Prosedur Laporan Pengadaan dan Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa | 11. PE.PLNE.D.01.05 | Procedure for Procurement Report and Announcement of Winners of Procurement of Goods/Services |
| 12. PE.PLNE.D.01.06 | Prosedur Pengadaan di Bidang | 12. PE.PLNE.D.01.06 | Procurement Procedures in the Field |
| 13. PE.PLNE.C.01.01 | Prosedur Audit Internal SMT | 13. PE.PLNE.C.01.01 | SMT Internal Audit Procedure |
| 14. PE.PLNE.C.01.02 | Prosedur Pemastian Mutu (QA) Produk Enjiniring | 14. PE.PLNE.C.01.02 | Engineering Product Quality Assurance (QA) Procedure |
| 15. PE.PLNE.C.01.03 | Prosedur Evaluasi Unjuk Kerja Sub Konsultan | 15. PE.PLNE.C.01.03 | Procedure for Evaluation of Sub-Consultant Performance |
| 16. PE.PLNE.A.01.01 | Prosedur Rapat Direksi Pengambilan Keputusan | 16. PE.PLNE.A.01.01 | Procedure for Board of Directors Meeting Decision Making |
| 17. PE.PLNE.A.01.02 | Prosedur Kebijakan Kompensasi Mutu Produk | 17. PE.PLNE.A.01.02 | Product Quality Compensation Policy Procedure |
| 18. PE.PLNE.P.02.01 | Prosedur Penyusunan IT Master Plan | 18. PE.PLNE.P.02.01 | Procedure for Preparation of IT Master Plan |
| 19. PE.PLNE.P.02.02 | Prosedur Penyusunan Anggaran TI | 19. PE.PLNE.P.02.02 | IT Budgeting Procedure |
| 20. PE.PLNE.P.02.03 | Prosedur Pengelolaan Website dan Portal | 20. PE.PLNE.P.02.03 | Website and Portal Management Procedure |



21. PE.PLNE.P.02.04	Prosedur	Pengelolaan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Lingkungan PT PLN Enjiniring	21. PE.PLNE.P.02.04	Procedure	for the Management of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in PT PLN Enjiniring
22. PE.PLNE.P.02.05	Prosedur	Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja	22. PE.PLNE.P.02.05	Procedure	for Preparation, Monitoring and Evaluation of Performance
23. PE.PLNE.D.02.01	Prosedur	Asistensi Hukum	23. PE.PLNE.D.02.01	Legal Assistance	Procedure
24. PE.PLNE.D.02.02	Prosedur	Kajian Hukum	24. PE.PLNE.D.02.02	Legal Study	Procedure
25. PE.PLNE.D.02.03	Prosedur	Penyelesaian Sengketa Litigasi	25. PE.PLNE.D.02.03	Litigation Dispute Resolution	Procedure
26. PE.PLNE.D.02.04	Prosedur	Penyelesaian Perselisihan Non Litigasi	26. PE.PLNE.D.02.04	Procedure for Settlement of Non-Litigation Disputes	
27. PE.PLNE.D.02.05	Prosedur	Penggunaan Aplikasi Perangkat Enjiniring	27. PE.PLNE.D.02.05	Procedure for Using Applications for Engineering Tools	
28. PE.PLNE.D.02.06	Prosedur	Pengelolaan Akun Pengguna	28. PE.PLNE.D.02.06	User Account Management	Procedure
29. PE.PLNE.D.02.07	Prosedur	Penyusunan Analisa Dampak Perubahan Perundang-Undangan Terbaru Yang Terkait Dengan Proses Bisnis PLN Enjiniring	29. PE.PLNE.D.02.07	Procedure for Compilation of Impact Analysis of Recent Changes in Laws Related to PLN Enjiniring Business Processes	
30. PE.PLNE.D.02.08	Prosedur	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi	30. PE.PLNE.D.02.08	Training Procedure for Using Information System Applications	
31. PE.PLNE.D.02.09	Prosedur	Penyusunan Laporan Manajemen	31. PE.PLNE.D.02.09	Management Report Preparation	Procedure
32. PE.PLNE.D.02.11	Prosedur	Bantuan Penggunaan Teknologi Informasi	32. PE.PLNE.D.02.11	Procedure for Assistance in Using Information Technology	
33. PE.PLNE.D.02.12	Prosedur	Pelaksanaan Program CSR	33. PE.PLNE.D.02.12	CSR Program Implementation	Procedure
34. PE.PLNE.C.02.01	Prosedur	Review Perjanjian	34. PE.PLNE.C.02.01	Agreement Review	Procedure
35. PE.PLNE.A.02.01	Prosedur	Pengelolaan Penanganan Insiden TI	35. PE.PLNE.A.02.01	IT Incident Management	Procedures
36. PE.PLNE.A.02.02	Prosedur	Pengembangan dan Pengujian Aplikasi Sistem Informasi	36. PE.PLNE.A.02.02	Information System Application Development and Testing	Procedure
37. PE.PLNE.P.03.01	Prosedur	Penyusunan Program Kerja Bidang/Satuan Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)	37. PE.PLNE.P.03.01	Procedure for Preparation of Field/Unit Work Programs in the Company's Work Plan and Budget (RKAP)	
38. PE.PLNE.D.03.01	Prosedur	Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan	38. PE.PLNE.D.03.01	Procedure for Conducting Customer Satisfaction Survey	
39. PE.PLNE.A.03.01	Prosedur	Penanganan Keluhan dan Aspirasi Pelanggan	39. PE.PLNE.A.03.01	Procedure for Handling Customer Complaints and Aspirations	
40. PE.PLNE.P.04.01	Prosedur	Ketentuan Penomoran dan Penyusunan Register Proyek	40. PE.PLNE.P.04.01	Procedures for Numbering and Compiling Project Registers	
41. PE.PLNE.P.04.02	Prosedur	Penyusunan Rencana Kegiatan Proyek	41. PE.PLNE.P.04.02	Procedure for Preparation of Project Activity Plan	

42. PE.PLNE.P.04.03	Prosedur Tinjauan Peluang dan Risiko Penugasan Proyek	42. PE.PLNE.P.04.03	<i>Procedure for Reviewing Opportunities and Risks of Project Assignment</i>
43. PE.PLNE.D.04.01	Prosedur Penyusunan Dokumen Penawaran Administrasi Teknis dan Harga	43. PE.PLNE.D.04.01	<i>Procedure for Preparation of Bidding Technical Administration and Price Documents</i>
44. PE.PLNE.A.04.01	Prosedur Pembatalan Surat Penugasan	44. PE.PLNE.A.04.01	<i>Procedure for Cancellation of Assignment Letter</i>
45. PE.PLNE.P.05.01	Prosedur Pembentukan, Perubahan dan Pembubaran Tim Proyek	45. PE.PLNE.P.05.01	<i>Procedure for Formation, Change and Disbandment of the Project Team</i>
46. PE.PLNE.P.05.02	Prosedur Penyusunan DPD/DPDR/DPSK	46. PE.PLNE.P.05.02	<i>Procedure for Preparation of DPD/DPDR/DPSK</i>
47. PE.PLNE.P.05.03	Prosedur Penyusunan Rencana Mutu Proyek (RMP)	47. PE.PLNE.P.05.03	<i>Procedure for Preparation of Project Quality Plan (RMP)</i>
48. PE.PLNE.P.05.04	Prosedur Penomoran Dokumen/Gambar Proyek	48. PE.PLNE.P.05.04	<i>Procedure for Numbering Project Documents/Drawings</i>
49. PE.PLNE.P.05.05	Prosedur Penyusunan, Perubahan, dan Penutupan Rencana Biaya Produksi	49. PE.PLNE.P.05.05	<i>Procedure for Preparation, Amendment, and Closing of Production Cost Plans</i>
50. PE.PLNE.D.05.01	Prosedur Monitoring Kemajuan Proyek	50. PE.PLNE.D.05.01	<i>Project Progress Monitoring Procedure</i>
51. PE.PLNE.D.05.02	Prosedur Penyusunan Dokumen Feasibility Study	51. PE.PLNE.D.05.02	<i>Procedure for Preparation of Feasibility Study Documents</i>
52. PE.PLNE.D.05.05	Prosedur Penyusunan Dokumen Lelang (Bidding Document)/ Rencana Kerja dan Syarat	52. PE.PLNE.D.05.05	<i>Procedure for Preparation of Bidding Document/Work Plan and Conditions</i>
53. PE.PLNE.D.05.06	Prosedur Penyusunan Harga Perkiraan Enjinir	53. PE.PLNE.D.05.06	<i>Procedure for Preparation of Engineer's Estimated Price</i>
54. PE.PLNE.D.05.07	Prosedur Pendampingan Pengadaan	54. PE.PLNE.D.05.07	<i>Procurement Assistance Procedure</i>
55. PE.PLNE.D.05.08	Prosedur Design Review	55. PE.PLNE.D.05.08	<i>Design Review Procedure</i>
56. PE.PLNE.D.05.09	Prosedur Pembuatan Detailed Design	56. PE.PLNE.D.05.09	<i>Procedure for Making Detailed Design</i>
57. PE.PLNE.D.05.10	Prosedur Pelaksanaan Supervisi Konstruksi	57. PE.PLNE.D.05.10	<i>Construction Supervision Implementation Procedure</i>
58. PE.PLNE.D.05.11	Prosedur Pelaksanaan Supervisi Konstruksi (Consultant Leading)	58. PE.PLNE.D.05.11	<i>Construction Supervision Implementation Procedure (Consultant Leading)</i>
59. PE.PLNE.D.05.12	Prosedur Pelaksanaan Supervisi Masa Pemeliharaan	59. PE.PLNE.D.05.12	<i>Procedure for Implementation of Maintenance Period Supervision</i>
60. PE.PLNE.D.05.13	Prosedur Pengendalian Dokumen Proyek	60. PE.PLNE.D.05.13	<i>Project Document Control Procedure</i>
61. PE.PLNE.D.05.14	Prosedur Penyelesaian Dokumen dan BAPP	61. PE.PLNE.D.05.14	<i>Procedure for Completion of Documents and BAPP</i>
62. PE.PLNE.D.05.15	Prosedur Penutupan Proyek	62. PE.PLNE.D.05.15	<i>Project Closure Procedure</i>



63. PE.PLNE.D.05.16	Prosedur Pengendalian Dokumen Perangkat Enjiniring	63. PE.PLNE.D.05.16	Engineering Equipment Document Control Procedure
64. PE.PLNE.D.05.17	Prosedur Rekrutmen Karyawan PKWT Konstruksi	64. PE.PLNE.D.05.17	Recruitment Procedures for Construction PKWT Employees
65. PE.PLNE.D.05.18	Prosedur Layanan Jasa Enjiniring dari Internal PLNE	65. PE.PLNE.D.05.18	Procedure for Engineering Services from Internal PLNE
66. PE.PLNE.D.05.19	Prosedur Penerimaan Gambar Supervisi Konstruksi	66. PE.PLNE.D.05.19	Procedure for Accepting Construction Supervision Drawings
67. PE.PLNE.D.05.20	Prosedur Pelaksanaan Mobilisasi dan Demobilisasi Personil	67. PE.PLNE.D.05.20	Procedure for Personnel Mobilization and Demobilization
68. PE.PLNE.D.05.22	Prosedur Pembayaran Subkonsultan di Direktorat Enjiniring	68. PE.PLNE.D.05.22	Payment Procedures for Sub-consultants at the Engineering Directorate
69. PE.PLNE.C.05.01	Prosedur Pengawasan Waktu Kerja	69. PE.PLNE.C.05.01	Procedure for Supervision of Working Time
70. PE.PLNE.C.05.02	Prosedur Pemeriksaan Teknis	70. PE.PLNE.C.05.02	Technical Inspection Procedure
71. PE.PLNE.C.05.03	Prosedur Pengendalian Mutu Produk Enjiniring	71. PE.PLNE.C.05.03	Engineering Product Quality Control Procedure
72. PE.PLNE.C.05.04	Prosedur Persetujuan Progres Pekerjaan Kontraktor	72. PE.PLNE.C.05.04	Contractor Work Progress Approval Procedure
73. PE.PLNE.A.05.01	Prosedur Permohonan Pelayanan Enjiniring	73. PE.PLNE.A.05.01	Procedure for Application for Engineering Services
74. PE.PLNE.A.05.02	Prosedur Perubahan Desain Proyek di Lapangan	74. PE.PLNE.A.05.02	Procedure for Changes in Project Design in the Field
75. PE.PLNE.A.05.03	Prosedur Penyusunan Dokumen Amandemen Kontrak dengan Pemberi Kerja	75. PE.PLNE.A.05.03	Procedure for Drafting Contract Amendment Documents with Employers
76. PE.PLNE.A.05.04	Prosedur Laporan Umpan Balik Pengalaman Pelaksanaan Kontrak	76. PE.PLNE.A.05.04	Procedure for Reporting Feedback on Contract Execution Experience
77. PE.PLNE.A.05.05	Prosedur Pengendalian Ketidaksesuaian Produk dan Tindakan Korektif	77. PE.PLNE.A.05.05	Product Non-conformance Control Procedures and Corrective Action
78. PE.PLNE.D.06.01	Prosedur Penagihan Jasa Pre-Treatment dan CNG Bangkanai	78. PE.PLNE.D.06.01	Procedure for Billing for Bangkanai Pre-Treatment and CNG Services
79. PE.PLNE.D.06.02	Prosedur Pelaksanaan Penagihan Invoice	79. PE.PLNE.D.06.02	Procedure for Invoice Billing
80. PE.PLNE.C.06.01	Prosedur Sistem Informasi Terintegrasi (SIT) untuk Monitoring Pendapatan PLN Enjiniring	80. PE.PLNE.C.06.01	Procedure for Integrated Information System (SIT) for Monitoring PLN Enjiniring Revenues
81. PE.PLNE.C.07.01	Prosedur Rekonsiliasi Proyek	81. PE.PLNE.C.07.01	Project Reconciliation Procedure
82. PE.PLNE.C.07.02	Prosedur Inventarisasi Aset Tetap	82. PE.PLNE.C.07.02	Procedure for Inventory of Fixed Assets
83. PE.PLNE.P.08.01	Prosedur Pelaksanaan dan Evaluasi Pelatihan	83. PE.PLNE.P.08.01	Training Implementation and Evaluation Procedure

- 84. PE.PLNE.D.08.01 Prosedur Rekrutmen Karyawan PKWT
- 85. PE.PLNE.D.08.02 Prosedur Pengajuan ATK, Peralatan Kantor, Komputer, dan Peripheral
- 86. PE.PLNE.D.08.03 Prosedur Penggunaan kendaraan Operasional
- 87. PE.PLNE.D.08.04 Prosedur Pemusnahan Arsip Dokumen
- 88. PE.PLNE.D.08.05 Prosedur Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
- 89. PE.PLNE.D.08.06 Prosedur Pelaksanaan Fit and Proper Test Jabatan Struktural
- 90. PE.PLNE.D.10.01 Prosedur Operasi CNG Plant Bangkanai
- 91. PE.PLNE.D.10.02 Prosedur Pemeliharaan CNG Plant Bangkanai

- 84. PE.PLNE.D.08.01 PKWT Employee Recruitment Procedure
- 85. PE.PLNE.D.08.02 Procedure for Submission of ATK, Office Equipment, Computers, and Peripherals
- 86. PE.PLNE.D.08.03 Operational Vehicle Usage Procedure
- 87. PE.PLNE.D.08.04 Procedure for Destruction of Document Archives
- 88. PE.PLNE.D.08.05 Facilities and Infrastructure Maintenance Procedure
- 89. PE.PLNE.D.08.06 Procedure for Implementation of Fit and Proper Test for Structural Positions
- 90. PE.PLNE.D.10.01 Operational Procedure of Bangkanai CNG Plant
- 91. PE.PLNE.D.10.02 Maintenance Procedure of Bangkanai CNG Plant

3. Peningkatan Kualitas Produk Enjiniring

Dalam Rangka peningkatan kualitas produk Enjiniring maka pada tahun 2021 PLNE mengupayakan penyempurnaan Perangkat Enjiniring meliputi: Review dan penyempurnaan SMM ISO 9001, Prosedur Enjiniring dan Petunjuk Teknis Enjiniring, termasuk Prosedur dan Petunjuk Teknis di Bidang Supervisi Konstruksi.

3. Improving the Quality of Engineering Products

In order to improve the quality of Engineering products, in 2021 PLNE will seek to improve the Engineering Equipment including: Review and refinement of SMM ISO 9001, Engineering Procedures and Technical Instructions for Engineering, including Procedures and Technical Instructions in the Field of Construction Supervision.

4. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Sesuai Standar ISO 9001:2015, Audit Mutu Internal dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas sistem mutu dan dituangkan dalam PE.PLNE.C.01.01 Prosedur Audit Mutu Internal sebelum dilakukan Audit pihak Eksternal. Pada tahun 2021 audit internal dilakukan pada bulan Agustus yaitu dimulai dari pembukaan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus dan diakhiri dengan penutupan yang dilaksanakan pada tanggal 06 September Serta dilaporkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen tertanggal 22 September 2021.

4. Implementation of Internal Quality Audit

In accordance with the ISO 9001:2015 Standard, Internal Quality Audits are carried out periodically to measure the effectiveness of the quality system and are stated in PE.PLNE.C.01.01 Internal Quality Audit Procedures prior to External Audit. In 2021 the internal audit will be conducted in August, starting with the opening which was held on August 19 and ending with the closing which was held on September 6, and reported in the Management Review Meeting on September 22, 2021.

5. Pelaksanaan Sertifikasi ISO 9001:2015 (Audit Eksternal)

Telah dilaksanakan Audit Eksternal SMM ISO 9001:2015 pada tanggal 27 s.d. 29 September 2021 oleh Lembaga Sertifikasi LMK (PLN PUSERTIF) dengan lingkup Desain Enjiniring (*Feasibility Study, Design Review, Bidding Document*) dan Supervisi Konstruksi Instalasi Ketenagalistrikan.

5. Implementation of ISO 9001:2015 Certification (External Audit)

An ISO 9001:2015 QMS External Audit has been carried out on 27 s.d. 29 September 2021 by the LMK Certification Institute (PLN PUSERTIF) with the scope of Engineering Design (Feasibility Study, Design Review, Bidding Document) and Supervision of Electricity Installation Construction.



Sistem Manajemen K3

HEALTH AND SAFETY SYSTEM MANAGEMENT

SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Penerapan SMK3 bertujuan untuk:

- Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi;
- Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen dan pekerja/karyawan;
- Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien untuk mendorong produktivitas.

SMK3 menjadi salah satu fokus utama korporat dalam implementasi SMK3 di PT PLN Enjiniring. PT PLN Enjiniring menerapkan SMK3 agar tidak terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja baik di PT PLN Enjiniring Kantor Pusat maupun di CNG Plant Bangkanai. Program kerja SMK3 disusun melalui lima elemen yaitu:

- *Man*, menyiapkan personil dan Tim pendukung penerapan SMK3 termasuk sertifikasi dan pelatihan;
- *Machine*, menyiapkan dan memasang instalasi pendukung K3 seperti penangkal petir, hydrant, alarm, dll;
- *Method*, menyiapkan dan menyusun dokumen K3 seperti pedoman, prosedur, intruksi kerja, formulir dll;
- *Management*; menerapkan K3 ke dalam manajemen perusahaan dengan melakukan pemeliharaan dokumen K3, melakukan HIRARC, pemeriksaan kesehatan serta membuat sistem pendukung implementasi K3;

SMK3 (Occupational Safety and Health Management System) is part of the company's overall management system in order to control risks related to work activities in order to create a safe, efficient and productive workplace.

The implementation of Health and Safety System to aims:

- *Increasing the effectiveness of planned, measured, structured and integrated health and safety system;*
- *Prevent and reduce accidents and diseases in the working place by involving management and workers / employees as the elements;*
- *Creating a safe, comfortable and efficient workplace to boost productivity.*

Health and safety system management is one of the company main focus. PT. PLN Enjiniring implemented their health and safety system management to prevent accident and Diseases arising because of the work weather in PT PLN Enjiniring head quarter or in CNG Plant Bangkanai. The Health and safety system management work program is structured through five elements, namely:

- *Man, preparing the personnel and support team to implementing the health ad safety system management including certification and training;*
- *Machine, prepare and install supporting installations of occupational health and safety management systems such as lightning rods, hydrant, alarm, etc;*
- *Method, drafting and repairing health and safety managemnet system documents such as guidelines, procedures, working instructions, forms, etc;*
- *Management; implementing the health and safety management system in company's management by maintaining the health and safety management system documents, conducting HIRARC, health checks and creating support system in impementaion of the health and safety management system;*

- *Money*, menyiapkan anggaran untuk mendukung pemenuhan penerapan SMK3.

Berikut pelaksanaan Sistem Manajemen K3 Tahun 2021:

- Pelaksanaan simulasi Tanggap Darurat kebakaran
- Pelaksanaan Audit Internal SMK3 untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SMK3 dengan Nilai 90,96%
- Pelaksanaan sertifikasi disnaker Ahli K3 Umum (AK3U) dan Ahli K3 Listrik (AK3L)
- Pelaksanaan Rapat P2K3 dan Sosialisasi Pencegahan COVID-19
- Pelaksanaan MCU (Medical Check Up) pada pegawai dengan kategori umur 45 tahun ke atas

Sasaran kegiatan K3 pada tahun 2021 telah tercapai dengan hasil kecelakaan kerja nihil

- *Money*, prepare a budget to support the fulfillment of the implementation of health and safety management system.

Following is the implementation of 2021 Health and safety management system :

- *Emergencies response training.*
- *Internal audit of the Health and Safety Management System to measure the compliance of Health and Safety Management System with 90,96% on score.*
- *Implementation of the Ministry of Manpower certification for General K3 Expert (AK3U) and Electrical K3 Expert (AK3L)*
- *Implementation of P2K3 Meetings and COVID-19 Prevention Socialization*
- *Medical Check Up for the employee above 45 years old.*

The target of Health and Safety activities in 2021 has been achieved with zero work accidents.

Sistem Teknologi Informasi

INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM

Sejalan dengan visinya untuk menjadi Perusahaan Konsultan Enjiniring Terintegrasi yang Terkemuka se-Asia Tenggara dan Pilihan Nomor Satu Pelanggan, PLN Enjiniring terus berbenah untuk tumbuh dan berkembang dalam memenuhi harapan stakeholders. Di tengah perkembangan dunia yang semakin kompleks, PLN Enjiniring senantiasa mengikuti perkembangan zaman salah satunya dengan menggunakan Teknologi Informasi (TI) sebagai alat penyebaran informasi sekaligus sistem kontrol di dalam aktivitas perusahaan.

Di PLN Enjiniring, penerapan Teknologi Informasi dilakukan oleh Sub-bidang Teknologi Informasi (TIF) yang dikelola di bawah Sekretariat Perusahaan. Berikut ini adalah beberapa kegiatan utama bidang TIF PLNE :

KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 01.004 . K/DIR/PLNE/XI/2021 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Jabatan PT PLN Enjiniring menyebutkan bahwa, tugas pokok Bidang Teknologi Informasi (TIF) pada Sekretariat Perusahaan antara lain:

- Merencanakan, melaksanakan dan evaluasi kebijakan penyelarasan antara pengembangan Teknologi Informasi terhadap proses bisnis Perusahaan;
- Merencanakan, melaksanakan dan evaluasi dalam implementasi layanan teknologi dan system informasi Perusahaan sesuai dengan tata kelola teknologi informasi Perusahaan;
- Merencanakan, melaksanakan dan evaluasi dalam mengelola operasional pelayanan infrastruktur dan keamanan sistem informasi Perusahaan yang menjamin ketersediaan, keamanan, keandalan dan keakuratan layanan teknologi informasi;
- Merencanakan, melaksanakan dan evaluasi pengembangan aplikasi sesuai kebutuhan BPO (Business Process Owner) yang telah diajukan;
- Mendukung operasi dan pemeliharaan aplikasi secara periodik;

In line with its vision to become the Leading Integrated Engineering Consulting Company in Southeast Asia and the Number One Choice of Customers, PLN Enjiniring continues to improve to grow and develop in meeting stakeholder expectations. In the midst of an increasingly complex world development, PLN Enjiniring always keeps up with the times, one of which is by using Information Technology (IT) as an information dissemination tool as well as a control system in company activities.

At PLN Enjiniring, the application of Information Technology is carried out by the Information Technology Sub-sector (TIF) which is managed under the Corporate Secretary. The following are some of the main activities in the PLNE TIF sector:

INFORMATION TECHNOLOGY POLICY

Based on the Decree of the Board of Directors No. 01.004 . K/DIR/PLNE/XI/2021 regarding the Organizational Structure and Main Duties of PT PLN Enjiniring stated that the main tasks of the Information Technology Sector (TIF) at the Corporate Secretariat include:

- *Planning, implementing and evaluating policy of alignment between Information Technology development and the Company's business processes;*
- *Planning, implementing and evaluating the implementation of the Company's information technology and system services in accordance with the Company's information technology governance;*
- *Planning, implementing and evaluating the operational management of the Company's information system infrastructure and security services that ensure the availability, security, reliability and accuracy of information technology services;*
- *Planning, implementing and evaluating application development according to the proposed BPO (Business Process Owner) requirements;*
- *Support operation and periodic maintenance*

- Mengoperasikan dan mengelola jaringan internet dan intranet di PT PLN Enjiniring;
- Menyiapkan fasilitas kerja berbasis TI;
- Menjamin kehandalan dan ketersediaan operasi dan infrastruktur di bidang TI;
- Menyusun rencana dan melaksanakan untuk pekerjaan Sub Bidang Teknologi Informasi sesuai dengan arahan Sekretaris Perusahaan;
- Memberikan penilaian tentang kinerja bulanan, semesteran, dan tahunan kepada karyawan yang berada di lingkup Sub Bidang Teknologi Informasi;
- Menyusun rencana dan melaksanakan proses bisnis berbasis risiko, kepatuhan, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) secara berkelanjutan termasuk merencanakan dan menindaklanjuti mitigasi risiko terkait program yang menjadi kewenangannya sesuai dengan arahan Sekretaris Perusahaan;
- Memastikan dan bertanggung jawab terhadap manajemen sumber daya manusia pada Sub Bidang Teknologi Informasi yang berupa optimasi pengelolaan Formasi Tenaga Kerja (FTK), pengembangan kompetensi Pegawai, dan pelaksanaan kegiatan Knowledge Management (KM);
- Memastikan penggunaan aplikasi di lingkungan PT PLN Enjiniring, antara lain : *Knowledge Management System (KMS)*, *Dokumen Manajemen (DM)*, *RICO*, *Intelting*, *eRBAS*, *Virtual Cubicle (VC)*, *Sunfish*, *Aplikasi Manajemen Surat (AMS)*, dan *Business One*, secara optimal dan selaras dengan bidang atau fungsinya, dalam rangka pengelolaan data dan Informasi beserta pemutakhirannya, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas.

Selain terkait tugas pokok, teknologi informasi juga memiliki kebijakan dan pedoman umum tata kelola teknologi informasi yang tertuang pada Keputusan Direksi No. 12.001.K/DIR/PLNE/XI/2018 dan kebijakan dan pedoman umum keamanan informasi elektronik dan teknologi informasi yang tertuang pada Keputusan Direksi No. 13.001.K/DIR/PLNE/XI/2018.

Sebagai pedoman pengembangan dan aktivitas operasional TI, berikut adalah prosedur-prosedur di bidang TI yang berlaku.

- *Operate and manage internet and intranet networks at PT PLN Enjiniring;*
- *Setting up IT-based work facilities;*
- *Ensure the reliability and availability of operations and infrastructure in the IT sector;*
- *Prepare plans and carry out for the work of the Information Technology Sub-Sector in accordance with the direction of the Corporate Secretary;*
- *Provide an assessment of monthly, semi-annual, and annual performance to employees within the Information Technology Sub-Sector;*
- *Planning and implement risk-based business process, compliance, and the principles of Good Corporate Governance on an ongoing basis including planning and following up on risk mitigation related to programs under their authority in accordance with the direction of the Corporate Secretary;*
- *Ensure and be responsible for human resource management in the Information Technology Sub-Sector in the form of optimizing the management of Manpower Formation (FTK), developing employee competencies, and implementing Knowledge Management (KM) activities;*
- *Ensuring the use of applications within PT PLN Enjiniring, including: Knowledge Management System (KMS), Management Documents (DM), RICO, Intelting, eRBAS, Virtual Cubicle (VC), Sunfish, Mail Management Application (AMS), and Business One, optimally and in line with its field or function, in the context of managing data and information and updating it, as well as supporting a quality decision-making process.*

In addition to the main tasks related to information technology, information technology also has general policies and guidelines for information technology governance as stated in the Decree of the Board of Directors No. 12.001.K/DIR/PLNE/XI/2018 and the general policies and guidelines for electronic information security and information technology contained in the Decree of the Board of Directors No. 13.001.K/DIR/PLNE/XI/2018.

As a guideline for IT operational development and activities, the following are the applicable IT procedures.

- | | |
|--|--|
| a. PE.PLNE.P.02.01 Prosedur Penyusunan IT Master Plan | a. <i>PE.PLNE.P.02.01 Procedure for Preparation of IT Master Plan</i> |
| b. PE.PLNE.P.02.02 Prosedur Penyusunan Anggaran TI | b. <i>PE.PLNE.P.02.02 IT Budgeting Procedure</i> |
| c. PE.PLNE.D.02.05 Prosedur Penggunaan Aplikasi Perangkat Enjiniring | c. <i>PE.PLNE.D.02.05 Procedure for Use of Engineering Device Applications</i> |
| d. PE.PLNE.D.02.06 Prosedur Pengelolaan Akun Pengguna | d. <i>PE.PLNE.D.02.06 User Account Management Procedure</i> |
| e. PE.PLNE.D.02.08 Prosedur Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi | e. <i>PE.PLNE.D.02.08 Training Procedure for Using Information System Applications</i> |
| f. PE.PLNE.D.02.11 Prosedur Bantuan Penggunaan Teknologi Informasi | f. <i>PE.PLNE.D.02.11 Procedure for Assistance in Using Information Technology</i> |
| g. PE.PLNE.A.02.01 Prosedur Pengelolaan Penanganan Insiden TI | g. <i>PE.PLNE.A.02.01 IT Incident Management Procedures</i> |
| h. PE.PLNE.A.02.02 Prosedur Pengembangan Dan Pengujian Aplikasi Sistem Informasi | h. <i>PE.PLNE.A.02.02 Information System Application Development and Testing Procedure</i> |

ROADMAP TEKNOLOGI INFORMASI

Sejalan dengan telah disahkannya Keputusan Direksi no. 30.001.K/DIR/PLNE/XI/2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi (IT Master Plan) PT PLN Enjiniring tahun 2020-2023, sepanjang tahun 2021, subbidang Teknologi Informasi melaksanakan inisiatif – inisiatif pekerjaan yang ada pada tahun 2021 sesuai dengan kategori roadmapnya antara lain:

1. Roadmap Optimalisasi Aplikasi
2. Roadmap Pengembangan / Implementasi Aplikasi
3. Roadmap Infrastruktur TI
4. Roadmap Tata Kelola TI

PELAKSANAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Kegiatan subbidang Teknologi Informasi PLN Enjiniring selama tahun 2021 mencakup:

1. Pengembangan Sistem Teknologi Informasi
2. Pelaksanaan Milestone Investasi
3. Pelaksaaan IT Master Plan
4. Pengukuran IT Maturity Level
5. Layanan Operasional TI
6. Penyelesaian Rekomendasi dalam LHA SPI
7. Sinergi Anak Perusahaan PLN dengan PT ICON+
8. Manajemen Risiko dan GCG

INFORMATION TECHNOLOGY ROADMAP

In line with the ratification of the Decree of the Board of Directors no. 30.001.K/DIR/PLNE/XI/2020 regarding the Information Technology Master Plan (IT Master Plan) of PT PLN Enjiniring for 2020-2023, throughout 2021, the Information Technology sub-sector will carry out existing work initiatives in 2021 according to the roadmap category among others:

1. *Application Optimization Roadmap*
2. *Application Development/Implementation Roadmap*
3. *IT Infrastructure Roadmap*
4. *IT Governance Roadmap*

INFORMATION TECHNOLOGY IMPLEMENTATION

PLN Enjiniring Information Technology sub-sector activities during 2021 include:

1. *Information Technology System Development*
2. *Implementation of the Investment Milestone*
3. *Implementation of IT Master Plan*
4. *Measurement of IT Maturity Level*
5. *IT Operational Services*
6. *Completion of Recommendations in LHA SPI*
7. *Synergy of PLN's Subsidiaries with PT ICON+*
8. *Risk Management and GCG*

1. Pengembangan Sistem Teknologi Informasi

Adapun pengembangan system teknologi informasi selama tahun 2021 sebagai berikut.

1. Development of Information Technology Systems

The development of information technology systems during 2021 is as follows.

No.	Nama <i>Name</i>	Fungsi <i>Function</i>	Status terakhir 2021 <i>Last Status in 2021</i>
1	Aplikasi Pelayanan <i>Service application</i>	Aplikasi yang berfungsi untuk pengelolaan sistem teknologi informasi (TI) yang secara filosofis terpusat pada perspektif konsumen layanan TI terhadap bisnis perusahaan <i>Applications that function to manage information technology (IT) systems that are philosophically centered on the perspective of IT service consumers on the company's business</i>	Berfungsi dengan baik <i>Well Functioned</i>
2	Aplikasi Knowledge Management System <i>Knowledge Management System Application</i>	Aplikasi berbasis Web yang mengacu pada sebuah sistem untuk mengelola pengetahuan dalam organisasi agar dapat mendukung penciptaan, akuisisi, penyimpanan, penyebaran, dan penggunaan/pemanfaatan pengetahuan <i>Web-based application which refers to a system for managing knowledge in an organization in order to support the creation, acquisition, storage, dissemination, and use / utilization of knowledge.</i>	Berfungsi dengan baik <i>Well Functioned</i>
3	Aplikasi RICO <i>RICO Application</i>	Aplikasi untuk mengelola risiko di PT PLN Enjiniring <i>Application for managing risk at PT PLN Enjiniring</i>	Rilis fitur baru yaitu threshold KRI dan ditayangkan dalam bentuk grafik <i>Release of a new feature, namely the threshold of KRI and displayed in graphical form</i>
4	Aplikasi Database Enjiniring <i>Database Enjiniring Application</i>	Aplikasi yang berfungsi untuk pembuatan gambar engineering seperti PID, PFD, load list, instrument list, dan lain lain <i>Applications used to making engineering drawings such as PID, PFD, load lists, instrument lists, and others</i>	Berfungsi dengan baik <i>Well Functioned</i>
5	Aplikasi SIMADUKU <i>SIMADUKU Application</i>	Aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk melakukan manajemen dokumen desain dan approval dokumen desain pada pekerjaan design review <i>Web-based applications that serve to perform design document management and design document approval on design review project</i>	Berfungsi dengan baik <i>Well Functioned</i>

2. Pelaksanaan Milestone Investasi

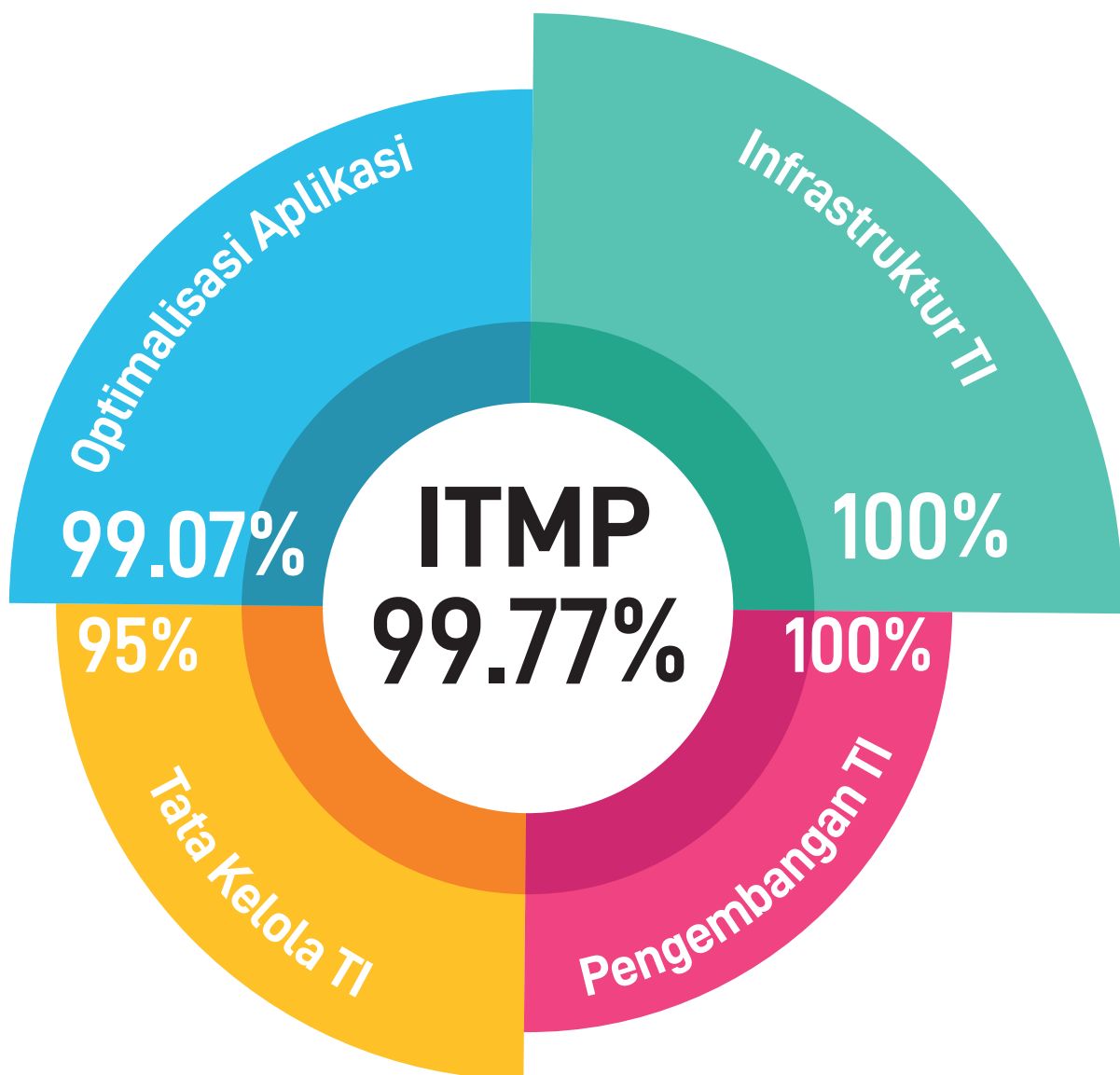
Subbidang Teknologi Informasi menyelesaikan target kinerja milestone investasi dengan ukuran keberhasilannya adalah Progres Aktual Investasi sesuai tahapan milestone. Adapun target kinerja tersebut adalah Go-Live Aplikasi Database Engineering pada Oktober 2021 dan terelisasi Go-Live Aplikasi Database Engineering pada Oktober 2021.

2. Implementation of the Investment Milestone

The Information Technology sub-sector completes the investment milestone performance target with the measure of success being the Actual Investment Progress according to the milestone stages. The performance targets are the Go-Live Database Engineering Application in October 2021 and the realization of the Go-Live Database Engineering Application in October 2021.

3. Pelaksanaan IT Master Plan

3. Implementation of IT Master Plan



4. Pengukuran IT Maturity Level

RUPS RKAP PLNE tahun 2021 memberikan KPI baru berupa IT Maturity Level yang bersumber dari PERMEN BUMN No. PER-03/MBU/02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-02/Mbu/ 2013 Tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara. Tujuan dari KPI IT Maturity Level adalah untuk meningkatkan tata Kelola TI di perusahaan sehingga TI dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pencapaian dan peningkatan kinerja perusahaan.

Hingga Desember 2021, telah dilakukan assessment oleh Lembaga independent dengan hasil skor IT Maturity Level sebesar 2.96 dari target 2.75.

5. Layanan Operasional TI

Subbidang TI melaksanakan dukungan operasi TI kepada pengguna yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada SLA (Service Level Agreement) yang disepakati. Adapun bentuk Dukungan operasi TI antara lain:

- layanan Helpdesk / bantuan penggunaan TI,
- penanganan insiden Sistem TI,
- pelaksanaan kegiatan pemeliharaan yang meliputi kegiatan backup, pengecekan kondisi Perangkat Enjiniring, pengecekan masa berlaku lisensi layanan TI dan pemeliharaan/optimalisasi penggunaan lisensi.
- pelaporan tingkat penggunaan aplikasi Perangkat Enjiniring setiap bulan kepada bidang-bidang terkait.

6. Penyelesaian Rekomendasi dalam LHA SPI

Dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Tata Kelola TI yang baik, Subbidang TI diaudit oleh SPI PT PLN (Persero) grup khusus TI. Sampai dengan bulan Desember, telah selesai dengan tepat waktu sebanyak 20 tindaklanjut dari 20 rekomendasi.

7. Sinergi Anak Perusahaan PLN dengan PT ICON+

Sinergi antar anak perusahaan PT PLN (Persero) dari sub-bidang teknologi informasi adalah bersinergi dengan PT Indonesia Comnet+ dalam pengembangan aplikasi Virtual Cubicle dan penyediaan infrastruktur khususnya cloud dan layanan internet.

4. Measurement of IT Maturity Level

PLNE RKAP GMS in 2021 provided a new KPI in the form of IT Maturity Level sourced from PERMEN BUMN No. PER-03/MBU/02/2018 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number Per-02/Mbu/2013 concerning Guidelines for the Preparation of Information Technology Management for State-Owned Enterprises. The purpose of the IT Maturity Level KPI is to improve IT governance in the company so that IT can have a more significant impact on the achievement and improvement of company performance.

As of December 2021, an independent institution has conducted an assessment with an IT Maturity Level score of 2.96 out of a target of 2.75.

5. IT Operational Services

The IT sub-sector carries out IT operation support to users which in its implementation is based on the agreed SLA (Service Level Agreement). The forms of IT operations support include:

- *Helpdesk services / IT usage assistance,*
- *IT System incident handling,*
- *implementation of maintenance activities which include backup activities, checking the condition of Engineering Equipment, checking the validity period of IT service licenses and maintenance/ optimization of license usage.*
- *Monthly reporting on the usage level of the Software Engineering application to related fields.*

6. Completion of Recommendations in LHA SPI

In order to implement Good Corporate Governance and good IT Governance, the IT sub-sector is audited by the SPI of PT PLN (Persero) a special IT group. As of December, 20 follow-ups from 20 recommendations have been completed on time.

7. Synergy of PLN's Subsidiaries with PT ICON+

Synergy between subsidiaries of PT PLN (Persero) from the information technology sub-field is synergizing with PT Indonesia Comnet+ in developing Virtual Cubicle applications and providing infrastructure, especially cloud and internet services.

8. Manajemen Risiko dan GCG

Dalam rangka pelaksanaan Good Corporate Governance, subbidang TI secara rutin bulanan melaporkan mitigasi risiko ke aplikasi RICO dan penyediaan eviden untuk kebutuhan *Risk Maturity*. Selain itu, TI juga turut berkontribusi di dalam penyediaan eviden untuk penilaian GCG.

8. Risk Management and GCG

In the context of implementing Good Corporate Governance, the IT sub-sector regularly reports on risk mitigation to the RICO application and provides evidence for Risk Maturity needs. In addition, IT also contributes in providing evidence for GCG assessment.

Perkara Hukum yang Dihadapi PLN Enjiniring

Legal Cases Faced by PLN Enjiniring

Berikut ini adalah informasi tentang perkara hukum yang sedang dihadapi Perusahaan dan Anak Perusahaan:

a. Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan

Selama tahun 2021, tidak terdapat perkara hukum yang dihadapi oleh Perusahaan.

b. Perkara Hukum yang Dihadapi Entitas Anak

Selama tahun 2021, tidak terdapat perkara hukum yang dihadapi oleh Entitas Anak Perusahaan.

c. Perkara Hukum yang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2021, tidak terdapat perkara hukum yang dihadapi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

The following information is about some legal cases currently faced by the Company and its subsidiaries:

a. Legal Cases Faced By The Company

There were no legal cases faced by the Company during 2021.

b. Legal Cases Faced by The Subsidiaries

There were no legal cases faced by the Subsidiaries during 2021.

c. Legal Cases Faced by the Board of Commissioners and Directors

There were no legal cases involving members of the Company's Board of Commissioners and Directors during 2021.



PEDOMAN PERILAKU

CODE OF CONDUCT

TUJUAN CODE OF CONDUCT

1. Merupakan petunjuk praktis dan pedoman perilaku bagi Jajaran perseroan yang harus dipatuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak serta harus dijadikan landasan berpikir dalam proses pengambilan keputusan;
2. Menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang positif yang mendukung perilaku etis dari Jajaran Perseroan serta meningkatkan kepekaan Perseroan dan jajaran Perseroan terhadap nilai-nilai etika bisnis.

TANGGUNG JAWAB PENERAPAN DAN PENGAWASAN CODE OF CONDUCT

1. Direksi menetapkan *key success factors* implementasi *Code of Conduct* yang efektif, efisien dan berkelanjutan serta menerapkan pengawasan melekat serta mekanisme pengendalian yang efektif;
2. Direksi memastikan bahwa *Code of Conduct* telah dipahami dan ditandatangani oleh segenap Jajaran Perseroan;
3. Dewan Komisaris dan Direksi memastikan bahwa seluruh Jajaran Perseroan dan pihak yang terkait di luar Perseroan patuh terhadap *Code of Conduct*, termasuk menyelesaikan setiap konflik yang timbul;
4. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan *Code of Conduct* Perseroan.

PURPOSE OF THE CODE OF CONDUCT

1. *It is a practical guide and a code of conduct for the Company's staff that must be obeyed in daily interactions with all parties and must be used as a basis for thinking in the decision-making process;*
2. *Creating and maintaining a positive work environment that supports the ethical behavior of the Company's staff and increases the sensitivity of the Company and the Company's ranks to the values of business ethics.*

RESPONSIBILITIES FOR IMPLEMENTING AND OVERSEEING THE CODE OF CONDUCT

1. *The Board of Directors determines the key success factors for implementing an effective, efficient and sustainable Code of Conduct as well as implementing inherent supervision and effective control mechanisms;*
2. *The Board of Directors ensures that the Code of Conduct has been understood and signed by all levels of the Company;*
3. *The Board of Commissioners and the Board of Directors ensure that all levels of the Company and related parties outside the Company comply with the Code of Conduct, including resolving any conflicts that arise;*
4. *The Board of Commissioners and the Board of Directors are responsible for establishing the Company's Code of Conduct.*

RUANG LINGKUP CODE OF CONDUCT

Code of Conduct Perseroan meliputi pengaturan aspek-aspek sebagai berikut :

1. Kebijakan Etika Perseroan
Mencakup Etika Bisnis Perseroan yang mengatur hubungan Perseroan dengan para Stakeholder-nya dan Etika Kerja Pegawai;
2. Pelaksanaan Code of Conduct Perseroan
Mencakup internalisasi, penghargaan dan sanksi, pernyataan komitmen, serta sosialisasi terhadap Code of Conduct;
3. Pernyataan Komitmen
Mencakup pernyataan bahwa seluruh Jajaran Perseroan diwajibkan membaca, memahami dan mematuhi Code of Conduct dengan baik dan benar dalam upaya meningkatkan dan memaksimalkan hasil pekerjaan untuk kemajuan Perseroan.

ISI CODE OF CONDUCT

Code of Conduct mengatur kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang harus dipedomani oleh seluruh Insan PLN Enjiniring.

Code of Conduct berisi hal-hal sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
- II. Kewajiban
- III. Visi dan Misi
- IV. Pedoman Prilaku
- V. Sanksi
- VI. Komitmen

KEPATUHAN TERHADAP CODE OF CONDUCT

Pada tahun 2021, upaya implementasi Code of Conduct dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya :

- a. Sosialisasi Code of Conduct kepada seluruh karyawan/pegawai/alih daya dilingkungan PT PLN Enjiniring.

SCOPE OF THE CODE OF CONDUCT

The Company's Code of Conduct covers the following aspects:

1. Company Ethical Policy
Includes the Company's Business Ethics which regulates the Company's relationship with its Stakeholders and Employee's Work Ethics;
2. Implementation of the Company's Code of Conduct
Includes internalization, rewards and sanctions, statement of commitment, and socialization of the Code of Conduct;
3. Commitment Statement
Includes a statement that all employees of the Company are required to read, understand and comply with the Code of Conduct properly and correctly in an effort to improve and maximize work results for the progress of the Company.

CODE OF CONDUCTS CONTENT

The Code of Conduct regulates ethical values policies, stated explicitly as a standard of behaviour that must be followed by all PLN Enjiniring Personnel.

The Code of Conduct contains the following matters:

- I. Introduction
- II. Responsibility
- III. Vision and Mission
- IV. Code of Conduct
- V. Penalty
- VI. Commitment

CODE OF CONDUCT COMPLIANCED

In 2021, the efforts to implement the Code of Conduct were carried out in several ways, including:

- a. Code of Conducts Socialization to all employees / workers/ outsourcing of PT PLN Enjiniring.

- b. Melakukan kegiatan *Collective Action* yang bertujuan mengurangi terjadinya praktek suap dan kecurangan dalam proses bisnis PLNE melalui proses internalisasi terhadap karyawan PLNE dan mensosialisasikan terhadap Mitra Kerja.
 - c. Melakukan kegiatan *Complaint Handling Management*, PLNE telah melaksanakannya sesuai laporan kepuasan pelanggan dimana kegiatan tersebut dilakukan secara rutin setiap tahun.
- b. *Conducting Collective Action activities, aiming to reduce the occurrence of bribery and fraud in PLNE business process through the internalization to PLNE employees and socializing with Business Partners.*
 - c. *Carrying out Complaint Handling Management activities, PLNE has implemented it according to customer satisfaction reports where these activities were being carried out regularly every year.*

JENIS SANKSI PELANGGARAN CODE OF CONDUCT

Pelanggaran terhadap *code of conduct* pada PLN Enjiniring akan dikenakan hukuman disiplin sesuai yang telah diatur dalam Pedoman Perilaku Perusahaan. Sanksi yang diberikan terdiri dari hukuman Disiplin Ringan, Disiplin Sedang dan Disiplin Berat.

TYPES OF PENALTY FOR CODE OF CONDUCT VIOLATION

Violation against PLN Enjiniring code of conduct will be subject to disciplinary penalties as regulated in the Company's Code of Conduct. The penalty given consist of mild, moderate and heavy discipline.

TABLE JENIS PELANGGARAN CODE OF CONDUCT
TYPE OF CODE OF CONDUCT VIOLATION TABLE

Tingkat Sanksi <i>Sanction Level</i>	Jenis Pelanggaran <i>Types of Violations</i>
Disiplin Ringan <i>Mild Discipline</i>	<p>Tidak mentaati ketentuan jam kerja di Perseroan, termasuk meninggalkan kantor tanpa ijin atasan langsung, kecuali untuk keperluan pekerjaan ;</p> <p><i>Not complying with the provisions of working hours in the Company, including leaving the office without direct supervisor's permission, except for work purposes;</i></p> <p>Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah (mangkir) selama 1 hari kerja;</p> <p><i>Not coming to work without a valid reason for 1 working day;</i></p>
Disiplin Sedang <i>Moderate Discipline</i>	<p>Apabila dalam masa menjalani hukuman disiplin ringan melakukan perbuatan disiplin ringan kembali ;</p> <p><i>If in the light of a disciplinary sentence to lightly commit a mild disciplinary act again;</i></p> <p>Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah (mangkir) selama 2 hari atau lebih secara berturut-turut atau berpencar sampai dengan 4 hari kerja dalam kurun waktu 1 bulan</p> <p><i>Not going to work without valid reasons for 2 days or more in a row or split up to 4 working days in 1 month</i></p> <p>Menyalahgunakan asset milik perseroan untuk kepentingan pribadi maupun orang lain, baik dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan maupun tidak, kecuali dengan seijin Perseroan ;</p> <p><i>Misusing the assets of the company for personal and other interests, either with the intention of obtaining profits or not, except with the permission of the Company;</i></p> <p>Menolak melaksanakan tugas pekerjaan atau perintah yang diberikan Perseroan;</p> <p><i>Refusing to carry out work duties or orders given by the Company;</i></p> <p>Menolak melaksanakan mutasi jabatan;</p> <p><i>Refusing to carry out transfer positions;</i></p> <p>Tidak melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab jabatannya;</p>

Not carrying out duties which are the responsibility of his position

Melakukan pelanggaran atas undang-undang dalam lingkup hukum pidana dan atas perbuatan tersebut pegawai divonis hukuman penjara urang 2 (dua) (putusan final);

Violating the law within the scope of criminal law and for the deed the employee is sentenced to sentence 2 (two) (final decision);

Melakukan hal-hal yang dapat mencoreng atau menurunkan nama baik Perseroan atau harkat dan martabat pegawai;

Doing things that can tarnish or ruin the reputation of the Company or the dignity of employees;

Membuat keonaran atau kegaduhan dalam lingkungan kerja;

Make disturbance or noise in the work environment;

Memiliki Perusahaan atau memiliki saham suatu Perusahaan atau bekerja pada suatu Perusahaan lain yang kegiatan usahanya sama dengan Perseroan;

Owning a company or owning shares of a company or working for another company whose business activities are the same as the Company;

Meminta, menerima atau menggunakan, fasilitas atau jasa lainnya dari pihak manapun, yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya;

Requesting, receiving or using, other facilities or services from any party, which is known or reasonably suspected to be related to their position or job;

Memberikan atau menjanjikan kepada pihak lain berupa barang, fasilitas atau jasa apapun;

Providing or promising to other parties in the form of goods, facilities or any services;

Melakukan serangan secara fisik (kecuali tindakan pembelaan diri) atau mengancam, mengintimidasi kepada sesama pegawai dan atau Direksi;

Carrying out physical attacks (except self-defense actions) or threaten, intimidate fellow employees and or Directors;

Ceroboh atau lalai dalam melakukan pekerjaan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Perseroran

Careless or negligent in doing work, resulting in a loss for the Company

Disiplin Berat
Heavy Discipline

Pegawai apabila dalam masa menjalani hukuman disiplin sedang, melakukan perbuatan pelanggaran disiplin sedang kembali;

Employees when undergoing a moderate disciplinary sentence, committing moderate disciplinary offenses once more;

Mengambil dan memberikan atau membocorkan informasi penting atau dokumen penting Perseroan kepada pihak lain;

Taking and providing or leaking important information or important documents of the Company to other parties;

Dengan sengaja merancang atau membuat atau mengarahkan dalam penentuan spesifikasi peralatan sehingga merugikan atau berpotensi merugikan Perseroan atau Vendor baik materil maupun immateril;

Deliberately designing or making or directing in determining the specifications of the equipment so that it is detrimental or potentially detrimental to the Company or the Vendor, both material and immaterial;

Mengerjakan pekerjaan selain untuk kepentingan Perseroan namun menggunakan fasilitas atau inventaris milik Perseroan;

Doing work other than for the interests of the Company but using facilities or inventory belonging to the Company;

Mengerjakan atau turut serta atau membantu mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan oleh Perseroan kepada Perusahaan atau pihak lain;

Doing or participating or helping to do the work that has been given by the Company to the Company or other parties;

Melakukan perbuatan atau bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan perbuatan yang merugikan atau berpotensi merugikan Perseroan;

Acting or cooperating with other parties to commit actions that are detrimental to or potentially detrimental to the Company;

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK

Selama tahun 2021, tidak terjadi pelanggaran Kode Etik.

NUMBER OF CODE OF CONDUCTS VIOLATIONS

There were no code of conduct violations happen in 2021

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

Gratuity Policy

Dalam kegiatan bisnis PLN Enjiniring, pada umumnya tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan pihak internal maupun eksternal yang saling menjalin kerja sama yang harmonis, serasi dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Terkait dengan hubungan bisnis sering terjadi praktek yang muncul dan tidak dapat dihindari yaitu adanya penerimaan, pemberian atau permintaan hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Oleh karena itu PLN Enjiniring perlu untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan penerimaan, pemberian atau permintaan hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) dari satu pihak kepada pihak yang lainnya dan tata acara/mekanisme pelaporannya di lingkungan PLN Enjiniring. Hal ini penting untuk dibudayakan di lingkungan PLN Enjiniring sebagai suatu proses pembelajaran bagi Insan PLN Enjiniring dalam mewujudkan visi dan misi PLN Enjiniring dengan perilaku yang bermartabat dan citra yang tinggi dalam hubungan bisnis dengan para pelanggan atau *stakeholdernya*.

• Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

Apabila Insan PLN Enjiniring secara langsung mengalami peristiwa gratifikasi baik berupa penerimaan atau penolakan gratifikasi, maka dapat membuat laporan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) PLN Enjiniring melalui aplikasi *Compliance Online System* (COS) dengan mengakses link <http://cos.plne.co.id> atau dengan cara melakukan konfirmasi kejadian gratifikasi melalui email yang dikirim secara otomatis dari aplikasi COS kepada alamat email masing-masing Insan PLN Enjiniring. Selain itu apabila Insan PLN Enjiniring atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat pada Pedoman Pengendalian Gratifikasi, agar segera melaporkan pelanggaran dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku di PLN Enjiniring sebagaimana diatur dalam sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) yaitu

In the Company's business activities, in general it cannot be separated from the relationships and interactions with internal and external parties who mutually establish harmonious, harmonious and sustainable cooperation without forgetting the ethics and principles of good corporate governance.

In relation to business relationships, work activities often occur and cannot be avoided, namely the acceptance of gifts / souvenirs and entertainment from one party to another. It is necessary for PLN Enjiniring to regulate matters related to acceptance, giving, and request for gifts / souvenirs and entertainment from one party to another and the procedure / reporting mechanism within the PLN Enjiniring environment. It is important to be cultured within the Company as a learning process for company members in realizing the Company's vision and mission with dignified behavior and a high image in business relationships with its customers or stakeholder.

• Gratuity Control Management

If PLN Enjiniring Personnel directly experience a gratification event in the form of acceptance or rejection of gratification, then they can make a report to the PLN Enjiniring Gratification Control Unit (UPG) through the Compliance Online System (COS) application by accessing the link <http://cos.plne.co.id> or by confirming the gratification event via email which is sent automatically from the COS application to the email address of each PLN Enjiniring Personnel. In addition, if PLN Enjiniring Personnel or third parties are aware of a violation of the provisions contained in the Gratification Control Guidelines, they must immediately report the violation in accordance with the applicable provisions at PLN Enjiniring as stipulated in the Whistleblowing System, namely by telephone, Short Message Service (SMS), and/or Whatsapp to number 08111995177, email

melalui telepon, *Short Message Service (SMS)*, dan/atau *Whatsapp* ke nomor 08111995177, email ke wbs@plne.co.id, dan/atau surat yang ditujukan kepada Direktur Utama PLN Enjiniring dengan disertai bukti/eviden yang jelas, rinci dan dapat dipertanggungjawabkan. PLN Enjiniring menjamin bahwa proses pelaporan yang dilakukan oleh Insan PLN Enjiniring maupun pihak ketiga akan dijaga kerahasiaannya.

- **Sosialisasi Gratifikasi**

Dalam rangka menjamin bahwa Peraturan Direksi PT PLN Enjiniring Nomor:02.001.K/010/DIR/PLN ENJINIRING/II/2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di PT PLN Enjiniring ("Pedoman Pengendalian Gratifikasi PLNE") ini dapat diketahui oleh seluruh Insan PLN Enjiniring dan seluruh pihak ketiga yang berhubungan dengan PLN Enjiniring, agar seluruh pihak-pihak yang terkait di lingkungan PLN Enjiniring untuk melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Menginformasikan ketentuan larangan penerimaan gratifikasi beserta jenis-jenis gratifikasi sesuai dengan yang diatur di dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi PLN Enjiniring.
2. Menugaskan kepada Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) dan Fungsi Humas di lingkungan PLN Enjiniring untuk secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh Insan PLN Enjiniring maupun pihak ketiga/ eksternal terkait dengan adanya Pedoman Pengendalian Gratifikasi PLN Enjiniring ini.
3. Menugaskan Fungsi Pengadaan, Fungsi Pemasaran dan fungsi lain di lingkungan PLN Enjiniring yang memiliki hubungan kerja dengan pihak ketiga untuk melakukan Penyampaian Pedoman Pengendalian Gratifikasi PLN Enjiniring ini kepada seluruh pihak terkait dengan mata rantai supply di lingkungan PLN Enjiniring (Penyedia Barang/Jasa, Agen, Distributor, Kontraktor, Sub-Kontraktor, Konsultan, Auditor/Assessor dan Pelanggan serta Stakeholder lainnya).
4. Memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun juga terkait dengan ketentuan terkait gratifikasi yang berlaku.

to wbs@plne.co.id, and/or a letter addressed to the President Director of PLN Enjiniring accompanied by clear, detailed and accountable evidence/evidence. PLN Enjiniring guarantees that the reporting process carried out by PLN Enjiniring Personnel and third parties will be kept confidential.

- **Gratification Socialization**

In order to ensure that the Regulation of the Board of Directors of PT PLN Enjiniring Number: 02.001.K/010/DIR/PLN ENJINIRING/II/2018 concerning Guidelines for Gratification Control at PT PLN Enjiniring ("Guidelines for Control of PLNE Gratification") can be known by all personnel of PLN Enjiniring and all third parties related to PLN Enjiniring, so that all relevant parties within the PLN Enjiniring environment to do the following things.

1. *Informing the provisions on the prohibition of receiving gratuities along with the types of gratuities in accordance with those stipulated in the PLN Enjiniring Gratification Control Guidelines.*
2. *Assigning the Anti-Bribery Compliance Function (FKAP) and Public Relations Function within PLN Enjiniring to continuously provide information to all PLN Enjiniring Personnel and third/external parties related to the PLN Enjiniring Gratification Control Guidelines.*
3. *Assigning the Procurement Function, Marketing Function and other functions within PLN Enjiniring that have a working relationship with third parties to submit this PLN Enjiniring Gratification Control Guidelines to all parties related to the supply chain within PLN Enjiniring (Goods/Services Providers, Agents), Distributors, Contractors, Sub-Contractors, Consultants, Auditors/Assessors and Customers and other Stakeholders).*
4. *Provide clear information to any party related to the applicable gratification provisions.*

5. UPG PLN Enjiniring memonitor pelaksanaan/ implementasi Pedoman Pengendalian Gratifikasi PLN Enjiniring dan memberikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Utama mengenai implementasi Pedoman Pengendalian Gratifikasi termasuk laporan-laporan yang timbul setelah adanya ketentuan ini.

5. UPG PLN Enjiniring monitors the implementation/ implementation of the PLN Enjiniring Gratification Control Guidelines and provides periodic reports every 6 (six) months to the President Director regarding the implementation of the Gratification Control Guidelines including reports arising after this provision.



Whistleblowing System

Whistleblowing System

Whistleblowing System (WBS) adalah system yang mengelola pengaduan/penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonym dan mandiri (independent) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta anggota perusahaan dan mitra kerja dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi di lingkungan PLN Enjiniring.

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 04.004.K/DIR/PLNE/IV/2019 tanggal 04 April 2019 Tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), Landasan penyusunan system pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) adalah

1. Keinginan PLN Enjiniring untuk terus menegakkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di seluruh lingkungan PLN Enjiniring, khususnya yang berkaitan dengan integritas dan transparansi;
2. Sebagai komitmen perusahaan untuk menyediakan media bagi penegakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sehingga menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggung jawab;
3. Sebagai salah satu alat yang ampuh dalam mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran di PLN Enjiniring

- **Maksud, Tujuan dan Manfaat Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)**

Maksud diberlakukannya Pedoman ini adalah untuk menyelenggarakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang memberikan kepastian dan keyakinan bahwa laporan yang disampaikan yang disampaikan akan ditindaklanjuti oleh Direktur Utama sekaligus memberikan keamanan Pelapor pelanggaran dan penerima laporan melalui jaminan kerahasiaan Pelapor, penyediaan perlindungan Pelaporan. Tujuan diberlakukannya pedoman ini adalah:

Whistleblowing System (WBS) is a system that manages complaints / disclosures regarding unlawful act, confidential unethical / improper actions, anonymous and independent manner which used to optimize the participation of company members and partners in exposing violations that occur in the PLN Enjiniring

Based on the Decree of the Board of Directors Number: 04.004.K /DIR/PLNE/IV/2019 date April 04, 2019 concerning Whistleblowing System. The basis for the preparation of a whistleblowing system is:

1. *PLN Enjiniring desire to continue to uphold the principles of good corporate governance throughout the PLN Enjiniring environment, especially those related to integrity and transparency;*
2. *As the company's commitment to providing the media for upholding the principles of good corporate governance, thus creating a clean and responsible work situation;*
3. *As one of the powerful tools in preventing and detecting potential violations at PLN Enjiniring*

- **The Purposes, Objectives and Benefits of Implementing the Whistleblowing System**

The purpose of the enactment of these Guidelines is to implement a Whistleblowing System which provides certainty and confidence that the submitted reports will be followed up by the President Director while at the same time providing security for the Whistleblower and the recipient of the report by guaranteeing the confidentiality of the Whistleblower, and providing Reporting protection. The aims of this guideline are :



1. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong Pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun *non finansial*, termasuk hal-hal yang dapat merusak citra perusahaan
2. Mempermudah penanganan yang efektif terhadap laporan-laporan pelanggaran dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas Pelapor serta tetap menjaga informasi ini dalam arsip khusus yang dijamin keamanannya.
3. Membangun suatu kebijakan dan infrastruktur untuk melindungi Pelapor dari balasan pihak-pihak internal maupun eksternal.
4. Mengurangi kerugian yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi dini.
5. Meningkatkan reputasi Perusahaan.

- **Pengelola Proses Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)**

Unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan terhadap implementasi Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) adalah Kepala Satuan Pengawas Intern (KSPI) selaku Chief Compliance Officer (CCO). Selanjutnya apabila diperlukan secara berkala, CCO dapat mengadakan penyempurnaan dalam rangka perbaikan secara berkelanjutan yang disesuaikan dengan perkembangan bisnis Perusahaan.

1. *Creating a conducive climate and encouraging reporting on things that can cause financial and non-financial losses, including things that can damage the company's image*
2. *Facilitate the effective handling of reports of violations and at the same time protect the confidentiality of the identity of the Whistleblower and keep this information in a special archive that is guaranteed to be safe.*
3. *Develop a policy and infrastructure to protect the Whistleblower from retaliation from internal and external parties.*
4. *Reducing losses due to violations through early detection.*
5. *Improve the reputation of the Company*

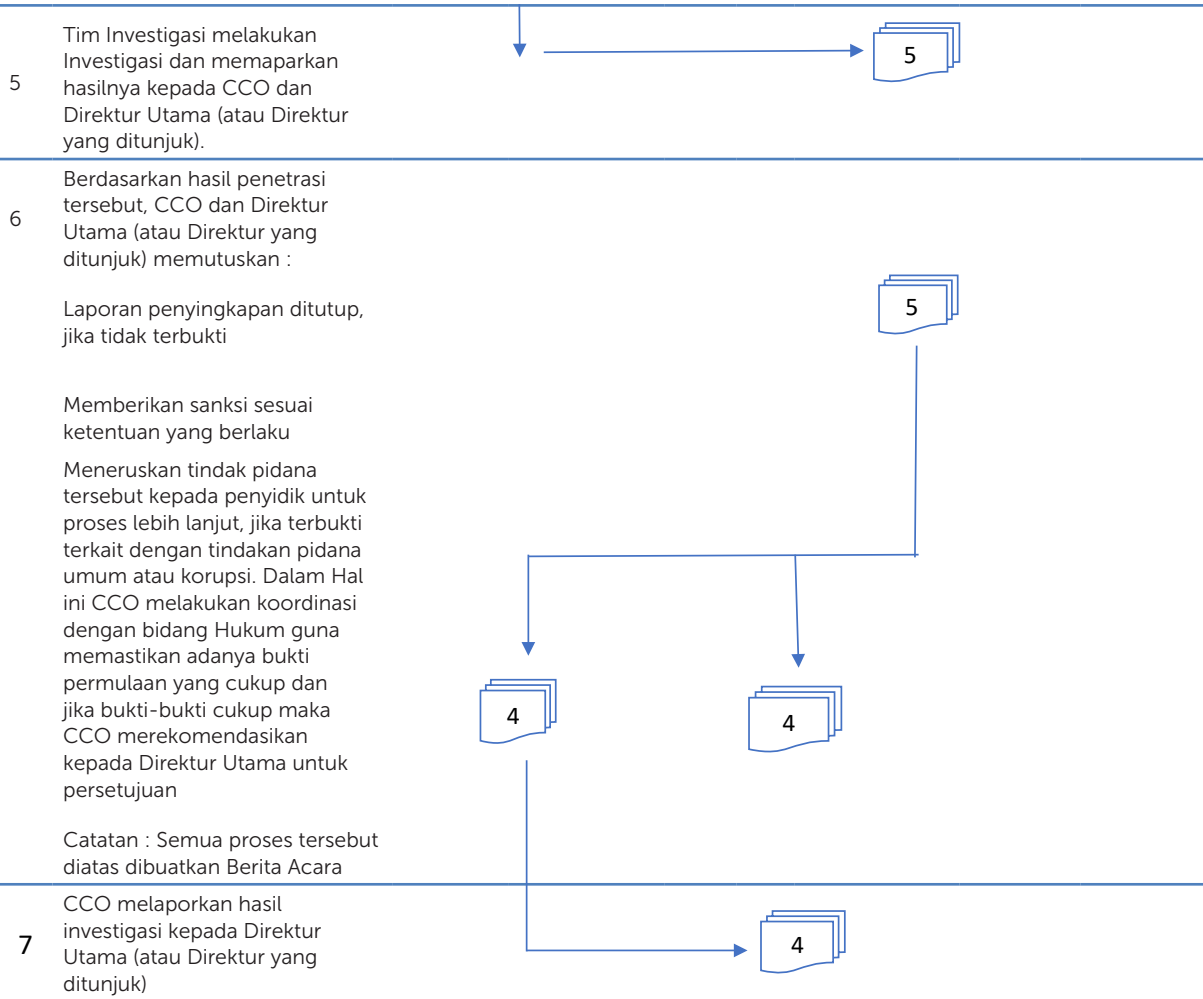
- **Whistleblowing System Process Management**

The work unit responsible for implementing and managing the implementation of the Whistleblowing System is the Head of the Internal Supervisory Unit (KSPI) as the Chief Compliance Officer (CCO). Furthermore, if necessary periodically, the CCO can make improvements in the context of continuous improvement in accordance with the Company's business development.

TABEL PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEM MANAGEMENT TABLE

No.	Prosedur <i>Procedur</i>	Pelapor <i>Reporter/ Informan</i>	Pengelolaan WBS		Dewan Komisaris <i>Commissioner Board</i>	Direktur Utama <i>President Director</i>	Tim Investigasi <i>Investigation Team</i>
			TC	CCO			
1	Membuat pengaduan/penyungkapan dan mengirimkan kepada Pengelola WBS melalui sarana/media sebagai berikut : Telephone : 62-811 1995 177 Email : wbs@plne.co.id Surat : Kepada Direktur Utama	1					
2	Menerima pelaporan/pengaduan/penyungkapan, lalu mencatat dan menuangkan ke dalam format standard yang menghasilkan Laporan penerimaan kontrak sesuai kategori lingkup pengaduan/penyungkapan Laporan Penyungkapan		2				
3	Menyampaikan laporan penyungkapan (disclosure report) melalui email atau media internet yang dapat di akses oleh Tim Compliance/CCO/Dewan Komisaris/Direktur Utama (sesuai dengan kategori dilaporkan)		3		3		
4	Tim Compliance melakukan penelaahan awal/klarifikasi terhadap pengaduan/penyungkapan tersebut dan membuat resumennya. Kemudian mempresentasikan kepada CCO dan Direktur Utama atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama. Berdasarkan hasil presentasi tersebut CCO dan Direktur Utama (atau Direktur yang ditunjuk) memutuskan tindak lanjut : dihentikan, jika tidak memenuhi persyaratan indikasi awal bekerja sama dengan eksternal investigator jika substansi pengaduan/penyungkapan terkait dengan citra/reputasi PT PLN Enjiniring dan/atau menimbulkan kerugian yang besar dan/atau belum pernah ditindaklanjuti oleh SPI. bekerja sama dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan/atau Sekuriti sesuai dengan substansi pengaduan/penyungkapan dilakukan oleh Tim Compliance atas justifikasi dan penunjukkan dari CCO		4				



• **Mekanisme Penyampaian Laporan**

Mekanisme penyampaian Pelaporan terhadap Tindakan Pelanggaran adalah sebagai berikut:

- 1) Melalui telepon, *Short Message Service* (SMS), atau *Whatsapp* ke nomor 08111995177, *email* ke wbs@plne.co.id, dan surat yang ditujukan kepada Direktur Utama.
- 2) Direktur Utama menerima Pelaporan terkait dengan Tindakan Pelanggaran dan menetapkan bentuk tindak lanjut penyelesaian atas Pelaporan tersebut.
- 3) Direktur Utama menyampaikan setiap Pelaporan terkait dengan Tindakan Pelanggaran yang telah ditetapkan penyelesaiannya melalui mekanisme audit CCO.
- 4) CCO akan melakukan audit dan mengevaluasi tingkat kompleksitas Pelaporan tersebut berkaitan dengan bentuk tindak lanjut penyelesaian atas Pelaporan tersebut.

• **Report Submission Mechanism**

The mechanism for submitting Reports on Violation Actions is as follows:

- 1) *Via telephone, Short Message Service (SMS), or Whatsapp to number 08111995177, email to wbs@plne.co.id, and letters addressed to the President Director.*
- 2) *The President Director receives the Report related to the Violation Act and determines the form of follow-up for the settlement of the Report.*
- 3) *The President Director submits each Report related to Violation Actions whose resolution has been determined through the CCO audit mechanism.*
- 4) *CCO will conduct an audit and evaluate the level of complexity of the Report in relation to the form of follow-up to the completion of the Report.*

- 5) CCO akan meneruskan hasil tindak lanjut penyelesaian Pelaporan disertai dengan kesimpulan apakah Pelaporan tersebut terbukti atau tidak terbukti dan usulan tindak lanjut penyelesaian pelanggarannya kepada Direktur Utama untuk ditetapkan bentuk tindak lanjut penyelesaiannya dengan rincian sebagai berikut:
- 6) Diberhentikan dan dinyatakan selesai apabila hasil audit atau hasil konfirmasi/keterangan/penjelasan menyatakan bahwa pengaduan tersebut tidak benar atau tidak terbukti.
- 7) Meneruskan kepada Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia untuk proses tindak lanjut pengenaan hukuman disiplin Perusahaan apabila terbukti terjadi pelanggaran disiplin.
- 8) Dengan pertimbangan Direksi, kasus pelanggaran yang merugikan perusahaan dapat diserahkan kepada yang berwenang untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan internal dan hukum yang berlaku. Dalam hal ini akan dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan tim dari Sub-bidang Hukum untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang telah dikumpulkan dinyatakan cukup untuk disampaikan kepada pihak yang berwenang.

Dalam mengelola whistleblowing system, perusahaan menjaga kerahasiaan pelapor pelanggaran sebagai bentuk perlindungan terhadap pelapor.

- **Perlindungan Bagi Whistleblower**

Perusahaan memberikan jaminan perlindungan dan kerahasiaan terhadap setiap Pelapor yang meliputi:

- 1) Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan.
- 2) Jaminan keamanan bagi pelapor maupun keluarganya.
- 3) Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang berpotensi merugikan Pelapor
- 4) Jaminan terhadap tekanan, penundaan kenaikan pangkat/jabatan, pemecatan, gugatan hukum, hingga Tindakan fisik yang dilakukan oleh pihak melakukan Tindakan Pelanggaran/terlapor.

- 5) *The CCO will forward the results of the follow-up to the completion of the Report accompanied by a conclusion whether the Report is proven or not and the proposed follow-up action to resolve the violation to the President Director to determine the form of follow-up settlement with the following details:*
- 6) *Dismissed and declared completed if the results of the audit or the results of the confirmation/description/explanation state that the complaint is untrue or unproven.*
- 7) *Forward to the Director of Finance and Human Resources for the follow-up process for imposing disciplinary penalties on the Company if it is proven that there has been a disciplinary violation.*
- 8) *With the consideration of the Board of Directors, cases of violations that are detrimental to the company can be submitted to the authorities for further processing in accordance with internal regulations and applicable laws. In this case, communication and coordination will be carried out with the team from the Legal Sub-Sector to ensure that the evidence that has been collected is declared sufficient to be submitted to the competent authorities.*

In managing the whistleblowing system, the company maintains the confidentiality of the whistleblower as a form of protection for the whistleblower.

- **Whistleblower Protection**

The Company provides protection and confidentiality guarantees for each Whistleblower which includes:

- 1) *The reporter's identity and content of the reports confidentiality is a guaranteed.*
- 2) *Security guarantees for reporters and their families.*
- 3) *guarantee of protection against treatment that has the potential to harm the Whistleblower.*
- 4) *Guarantee against pressure, postponement of promotion/position, dismissal, lawsuits, to physical actions taken by the party committing the Violation Act/reported*



- **Media Whistleblowing System**

Penyampaian pelaporan pelanggaran dapat dilakukan melalui berbagai media sebagai berikut

- 1) Melalui telepon, *Short Message Service* (SMS), atau *WhatsApp* ke nomor +62 811-1995-177,
- 2) *email* ke: wbs@plne.co.id,
- 3) surat yang ditujukan kepada Direktur Utama.

- **Pengelola Whistleblowing System**

Whistleblowing system merupakan suatu mekanisme pelaporan terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan secara rahasia yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan PLN Enjiniring. Pelaporan ditujukan melalui suatu mekanisme baku dan dikelola secara profesional oleh pengelola whistleblowing system. Pengelola WBS menyampaikan laporan penyingkapan (*disclosure report*) kepada Tim Compliance/CCO/ Dewan Komisaris/Direktur Utama (sesuai dengan kategori Terlapor).

- **Sosialisasi Whistleblowing System**

Sosialisasi WBS dilakukan kepada setiap bidang pada setiap pelaksanaan *Entry Meeting* Audit Operasional oleh KSPI.

- **Laporan Whistleblowing System**

Pada tahun 2021, Tidak ada Laporan WBS yang diterima oleh Tim *Whistleblowing System*.

- **Whistleblowing System Media**

Submission of violation reports can be done through various media as follows

- 1) *Via telephone, Short Message Service (SMS), or WhatsApp to +62 811-1995-177,*
- 2) *email to: wbs@plne.co.id,*
- 3) *a letter addressed to the President Director.*

- **Whistleblowing System Management**

The whistleblowing system is a mechanism for reporting violations violations committed secretly by employees or leaders of PLN Enjiniring. Reporting is addressed through a standard mechanism and is professionally managed by the whistleblowing system manager. The WBS Manager submits a disclosure report to the Compliance Team / CCO / Board of Commissioners / President Director (according to the Reported Party category).

- **Whistleblowing System Socialization**

WBS socialization is carried out to every field in every Operational Audit Entry Meeting implementation by KSPI.

- **Whistleblowing System Report**

In 2021, No WBS Report was received by the Whistleblowing System Team.

No.	Bulan <i>Month</i>	Nomor Laporan <i>Report Number</i>	Jumlah Laporan <i>Number of Reports</i>	Jenis Keputusan dan/atau tindakan yang dilaporkan <i>Types of Decisions and/or Actions Reported</i>	Tindak lanjut laporan <i>Follow up report</i>
1	Januari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	Februari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3	Maret	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
4	April	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
5	Mei	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
6	Juni	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
7	Juli	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
8	Agustus	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
9	September	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
10	Oktober	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
11	Nopember	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
12	Desember	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Informasi Pemegang Saham Utama Dan Pengendali

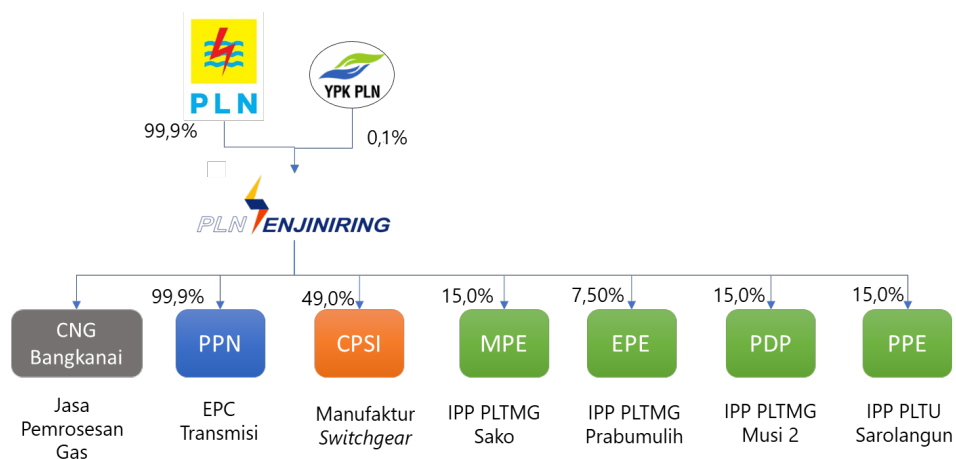
Information on Major and Controlling Shareholders

Saham PLN Enjiniring dimiliki 99.90% oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan 0.10% oleh Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN. Hal ini menjadikan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai pemegang saham utama dan pengendali di PLN Enjiniring.

PLN Enjiniring shares are owned 99.99% by PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) and 0.01% by the Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN. This makes PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) the main and controlling shareholder in PLN Enjiniring.

Skema kepemilikan saham PLN Enjiniring sebagai berikut.

The PLN Enjiniring share ownership scheme is as follows.



- Unit Usaha
- Anak Perusahaan
- Joint Venture Company
- Afiliasi/Penyertaan Saham

CNG Bangkanai : Compressed Natural Gas Bangkanai
 PPN : PT Prima Power Nusantara
 CPSI : PT Crompton Power Switchgear Indonesia
 MPE : PT Multidaya Prima Elektrindo
 EPE : PT Energi Prima ElektriKa
 PDP : PT Pura Daya Prima
 PPE : PT Permata Prima Elektrindo

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

PLN Enjiniring bertujuan untuk menciptakan persepsi yang baik dan kepuasan public terhadap system informasi perusahaan. Perseroan memiliki kebijakan keterbukaan informasi public berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 17.001.K/010/DIR/PLNE/XI/2010 tentang Pengklasifikasian dan Pengungkapan Informasi. Pelaksanaan keterbukaan informasi public menjadi tanggung jawab Sekretaris Perusahaan.

ACCESS TO COMPANIES INFORMATION AND DATA

PLN Enjiniring aiming to create good perceptions and public satisfaction of the company's information system. The Company has a public information disclosure policy based on the Board of Directors Decree Number: 17.001.K / 010 / DIR / PLNE / XI / 2010 concerning in Classification and Information Disclosure. The implementation of public information disclosure is the responsibility of the Corporate Secretary.

Bentuk pelaksanaan kebijakan tersebut adalah dengan memberikan kemudahan bagi pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi perusahaan dengan senantiasa melakukan pembaharuan sarana dan prasarana penunjang penyampaian informasi. Selain itu, perusahaan juga terus berupaya memperkuat platform teknologi informasi untuk menjaga dan meningkatkan kehandalan dalam penyediaan informasi secara terintegrasi, tepat waktu dan tepat sasaran melalui berbagai media.

The form of implementation of this policy is to provide convenience for stakeholders to obtain company information by constantly updating the supporting facilities and infrastructure for the delivery of information. In addition, the company also continues to strengthen its information technology platform to maintain and improve reliability in providing information in an integrated, timely and targeted manner through various media.

MEDIA INFORMASI PERUSAHAAN

PLN Enjiniring memiliki media yang berfungsi sebagai saluran dalam memastikan ketersediaan akses dan pengungkapan informasi secara update, transparan, fair dan berimbang kepada stakeholders dan shareholders diantaranya adalah Website, Media Elektronik Interaktif, Media Sosial dan Media Internal.

INFORMATION MEDIA TO COMPANY

PLN Enjiniring has a media that serves as a channel to encourage information disclosure updates, transparent, fair and balance to stakeholders and shareholders including Website, Printed Media, Interactive Electronic Media, Social Media, and Internal Media.

WEBSITE

Shareholders dan stakeholders dapat mengakses informasi mengenai PLNE di situs www.plne.co.id yang memuat informasi mengenai kegiatan operasional dan kinerja Perusahaan. Website PLNE disajikan secara bilingual yaitu dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

WEBSITE

Shareholders and stakeholders can access the information about PLNE at www.plne.co.id that containing fairly complete and comprehensive information toward the operational activity and performance of the Company. The PLNE website is presented bilingually in Indonesian and English.

Website PLNE menyediakan informasi terkait Perusahaan, peristiwa di Lingkungan Perusahaan, Soft Copy Majalah Prima News, Annual Report, Laporan Keuangan, pengumuman pelelangan dan informasi lainnya yang dapat diakses dengan mudah oleh publik.

PLNE website provides information of companies, events in the corporate environment, soft copy of Prima News magazine, Annual Report, Financial Report, the Tender announcement and some other information that could be easily accessed by public.

MEDIA ELEKTRONIK INTERAKTIF

PLN Enjiniring menggunakan media elektronik dalam menyediakan informasi antara lain menggunakan email, LCD TV, Paggging Call di kantor PLNE. Alamat email PLNE adalah contact@plne.co.id. Tujuan dibuatnya email PLNE berguna untuk memberikan kemudahan bagi publik yang ingin menanyakan berbagai hal yang berhubungan PLNE. Sarana komunikasi lainnya yaitu display LCD TV yang menayangkan informasi terbaru terkait PLNE dalam bentuk foto dan video dan informasi lain yang perlu diketahui oleh karyawan dan tamu PLNE.

MEDIA SOSIAL

PLN Enjiniring juga menyediakan informasi mengenai perusahaan serta untuk berkomunikasi kepada publik dengan memanfaatkan media sosial melalui akun Instagram, Facebook, Youtube dan Twitter.

MEDIA INTERNAL

PLN Enjiniring menyediakan saluran dan media komunikasi internal dalam rangka sarana komunikasi dengan karyawan melalui pelaksanaan acara knowledge sharing, coffee morning, dan email.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai PLN Enjiniring, masyarakat umum dan investor dapat menghubungi:

- **Sekretaris Perusahaan**

Menara Enjiniring, Jl. Ciputat Raya No. 123
Kebayoran Lama – Jakarta 12310, Indonesia
T (62-21) 27510363
F (62-21) 27510362
E contact@plne.co.id

INTERACTIVE ELECTRONIC MEDIA

PLN Enjiniring uses electronic media in providing information including e-mail, LCD TV, Paggging Call at the PLNE office. PLNE email address is contact@plne.co.id. The purpose of PLNE e-mail made is to provide convenience for the public who wish to ask everything related to PLNE. Other communication facilities are LCD TV display that shows the latest information related PLNE in the form of photos and video and other information that needs to be known by employees and guests.

SOCIAL MEDIA

PLN Enjiniring also provides information regarding the company as well as to communicate to the public by utilizing social media through Instagram, Facebook, Youtube and Twitter accounts.

INTERNAL MEDIA

PLN Enjiniring provides information channels and internal communication media in order to communication with employees through knowlegde sharing, coffee morning, and email blast.

To get more information about PLN Enjiniring, the general public and investors can contact:

- **Corporate Secretary**

*Menara Enjiniring, Jl. Ciputat Raya No. 123
Kebayoran Lama – Jakarta 12310, Indonesia
T (62-21) 27510363
F (62-21) 27510362
E contact@plne.co.id*

Tanggung Jawab Perusahaan

Company Responsibilities





Tanggung Jawab Perusahaan

Corporate Responsibility

TANGGUNG JAWAB SOSIAL & LINGKUNGAN

Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan merupakan tanggung jawab Perusahaan yang berdampak pada keputusan dan kegiatan Perusahaan terhadap masyarakat dan Lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis.

• MAKSUD DAN TUJUAN

Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk menciptakan kesinambungan dalam pembangunan ekonomi dan untuk meningkatkan kualitas hidup yang bermanfaat sehingga mendorong terciptanya keselarasan dan keharmonisan dengan masyarakat terutama disekitar lokasi usaha Perusahaan. Perusahaan menyadari pentingnya Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dalam mendukung keberlanjutan operasional perusahaan dengan visi Perusahaan:

“Menjadi Perusahaan Konsultan Enjiniring Terintegrasi yang Terkemuka se Asia Tenggara dan Pilihan No. 1 Pelanggan ”

Melalui visi tersebut, PT PLN Enjiniring terus menjalankan komitmennya untuk berkontribusi dalam melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan menyadari bahwa kinerja perusahaan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi saja, akan tetapi juga kinerja sosial maupun lingkungan. Kesadaran ini didasarkan bahwa keberlanjutan perusahaan (*corporate sustainability*) tercermin dalam konsep *triple bottom line* yaitu *people*, *profit*, dan *planet*.

SOCIAL & ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

Social & Environmental Responsibility is the company responsibility which impacted to the Company's decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behavior.

• PURPOSE AND OBJECTIVES

The accompany has a high commitment to create sustainability in economic development and to improve the quality of life that is beneficial so as to encourage harmony with the community, especially around the Company's business location. The Company realizes the importance of Environmental Social Responsibility in supporting the company's operations with the Company's vision:

“To be the Leading Integrated Engineering Consulting Company in Southeast Asia and the No. 1 Customer”

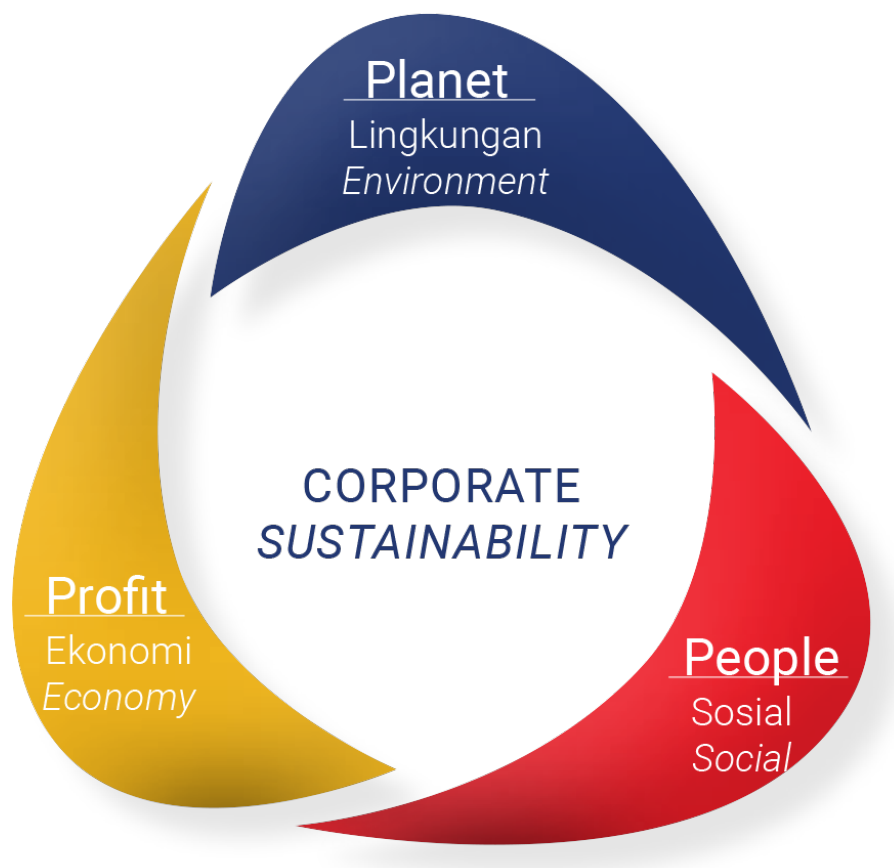
Throught this vision, PT PLN Enjiniring continuous to carry out its commitment to contribute in carrying out corporate social responsibility (CSR). This is an integral part of the company's operational activities. The company realizes that the company's performance is not only measured from the economic aspect, but also social and environmental performance. This awareness is based that corporate sustainability is reflected in the triple bottom line concept of people, profit and planet.

Maksud dari penyelenggaraan CSR Perusahaan adalah sebagai perwujudan visi dan misi Perusahaan untuk menciptakan kesinambungan dalam pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup yang bermanfaat. Adapun tujuan pelaksanaan CSR adalah sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan perekonomian masyarakat dan perbaikan lingkungan di sekitar tempat usaha khususnya di sektor ketenagalistrikan dengan kelompok sasaran program yaitu komunitas lokal / kelompok / konsumen, karyawan, lingkungan hidup, pemegang saham, kreditor, pemasok/ mitra kerja.
2. Meningkatkan pemahaman publik terhadap perusahaan melalui informasi yang disalurkan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan sehingga dapat menunjang peningkatan nilai perusahaan melalui pembentukan reputasi yang baik.

The purpose of organizing the Company CSR is as a manifestation of the Company vision and mission to create sustainability in economic development to improve the quality of the life that is beneficial. The objectives of implementing CSR are as follows:

1. *Encourage the community economic development and improvement around the place of business, especially in the electricity sector with the program target group's namely local communities / groups / Consumers, employees, environment, shareholders, creditors, supplier/ partners.*
2. *Increase public understanding on the company through information channeled in social activities so that it can support the increase in the company value through the establishment of good reputation.*



Bagi PT PLN Enjiniring, tujuan perusahaan tidak hanya semata-mata memenuhi kepentingan pemegang saham, akan tetapi juga memberikan kontribusi nilai bagi para pemangku kepentingan lainnya yang meliputi, karyawan, pelanggan, pemasok, dan pihak lainnya. Tujuan tersebut tertanam dalam setiap aktivitas perusahaan termasuk dalam hal ini adalah komitmen PT PLN Enjiniring dalam melestarikan lingkungan yang tercermin dalam berbagai kebijakan perusahaan.

• **KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL**

Dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, PT PLN Enjiniring menyusun Program CSR yang ditetapkan dalam Rencana dan Anggaran Perusahaan sesuai dengan Pedoman CSR yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 09.001.K/010/PLNE/VI/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Pedoman ini digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan kegiatan agar pelaksanaan kegiatan CSR di lingkungan PT PLN Enjiniring dapat terselenggara secara efektif, tepat sasaran dan berkelanjutan.

Prinsip-prinsip keberlanjutan yang digunakan dalam mendukung tercapainya tujuan-tujuan tersebut, PT PLN Enjiniring mengacu kepada standar ISO 26000 sebagai panduan prinsip keberlanjutan perusahaan. ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitas terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis sehingga pelaksanaan CSR bersifat holistik dan melibatkan berbagai fungsi di perusahaan. Prinsip-Prinsip keberlanjutan antara lain:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas yang membuktikan bahwa organisasi bersangkutan melakukan segala sesuatu dengan benar. Akuntabilitas yang diminta adalah terhadap seluruh pemangku kepentingan, dalam hal dampak Perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, termasuk dampak yang tidak disengaja atau tidak diperkirakan, Perusahaan seharusnya menerima dan bahkan mendorong penyelidikan mendalam atas dampak operasionalnya.

For PT PLN Enjiniring, the company objectives not only to fulfill the interests of shareholders, but also to contribute a value to other stakeholders, including employees, customers, supplier and other parties. These objectives are embedded in every activity of the company including in this case the PLN Enjiniring commitment in preserving the environment which is reflected in various company policies.

• **POLICY AND IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY**

In the implementation of company social responsibility PT PLN Enjiniring prepares a CSR Program specified in Company Plans and Budgets in accordance with the CSR Guidelines stipulated in the Decision Letter of the Board of Directors Number 09.001.K/010/PLNE/VI/2015 regarding CSR Guideline. This guideline is used as a guideline in the management of activities so that the implementations of CSR activities within the PT PLN Enjiniring can be carried out effectively and on target as well as sustainably.

The sustainability principles used in supporting the achievement of these objectives, PT PLN Enjiniring refers to the ISO 26000 standard as a guiding principles for the company's sustainability. ISO 26000 translate social responsibility as the responsibility of an organization for the impact of decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behavior so that the implementation of CSR is holistic and involves various function in the company. Sustainability principles, among others:

1. Accountability

Accountability that proves that the organization is doing everything right. The accountability requested is for all stakeholders, in terms of the Company's impact on society and environment, including accidental or unanticipated impacts, the Company should accept and even encourage in-depth investigation of its operational impacts.

2. Transparansi

Perusahaan menyatakan secara transparan seluruh keputusan dan aktivitasnya yang mengakibatkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Perusahaan dituntut untuk melaksanakan keterbukaan yang jelas, akurat dan lengkap atas seluruh kebijakan, keputusan dan aktivitasnya.

3. Perilaku Etis

Perusahaan harus berperilaku etis sepanjang waktu, dengan menegakkan kejujuran, kesetaraan dan integritas. Penerapan perilaku etis dilaksanakan melalui: (a) Pengembangan struktur tata kelola yang mendorong perilaku etis, (b) Membuat dan mengaplikasikan perilaku etis baku, dan (c) Terus menerus meningkatkan perilaku etis baku tersebut.

4. Penghormatan kepada pemangku kepentingan Perusahaan

Menghormati dan menanggapi kepentingan seluruh Pemangku Kepentingan. Hal-hal yang harus dilakukan adalah: (a) Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan, (b) Menanggapi kebutuhannya, (c) Mengenali hak-hak legal dan kepentingan yang sah, serta (d) Mengenali kepentingan yang lebih luas terkait dengan pembangunan berkelanjutan.

5. Kepatuhan terhadap Hukum

Perusahaan menerima bahwa kepatuhan terhadap hukum adalah suatu kewajiban. Hal-hal yang harus dilakukan adalah (a) Patuh terhadap semua peraturan, (b) Memastikan bahwa seluruh aktivitasnya sesuai dengan kerangka hukum yang relevan, (c) Patuh pada seluruh aturan yang dibuatnya sendiri secara adil dan tidak memihak, (d) Mengetahui perubahan-perubahan dalam peraturan-perundangan, dan (e) Secara berkala memeriksa kepatuhannya.

2. Transparency

The company transparently states all its decisions and activities that have an impact on society and environment. Company is required to implement clear, accurate and complete disclosure of all policies, decisions and activities.

3. Ethical Behavior

Companies must behave ethically at all times, upholding honesty, equality and integrity. The practice of ethical behavior is implemented through: (a) development governance structures that encourage ethical behavior, (b) create and apply standard ethical behavior, and (c) continuously improving the standard ethical behavior.

4. Respect for the Company's stakeholders

Respect and respond to the interests of all Stakeholders. The things that must be done are: (a) identifying Stakeholders, (b) responding to their needs, (c) recognizing legal rights and legitimate interests, and (d) identifying broader interests related to sustainable development.

5. Compliance with Laws

The company accepts that compliance with the law is an obligation. Things that must be done are (a) comply with all regulations, (b) ensure that all activities are in suitable with the relevant legal framework, (c) comply with all rules that he/she made themselves fairly and impartially, (d) aware of the changes in laws and regulations, and (e) periodically checking compliance.

6. Penghormatan Terhadap Norma Perilaku International

Di negara-negara di mana hukum nasionalnya atau implementasinya tidak mencukupi untuk melindungi kondisi lingkungan dan sosialnya, Perusahaan harus mengacu kepada norma perilaku internasional.

7. Penghormatan terhadap HAM

Perusahaan menghormati HAM, serta mengakui betapa pentingnya HAM serta sifatnya yang universal. Hal-hal yang harus dilakukan, apabila ditemukan situasi HAM tidak terlindungi, Perusahaan tersebut harus tetap melindungi HAM, dan tidak mengambil kesempatan dari situasi itu, dan apabila tak ada peraturan perundangan HAM di tingkat nasional, maka Perusahaan harus mengacu pada nilai baku HAM internasional.

• UNIT PENGELOLAAN CSR PERUSAHAAN

Dalam pelaksanaan kegiatan CSR di lingkungan PT PLN Enjiniring, Sekretaris Perusahaan melalui Sub Bidang Kinerja dan Komunikasi berperan sebagai fasilitator dan memberikan perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan dokumentasi kegiatan CSR.

• PENERAPAN CSR SECARA HOLISTIK

Bagi PT PLN Enjiniring, CSR bukan hanya sekedar membagi donasi dan kegiatan sosial. Penerapan CSR di PT PLN Enjiniring dikelola secara holistik dalam rangka memenuhi tanggung jawab perusahaan kepada Semua pemangku kepentingan. Kegiatan CSR diimplementasikan pada setiap hubungan antara Perusahaan dan para pemangku kepentingan.

• KEBIJAKAN

Komitmen PT PLN Enjiniring untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan dituangkan dalam Surat Edaran Direksi yang dilaksanakan melalui berbagai program, baik di lingkungan internal maupun di lingkungan masyarakat. Dampak lingkungan yang timbul akibat operasional perusahaan harus ditekan serendah mungkin dan Perseroan bertanggung jawab atas dampak tersebut.

6. Respect for the Norms of International Conduct

In countries where its laws or their implementation are insufficient to protect their environmental and social conditions, Companies must comply with international norms of conduct.

7. Respect for human rights

Human rights is respected by the company, and recognizes on how important it is. Things that must be done, if a human rights is not protected, the company must continue to protect human rights, and not take advantage of it situation, and if there is no human rights regulation at the state law, the company must refer to international human rights standards.

• DEPARTMENT OF CORPORATE CSR MANAGEMENT

In implementing CSR activities within PT PLN Enjiniring, the Corporate Secretary acts as a facilitator and provides planning, implementation and preparation of CSR activities documentation.

• HOLISTIC IMPLEMENTATION OF CSR

For PT PLN Enjiniring, CSR is not just about sharing donations and social activities. The implementation of CSR at PT PLN Enjiniring is managed holistically in order to fulfill the company's responsibilities to all stakeholders. CSR activities are implemented in every relationship between the Company and its stakeholders.

• POLICY

PT PLN Enjiniring commitment to be environmentally responsible is stated in the Directors decree which is implemented through various programs, both internally and in the community. Environmental arising impacts from the company's operational must be kept as low as possible and the Company is responsible for these impacts.

Perusahaan memberikan kontribusi terhadap pembangunan keberlanjutan dengan mempertimbangkan harapan para pemangku kepentingan dan mengintegrasikan program-program sosial demi menciptakan perusahaan yang lebih peduli kepada lingkungan

The company contribution in sustainable development considering the stakeholders expectation and integrating social programs in order to create a company that cares more for the environment

• SASARAN STRATEGIS

PT PLN Enjiniring berupaya untuk melakukan berbagai program dengan merujuk pada ruang lingkup implementasi dari CSR berbasis pada ISO 26000, yang terdiri dari:

- a) Tata Kelola Organisasi, Kepatuhan pada hukum, akuntabilitas, transparansi, kode etik, pengenalan profil dan minat stakeholder;
- b) Hak Asasi Manusia, hak sipil dan politik, sosial, ekonomi, budaya dan kelompok rentan, serta hak dasar dalam kerja;
- c) Aktivitas Tenaga Kerja, hubungan antar pekerja, kondisi kerja dan perlindungan sosial, kesehatan, keamanan kerja dan sumber daya manusia;
- d) Lingkungan, preventif polusi, konsumsi berkelanjutan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, proteksi dan restorasi lingkungan alam;
- e) Aktivitas operasi yang adil, anti korupsi dan anti suap, kompetisi yang adil, promosi tanggung jawab sosial melalui rantai pasok, perhatian pada Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
- f) Isu Konsumen, marketing yang adil, perlindungan keamanan dan kesehatan konsumen, pengembangan produk dan jasa yang memeberikan manfaat sosial dan lingkungan, layanan konsumen, penyelesaian perselisihan, privasi/perindungan data konsumen, akses pada produk dan servis utama, konsumsi berkelanjutan, pendidikan dan kepedulian; dan
- g) Kontribusi pada komunitas dan masyarakat, melibatkan komunitas, kontribusi pada pengembangan ekonomi dan kontribusi pada pengembangan sosial (TJSL).

• STRATEGIC TARGET

PT PLN Enjiniring strives to carry out various programs by referring to the scope of implementation of CSR based on ISO 26000, which consists of:

- a) *Organizational Governance, Compliance with law, accountability, transparency, code of ethics, profile recognition and stakeholder interest;*
- b) *Human rights, civil and political rights, social, economic, cultural and vulnerable groups, as well as basic rights at work;*
- c) *Labor activities, relations between workers, working conditions and social protection, health, job security and human resources;*
- d) *Environment, pollution prevention, sustainable consumption, climate change adaptation and mitigation, protection and restoration of the natural environment;*
- e) *Fair operating activities, anti-corruption and anti-bribery, fair competition, promotion of social responsibility through the supply chain, attention to Intellectual Property Rights (IPR);*
- f) *Consumer Issues, fair marketing, protection of consumer safety and health, development of products and services that provide social and environmental benefits, consumer services, dispute resolution, consumer privacy/data protection, access to key products and services, sustainable consumption, education and care; and*
- g) *Contribution to the community and society, involving the community, contribution to economic development and contribution to social development (TJSL).*

- **PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI**

Sebagaimana bidang usaha utama PT PLN Enjiniring sebagai jasa konsultan enjiniring dalam industri ketenagalistrikan yang tidak memberikan dampak pencemaran terhadap lingkungan, maka tidak terdapat sertifikasi di bidang lingkungan.

- **AWARDS AND CERTIFICATIONS**

PLN Enjiniring main business is as an engineering consultant service in the electricity industry which have no impact on environmental pollution, because of that there is no environmental certification.



Corporate Social Responsibility (CSR) Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan, Dan Keselamatan Kerja

Corporate Social Responsibility (CSR) Related to Labor, Health and Safety Work

KETENAGAKERJAAN

- **Kebijakan**

PT PLN Enjiniring, sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang jasa konsultan enjiniring ketenagalistrikan, memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman arah tujuan perusahaan. Terkait dengan hubungan industrial antara perusahaan dengan tenaga kerja, PT PLN Enjiniring memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang menjadi landasan hukum tertinggi di perusahaan. Dalam PP, diatur tentang Sistem Manajemen SDM, Hubungan Kerja, Penghasilan, Pembinaan Pegawai, Disiplin Pegawai, Tata Tertib, Cuti, Perjalanan Dinas, Jaminan Sosial, Penghargaan Pensiun, Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Koperasi Pegawai, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Ketentuan Peralihan, dan lain-lain. PP PT PLN Enjiniring tunduk dan mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- **Kegiatan**

Program kerja terkait ketenagakerjaan yang dilaksanakan selama tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

1. Hubungan Kerja Pada PT PLN Enjiniring, tenaga kerja terbagi menjadi empat macam berdasarkan status hubungan kerjanya, yaitu Pegawai organik, Pegawai tugas karya, karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan karyawan Outsourcing (OS). Dalam pemenuhan tenaga kerja tersebut, jenis rekrutmen yang dilakukan berbeda satu dengan lainnya. Pegawai organik direkrut melalui sistem dan prosedur rekrutmen berdasarkan kebutuhan formasi jabatan dan formasi tenaga kerja (FJFTK) sesuai dengan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (MSDM-BK). Pegawai tugas karya direkrut berdasarkan

EMPLOYMENT

- **Policy**

PT PLN Enjiniring, as PT PLN (Persero) subsidiary company which is engaged in electricity engineering consulting services, has a vision and mission that guides the direction of the company's goals. Regarding industrial relations between companies and workers, PLN Enjiniring has a Company Regulation (PP) which is the highest legal basis in the company. In Company Regulation (PP), it regulating the HR Management System, Work Relations, Income, Employee Development, Employee Discipline, Rules, Leave, Official Travel, Social Security, Retirement Awards, Religious Holiday Allowances, Employee Cooperatives, Employee Termination and Retirement, Industrial Relations Dispute Resolution, Transitional Provisions, and others. PP PLN Enjiniring is subject and refers to Law no. 13 of 2003 concerning Manpower.

- **Activity**

Employment-related work programs implemented through 2021 include the following:

1. *Employment Relations at PLN Enjiniring, the labor force is divided into four types based on the work relationship status, namely organic employees, work assignments employees, Fixed Time Work Agreement (PKWT) employees, and outsourcing employees (OS). In fulfilling this labor force, the types of recruitment carried out are different from one to another. Organic employees are recruited through recruitment systems and procedures based on job formation needs and labor force formation (FJFTK) appropriate with Competency-Based HR Management (MSDM-BK). Work assignments employees are recruited*

kebutuhan FJ-FTK melalui seleksi fit and proper test. Sedangkan karyawan PKWT dan OS direkrut berdasarkan kebutuhan jenis pekerjaan administratif dan project based.

Pada 2021, komposisi karyawan kontrak (PKWT) sebesar 45,90%, pegawai Organik sebesar 41,36%, karyawan *outsourcing* sebesar 10,12%, dan pegawai tugas karya sebesar 2,52%. Besarnya dominasi karyawan kontrak di PT PLN Enjiniring disebabkan oleh proses bisnis perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultan enjiniring dan supervisi konstruksi, sehingga kebutuhan terhadap tenaga kerja ahli sangat tinggi, yang berbasis pada proyek, tetapi masa kerjanya tertentu. Hal ini dilakukan sebagai strategi perusahaan dalam mengefisienkan biaya kepegawaian dengan tidak memelihara tenaga kerja yang digunakan pada masa tertentu saja.

2. Pembinaan Pegawai PT PLN Enjiniring melakukan pembinaan Pegawai dengan tujuan untuk mendorong profesionalisme Pegawai, memelihara dan mengembangkan motivasi, kemampuan, dan produktivitas, serta memberikan kesempatan pengembangan karir.

Macam-macam kegiatan pembinaan Pegawai adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan dan pelatihan,
- b. Pembinaan karir,
- c. Penilaian unjuk kerja,
- d. Pemberian penghargaan,
- e. Penegakan peraturan disiplin, dan
- f. Pemberian sanksi disiplin.

Dalam menjaga kualitas SDM, kesinambungan program pengembangan kompetensi pegawai menjadi komitmen Perusahaan agar dapat mendukung kinerja perusahaan dan memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan. PT PLN Enjiniring telah merencanakan dan merumuskan kebutuhan pelatihan dan sertifikasi bagi Pegawai untuk periode tahun 2021 dalam kegiatan Training Need Analysis (TNA) secara mandiri mengikuti Prosedur Enjiniring (PE) 6.13.

based on the needs of the FJ-FTK through a fit and proper test selection. Meanwhile, PKWT and OS employees are recruited based on the needs of administrative and project based jobs.

In 2021, the composition of contract employees (PKWT) is 45.90%, Organic employees are 41.36%, outsourcing employees are 10.12%, and work-duty employees are 2.52%. The large dominance of contract employees at PT PLN Enjiniring is caused by the company's business processes that are engaged in engineering consulting services and construction supervision, so the need for skilled workers is very high, which is project-based, but has a certain working period. This is done as the company's strategy to streamline staffing costs by not maintaining the workforce only for a certain period of time.

2. *PLN Enjiniring Employee Development conducted to encourage employee professionalism, maintaining and developing motivation, abilities, and productivity, as well as providing career development opportunities.*

The types of employee coaching activities are as follows:

- a. *Training and Education Program*
- b. *Career Coaching*
- c. *Performance Assessment*
- d. *Awards*
- e. *Disciplinary Enforment, and*
- f. *Disciplinary Penalty*

In maintaining the quality of human resources, the employee competency development continuity program became the Company's commitment so that it can support the company's performance and make a positive contribution to the sustainability of the company's business. PLN Enjiniring planned and formulated the training and certification needs for employees on the 2021 period regarding Training Need Analysis (TNA) activities independently following Engineering Procedures (PE) 6.13.

Dalam melaksanakan pengembangan SDM, PT PLN Enjiniring bekerja sama dengan PLN Corporate University dan lembaga pelatihan dalam dan luar negeri. Selama tahun 2021, Perusahaan melaksanakan pengembangan kompetensi karyawan yang terdiri dari Selama tahun 2021, Perusahaan melaksanakan pengembangan kompetensi karyawan yang terdiri dari 81 Program Pelatihan dengan diikuti oleh 539 orang, serta 25 Program Sertifikasi dengan diikuti oleh 68 orang terdiri dari Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai. Pengembangan Kompetensi dilakukan dengan menerapkan prinsip persamaan kesempatan bagi semua karyawan.

Pembinaan kompetensi terdiri dari pembinaan level kompetensi dan pembinaan grade. Level kompetensi didasarkan pada bidang keilmuan, pengalaman, dan/atau kemampuan Pegawai dalam mengembangkan kompetensi sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Setiap level kompetensi terdiri dari beberapa grade yang menunjukkan tingkat penguasaan kompetensi individu pada level kompetensi tertentu. Level kompetensi dan grade melekat pada Pegawai, bukan pada Jabatan.

Pegawai diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk kinerja yang optimal. Sedangkan, Perusahaan wajib memberikan pembinaan dalam hal pengembangan kompetensi dan karir bagi Pegawai, dalam rangka memelihara dan memotivasi Pegawai untuk berkontribusi lebih dalam kinerja individu. Dalam hal ini, PT PLN Enjiniring telah memiliki ketentuan dalam Keputusan Direksi No. 05.001.K/DIR/PLNE/XII/2014 tentang Sistem Pembinaan Kompetensi dan Karir.

Pembinaan karir ditujukan kepada seluruh Pegawai dengan kesempatan yang sama dan dilakukan berdasarkan kompetensi, nilai unjuk kerja, dan dengan memperhatikan apresiasi Pegawai. Pembinaan karir adalah tanggung jawab dari atasan, Pegawai yang bersangkutan, dan pejabat yang menangani SDM. Selain digunakan untuk pembinaan karir, nilai unjuk kerja juga digunakan untuk memberikan penghargaan kepada Pegawai dalam bentuk insentif kerja. Penghargaan juga diberikan kepada Pegawai sebagai apresiasi Perusahaan dalam bentuk penghargaan kesetiaan kerja dan penghargaan pensiun.

In developing its human resource, PT PLN Enjiniring collaborates with PLN Corporate University and also domestic and foreign training institutions. During 2021, the Company implemented employee competency development consisting of 81 Training Programs with 539 participants, and 25 Certification Programs attended by 68 participants consisting of Members of the Board of Commissioners, Directors, Employees, and Contract / Outsourcing Employees. Competency development is carried out by applying the principle of equal opportunity for all employees.

Competency coaching consists of competency level and grade coaching. The competency level is based on the employee's scientific field, experience, and / or ability, in developing competencies that suitable with the job requirements. Each competency level consists of several grades which indicate the level of mastery of individual competencies at a certain competency level. Competency level and grade are attached to employees, not to positions.

Employees are expected to contribute in the form of optimal performance. Meanwhile, the Company is obliged to provide guidance in terms of competency and career development, in order to maintain and motivate employees to contribute more in individual performance. In this case, PT PLN Enjiniring already has provisions in the Decree of the Board of Directors No. 05.001.K / DIR / PLNE / XII / 2014 concerning Competency and Career Development Systems.

Career development is aimed at all employees with equal opportunities and is carried out based on competence, performance value, and with due regard for employee appreciation. Career development is the responsibility of superiors, concerned employees, and officials who handle HR. Apart from being used for career development, performance value is also used to reward employees in the form of work incentives. Awards are also given to employees as company appreciation in the form of work loyalty awards and retirement awards.

3. Penghargaan yang diberikan oleh PT PLN Enjiniring terdiri dari dua jenis, yaitu penghargaan ekstrinsik dan intrinsik. Penghargaan ekstrinsik diberikan kepada Pegawai dalam bentuk kompensasi dan manfaat. Kompensasi terdiri dari
 - a. kompensasi tetap bulanan (*Pay for Person* – P1),
 - b. tunjangan posisi (*Pay for Position* – P2), tunjangan prestasi (*Pay for Performance* – P3), tunjangan hari raya, cuti tahunan, cuti besar, bantuan ganti rugi, dan jaminan sosial pegawai,
 - c. imbal jasa dalam bentuk bonus kinerja.

Manfaat terdiri dari

- a. manfaat umum, antara lain pemeliharaan kesehatan, hak cuti, pakaian dinas, bantuan penggantian fasilitas perumahan, bantuan pinjaman pemilikan rumah, dan program pensiun, serta
- b. manfaat khusus, antara lain bantuan pemilikan kendaraan, alat komunikasi, laptop, dan fasilitas kerja.

Penghargaan intrinsik diberikan kepada Pegawai dalam bentuk

- a. Program pendidikan formal dan sertifikasi profesi, yang diberikan bagi Pegawai yang memenuhi persyaratan kriteria talenta tertentu,
- b. Fasilitas kerja khusus, yang diberikan atas dasar kontribusi dan/atau pencapaian inovasi yang memberikan keuntungan bagi Perusahaan dalam bentuk efisiensi biaya dan/atau peningkatan pendapatan,
- c. Program keseimbangan khusus, yang diberikan atas dasar efisiensi biaya kesehatan pribadi dan keluarga dan/atau pencapaian loyalitas kerja Pegawai,
- d. Bantuan hukum, yang diberikan dalam bentuk pembelaan atas tuntutan hukum terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan,
- e. Pengakuan, yang diberikan atas dasar penghargaan Direksi.

3. There are two types of awards given by PT PLN Enjiniring, namely extrinsic and intrinsic awards. Extrinsic awards are given to employees in the form of compensation and benefits. Compensation consists of:

- a. fixed monthly compensation (*Pay for Person* - P1),
- b. position allowances (*Pay for Position* - P2), achievement allowances (*Pay for Performance* - P3), holiday allowances, annual leave, large leave, compensation assistance, and employee social security,
- c. fees in the form of performance bonuses.

The benefits consist of:

- a. general benefits, including health care, leave rights, official clothing, assistance to replace housing facilities, assistance with housing loans, and pension programs, as well as,
- b. special benefits, including assistance for ownership of vehicles, communication devices, laptops and work facilities.

Intrinsic rewards are given to employees in form:

- a. Formal education programs and professional certification, which are given to employees who meet certain criteria for talent,
- b. Special work facilities, which are given on the basis of contribution and / or innovations achievement that benefit the Company in the form of cost efficiency and / or increased revenue,
- c. A special balance program, which is given on the basis of efficiency in personal and family health costs and / or achievement of employee job loyalty,
- d. Legal aid assistance, which is provided in the form of defense of legal claims related to the implementation of duties and responsibilities of the position,
- e. Recognition, which is given on the basis of an award from the Board of Directors.

Selain penghasilan dalam bentuk remunerasi tersebut di atas, PT PLN Enjiniring juga memberikan bonus sesuai dengan pencapaian kinerja dan kemampuan Perusahaan. Dalam hal PP PT PLN Enjiniring patuh terhadap ketentuan Undang Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, maka Perusahaan juga memberikan tunjangan wajib yaitu Tunjangan Hari Raya (THR) dan imbalan kerja lembur.

4. PT PLN Enjiniring mengatur Program Pensiun Pegawai dalam Keputusan Direksi No. 01.001.K/DIR/PLNE/IX/2017. Usia pensiun untuk seluruh Pegawai PT PLN Enjiniring adalah 56 tahun. Bagi Pegawai yang telah berusia 55 tahun dapat mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP). Untuk mempersiapkan Pegawai yang memasuki masa MPP tersebut, PT PLN Enjiniring memberikan pelatihan purna bakti. Diharapkan dengan bekal pelatihan ini, Pegawai dapat mempersiapkan diri di masa pensiun. Sementara itu, bagi Pegawai yang telah memasuki usia purna bakti diberikan kompensasi. Pegawai diikutsertakan dalam Program Jaminan Hari Tua (JHT), yaitu Kompensasi Jaminan Hari Tua sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku dan PSAK 24.
5. PT PLN Enjiniring senantiasa berkomitmen untuk memelihara hubungan industrial yang baik antara karyawan dengan manajemen serta menghormati hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan organisasi diwujudkan dengan penyaluran aspirasi karyawan yang baik dan sesuai dengan etika. Media komunikasi yang dapat digunakan untuk menyalurkan aspirasi karyawan tersebut berupa forum komunikasi yang diadakan pada dalam peringatan acara-acara Perusahaan, hari besar kenegaraan dan keagamaan.
PLN Enjiniring telah memiliki Serikat Pekerja yang terbentuk pada tanggal 29 Januari 2020, dimana beberapa Pegawai PLN Enjiniring membentuk sebuah Serikat Pekerja dengan nama Persatuan Pekerja Prima Enjiniring (P3E) dan telah dicatat dalam Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja

In addition to income in the form of remuneration mentioned above, PLN Enjiniring also provides bonuses in accordance with the Company's performance, achievements and capabilities. In the event that PP PT PLN Enjiniring complies with the applicable Law of the Republic of Indonesia No. 13 of 2013 concerning Manpower, the Company also provides mandatory allowances, namely Hari Raya Allowances (THR) and overtime benefits.

4. *PLN Enjiniring regulates Employee Pension Program in Directors Decree No. 01.001.K / DIR / PLNE / IX / 2017. The retirement age for all PLN Enjiniring employees is 56 years. Employees who are 55 years old can take the Retirement Preparation Period (MPP). To prepare the employees who enter the MPP period, PLN Enjiniring provides post-service training. It is hoped that with this training provision, employees can prepare themselves for retirement. Meanwhile, employees who have entered retirement age are given compensation. Employees are included in the Old Age Security Program (JHT), namely Old Age Security Compensation in accordance with the applicable Manpower Law and PSAK 24.*
5. *PT PLN Enjiniring is always committed to maintaining good industrial relations between employees and management and respecting the rights and obligations of employees in accordance with applicable laws and regulations. Organizational freedom is realized by channeling the aspirations of good employees and in accordance with ethics. Communication media that can be used to channel employee aspirations are in the form of a communication forum held in commemoration of Company events, state and religious holidays.*

PLN Enjiniring already has a Workers Union which was formed on January 29, 2020, where several PLN Enjiniring employees formed a Workers Union with the name Persatuan Pekerja Prima Enjiniring (P3E) and has been recorded in the Decree of the Head of the Manpower

dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 3027/-1.838 tanggal 10 November 2020. PLN Enjiniring memiliki komitmen untuk menciptakan kondisi yang sehat dan serasi sekaligus terciptanya ketenangan kerja sesuai dengan azas hubungan industrial. Tidak pernah terjadi pemogokan kerja, demonstrasi atau gangguan lainnya, yang menghentikan kegiatan operasional PLN Enjiniring maupun gugatan terkait peradilan hubungan industrial. Hal ini dikarenakan adanya pemahaman dan saling pengertian yang baik antara manajemen PLN Enjiniring dengan karyawan sebagai mitra yang saling mendukung satu sama lain.

and Transmigration Sub-Department of West Jakarta Administration Number 3027 /-1,838 on November 10, 2020. PLN Enjiniring has a commitment to create healthy and harmonious conditions while at the same time creating work peace in accordance with the principles of industrial relations. There were never any strikes, demonstrations or other disturbances, which stopped the PLN Enjiniring operational activities or lawsuits related to industrial relations justice. This is due to a good understanding and mutual understanding between PLN Enjiniring management and employees as partners who support each other.

KESEHATAN

• Kebijakan

Fasilitas pemeliharaan kesehatan adalah bagian dari penghargaan ekstrinsik yang masuk dalam kategori manfaat umum. PT PLN Enjiniring memberikan bantuan pemeliharaan kesehatan kepada Pegawai dan keluarganya diatur dalam Keputusan Direksi No. 01.001.K/DIR/PLNE/XI/2020 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pegawai dan Keluarga yang Ditanggung PT PLN Enjiniring. Bentuk pemeliharaan kesehatan yang ditanggung Perusahaan terdiri dari:

- a. Rawat jalan,
- b. Rawat inap,
- c. Pemeriksaan penunjang atas rekomendasi dokter untuk peneguhan diagnosa di laboratorium,
- d. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan sampai dengan anak ketiga,
- e. Gugur kandung,
- f. Perawatan di Unit Gawat Darurat (UGD),
- g. Program Keluarga Berencana (KB), imunisasi dan vaksinasi, khitan, pengobatan infertilitasi dan program bayi tabung,
- h. Perawatan gigi,
- i. Alat-alat rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi alat tubuh,
- j. Alat-alat cangkok/transplantasi,

HEALTH

• Policy

Health care facilities are part of an extrinsic award that falls into the category of general benefits. PLN Enjiniring provides health care assistance to employees and their families as regulated in the Decree of the Board of Directors No. 01.001.K/DIR/PLNE/XI/2020 concerning the Implementation of Health Care for Employees and Families covered by PT PLN Enjiniring. The form of health care borne by the Company consists of:

- a. Outpatient,
- b. Inpatient,
- c. Supporting examinations on the doctor's recommendation for confirmation of the diagnosis in the laboratory,
- d. Pregnancy examinations and assistance with childbirth up to the third child,
- e. Biological death,
- f. Care in the Emergency Unit (UGD),
- g. Family Planning Program (KB), immunization and vaccination, circumcision, infertilization treatment and IVF program,
- h. Dental care,
- i. Rehabilitation tools to restore the function of organs,
- j. Graft / transplant tools,

- k. Alat-alat kesehatan terkait jantung,
- l. Obat untuk penyembuhan sesuai dengan formularium obat dan Daftar Obat Perusahaan (DOP),
- m. Tindakan bedah plastik khusus akibat kecelakaan kerja,
- n. Terapi kejiwaan,

Pelaksanaan pemeliharaan kesehatan yang dilaksanakan PT PLN Enjiniring adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan dapat melanggan sarana kesehatan milik pemerintah atau swasta, berupa rumah sakit, klinik, poliklinik, puskesmas, dokter umum, dokter spesialis, psikolog, psikiater, apotek, laboratorium, dan tempat pemeriksaan penunjang lainnya,
2. Dalam hal sarana rawat inap, level Manajemen Atas/Fungsional I dan Manajemen Menengah/Fungsional II mendapat fasilitas rawat inap kelas VIP, level Manajemen Dasar/Fungsional III mendapat fasilitas rawat inap kelas I, dan level Supervisor Atas hingga Fungsional IV mendapat fasilitas rawat inap kelas II,
3. Perusahaan melakukan upaya pencegahan gangguan kesehatan dengan cara:
 - a. Penyediaan sarana olahraga dan fasilitas olahraga lainnya;
 - b. Penyampaian informasi kesehatan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, ataupun seminar;
 - c. Pemeriksaan kesehatan tiap satu tahun sekali bagi Pegawai berusia di atas 40 tahun dan Pegawai yang bertugas di tempat berpotensi mengakibatkan penyakit.
 - d. Memfasilitasi kegiatan di bidang kesehatan dan olahraga,
 - e. Penyediaan sarana untuk ibu menyusui dan penitipan anak sampai dengan usia tiga tahun.

- k. *Heart related medical devices,*
- l. *Medicines for healing in accordance with the drug formulary and the Company Drug List (DOP),*
- m. *Special plastic surgery due to occupational accidents,*
- n. *Psychiatric therapy,*

Implementation of health care carried out by PLN Enjiniring is as follows:

1. *Companies can subscribe to government-owned or private health facilities, in the form of hospitals, clinics, polyclinics, health centers, general practitioners, specialists, psychologists, psychiatrists, pharmacies, laboratories, and other supporting examination places,*
2. *In terms of inpatient facilities, Upper Management / Functional I and Middle / Functional II inpatient facilities receive VIP class inpatient facilities, Basic / Functional III inpatient facilities class I, and Upper Supervisor to Functional IV levels receive class inpatient facilities II,*
3. *The company makes efforts to prevent health problems by:*
 - a. *Provision of sports facilities and other sports facilities;*
 - b. *Delivering health information in the form of counseling, socialization, or seminars;*
 - c. *Health checks every once a year for employees over 40 years of age and employees who work in places that have the potential to cause illness.*
 - d. *Facilitating activities in the field of health and sports,*
 - e. *Provision of facilities for breastfeeding mothers and child care up to the age of three.*

KESELAMATAN KERJA

• Kebijakan

PT PLN Enjiniring berkomitmen untuk senantiasa menjaga keselamatan kerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP) yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 26.001.K/DIR/PLNE/V/2015 dan disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta no. 404 tahun 2017. Sejak tahun 2016, sesuai dengan Risalah RUPS tanggal 19 Januari 2016, Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan Hidup (K3LH) menjadi salah satu indikator kinerja PT PLN Enjiniring yang tertuang dalam Kontrak Manajemen/ Key Performance Indicator (KPI) tahun 2017 dalam perspektif kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggung Jawab Masyarakat. Oleh karena itu, PT PLN Enjiniring membentuk Tim Setup Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 27.001.K/DIR/PLNE/VI/2016 dan dilanjutkan dengan membentuk Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 06.003.K/DIR/PLNE/VII/2020, Tim Pengawas K3 yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 06.004.K/DIR/PLNE/VII/2020, dan Tim Tanggap Darurat yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 06.002.K/DIR/PLNE/VII/2020.

• Kegiatan

Dalam mendukung komitmen untuk menyelenggarakan program-program terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja, PT PLN Enjiniring memberikan pembekalan bagi tim dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi. Beberapa judul pelatihan dan sertifikasi yang telah terlaksana di tahun 2021 sebagai berikut:

WORK SAFETY

• Policy

PT PLN Enjiniring is committed to always maintaining work safety as stated in the Company Regulation (PP) which is stipulated in the Decree of the Board of Directors No. 26.001.K / DIR / PLNE / V / 2015 and legalized by the Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province no. 404 of 2017. Since 2016, according to the Minutes of the GMS dated 19 January 2016, Health, Safety and Environment (K3LH) has become one of the performance indicators for PLN Enjiniring as stated in the 2017 Key Performance Indicator (KPI) Contract. a leadership perspective, Governance, and Community Responsibility. Therefore, PLN Enjiniring formed the Occupational Health and Safety Management System Setup Team as stipulated in the Decree of the Board of Directors No. 27.001.K / DIR / PLNE / VI / 2016 and continued by forming an Occupational Health and Safety Committee (P2K3) as stipulated in the Decree of the Board of Directors No. 06.003.K / DIR / PLNE / VII / 2020, K3 Supervisory Team as stipulated in the Decree of the Board of Directors No. 06.004.K / DIR / PLNE / VII / 2020, and the Emergency Response Team as stipulated in the Decree of the Board of Directors No. 06.002.K / DIR / PLNE / VII / 2020.

• Activity

In supporting the commitment to carry out programs related to Occupational Health and Safety, PT PLN Enjiniring provides provision for the team in the form of training and certification. Some of the training and certification titles that have been carried out in 2021 are as follows:

TABEL PELAKSANAAN SERTIFIKASI K3 TAHUN 2021
TABLE OF 2021 K3 CERTIFICATION IMPLEMENTATION

No.	Waktu Pelaksanaan <i>Execution Time</i>	Jenis/Judul Sertifikasi <i>Type / Title of Certification</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>	Jumlah Peserta <i>Number of Participants*</i>
1	Januari	Pembinaan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	PT Phitagoras Global Duta	1
	<i>January</i>	<i>The Supervision Development of Occupational Safety and Health Norms</i>		
2	Januari	Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bidang Listrik	PT Phitagoras Global Duta	16
	<i>January</i>	<i>The Occupational Safety and Health (OSH) Norms of Supervision Training of Electrical</i>		
Total Jumlah Peserta Sertifikasi				17
Total Number of Certification Participants				

Selain program pelatihan dan sertifikasi, kegiatan terkait Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan Hidup (K3LH) di PT PLN Enjiniring adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dokumen pedoman K3,
2. Melakukan inspeksi APAR dan kotak P3K,
3. Pengadaan rambu-rambu K3 di dalam maupun di halaman kantor PT PLN Enjiniring,
4. Pemeriksaan lingkungan kantor, yaitu suhu, cahaya, debu, kebisingan,
5. Penerbitan SLO listrik, proteksi kebakaran, dan penyalur petir,
6. Membuat laporan kecelakaan kerja dan monitoring SMK3 untuk PT PLN (Persero) Pusat,
7. Membuat laporan P2K3 untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per Triwulan,

Beside training and certification programs, activities related to Health, Safety, and Environment (K3LH) at PLN Enjiniring are as follows:

1. *Prepare the Occupational Health and Safety (K3) guideline document,*
2. *Fire extinguisher inspection and first aid kit,*
3. *Procurement of K3 signs inside and on the PT PLN Enjiniring office yard,*
4. *Inspection of the office environment, namely temperature, light, dust, noise,*
5. *Issuance of electricity SLO, fire protection, and lightning distributor,*
6. *Creating work accident reports and monitoring SMK3 for PT PLN (Persero) Pusat,*
7. *Make a P2K3 report for the Manpower and Transmigration Office per quarter,*

Corporate Social Responsibility Terkait Pengembangan Sosial Dan Masyarakat

Corporate Social Responsibility Related to Social and Community Development

• Kebijakan

Sebagai bagian dari warga korporasi yang baik (*Good Corporate Citizenship*), PT PLN Enjiniring menyadari bahwa hubungan dengan masyarakat merupakan bentuk simbiosis mutualisme yang sangat menguntungkan bagi PT PLN Enjiniring. Kebijakan yang dimiliki PT PLN Enjiniring dituangkan dalam bentuk komitmen untuk membangun kesejahteraan bersama melalui berbagai upaya yang dapat dilakukan.

• Policy

As part of a Good Corporate Citizenship, PLN Enjiniring realizes that relations with the community in the form of mutualism symbiosis is very beneficial for PLN Enjiniring. The policies that are owned by PLN Enjiniring are outlined in the form of a commitment to build mutual welfare through various efforts that can be made.

• Kegiatan

Selama tahun 2021 PT PLN Enjiniring telah melaksanakan berbagai program *Corporate Social Responsibility* terkait sosial kemasyarakatan yang meliputi 4 (empat) kegiatan dengan total dengan rincian sebagai berikut:

• Activity

During 2021, PT PLN Enjiniring has implemented various Corporate Social Responsibility programs related to social communities which include 4 (four) activities in total with the following details:

KEGIATAN CSR TAHUN 2021

THE 2021 CSR EVENTS

No	Kegiatan	Jenis Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Biaya (Rp)	Mobilisasi/ Pelaksanaan
	<i>Activity</i>	<i>Type of Activity</i>	<i>Location</i>	<i>Time of Implementation</i>	<i>Cost (Rp)</i>	<i>Mobilization/ Implementation</i>
1	CSR Bantuan Rapid Antigen untuk penanggulangan COVID-19 <i>CSR Rapid Antigen Assistance for the prevention of COVID-19</i>	Kesehatan <i>Health Program</i>	PT PLN (Persero) Kantor Pusat <i>PT PLN (Persero) Head Office</i>	17 Maret 2021 <i>March 17, 2021</i>	13,000,000	13,000,000
2	CSR Pembangunan Jalan Desa Luwe <i>CSR for Luwe Village Road Construction</i>	Community Development	Sekitar Site CNG Plant Bangkanai <i>Around the Bangkanai CNG Plant Site</i>	03 Agustus 2021 <i>August 03, 2021</i>	21,000,000	21,000,000
3	CSR Webinar PLN Enjiniring Technology & Business Talk <i>CSR Webinar PLN Enjiniring Technology & Business Talk</i>	Community Relation	Via Zoom Meeting	10 November 2021 <i>November 10, 2021</i>	450,000	450,000

4	CSR PLNE International Webinar Energy Transition : Global Technology <i>CSR PLNE International Webinar Energy Transition : Global Technology</i>	Community Relation	Via Zoom Meeting	30 November 2021 <i>November 30, 2021</i>	5,000,000	5,000,000
---	---	--------------------	------------------	--	-----------	-----------

TOTAL

39,450,000

Sehingga total biaya CSR tahun 2021 adalah Rp 39.450.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan program CSR yang mendapat persetujuan untuk direalisasikan adalah seluruh kegiatan.

So that the total CSR cost in 2021 is Rp. 39,450,000, - (thirty nine million four hundred fifty thousand rupiah) and CSR programs that have been approved for realization are all activities.

Untuk pelaksanaan program CSR di Bangkanai, Tim Sub-Bidang Komunikasi dan Kinerja telah melakukan social mapping terhadap 7 isu penting yang timbul di wilayah kerja PT PLN Enjiniring dan bobot tertinggi adalah pembangunan PAUD di Desa Karendan.

For the implementation of the CSR program in Bangkanai, the Communication and Performance Sub-Division Team has carried out social mapping of 7 important issues arising in the PT PLN Enjiniring work area and the highest weight is the development of PAUD in Karendan Village.

Corporate Social Responsibility Terkait Tanggung Jawab Kepada Konsumen

Corporate Social Responsibility Related To Consumer Responsibility

• Kebijakan

PT PLN Enjiniring senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan. Perbaikan kualitas layanan dan kinerja PT PLN Enjiniring terus ditingkatkan dan berbagai upaya dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan baik pelanggan internal (PLN Group) maupun eksternal.

• Kegiatan

PT PLN Enjiniring senantiasa menjaga dan meningkatkan kepuasan pelanggan serta membangun hubungan dengan pelanggan. Salah satu pemenuhan kepuasan pelanggan ini dilakukan dengan cara mendengarkan suara pelanggan, baik pelanggan saat ini maupun pelanggan potensial. Sedangkan untuk membangun hubungan dengan pelanggan dilakukan dengan pengelolaan hubungan pelanggan dan pengelolaan aspirasi dan keluhan pelanggan.

Untuk memenuhi Kepuasan Pelanggan PT PLN Enjiniring dilakukan dengan cara mendengarkan, berinteraksi dan mengamati perilaku pelanggan guna memperoleh informasi atas produk dan layanan yang diberikan PT PLN Enjiniring kepada pelanggan internal (PLN Group) melalui rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh PT PLN (Persero) dan afiliasinya maupun yang diinisiasikan sendiri oleh PT PLN Enjiniring.

Pendekatan yang dilakukan PT PLN Enjiniring untuk menindaklanjuti suara pelanggan dan memperoleh informasi serta umpan balik pelanggan adalah sebagai berikut:

- Rapat koordinasi mingguan dan bulanan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi/ masukan serta umpan balik pelanggan pada setiap tahapan pekerjaan;

• Policy

PLN Enjiniring is always committed in providing the best service for all customers. Improvements in service quality and performance of PLN Enjiniring continue to be improved and various efforts are made to determine the level of customer satisfaction, both internal (PLN Group) and external customers.

• Activity

PLN Enjiniring always maintains and improves customer satisfaction and builds relationships with customers. One of the fulfillment of customer satisfaction is done by listening to the voice of customers, both current and potential customers. Meanwhile, to build relationships with customers is done by managing customer relationships and managing customer aspirations and complaints.

To fulfill customer satisfaction, PT PLN Enjiniring is done by listening, interacting and observing customer behavior in order to obtain information on products and services provided by PLN Enjiniring to internal customers (PLN Group) through coordination meetings held by PT PLN (Persero) and its affiliates as well as which was initiated by PT PLN Enjiniring.

The approach taken by PT PLN Enjiniring to follow up on customer voices and obtain customer information and feedback is as follows:

- *Weekly and monthly coordination meetings are held to obtain information / input and customer feedback at each stage of work;*

- Media komunikasi (Telepon, SMS, email dan website) untuk menampung aspirasi dan keluhan pelanggan;
- Survey Kepuasan, Loyalitas dan Keterikatan Pelanggan yang dilakukan setiap tahun oleh Bidang Pengembangan Usaha dan Perencanaan Korporat untuk memperoleh informasi mengenai persepsi pelanggan terhadap kinerja, kualitas layanan dan produk PT PLN Enjiniring;
- In-depth interview yang dilakukan kepada pelanggan potensial;
- Pendekatan secara personal; dan
- Customer Day

PT PLN Enjiniring menindaklanjuti aspirasi, keluhan dan umpan balik pelanggan untuk memperbaiki kinerja, mutu produk, dan kualitas layanan yang dilakukan PT PLN Enjiniring dengan cara:

- Mengoptimalkan fungsi kerja tim proyek untuk berkoordinasi dengan pelanggan dan menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan bulanan/sesuai permintaan pelanggan;
- Melakukan kunjungan lapangan untuk mendengarkan suara pelanggan, sehingga tim proyek dapat merespon langsung keluhan pelanggan.

Terkait dengan pelanggan potensial, suara pelanggan diperoleh melalui rapat formal, diskusi informal, survey, pameran, Customer Day dan media elektronik (Telepon, SMS, email dan website).

- *Communication media (telephone, SMS, email and website) to accommodate customer aspirations and complaints;*
- *Survey of Customer Satisfaction, Loyalty and Engagement that is conducted annually by the Business Development and Corporate Planning Sector to obtain information on customer perceptions of PLN Enjiniring performance, service quality and products;*
- *In-depth interviews conducted with potential customers;*
- *Personal approach; and*
- *Customer Day*

PLN Enjiniring follows up on customer aspirations, complaints and feedback to improve performance, product quality, and service quality carried out by PLN Enjiniring by:

- *Optimizing the project team work function to coordinate with customers and submit monthly work progress reports / according to customer requests;*
- *Conduct field visits to listen to customer voices, so that the project team can respond directly to customer complaints.*

Regarding potential customers, customer votes are obtained through formal meetings, informal discussions, surveys, exhibitions, Customer Days and electronic media (telephone, SMS, e-mail and website).

Corporate Social Responsibility Terkait Tanggung Jawab Kepada Negara

Corporate Social Responsibility Related to Responsibility to the State

• Kebijakan

PT PLN Enjiniring berkomitmen untuk senantiasa mendukung pembangunan negara dengan berkontribusi sesuai dengan bidang kerja dan usaha yang dijalankan. Tanggung jawab terhadap Negara diwujudkan dalam hal mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kepatuhan terhadap kewajiban membayar pajak dan dukungan terhadap program-program yang dicanangkan oleh Pemerintah.

• Kegiatan

Dukung Program 35.000 MW, Penerangi Nusantara. Terkait program 35.000 MW yang ditugaskan Pemerintah kepada PLN dalam menerangi Nusantara, PT PLN Enjiniring memiliki kontribusi penting dalam mewujudkannya. Hal ini tampak jelas dari penugasan PLN kepada PT PLN Enjiniring untuk “mengawal” beberapa tugas strategis berkenaan dengan konsultasi pengerjaan berbagai proyek strategis. PT PLN Enjiniring bekerja sama dengan beberapa perusahaan swasta, yang merupakan mitra kerja PLN, untuk penggunaan jasa injenir dari PT PLN Enjiniring.

PT PLN Enjiniring sebagai Perusahaan senantiasa memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Perusahaan menyadari bahwa kontribusi pajak yang dibayarkan dapat mendukung dan membantu pemerintah dalam berbagai program pembangunan negeri. Selama 5 (lima) tahun terakhir Perusahaan telah memberikan kontribusi pajak sebesar Rp 34.802 Milyar.

• Policy

PT PLN Enjiniring is committed to always supporting the country's development by contributing in accordance with the field of work and business being carried out. Responsibility to the State is manifested in terms of following the provisions of the applicable laws, compliance with the obligation to pay taxes and support for programs launched by the Government.

• Activity

Support the 35,000 MW Program, Lighting the Archipelago. Regarding the 35,000 MW program assigned by the Government to PLN in lighting up the archipelago, PT PLN Enjiniring has an important contribution to make. This is evident from the assignment of PLN to PT PLN Enjiniring to “guard” several strategic tasks with regard to consulting the work of various strategic projects. PT PLN Enjiniring collaborates with several private companies, which are PLN partners, to use engineering services from PT PLN Enjiniring.

PT PLN Enjiniring as a Company always fulfills its tax payment obligations. The company realizes that the tax contribution paid can support and assist the government in various domestic development programs. During the last 5 (five) years, the Company has contributed tax amounting to Rp 34,802 billion..

Adapun rincian kontribusi pajak selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut.

The details of tax contributions for the last 5 (five) years are as follows.

RINCIAN KONTRIBUSI PAJAK SELAMA 5 TAHUN

DETAILS OF TAX CONTRIBUTION FOR 5 YEARS

Tahun	Jumlah (Rp Juta)
<i>Year</i>	<i>Amount (IDR Million)</i>
2021	7,386
2020	4,947
2019	7,392
2018	5,056
2017	10,021
Total	23,571

Selama 5 (lima) tahun terakhir, PT PLN Enjiniring belum pernah mendapatkan teguran ataupun sanksi terkait dengan pemenuhan pembayaran pajak.

During the last 5 (five) years, PLN Enjiniring has never received a warning or sanction regarding the fulfillment of tax payments.

Corporate Social Responsibility Terkait Tanggung Jawab Kepada Kreditur

Corporate Social Responsibility With Responsibility To Creditors

• Kebijakan

Dalam Pedoman Perilaku yang telah ditetapkan oleh PT PLN Enjiniring diatur tentang Hubungan dengan Investor termasuk dalam hal ini adalah kreditur perusahaan. Dalam hubungan dengan Investor ditetapkan kebijakan sebagai berikut ;

1. Memilih investor yang terpercaya, kredibel dan bertanggung jawab.
2. Membuat perjanjian kerja yang saling menguntungkan.
3. Menjalin komunikasi secara jujur dan efektif dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi.
4. Menyediakan informasi yang aktual, akurat dan prospektif.
5. Menjaga kepercayaan investor.

• Pelaksanaan

PT PLN Enjiniring senantiasa berupaya untuk menerapkan aturan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Perilaku maupun aturan internal lainnya. Beberapa hal yang menunjukkan bahwa Perusahaan telah memenuhi apa yang telah ditetapkan bisa terlihat dalam hal-hal berikut ini.

1. Perusahaan tidak pernah melakukan restrukturisasi utang selama 5 (lima) tahun terakhir.
2. Perusahaan memiliki kemampuan membayar utang yang baik.

• Policy

In the Code of Conduct that has been established by PT PLN Enjiniring is regulated on The Relationship with Investors including in this case the creditors of the company. In relation to investors are set the following policie ;

1. Choose a trusted, credible and responsible investor.
2. Making work agreements that are mutually beneficial.
3. Maintain honest and effective communication while maintaining the confidentiality of data and information.
4. Provide actual, accurate and prospective information.
5. Maintain investor confidence.

• Implementation

PLN Enjiniring always strives to apply the rules set out in the Code of Conduct and other internal rules. Several things that show that the Company has fulfilled what has been determined can be seen in the following matters.

1. The company has never restructured its debt for the last 5 (five) years.
2. The company has a good debt repayment ability.

Corporate Social Responsibility Terkait Tanggung Jawab Kepada Pemasok

Corporate Social Responsibility With Responsibilities To Suppliers

• Kebijakan

Dalam Pedoman Perilaku yang telah ditetapkan oleh PT PLN Enjiniring diatur tentang Hubungan dengan Mitra Kerja/Pemasok. Dalam hubungan dengan Mitra Kerja/Pemasok ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Menjaga dan mengutamakan kepentingan Perusahaan.
2. Menilai secara obyektif, transparan dan akuntabel.
3. Membuat perjanjian kerja yang saling menguntungkan.
4. Menjalin komunikasi secara jujur dan efektif dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi.
5. Memberikan sanksi apabila tidak memenuhi kontrak kerja.

• Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa telah mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh Perusahaan.

PT PLN Enjiniring akan senantiasa melakukan evaluasi berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan. Untuk hal-hal yang pemenuhannya masih belum optimal akan segera ditindak lanjuti dengan upaya-upaya perbaikan sehingga tanggung jawab Perusahaan kepada Pemasok dapat terpenuhi dengan baik dan selanjutnya akan memberikan dampak positif terhadap kinerja Perusahaan secara berkelanjutan.

• Policy

In the Code of Conduct established by PLN Enjiniring, it regulates Relationships with Work Partners / Suppliers. In relation to Business Partners / Suppliers, the following policies are established:

1. *Maintain and prioritize the interests of the Company.*
2. *Assessing objectively, transparently and accountably.*
3. *Making work agreements that are mutually beneficial.*
4. *Maintain honest and effective communication while maintaining the confidentiality of data and information.*
5. *Provide sanctions if they do not fulfill the work contract.*

• Activity

The implementation of goods and services procurement activities has complied with what has been determined by the Company.

PLN Enjiniring will always conduct evaluations based on the results of the survey that has been conducted. For matters whose fulfillment is still not optimal, it will be immediately followed up with corrective efforts so that the Company's responsibilities to suppliers can be fulfilled properly and will subsequently have a positive impact on the Company's performance in a sustainable manner.



PLN ENJINIRING
www.plne.co.id

Account	Volume	Total # Closed	Total # in Operation	Total \$ Volume	Total \$ Equity
Account A	10	10	0	\$100,000	\$100,000
Account B	5	5	0	\$50,000	\$50,000
Account C	15	15	0	\$150,000	\$150,000
Account D	20	20	0	\$200,000	\$200,000
Account E	30	30	0	\$300,000	\$300,000
Account F	40	40	0	\$400,000	\$400,000
Account G	50	50	0	\$500,000	\$500,000
Account H	60	60	0	\$600,000	\$600,000
Account I	70	70	0	\$700,000	\$700,000
Account J	80	80	0	\$800,000	\$800,000
Account K	90	90	0	\$900,000	\$900,000
Account L	100	100	0	\$1,000,000	\$1,000,000

Laporan Keuangan

Financial Report



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG/
BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT REGARDING**

**TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

**THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR
THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020**

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY**

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Didik Sudarmadi
Alamat Kantor : Menara Enjiniring, Jl. Ciputat Raya No.123, RT.1/RW.8, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310
Jabatan : Presiden Direktur
2. Nama : Martono
Alamat Kantor : Menara Enjiniring, Jl. Ciputat Raya No.123, RT.1/RW.8, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310
Jabatan : Direktur Keuangan & Sumber Daya Manusia

On behalf of the Board of Director, we, the undersigned:

1. Name : Didik Sudarmadi
Office address : Menara Enjiniring, Jl. Ciputat Raya No.123, RT.1/RW.8, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310
Position : President Director
2. Name : Martono
Office address : Menara Enjiniring, Jl. Ciputat Raya No.123, RT.1/RW.8, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310
Position : Finance & Human Resource Director

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Prima Layanan Nasional Enjiniring dan entitas anak ("Grup");
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
3. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Grup.

1. Responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Prima Layanan Nasional Enjiniring and its subsidiary (the "Group");
2. The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
 - a. All information in the Group's consolidated financial statements have been disclosed in a complete and truthful manner;
 - b. The Group's consolidated financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts; and
3. We are responsible for the Group's internal control systems.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus, this statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of the Board of Director

Jakarta, 7 Juni/June 2022



Didik Sudarmadi
Martono

Didik Sudarmadi
Presiden Direktur/President Director

Martono
Direktur Keuangan & Sumber Daya Manusia/
Finance & Human Resource Director

PT Prima Layanan Nasional Enjiniring

Menara Enjiniring, Jalan Ciputat Raya No. 123, Kebayoran Lama - Jakarta 12310 - Indonesia

Tel: (62-21) 27510363, Fax: (62-21) 27510362

Website: <http://www.plne.co.id>, email: contact@plne.co.id



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Prima Layanan Nasional Enjiniring dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Prima Layanan Nasional Enjiniring and its subsidiary, which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2021, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id



Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Prima Layanan Nasional Enjiniring dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

JAKARTA,
7 Juni/June 2022

Firman Sababalat, CPA
Izin Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.1789

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Prima Layanan Nasional Enjiniring and its subsidiary as at 31 December 2021, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



Prima Layanan Nasional Enjiniring
01101/2.1025/AU.1/03/1789-1/1/VI/2022

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 1/1 Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2021
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	6	450,783	338,591	Cash and cash equivalents
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	7	2,696	2,858	Restricted cash in banks
Piutang usaha	8			Trade receivables
- Pihak berelasi		66,232	147,497	Related parties -
- Pihak ketiga		1,931	11,563	Third parties -
Piutang lain-lain				Other receivables
- Pihak berelasi	24	372	7,657	Related parties -
- Pihak ketiga		13,470	4,778	Third parties -
Piutang sewa pembiayaan	9	31,158	27,665	Finance lease receivables
Aset kontrak	10			Contract assets
- Pihak berelasi		187,440	210,059	Related parties -
- Pihak ketiga		5,072	5,115	Third parties -
Pajak dibayar di muka	22a			Prepaid taxes
- Pajak lainnya		59,265	74,829	Other taxes -
Biaya dibayar di muka dan uang muka	11	<u>12,557</u>	<u>17,749</u>	Prepaid expenses and advances
Jumlah Aset Lancar		<u>830,976</u>	<u>848,361</u>	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	7	22,938	23,128	Restricted cash in banks
Piutang sewa pembiayaan	9	182,755	213,913	Finance lease receivables
Investasi pada ventura bersama		11,764	9,851	Investments in joint venture
Aset tetap	12	20,801	31,131	Fixed assets
Pajak dibayar di muka	22a			Prepaid taxes
- Pajak penghasilan badan		-	1,336	Corporate income taxes -
- Pajak lainnya		39,214	-	Other taxes-
Biaya dibayar di muka dan uang muka	11	2,532	6,291	Prepaid expenses and advances
Aset tak berwujud		8,330	13,072	Intangible assets
Aset tidak lancar lainnya		<u>6,490</u>	<u>16,130</u>	Other non-current assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>294,824</u>	<u>314,852</u>	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		<u>1,125,800</u>	<u>1,163,213</u>	TOTAL ASSETS

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 1/2 Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2021
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2021	2020	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	13	66,764	103,490	Trade payables
Uang muka dari pelanggan	14	18,468	21,006	Advances from customer
Utang lain-lain		15,465	8,977	Other payables
Liabilitas kontrak	15			Contract liabilities
- Pihak berelasi		106,344	136,633	Related parties -
- Pihak ketiga		2,362	7,808	Third parties -
Utang pajak	22b			Taxes payable
- Pajak penghasilan badan		3,266	58	Corporate income taxes -
- Pajak lainnya		7,560	7,433	Other taxes -
Biaya masih harus dibayar	16	54,739	53,779	Accrued expenses
Liabilitas sewa		502	7,979	Lease liabilities
				Post-employment
Liabilitas imbalan pascakerja	23	1,617	1,999	benefit obligation
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	17	32,900	32,978	Current maturity of long-term loan
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>309,987</u>	<u>382,140</u>	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	17	23,119	55,050	Long-term loan - net of current maturity
Liabilitas imbalan kerja	23	31,705	25,554	Employment benefit liabilities
Liabilitas sewa		1,714	875	Lease liabilities
Utang lain-lain		369	142	Other payables
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>56,907</u>	<u>81,621</u>	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		<u>366,894</u>	<u>463,761</u>	TOTAL ASSETS
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham Rp1.000				Capital stock - 25,000,000 authorised, subscribed and paid-up shares at a par value of Rp1,000 (full amount) per share
Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh - 25.000.000 saham	18	25,000	25,000	Retained earnings
Saldo laba				Appropriated -
- Ditentukan penggunaannya		5,169	5,169	Unappropriated -
- Tidak ditentukan penggunaannya (Rugi)/penghasilan komprehensif lain		729,811	659,940	Other comprehensive (loss)/income
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		<u>758,891</u>	<u>699,438</u>	Equity attributable to owner of the Company
Kepentingan non-pengendali		15	14	Non-controlling interests
JUMLAH EKUITAS		<u>758,906</u>	<u>699,452</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>1,125,800</u>	<u>1,163,213</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lampiran 2 Schedule

**LAPORAN POSISI LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021**
(Expressed in millions of Rupiah)

	Catatan/ Notes	2021	2020	
PENDAPATAN	19	736,732	625,344	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	20	(500,492)	(436,166)	COST OF REVENUES
LABA BRUTO		236,240	189,178	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	21	(170,916)	(190,713)	OPERATING EXPENSES
LABA/(RUGI) USAHA		65,324	(1,535)	OPERATING INCOME/(LOSS)
Penghasilan bunga		8,321	9,637	Finance income
Laba/(rugi) investasi pada ventura bersama		2,138	(3,684)	Gain/(loss) on investments in joint ventures
Beban bunga		(9,090)	(14,732)	Interest expenses
Lain-lain - bersih		10,565	30,758	Others - net
LABA SEBELUM PAJAK		77,258	20,444	PROFIT BEFORE TAX
Beban pajak penghasilan	22d	(7,386)	(4,947)	Income tax expense
LABA TAHUN BERJALAN		69,872	15,497	PROFIT FOR THE YEAR
(Kerugian)/penghasilan komprehensif lain tahun berjalan				Other comprehensive (loss)/income for the year
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be subsequently reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali imbalan pascakerja karyawan	23	(826)	(1,069)	Remeasurement of post- employment benefit obligation
Pengukuran kembali nilai wajar atas atas investasi saham		(9,592)	2,336	Remeasurement of fair value of investments in shares
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		59,454	16,764	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada:				Profit for the year attributable to:
Pemilik entitas induk		69,871	15,496	Owners of the parent entity
Keperentingan non-pengendali		1	1	Non-controlling interest
JUMLAH		69,872	15,497	TOTAL
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan diatribusikan kepada:				Total comprehensive income for the year attributable to:
Pemilik entitas induk		59,453	16,763	Owners of the parent entity
Keperentingan non-pengendali		1	1	Non-controlling interest
JUMLAH		59,454	16,764	TOTAL

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 3 Schedule

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021**
(Expressed in millions of Rupiah)

	Komponen ekuitas lain/ Other components of equity		Saldo laba/Retained earnings Ditetapkan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	Pengkuran kembali imbangan pascakerja karyawan/ Remeasurement of employment benefit obligation	Perubahan nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya/ Changes in fair value of financial assets measured through other comprehensive income	Ekuitas yang dapat distribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to owners of the parent entity	Kepentingan nonpengendali/ Non-controlling Interest	Jumlah ekuitas/ Total equity
Saldo per 1 Januari 2020	25,000	5,169	644,444	(5,616)	-	-	668,997	13	669,010
Penyesuaian saldo awal atas penerapan PSAK No.71: Instrumen Keuangan	-	-	-	-	13,678	-	13,678	-	13,678
Saldo per 1 Januari 2020 setelah penyesuaian	25,000	5,169	644,444	(5,616)	13,678	-	682,675	13	682,688
Laba tahun berjalan	-	-	15,496	-	-	-	15,496	1	15,497
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	(1,069)	2,336	-	1,267	-	1,267
Saldo per 31 Desember 2020	25,000	5,169	659,940	(6,685)	16,014	-	699,438	14	699,452
Laba tahun berjalan	-	-	69,871	-	-	-	69,871	1	69,872
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	(826)	(9,592)	-	(10,418)	-	(10,418)
Saldo per 31 Desember 2021	25,000	5,169	729,811	(7,511)	6,422	-	758,891	15	758,906

Balance as at 1 January 2020

Opening balance adjustment
for adoption of SFAS No. 71:
Financial InstrumentsBalance as of 1 January 2020
after adjustmentProfit for the year
Total comprehensive income
for the year

Balance as at 31 December 2020

Profit for the year
Total comprehensive income
for the year

Balance as at 31 December 2021

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian.The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of
the consolidated financial statements.

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 4 Schedule

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2021**
(Expressed in millions of Rupiah)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
Laba sebelum pajak	77,258	20,444	Profit before tax
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba sebelum pajak:			Adjustments to reconcile profit before tax:
Laba/(rugi) investasi pada ventura bersama	(2,138)	3,684	Gain/(loss) on investments in joint ventures
Pendapatan dividen dari investasi saham	-	(1,785)	Dividend income from investment in shares
Beban imbalan pascakerja	7,280	7,944	Post-employment benefit expense
Penyisihan untuk penurunan nilai piutang usaha dan piutang lain-lain - bersih	8,307	31,987	Net allowances for impairment of trade and other receivables
Penyusutan aset tetap dan aset hak guna	12,386	15,376	Depreciation of fixed assets and right-of-use assets
Amortisasi perangkat lunak	6,853	6,243	Amortisation of software
Beban bunga	9,090	14,732	Interest expenses
Penghasilan bunga	(8,321)	(9,637)	Finance income
Arus kas operasi sebelum perubahan modal kerja	<u>110,715</u>	<u>88,988</u>	Operating cash flows before changes in working capital
Perubahan modal kerja:			Changes in working capital:
Piutang usaha	88,468	29,492	Trade receivables
Piutang lain-lain	(7,285)	(794)	Other receivables
Aset kontrak	22,662	16,892	Contract assets
Pajak dibayar di muka	(22,649)	(6,725)	Prepaid taxes
Biaya dibayar di muka dan uang muka	8,951	27,954	Prepaid expenses and advances
Aset tak berwujud	(2,111)	(3,113)	Intangible assets
Aset tidak lancar lainnya	48	422	Other non-current assets
Utang usaha	(36,726)	(30,606)	Trade payables
Uang muka dari pelanggan	(2,538)	(14,387)	Advances from customer
Utang lain-lain	6,715	3,491	Other payables
Liabilitas kontrak	(35,735)	30,298	Contract liabilities
Utang pajak lainnya	127	(4,372)	Other taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar	960	(866)	Accrued expenses
Penarikan/(penempatan) rekening bank yang dibatasi penggunaannya	352	(2,858)	Withdrawal/(placement) of restricted cash in banks
Penerimaan dari pelanggan atas piutang sewa pembiayaan	27,665	24,563	Receipts from customers of finance lease receivables
Penerimaan restitusi pajak pertambahan nilai	-	21,914	Restitution of value added tax
Penerimaan restitusi pajak penghasilan badan	335	-	Restitution of corporate income tax
Pembayaran bunga	(9,090)	(14,732)	Payments for interest expenses
Penerimaan bunga	8,321	9,637	Interest received
Pembayaran imbalan pascakerja	(2,337)	(220)	Payments of post-employment benefit
Pembayaran pajak penghasilan badan	(4,178)	(7,326)	Payments of corporate income tax
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	<u>152,670</u>	<u>167,652</u>	Net cash provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	-	(172)	Acquisition of fixed assets
Penerimaan dividen	225	1,976	Receipts of dividends
Kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi	<u>225</u>	<u>1,804</u>	Net cash provided by investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran liabilitas sewa	(8,694)	(25,675)	Payments of lease liabilities
Pembayaran atas pinjaman jangka panjang	(32,009)	(32,012)	Payments for long-term loan
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>(40,703)</u>	<u>(57,687)</u>	Net cash used in financing activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	112,192	111,769	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	<u>338,591</u>	<u>226,822</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	<u>450,783</u>	<u>338,591</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Lampiran 5/1 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Prima Layanan Nasional Enjiniring ("Perusahaan") didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris No. 9 tanggal 3 Oktober 2002 dari Haryanto S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No.C-00184.HT.01.01TH.2003 tanggal 6 Januari 2003 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 19, Tambahan No. 1891 tanggal 7 Maret 2003.

Akta Notaris Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 30 tanggal 30 November 2021 dari Lenny Janis Ishak, S.H., mengenai perubahan komisaris Perusahaan menjadi Komisaris Independen, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan terkait amandemen anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tanggal 21 Desember 2021 No. AHU-AH.01.03-0488625.

Perusahaan berdomisili di Jakarta. Kantor pusat berkedudukan di Jalan Ciputat Raya No.123, Jakarta. Perusahaan merupakan entitas anak Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN"). Kegiatan komersial Perusahaan dimulai pada tanggal 1 Januari 2003.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi usaha enjiniring, pengadaan dan konstruksi, operasi, pemeliharaan pada bidang ketenagalistrikan dan non-ketenagalistrikan sebagai berikut:

- a. Jasa konsultasi enjiniring dan atau manajemen proyek termasuk integrator proyek ketenagalistrikan;
- b. Studi sistem kelistrikan;
- c. Studi analisa mengenai dampak lingkungan ("AMDAL");
- d. Informasi teknologi;
- e. Pendidikan dan pelatihan;
- f. Penelitian dan pengembangan;
- g. Penyediaan tenaga listrik;
- h. Perencanaan, pengadaan dan pembangunan atau pemasangan (jasa konstruksi) bidang pembangkitan, transmisi dan atau distribusi;
- i. Pemeliharaan dan atau pengoperasian bidang pembangkitan, transmisi dan atau distribusi;
- j. Pengolahan, penimbunan, transportasi, niaga, pengoperasian dan pemeliharaan instalasi minyak dan/atau gas bumi; dan
- k. Penyediaan atau manufaktur berbagai peralatan elektrikal untuk transmisi dan elektrikal untuk transmisi dan distribusi listrik.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anaknya (bersama-sama disebut "Grup") masing-masing sebanyak 619 dan 833 (tidak diaudit).

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Prima Layanan Nasional Enjiniring ("the Company") was established in Jakarta based on Notarial Deed No. 9 dated 3 October 2002 of Haryanto S.H., a notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice and Human Rights in Decision Letter No.C-00184.HT.01.01TH.2003 dated 6 January 2003 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No, 19, Supplement No. 1891 dated 7 March 2003.

The Company's Notarial Deed have been amended several times, recently by Notarial Deed No. 30 dated 30 November 2021 of Lenny Janis Ishak, S.H., related to change of the Company's commissioner became Independent Commissioner, which notification regarding the amendment of its Article of Association had been duly received by Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia by virtue of its letter dated 21 December 2021 No. AHU-AH.01.03-0488625.

The Company is domiciled in Jakarta. The headquarters is located in Jalan Ciputat Raya No.123, Jakarta. The Company is a subsidiary of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN"). The commercial activity of the Company started on 1 January 2003.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of the Company's activities encompasses engineering, procurement and construction, operation and maintenance within the electricity and nonelectricity sectors. The activities are as follows:

- a. *Engineering consultancy services and/or project management including services related to project integrator electricity;*
- b. *Study of electrical systems;*
- c. *Study of environmental impact analysis ("EIA");*
- d. *Information technology;*
- e. *Education and training;*
- f. *Research and development;*
- g. *Electricity supply;*
- h. *Planning, procurement and construction or installation (construction services) of the generation, transmission and/or distribution of electricity;*
- i. *Maintenance and/or operation of the generation, transmission and/or distribution;*
- j. *Processing, stockpiling, transportation, trade, installation operation and maintenance of oil and/or gas; and*
- k. *Provision or manufacturing of various items of electrical equipment for electrical transmission and also for the transmission and distribution of electricity.*

As at 31 December 2021 and 2020, the Company and its subsidiary (collectively referred to as the "Group")'s total number of employees was 619 and 833 (unaudited), respectively.

Lampiran 5/2 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Susunan pengurus dan informasi lain

Susunan Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2021
Komisaris	
Komisaris Utama	Ahmad Rofik
Komisaris	M.R. Karliansyah
Komisaris	Edward Siagian
Komisaris	Hardiv Harris Situmeang

Susunan Direksi adalah sebagai berikut:

	2021
Direktur	
Direktur Utama	Didik Sudarmadi
Direktur	Martono
Direktur	Bernadus Sudarmanta
Direktur	Muhamad Reza

Susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

	2021
Komite Audit	
Ketua	Edward Siagian
Sekretaris	Bowo Setiadji
Anggota	Risma Royani
Anggota	Julita Saffitri Ewani
Anggota	-

1. GENERAL (continued)

b. Management and other information

The composition of the Company's Board of Commissioners was as follows:

	2020	
		Commissioner
Ahmad Rofik	Ahmad Rofik	President Commissioner
Djoko Prasetyo	Djoko Prasetyo	Commissioner
Edward Siagian	Edward Siagian	Commissioner
Marzuqi	Marzuqi	Commissioner

The composition of the Company's Board of Directors was as follows:

	2020	
		Director
Hernadi Buhron	Hernadi Buhron	President Director
Alfi Zamzani	Alfi Zamzani	Director
Yanuar Hakim	Yanuar Hakim	Director
Ultrizza Mednawarman	Ultrizza Mednawarman	Director

The composition of the Company's Audit Committee was as follows:

	2020	
		Audit Committee
Julius Bobo	Julius Bobo	Chairman
Raslan	Raslan	Secretary
Anita Mardalina	Anita Mardalina	Member
Djoko Juwanto	Djoko Juwanto	Member
Marzuqi	Marzuqi	Member

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") BARU DAN AMENDEMENT SERTA INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK")

Penerapan dari standar baru, interpretasi, amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan:

- PSAK No. 112, "Akuntansi Wakaf"
- Amendemen PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis - Definisi Bisnis"
- Amendemen PSAK No. 71, Amendemen PSAK No. 55, Amendemen PSAK No. 60, Amendemen PSAK No. 62 dan Amendemen PSAK No. 73 tentang "Reformasi Acuan Suku Bunga 2"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 110, "Akuntansi Sukuk"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 111, "Akuntansi Wa'd"
- Amendemen PSAK 73, "COVID-19 Terkait Konsesi Rental"
- Penyesuaian tahunan atas PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan", PSAK No. 13, "Properti Investasi", PSAK No. 48, "Penurunan Nilai Aset", PSAK No. 66, "Pengaturan Bersama" dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") No. 16, "Pengaturan Jasa Konsesi"

2. NEW AND AMENDMENT STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("SFAS") AND INTERPRETATIONS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("IFAS")

The adoption of the following new standards, interpretations, amendments and annual improvements to accounting standards, all of which have been effective since 1 January 2021 did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the consolidated financial statements for the current year:

- SFAS No. 112, "Accounting for Endowments"
- Amendment SFAS No. 22, "Business Combinations - Business Definition"
- Amendment to SFAS No. 71, Amendment to SFAS No. 55, Amendment SFAS No. 60, Amendment SFAS No. 62 and Amendment to SFAS No. 73 regarding "Interest Rate Benchmark Reform II"
- Annual improvement to SFAS No. 110, "Sukuk Accounting"
- Annual improvement to SFAS No. 111, "Wa'd Accounting"
- Amendment to SFAS No. 73, "COVID-19 related Rent Concessions"
- Annual improvements to SFAS No. 1, "Presentation of Financial Statements", SFAS No. 13, "Investment Property", SFAS No. 48, "Impairment of Assets", SFAS No. 66, "Joint Arrangements" and Interpretation of Financial Accounting Standard ("ISFAS") No. 16, "Service Concession Arrangements"

Lampiran 5/3 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
("PSAK") BARU DAN AMENDEMENT SERTA
INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
("ISAK") (lanjutan)**

Standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

- Revisi PSAK No. 107, "Akuntansi Ijarah"
- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Liabilitas Lancar atau tidak lancar"
- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi"
- Amendemen PSAK No. 16, "Aset Tetap - Hasil Penggunaan yang Diintensifkan"
- Amendemen PSAK No. 22, "Bisnis Kombinasi Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan"
- Amendemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan - Definisi Estimasi Akuntansi"
- Amendemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan terkait Aset dan Kewajiban yang Timbul dari Satu Transaksi"
- Amendemen PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 69, "Agrikultur"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 73, "Sewa"
- PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi"
- Pengesahan amendemen PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK No. 74 dan PSAK No. 71 - Informasi Komparatif"

Standar baru, amendemen, revisi dan penyesuaian tahunan di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2022, kecuali Amendemen PSAK No. 1, Amendemen PSAK No. 16, Amendemen PSAK No. 25, Amendemen PSAK No. 46, dan Revisi PSAK No. 107 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2023 dan PSAK No. 74 dan Amendemen PSAK No. 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan.

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan ("SAK")

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang meliputi PSAK dan ISAK.

**2. NEW AND AMENDMENT STATEMENTS OF FINANCIAL
ACCOUNTING STANDARDS ("SFAS") AND
INTERPRETATIONS OF FINANCIAL ACCOUNTING
STANDARDS ("IFAS") (continued)**

The new standards, amendments and annual improvements that have been issued but that were not effective for the financial year beginning 1 January 2021 were as follows:

- Revision of SFAS No. 107, "Ijarah Accounting"
- Amendment of SFAS No. 1, "Presentation of financial statements - Classification of Liabilities as Current or Non-Current"
- Amendment to SFAS No. 1, "Presentation of Financial Statements - Disclosure of Accounting Policies"
- Amendment of SFAS No. 16, "Fixed Assets - Proceeds before Intended Use"
- Amendment of SFAS No. 22, "Business Combinations - References to the Conceptual Framework for Financial Reporting"
- Amendment to SFAS No. 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - Definition of Accounting Estimates"
- Amendment to SFAS No. 46, "Income Taxes - Deferred Tax related to Assets and Liabilities Arising from a Single Transaction"
- Amendment to SFAS No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets - Onerous Contracts - Cost of Fulfilling a Contract"
- Annual improvement to SFAS No. 69, "Agriculture"
- Annual improvement to SFAS No. 71, "Financial Instruments"
- Annual improvement to SFAS No. 73, "Leases"
- SFAS No. 74, "Insurance Contracts"
- Amendment to SFAS No. 74, "Insurance Contract relating to Initial Application of SFAS No. 74 and SFAS No. 71 - Comparative Information"

The above new standards, amendments, revision and annual improvements are effective beginning 1 January 2022, except for Amendments to SFAS No. 1, Amendment to SFAS No. 16, Amendment to SFAS No. 25, Amendment to SFAS No. 46, and Revision of SFAS No. 107 which are effective beginning 1 January 2023, and SFAS No. 74 and Amendment to SFAS No. 74, which are effective beginning 1 January 2025, but early adoption is permitted.

As at the issuance date of these consolidated financial statements, the Group was evaluating the potential impact of these new standards, amendments and annual improvements on the Group's consolidated financial statements.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
a. Compliance with the Financial Accounting Standards ("FAS")

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include SFAS and ISFAS.

Lampiran 5/4 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

b. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah ("Rp"), yang juga merupakan mata uang fungsional Grup. Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi tertentu yang penting. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 4.

Selain yang dijelaskan di Catatan 2, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

c. Prinsip-prinsip konsolidasian

i. Entitas anak

i.1. Konsolidasi

Entitas anak merupakan semua entitas (termasuk entitas bertujuan khusus), di mana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan suatu entitas ketika Grup memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal pengendalian beralih kepada Grup dan tidak lagi dikonsolidasi sejak tanggal hilangnya pengendalian.

Saldo, transaksi, penghasilan, dan beban intra kelompok usaha dieliminasi. Keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi intra kelompok usaha yang diakui dalam aset juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak telah diubah seperlunya untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan oleh Grup.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements, with the exception of cash flows, have been prepared on the accrual basis of accounting. The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah ("Rp"), which is also the functional currency of the Group. The measurement basis is the historical cost, except for certain accounts that are measured on the basis described in the related accounting policies.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the indirect method with cash flows being classified into operating, investing and financing activities.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgment in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 4.

Except as described in Note 2, the accounting policies applied are consistent with the financial statements for the year ended 31 December 2020, which conform to Indonesian Financial Accounting Standards.

c. Principles of consolidation

i. Subsidiary

i.1. Consolidation

Subsidiary is all the entities (including structured entities) over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect such returns through its power over the entity.

A subsidiary is consolidated from the date on which control is transferred to the Group and is de-consolidated from the date on which that control ceases.

Intragroup balances, transactions, income and expenses are eliminated. Profits and losses resulting from intragroup transactions that are recognised in assets are also eliminated. The accounting policies of subsidiary have been amended where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

Lampiran 5/5 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

i. Entitas anak (lanjutan)

i.2. Akuisisi

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat setiap kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk mengakuisisi entitas anak adalah nilai wajar seluruh aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui oleh pihak pengakuisisi kepada pemilik sebelumnya dari entitas yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup.

Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar setiap aset dan liabilitas yang dihasilkan dari suatu kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjensi yang diambil alih, yang diperoleh dalam kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Grup mengakui kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. Biaya terkait akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, Grup akan mengukur kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki pada pihak yang diakuisisi sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Selisih lebih antara imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali dalam pihak yang diakuisisi, dan nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepemilikan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi, dibandingkan dengan nilai wajar bagian Grup atas aset bersih teridentifikasi yang diakuisisi, dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah tersebut lebih kecil dari nilai wajar atas aset bersih teridentifikasi entitas anak yang diakuisisi dan pengukuran atas seluruh jumlah tersebut telah ditelaah, dalam hal pembelian dengan diskon, selisih tersebut diakui secara langsung dalam laba rugi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Principles of consolidation (continued)

i. Subsidiary (continued)

i.2. Acquisition

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group.

The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. The identifiable assets acquired and the liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values as at the acquisition date.

The Group recognises any non-controlling interest in the acquiree on an acquisition-by-acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Non-controlling interests are reported as equity in the consolidated statements of financial position, separate from the owner of the parent entity. Acquisition-related costs are expensed as incurred.

If the business combination is achieved in stages, the Group will remeasure its previously held equity interest in the acquiree at its fair value as at the acquisition date and recognise the resulting gain or loss, if any, in profit or loss. Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognised at its fair value as at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is deemed to be an asset or a liability are recognised in profit or loss. A contingent consideration that is classified as equity is not remeasured and its subsequent settlement is accounted for within equity.

The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree and the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquiree over the fair value of the Group's share of the identifiable net assets acquired are recorded as goodwill. If these amounts are less than the fair value of the net identifiable assets of the subsidiary acquired and the measurement of all amounts has been reviewed, in the case of a bargain purchase, the difference is recognised directly in profit or loss.

Lampiran 5/6 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

ii. Perubahan kepemilikan atas entitas anak tanpa kehilangan pengendalian

Transaksi dengan kepentingan nonpengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayarkan dan bagiannya atas jumlah tercatat aset neto yang diperoleh dicatat dalam ekuitas. Keuntungan atau kerugian atas pelepasan kepada kepentingan nonpengendali juga dicatat pada ekuitas.

iii. Pelepasan entitas anak

Ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, Grup menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang. Jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain juga direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh PSAK lain.

Sisa investasi pada entitas anak terdahulu diakui sebesar nilai wajarnya. Setiap perbedaan antara nilai tercatat sisa investasi pada tanggal hilangnya pengendalian dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan ventura bersama

Entitas asosiasi adalah suatu entitas di mana Grup mempunyai pengaruh signifikan, tetapi tidak mengendalikan, dan biasanya Grup memiliki 20% atau lebih hak suara, tetapi tidak melebihi 50% hak suara. Investasi pada entitas asosiasi dicatat pada laporan keuangan konsolidasian menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

Ventura bersama merupakan pengaturan bersama antara beberapa pihak yang melakukan kesepakatan pengendalian bersama yang memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Ventura bersama ini menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

- Akuisisi

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan, instrumen ekuitas yang diterbitkan atau liabilitas yang timbul atau diambil alih pada tanggal akuisisi, ditambah biaya yang berhubungan langsung dengan akuisisi.

Goodwill pada akuisisi entitas asosiasi atau ventura bersama merupakan selisih lebih yang terkait dengan biaya perolehan investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dengan bagian Grup atas nilai wajar neto aset teridentifikasi dari entitas asosiasi atau ventura bersama dan dimasukkan dalam jumlah tercatat investasi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Principles of consolidation (continued)

ii. Changes in ownership interest in subsidiary without loss of control

Transactions with non-controlling interests that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying amount of the net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

iii. Disposal of subsidiary

When the Group loses control of a subsidiary, the Group derecognises the assets (including any *goodwill*) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts as at the date on which control is lost. Amounts previously recognised in other comprehensive income are also reclassified to profit or loss, or transferred directly to retained earnings if required under other SFAS.

Any investment retained in the former subsidiary is recognised at its fair value. The difference between the carrying amount of the investment retained on the date when the control is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

iv. Accounting for associates and joint ventures

An associate is an entity over which the Group has significant influence, but not control, and is generally accompanied by a shareholding giving rise to voting rights of 20% or greater but not exceeding 50%. Investment in associates are accounted for in the consolidated financial statements using the equity method less impairment losses, if any.

A joint venture is a joint arrangement in which the parties that share joint control have rights to the net assets of the arrangement. Joint ventures are accounted for using the equity method less impairment losses, if any.

- Acquisitions

Investment in an associate or a joint venture is initially recognised at cost. The cost of an acquisition is measured at the fair value of the assets transferred, the equity instruments issued or the liabilities incurred or assumed as at the date of exchange, plus costs directly attributable to the acquisition.

Goodwill on the acquisition of an associate or a joint venture represents the excess of the cost of the acquisition of the associate or joint venture over the Group's share of the fair value of the identifiable net assets of the associate or joint venture and is included in the carrying amount of the investment.

Lampiran 5/7 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan ventura bersama (lanjutan)

- Metode ekuitas

Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi atau ventura bersama setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian Grup atas penghasilan komprehensif lain setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Perubahan dan penerimaan distribusi dari entitas asosiasi atau ventura bersama setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi.

Jika bagian Grup atas rugi entitas asosiasi atau ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi atau ventura bersama, termasuk piutang tidak lancar tanpa jaminan, maka Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut, kecuali Grup memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau telah melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama.

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi atau ventura bersama dieliminasi sebesar bagian Grup dalam entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi atau ventura bersama akan disesuaikan, apabila diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Grup.

Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi atau ventura bersama diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Jika bukti tersebut ada, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dan mengakui selisih tersebut pada laba rugi.

- Pelepasan

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dihentikan pengakuannya apabila Grup tidak lagi memiliki pengaruh signifikan. Grup mengukur investasi yang tersisa sebesar nilai wajar. Selisih antara jumlah tercatat investasi yang tersisa pada tanggal hilangnya pengaruh signifikan dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Principles of consolidation (continued)

iv. Accounting for associates and joint ventures (continued)

- Equity method

In applying the equity method of accounting, the Group's share of its associate's or joint venture's post-acquisition profit or loss is recognised in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognised in other comprehensive income.

These post-acquisition movements and distributions received from an associate or a joint venture are adjusted against the carrying amounts of the investment.

When the Group's share of the losses of an associate or a joint venture equals or exceeds its interest in the associate or joint venture, including any other unsecured non-current receivables, the Group does not recognise further losses unless it has obligations to make or has made payments on behalf of the associate or joint venture.

Unrealised gains on transactions between the Group and its associates or joint ventures are eliminated to the extent of the Group's interest in the associate or joint venture. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of the impairment of the asset being transferred. The accounting policies of the associate or joint venture have been changed where necessary to ensure consistency with the accounting policies adopted by the Group.

Dividend receivables from an associate or a joint venture are recognised as reductions in the carrying amount of the investment.

At each reporting date, the Group determines whether there is any objective evidence that the investment in an associate or joint venture is impaired. If any such evidence exists, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate or the joint venture and its carrying amount and recognises the amount in profit or loss.

- Disposals

An investment in an associate or a joint venture is derecognised when the Group loses significant influence and subsequently any retained equity interest in the entity is remeasured at its fair value. The difference between the carrying amount of the retained interest at the date when significant influence is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

Lampiran 5/8 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan ventura bersama (lanjutan)

- Pelepasan (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan sebagian atau dilusi yang timbul pada investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama dimana pengaruh signifikan masih dipertahankan diakui dalam laba rugi dan hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba rugi.

d. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Mata uang fungsional dan penyajian

Pembukuan Grup diselenggarakan dalam mata uang Rupiah, mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsionalnya). Transaksi-transaksi selama periode berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali selisih kurs mata uang asing yang dikapitalisasi sebagai biaya pinjaman.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kurs konversi yang digunakan Grup sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Mata uang		
US\$	14,269	14,105
CNY	2,238	2,161

*) dalam jumlah penuh/in full amount

e. Transaksi pihak-pihak berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No.7 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

Saldo dan transaksi yang material antara Perusahaan dengan entitas berelasi dengan Pemerintah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

Perusahaan memilih untuk mengungkapkan transaksi dengan entitas berelasi dengan Pemerintah dengan menggunakan pengecualian dari persyaratan pengungkapan pihak berelasi.

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Principles of consolidation (continued)

iv. Accounting for associates and joint ventures (continued)

- Disposals (continued)

Gains and losses arising from the partial disposal or dilution of an investment in an associate or a joint venture in which significant influence is retained are recognised in profit or loss. Only a proportionate share of the amount previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss where appropriate.

d. Foreign currency transaction and balances

Functional and presentation currency

The accounts of the Group are maintained in Indonesian Rupiah, the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). Transactions during the period involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions were made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies were adjusted to reflect the rates of exchange prevailing at such a date. With the exception of the foreign exchange differences that are capitalised as borrowing costs, the resulting gains or losses are credited or charged to profit or loss.

On 31 December 2021 and 2020, the conversion rates used by the Group were as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Mata uang			Currency
US\$	14,269	14,105	US\$
CNY	2,238	2,161	CNY

e. Transactions with related parties

The Company has transactions with related parties as defined in SFAS No.7 "Related Party Disclosures".

Significant transactions and balances of the Company with Government-related entities are disclosed in the relevant notes to the financial statements.

The Company elected to disclose the transaction with the Government-related entities, using the exemption from general related party disclosure requirements.

Transactions with the related parties are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those of transactions between unrelated parties.

Lampiran 5/9 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)
e. Transaksi pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Kebijakan Perusahaan atas transaksi tersebut adalah dengan menggunakan persyaratan komersial normal.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

f. Aset keuangan
i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:

- aset keuangan yang diukur pada nilai wajar (baik melalui penghasilan komprehensif lain, atau melalui laba rugi), dan
- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas.

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah Grup telah melakukan pemilihan takterbatalkan pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

ii. Penghentian pengukuran

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

iii. Pengukuran

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
e. Transactions with related parties (continued)

The Company's policy on such transactions is to use normal commercial terms.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the financial statements

f. Financial assets
i. Classification, recognition and measurement

The Group classified its financial assets in the following measurement categories:

- those to be measured subsequently at fair value (either through other comprehensive income, or through profit or loss), and
- those to be measured at amortised cost.

The classification depended on the entity's business model for managing the financial assets and the contractual terms of the cash flows.

For assets measured at fair value, gains and losses will be recorded either in profit or loss or other comprehensive income. For investments in debt instruments, the manner of recording will depend on the business model in which the investment is held. For investments in equity instruments that are not held for trading, the manner of recording will depend on whether the Group has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment being measured at fair value through other comprehensive income.

The Group reclassifies debt investments when and only when its business model for managing such assets changes.

ii. Derecognition

Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the investments have expired or have been transferred and when the Group has transferred substantially all the risks and rewards of ownership.

iii. Measurement

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not measured at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.

Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are solely payments of principal and interest.

Lampiran 5/10 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

f. Aset keuangan (lanjutan)

iii. Pengukuran (lanjutan)

Instrumen utang

Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut. Ada tiga kategori pengukuran yang Grup mengklasifikasikan instrumen utangnya:

- Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dimana arus kas tersebut hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau penurunan nilainya. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
- Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI): Aset yang dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan untuk menjual aset keuangan, di mana arus kas aset tersebut hanya atas pembayaran pokok dan bunga, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Perubahan nilai tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs yang diakui dalam laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi dan diakui dalam keuntungan/(kerugian) lain-lain. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan dalam keuntungan dan kerugian lain-lain dan beban penurunan nilai pada beban lain-lain.
- Nilai wajar melalui laba rugi: Aset yang tidak memenuhi kriteria untuk biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laporan laba rugi dan disajikan bersih dalam laporan laba rugi di dalam keuntungan/(kerugian) lainnya dalam periode kemunculannya.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial assets (continued)

iii. Measurement (continued)

Debt instruments

Subsequent measurement of debt instruments depends on the Group's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the Group classifies its debt instruments:

- *Amortised cost: Assets that are held for the collection of contractual cash flows in cases where such cash flows represent solely payments of principal and interest are measured at amortised cost. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at amortised cost and that is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss when the asset is derecognised or impaired. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method.*
- *Fair value through other comprehensive income (FVOCI): Assets that are held for the collection of contractual cash flows and financial assets that are held for sale, in cases where the assets' cash flows represent solely payments of principal and interest, are measured at FVOCI. Movements in the carrying amount are taken through Other Comprehensive Income ("OCI"), except for the recognition of impairment gains or losses, interest revenue and foreign exchange gains and losses which are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from equity to profit or loss and recognised in other gains/(losses). Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains and losses are presented in other gains and losses and impairment expenses in other expenses.*
- *Fair value through profit or loss: Assets that do not meet the criteria for amortised cost or FVOCI are measured at fair value through profit or loss. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at fair value through profit or loss and that is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss and presented net in the statement of profit or loss within other gains/(losses) in the period in which it arises.*

Lampiran 5/11 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

f. Aset keuangan (lanjutan)

iii. Pengukuran (lanjutan)

Instrumen ekuitas

Grup selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Jika manajemen Grup telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar atas investasi ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain, tidak ada reklasifikasi keuntungan dan kerugian nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi tersebut. Dividen dari investasi semacam itu tetap diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lainnya ketika hak Grup untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui dalam keuntungan/(kerugian) lain-lain dalam laporan laba rugi sebagaimana berlaku. Kerugian penurunan nilai (dan pemulihan kerugian penurunan nilai) atas investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak dilaporkan secara terpisah dari perubahan nilai wajar lainnya.

g. Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.

Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Grup menerapkan "pendekatan yang disederhanakan" untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha, dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan "pendekatan umum" untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal. Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa, terkecuali kepada piutang-piutang yang dapat dinilai sendiri kerugian kredit ekspektasiannya.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial assets (continued)

iii. Measurement (continued)

Equity instruments

The Group subsequently measures all equity investments at fair value. In cases where the Group's management has elected to present the fair-value gains and losses on equity investments in other comprehensive income, there is no subsequent reclassification of fair value gains and losses to profit or loss following the derecognition of the investment. Dividends from such investments continue to be recognised in profit or loss as other income when the Group's right to receive payments is established.

Changes in the fair value of financial assets measured at fair value through profit or loss are recognised in other gains/(losses) in the statement of profit or loss as applicable. Impairment losses (and the reversal of impairment losses) on equity investments measured at FVOCI are not reported separately from other changes in fair value.

g. Impairment of financial assets

At each reporting date, the Group assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses.

To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and considers reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Group applies the "simplified approach" to measuring expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables, other receivables and contract assets without significant financing components and the "general approach" for other financial assets. The general approach incorporates a review for any significant increase in counterparty credit risk since initial recognition. The expected credit loss reviews include assumptions about the risk of default and expected loss rates. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due, with the exception of the receivables which can be assessed at their own rating of expected credit losses.

Lampiran 5/12 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Saling hapus antar instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

i. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

j. Rekening bank yang dibatasi penggunaannya

Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya, digunakan sebagai jaminan atau yang tidak dapat digunakan secara bebas digolongkan dalam kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya.

k. Piutang usaha dan piutang lain-lain

Piutang usaha adalah jumlah piutang pelanggan atas jasa yang diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha biasa. Piutang lain-lain adalah jumlah piutang pihak ketiga atau pihak berelasi diluar kegiatan usaha biasa. Jika penagihan diperkirakan diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi usaha biasa, jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak demikian, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi dengan provisi atas penurunan nilai.

Jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi. Ketika piutang usaha atau piutang non-usaha, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih pada periode selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukkan dengan mengurangi akun penyisihan. Keberhasilan penagihan kembali di kemudian hari atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukkan, dikreditkan pada laba rugi.

l. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amount and when there is an intention to settle on a net basis or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

i. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits with maturities of three months or less from the date of placement that are not used as collateral or that are unrestricted.

j. Restricted cash in banks

Cash and cash equivalents which have been restricted for certain purposes, used for collateral or which can not be used freely are classified as restricted cash and cash equivalents.

k. Trade and other receivables

Trade receivables are amounts due from customers for services performed in the ordinary course of business. Other receivables are amounts due from third or related parties for transactions outside the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Trade and other receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any provision for impairment.

The amount of the impairment loss is recognised in profit or loss. When a trade or other receivable for which an impairment allowance had been recognised becomes uncollectible in a subsequent period, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited to profit or loss.

l. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortised over their beneficial periods using the straight-line method.

Lampiran 5/13 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

m. Aset tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan aset tetap meliputi: (a) harga pembelian, (b) biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisinya sekarang, dan (c) estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan dan restorasi lokasi aset (jika ada). Setiap bagian dari aset tetap dengan biaya perolehan yang signifikan terhadap total biaya perolehan aset, disusutkan secara terpisah.

Nilai residu dari aset adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh Grup dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, ketika aset telah mencapai akhir umur manfaatnya.

Penyusutan diakui dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

Tahun/Years

Perlengkapan umum

5

General equipment

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap diakui sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Tanah diakui sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan.

Biaya hukum awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah dan biaya-biaya tersebut tidak didepresiasi. Biaya terkait dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atas tanah.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Fixed assets

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. The cost of fixed assets includes: (a) the purchase price, (b) any costs directly attributable to bringing the asset to its present location and condition, and (c) the initial estimate of the cost of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located (if any). Each part of fixed assets with a cost that is significant in relation to the total cost of the item is depreciated separately.

The residual value of an asset is the estimated amount that the Group would currently obtain from the disposal of the asset after deducting the estimated costs of disposal, if the asset is already of the age and in the condition expected at the end of its useful life.

Depreciation is recognised using the straight-line method based on the estimated economic useful lives of the assets as follows:

Tahun/Years

5

General equipment

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year-end, and the effect of any changes in estimates is accounted for on a prospective basis.

The costs of maintenance and repairs are charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service a fixed assets are recognised as assets if and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognised on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition (that is determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when the item is derecognised.

Land rights are recognised at cost and not depreciated.

Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognised as part of the acquisition cost of the land and these costs are not depreciated. Costs related to the renewal of land rights are recognised as intangible assets and amortised over the contractual life of the land rights.

Lampiran 5/14 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

m. Aset tetap (lanjutan)

Grup menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat kejadian atau transaksi ekonomi yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK No. 73: hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK No. 16: Aset Tetap.

n. Penurunan nilai aset non-keuangan

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Untuk tujuan menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi (unit penghasil kas).

Aset nonkeuangan, selain *goodwill*, yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

Pembalikan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pemulihan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang diukur dengan menggunakan model revaluasi sesuai dengan PSAK yang lain. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak akan dipulihkan lagi.

Beban dan pembalikan penurunan nilai disajikan secara terpisah dalam laba rugi, setelah penyajian laba usaha.

o. Utang usaha dan utang lain-lain

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha biasa. Utang lain-lain adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok diluar kegiatan usaha biasa. Utang usaha dan utang lain-lain diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek bila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Bila tidak, akan disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha dan utang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Fixed assets (continued)

The Group analyses the facts and circumstances for each type of land right in determining the accounting for each of these land rights so that it can accurately represent an underlying economic event or transaction. If the land rights do not transfer control of the underlying assets to the Group but give the rights to use the underlying assets, the Group treats these transactions as leases for accounting purposes under SFAS No. 73: Leases. If the land rights are substantially similar to land purchases, the Group applies SFAS No. 16: Fixed Assets.

n. Impairment of non-financial asset

Assets that have an indefinite useful life are not subject to amortisation but are tested annually for impairment or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired. Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying value may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset's carrying value exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs to sell and its value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for which there is separately identifiable cash flows (cash generating unit).

Non-financial assets, other than goodwill, that suffer impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

Reversal of impairment losses for assets other than goodwill, would be recognised if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Any reversal of impairment losses will be immediately recognised in profit or loss, except for assets measured using the revaluation model as required by other SFAS. Impairment losses relating to goodwill would not be reversed.

Impairment charges and reversals are disclosed in a separate line item within profit or loss, below the operating profit line.

o. Trade and other payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Other payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired outside of the ordinary course of business. Trade and other payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade and other payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

Lampiran 5/15 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

p. Biaya pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian, merupakan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual, ditambahkan pada biaya perolehan aset tersebut, sampai dengan saat selesainya aset secara substansial siap untuk digunakan atau dijual.

Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian.

Biaya pinjaman dikapitalisasi yang berasal dari rugi selisih kurs dibatasi sedemikian rupa sehingga jumlah dikapitalisasi tidak melebihi jumlah biaya pinjaman yang mungkin terjadi jika pinjaman tersebut dilakukan dengan menggunakan mata uang fungsional pada periode tersebut.

Penghasilan investasi diperoleh atas investasi sementara dari pinjaman yang secara spesifik belum digunakan untuk pengeluaran aset kualifikasian dikurangi dari biaya pinjaman yang dikapitalisasi.

Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

q. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan

Grup telah menerapkan PSAK No. 72, yang mengharuskan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah penilaian:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan.
3. Tentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Jika pertimbangan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah variabel, Grup memperkirakan jumlah imbalan yang diharapkan berhak sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi perkiraan jumlah jaminan tingkat layanan yang akan dibayarkan selama masa kontrak.
4. Alokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya ekspektasian ditambah margin.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Borrowing costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to become ready for their intended use or sale, are to be added to the cost of such assets until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale.

For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expensed on the qualifying assets. The capitalisation rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding during the period, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset.

Borrowing costs are capitalised from foreign exchange losses to the extent by which the capitalised amount does not exceed the amount of borrowing costs that may have been incurred had the loan been denominated in the functional currency.

Investment income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalisation.

All other borrowing costs are recognised in profit or loss in the period in which they are incurred.

q. Revenue and expense recognition

Revenue

The Group has applied SFAS No. 72, which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of assessment:

1. *Identify contract(s) with a customer.*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.*
3. *Determine the transaction price. The transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee that will be paid during the contract period.*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct good or service promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling prices are estimated based on expected cost plus margin.*

Lampiran 5/16 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)
q. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)
Pendapatan (lanjutan)

Grup telah menerapkan PSAK No. 72, yang mengharuskan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah penilaian: (lanjutan)

5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi saat:

- a. Pada waktu tertentu (biasanya untuk janji dalam memindahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Sepanjang waktu (biasanya untuk janji dalam memberikan layanan pada pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, Grup memilih ukuran kemajuan yang sesuai untuk menentukan jumlah pendapatan yang harus diakui ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Liabilitas kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual

r. Imbalan kerja
Imbalan pasca kerja

Skema pensiun diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program imbalan pasti, tergantung pada substansi ekonomi dari syarat dan kondisi utama program tersebut. Program iuran pasti adalah program pensiun yang mewajibkan Perusahaan membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas terpisah. Perusahaan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan atas jasa yang diberikan pekerja pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Program imbalan pasti adalah program pensiun yang bukan merupakan program iuran pasti. Program imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya berdasarkan pada satu atau lebih faktor seperti usia, masa kerja dan kompensasi.

Perusahaan harus mencadangkan jumlah minimal imbalan pensiun sesuai dengan Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang Cipta Kerja") (sebelum 1 Januari 2021: Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("UU Ketenagakerjaan")) atau Perjanjian Kerja Bersama ("PKB"), mana yang lebih tinggi. Karena UU Cipta Kerja atau UU Ketenagakerjaan atau PKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU Cipta Kerja atau UU Ketenagakerjaan atau PKB adalah program imbalan pasti.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
q. Revenue and expense recognition (continued)
Revenue (continued)

The Group has applied SFAS No. 72, which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of assessment: (continued)

5. Recognise revenue when the performance obligation has been satisfied via the transferral of a promised good or service to a customer (transferral is considered to have occurred when the customer obtains control of the goods or services).

A performance obligation may be satisfied at:

- a. Point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
- b. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.

The payment of the transaction price is different for each contract. A contract asset is recognised when the consideration paid by the customer is less than the balance of the performance obligation that has been satisfied. A contract liability is recognised when the consideration paid by the customer is more than the balance of the performance obligation that has been satisfied.

Expenses

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

r. Employee benefits
Post-employment benefits

Pension schemes are classified as either defined contribution plans or defined benefit plans, depending on the economic substance of the plan as derived from its principal terms and conditions. A defined contribution plan is a pension plan under which the Company pays fixed contributions into a separate entity. The Company has no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current and prior years. A defined benefit plan is a pension plan that is not a defined contribution plan. Typically, defined benefit plans define an amount of pension benefit that an employee will receive upon retirement, usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation.

The Company is required to provide a minimum amount of pension benefit in accordance with Law No. 11/2020 on Job Creation (the "Job Creation Law") (before 1 January 2021: Labour Law No. 13/2003 (the "Labour Law")) or the Company's Collective Labour Agreement (the "CLA"), whichever is higher. Since the Job Creation Law or Labour Law or the CLA sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Job Creation Law or Labour Law or the CLA represent defined benefit plans.

Lampiran 5/17 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

r. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pasca kerja (lanjutan)

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan setara dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir tahun pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Imbalan pascakerja terdiri dari imbalan pesangon dan penghargaan purna jabatan.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi korporat berkualitas tinggi dalam denominasi mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun. Apabila tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporat tersebut, digunakan bunga obligasi pemerintah.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti diakui pada saat kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan pada penghasilan komprehensif lain pada tahun dimana beban tersebut terjadi. Akumulasi saldo pengukuran kembali dilaporkan di kerugian komprehensif lain di bagian ekuitas.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang lainnya ditentukan dengan menggunakan *Projected Unit Credit*. Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Grup mengakui keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi. Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain periode terjadinya.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan kerja pasti.

s. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Employee benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

The liability recognised in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is equivalent to the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting year less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Post-employment benefits consist of severance benefits and employment awards.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the interest rates of high quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms of maturity approximating the terms of the related pension obligations. When there is no deep market for such bonds, the market rates of government bonds are used.

Past service costs are recognised immediately in profit or loss. Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised when the curtailment or settlement occurs.

Remeasurements arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to other comprehensive income in the year in which they arise. The accumulated remeasurements balance is reported in other comprehensive loss in equity section.

Other long-term benefits

Other long-term benefits are determined using the Projected Unit Credit Method. Past service costs are recognised immediately in profit or loss. The Group recognised gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan when the curtailment or settlement occurs. The gain or loss on a curtailment or settlement of a defined benefit plan is recognised in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged to other comprehensive income in the period in which they occur.

The long-term post-employment benefit obligation recognised in the consolidated statement of financial position represents the present value of the defined benefit liabilities.

s. Provisions

Provisions are recognised when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, when it is probable that the Group will be required to settle the obligation and when a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Lampiran 5/18 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)
s. Provisi (lanjutan)

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik dari pertimbangan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

t. Sewa
Grup sebagai penyewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

Grup menyewa aset tetap tertentu. Kontrak sewa biasanya dibuat untuk periode tetap dari satu hingga lima tahun tetapi mungkin memiliki opsi ekstensi.

Persyaratan sewa dinegosiasikan secara individual dan berisi berbagai persyaratan dan ketentuan yang berbeda. Perjanjian sewa tidak memberlakukan perjanjian apa pun selain jaminan untuk tujuan peminjaman.

Sewa diakui sebagai aset hak pakai dan liabilitas terkait pada tanggal di mana aset sewaan tersedia untuk digunakan oleh Grup. Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara liabilitas dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan ke laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa untuk setiap periode. Aset hak pakai didepresiasi selama periode yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa sewa dengan metode garis lurus.

Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur dengan basis nilai kini. Liabilitas sewa termasuk nilai bersih sekarang dari pembayaran sewa berikut:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang didasarkan pada indeks atau tingkat, pada awalnya diukur menggunakan indeks atau tingkat pada tanggal mulai;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai residu;
- harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk menggunakan opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti untuk penghentian sewa, jika masa sewa mencerminkan penyewa yang melaksanakan opsi tersebut.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
s. Provisions (continued)

The amount recognised as a provision is the best estimate of the consideration that is expected to be required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. In cases where a provision is measured using the cash-flows estimate to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of such cash flows.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, the receivable is recognised as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and if the amount of the receivable can be measured reliably.

t. Leases
The Group as a lessee

The determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is made based on the substance of the arrangement and an assessment of whether the fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and an assessment of whether the arrangement conveys a right to use the asset.

The Group leases certain fixed assets. Rental contracts are typically made for fixed periods of one to five years but may have extension options.

Lease terms are negotiated on individual bases and contain a wide range of different terms and conditions. The lease agreements do not impose any covenants other than security for borrowing purposes.

A lease is recognised as a right-of-use asset and a corresponding liability at the date on which the leased asset is available for use by the Group. Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period. The right-of-use asset is depreciated over the shorter of the asset's useful life and the lease term on a straight-line basis.

Assets and liabilities arising from a lease are initially measured on a present-value basis. Lease liabilities include the net present value of the following lease payments:

- *fixed payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives receivable;*
- *variable lease payments that are based on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *amounts expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;*
- *the exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain that it will exercise such an option; and*
- *payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the lessee exercising such an option.*

Lampiran 5/19 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

t. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Pembayaran sewa yang harus dilakukan berdasarkan opsi perpanjangan tertentu juga termasuk dalam pengukuran liabilitas.

Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika tarif tidak dapat segera ditentukan, di mana hal tersebut secara umum terjadi pada sewa dalam Grup, suku bunga pinjaman incremental penyewa digunakan, yaitu tarif yang harus dibayar oleh penyewa untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak guna dalam lingkungan ekonomi serupa dengan syarat dan ketentuan yang serupa.

Untuk menentukan suku bunga pinjaman tambahan, Grup:

- jika memungkinkan, menggunakan pembiayaan pihak ketiga terkini yang diterima oleh penyewa individu sebagai titik awal, disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kondisi pembiayaan sejak pembiayaan pihak ketiga diterima;
- menggunakan pendekatan *build-up* yang dimulai dengan suku bunga bebas risiko yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk sewa yang dimiliki oleh Grup, yang tidak memiliki pembiayaan pihak ketiga baru-baru ini; dan
- membuat penyesuaian spesifik untuk sewa, misalnya jangka waktu, mata uang dan jaminan.

Grup dihadapkan pada potensi kenaikan di masa depan dalam pembayaran sewa variabel berdasarkan indeks atau tarif, yang tidak termasuk dalam liabilitas sewa sampai diberlakukan. Ketika penyesuaian pembayaran sewa berdasarkan indeks atau suku bunga mulai berlaku, liabilitas sewa dinilai kembali dan disesuaikan dengan aset hak guna.

Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya pokok dan keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laporan laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas sisa saldo liabilitas untuk setiap periode.

Aset hak pakai diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari berikut ini:

- jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima;
- biaya langsung awal; dan
- biaya restorasi.

Aset hak guna umumnya disusutkan sepanjang waktu yang lebih pendek antara lama masa manfaat aset dan jangka waktu sewa menggunakan metode garis lurus. Jika Grup cukup yakin untuk melaksanakan opsi pembelian, aset hak guna disusutkan selama masa manfaat aset yang mendasarinya.

Aset hak guna juga mengalami penurunan nilai (Catatan 3n).

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Leases (continued)

The Group as a lessee (continued)

Lease payments to be made under reasonably certain extension options are also included in the measurement of the liability

The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease. If the rate cannot be readily determined, which is generally the case for leases in the Group, the lessee's incremental borrowing rate is used, being the rate that the individual lessee would have to pay to borrow the funds necessary to obtain an asset of similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment with similar terms, security and conditions.

To determine the incremental borrowing rate, the Group:

- where possible, uses recent third-party financing received by the individual lessee as a starting point, adjusted to reflect changes in financing conditions that have occurred since the third-party financing was received;
- uses a build-up approach that starts with a risk-free interest rate adjusted for credit risk for leases held by the Group in cases where there is no recent third-party financing; and
- makes adjustments specific to the lease, e.g. adjustments of term, currency and security.

The Group is exposed to potential future increases in variable lease payments based on an index or rate; such increases are not included in the lease liability until they take effect. When adjustments to lease payments based on an index or rate take effect, the lease liability is reassessed and adjusted against the right-of-use asset.

Lease payments are allocated between principal and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

Right-of-use assets are measured at cost comprising the following:

- the amount of the initial measurement of the lease liability;
- any lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received;
- any initial direct costs; and
- restoration costs.

Right-of-use assets are generally depreciated over the shorter of the asset's useful life and the lease term on a straight-line basis. If the Group is reasonably certain that it will exercise a purchase option, the right-of-use asset is depreciated over the underlying asset's useful life.

The right-of-use assets are also subject to impairment (Note 3n).

Lampiran 5/20 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

t. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Pembayaran terkait dengan sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui atas dasar garis lurus sebagai beban dalam laporan laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa 12 bulan atau kurang. Aset bernilai rendah terdiri dari peralatan umum.

Opsi ekstensi dan terminasi

Opsi ekstensi dan terminasi termasuk dalam sejumlah sewa properti dan peralatan di seluruh Grup. Istilah-istilah ini digunakan untuk memaksimalkan fleksibilitas operasional dalam hal pengelolaan kontrak. Mayoritas opsi ekstensi dan terminasi yang dimiliki hanya dapat dilaksanakan oleh Grup dan bukan oleh pemberi sewa masing-masing.

Jaminan nilai residu

Untuk mengoptimalkan biaya sewa selama periode kontrak, Grup terkadang memberikan jaminan nilai residu sehubungan dengan sewa peralatan.

Pendapatan sewa guna usaha dari kegiatan operasi sewa dimana Grup bertindak sebagai pemberi sewa diakui sebagai pendapatan secara garis lurus selama masa sewa.

Grup sebagai pesewa

Ketika Grup bertindak sebagai pesewa, Grup mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak maka, merupakan sewa operasi. Sebagai bagian dari penilaian ini, Grup mempertimbangkan beberapa indikator seperti apakah masa sewa adalah sebagian besar dari umur ekonomik aset pendasar.

Dalam sewa pembiayaan, dimana Grup mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, Grup mengakui dan menyajikan aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan keuangan. Pengakuan pendapatan keuangan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto Grup sebagai pesewa dalam sewa pembiayaan.

Grup mengakui pembayaran sewa yang diterima dari sewa operasi sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Leases (continued)

The Group as a lessee (continued)

Payments associated with short-term leases and leases of low-value assets are recognised on a straight-line basis as an expense in profit or loss. Short-term leases are leases with a lease term of 12 months or less. Low-value assets comprise general equipment.

Extension and termination options

Extension and termination options are included in a number of property and equipment leases across the Group. These terms are used to maximise operational flexibility in terms of managing contracts. The majority of extension and termination options held are exercisable only by the Group and not by the respective lessor.

Residual value guarantees

To optimise lease costs during the contract period, the Group sometimes provides residual value guarantees in relation to equipment leases

Lease income from operating leases in cases where the Group is a lessor is recognised in income on a straight-line basis over the lease term.

The Group as a lessor

When the Group acts as a lessor, it shall classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease. As part of this assessment, the Group considers certain indicators such as whether the lease term is for the major part of the economic life of the asset.

Under a finance lease, where the Group transfers substantially all the risks and rewards related to the ownership of the leased item, the Group recognised and presented a finance lease receivables in the consolidated statement of financial position at an amount equal to the net investment in the lease. Lease payments received are treated as payments of principal and finance income. The recognition of finance income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the Group's net investment as lessors in finance leases.

The Group recognises lease payments received under operating leases as income on the straight-line basis over the lease term.

Lampiran 5/21 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

u. Perpajakan

Pajak penghasilan final

Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sebagian penghasilan Grup dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final.

Untuk tujuan pelaporan keuangan, beban PPh final dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari beban pokok pendapatan.

Beban pajak atas penghasilan yang telah dikenakan pajak final, diakui proporsional dengan jumlah pendapatan pada periode berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang dibayar dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban usaha diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak.

Perbedaan nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Pajak penghasilan di luar pajak final

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak itu terkait dengan kejadian atau transaksi yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, beban pajak tersebut masing-masing diakui pada penghasilan komprehensif lain atau secara langsung dicatat ke ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan dan dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi atas peraturan pajak yang berlaku. Jika perlu, manajemen menentukan provisi dibentuk berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar pada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability* untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan. Namun, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika timbul dari pengakuan awal *goodwill*; atau pada saat pengakuan awal suatu aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi maupun laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada akhir tahun pelaporan dan diharapkan diterapkan jika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat digunakan.

Atas perbedaan temporer dalam investasi pada asosiasi dibentuk pajak penghasilan tangguhan, kecuali untuk liabilitas pajak tangguhan dimana saat pembalikan perbedaan sementara dikendalikan oleh Grup dan sangat mungkin perbedaan temporer tidak akan dibalik di masa mendatang.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Taxation

Final income tax

According to the tax regulation, certain Group income is subject to final tax.

For the purpose of financial statement preparation, final income tax expenses are stated in the consolidated statement of profit or loss as part of the cost of revenues.

Tax expenses on income subjected to final tax are recognised proportionally with total income in the current period. The differences between the final income tax paid and the total charged as operating expenses are recognised as prepaid tax or tax payable.

The difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities, and their respective final tax bases are not recognised as deferred tax assets or liabilities.

Non-final income tax

Tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax expense is recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws that have been enacted as at the reporting date and computed using the prevailing tax rates. Management periodically evaluates the positions taken in Annual Tax Returns with respect to situations in which the applicable tax regulations are subject to interpretation. It establishes a provision where appropriate on the basis of the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill; deferred income tax is not accounted for if it arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using the tax rate that has been enacted or substantially enacted at the end of the reporting year and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred income tax is provided on temporary differences arising on investment in associates, except from deferred income tax liabilities where the timing of the reversal of the temporary difference is controlled by the Group and it is probable that the temporary difference will not to be reversed in the foreseeable future.

Lampiran 5/22 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

u. Perpajakan

Pajak penghasilan di luar pajak final (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus jika terdapat hak yang berkekuatan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini.

Pajak tangguhan tidak dihitung karena tidak terdapat perbedaan temporer yang signifikan antara dasar pengenaan pajak dan komersial.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Taxation

Non-final income tax (continued)

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities.

Deferred tax is not accounted as there is no significant temporary difference identified for commercial and tax base values.

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, yang dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen Grup diwajibkan untuk membuat penilaian, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari direvisi secara berkelanjutan. Revisi terhadap estimasi akuntansi akan diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi, jika revisi tersebut hanya berpengaruh terhadap periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode berikutnya jika revisi tersebut mempengaruhi periode tersebut.

Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 3, Grup telah menentukan hal-hal berikut yang memerlukan pertimbangan signifikan:

Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS

In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 3, the Group's management are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Critical judgements in applying accounting policies

In the process of applying the accounting policies described in Note 3, the Group has identified the following matters under which significant judgments are made:

Leases

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from the use of the asset throughout the period of use and the right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

Since the Group could not readily determine the implicit rate, management uses the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. In order to determine the incremental borrowing rate, the Group must consider a number of factors and reliably quantify any adjustments; so doing requires careful judgement. Only in this way can the final discount rates be determined.

In determining an incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

In determining the lease term, management considers all the facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or to not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if it is reasonably certain that the lease will be extended (or not terminated).

Lampiran 5/23 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan
akuntansi (lanjutan)**

Kepentingan dalam pengaturan bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan ketika Grup memiliki pengendalian bersama, yang membutuhkan penilaian mengenai aktivitas yang relevan dan ketika keputusan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut membutuhkan persetujuan dengan suara bulat. Grup menentukan bahwa aktivitas yang relevan untuk pengaturan Bersama adalah aktivitas yang berkaitan dengan operasi dan pengambilan keputusan dalam pengaturan tersebut.

Pertimbangan juga diperlukan untuk mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai pengendalian bersama atau ventura bersama. Pengklasifikasian pengaturan tersebut mengharuskan Grup untuk menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan tersebut.

Secara khusus, Grup mempertimbangkan:

- Struktur dari pengaturan bersama - apakah dibentuk melalui kendaraan terpisah.
- Ketika pengaturan tersebut terstruktur melalui kendaraan terpisah, Grup juga mempertimbangkan hak dan kewajiban yang timbul dari:
 - Bentuk legal dari kendaraan terpisah;
 - Persyaratan dari perjanjian kontraktual;
 - Fakta dan kondisi lain (ketika relevan).

Penilaian ini sering membutuhkan pertimbangan yang signifikan, dan kesimpulan yang berbeda mengenai pengendalian bersama dan apakah pengaturan tersebut merupakan operasi bersama atau ventura bersama, dapat memiliki dampak material terhadap akuntansi.

Grup memiliki pengaturan bersama yang terstruktur melalui ventura bersama, yaitu PT Crompton Prima Switchgear Indonesia dan PT Pura Daya Prima. Struktur dan persyaratan dari perjanjian kontraktual mengindikasikan bahwa Grup memiliki hak atas aset bersih dari pengaturan bersama tersebut.

Grup menilai fakta dan kondisi lain yang berkaitan dengan pengaturan ini dan kesimpulan final dari penilaian yang dilakukan adalah pengaturan tersebut merupakan ventura bersama.

Pengakuan pendapatan kontrak

Grup mengakui pendapatan kontrak yang masih dalam proses berdasarkan metode persentase penyelesaian. Tahap penyelesaian diukur berdasarkan proporsi biaya kontrak yang terjadi untuk pekerjaan yang dilaksanakan sampai tanggal perhitungan dibandingkan dengan estimasi total biaya kontrak sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 2. Asumsi yang penting diperlukan adalah dalam menentukan tahap penyelesaian (persentase penyelesaian) dan jumlah estimasi pendapatan. Pendapatan kontrak diungkapkan dalam Catatan 19.

**4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**

**Critical judgements in applying accounting policies
(continued)**

Interest in joint arrangements

Judgement is required to determine when the Group has joint control, which requires an assessment of the relevant activities and of when the decisions in relation to such activities require unanimous consent. The Group has determined that the relevant activities for its joint arrangements are those relating to the operating and capital decisions of the arrangement.

Judgement is also required to classify a joint arrangement as either a joint operation or a joint venture. Classifying the arrangement requires the Group to assess its rights and obligations arising from the arrangement.

Specifically, the Group considers:

- *The structure of the joint arrangement - whether it is structured through a separate vehicle.*
- *When the arrangement is structured through a separate vehicle, the Group also considers the rights and obligations arising from:*
 - *The legal form of the separate vehicle; The terms of the contractual arrangement;*
 - *Other facts and circumstances (when relevant).*

This assessment often requires significant judgement. Conclusions on joint control and also on whether the arrangement is a joint operation or a joint venture may materially impact the accounting.

The Group has joint arrangements that are structured through joint ventures, namely PT Crompton Prima Switchgear Indonesia and PT Pura Daya Prima. These structures and the terms of the contractual arrangements indicate that the Group has rights to the net assets of the arrangements.

The Group also assessed the other facts and circumstances relating to these arrangements and the final conclusion was that the arrangement was a joint venture.

Contract revenue recognition

The Group recognises contract revenues that are still in progress based on the percentage-of-completion method. The stage of completion is measured based on the proportion of contract costs incurred for the work performed up to the calculation date compared to the estimated total contract costs based on the accounting policies described in Note 2. Important assumptions are required in determining the stage of completion (percentage of completion) and the amount of the estimated income. Contract revenue is disclosed in Note 19.

Lampiran 5/24 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan
akuntansi (lanjutan)**

Pajak penghasilan

Perhitungan beban pajak penghasilan Grup memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasi. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Grup, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Sumber ketidakpastian estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini:

Penurunan nilai aset keuangan

Penerapan PSAK No. 71 menyebabkan perubahan terhadap penilaian signifikan estimasi dan asumsi akuntansi terhadap provisi untuk kerugian penurunan nilai atas piutang. Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Dalam penentuan kerugian kredit ekspektasian, manajemen diharuskan untuk menggunakan pertimbangan alam mendefinisikan hal apa yang dianggap sebagai kenaikan risiko kredit yang signifikan dan dalam pembuatan asumsi dan estimasi, untuk menghubungkan informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi. Pertimbangan diaplikasikan dalam menentukan periode seumur hidup dan titik pengakuan awal piutang.

Imbalan pascakerja

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris independen untuk menghitung jumlah kewajiban tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, kenaikan gaji tahunan di masa depan, tingkat perputaran tahunan karyawan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi Grup diakui di penghasilan komprehensif lain dan ketika terjadi. Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam pengalaman aktual Grup atau perubahan signifikan dalam asumsi Grup material dapat mempengaruhi kewajiban diestimasi atas imbalan pascakerja dan penghasilan komprehensif lain.

Asumsi yang digunakan untuk perhitungan liabilitas imbalan pascakerja diungkapkan dalam Catatan 23.

**4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**

**Critical judgements in applying accounting policies
(continued)**

Income taxes

The calculations of income tax expense for the Group require judgements and assumptions in determining the deductibility of certain expenses during the estimation process. All judgements and estimates made by management may be challenged by the Directorate General of Taxation. As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Group through negotiations with the relevant tax authorities can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. In cases where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.

Sources of estimation uncertainty

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation used at the end of the reporting period that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

Impairment of financial assets

The implementation of SFAS No. 71 resulted in a change to the assessment of the significant accounting estimates and judgements related to the provision for the loss impairment of receivables. The Group applies a simplified approach to measure expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables. In determining expected credit losses, management is required to exercise judgement in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions. Judgement has been applied in determining the lifetime and point of initial recognition of receivables.

Post-employment benefits

The determination of employee benefits obligations is dependent on the selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increases, annual employee turn-over rates, disability rates, retirement ages and mortality rates. Actual results that differ from the Group's assumptions are recognised immediately in other comprehensive income and when they occur. While management is of the opinion that assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual experiences or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liabilities for post-employment benefits and other comprehensive income.

Assumptions used in the calculation of post-employment benefit liabilities are disclosed in Note 23.

Lampiran 5/25 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. ENTITAS ANAK

Perusahaan memiliki entitas anak sebagai berikut:

Entitas anak/ Subsidiary	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)		Tahun operasi komersial Year of commercial operation	Jumlah aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination	
			2021	2020		2021	2020
PT Prima Power Nusantara ("PPN")	Jakarta	Jasa enjiniring, pengadaan dan konstruksi/ Engineering, procurement and construction	99.99	99.99	2017	240,388	277,619

5. SUBSIDIARY

The Company has the following subsidiary:

6. KAS DAN SETARA KAS

	2021	2020	
Kas	1,862	1,808	Cash on hand
Kas di bank	403,921	81,783	Cash in banks
Deposito	45,000	255,000	Deposits
Jumlah	450,783	338,591	Total

Lihat Catatan 24 untuk rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 24 for details of transactions and balances with related parties.

6. CASH AND CASH EQUIVALENTS

7. REKENING BANK YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Akun ini merupakan rekening bank yang digunakan sebagai jaminan bank garansi untuk jaminan pelaksanaan proyek. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo rekening bank yang dibatasi penggunaannya masing-masing sebagai berikut:

	2021	2020	
Pihak berelasi (Catatan 24)	8,886	9,047	Related party (Note 24)
Pihak ketiga	16,748	16,939	Third parties
Jumlah	25,634	25,986	Total
Bagian lancar	(2,696)	(2,858)	Current portion
Bagian tidak lancar	22,938	23,128	Non-current portion

7. RESTRICTED CASH IN BANKS

This account represents cash in banks that was used as collateral on bank guarantees for projects. As at 31 December 2021 and 2020, the restricted bank account balances were as follows:

8. PIUTANG USAHA

	2021	2020	
Piutang usaha			Trade receivables
Pihak berelasi (Catatan 24)	82,691	163,956	Related parties (Note 24)
Pihak ketiga	8,038	15,241	Third parties
Jumlah	90,729	179,197	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai			Allowances for impairment losses
Pihak berelasi	(16,459)	(16,459)	Related parties
Pihak ketiga	(6,107)	(3,678)	Third parties
Jumlah	(22,566)	(20,137)	Total
Jumlah piutang usaha - bersih	68,163	159,060	Total trade receivables - net

8. TRADE RECEIVABLES

Lampiran 5/26 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Belum jatuh tempo	25,528	108,795
Sudah jatuh tempo		
1 s/d 60 hari	30,346	16,734
61 s/d 90 hari	1,211	18,456
Lebih dari 90 hari	<u>33,644</u>	<u>35,212</u>
	90,729	179,197
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(22,566)</u>	<u>(20,137)</u>
Jumlah piutang usaha - bersih	<u><u>68,163</u></u>	<u><u>159,060</u></u>

Pergerakan perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Saldo awal	20,137	4,141
Pemulihan	(828)	-
Penambahan (Catatan 21)	<u>3,257</u>	<u>15,996</u>
Saldo akhir	<u><u>22,566</u></u>	<u><u>20,137</u></u>

Grup menerapkan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai piutang secara individual dilakukan untuk pelanggan yang telah mengalami kesulitan pembayaran sesuai dengan periode yang telah ditentukan dan pelanggan yang umumnya memiliki peringkat kredit.

Manajemen Grup berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai adalah cukup untuk menutupi kemungkinan atas tidak tertagihnya piutang usaha.

8. TRADE RECEIVABLES (continued)

The aging analysis of trade receivables is as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Belum jatuh tempo	25,528	108,795
Sudah jatuh tempo		
1 to 60 days	30,346	16,734
61 to 90 days	1,211	18,456
More than 90 days	<u>33,644</u>	<u>35,212</u>
	90,729	179,197
Allowances for impairment losses	<u>(22,566)</u>	<u>(20,137)</u>
Total trade receivables - net	<u><u>68,163</u></u>	<u><u>159,060</u></u>

The movement of changes in the allowance for impairment losses is as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Beginning balance	20,137	4,141
Reversal	(828)	-
Additions (Note 21)	<u>3,257</u>	<u>15,996</u>
Ending balance	<u><u>22,566</u></u>	<u><u>20,137</u></u>

The Group applies the lifetime expected loss provision for all trade receivables. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

Allowance for impairment losses for individual receivables are provided for customers that have difficulties in fulfilling their obligations according to the defined period and generally have credit ratings.

The management of the Group is of the opinion that the allowance for impairment is adequate to cover any loss from uncollectible accounts.

9. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Pihak berelasi (Catatan 24)		
PLN	<u>213,913</u>	<u>241,578</u>
Jumlah	<u><u>213,913</u></u>	<u><u>241,578</u></u>

Rekonsiliasi antara piutang sewa pembiayaan bruto dengan piutang sewa pembiayaan neto sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Piutang sewa pembiayaan bruto:		
- Jatuh tempo dalam waktu satu tahun	55,050	55,050
- Jatuh tempo dalam waktu dua sampai lima tahun	233,964	289,015
Dikurangi:		
Pendapatan keuangan sewa yang belum terealisasi	<u>(75,101)</u>	<u>(102,487)</u>
Piutang sewa pembiayaan bersih	<u><u>213,913</u></u>	<u><u>241,578</u></u>
Dikurangi: Jatuh tempo dalam waktu satu tahun	<u>(31,158)</u>	<u>(27,665)</u>
Bagian jangka panjang	182,755	213,913

9. FINANCE LEASE RECEIVABLES

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Pihak berelasi (Catatan 24)		
PLN	<u>213,913</u>	<u>241,578</u>
Jumlah	<u><u>213,913</u></u>	<u><u>241,578</u></u>

The reconciliation of gross finance lease receivables with the net finance lease receivables as reported in the statement of financial position is as follows:

Gross finance lease receivables:

Due within one year -
Due within two until five years -

Less:

Unearned finance lease income

Net finance lease receivables

Less: Due within one year

Long-term portion

Lampiran 5/27 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

Piutang sewa bagian tidak lancar akan terealisasi dalam jangka waktu dua sampai lima tahun.

Piutang sewa pembiayaan dari PLN timbul dari penyediaan jasa *pre-treatment* gas dan jasa *compressed natural gas* untuk keperluan pembangkit di Bangkanai, Kalimantan Tengah dengan jangka waktu kontrak selama sepuluh tahun yang dimulai pada tahun 2017.

9. FINANCE LEASE RECEIVABLES (continued)

The non-current portion of finance lease receivables will be realised within two until five years.

The finance lease receivables from PT PLN (Persero) arise from gas and compressed natural gas pre-treatment services for power generator in Bangkanai, Central Kalimantan with a contract period of ten years starting from 2017.

10. ASET KONTRAK**10. CONTRACT ASSETS**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Pihak berelasi (Catatan 24)	187,440	210,059	Related parties (Note 24)
Pihak ketiga	<u>5,072</u>	<u>5,115</u>	Third parties
Jumlah	<u><u>192,512</u></u>	<u><u>215,174</u></u>	Total

11. BIAYA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA**11. PREPAID EXPENSES AND ADVANCES**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Uang muka proyek	5,063	16,954	Advances for project
Sewa jangka pendek	748	604	Short-term rent
Lain-lain	<u>9,278</u>	<u>6,482</u>	Others
Jumlah	15,089	24,040	Total
Bagian lancar	<u>(12,557)</u>	<u>(17,749)</u>	Current portion
Bagian tidak lancar	<u><u>2,532</u></u>	<u><u>6,291</u></u>	Non-current portion

12. ASET TETAP**12. FIXED ASSETS**

	<u>1 Januari/ January 2021</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>31 Desember/ December 2021</u>	
Biaya perolehan				Acquisition cost
Tanah	5,591	-	5,591	Land
Perlengkapan umum	<u>9,229</u>	<u>-</u>	<u>9,229</u>	General equipment
Subjumlah	14,820	-	14,820	Subtotal
Aset hak guna				Right-of-use assets
Bangunan	30,423	1,878	32,301	Building
Perlengkapan umum	1,157	-	1,157	General equipment
Kendaraan	<u>2,949</u>	<u>178</u>	<u>3,127</u>	Vehicles
Jumlah	<u>49,349</u>	<u>2,056</u>	<u>51,405</u>	Total
Akumulasi penyusutan				Accumulated depreciation
Perlengkapan umum	(4,592)	(1,654)	(6,246)	General equipment
Aset hak guna				Right-of-use assets
Bangunan	(10,412)	(9,792)	(20,204)	Building
Perlengkapan umum	(1,157)	-	(1,157)	General equipment
Kendaraan	<u>(2,057)</u>	<u>(940)</u>	<u>(2,997)</u>	Vehicles
Jumlah	<u>(18,218)</u>	<u>(12,386)</u>	<u>(30,604)</u>	Total
Nilai buku bersih	<u><u>31,131</u></u>		<u><u>20,801</u></u>	Net book value

Lampiran 5/28 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

12. FIXED ASSETS (continued)

	1 Januari/ January 2020	Penambahan/ Additions	31 Desember/ December 2020	
Biaya perolehan				Acquisition cost
Tanah	5,591	-	5,591	Land
Perlengkapan umum	<u>9,057</u>	<u>172</u>	<u>9,229</u>	General equipment
Subjumlah	14,648	172	14,820	Subtotal
Aset hak guna				Right-of-use assets
Bangunan	30,423	-	30,423	Building
Perlengkapan umum	1,157	-	1,157	General equipment
Kendaraan	<u>2,500</u>	<u>449</u>	<u>2,949</u>	Vehicles
Jumlah	<u>48,728</u>	<u>621</u>	<u>49,349</u>	Total
Akumulasi penyusutan				Accumulated depreciation
Perlengkapan umum	(2,842)	(1,750)	(4,592)	General equipment
Aset hak guna				Right-of-use assets
Bangunan	-	(10,412)	(10,412)	Building
Perlengkapan umum	-	(1,157)	(1,157)	General equipment
Kendaraan	<u>-</u>	<u>(2,057)</u>	<u>(2,057)</u>	Vehicles
Jumlah	<u>(2,842)</u>	<u>(15,376)</u>	<u>(18,218)</u>	Total
Nilai buku bersih	<u>45,886</u>		<u>31,131</u>	Net book value

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated to the following:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Beban pokok pendapatan (Catatan 20)	6,468	7,097	Cost of revenues (Note 20)
Beban usaha (Catatan 21)	<u>5,918</u>	<u>8,279</u>	Operating expenses (Note 21)
Jumlah	<u><u>12,386</u></u>	<u><u>15,376</u></u>	Total

Grup memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di Sumatera Selatan, Nias Utara dan Kalimantan Barat dengan hak legal berupa sertifikat Hak Guna Bangunan yang berjangka waktu 20 tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2031. Perolehan tanah tersebut sehubungan pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga gasifikasi batubara dan pembangkit tenaga modular pengganti diesel.

The Group owns several pieces of land located in South Sumatera, North Nias and West Kalimantan with Building Use Rights for a period of 20 years until 2031. The land acquisitions were performed in relation to the construction and operation of a coal gas power plant and substitute diesel power modular.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, jumlah harga perolehan aset tetap Grup yang telah disusutkan penuh tetapi masih digunakan dalam kegiatan operasional adalah sebesar Rp1.130 dan Rp958.

As of 31 December 2021 and 2020, the cost of the Group's fixed assets that had been fully depreciated but that were still being used in operational activities amounted to Rp1,130 and Rp958, respectively.

Lampiran 5/29 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. UTANG USAHA

Akun ini merupakan liabilitas kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembelian material dan jasa konstruksi kepada sub kontraktor.

13. TRADE PAYABLES

This account represents payables to third parties arising from purchase of material and construction service to sub contractors.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
PT Jabbaru Elektrodaya Telematika	8,251	-	PT Jabbaru Elektrodaya Telematika
China Electric Power Research Institute	5,573	5,380	China Electric Power Research Institute
PT Tunggal Buana Utama	4,900	-	PT Tunggal Buana Utama
PT Karya Logam Agung	4,639	5,518	PT Karya Logam Agung
PT Grid Solution Indonesia	3,469	-	PT Grid Solution Indonesia
PT Voksel Electric Tbk	1,901	11,758	PT Voksel Electric Tbk
PT Bira Jaya Mandiri Perkasa	-	9,379	PT Bira Jaya Mandiri Perkasa
PT Bintang Indah Persada	-	8,447	PT Bintang Indah Persada
PT Putranata Mandiri	-	2,344	PT Putranata Mandiri
Lain-lain (di bawah Rp1.500)	<u>38,031</u>	<u>60,664</u>	Others (below Rp1,500)
Jumlah	<u><u>66,764</u></u>	<u><u>103,490</u></u>	Total

14. UANG MUKA DARI PELANGGAN

Akun ini merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan sehubungan dengan pendapatan yang berasal dari kegiatan *Engineering Procurement Construction*.

14. ADVANCES FROM CUSTOMER

This account represents advances received from customer in relation to revenue incurred from *Engineering, Procurement Construction services*.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, uang muka dari pelanggan masing-masing sebesar Rp18.468 dan Rp21.006.

As at 31 December 2021 and 2020, the Company's advances from customer amounted to Rp18,468 and Rp21,006, respectively.

15. LIABILITAS KONTRAK**15. CONTRACT LIABILITIES**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Pihak berelasi (Catatan 24)	106,344	136,633	Related parties (Note 24)
Pihak ketiga	<u>2,362</u>	<u>7,808</u>	Third parties
Jumlah	<u><u>108,706</u></u>	<u><u>144,441</u></u>	Total

16. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR**16. ACCRUED EXPENSES**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Biaya pegawai	31,592	35,819	Employee expenses
Biaya non-pegawai	<u>23,147</u>	<u>17,960</u>	Non-employee expenses
Jumlah	<u><u>54,739</u></u>	<u><u>53,779</u></u>	Total

Lampiran 5/30 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. PINJAMAN JANGKA PANJANG

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Jumlah utang pokok	56,019	88,028
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(32,900)</u>	<u>(32,978)</u>
Bagian jangka panjang	<u>23,119</u>	<u>55,050</u>

Pada tanggal 28 Desember 2015, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PLN untuk keperluan pendanaan program investasi dalam rangka kelancaran kegiatan usaha Perusahaan. Jumlah pokok total pinjaman yang diberikan adalah maksimum sebesar Rp250.000. Perusahaan telah melakukan penarikan sebesar Rp220.000 dengan tingkat bunga sebesar 11,95% per tahun dan akan berakhir setelah jangka waktu 7 tahun terhitung sejak selesainya masa *grace period* selama 12 bulan sejak tanggal penarikan pinjaman pertama kali.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 saldo pokok pinjaman yang sudah dibayar masing-masing sebesar Rp32.009 dan Rp32.012 (Catatan 25).

Beban bunga pinjaman tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp9.009 dan Rp13.009.

17. LONG-TERM LOAN

*Principal amount
Current maturities*

Long-term portion

On 28 December 2015, the Company entered into a loan agreement with PLN for the funding of the Company's investment program to support its business operations. The maximum loan to be granted amounted to Rp250,000. The Company has drawdown Rp220,000 with an interest rate of 11.95% per annum. The loan expires after a period of 7 years from the end of the grace period of 12 months from the date of the first loan withdrawal.

As at 31 December 2021 and 2020 the principal loan that had been paid amounted to Rp32,009 and Rp32,012, respectively (Note 25).

Interest expense charges related to the loan in 2021 and 2020 amounted to Rp 9,009 and Rp13,009, respectively.

18. MODAL SAHAM

<u>Pemegang saham/Shareholders</u>	<u>2021 dan/and 2020</u>		
	<u>Jumlah saham/ Number of shares</u>	<u>Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)</u>	<u>Jumlah/ Amount</u>
PLN	24,975,000	99.90%	24,975
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) ("YPK PLN")	<u>25,000</u>	<u>0.10%</u>	<u>25</u>
Jumlah/Total	<u>25.000.000</u>	<u>100.00%</u>	<u>25.000</u>

18. SHARE CAPITAL**19. PENDAPATAN**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<i>Engineering Procurement Construction</i>	332,691	269,533
Konstruksi	147,381	127,123
Pembangkitan	114,991	72,312
Transmisi dan distribusi	60,282	71,847
Kompresi gas	54,001	54,042
Pendapatan bunga dari sewa pembiayaan	<u>27,386</u>	<u>30,487</u>
Jumlah	<u>736,732</u>	<u>625,344</u>

Manajemen memperkirakan bahwa harga transaksi yang dialokasikan untuk kontrak pekerjaan yang belum diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.567.338 akan diakui sebagai pendapatan selama rentang waktu antara 1-3 tahun ke depan.

Lihat Catatan 24 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

19. REVENUES

*Engineering Procurement Construction
Constructions
Generators
Transmission and distributions
Gas compressions
Interest income from finance lease receivables*

Total

Management expects that the transaction price allocated to the unsatisfied contracts as of 31 December 2021 amounting to Rp1,567,338 will be recognised as revenue within the next 1-3 years.

Refer to Note 24 for details of transactions with related parties.

Lampiran 5/31 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

20. BEBAN POKOK PENDAPATAN**20. COST OF REVENUES**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Subkontraktor	285,930	221,575	Subcontractors
Gaji dan kesejahteraan karyawan	107,466	117,627	Salary and welfare benefits
Beban pajak final (Catatan 22)	21,670	19,259	Final income tax (Note 22)
Perjalanan dinas dan transportasi	16,676	16,728	Business trip and transportation
Sewa	15,086	16,314	Rental
Lain-lain	53,664	44,663	Others
	<u>500,492</u>	<u>436,166</u>	Total
Lihat Catatan 24 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.			Refer to Note 24 for details of transactions with related parties.

21. BEBAN USAHA**21. OPERATING EXPENSES**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Gaji dan kesejahteraan karyawan	110,804	106,689	Salary and welfare benefits
Tunjangan pajak penghasilan karyawan	11,411	7,861	Employee income tax allowances
Lain-lain	48,701	76,163	Others
	<u>170,916</u>	<u>190,713</u>	Total
Lihat Catatan 24 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.			Refer to Note 24 for details of transactions with related parties.

22. PERPAJAKAN**22. TAXATION****a. Pajak dibayar di muka****a. Prepaid taxes**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
<u>Bagian lancar</u>			<u>Current portion</u>
Pajak lainnya			Other taxes
Perusahaan			The Company
Pajak pertambahan nilai	19,089	35,694	Value added tax
Lain-lain	13	429	Others
Entitas anak			Subsidiary
Pajak pertambahan nilai	39,786	38,595	Value added tax
Lain-lain	377	111	Others
	<u>59,265</u>	<u>74,829</u>	
<u>Bagian tidak lancar</u>			<u>Non-current portion</u>
Pajak penghasilan badan			Corporate income tax
Perusahaan			The Company
Kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 25 tahun 2017	-	1,336	Overpayment of income tax article 25 for the year 2017
	<u>-</u>	<u>1,336</u>	
Pajak lainnya			Other taxes
Perusahaan			The Company
Pajak pertambahan nilai	24,308	-	Value added tax
Entitas anak			Subsidiary
Pajak pertambahan nilai	14,906	-	Value added tax
	<u>39,214</u>	<u>-</u>	Total

Lampiran 5/32 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

22. TAXATION (continued)

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	2021	2020	
Pajak penghasilan badan			Corporate income tax
Perusahaan	3,266	58	The Company
Jumlah pajak penghasilan badan	3,266	58	Total corporate income tax
Pajak lainnya			Other taxes
Perusahaan			The Company
Pasal 4(2)	3,005	4,406	Article 4(2)
Pasal 21	1,906	-	Article 21
Pasal 23	155	96	Article 23
Pasal 25	91	151	Article 25
Entitas anak			Subsidiary
Pasal 4(2)	2,071	2,397	Article 4(2)
Pasal 21	290	376	Article 21
Pasal 23	42	7	Article 23
Jumlah pajak lainnya	7,560	7,433	Total other taxes

c. Pajak penghasilan final

c. Final income tax

Rekonsiliasi antara pendapatan konstruksi yang dikenakan pajak final dengan beban pajak final adalah sebagai berikut:

A reconciliation between revenue from constructions subject to final tax and its final income tax expense is as follows:

	2021	2020	
Pendapatan konstruksi yang dikenakan pajak penghasilan final	541,750	481,878	Revenue from construction subject to final income tax
Beban pajak penghasilan final berdasarkan tarif pajak yang berlaku (Catatan 20)	21,670	19,259	Final income tax expense at prevailing tax rates (Note 20)
Dikurangi pembayaran pajak yang berlaku	(22,803)	(23,213)	Less payment of final income tax
Utang atas pajak penghasilan final awal tahun	3,586	7,540	Tax payable on final income tax at beginning of the year
Utang atas pajak penghasilan final akhir tahun	2,453	3,586	Tax payable on final income tax at end of the year

d. Beban pajak penghasilan

d. Income tax expense

Pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak. Nilai tersebut mungkin disesuaikan pada saat Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak disampaikan ke Kantor Pajak.

Current income tax computations are based on estimated taxable income. The amount may be adjusted when the Annual Tax Returns are filed to the Tax Office.

Lampiran 5/33 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. PERPAJAKAN (lanjutan)**d. Beban pajak penghasilan (lanjutan)**

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Laba sebelum pajak penghasilan	77,258	20,444
Beban pajak sesuai tarif yang berlaku	16,997	4,498
Penghasilan bukan objek pajak	(4,559)	(9,233)
Beban yang tidak dapat dikurangkan	12,777	13,411
Pendapatan yang telah dikenakan pajak final konstruksi dan biaya-biaya yang berkaitan	(17,829)	(3,729)
Beban pajak kini	<u>7,386</u>	<u>4,947</u>

e. Tarif pajak

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Penyakit Coronavirus 2020 ("COVID-19") dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") pada tanggal 16 Mei 2020 menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 ("UU No. 2/2020"). UU No. 2/2020 antara lain menetapkan penyesuaian tarif PPh Badan menjadi sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020-2021 dan sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU HPP") telah disahkan. UU HPP, antara lain, menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 11% yang berlaku sejak 1 April 2022 dan 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025 dan tarif pajak penghasilan badan bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap dari tahun pajak 2022 tetap sebesar 22%.

f. Surat ketetapan pajak

Pada Juli 2021, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") dari Kantor Pajak, yang menyatakan Perusahaan memiliki lebih bayar atas pajak penghasilan badan 2017 sebesar Rp335. Pada September 2021, Perusahaan telah menerima restitusi atas SKPLB tersebut.

Pada September 2021, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") dari Kantor Pajak, yang menyatakan Perusahaan memiliki kurang bayar atas pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan pasal 21 2017, masing-masing sebesar Rp803 dan Rp332. Pada Oktober 2021, Perusahaan telah membayar secara penuh atas SKPKB tersebut.

22. TAXATION (continued)**d. Income tax expense (continued)**

A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the prevailing tax rates to income before tax is as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Laba sebelum pajak penghasilan	77,258	20,444	<i>Profit before tax</i>
Beban pajak sesuai tarif yang berlaku	16,997	4,498	<i>Tax expenses at prevailing rate</i>
Penghasilan bukan objek pajak	(4,559)	(9,233)	<i>Income not subject to tax</i>
Beban yang tidak dapat dikurangkan	12,777	13,411	<i>Non-deductible expenses</i>
Pendapatan yang telah dikenakan pajak final konstruksi dan biaya-biaya yang berkaitan	(17,829)	(3,729)	<i>Income already subjected to final tax and related expense</i>
Beban pajak kini	<u>7,386</u>	<u>4,947</u>	<i>Current tax expense</i>

e. Tax rates

As at 31 March 2020, the Government issued Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020, on State Finances and the Stability of Financial System Policies for the Mitigation of Coronavirus Disease 2020 ("COVID-19") Pandemic and/or to Deal with Threats that are Potentially Harmful to the National Economy and/or the Stability of the Financial System, which has been approved by the House of Representatives ("DPR") on 16 May 2020 as Law No. 2 of 2020 ("Law No. 2/2020"). Law No. 2/2020 stipulates, among other things, adjustment of the corporate income tax rate to 22% which applies in fiscal years 2020-2021 and to 20% which applies from fiscal year 2022.

On 29 October 2021, Law No. 7 Year 2021 on Harmonisation of Tax Regulations (the "HPP Law") was issued. The HPP Law, among other things, stipulates an increase in the VAT rate to 11% effective from 1 April 2022 and to 12% at the latest by 1 January 2025 and the corporate income tax rate for Corporate Tax Payers and Permanent Establishments from fiscal year 2022 remains at 22%.

f. Tax assessment letters

In July 2021, the Company received a Letter of Tax Overpayment ("SKPLB") from Tax Office, which stated that the Company had the overpayment of corporate income tax 2017 amounting to Rp335. In September 2021, the Company had received the restitution for the SKPLB.

In September 2021, the Company received a Letter of Tax Underpayment ("SKPKB") from Tax Office, which stated that the Company had the underpayment of value added tax and income tax article 21 2017, amounting to Rp803 and Rp332, respectively. In October 2021, the Company had fully paid the SKPKB.

Lampiran 5/34 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

23. LIABILITAS IMBALAN KERJAImbalan pascakerja

Grup menyelenggarakan imbalan pascakerja tanpa pendanaan kepada karyawan tetap berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 yang dituangkan dalam peraturan Perusahaan No. 21.002.L/DIR/PLNE/II/2020. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pascakerja tersebut adalah 283 karyawan pada tahun 2021 dan 347 karyawan pada tahun 2020.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Grup juga memberikan imbalan pascakerja jangka panjang tanpa pendanaan berupa tunjangan uang cuti besar, tunjangan kecelakaan dinas, dan bantuan kematian dan pemakaman bagi karyawan yang memenuhi persyaratan.

Asumsi yang digunakan dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja

	<u>2021</u>
Tingkat diskonto per tahun	7.59%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7.12%
Tingkat kematian	CSO-1958
Umur pensiun normal	56 tahun/years

Penilaian aktuarial atas program pensiun dan imbalan jangka panjang lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuarial terdaftar, Kantor Konsultan Aktuarial ("KKA") Tubagus Syafrial dan Amran Nangasan, dengan laporan No. 326/IPK/KKA-TBA/II-2022 tanggal 25 Februari 2022 dan No. 385/IPK/KKA-TBA/V-2021 tanggal 3 Mei 2021.

Pada tahun 2020, Grup melakukan studi untuk melihat tabel mortalitas mana yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Grup. Dalam melakukan studi, Grup telah mempertimbangkan CSO-58, GAM-71, ANN-49, GAM-83, TMI-2011, TMI-2019. Dari studi tersebut, Grup menemukan bahwa tabel mortalitas yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Grup adalah CSO-58.

Beban imbalan pascakerja Grup dibebankan ke beban kepegawaian adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Biaya jasa kini	5,266	6,506
Beban bunga	2,014	1,438
Jumlah	<u>7,280</u>	<u>7,944</u>

Liabilitas imbalan pascakerja Grup dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Nilai kini liabilitas - jangka pendek	1,617	1,999
Nilai kini liabilitas - jangka panjang	31,705	25,554
Jumlah	<u>33,322</u>	<u>27,553</u>

23. EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIESPost-employment benefits

The Group provides unfunded defined post-employment benefits to permanent employees which are determined based on Labour Law No. 13/2003 that is expressed on the Company's regulation No. 21.002.K/DIR/PLNE/II/2020. The number of employees eligible for the benefits totalled 283 in 2021 and 347 in 2020.

Other long-term benefits

The Group also provides unfunded long-term benefits such as long-service leave, work-accident allowance, death and funeral allowances for its qualifying employees.

Assumptions used in calculations of employment benefit liabilities

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Tingkat diskonto per tahun	7.59%	7.70%	Discount rate per annum
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7.12%	7.02%	Rate of salary increase per annum
Tingkat kematian	CSO-1958	CSO-1958	Mortality rate
Umur pensiun normal	56 tahun/years	56 tahun/years	Normal retirement age

The actuarial calculations of pension plan and other long-term benefits for the years ended 31 December 2021 and 2020 were prepared by a registered actuarial consulting firm, Kantor Konsultan Aktuarial ("KKA") Tubagus Syafrial and Amran Nangasan with report No. 326/IPK/KKA-TBA/II-2022 dated 25 February 2022 and No. 385/IPK/KKA-TBA/V-2021 dated 3 May 2021.

In 2020, the Group conducted a study to determine which mortality tables best suited most of the Group's employees' and pensioners' mortality profile. In the study, the Group has considered CSO-58, GAM-71, ANN-49, GAM-83, TMI-2011, TMI-2019. Based on the study, the Group found that the mortality table that best suited the mortality profile of the Group's employees and pensioners is CSO-58.

The Group's employment benefit expenses charged to personnel expenses are as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Biaya jasa kini	5,266	6,506	Current service cost
Beban bunga	2,014	1,438	Interest cost
Jumlah	<u>7,280</u>	<u>7,944</u>	Total

The Group's employment benefit liabilities included in the statement of financial position are as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Nilai kini liabilitas - jangka pendek	1,617	1,999	Present value of obligation - current
Nilai kini liabilitas - jangka panjang	31,705	25,554	Present value of obligation - non-current
Jumlah	<u>33,322</u>	<u>27,553</u>	Total

Lampiran 5/35 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pascakerja Grup adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Saldo awal	27,553	18,760
Biaya jasa kini	5,266	6,506
Biaya bunga	2,014	1,438
Pembayaran manfaat	(2,337)	(220)
Pengukuran kembali:		
Perubahan asumsi demografi	-	(62)
Perubahan asumsi keuangan	1,415	(10)
Kombinasi perubahan asumsi	-	(19)
Penyesuaian atas pengalaman	(589)	1,160
Saldo akhir	<u>33,322</u>	<u>27,553</u>

Durasi rata-rata program imbalan pascakerja pasti di akhir tahun laporan adalah 7,70 tahun.

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation		
Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption

Tingkat diskonto	1%	(3,547)	4,259	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1%	4,373	(3,708)	Future salary growth rate

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pascakerja yang tidak terdiskonto dan imbalan pascakerja jangka Panjang lainnya adalah sebagai berikut:

	Kurang dari 1 tahun/ Less than a year	Antara 1-2 tahun/ Between 1-2 years	Antara 2-5 tahun/ Between 2-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Jumlah/ Total	
Imbalan pascakerja program pensiun	386	1,125	1,155	573,482	576,148	Post-employment benefit pension plan
Imbalan jangka panjang lainnya	<u>1,231</u>	<u>1,350</u>	<u>7,369</u>	<u>9,594</u>	<u>19,544</u>	Other post-employment benefit
Jumlah	<u>1,617</u>	<u>2,475</u>	<u>8,524</u>	<u>583,076</u>	<u>595,692</u>	Total

24. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI**Sifat hubungan dan transaksi**

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Grup:

Pihak berelasi/Related parties	Sifat hubungan/Nature of relationship	Sifat transaksi/Nature of transaction
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)	Entitas pemegang saham utama/ Ultimate parent entity	Piutang usaha, aset kontrak, piutang lain-lain, uang muka dari pelanggan, utang lain-lain, liabilitas kontak, pinjaman jangka panjang, piutang sewa pembiayaan, dan pendapatan/ Trade receivable, contract asset, other receivables, advances from customer, other payables, contract liability long-term loan, finance lease receivable, and revenue
PT Crompton Prima Switchgear Indonesia	Pengendalian bersama CG International Holdings Singapore Pte. Ltd dan Perusahaan/ Joint venture between CG International Holdings Singapore PTE.LTD and the Company	Piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan jasa supervisi enjiniring, procurement dan konstruksi/ Trade receivable, other receivables, revenue from engineering, procurement, and construction
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ Government-related entity	Penempatan kas dan setara kas/ Placement of cash and cash equivalents

23. EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES (continued)

The movements in the present value of the Group's post-employment benefit obligation are as follows:

	2021	2020	
Saldo awal	27,553	18,760	Beginning balance
Biaya jasa kini	5,266	6,506	Current service cost
Biaya bunga	2,014	1,438	Interest expenses
Pembayaran manfaat	(2,337)	(220)	Payment of benefits
Pengukuran kembali:			Remeasurements:
Perubahan asumsi demografi	-	(62)	Change in demographic assumption
Perubahan asumsi keuangan	1,415	(10)	Change in financial assumption
Kombinasi perubahan asumsi	-	(19)	Combination of assumption changes
Penyesuaian atas pengalaman	(589)	1,160	Experience adjustment
Saldo akhir	<u>33,322</u>	<u>27,553</u>	Ending balance

The average duration of the other post-employment benefits at the end of the reporting year is 7.70 years.

The sensitivity of the defined obligation to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

**Dampak atas kewajiban imbalan pasti/
Impact on defined benefit obligation**

Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption
---	--	---

Tingkat diskonto	1%	(3,547)	4,259	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1%	4,373	(3,708)	Future salary growth rate

The expected maturity analysis of undiscounted post-employment benefit and other long-term post-employment benefit liabilities is as follows:

	Kurang dari 1 tahun/ Less than a year	Antara 1-2 tahun/ Between 1-2 years	Antara 2-5 tahun/ Between 2-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Jumlah/ Total	
Imbalan pascakerja program pensiun	386	1,125	1,155	573,482	576,148	Post-employment benefit pension plan
Imbalan jangka panjang lainnya	<u>1,231</u>	<u>1,350</u>	<u>7,369</u>	<u>9,594</u>	<u>19,544</u>	Other post-employment benefit
Jumlah	<u>1,617</u>	<u>2,475</u>	<u>8,524</u>	<u>583,076</u>	<u>595,692</u>	Total

24. NATURE OF RELATIONSHIPS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES**Nature of relationships and transactions**

Below is the list of related parties with which the Group has transactions:

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 5/36 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

24. NATURE OF RELATIONSHIPS AND TRANSACTIONS
WITH RELATED PARTIES (continued)

Sifat hubungan dan transaksi (lanjutan)

Nature of relationships and transactions (continued)

Pihak berelasi/Related parties	Sifat hubungan/Nature of relationship	Sifat transaksi/Nature of transaction
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Rakyat Indonesia")	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ Government-related entity	Penempatan kas dan setara kas/ Placement of cash and cash equivalents
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Syariah Indonesia")	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ Government-related entity	Penempatan kas dan setara kas/ Placement of cash and cash equivalents
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Negara Indonesia")	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ Government-related entity	Rekening bank dibatasi penggunaannya dan Penempatan kas dan setara kas/ Restricted cash in banks and placement of cash and cash equivalents
PT Geo Dipa Energi (Persero) ("PT Geo Dipa Energi")	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ Government-related entity	Pendapatan jasa supervisi enjiniring dan konstruksi/ Revenue from engineering supervision and construction
PT Indonesia Power ("IP")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan jasa supervisi enjiniring dan konstruksi/ Revenue from engineering supervision and construction
PT Indonesia Comnet Plus ("ICON")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan jasa supervisi enjiniring dan konstruksi/ Revenue from engineering supervision and construction
PT Haleyora Power ("HP")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan jasa supervisi enjiniring dan konstruksi/ Revenue from engineering supervision and construction
PT Pembangkitan Jawa Bali ("PJB")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan jasa supervisi enjiniring dan konstruksi/ Revenue from engineering supervision and construction
Dewan Komisaris dan Direksi/ Board of Commissioners and Directors	Personil manajemen kunci/ Key management personnel	Gaji dan imbalan jangka pendek lainnya/ Salaries and other short-term benefit

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi

Balances and transactions with related parties

Catatan/ Notes	2021		2020		
	Rp	%)	Rp	%)	
Kas dan setara kas	6				Cash and cash equivalents
Bank Mandiri	206,189	18.17%	175,982	15.13%	Bank Mandiri
Bank Negara Indonesia	206,075	18.16%	108,902	9.36%	Bank Negara Indonesia
Bank Rakyat Indonesia	30,331	2.67%	31,139	2.68%	Bank Rakyat Indonesia
Bank Syariah Indonesia	5,000	0.44%	10,000	0.86%	Bank Syariah Indonesia
Subjumlah	447,595	39.44%	326,023	28.03%	Subtotal
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	7				Restricted cash in bank
Bank Negara Indonesia	8,886	0.78%	9,047	0.77%	Bank Negara Indonesia
Subjumlah	8,886	0.78%	9,047	0.77%	Subtotal
Piutang lain-lain PLN					Other receivables PLN
		0.03%	7,657	0.64%	
Aset kontrak	10				Contract assets
PLN	171,293	15.10%	199,198	17.12%	PLN
ICON	14,164	1.25%	-	-	ICON
Lain-lain	1,983	0.12%	10,861	0.92%	Others
Subjumlah	187,440	16.47%	210,059	18.04%	Subtotal
Uang muka dari pelanggan PLN	14				Advances from customer PLN
	18,468	4.91%	21,006	4.52%	
Utang lain-lain					Other payables
PLN	11,916	3.17%	2,370	0.48%	PLN
ICON	1,727	0.46%	390	0.08%	HP
HP	1,707	0.45%	2,630	0.53%	ICON
Subjumlah	15,350	4.08%	5,390	1.09%	Subtotal
Liabilitas kontrak	15				Contract liabilities
PLN	98,400	26.20%	133,211	28.72%	PLN
IP	5,637	1.50%	3,302	0.71%	IP
PT Crompton Prima Switchgear Indonesia	1,207	0.32%	-	-	PT Crompton Prima Switchgear Indonesia
Lain-lain	1,100	0.27%	120	0.03%	Others
Subjumlah	106,344	28.29%	136,633	29.46%	Subtotal
Pinjaman jangka panjang PLN	17				Long-term loan PLN
	56,019	14.91%	88,028	18.98%	

*) Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan

Percentage of related total assets/liabilities/revenues *)

Lampiran 5/37 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

24. NATURE OF RELATIONSHIPS AND TRANSACTIONS
WITH RELATED PARTIES (continued)

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Balances and transactions with related parties
(continued)

	Catatan/ Notes	2021		2020		
		Rp	%)	Rp	%)	
Piutang usaha	8					Trade receivables
PLN		57,364	5.06%	143,602	12.35%	PLN
PT Crompton Prima Switchgear Indonesia		16,219	1.43%	16,219	1.39%	PT Crompton Prima Switchgear Indonesia
ICON		8,464	0.75%	-	-	ICON
Lain-lain		644	0.06%	4,135	0.35%	Others
Subjumlah		82,691	7.29%	163,956	14.09%	Subtotal
Piutang sewa pembiayaan	9					Finance lease receivables
PLN		213,913	18.85%	241,578	20.77%	PLN
Pendapatan	19					Revenues
PLN		550,216	74.68%	587,827	94.00%	PLN
PJB		23,241	3.15%	12,780	2.04%	PJB
PT Geo Dipa Energi		22,115	3.00%	-	-	PT Geo Dipa Energi
ICON		16,747	2.27%	-	-	ICON
IP		11,608	1.58%	7,521	1.20%	IP
Lain-lain		9,177	1.24%	15,262	2.41%	Others
Jumlah		633,104	85.93%	623,390	99.69%	Total

*) Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan

Percentage of related total assets/liabilities/revenues *)

Pada 31 Desember 2021 dan 2020, Grup memberikan kompensasi kepada Komisaris dan Direksi berupa gaji, fasilitas, tunjangan dan tantiem masing-masing sebesar Rp16.975 dan Rp18.563.

On 31 December 2021 and 2020, the Group provided compensation to its Commissioners and Directors, which included salaries, facilities, allowances and bonuses amounting to Rp16,975 and Rp18,563, respectively.

25. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI
AKTIVITAS PENDANAAN25. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM
FINANCING ACTIVITIES

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas Grup sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

The table below details the changes in the Group's liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. The liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or those for which future cash flows will be, classified in the Group's statement of cash flows as cash flows from financing activities.

	2021				
	Saldo awal/ Beginning balance	Nonkas/ Non-cash	Arus kas/ Cash flow	Saldo akhir/ Ending balance	
Pinjaman jangka panjang	88,028	-	(32,009)	56,019	Long-term loan
Liabilitas sewa	8,854	2,056	(8,694)	2,216	Lease liabilities
2020					
	Saldo awal/ Beginning balance	Dampak Penyesuaian PSAK 73/ Impact of Adjustment SFAS 73		Saldo akhir/ Ending balance	
		Nonkas/ Non-cash	Arus kas/ Cash flow		
Pinjaman jangka panjang	120,040	-	-	88,028	Long-term loan
Liabilitas sewa	-	34,080	449	8,854	Lease liabilities

Lampiran 5/38 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021***(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)***26. KOMITMEN DAN KONTIJENSI**

Pada tanggal 6 Maret 2017, Grup dan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I ("UIP JBT I") melakukan kerjasama untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Desain dan Konstruksi dan *Quality Assurance & Quality Control* ("QA/QC") Pembangunan Muara Tawar Combined Cycle Power Plant Block 2,3&4 Add-on Project dengan nilai kontrak sebesar Rp120.239. Jangka waktu kontrak selama 24 bulan dari tanggal mulai kerjasama kontrak.

Pada tanggal 19 Februari 2019 terdapat addendum atas kontrak yang menerangkan bahwa pemilik pekerjaan berubah dari UIP JBT I menjadi PT Pembangkitan Jawa Bali, dan dibentuk konsorsium antara Grup dengan PT Rekadaya ElektriKA Consult ("REC"). Pekerjaan ini mengalami amandemen kontrak hingga Addendum III pada 17 Mei 2021 yang menyatakan perubahan nilai kontrak menjadi Rp138.905 dan perpanjangan jangka waktu kontrak menjadi 69 bulan, di mana Grup melaksanakan lingkup pekerjaan Supervisi Konstruksi dengan nilai kontrak Rp75.053 dan REC melaksanakan lingkup pekerjaan Supervisi Desain dan QA/QC dengan nilai kontrak Rp63.852.

Pada tanggal 16 November 2018, Grup dan UIP JBT I melakukan kerjasama untuk 2 (dua) kontrak pekerjaan proyek PLTA Upper Cisokan. Pekerjaan pertama adalah Jasa Konsultasi Management Team PLTA Upper Cisokan dengan nilai kontrak sebesar Rp112.298 dengan Addendum II tanggal 31 Maret 2021 yang mengubah nilai kontrak menjadi Rp123.378 dan jangka waktu kontrak menjadi 82 bulan dari tanggal mulai kerjasama kontrak. Pekerjaan kedua adalah Jasa Konsultansi Update Desain, Supervisi Desain, dan Supervisi Konstruksi PLTA Upper Cisokan Pumped Storage, kapasitas (4x260 MW) dengan nilai kontrak sebesar Rp334.985 dan jangka waktu kontrak selama 75 bulan dari tanggal mulai kerjasama kontrak.

Pada tanggal 12 April 2021, Grup dan PT Kayan Hydropower Nusantara mengadakan kerja sama untuk Jasa Profesional untuk Studi Sistem Evakuasi Tenaga Listrik PLTA Mentarang Induk dengan nilai kontrak sebesar Rp19.960. Jangka waktu kontrak yaitu selama 28 bulan dari tanggal mulai kerjasama kontrak.

Pada tanggal 30 April 2021, Grup dan ThorCon International, Pte. Ltd. mengadakan kerja sama untuk Jasa Profesional untuk Jasa Konsultansi Enjiniring untuk Pembangkit Listrik Tenaga Thorium Thorcon 500 MW dengan nilai kontrak sebesar Rp5.952. Jangka waktu kontrak selama 12 bulan dari tanggal mulai kontrak.

27. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**a. Kategori dan klasifikasi instrumen keuangan**

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan mengklasifikasikan kas dan setara kas, rekening bank yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain-lain, piutang sewa pembiayaan, dan aset kontrak sebesar Rp964.847 sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (2020: Rp992.824) dan aset tidak lancar lainnya sebesar Rp6.490 sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya (2020: Rp16.081).

26. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

On 6 March 2017, the Group and Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I ("UIP JBT I") entered into a partnership for Design Supervision Consultancy Services, Construction and Quality Assurance & Quality Control ("QA/QC") for the Construction of Muara Tawar Combined Cycle Power Plant Block 2.3 & 4 Add-ons Project with a contract value of Rp120,239. The contract period lasted 24 months from the start date of the contract collaboration.

On 19 February 2019, there was an addendum to the contract explaining that the owner of the work had changed from UIP JBT I to PT Pembangkitan Jawa Bali, and a consortium was formed between the Group and PT Rekadaya ElektriKA Consult ("REC"). This project had contract amendment until Addendum III on 17 May 2021 which stated changes in the contract value to Rp138,905 and an extension of the contract period to 69 months, whereby the Group carried out the full scope of construction supervision work with a contract value of Rp75,053 and REC carried out the full scope of design supervision and QA/QC with a contract value of Rp63,852.

On 16 November 2018, the Group and UIP JBT I collaborated for 2 (two) contracts for the Upper Cisokan Hydroelectric Power Plant Project. The first job was the Upper Cisokan Hydroelectric Power Management Consultation Services Team with a contract value of Rp112,298 with the Addendum II dated 31 March 2021 which revised the contract value to Rp123,378 and the contract period to 82 months from the start date of the contract agreement. The second job is Design Update Consultant Services, Design Supervision, and Construction Supervision of Upper Cisokan Pumped Storage Hydroelectric Power Plant, capacity (4x260 MW) with a contract value of Rp334,985 and a contract period of 75 months from the start date of the contract collaboration.

On 12 April 2021, the Group and PT Kayan Hydropower Nusantara entered into an agreement for Professional Services for the Study of the Electric Power Evacuation System for the Mentarang Induk Hydroelectric Power Plant with a contract value of Rp19,960. The contract period is 28 months from the start date of the contract agreement.

On 30 April 2021, the Group and ThorCon International, Pte. Ltd. entered into an agreement for Professional Services for Engineering Consultancy Services for Thorium Thorcon 500 MW Power Plant with a contract value of Rp5,952. The contract period is 12 months from the start date of the contract.

27. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT**a. Categories and classes of financial instrument**

As at 31 December 2021, the Company classified its cash and cash equivalents, restricted cash in banks, trade receivables, other receivables, finance lease receivables, and contract assets amounting to Rp964,847 as financial assets at amortised cost (2020: Rp992,824) and other non-current assets amounting to Rp6,490 as financial assets measured at fair value through other comprehensive income (2020: Rp16,081).

Lampiran 5/39 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**27. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

**a. Kategori dan klasifikasi instrumen keuangan
(lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan mengklasifikasikan utang usaha, utang lain-lain, liabilitas kontrak, biaya masih harus dibayar, pinjaman jangka panjang, dan liabilitas sewa sebesar Rp272.686 sebagai kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (2020: Rp371.892).

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Grup adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko keuangan, antara lain risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Grup beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Direksi.

i. Manajemen risiko mata uang asing

Grup melakukan sejumlah transaksi dalam mata uang asing. Akibatnya, timbul eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Kebijakan Grup adalah untuk menjaga risiko mata uang asing dalam batas yang dapat diterima.

Grup tidak melakukan lindung nilai atas eksposur nilai tukar mata uang asing. Untuk mengelola eksposur atas nilai tukar mata uang asing tersebut, kebijakan Grup untuk memastikan bahwa total eksposur tetap pada batas yang dapat diterima adalah dengan menjual atau membeli valuta asing dengan kurs spot saat diperlukan untuk mengatasi ketidak seimbangan jangka pendek.

Pada tanggal 31 Desember 2021, jika Rupiah menguat/(melemah) sebesar 10% terhadap USD dengan seluruh variabel lain konstan, jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan lebih rendah/(tinggi) sebesar Rp46 (2020: Rp41), terutama diakibatkan keuntungan/(kerugian) dari penjabaran kas dan setara kas, piutang usaha dan utang usaha. Dampak terhadap ekuitas sama dengan dampak terhadap laba sebelum pajak tahun berjalan.

ii. Manajemen risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga Grup timbul dari pinjaman jangka panjang. Risiko tingkat suku bunga dari kas tidak signifikan.

Pinjaman dengan tingkat suku bunga tetap mengekspos Grup terhadap risiko nilai wajar suku bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2021, pinjaman dengan tingkat suku bunga tetap berkaitan dengan pinjaman jangka panjang (Catatan 17). Grup tidak mempunyai pinjaman dengan tingkat suku bunga tetap yang diukur dengan nilai wajar melalui laporan laba rugi. Oleh karena itu, perubahan tingkat suku bunga pada tanggal pelaporan tidak akan mempengaruhi laporan laba rugi.

**27. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK
MANAGEMENT (continued)**

**a. Categories and classes of financial instrument
(continued)**

As at 31 December 2021, the Company classified its trade payables, other payables, contract liabilities, accrued expenses, long-term loan, and lease liabilities amounting to Rp272,686 as financial liabilities carried at amortised cost (2020: Rp371,892).

b. Financial risk management objectives and policies

The objective and policies of the Group's financial risk management is to ensure that adequate financial resources are available for the operation and development of its business while managing the Group's exposure to financial risks, which comprise market risk (including foreign currency risk and interest-rate risk), credit risk and liquidity risk. The Group operates within a defined policy approved by the Directors.

i. Foreign currency risk management

The Group undertakes many transactions denominated in foreign currencies. Consequently, there are exposures to exchange rate fluctuations. The Group's policy is to maintain foreign currency exposure within acceptable limits.

The Group does not hedge its foreign currency exposure. To manage their foreign currency exposure, the Company's and subsidiary's policy is to ensure that their net exposure is kept to an acceptable level by buying or selling foreign currencies at spot rates when necessary to address short-term imbalances.

As at 31 December 2021, if Rupiah had appreciated/(depreciated) by 10% against USD with all other variables held constant, total comprehensive income for the year would have been Rp46 lower/(higher) (2020: Rp41) mainly as a result of foreign exchange gains/(losses) on the translation of cash and cash equivalents, trade receivables and trade payables. The impact on equity would have been the same as the impact on post-tax profit for the year.

ii. Interest rate risk management

The Group interest rate risk arises from long-term loans. The interest rate risk from cash is not significant.

Fixed rate loans expose the Group to fair value interest rate risk.

As at 31 December 2021, the Group had a fixed rate long-term loan (Note 17). The Group does not account for any fixed rate loan at fair value through profit or loss. Therefore, a change in interest rates at the reporting date would not affect profit or loss.

Lampiran 5/40 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan
(lanjutan)

iii. Manajemen risiko kredit

Risiko kredit timbul dari risiko kegagalan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban kontraktual yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan kepada Grup. Risiko ini lebih disebabkan oleh pembayaran pelanggan yang tidak tepat waktu dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Upaya-upaya pengelolaan risiko dilaksanakan dengan penjadwalan ulang atas pembayaran pelanggan. Sebagai entitas yang dapat digolongkan dalam infrastruktur, dalam meminimalkan risiko tidak tertagihnya piutang.

Grup melakukan pendekatan persuasif kepada pelanggan, jika pelanggan tidak melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan, Grup akan mengirimkan surat pemberitahuan kembali ke pelanggan untuk melakukan pembayaran.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Grup terhadap risiko kredit.

Pelanggan Grup terdiri dari pihak berelasi. Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, PLN memiliki kontribusi 94,07% dan 99,68% masing-masing dari jumlah penjualan bersih. Manajemen berkeyakinan bahwa risiko kredit terbatas karena tidak pernah ada kegagalan kredit dari PLN.

Kualitas kredit aset keuangan

Tabel di bawah ini menunjukkan kualitas aset keuangan Grup:

	2021			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Kas dan setara kas	450,783	-	450,783	Cash and cash equivalents
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	25,634	-	25,634	Restricted cash in banks
Piutang usaha	68,163	22,566	90,729	Trade receivables
Piutang lain-lain	13,842	21,870	35,712	Other receivables
Jumlah	558,422	44,436	602,858	Total
	2020			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Kas dan setara kas	338,591	-	338,591	Cash and cash equivalents
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	25,986	-	25,986	Restricted cash in banks
Piutang usaha	159,060	20,137	179,197	Trade receivables
Piutang lain-lain	12,435	-	12,435	Other receivables
Jumlah	536,072	20,137	556,209	Total

Aset keuangan tertentu dinilai secara individu untuk penurunan nilai dan jika ditemukan terjadi penurunan nilai, rugi penurunan nilai harus diterapkan secara individu.

Tabel di atas termasuk aset keuangan yang mana penurunan nilainya dilakukan secara kolektif. Tidak praktis untuk mengidentifikasi penurunan nilai aset keuangan tersebut secara individu dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik risiko yang sama dimana penurunan nilainya dilakukan secara kolektif.

27. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK
MANAGEMENT (continued)b. Financial risk management objectives and policies
(continued)

iii. Credit risk management

Credit risk arises from the risk that counterparties will default on their contractual obligations resulting in financial loss to the Group. This risk is caused mostly by customers who do not pay on time and delays in the completion of the Group's work. The risk-management efforts undertaken comprise the rescheduling of customer payments. As an entity that can be classified as undertaking work in public infrastructure, the Group minimises its risk of uncollectible receivables.

The Group takes a persuasive approach in regard to the payments of its customers; if the customer does not pay at the time that has been determined, the Group will send a notice back to the customer to make a payment.

The carrying value of financial assets on the financial statements net of an allowance for losses reflects the Company's and subsidiary's exposure to credit risk.

The Group's customers consist of related parties. For the years ended 31 December 2021 and 2020, PLN accounted for 94.07% and 99.68% of the total net sales, respectively. Management believes that the credit risk is limited because there has been no credit default from PLN.

Credit quality of financial assets

The table below shows the quality of the Company's and subsidiary's financial assets:

Certain financial assets are individually assessed for impairment and if found to be impaired, have impairment loss assigned to them on an individual basis.

The table above includes financial assets that have been assessed for collective impairment. It is not practicable to individually identify impaired financial assets within portfolios of financial assets with similar risk characteristics which are collectively assessed for impairment.

Lampiran 5/41 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan
(lanjutan)

iv. Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko bahwa Grup akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau aset keuangan lainnya. Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Dewan Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka Panjang Grup. Grup mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan kas dan simpanan dengan terus menerus memonitor perkiraan dan realisasi arus kas dan mencocokkan profil jatuh tempo liabilitas keuangan.

Selanjutnya Grup juga memelihara kecukupan dana dengan cara mempertahankan kecukupan jumlah kas dan setara kas dan investasi jangka pendek yang mudah dikonversi menjadi uang tunai ketika mengalami gangguan yang tak terduga dari penagihan kas.

Tabel berikut ini memberikan rincian jatuh tempo kontraktual Grup untuk liabilitas keuangan dengan pembayaran yang telah disepakati pada periode 31 Desember 2021 dan 2020:

	2021				Jumlah/ Total	
	Dalam satu tahun/ Within one year	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ Over one year but not longer than three years	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ Over three years but not longer than five years	Lebih dari lima tahun/ More than five years		
Liabilitas Keuangan						Financial Liabilities
Utang usaha	66,764	-	-	-	66,764	Trade payables
Utang lain-lain	15,465	369	-	-	15,834	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	23,147	-	-	-	23,147	Accrued expenses
Pinjaman jangka panjang	38,229	24,569	-	-	62,798	Long-term loan
Liabilitas sewa	503	1,714	-	-	2,217	Lease liabilities
Jumlah	144,108	26,652	-	-	170,760	Total

	2020				Jumlah/ Total	
	Dalam satu tahun/ Within one year	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ Over one year but not longer than three years	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ Over three years but not longer than five years	Lebih dari lima tahun/ More than five years		
Liabilitas Keuangan						Financial Liabilities
Utang usaha	103,490	-	-	-	103,490	Trade payables
Utang lain-lain	8,977	142	-	-	9,119	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	17,960	-	-	-	17,960	Accrued expenses
Pinjaman jangka panjang	41,036	61,828	-	-	102,864	Long-term loan
Liabilitas sewa	8,932	1,084	-	-	10,016	Lease liabilities
Jumlah	180,395	63,054	-	-	243,449	Total

27. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK
MANAGEMENT (continued)b. Financial risk management objectives and policies
(continued)

iv. Liquidity risk management

Liquidity risk is defined as the risk that the Group will encounter difficulty in meeting its obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the Board of Directors, which has built an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Group's short-term, medium-term, and long-term funding and liquidity management requirements. The Group manages liquidity risk by maintaining adequate cash and reserves by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial liabilities.

Furthermore, the Group maintains an adequate amount of cash, cash equivalents and short-term investments, which may be readily converted to cash upon any unforeseen interruption of its cash collections.

The following table details the Group remaining contractual maturities for its financial liabilities with an agreed repayment period as of 31 December 2021 and 2020:

Lampiran 5/42 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**27. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**
**b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan
(lanjutan)**
iv. Manajemen risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel tersebut telah disusun berdasarkan arus kas liabilitas keuangan yang tidak didiskontokan berdasarkan tanggal jatuh tempo kontraktual, yaitu paling awal dimana Grup diwajibkan untuk membayar. Untuk liabilitas keuangan yang didenominasi dengan mata uang asing, jumlah yang tidak didiskontokan ditranslasi dengan kurva nilai tukar masa depan yang relevan pada akhir periode pelaporan.

Nilai wajar instrumen keuangan

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat mendekati nilai wajarnya baik karena jatuh tempo dalam jangka pendek atau mempunyai tingkat suku bunga pasar.

v. Manajemen risiko modal

Grup mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Grup terdiri dari ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal saham (Catatan 18) dan saldo laba.

Direksi Grup secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Grup berusaha untuk meminimalkan biaya modal sehingga dapat memaksimalkan nilai Grup. Oleh karena itu, kebijakan Grup dalam mencari pendanaan akan selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

**27. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK
MANAGEMENT (continued)**
**b. Financial risk management objectives and policies
(continued)**
iv. Liquidity risk management (continued)

The table has been drawn up based on the undiscounted cash flow of financial liabilities based on the date of contractual maturity, which is the earliest date on which the Group can be required to pay. For financial liabilities denominated in a foreign currency, the undiscounted amortisation is translated using the relevant forward exchange curve at the end of the reporting period.

Fair value of financial instruments

Management considers that the carrying amounts of the recorded financial assets and financial liabilities approximate their fair values either because of their short-term maturities or because they carry a market interest rate.

v. Capital risk management

The Group manages capital risk to ensure that it will be able to continue as a going concern and to ensure compliance with the covenants of the capital adequacy ratio. The Group's capital structure consists of equity shareholders, capital stock (Note 18), and retained earnings.

The Directors of the Group periodically review the Company's capital structure. As part of this review, the Directors consider the cost of capital and related risks.

The Group seeks to minimise the cost of capital in order to maximise its value. Therefore, the Group has a policy of seeking funding in which it always takes into account the financial risk that may arise in the future.

28. TRANSAKSI NON KAS

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Penambahan aset hak guna melalui liabilitas sewa	2,056	449

Additions of right-of-use assets through lease liabilities

29. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a. Berdasarkan keputusan Akta Notaris No. 3 tanggal 5 Januari 2022 dari Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., susunan Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris
Komisaris

2022

Edwin Nugraha Putra
M.R. Karliansyah
Edward Siagian
Hardiv Harris Situmeang

29. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

- a. Based on Notarial Deed No. 3 dated 5 January 2022 from Notary Lenny Janis Ishak, S.H., the composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:

President Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner

Lampiran 5/43 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

- b. Pada 4 April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK-IAI") menerbitkan siaran pers mengenai 'Pengatribusian imbalan pada periode jasa (PSAK 24)' sebagai tanggapan terhadap *International Financial Reporting Standards ("IFRS") Interpretation Committee Agenda Decision: International Accounting Standards ("IAS") 19 Employee Benefit - Attributing Benefit to Periods of Service* pada bulan Mei 2021. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan ini, Perusahaan masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari siaran pers tersebut.

30. INFORMASI LAINNYA

Sejak awal tahun 2020, telah terjadi wabah penyakit COVID-19 di seluruh dunia, yang dinyatakan Organisasi Kesehatan Dunia ("WHO") sebagai pandemi. Pandemi sangat mempengaruhi, antara lain, permintaan global untuk produk dan jasa dan rantai pasokan.

Di saat yang sulit ini, Grup terus berupaya mempertahankan kegiatan operasional dan terus berfokus untuk tetap efisien serta melindungi kesehatan dan keselamatan para karyawan. Tim kesehatan, keselamatan dan lingkungan ("K3LH") di lapangan beberapa daerah telah menerapkan langkah-langkah pencegahan maupun prosedur kesehatan yang harus dipatuhi setiap karyawan, termasuk peningkatan perilaku higienis, larangan perjalanan non esensial, penerapan jarak fisik di tempat kerja, identifikasi kelompok risiko tinggi di Grup, dan sedapat mungkin bekerja dari rumah untuk para karyawan yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas produksi. Setiap unit bisnis telah menyiapkan rencana manajemen krisis dan menyiapkan tindakan pencegahan yang diperlukan.

Prioritas pertama Grup adalah kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan karyawan, pelanggan dan pemasok. Beberapa kegiatan utama yang telah dilakukan Grup pada masa pandemi ini, meliputi antara lain:

1. Menjalankan program promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif guna memastikan kesehatan karyawan.
2. Memberikan arahan dan dukungan kepada karyawan.
3. Memantau dengan cermat kapasitas infrastruktur dan keamanan kegiatan operasional.
4. Mengikuti arahan dari Pemerintah dan organisasi kesehatan.
5. Senantiasa melayani dan melibatkan pelanggan dan pemasok.
6. Mengembangkan rencana sebagaimana diperlukan.

Grup telah melakukan penilaian atas dampak kejadian ini terhadap rencana operasi dan bisnis Grup. Berdasarkan penilaian yang dilakukan di atas, manajemen tidak melihat adanya ketidakpastian material yang akan menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap bisnis dan operasional Grup sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian. Manajemen akan terus memantau perkembangan pandemi COVID-19 dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan yang berkaitan dengan dampaknya terhadap bisnis, posisi keuangan dan hasil operasi Grup.

29. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

- b. On 4 April 2022, the Financial Accounting Standards Board ("DSAK-IAI") published a press release regarding 'Attributing benefit to periods of service (PSAK 24)' in response to the *International Financial Reporting Standards ("IFRS") Interpretation Committee Agenda Decision: International Accounting Standards ("IAS") 19 Employee Benefit - Attributing Benefit to Periods of Service* in May 2021. As at the issuance date of these financial statements, the Company is still evaluating the possible impact of this press release.

30. OTHER INFORMATION

Since early 2020, there has been an outbreak of COVID-19 around the world, which the World Health Organisation ("WHO") has declared a pandemic. The pandemic may severely effect, among others, global demand for products and services and supply chains.

In this challenging time, the Group continues to strive to maintain its operational activities and continues to focus on staying efficient and protecting the health and safety of its employees. The health, safety, and environment ("K3LH") teams in several areas have implemented preventive measures and health procedures that every employee must comply with, including improvement of the hygienic behavior, the prohibition of non-essential travel, implementation of physical distancing in the workplace, identification of high risk groups in the Group, and wherever possible to work from home for employees who are not directly involved in production activities. Each business unit has prepared a crisis management plan and prepared the necessary preventive measures.

The Group's first priority continues to be the health, safety and well-being of the employees, customers, and suppliers. Some of the key activities that the Group has carried out during this pandemic, include among others:

1. Conducting promotional, preventive, curative, and rehabilitative programmes, to ensure the health of our employees.
2. Providing guidance and support to employees.
3. Closely monitoring infrastructure capacity and the security of operational activities.
4. Following guidance from the Government and health organisations.
5. Continuing to serve and engage with customers and vendors.
6. Evolving our plans as necessary.

The Group has assessed the effects of the event on the Group's operations and business plan. Based on the assessment, management does not foresee any material uncertainty that may have a significant adverse impact on the Group's business and operations up to the completion date of these consolidated financial statements. Management will closely monitor the developments of the COVID-19 pandemic and take the necessary actions in relation to its impact on the business, the financial position and operating results of the Group.

Lampiran 5/44 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**31. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN
KEUANGAN**

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian merupakan tanggung jawab manajemen dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 7 Juni 2022.

**31. MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS**

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements were the responsibilities of the management and approved by the Directors for issuance on 7 June 2022.